

UC-NRLF



B 3 859 659



Sedjarah

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN

DAERAH

DJAWA-BARAT

TAHUN 1945 - 1965



DITERBITKAN

OLEH

BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I DJAWA BARAT

SEDJ ARAH

Perkembangan Pembangunan Daerah

Djawa - Barat
Tahun 1945-1965

Diterbitkan

oleh

**Koordinasi Pembangunan Daerah
Tingkat I Djawa Barat**

695074 ✓

HC 448
D 495 D 4
1965

KATA - PENGANTAR

Buku „SEDJARAH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DJAWA BARAT” ini disusun dengan mempergunakan laporan-laporan dan data-data yang diterima dari Djawatan², Instansi² dan Badan² yang bersangkutan dengan bidang²/objek² sebagaimana tertera dalam lembaran isinja. Gambar² (portret²) disediakan/disusun oleh Kolonel Dr. Gigi R.M. SOELARKO, Ketua Perhimpunan Amateur Foto di Bandung.

Baik isi maupun susunan redaksi disesuaikan dengan petunjuk² yang dikemukakan dalam rapat Bakopda terakhir tanggal 23 April 1965, yang diadakan khusus untuk membitjarkan penjusunan dan penerbitan buku ini.

Berkat bantuan Saudara² Drs. KARDIAT, Drs. ZAINUDIN, ACHMAD SOBANA S.H. dan R. BENJAMIN WIGENAKUSUMA dari Sekertariat Bakopda, punpula Sdr. ICHSANUDDIN serta Sdr. ABO (pengetik Naskah) dari Staf Bagian Pembangunan Daerah pada Sekretari Pemerintah Daerah Djawa Barat, dengan segala kemampuan yang ada, oleh penjusun telah ditjoba untuk menggambarkan perkembangan pembangunan Djawa Barat ini sebaik mungkin.

Karena waktunya yang sempit dengan ditambah pula data² yang dalam beberapa hal kurang lengkap, buku ini tidak dapat menjadjikan suatu karya terperintji seperti yang diharapkan oleh para pembatja.

Atas kekurangan-kekurangan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya dan selalu menunggu kritik/saran².

Kepada Djawatan², Instansi² dan Badan² serta perorangan yang telah memberikan bantuan dalam penjediaan data-data dan sebagainya kami utjapkan diperbanjak terima kasih.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan sebesar-besarnya kepada usaha pembangunan Negara kita.

Penjusun/Penata Redaksi,

R. ODI SUWARDI.

R. NANA DJAJASOEMPENA

I S I

I. SAMBUTAN²:		Halaman
1. Sambutan J.M. Menko Perentjanaan dan Pembangunan Dr. R. Suharto.		V
2. Sambutan Gubernur Kepda Djabar/Ketua Sapta Tunggal.		XIII
 II. KATA PENDAHULUAN.		
III. BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI.		
1. Perkembangan dalam Periode fisik/periode Revolusi tahun 1945 — 1950.		3
2. Perkembangan dalam tingkatan tahun Survival (1950-1955) dan tahun ² Investment (1955-1959).		6
3. Perkembangan periode Pantja-Warsa (1959-1964) dan dalam periode Mahkota Revolusi (1965).		13
4. Perkembangan dinas ² Vertikal & Aparatur Pemerintah Pusat di Djabar Barat.		31
 IV. BIDANG KEHIDUPAN POLITIK.		
1. Perkembangan kehidupan politik dari masa ke masa		32
2. Persoalan Sukarnoisme dan Nasakom.		37
3. Usaha ² Ketahanan dalam pelaksanaan Dwikora.		39
 V. BIDANG KEAMANAN.		
VI. BIDANG EKONOMI.		
1. Geografie Daerah.		48
2. Keadaan perekonomian dari masa ke masa (pandangan umum).		49
3. Kehutanan.		56
4. Perkebunan: a. Perkebunan Besar.		60
b. Perkebunan Rakjat.		63
5. Pengairan.		70
6. Pertanian.		72
7. Perikanan Darat/Laut: a. Perikanan Darat.		78
b. Perikanan Laut.		80
8. Kchewanan.		82
9. Kelistrikan.		85
10. Perindustrian.		94
11. Pertambangan.		105
12. Pengangkutan: a. P.N.K.A., b. Lalu-Lintas Djabar.		109
c. Organda, d. DAMRI, e. Pelabuhan.		120

	Halaman
13. Telekomunikasi.	129
14. Pariwisata.	140
15. Perdagangan.	147
16. Kooperasi.	153
17. Perbankan.	158
 VII. BIDANG SOSIAL.	
VIII. BIDANG KESEHATAN.	
IX. BIDANG MENTAL.	
1. Agama.	174
2. Kebudajaan.	178
3. Olah Raga.	180
X. BIDANG PENDIDIKAN.	
1. Pendidikan Dasar.	184
2. Pendidikan landjutan.	187
3. Perguruan Tinggi.	201
4. Pendidikan Masjarakat.	203
XI. PROJEK ² NASIONAL.	
XII. PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.	
1. Perusahaan Negara.	218
2. Perusahaan Daerah.	224
XIII. B A M U N A S.	
XIV. BEBERAPA LAMPIRAN JANG PENTING.	
1. I.K.I.P. Bandung.	314
2. R.R.I. Studio Bandung	320
3. Balai Penelitian Keramik	325
4. Perkembangan Persuteraan di Djabar.	330
5. Beberapa Tjatatatan Perkapasan di Djabar.	346
6. Surat Keputusan Gub. Kepda. Djabar No. 119/B-I/BPD/SK/64	354



Dr. Suharto
J.M. Menko Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia.

KATA SAMBUTAN

oleh

Dr. Suharto

Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia

Dengan senang hati saja menerima permintaan dari Bakopda Djawa Barat untuk memberi kata sambutan pada buku „Sedjarah Perkembangan Pembangunan Djawa Barat selama 20 tahun” yang diterbitkan oleh Bakopda Djawa Barat mendjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1965. Dan saja menjambut dengan gembira sekali terbitnja buku ini, sebab dengan demikian bukan sadja tersadjikan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang bagaimana sedjarah pembangunan di Daerah Djawa Barat, akan tetapi djuga bertambahlah lagi data² yang diperlukan bagi usaha² perentjanaan pembangunan untuk tahun² selandjutnja, bukan sadja usaha perentjanaan pembangunan Daerah Djawa Barat sendiri akan tetapi pula usaha perentjanaan pembangunan Nasional.

Bahwasanja pembangunan harus dilaksanakan dalam rangka ekonomi terpimpin, kiranja sama² kita telah ketahui. Manipol-Usdek, adalah haluan negara, djadi ekonomi terpimpin adalah suatu *keharusan* untuk diselenggarakan. Meskipun demikian, untuk mempertebal kejakinan, dipandang dari sudut *ekonomis objektif* sadja dapat dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia *tidak* dapat terlaksana dengan tjepat djika tidak dengan tjara ekonomi terpimpin, djika Pemerintah tidak menjelenggarakan/mengerdjakan sendiri pendirian² projek² atau mentjiptakan kondisi² yang dapat memudahkan dan melantjarkan penjelenggaraan projek² mitsalnja dengan mengadakan „industrial estates”, dengan pendirian Bank Pembangunan Desa (projek A.L. 334) dls.

Alasan-alasannja ialah bahwa ada faktor², antara lain:

- belum tjukup tersedianja social overhead capital.
- terbatasnja sumber² riil.
- tiap penanaman modal membawa tekanan inflasi.
- adanja kepentingan² yang mempunjai kedudukan monopolis yang mempengaruhi kehidupan sampai didesa-desa.

Di Negara² yang telah berindustrialisasi, maka pertumbuhan unit² produksi *baru* akan dengan segera menerima faedah² yang ada dalam masyarakat, faedah² karena tjukup tersedianja social overhead capital jaitu adanja djalan², adanja pengangkutan yang baik, tenaga listrik yang murah, workshops dll. yang semuanya merupakan external economies bagi unit² pro-

duksi tersebut. Di Indonesia karena belum cukup tersedianja social overhead capital tersebut, maka faedah² tersebut tidak akan diterima oleh seseorang/badan seandainya ia akan mendirikan sesuatu unit produksi dalam lapangan baru jaitu dilapangan industri. Dengan demikian maka biaya produksi dari unit produksi baru tersebut adalah tinggi, capital output rasionja adalah besar.

Dengan demikian marginal efficiency of capital di Indonesia dalam sektor² industri (lapangan baru) adalah rendah, atau dalam perkataan populer, rentabilitas disektor industri rendah.

Selain dari pada itu hasil dari sesuatu industri baru diperoleh sesudah sesuatu waktu jang tidak pendek. Djadi seseorang/badan jang hendak mendirikan sesuatu industri membutuhkan modal banjak, menanggung risiko jang besar, memperoleh keuntungan jang tidak-tinggi, memperoleh hasil sesudah sesuatu djangka waktu jang tidak pendek. Dilain pihak sektor perdagangan memberi rentabilitas jang tinggi, bahkan tinggi sekali dalam waktu jang pendek, menanggung risiko jang ketjil, membutuhkan modal sendiri jang tidak banjak. Dengan demikian maka djika Pemerintah tidak turun kebawah dan mengadakan industrial estates etc atau sendiri mendirikan industri² maka tidak akan tertjapai industrialisasi dengan tjepat dan karena tidak tumbuhnja industri dengan tjepat maka struktur ekonomi Indonesia jang sekarang akan tetap berlangsung karena modal swasta jang ada akan ditanamnja pada sektor² jang dikenal dari dahulu dan jang memberikan rentabilitas jang tinggi, jaitu dalam sektor perdagangan.

Bagaimana keadaannja djika Pemerintah jang menjediakan social overhead capital dan pendirian² industri diserahkan semuanya kepada usaha² individu², apakah industrialisasi akan tertjapai dengan tjepat? Dalam hubungan ini kita harus sadar bahwa tiap² investasi akan membawa tekanan² inflasi. Dengan adanya tekanan² inflasi maka industri-industri jang akan memperoleh keuntungan jang besar adalah industri² jang memproduksi barang² mewah jaitu industri² jang dipandang dari sudut rakjat banjak merupakan industri² jang tidak penting. Dengan demikian maka sumber² riil jang ada didalam masyarakat tidak dipergunakan setjara efisien. Selandjutnja djika pembangunan industri diserahkan begitu sadja kepada usaha² individu² maka golongan jang telah mempunyai kedudukan² monopolistis akan terus hidup dengan subur.

Djadi konklusinja ialah bahwa djika pendirian industri diserahkan begitu sadja kepada usaha² individu² ataupun organisasi ekonomi dibiarkan diatur sebagian besar oleh individu² maka maksud tudjuan pembangunan untuk memperluas dasar perekonomian agar memperoleh pendapatan nasional dan pendapatan riil per capita jang lebih tinggi tidak akan terlaksana. Berhubung dengan itu maka agar maksud tudjuan pembangunan

tersebut dapat terlaksana dengan tjepat dan baik, maka ditindjau dari *suat ekonomis sadja* sudah memang *tidak ada* alternatif lain dari pada pembangunan harus dilaksanakan dalam rangka ekonomi terpimpin. Dan untuk melaksanakan tugas Pemerintah tersebut diperlukan adanya suatu Perentjanaan Nasional.

Tindjauan dari sudut falsafah, dari sudut pandangan hidup jang dianut sebagaimana terlukis dalam rumusan Pantja Sila jang dipantjarkan dalam Manifesto Politik, jaitu ingin mewujudkan masjarakat adil dan makmur.

Untuk dapat mentjapai masjarakat adil dan makmur tersebut pembangunan harus dilaksanakan dalam rangka ekonomi terpimpin. Dengan memperhatikan pandangan hidup tersebut tadi, maka tjorak ekonomi terpimpin diperhalus dan diperluas, sehingga tjorak ekonomi terpimpin, tjorak economic planning mendjadi dikuasai oleh tjita² terlaksananya masjarakat adil dan makmur. Bagaimana selandjutnja perkembangan ekonomi terpimpin ini? Apakah djika masjarakat nanti sudah mentjapai „economic momentumnja” (atau dimana dalam masjarakat sudah bekerdja „self generating process”), ekonomi terpimpin dalam tjorak jang dikemukakan tadi akan ditinggalkan? Sudah djelas bahwa ekonomi terpimpin untuk seterusnya akan tetap berlaku dalam alam sosialisme Indonesia. Hal demikian adalah logis, karena berpangkal pada pandangan hidup tadi sehingga gerak permulaan dan gerak selandjutnja telah digariskan oleh Amanat Penderitaan Rakjat jang ingin mentjiptakan dan mewujudkan masjarakat Sosialis Indonesia jaitu masjarakat adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan sifat² Kepribadian Indonesia sendiri seperti tertulis dalam rumusan Pantja Sila, sebagaimana terwujud dalam Mukadimah UUD’45 jang selandjutnja oleh Penggalinja P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dipantjarkan dalam Manifesto Politik — Usdeknja dan mengenai bidang ekonominja ditegaskan lagi dalam pasal 33 UUD ’45. Mengapa pasal 33 UUD ’45 mendjamin berkembangnja perekonomian kearah Sosialisme Indonesia? Dalam rumusan Depernas ditjantumkan bahwa tjiri-tjiri pokok Sosialisme Indonesia adalah keadilan sosial, kesedjahteraan, kekeluargaan, gotong-rojong, musjawarah, kelimanja sebagai perpaduan antara unsur Sosialisme dan unsur kepribadian Indonesia. Dan tjiri² pokok tersebut kita djumpai dalam UUD ’45 jaitu:

ajat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan (terlihat njata tjiri pokok kekeluargaan, gotong-rojong, musjawarah).

ajat 2: Tjabang² produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hidup orang banjak dikuasai oleh negara (terlihat njata tjiri pokok keadilan, kesedjahteraan).

ajat 3: Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat (terlihat nyata tjiri pokok keadilan, dan kesedjahteraan).

Ekonomi terpimpin adalah djuga ekonomi dan berhubungan dengan itu tjara melaksanakannya djuga harus tunduk pada prinsip ekonomi, jaitu mentjapai hasil se-besar²-nya dengan pengorbanan yang se-ketjil²-nya, dan selanjutnya harus memperhatikan hukum² ekonomi. Ini tidak berarti, bahwa hukum² ekonomi berada diatas kita yang tidak dapat kita kuasai, dan tidak berarti bahwa sesuatu hukum ekonomi akan berlaku terus-menerus. Suatu hukum ekonomi berlaku hanya untuk djangka waktu pendek dan bekerdja hanya dalam sesuatu djangka waktu tertentu saja. Sesuatu kondisi ekonomi jaitu sistim produksi dari masyarakat yang bersangkutan merupakan dasar bagi bekerdjanya sesuatu hukum ekonomi.

Transformasi dari sistim produksi dari yang satu ke yang lain, misalnja dari sistim kapitalis ke sistim sosialis, membawa hilangnya sesuatu hukum ekonomi yang lama dan timbulnja sesuatu hukum ekonomi baru. Persoalannya adalah menemukan hukum² ekonomi yang baru tersebut dan mempergunakannya setjara sadar guna kepentingan masyarakat yang bersangkutan, kadang² „dengan suatu keharusan yang telah diakui”. Dikatakannya „dengan suatu keharusan yang telah diakui”, karena kadang² masih adanya sisa² dari kekuatan² lama yang sudah mulai usang yang masih ingin mempertahankan dirinya.

Dengan mempergunakan prinsip² ekonomi dan dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi (dengan tjatatan²-nya), maka tiap² perentjanaaan pembangunan Nasional dan bagian²-nya, tiap² peraturan dan tindakan² djadinja harus ditindjau se-masak²-nya apakah sesuai dengan Pantja Sila, Manipol-Usdek, Dekon, Tavip, Berdikari dan menudju kearah Sosialisme Indonesia yang bidang ekonominya dalam Sosialisme Indonesia adalah sebagaimana dirumuskan oleh Depernas. Suatu rentjana pembangunan Nasional yang menjeluruh, setjara teoritis dan praktis sebaiknya didasarkan atas rentjana² diberbagai sektor² ekonomi, sektor² sosial, yang dibuat oleh Departemen² dan didasarkan atas rentjana² Daerah yang dibuat oleh masing² Daerah, karena rentjana pembangunan Nasional bertudjuan pembangunan yang balanced disemua sektor² ekonomi, sektor² sosial dan semua Daerah² yang bergerak kearah peningkatan Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Capita dan perubahan struktur ekonomi.

Ini tidak berarti pengorbanan Sentralisasi dalam perentjanaaan terakhir yang ada ditangan Pusat, jaitu Bappenas sebagaimana ditjantumkan dalam Pen. Pres. Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 dan sebagai hasil dari musjawarah Muppenas III, karena a.l.:

- djumlahan dari rentjana² sektor² dan rentjana Daerah² (sebagai suatu administratif unit) belum berarti suatu rentjana pembangunan Nasional.
- rentjana² sektor² dan rentjana² Daerah sukar dapat berdiri sendiri.
- diperlukan adanya penentuan prioritas ditingkat Nasional, berhubung dengan sumber² yang tersedia diwilayah Indonesia dalam suatu waktu.
- diperlukan adanya synchronisasi dan koordinasi ditingkat Nasional agar diperolehnja pembangunan yang balanced tadi.

Synchronisasi dan koordinasi ditingkat Nasional dari semua usaha² perentjanaan perlu dilaksanakan agar dapat dihindarkan pemborosan² dari sumber yang tersedia diseluruh wilayah Indonesia dan djuga dapat terpetjahkan dengan lebih mudah persoalan pemasaran dari produk² yang dihasilkan. Kesemuanja demi memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi masjarakat Indonesia. Berhubung dengan itu maka dapat dirasakan kiranja bahwa synchronisasi dan koordinasi dengan tudjuan tersebut, hanja dapat tertjapai djika dilaksanakan konsultasi dan musjawarah setjara kontinue antara Baperdep², Bakopda² dan Bappenas.

Mengenai perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah Dati I Djawa Barat sendiri, kenjataan² menunjukkan pada kita bahwa Djawa Barat mampu untuk dalam waktu yang pendek melaksanakan pembangunan setjara besar²-an. Tuhan telah melimpahkan rachmat-Nja kepada bangsa Indonesia dengan memberikan kepadanya tanah air yang subur, kaya raja, serta indah. Demikian pula Dati I Djawa Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Adalah suatu kewadajiban bagi kita semua untuk mempergunakan dengan baik tanah yang subur tsb., untuk menggali kekajaan tersebut, baik yang ada diatas bumi maupun yang ada didalam bumi dan untuk memelihara keindahan tersebut guna kepentingan kita bersama dan generasi² yang akan datang jaitu masjarakat adil dan makmur. Pemenuhan kewadajiban kita untuk berbuat demikian adalah berarti pula suatu pernjataan terima kasih kita kepada Tuhan. Potensi Djawa Barat dalam usaha menjumbangkan dharma baktinja adalah besar. Djawa Barat mempunjai tanah yang subur. Menurut sensus pertanian 1963 terdapat luas tanah pertanian sebanyak 1.490 893 ha. dengan luas pancnan padi sawah 964.445 ha dan padi ladang 121.182 ha. Djika pada waktu sekarang produksi padi per ha rata² 22 kwintal, maka pada tanah yang subur tersebut kiranja, dengan sedikit pemupukan rabuk alam sadja dan dengan sistim pengairan yang sederhana sadja, menaikkan produksi per ha-nja mendjadi rata² 25 kwintal dapat dengan mudah dilaksanakan. Disamping itu dengan akan selesainja seluruh pengairan Djatiluhur pada kira² achir tahun 1966, sehingga dapat diairi tanah seluas 240.000 ha dan dengan demikian dapat diadakan panen 2 kali, maka kita yakin bahwa Djawa Barat dengan konsumsi beras 90 kg per capita/per tahun dalam waktu singkat dapat menghasilkan surplus beras yang tjukup besar. Selandjutnja Djawa Barat mempunjai

tanah kawasan hutan seluas 944.872 ha. jang 42% dari padanja merupakan kawasan hutan produksi. Pengolahan dari hasil hutan dengan mengindahkan peremadjaan hutan jang *teratur* akan diperoleh sekaligus barang²/ modal devisa jang kita perlukan dan kekekalan serta perluasan dari sumbernja. Pada tanah jang subur serta iklim jang menguntungkan bagi tumbuh²-an, dimana pohon jang ditanam dapat tumbuh dengan pesat, maka usaha *rejuvenation* perlu mendapat perhatian khusus dari kita dalam usaha kita berdikari dalam ekonomi dan pembangunan. Sudah djelas kita lihat disini bahwa pertanian dan perkebunan dengan melaksanakan *rejuvenation* jang teratur, dapat dengan sendirinja mentjiptakan suatu economic surplus, dapat dengan sendirinja mentjiptakan modal jang diperlukan guna pembangunan dalam sektor² lain. Tjara itulah antara lain jang dimaksud dengan kalimat „pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama pembeajaan pembangunan” jang diutjapkan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam amanatnja berdjudul Berdikari.

Disamping kedua sumber tersebut diatas, Djawa Barat masih mempunyai sumber lain jaitu kekajaan alam jang ada dibawah muka bumi jang berupa mineral². Berdasarkan penjelidikan dari Djawatan Geologi Bandung di Djawa Selatan dan dengan demikian pula di Djawa Barat dapat diharapkan diketemukannja konsentrasi² ketjil jang tjukup ekonomis dari endapan² bidji emas (sebagai tjontoh Tjikotok), bidjih perak, mangaan (tjontoh didaerah Karangnunggal terdapat endapan² jang tjukup ekonomis), timah hitam, tembaga, seng, air rasa dll. mineral segugusan dengan itu. Selain dari itu di Telagabodas dan Kawahputih terdapat bidjih² belerang ratusan ribu ton, bidjih belerang mana vital sekali bagi pertumbuhan industri kimia. Hasil dari mineral² tersebut selain dari pada dapat dipergunakan sendiri djuga dapat diekspor untuk menambah hasil devisa kita. Selandjutnja, last but not least, Djawa Barat jang dihiasi oleh gunung², lembah² serta pantai jang indah memberikan objek² keparawisataan jang menarik selain dari Pelabuhan Ratu dengan hotelnja jang diperkirakan selesai pada permulaan tahun 1966. Dengan pulihnja keamanan di Djawa Barat dan dengan tjara menjediakan infrastruktur djalan², dalam taraf permulaan diutamakan lebih pada pandjangnja djalan² dari pada lebarnja djalan² dan fasilitas² jang diperlukan oleh parawisata, maka dapat diharapkan bahwa dalam waktu jang pendek Djawa Barat dengan bidang keparawisataannja akan menghasilkan alat² pembelandjaan guna pembangunan. Dengan tenaga skilled jang dapat dikatakan tjukup ada di Djawa Barat, dengan adanja lembaga² Ilmu pengetahuan serta balai² penjelidikan di Djawa Barat, maka melalui perentjanaan jang baik serta diikuti oleh pelaksanaan jang didorong oleh tjita², tekad dan kenjataan², maka insja'allah, kesemuanja jang dikemukakan diatas mengenai Djawa Barat akan tertjapai dan dengan demikian Djawa Barat bukan sadja dapat

dalam waktu pendek berdikari dibanjak bidang, akan tetapi pula dapat memberikan suatu surplus sebagai hasil dari darma baktinja dalam menjapai tjita² masjarakat Sosialis Indonesia.

Achirulkalam, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan djalan bagi kita. Baik tidak baiknja djalan tersebut ditempuh, tjepat atau tidak tjepatnja djalan tersebut dilalui, achirnja tergantung pada manusia jang akan mempergunakan djalan tersebut. Dengan demikian hasil pelaksanaan pembangunan di Djawa Barat tergantung dari rakjat beserta para pemimpin²-nja sendiri di Djawa Barat, dan dalam hal ini terutama dari para pemimpin²-nja jang selain dari pada politik oriented, social oriented, sebaiknja djuga development oriented, jang didjiwai oleh lima azimat jaitu Nasakom, Pantja-sila, Manipol-Usdek, Trisakti Tavip, Berdikari dan dilengkapi dengan Dekon.

SAMBUTAN KETUA SAPTA TUNGGAL DJAWA BARAT

Dengan mengutjapkan sjukur alhamdulillah kepada Tuhan Jang Maha Esa, kami merasa sangat gembira atas diterbitkannja, „Buku Sedjarah Perkembangan Pembangunan Djawa Barat” sedjak 17-8-1945 s/d 17-8-1965, dalam rangka menjambut hari Ulang Tahun ke 20 ini.

Atas nama Sapta Tunggat chususnja dan masjarakat Djawa Barat umumnja kami mengutjapkan terima kasih jang se-tinggi²-nja kepada „Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Djawa Barat” jang telah mampu untuk menjusun dan menerbitkan buku Sedjarah pembangunan ini.

Proklamasi Kemerdekaan jang kita tjetuskan 20 tahun jang lalu, pada hakekatnja merupakan „djembatan-mas”, sebuah djembatan mahadahsjat dan megah jang telah dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke, untuk menegakkan pandji² Indonesia Merdeka, diatas tumpukan pengorbanan dan penderitaan para pahlawan kita.

Sebagai gencrasi pewaris alam merdeka dari pahlawan² jang gugur dimedan djaya, sebagai pengemban Ampera, kita lalui djembatan mas jang dahsjat dan megah itu untuk membangun „Negara Indonesia Merdeka” sebagai mertju-suar dalam perdjoangan dan pergulatan umat manusia dalam menuju kepada pembentukan „Dunia Baru” melalui poros „The New Emerging Forces”.

Telah kita Ketahui semua, bahwa Pembangunan dalam tahap revolusi Nasional Demokratis pada hakekatnja sudah hampir kita lalui ini dan merupakan persiapan untuk selandjutnja memasuki ambang pintu Sosialisme Indonesia dalam mentjapai masjarakat Indonesia jang ADIL DAN MAKMUR.

Didalam masjarakat Sosialisme Indonesia ini, „kita harus membangun, kita harus bekerdja keras, kita harus membanting tulang, memeras kita punja tenaga untuk membangun Sosialisme Indonesia” demikian dikatakan P.J.M. Presiden Sukarno Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. dalam Amanat Politiknja pada pembukaan Sidang Umum M.P.R.S. ke III, tanggal 11 April 1965.

Walaupun dalam buku sedjarah Perkembangan Pembangunan ini dapat kita batja dan kita lihat keadaan jang riil perkembangan pembangunan di Djawa Barat ini, baik dibidang kehidupan materiil maupun dibidang spirituil sedemikian hebat dan pesatnja, namun „bekal pembangunan” jang kita miliki itu masih harus kita perhebat pemupukannja untuk mempertjepat proses memasuki Sosialisme Indonesia, sesuai dengan tjita² luhur dari para pahlawan jang gugur dimasa lampau.

Mental/skill investment sebagai tenaga pelaksana jang pengalamannja disesuaikan dengan adjaran Sosialisme Indonesia, merupakan sjarat mutlak disamping penggalian² potensi lainnja.



MASHUDI
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat

Mudah-mudahan penerbitan buku sedjarah Perkembangan Pembangunan ini dapat memberikan inspirasi jang menjala-njala bagi bangsa dan Rakjat Indonesia umumnja, masjarakat Djawa Barat khususnja, untuk menegakkan kemerdekaan, sosialisme dan Dunia Baru.

Marilah kita berdjoang terus dalam usaha-usaha pembangunan bagi kemadjuan Bangsa dan Negara kita dengan bekal kita jang pokok, lima Azimat Revolusi Pemimpin Besar kita j.i.:

1. N A S A K O M.
2. PANTJA — SILA.
3. MANIPOL/USDEK dengan pedoman pelaksanaannja.
4. TRI SAKTI TAVIP.
5. BERDIKARI.

Achirul-kalam kami tutup sambutan ini dengan memandjatkan do'a kepada Tuhan Jang Maha Esa, supaja kita diberi taufik dan hidajat untuk dapat melandjutkan perdjoangan kita demi keagungan Nusa dan Bangsa.

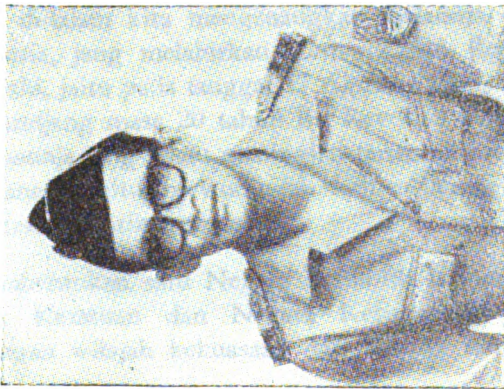
GUBERNUR KEPALA DAERAH
DJAWA — BARAT
SELAKU KETUA SAPTA TUNGGAL

ttd.

Mashudi

Brig. Djen. T.N.I.

Penjusun/Penata/Redaksi



R.O. Suwardi.



R. Nana Djasoempena.

PEMBANGUNAN DAERAH DJAWA BARAT SELAMA 20 TAHUN DARI TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 s/d TANGGAL 17 AGUSTUS 1965.

KATA PENDAHULUAN.

Buku ini disusun dan diterbitkan oleh BAKOPDA (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah) Djawa Barat untuk menjongsong dan menjambut hangat „Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” jang ke-20 pada tanggal 17 Agustus 1965. Hal ini mengandung pula pengertian, bahwa segenap lapisan masyarakat Daerah Djawa Barat turut memberi isi kepada dan mendjungdjung tinggi makna dan arti agung dari Hari Keramat Tanggal 17 Agustus 1965 ini jang penuh dihiasi dengan kepahlawanan dari putera-puteranja.

Dirasa perlu untuk dikemukakan, bahwa Buku ini memuat naskah dari pada kegiatan Rakjat di Daerah Djawa Barat dalam berbagai bidang dan lapangan, baik dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial, maupun dalam lapangan² lainnja jang pada umumnja menjangkut kehidupan dan penghidupan rakjat di Djawa Barat selama 20 tahun.

Dalam pada itu, bertalian dengan adanya maksud BAPPENAS (Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional) untuk mengeluarkan Buku Peringatan 20 tahun Indonesia Merdeka, untuk hal mana BAKOPDA Djawa Barat telah pula menjampaikan sumbangannja, semoga kiranja „Naskah Pembangunan Daerah Djawa Barat selama 20 Tahun” ini, sedjadjar dengan naskah² Pembangunan dari Daerah² lainnja, akan merupakan sumbangsih jang berarti dalam memperlengkap isi dari Buku „Peringatan 20 Tahun Indonesia Merdeka” itu.

Dilain segi didalam kita mengenangkan djalannja dan tingkatannja Revolusi Indonesia, jang melahirkan Kemerdekaan Republik Indonesia 20 Tahun jang lalu, jaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kita menjadari bahwa sepanjang masa 20 tahun itu Revolusi Indonesia mengikuti garis pertumbuhannja jang selalu meningkat terus-menerus semakin tinggi menudju sasarannja, jaitu perwujudan ketiga kerangka Revolusi kita jang oleh Manifesto Politik ditegaskan:

K e s a t u : Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berben-
tuk Kesatuan dan Negara Kebangsaan jang demokratis
dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

K e d u a : Pembentukan satu masyarakat jang adil dan makmur materiil
dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.

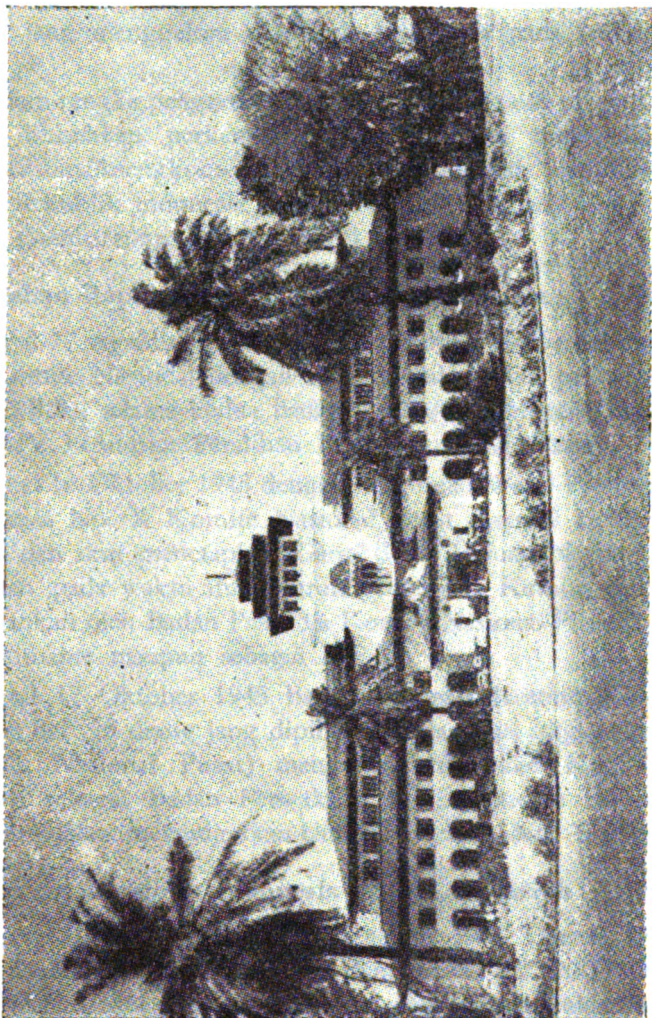
Ketiga : Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua Negara didunia, terutama sekali dengan Negara² Asia-Afrika atas dasar persamaan derajat, hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar bekerdja sama membentuk dunia baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna. P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam Amanat Politik „Berdikari” dimuka Sidang Umum jang ke III M.P.R.S. baru² ini menegaskan, bahwa tahap pertama dari pada Revolusi kita, jaitu tahap Nasional Demokrasi pada dewasa ini sudah hampir selesai dan sekarang kita memasuki tahap jang kedua, jaitu tahap Sosialisme atau tahap Pembangunan.

Dengan memperhatikan serta penarikan peladjaran² jang pandai dari pengalaman² pada waktu² jang telah lampau dan dengan pandangan lurus kemuka bersendjatakan Amanat Politik „Berdikari”, jang berintikan:

- a. Penegasan dalam bidang Politik mengenai Revolusi Indonesia pada tingkatnja sekarang dan peranan Indonesia dalam perdjoangan membangun Dunia Baru.
- b. Pedoman pelaksanaan Manipol sebagai Haluan Negara.
- c. Landasan Program perdjoangan Rakjat Indonesia dalam bidang² Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, Pertahanan/Keamanan kita madju terus dan pantang mundur untuk menjelesaikan Revolusi.

Achirul kalam semoga Buku ini ada manfaatnja dan semoga Tuhan Jang Maha Pengasih bersama kita.

AMIN.



„Gedung Sate”.
Kantor Gubernur Kepala Daerah Jawa-Barat.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI.

Perkembangan dalam periode Revolusi fisik/politik (1945 - 1950).

Dilihat dari djalannja Revolusi setjara keseluruhan, perdjuaan rakjat Djawa Barat didalam tingkatan merebut dan mempertahankan kekuasaan jang telah direbutnja dari pihak Imperialis Kolonialis Belanda pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perdjoangan segenap bangsa Indonesia jang menggelora diseluruh Nusantara pada waktu jang bersamaan.

Didalam rangka pengertian ini pula maka dibawah ini setjara selang-pandang dikisahkan perkembangan perdjuaan rakjat Djawa Barat dalam membina/mengkonsolidir dan memperkuat kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gambarannja adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Republik Indonesia ditingkat Pusat.

1. Tanggal 17 Agustus 1945 setelah proklamasi Kemerdekaan dibentuklah Komite Nasional dengan tugas menjalankan pekerdjaan M.P.R. dan D.P.R., selama kedua badan tersebut belum terbentuk (menurut pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar).
2. Tanggal 16 Oktober 1945 dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X Komite Nasional Pusat disertai kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan Garis² Besar Haluan Negara. Mengingat keadaan pada waktu itu, seluruh pekerdjaan Komite Nasional Pusat dijalankan oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat (baik sebagai Konstituante maupun sebagai D.P.R.).
3. Tanggal 17 Oktober 1945 Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat (terdiri dari 15 orang jang dipilih oleh dan dari lingkungan anggauta Komite Nasional Pusat) mengatur kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara, jaitu dengan djalan mewujudkan Undang-Undang No. 1 tahun 1945.

Pemerintahan Republik Indonesia ditingkat Daerah (Djawa Barat).

1. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1945 Daerah Djawa Barat djadi Daerah Otonom Propinsi dengan M. SUTARDJO KARTO-HADIKUSUMO sebagai Gubernur dan berkedudukan di Djakarta.
2. a. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1945 djuga ditiap tingkat Keresidenan, Kabupaten dan Kota jang berotonomi serta di-tempat² lain menurut Ketetapan Menteri Dalam Negeri dibentuk Komite² Nasional jang merupakan Badan² Perwakilan Rakjat di Daerah-nja masing² jang berkewajiban

mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri. Pemerintahan sehari-hari ada pada tangan Badan Eksekutif.

b. Pada saat itu Daerah Djawa Barat terdiri dari:

- (1). 5 Kota Otonom (Kota²; Djakarta, Bandung, Bogor, Tjirebon dan Sukabumi).
- (2). 5 Keresidenan (Keresidenan²; Djakarta-Raya, Priangan, Tjirebon, Bogor dan Banten).
- (3). 17 Kabupaten (Kabupaten²; Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaja, Tjiamis, Tjirebon, Kuningan, Madjalengka, Indramaju, Purwakarta, Tangerang, Tjiandjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasbitung dan Pandeglang).

TJATATAN: Kabupaten² Krawang dan Bekasi pada waktu itu belum dibentuk.

3. Djika Badan² Perwakilan Rakjat di Kabupaten² dan di Kota² Otonom pada waktu itu dapat dikatakan berdjalan lantjar, satu dan lain karena menggunakan Regentschapsverordening dan Stadsgemeente-verordening beserta segala peraturan yang telah ada, se-tidak²nja sebagai pedoman, Badan Perwakilan Rakjat di Keresidenan sedjak dari permulaan mengalami kesulitan² karena tidak dapat ditentukan sampai dimana dan apa yang masuk „rumah-tangga” Keresidenan itu.
4. Karena Kota Djakarta diduduki oleh Tentara Sekutu, maka dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Djakarta ke Jogjakarta, Pimpinan Pemerintahan Daerah Djawa Barat yang pada waktu itu dipegang oleh Mr. DATUK DJAMIN, sedjak permulaan tahun 1946 dipindahkan ke Daerah pedalaman dan mengambil tempat di Tasikmalaja.

Periode Negara Pasundan.

1. Badan² Pemerintahan di Daerah Djawa Barat yang dibentuk dengan Undang² No. 1 tahun 1945, chususnja sepanjang mengenai kegiatannya di-Kota², tidak dapat lama mendjalankan tugasnja, karena sedjak pertengahan tahun 1946 Belanda dengan Nicanja telah dapat memasuki beberapa Kota penting seperti Bogor, Tjiandjur, Bandung yang kemudian sedjak bulan Djuli 1947 mereka dapat menduduki serta menguasai semua kota di Daerah Djawa Barat.
2. Badan² Pemerintahan bentukan Republik Indonesia dihapuskan. Dalam pada itu dengan surat keputusan Ltn. G.G. tanggal 11 Djuni 1948 No. 10 Provincie West-Java dahulu dihapuskan. Tugasnja yang berdasarkan pada per-undangan² umum mendjadi tugas Pemerintah Pusat (Pre-Federal), sedangkan peraturan² yang dikeluarkan oleh

Provinciale Raad dan College van Gedeputeerden dahulu berlaku terus untuk daerah hukum Djawa Barat. Atas dasar keputusan Ltn. G.G. No. 10 djuga, maka dibentuklah Negara Pasundan, sebagai salah satu Negara Bagian dilingkungan Negara Pre-Federaal.

3. Dengan dibentuknja Negara Pasundan, maka didalam Peraturan² tentang Organisasi Negara (Stbl. 1948 No. 11) ditentukan bahwa segala peraturan hukum jang pada saat itu berlaku bagi Daerah Djawa Barat, tetap berlaku untuk wilayah Negara Pasundan, selama belum ditjabut, ditambah atau dirobah.

Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Djawa Barat dimasa pendudukan Belanda.

1. Baik pada saat² sebelum Negara Pasundan dibentuk, maupun beberapa saat setelahnja, walaupun pihak Belanda dengan kaki-tangannya telah berusaha dengan sekuat tenaga agar segenap lapisan masjarakat di Djawa Barat memberi dukungannya kepada maksud djahat mereka untuk mengingkari Republik Indonesia, akan tetapi umumnya Rakjat, terutama jang ada diluar Kota dan dipedalaman, tetap patuh pada Negara Proklamasi Republik Indonesia. Mereka lebih suka hidup di-tempat² pengungsian dan meninggalkan harta kekajaannya di Kota²/tempat² jang diduduki Belanda dari pada harus mengingkari Revolusi.
2. Pimpinan Pemerintah Daerah Djawa Barat dipengungsian setelah selama beberapa bulan dipegang oleh Gubernur Dr. MURDJANI sebagai pengganti Mr. DATUK DJAMIN, kemudian dipegang oleh Gubernur M. SEWAKA. Karena kota Tasikmalaja jang dari sedjak permulaan tahun 1946 djadi Pusat Pemerintahan Daerah Djawa Barat dalam bulan Djuli 1947 diduduki oleh Belanda, (aksi polisionil Belanda ke I tanggal 21 Djuli 1947), maka selama lebih kurang 7 bulan kedudukan Pemerintah Daerah terpaksa ber-pindah² dari satu tempat ketempat lain dipedalaman.

Keadaan di Daerah Djawa Barat disekitar tahun 1949.

1. Berkat keuletan dan ketabahan perjuangan Bangsa Indonesia didalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada achirnja Belanda melalui persetudjuan K.M.B. mengakui kedaulatan Negara kita (27 Desember 1949).
2. Daerah Djawa Barat pada waktu itu *lahiriahnja* merupakan Negara Pasundan salah satu dari Negara² Bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dalam Hatinja umumnya Rakjat di Daerah Djawa Barat tetap patuh pada Negara Proklamasi Republik Indonesia. Bentuk Negara Federaal tidak dikehendaki oleh mereka.

3. Perdjuaan Rakjat di Djawa Barat dalam usahanja menggerogoti serta melemahkan Pemerintah Boneka Belanda jang berbentuk Negara Pasundan, baik setjara fisik jang dilakukan oleh para pedjuang, maupun dengan tjara lain antara lain melalui pemuka² Rakjat Republik di Kota² jang setjara diam² memberikan bantuan berupa apapun kepada para pedjuang, berlangsung terus dengan semangat jang tak kundjung padam.
4. Perdjuaan mereka itu ternjata tidak sia². Pada achirnja setelah dengan hati jang tabah dapat dihadapinja serta dapat diatasinja fase perongrongan berupa serangan mendadak dari pihak Belanda dibawah pimpinan Kapten Westerling terhadap T.N.I. jang baru turun dari gunung dan belum lama berada di Kota Bandung, maka tuntutan Rakjat Djawa Barat agar Negara Pasundan dibubarkan dan menjatuhkan diri dengan Negara Republik Indonesia, terkabulkan.
5. Peresmian pembentukan Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat berlangsung pada saat dilangsungkannja Peringatan 5 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Perkembangan dalam tingkatan Tahun² „Survival” (1950-1955) dan Tahun² „Investment” (1955-1959).

Sedjalan dengan tingkatan djalannja Revolusi diwaktu itu, dimana Bangsa Indonesia setelah melalui tahun² jang penuh dengan perdjuaan fisik didalam mempertahankan kekuasaan jang telah *berhasil* dapat direbutnja dari pihak tangan Belanda, jang kemudian disusul dengan dapat ditjapainja kemenangan politik jang gilang-gemilang diforum Internasional, jaitu dengan diakuinja kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, maka Bangsa Indonesia dalam tahun² berikutnja, jaitu dalam masa tingkatan² Tahun „Survival” dan tingkatan tahun² „Investment”, dengan tabah dan penuh tekad melakukan tindakan² pembinaan terhadap segala hal jang menjangkut bidang politik pemerintahan, sosial dan ekonomi, maupun bidang² lainnja.

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat.

Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat dibentuk berdasarkan Undang² No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Peraturan Pelaksanaan) jang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun itu djuga.

Pemerintahan Daerah.

Didalam masa tingkatan tahun² „Survival” dan tahun² „Investment” masjarakat di Djawa Barat ber-turut² mengenal/mengalami 3 matjam Pemerintahan Daerah, jaitu:

- a. Pemerintahan Daerah sebelum dan sesudah tanggal 1 Desember 1957
 - (1). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif
 - (2). Dewan Pemerintah Daerah (D.P.D.) sebagai Badan Executive
- b. Pemerintahan Daerah sebelum dan sesudah tanggal 1 September 1958
 - (1). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif
 - (2). Dewan Pemerintah Daerah (D.P.D.) sebagai Badan Executive
- c. Pemerintahan Daerah dan dasar hukum Pemerintahan Daerah sebagai hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 1958 sampai tanggal 20 Desember 1959. Diberikan untuk diganti dengan D.P.R.D. yang ada dan dasar hukum Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berdasar atas dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berdasar atas dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada waktu pemerintahan Daerah yang dibentuk atas dasar Undang-Undang No. 1 tahun 1957 adalah:
 - (1). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D.P.R.D.) sebagai Badan Legislatif dan
 - (2). Dewan Pemerintah Daerah (D.P.D.) sebagai Badan Executive.

Komposisi imbalan kekuatan dalam tubuh Pemerintahan Daerah Jawa Barat.

a. Susunan D.P.R.D. dan D.P.D.

- (1). Baik D.P.R.D. Sementara, maupun D.P.R.D. Peralihan mempunyai 60 orang anggota D.P.R.D. atas dasar Undang-Undang No. 1 1957, mempunyai 75 orang anggota sebagai wakil dari partai politik dan/atau organisasi masa yang ada dalam hukum Propinsi Jawa Barat, dengan ketentuan bahwa para anggota D.P.R.D. Sementara dipilih berdasarkan Undang-Undang No. 7 jo. P.P.No. 39 tahun 1950 (sistem pemilihan bertingkat), sedangkan para anggota D.P.R.D. Peralihan diangkat menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1956 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 1956 (berdasarkan perwakilan yang berimbang), serta para anggota D.P.R.D. yang ketiga diangkat menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1955 (Undang-Undang Pemilihan Umum) berdasarkan perwakilan yang berimbang juga.

sk
pkai

- (2). Baik D.P.D. Sementara, D.P.D. Peralihan maupun D.P.D. dalam rangka Undang² Pemilihan Umum terdiri atas 6 orang anggota, dengan ketentuan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan adalah Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Undang² Pemilihan Umum adalah Kepala Daerah, karena Gubernur menurut ketentuan dalam Undang² No. 1 tahun 1957 hanya mendjabat pimpinan Pemerintahan Umum di Daerah Djawa Barat. Adapun Anggota D.P.D. yang 5 orang lagi dipilih oleh dan dari lingkungan para anggota D.P.R.D., satu dan lainnya menurut sistem yang berlaku bagi masing² periode (DPRDS., DPRDP. dan DPRD. dalam rangka Undang² Pemilihan Umum).
- (3). Dalam lingkungan D.P.R.D. Sementara duduk sebagai anggota wakil² dari lingkungan 22 partai politik dan organisasi² massa dimana Partai Masjumi menduduki kursi terbanyak, yaitu 29 kursi. Partai² politik dan organisasi² massa lainnya umumnya hanya mempunyai 1 atau 2 kursi saja atau paling banyak 4 kursi. Dalam pada itu dalam D.P.R.D. Peralihan dan dalam D.P.R.D. dalam rangka Undang² pemilihan Umum tertjat wakil² dari lingkungan 14 partai politik dan organisasi² massa dimana setjara ber-turut² Partai² Masjumi dan P.N.I. masing² menduduki 16 dan 14 kursi, disamping P.K.I. dan N.U. masing² mempunyai 7 dan 6 kursi. Partai² dan Organisasi massa lainnya hanya mempunyai 1 atau paling banyak 3 atau 4 kursi saja dalam D.P.R.D. Daerah Djawa Barat.

Kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah.

- a. Kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Sementara dan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi diatur dalam Undang² No. 22 tahun 1948 (Bab III Bagian 1, 2 dan 3). Dalam pada itu kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka Undang² Pemilihan Umum diatur dalam Undang² No. 1 tahun 1957.
- b. Dalam pasal 23 dari Undang² No. 22 tahun 1948 disebutkan, bahwa D.P.R.D. mengatur rumah tangga daerahnya, sedangkan pasal 24 Undang² tersebut menyatakan, bahwa kewajiban Pemerintah (Pusat) di Daerah² yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah dapat diserahkan dengan Undang² kepada Pemerintah Daerah untuk dijalankan.
- c. 1. Kedua soal tersebut diatas untuk Propinsi Djawa Barat dilaksanakan dengan Undang² No. 11 tahun 1950 (pasal 4). Sebagaimana kiranya telah dimaklum, menurut Undang² pembentukan Propinsi tersebut, yang akan menjadi urusan Propinsi adalah:

- (1). Urusan Umum.
- (2). Urusan Pemerintahan Umum.
- (3). Urusan Agraria.
- (4). Urusan Pengairan, Djalan² dan Gedung².
- (5). Urusan Pertanian, Perikanan dan Kooperasi.
- (6). Urusan Kehewanan.
- (7). Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
- (8). Urusan Perburuhan.
- (9). Urusan Sosial.
- (10). Urusan Pembagian (Distribusi).
- (11). Urusan Penerangan.
- (12). Urusan Pendidikan, Pengajaran — Kebudayaan.
- (13). Urusan Kesehatan.
- (14). Urusan Perusahaan.

c. 2. Dari sekian banjak urusan tersebut diatas, jang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian Rakjat, dengan P.P. No. 29 tahun 1951.
2. Urusan Kehewanan, dengan P.P. No. 30 tahun 1951.
3. Urusan Perikanan Darat, dengan P.P. No. 31 tahun 1951.
4. Urusan P.D. & K. (sepandjang mengenai urusan Sekolah² Rakjat dan Pendidikan Masjarakat) dengan P.P. No. 49 tahun 1951.
5. Urusan Kesehatan, dengan P.P. No. 49 tahun 1952.
6. Urusan Pekerdjaan Umum, dengan P.P. No. 18 tahun 1953.
7. Urusan Perindustrian (sepandjang mengenai industri ketjil dan keradjinan di-rumah², (dengan P.P. No. 12 jo. 13 tahun 1954).
8. Urusan Kehutanan dengan P.P. 64 tahun 1957.
9. Urusan Perikanan Laut, dengan P.P. No. 64 tahun 1957.
10. Urusan Karet Rakjat, dengan P.P. No. 64 tahun 1957.
11. Urusan Sosial, dengan P.P. No. 5 tahun 1958.
12. Urusan Perumahan, dengan P.P. No. 6 tahun 1958.
13. Urusan Perburuhan, dengan P.P. No. 14 tahun 1958.
14. Urusan Lalu-Lintas Djalan, dengan P.P. No. 16 tahun 1958.

c. 3. Disamping penjerahan urusan² tersebut diatas belum terhitung lagi sifat dan luasnja lapangan kekuasaan jang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat, dimana pada umumnja hanya merupakan sebagian ketjil sadja dari urusan² keseluruhannja, jang akibatnja daerah tidak mungkin dapat mendjalankan wewenangnja sebagaimana jang diharapkan.

Tugas² baru jang sepantasnja telah diberikan kepada daerah pada masa² itu seperti:

- (1). Soal desa pertjobaan,
 - (2). Soal bantuan keuangan kepada desa,
 - (3). Soal perumahan rakjat,
 - (4). Soal pembelian padi,
 - (5). Dan sebagainya,
- masih dibebankan kepada alat² Pemerintah Pusat.

Organisasi Sekertari Propinsi Djawa Barat dan Perkembangannya.

Sebagai aparatuur dari Pemerintahan Propinsi jang mengatur dan mendjalankan pekerdjaan² administratif se-hari² dalam lingkungan kekuasaan Pemerintahan Daerah, Sekertari Propinsi-pun tidak dapat terlepas dari perkembangan jang dialami oleh Pemerintah Propinsi sendiri. Dilihat dari segi riwayatnja, pembentukan organisasi sekertari mendahului pembentukan Pemerintahan Otonom Propinsi. Dapat dikatakan, bahwa pada masa Pemerintahan Propinsi belum terbentuk, untuk selama beberapa bulan Sekertari ini masih mendjadi satu dengan Kantor Gubernur jang pada masa itu (dalam bulan Maret tahun 1950) organisasinja tersusun atas 7 bagian jaitu:

1. Bagian Hukum.
2. Bagian Pemerintahan.
3. Bagian Urusan Keuangan.
4. Bagian Urusan Pegawai.
5. Bagian Daerah Otonom Bawahan.
6. Bagian Agraria.
7. Bagian Urusan Tanah Partikulir.

Pembentukan Sekertari Propinsi dan perkembangannya:

- (I). 1. Sekertari Propinsi Djawa Barat setjara formeel mulai berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950, jaitu pada saat terbentuknja Daerah Otonom Propinsi ini berdasarkan Undang² No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950. Dengan sendirinja Sekertari Propinsi ini baru dapat mendjalankan tugas-kewadjabannya dengan njata dari sedjak terbentuknja DPRDS. dan DPDS. Propinsi jang dilantik pada tanggal 30 Desember 1950. Berbarengan dengan bergantinja pimpinan Daerah, jaitu pergeseran functie Gubernur Kepala Daerah dari tangan Sdr. SEWAKA kepada tangan Sdr. SANOESI HARDJADINATA, maka oleh karena telah njata bahwa dualisme dalam pemerintahan didaerah tidak akan segera hilang, diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah buat memi-

sahkan kantor Gubernur dari Sekertari Propinsi. Ini terdjadi dalam tahun 1951.

Susunan organisasi Sekertari Propinsi disesuaikan dengan kebutuhan menurut luasnja (omvang) tugas-kewadajiban jang dipikulkan kepadanya. Atas dasar urgensi tersebut diatas, maka organisasi Sekertari diwaktu itu tersusun atas:

- (1). Bagian Hukum.
- (2). Bagian Urusan Keuangan.
- (3). Bagian Urusan Pegawai.
- (4). Bagian Sekertariat Kepala Daerah.
- (5). Sekertariat D.P.D.
- (6). Sekertariat D.P.R.D.
- (7). Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Otonom Bawahan.
- (8). Bagian Umum.

2. Sekertari dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu oleh seorang Administratur beserta stafnja, jang terdiri dari para Kepala Bagian. Pada masa pembentukannja, Sekertari Propinsi tidak mempunjai pegawai sendiri karena kesemuanja diwaktu itu masih termasuk pegawai Kantor Gubernur. Dalam pada itu perpindahan pegawai dari Kantor Gubernur ke Sekertari terus dilakukan, sehingga dengan demikian Sekertari lambat-laun mempunjai korps pegawai sendiri, kendatipun untuk 100% masih terdiri dari pegawai² negeri jang diperbantukan.

- (II). 1. Dengan ber-angsur² dilaksanakannja penjerahan beberapa urusan mengenai lapangan Pertanian Rakjat, Perikanan Darat, Kehewan dan P.P. & K. oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi Djawa Barat, masing² dengan peraturan Pemerintah No. 29, 31, 30 dan No. 65 tahun 1951, jang semuanya terdjadi dalam tahun 1952, maka lapangan pekerdjaan Sekertari dengan sendirinja telah mendjadi lebih luas lagi. Dengan ini, maka garapan pekerdjaan Sekertari dibawah pimpinan Sekertaris mempunjai sifat koordinarend pula terhadap semua urusan jang telah masuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah Daerah. Berhubung dengan itu, guna sedapat mungkin dapat menampung dan menjelesaikan pelbagai matjam pekerdjaan setjara effcient, maka atas dasar Surat Keputusan D.P.D. Propinsi tanggal 29 Djuli 1952 No. 8/UPO/A/52, organisasi Sekertari Propinsi diperluas dengan dibentuknja suatu bagian baru, jaitu Biro Perekonomian. Dengan demikian susunan Sekertari dari saat itu tidak lagi terdiri atas 8 bagian melainkan terdiri atas 9 bagian, jaitu:

jang lama, karena menganut sistim leberal, diretool dan diganti dengan Lembaga² Pemerintahan baru berdasarkan Demokrasi Terpimpin.

Daerah Djawa Barat dengan sendirinja tidak dapat terlepas dari keadaan dan suasana seperti dikemukakan diatas. Sedjak itu pula masjarakat di Daerah Djawa Barat, chususnja sependjang mengenai Pemerintahan hingga kini mengenal 2 (*dua*) *Pemerintahan Daerah*, baik ditingkat I, maupun ditingkat II, jaitu:

1. *Pemerintahan Daerah Gaja Baru (dibentuk atas dasar Penpres No. 6 tahun 1959).*
2. *Pemerintahan Daerah Gotong Rojong (Dibentuk atas dasar Penpres No. 5 tahun 1960 disempurnakan).*

Pemerintahan Daerah Djawa Barat Gaja Baru.

(1). Masa djabatannja berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1959 sampai tanggal 10 Desember 1960.

(2). Pemerintah Daerah ini tersusun atas:

- a. Bagian Eksekutif, terdiri dari Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Anggauta Badan Pemerintah Harian (B.P.H.).
- b. Badan Legislatief jaitu D.P.R.D. Gaja Baru dimana Gubernur Kepala Daerah duduk sebagai Ketua.

(3). D.P.R.D. Gaja Baru beranggautakan 75 orang, tersusun dengan komposisi sebagai berikut:

a. Golongan Islam:

(1). Masjumi	: 20 orang	
(2). N.U.	: 7 orang	
(3). P.S.I.I.	: 3 orang	
		30 orang.

b. Golongan Nasionalis:

(1). P.N.I.	: 11 orang	
(2). I.P.K.I.	: 3 orang	
(3). Gerpis	: 1 orang	
(4). P.R.N.	: 1 orang	
(5). P.R.D.	: 1 orang	
(6). Prim.	: 1 orang	
		18 orang.

c. Golongan Marxisme:

(1). P.K.I.	: 11 orang	
(2). Murba	: 2 orang	
(3). P.S.I.	: 2 orang	
		15 orang.

d. Golongan² lainnja:

(1). Himpunan Tani Miskin :	2 orang	
(2). Baperki :	1 orang	
(3). Akoma :	1 orang	
(4). Partai Buruh :	1 orang	
(5). P3.R.I. :	1 orang	
(6). Front B.T.I. :	1 orang	
(7). Tani Mukti :	1 orang	
(8). Non Partai :	3 orang	
(9). G.P.P.S. :	1 orang	
	<u>12 orang</u>	
Djumlah semuanya		75 orang.

- (4). Menurut ketentuannya Gubernur Kepala Daerah dalam Badan Eksekutif mempunyai 6 orang Anggota B.P.H. sebagai pembantunya. Akan tetapi pada akhirnya selama masa jabatannya hanya dibantu oleh 3 (tiga) orang Anggota B.P.H., yaitu 1 orang wakil dari P.K.I. 1 orang wakil dari N.U. dan 1 orang wakil dari Murba, 2 orang wakil dari Masjumi dan 1 orang wakil dari P.N.I. menolak untuk diangkat sebagai Anggota B.P.H. dengan alasan mereka tidak dapat melepaskan keanggotaannya dari Partainya masing².

Pemerintahan Daerah Gotong Rojong.

- 1). Masa jabatannya berlangsung dari tanggal 10 Desember sampai *sekarang*.
- (2). Pemerintahan Daerah Gotong-Rojong ini sama susunannya dengan Pemerintahan² Daerah jang lama, terdiri dari:
 - a. Badan Eksekutif, dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah dengan dibantu oleh Anggota² B.P.H.
 - b. Badan Legislatif, yaitu D.P.R.D.-G.R. diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). D.P.R.D.-G.R. menurut ketentuannya beranggotakan 75 orang, tersusun dengan komposisi sebagai berikut:

a. *Golongan Politik*: 34 orang

1. Golongan Islam:

(a). N.U. :	7 orang	
(b). P.S.I.I. :	4 orang	
(c). Perti :	1 orang	
	<u>12 orang</u>	

2. Golongan Nasionalis:

(a). P.N.I. :	8 orang	
(b). I.P.K.I. :	3 orang	
(c). Partindo :	1 orang	
	<u>12 orang</u>	

Tugas² baru jang sepantasnja telah diberikan kepada daerah pada masa² itu seperti:

- (1). Soal desa pertjobaan,
 - (2). Soal bantuan keuangan kepada desa,
 - (3). Soal perumahan rakjat,
 - (4). Soal pembelian padi,
 - (5). Dan sebagainya,
- masih dibebankan kepada alat² Pemerintah Pusat.

Organisasi Sekertari Propinsi Djawa Barat dan Perkembangannja.

Sebagai aparatuur dari Pemerintahan Propinsi jang mengatur dan mendjalankan pekerdjaan² administratif se-hari² dalam lingkungan kekuasaan Pemerintahan Daerah, Sekertari Propinsi-pun tidak dapat terlepas dari perkembangan jang dialami oleh Pemerintah Propinsi sendiri. Dilihat dari segi riwayatnja, pembentukan organisasi sekertari mendahului pembentukan Pemerintahan Otonom Propinsi. Dapat dikatakan, bahwa pada masa Pemerintahan Propinsi belum terbentuk, untuk selama beberapa bulan Sekertari ini masih mendjadi satu dengan Kantor Gubernur jang pada masa itu (dalam bulan Maret tahun 1950) organisasinja tersusun atas 7 bagian jaitu:

1. Bagian Hukum.
2. Bagian Pemerintahan.
3. Bagian Urusan Keuangan.
4. Bagian Urusan Pegawai.
5. Bagian Daerah Otonom Bawahan.
6. Bagian Agraria.
7. Bagian Urusan Tanah Partikulier.

Pembentukan Sekertari Propinsi dan perkembangannja:

- (I). 1. Sekertari Propinsi Djawa Barat setjara formeel mulai berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950, jaitu pada saat terbentuknja Daerah Otonom Propinsi ini berdasarkan Undang² No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950. Dengan sendirinja Sekertari Propinsi ini baru dapat mendjalankan tugas-kewadjabannja dengan njata dari sedjak terbentuknja DPRDS. dan DPDS. Propinsi jang dilantik pada tanggal 30 Desember 1950. Berbarengan dengan bergantinja pimpinan Daerah, jaitu pergeseran functie Gubernur Kepala Daerah dari tangan Sdr. SEWAKA kepada tangan Sdr. SANOESI HARDJADINATA, maka oleh karena telah njata bahwa dualisme dalam pemerintahan didaerah tidak akan segera hilang, diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah buat memi-

sahkan kantor Gubernur dari Sekertari Propinsi. Ini terdjadi dalam tahun 1951.

Susunan organisasi Sekertari Propinsi disesuaikan dengan kebutuhan menurut luasnja (omvang) tugas-kewadajiban jang dipikulkan kepadanja. Atas dasar urgensi tersebut diatas, maka organisasi Sekertari diwaktu itu tersusun atas:

- (1). Bagian Hukum.
 - (2). Bagian Urusan Keuangan.
 - (3). Bagian Urusan Pegawai.
 - (4). Bagian Sekertariat Kepala Daerah.
 - (5). Sekertariat D.P.D.
 - (6). Sekertariat D.P.R.D.
 - (7). Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Otonom Bawahan.
 - (8). Bagian Umum.
2. Sekertari dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu oleh seorang Administratur beserta stafnja, jang terdiri dari para Kepala Bagian. Pada masa pembentukannja, Sekertari Propinsi tidak mempunyai pegawai sendiri karena kesemuanja diwaktu itu masih termasuk pegawai Kantor Gubernur. Dalam pada itu perpindahan pegawai dari Kantor Gubernur ke Sekertari terus dilakukan, sehingga dengan demikian Sekertari lambat-laun mempunyai korps pegawai sendiri, kendatipun untuk 100% masih terdiri dari pegawai² negeri jang diperbantukan.
- (II). 1. Dengan ber-angsur² dilaksanakannja penjerahan beberapa urusan mengenai lapangan Pertanian Rakjat, Perikanan Darat, Kehewanan dan P.P. & K. oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi Djawa Barat, masing² dengan peraturan Pemerintah No. 29, 31, 30 dan No. 65 tahun 1951, jang semuanya terdjadi dalam tahun 1952, maka lapangan pekerdjaan Sekertari dengan sendirinja telah mendjadi lebih luas lagi. Dengan ini, maka garapan pekerdjaan Sekertari dibawah pimpinan Sekertaris mempunyai sifat koordinarend pula terhadap semua urusan jang telah masuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah Daerah. Berhubung dengan itu, guna sedapat mungkin dapat menampung dan menjelesaikan pelbagai matjam pekerdjaan setjara effcient, maka atas dasar Surat Keputusan D.P.D. Propinsi tanggal 29 Djuli 1952 No. 8/UPO/A/52, organisasi Sekertari Propinsi diperluas dengan dibentuknja suatu bagian baru, jaitu Biro Perekonomian. Dengan demikian susunan Sekertari dari saat itu tidak lagi terdiri atas 8 bagian melainkan terdiri atas 9 bagian, jaitu:

- (1). Bagian Hukum.
 - (2). Bagian Urusan Keuangan.
 - (3). Bagian Urusan Pegawai.
 - (4). Sekertariat Kepala Daerah.
 - (5). Sekertariat D.P.D.
 - (6). Sekertariat D.P.R.D.
 - (7). Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Otonom Bawahan.
 - (8). Bagian Umum.
 - (9). Biro Perekonomian.
2. a. Formasi Pegawai jang ditetapkan menurut Surat Keputusan D.P.D. Propinsi tersebut diatas memberi kemungkinan penempatan kepada sedjumlah 565 orang pegawai termasuk Sekertaris pada Sekertari Propinsi.
 - b. Pada achir tahun 1952 itu, formasi tersebut diatas terisi oleh 313 orang pegawai, atau merupakan 55% dari formasi. Patut pula kiranja untuk dikemukakan disini, bahwa dari sebanjak 313 orang pegawai tersebut diatas telah ada 20 orang jang telah mendjadi pegawai Otonom penuh, sedangkan sesisanja masih terdiri dari pegawai jang diperbantukan.
- (III). 1. Dalam tahun 1953 organisasi Sekertari Propinsi ini tidak mengalami perobahan dan tetap tersusun atas 9 bagian. Hanja penempatan (bezetting) pegawai disetiap Bagian ber-angsur² diisi dengan pegawai² baru menurut kebutuhan, sehingga pada achir tahun 1953 djumlah pegawai pada Sekertari telah meningkat djadi 514 orang.
Dibandingkan dengan djumlah pegawai pada achir tahun 1952, banjaknja itu meningkat dengan 201 orang.
2. Pada pertengahan tahun 1954, atas dasar surat Keputusan D.P.D. tanggal 25 Mei 1954 No. 2/UPO/A-I/54 organisasi Sekertari diperluas dengan dibentuknja 2 bagian baru, jaitu Bagian Inspeksi Keuangan dan Biro Sumber Penghasilan, sehingga dengan demikian susunan Sekertari Propinsi terdiri dari 11 Bagian.
Dapat dikatakan bahwa perluasan organisasi Sekertari ini sangat rapat hubungannja dengan pelaksanaan penjerahan urusan Pekerdjaan Umum dan Urusan Perindustrian dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Propinsi jang masing² terdjadi dalam tahun 1953 dan tahun 1954, sehingga dengan demikian lapangan pekerdjaan Sekertari telah sangat bertambah pula.

3. Formasi pegawai Sekertari Propinsi dalam tahun 1954 terdiri dari 696 orang diisi dengan 579 orang.
- (IV). a. Dalam tahun² berikutnja s/d achir tahun 1959 djumlah Bagian dilingkungan Sekertari Propinsi Djawa Barat tetap 11 dan terdiri dari:
- (1). Sekertariat D.P.R.D.
 - (2). Sekertariat D.P.D.
 - (3). Bagian Urusan Hukum.
 - (4). Sekertariat Kepala Daerah.
 - (5). Bagian Urusan Keuangan.
 - (6). Bagian Urusan Pegawai.
 - (7). Bagian Umum.
 - (8). Bagian Pengawasan Keuangan D.O.B.
 - (9). Bagian Inspeksi Keuangan dan Padjak serta Sumber² Penghasilan.
 - (10). Biro Perkeconomian.
 - (11). Biro Pemerintahan Umum.
- b. Formasi pegawai dalam tahun 1955 adalah 696 orang. Diisi oleh 624 orang.
- c. Sedjadjar dengan terus bertambahnja pekerdjaan jang harus didjalankan oleh Sekertari, berhubung dengan berkembangnja Propinsi Djawa Barat sebagai Daerah Otonom, maka formasi pegawai dalam tahun 1956 ditambah mendjadi 765 orang. Formasi pegawai ini dalam tahun 1956 diisi dengan 702 orang.
- d. Pada achir tahun 1959 djumlah pegawai seluruhnja tertjatat 736 orang, sedangkan formasinja tetap tidak berubah, jaitu 765 orang.

Perkembangan dalam periode Pantja-Warsa Manipol (1959-1964) dan dalam periode Mahkota Revolusi (1965).

Dengan berlakunja kembali Undang² Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, maka antara lain kehidupan Politik di Indonesia mendjadi berubah. Baik setjara lahiriah, maupun setjara bathiniah segenap Bangsa Indonesia kembali kedjiwa Revolusi. Hal ini dipertegas lagi sedjak tanggal 17 Agustus 1959 dengan lahirnja Manifesto Politik Republik Indonesia.

Sebagai salah satu segi dari follow up Bangsa Indonesia kembali ke Undang² Dasar tahun 1945 ialah bahwa Lembaga² Pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah² jang dibentuk berdasarkan perundang-undangan

mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri. Pemerintahan se-hari² ada pada tangan Badan Eksekutif.

b. Pada saat itu Daerah Djawa Barat terdiri dari:

- (1). 5 Kota Otonom (Kota²; Djakarta, Bandung, Bogor, Tjirebon dan Sukabumi).
- (2). 5 Keresidenan (Keresidenan²; Djakarta-Raya, Priangan, Tjirebon, Bogor dan Banten).
- (3). 17 Kabupaten (Kabupaten²; Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaja, Tjiamis, Tjirebon, Kuningan, Madjalengka, Indramaju, Purwakarta, Tangerang, Tjiandjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasbitung dan Pandeglang).

TJATATAN: Kabupaten² Krawang dan Bekasi pada waktu itu belum dibentuk.

3. Djika Badan² Perwakilan Rakjat di Kabupaten² dan di Kota² Otonom pada waktu itu dapat dikatakan berdjalan lantjar, satu dan lain karena menggunakan Regentschapsverordening dan Stadsgemeente-verordening beserta segala peraturan yang telah ada, se-tidak²nja sebagai pedoman, Badan Perwakilan Rakjat di Keresidenan sedjak dari permulaan mengalami kesulitan² karena tidak dapat ditentukan sampai dimana dan apa yang masuk „rumah-tangga” Keresidenan itu.
4. Karena Kota Djakarta diduduki oleh Tentara Sekutu, maka dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Djakarta ke Jogjakarta, Pimpinan Pemerintahan Daerah Djawa Barat yang pada waktu itu dipegang oleh Mr. DATUK DJAMIN, sedjak permulaan tahun 1946 dipindahkan ke Daerah pedalaman dan mengambil tempat di Tasikmalaja.

Periode Negara Pasundan.

1. Badan² Pemerintahan di Daerah Djawa Barat yang dibentuk dengan Undang² No. 1 tahun 1945, chususnja sependjang mengenai kegiatannya di-Kota², tidak dapat lama mendjalankan tugasnja, karena sedjak pertengahan tahun 1946 Belanda dengan Nicanja telah dapat memasuki beberapa Kota penting seperti Bogor, Tjiandjur, Bandung yang kemudian sedjak bulan Djuli 1947 mereka dapat menduduki serta menguasai semua kota di Daerah Djawa Barat.
2. Badan² Pemerintahan bentukan Republik Indonesia dihapuskan. Dalam pada itu dengan surat keputusan Ltn. G.G. tanggal 11 Djuni 1948 No. 10 Provincie West-Java dahulu dihapuskan. Tugasnja yang berdasarkan pada per-undangan² umum mendjadi tugas Pemerintah Pusat (Pre-Federaal), sedangkan peraturan² yang dikeluarkan oleh

Provinciale Raad dan College van Gedeputeerden dahulu berlaku terus untuk daerah hukum Djawa Barat. Atas dasar keputusan Ltn. G.G. No. 10 juga, maka dibentuklah Negara Pasundan, sebagai salah satu Negara Bagian dilingkungan Negara Pre-Federaal.

3. Dengan dibentuknja Negara Pasundan, maka didalam Peraturan² tentang Organisasi Negara (Stbl. 1948 No. 11) ditentukan bahwa segala peraturan hukum jang pada saat itu berlaku bagi Daerah Djawa Barat, tetap berlaku untuk wilayah Negara Pasundan, selama belum ditjabut, ditambah atau dirobah.

Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Djawa Barat dimasa pendudukan Belanda.

1. Baik pada saat² sebelum Negara Pasundan dibentuk, maupun beberapa saat setelahnja, walaupun pihak Belanda dengan kaki-tangannja telah berusaha dengan sekuat tenaga agar segenap lapisan masjarakat di Djawa Barat memberi dukungannja kepada maksud djahat mereka untuk mengingkari Republik Indonesia, akan tetapi umumnja Rakjat, terutama jang ada diluar Kota dan dipedalaman, tetap patuh pada Negara Proklamasi Republik Indonesia. Mereka lebih suka hidup di-tempat² pengungsian dan meninggalkan harta kekajaannja di Kota²/tempat² jang diduduki Belanda dari pada harus mengingkari Revolusi.
2. Pimpinan Pemerintah Daerah Djawa Barat dipengungsian setelah selama beberapa bulan dipegang oleh Gubernur Dr. MURDJANI sebagai pengganti Mr. DATUK DJAMIN, kemudian dipegang oleh Gubernur M. SEWAKA. Karena kota Tasikmalaja jang dari sedjak permulaan tahun 1946 djadi Pusat Pemerintahan Daerah Djawa Barat dalam bulan Djuli 1947 diduduki oleh Belanda, (aksi polisionil Belanda ke I tanggal 21 Djuli 1947), maka selama lebih kurang 7 bulan kedudukan Pemerintah Daerah terpaksa ber-pindah² dari satu tempat ketempat lain dipedalaman.

Keadaan di Daerah Djawa Barat disekitar tahun 1949.

1. Berkat keuletan dan ketabahan perdjjuangan Bangsa Indonesia didalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada achirnja Belanda melalui persetudjuan K.M.B. mengakui kedaulatan Negara kita (27 Desember 1949).
2. Daerah Djawa Barat pada waktu itu *lahiriahnja* merupakan Negara Pasundan salah satu dari Negara² Bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dalam Hatinja umumnja Rakjat di Daerah Djawa Barat tetap patuh pada Negara Proklamasi Republik Indonesia. Bentuk Negara Federaal tidak dikehendaki oleh mereka.

3. Perdjuaan Rakjat di Djawa Barat dalam usahanja menggerogoti serta melemahkan Pemerintah Boneka Belanda jang berbentuk Negara Pasundan, baik setjara fisik jang dilakukan oleh para pedjuang, maupun dengan tjara lain antara lain melalui pemuka² Rakjat Republik di Kota² jang setjara diam² memberikan bantuan berupa apapun kepada para pedjuang, berlangsung terus dengan semangat jang tak kundjung padam.
4. Perdjuaan mereka itu ternjata tidak sia². Pada achirnja setelah dengan hati jang tabah dapat dihadapinja serta dapat diatasinja fase perongrongan berupa serangan mendadak dari pihak Belanda dibawah pimpinan Kapten Westerling terhadap T.N.I. jang baru turun dari gunung dan belum lama berada di Kota Bandung, maka tuntutan Rakjat Djawa Barat agar Negara Pasundan dibubarkan dan menjatukan diri dengan Negara Republik Indonesia, terkabulkan.
5. Peresmian pembentukan Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat berlangsung pada saat dilangsungkannja Peringatan 5 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Perkembangan dalam tingkatan Tahun² „Survival” (1950-1955) dan Tahun² „Investment” (1955-1959).

Sedjalan dengan tingkatan djalannja Revolusi diwaktu itu, dimana Bangsa Indonesia setelah melalui tahun² jang penuh dengan perdjuaan fisik didalam mempertahankan kekuasaan jang telah *berhasil* dapat direbutnja dari pihak tangan Belanda, jang kemudian disusul dengan dapat ditjapainja kemenangan politik jang gilang-gemilang diforum Internasional, jaitu dengan diakuinja kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, maka Bangsa Indonesia dalam tahun² berikutnya, jaitu dalam masa tingkatan² Tahun „Survival” dan tingkatan tahun² „Investment”, dengan tabah dan penuh tekad melakukan tindakan² pembinaan terhadap segala hal jang menjangkut bidang politik pemerintahan, sosial dan ekonomi, maupun bidang² lainnja.

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat.

Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat dibentuk berdasarkan Undang² No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 (Peraturan Pelaksanaan) jang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun itu djuga.

Pemerintahan Daerah.

Didalam masa tingkatan tahun² „Survival” dan tahun² „Investment” masjarakat di Djawa Barat ber-turut² mengenal/mengalami 3 matjam Pemerintahan Daerah, jaitu:

- a. Pemerintahan Daerah Sementara jang berlangsung dari tanggal 30 Desember 1950 s/d tanggal 22 September 1956, terdiri atas:
 - (1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara (D.P.R.D.S.) sebagai Badan Legislatief, dan
 - (2). Dewan Pemerintah Daerah Sementara (D.P.D.S.) sebagai Badan Executief.
- b. Pemerintahan Daerah Peralihan, jang berlangsung dari tanggal 22 September 1956 hingga tanggal 25 Djanuari 1958 jaitu terdiri atas:
 - (1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan (D.P.R.D.P.) sebagai Badan Legislatief dan
 - (2). Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (D.P.D.P.) sebagai Badan Executief.
- c. Pemerintahan Daerah atas dasar Undang² Pemerintahan Daerah sebagai hasil pemilihan umum, jang berlangsung dari tanggal 25 Djanuari 1958 sampai tanggal 20 Oktober 1959 (Dibubarkan untuk diganti dengan D.P.R.D. stijl baru atas dasar djiwa Undang² Dasar tahun 1945, jang berarti kembalinja Rakjat Bangsa Indonesia kedjiwa Revolusi tahun 1945). Sama halnja seperti susunan Pemerintahan² Daerah pada waktu² sebelumnja, Pemerintahan Daerah jang dibentuk atas dasar Undang² No. 1 tahun 1957 terdiri atas:
 - (1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (D.P.R.D.) sebagai Badan Legislatief dan
 - (2). Dewan Pemerintah Daerah (D.P.D.) sebagai Badan Executief.

Komposisi/imbangan kekuatan dalam tubuh Pemerintahan Daerah Djawa Barat.

- a. *Susunan D.P.R.D. dan D.P.D.*
 - (1). Baik D.P.R.D. Sementara, maupun D.P.R.D. Peralihan mempunyai 60 orang anggauta D.P.R.D. atas dasar Undang² No. 1/1957, mempunyai 75 orang anggauta sebagai wakil dari pelbagai partai politik dan/atau organisasi masa jang ada didaerah hukum Propinsi Djawa Barat, dengan ketentuan bahwa para anggauta D.P.R.D. Sementara dipilih berdasarkan Undang² No. 7 jo. P.P.No. 39 tahun 1950 (sistim pemilihan bertingkat), sedangkan para anggauta D.P.R.D. Peralihan diangkat menurut Undang² No. 14 tahun 1956 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 1956 (berdasarkan perwakilan jang berimbang), serta para anggauta D.P.R.D. jang ketiga diangkat menurut Undang² No. 7 tahun 1955 (Undang² Pemilihan Umum) berdasarkan perwakilan jang berimbang djuga.

- (2). Baik D.P.D. Sementara, D.P.D. Peralihan maupun D.P.D. dalam rangka Undang² Pemilihan Umum terdiri atas 6 orang anggota, dengan ketentuan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pemerintah Daerah Sementara dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan adalah Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Undang² Pemilihan Umum adalah Kepala Daerah, karena Gubernur menurut ketentuan dalam Undang² No. 1 tahun 1957 hanya menjabat pimpinan Pemerintahan Umum di Daerah Jawa Barat. Adapun Anggota D.P.D. yang 5 orang lagi dipilih oleh dan dari lingkungan para anggota D.P.R.D., satu dan lainnya menurut sistem yang berlaku bagi masing² periode (DPRDS., DPRDP. dan DPRD. dalam rangka Undang² Pemilihan Umum).
- (3). Dalam lingkungan D.P.R.D. Sementara duduk sebagai anggota wakil² dari lingkungan 22 partai politik dan organisasi² massa dimana Partai Masjumi menduduki kursi terbanyak, yaitu 29 kursi. Partai² politik dan organisasi² massa lainnya umumnya hanya mempunyai 1 a 2 kursi saja atau paling banyak 4 kursi. Dalam pada itu dalam D.P.R.D. Peralihan dan dalam D.P.R.D. dalam rangka Undang² pemilihan Umum tertjat wakil² dari lingkungan 14 partai politik dan organisasi² massa dimana setjara ber-turut² Partai² Masjumi dan P.N.I. masing² menduduki 16 dan 14 kursi, disamping P.K.I. dan N.U. masing² mempunyai 7 dan 6 kursi. Partai² dan Organisasi massa lainnya hanya mempunyai 1 atau paling banyak 3 a 4 kursi saja dalam D.P.R.D. Daerah Jawa Barat.

Kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah.

- a. Kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Sementara dan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi diatur dalam Undang² No. 22 tahun 1948 (Bab III Bagian 1, 2 dan 3). Dalam pada itu kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka Undang² Pemilihan Umum diatur dalam Undang² No. 1 tahun 1957.
- b. Dalam pasal 23 dari Undang² No. 22 tahun 1948 disebutkan, bahwa D.P.R.D. mengatur rumah tangga daerahnya, sedangkan pasal 24 Undang² tersebut menyatakan, bahwa kewajiban Pemerintah (Pusat) di Daerah² yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah dapat diserahkan dengan Undang² kepada Pemerintah Daerah untuk dijalankan.
- c. 1. Kedua soal tersebut diatas untuk Propinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan Undang² No. 11 tahun 1950 (pasal 4). Sebagaimana kiranya telah dimaklum, menurut Undang² pembentukan Propinsi tersebut, yang akan menjadi urusan Propinsi adalah:

- (1). Urusan Umum.
 - (2). Urusan Pemerintahan Umum.
 - (3). Urusan Agraria.
 - (4). Urusan Pengairan, Djalan² dan Gedung².
 - (5). Urusan Pertanian, Perikanan dan Kooperasi.
 - (6). Urusan Kehewan.
 - (7). Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
 - (8). Urusan Perburuhan.
 - (9). Urusan Sosial.
 - (10). Urusan Pembagian (Distribusi).
 - (11). Urusan Penerangan.
 - (12). Urusan Pendidikan, Pengadjaran — Kebudayaan.
 - (13). Urusan Kesehatan.
 - (14). Urusan Perusahaan.
- c. 2. Dari sekian banyak urusan tersebut diatas, yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat adalah sebagai berikut:
1. Urusan Pertanian Rakjat, dengan P.P. No. 29 tahun 1951.
 2. Urusan Kehewan, dengan P.P. No. 30 tahun 1951.
 3. Urusan Perikanan Darat, dengan P.P. No. 31 tahun 1951.
 4. Urusan P.D. & K. (sepandjang mengenai urusan Sekolah² Rakjat dan Pendidikan Masjarakat) dengan P.P. No. 49 tahun 1951.
 5. Urusan Kesehatan, dengan P.P. No. 49 tahun 1952.
 6. Urusan Pekerdjaan Umum, dengan P.P. No. 18 tahun 1953.
 7. Urusan Perindustrian (sepandjang mengenai industri ketjil dan keradjinan di-rumah², (dengan P.P. No. 12 jo. 13 tahun 1954).
 8. Urusan Kehutanan dengan P.P. 64 tahun 1957.
 9. Urusan Perikanan Laut, dengan P.P. No. 64 tahun 1957.
 10. Urusan Karet Rakjat, dengan P.P. No. 64 tahun 1957.
 11. Urusan Sosial, dengan P.P. No. 5 tahun 1958.
 12. Urusan Perumahan, dengan P.P. No. 6 tahun 1958.
 13. Urusan Perburuhan, dengan P.P. No. 14 tahun 1958.
 14. Urusan Lalu-Lintas Djalan, dengan P.P. No. 16 tahun 1958.
- c. 3. Disamping penjerahan urusan² tersebut diatas belum terhitung lagi sifat dan luasnja lapangan kekuasaan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat, dimana pada umumnja hanya merupakan sebagian ketjil sadja dari urusan² keseluruhannja, yang akibatnja daerah tidak mungkin dapat mendjalankan wewenangnja sebagaimana yang diharapkan.

Tugas² baru yang sepiantasnja telah diberikan kepada daerah pada masa² itu seperti:

- (1). Soal desa pertjobaan,
 - (2). Soal bantuan keuangan kepada desa,
 - (3). Soal perumahan rakjat,
 - (4). Soal pembelian padi,
 - (5). Dan sebagainja,
- masih dibebankan kepada alat² Pemerintah Pusat.

Organisasi Sekertari Propinsi Djawa Barat dan Perkembangannja.

Sebagai aparatuur dari Pemerintahan Propinsi yang mengatur dan mendjalankan pekerdjaan² administratif se-hari² dalam lingkungan kekuasaan Pemerintahan Daerah, Sekertari Propinsi-pun tidak dapat terlepas dari perkembangan yang dialami oleh Pemerintah Propinsi sendiri. Dilihat dari segi riwayatnja, pembentukan organisasi sekertari mendahului pembentukan Pemerintahan Otonom Propinsi. Dapat dikatakan, bahwa pada masa Pemerintahan Propinsi belum terbentuk, untuk selama beberapa bulan Sekertari ini masih mendjadi satu dengan Kantor Gubernur yang pada masa itu (dalam bulan Maret tahun 1950) organisasinja tersusun atas 7 bagian jaitu:

1. Bagian Hukum.
2. Bagian Pemerintahan.
3. Bagian Urusan Keuangan.
4. Bagian Urusan Pegawai.
5. Bagian Daerah Otonom Bawahan.
6. Bagian Agraria.
7. Bagian Urusan Tanah Partikulir.

Pembentukan Sekertari Propinsi dan perkembangannja:

- (I). 1. Sekertari Propinsi Djawa Barat setjara formeel mulai berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950, jaitu pada saat terbentuknja Daerah Otonom Propinsi ini berdasarkan Undang² No. 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950. Dengan sendirinja Sekertari Propinsi ini baru dapat mendjalankan tugas-kewadjabannja dengan njata dari sedjak terbentuknja DPRDS. dan DPDS. Propinsi yang dilantik pada tanggal 30 Desember 1950. Berbarengan dengan bergantinja pimpinan Daerah, jaitu pergeseran functie Gubernur Kepala Daerah dari tangan Sdr. SEWAKA kepada tangan Sdr. SANOESI HARDJADINATA, maka oleh karena telah njata bahwa dualisme dalam pemerintahan didaerah tidak akan segera hilang, diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah buat memi-

sahkan kantor Gubernur dari Sekertari Propinsi. Ini terdjadi dalam tahun 1951.

Susunan organisasi Sekertari Propinsi disesuaikan dengan kebutuhan menurut luasnja (omvang) tugas-kewadajiban jang dipikulkan kepadanya. Atas dasar urgensi tersebut diatas, maka organisasi Sekertari diwaktu itu tersusun atas:

- (1). Bagian Hukum.
- (2). Bagian Urusan Keuangan.
- (3). Bagian Urusan Pegawai.
- (4). Bagian Sekertariat Kepala Daerah.
- (5). Sekertariat D.P.D.
- (6). Sekertariat D.P.R.D.
- (7). Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Otonom Bawahan.
- (8). Bagian Umum.

2. Sekertari dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu oleh seorang Administratur beserta stafnja, jang terdiri dari para Kepala Bagian. Pada masa pembentukannja, Sekertari Propinsi tidak mempunjai pegawai sendiri karena kesemuanja diwaktu itu masih termasuk pegawai Kantor Gubernur. Dalam pada itu perpindahan pegawai dari Kantor Gubernur ke Sekertari terus dilakukan, sehingga dengan demikian Sekertari lambat-laun mempunjai korps pegawai sendiri, kendatipun untuk 100% masih terdiri dari pegawai² negeri jang diperbantukan.

- (II). 1. Dengan ber-angsur² dilaksanakannja penjerahan beberapa urusan mengenai lapangan Pertanian Rakjat, Perikanan Darat, Kehewanan dan P.P. & K. oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi Djawa Barat, masing² dengan peraturan Pemerintah No. 29, 31, 30 dan No. 65 tahun 1951, jang semuanya terdjadi dalam tahun 1952, maka lapangan pekerdjaan Sekertari dengan sendirinja telah mendjadi lebih luas lagi. Dengan ini, maka garapan pekerdjaan Sekertari dibawah pimpinan Sekertaris mempunjai sifat koordinarend pula terhadap semua urusan jang telah masuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah Daerah. Berhubung dengan itu, guna sedapat mungkin dapat menampung dan menjelesaikan pelbagai matjam pekerdjaan setjara efficient, maka atas dasar Surat Keputusan D.P.D. Propinsi tanggal 29 Djuli 1952 No. 8/UPO/A/52, organisasi Sekertari Propinsi diperluas dengan dibentuknja suatu bagian baru, jaitu Biro Perekonomian. Dengan demikian susunan Sekertari dari saat itu tidak lagi terdiri atas 8 bagian melainkan terdiri atas 9 bagian, jaitu:

- (1). Bagian Hukum.
 - (2). Bagian Urusan Keuangan.
 - (3). Bagian Urusan Pegawai.
 - (4). Sekertariat Kepala Daerah.
 - (5). Sekertariat D.P.D.
 - (6). Sekertariat D.P.R.D.
 - (7). Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Otonom Bawahan.
 - (8). Bagian Umum.
 - (9). Biro Perekonomian.
2. a. Formasi Pegawai yang ditetapkan menurut Surat Keputusan D.P.D. Propinsi tersebut diatas memberi kemungkinan penempatan kepada sejumlah 565 orang pegawai termasuk Sekertaris pada Sekertari Propinsi.
 - b. Pada akhir tahun 1952 itu, formasi tersebut diatas terisi oleh 313 orang pegawai, atau merupakan 55% dari formasi. Patut pula kiranya untuk dikemukakan disini, bahwa dari sebanyak 313 orang pegawai tersebut diatas telah ada 20 orang yang telah menjadi pegawai Otonom penuh, sedangkan sisanya masih terdiri dari pegawai yang diperbantukan.
- (III). 1. Dalam tahun 1953 organisasi Sekertari Propinsi ini tidak mengalami perubahan dan tetap tersusun atas 9 bagian. Hanya penempatan (bezetting) pegawai disetiap Bagian ber-angsur² diisi dengan pegawai² baru menurut kebutuhan, sehingga pada akhir tahun 1953 jumlah pegawai pada Sekertari telah meningkat jadi 514 orang.
Dibandingkan dengan jumlah pegawai pada akhir tahun 1952, banyaknya itu meningkat dengan 201 orang.
2. Pada pertengahan tahun 1954, atas dasar surat Keputusan D.P.D. tanggal 25 Mei 1954 No. 2/UPO/A-I/54 organisasi Sekertari diperluas dengan dibentuknya 2 bagian baru, yaitu Bagian Inspeksi Keuangan dan Biro Sumber Penghasilan, sehingga dengan demikian susunan Sekertari Propinsi terdiri dari 11 Bagian.
- Dapat dikatakan bahwa perluasan organisasi Sekertari ini sangat rapat hubungannya dengan pelaksanaan penjerahan urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perindustrian dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Propinsi yang masing² terjadi dalam tahun 1953 dan tahun 1954, sehingga dengan demikian lapangan pekerjaan Sekertari telah sangat bertambah pula.

3. Formasi pegawai Sekertari Propinsi dalam tahun 1954 terdiri dari 696 orang diisi dengan 579 orang.
- (IV). a. Dalam tahun² berikutnya s/d akhir tahun 1959 jumlah Bagian dilingkungan Sekertari Propinsi Djawa Barat tetap 11 dan terdiri dari:
- (1). Sekertariat D.P.R.D.
 - (2). Sekertariat D.P.D.
 - (3). Bagian Urusan Hukum.
 - (4). Sekertariat Kepala Daerah.
 - (5). Bagian Urusan Keuangan.
 - (6). Bagian Urusan Pegawai.
 - (7). Bagian Umum.
 - (8). Bagian Pengawasan Keuangan D.O.B.
 - (9). Bagian Inspeksi Keuangan dan Pajak serta Sumber² Penghasilan.
 - (10). Biro Perekonomian.
 - (11). Biro Pemerintahan Umum.
- b. Formasi pegawai dalam tahun 1955 adalah 696 orang. Diisi oleh 624 orang.
- c. Sedjadar dengan terus bertambahnja pekerdjaan jang harus dijalankan oleh Sekertari, berhubung dengan berkembangnja Propinsi Djawa Barat sebagai Daerah Otonom, maka formasi pegawai dalam tahun 1956 ditambah mendjadi 765 orang. Formasi pegawai ini dalam tahun 1956 diisi dengan 702 orang.
- d. Pada akhir tahun 1959 jumlah pegawai seluruhnja tertjatat 736 orang, sedangkan formasinja tetap tidak berubah, jaitu 765 orang.

Perkembangan dalam periode Pantja-Warsa Manipol (1959-1964) dan dalam periode Mahkota Revolusi (1965).

Dengan berlakunja kembali Undang² Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, maka antara lain kehidupan Politik di Indonesia mendjadi berubah. Baik setjara lahiriah, maupun setjara bathiniah segenap Bangsa Indonesia kembali kcdjiwa Revolusi. Hal ini dipertegas lagi sedjak tanggal 17 Agustus 1959 dengan lahirnja Manifesto Politik Republik Indonesia.

Sebagai salah satu segi dari follow up Bangsa Indonesia kembali ke Undang² Dasar tahun 1945 ialah bahwa Lembaga² Pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah² jang dibentuk berdasarkan perundang-undangan

jang lama, karena menganut sistim leberal, diretool dan diganti dengan Lembaga² Pemerintahan baru berdasarkan Demokrasi Terpimpin.

Daerah Djawa Barat dengan sendirinja tidak dapat terlepas dari keadaan dan suasana seperti dikemukakan diatas. Sedjak itu pula masjarakat di Daerah Djawa Barat, chususnja sependjang mengenai Pemerintahan hingga kini mengenal 2 (*dua*) *Pemerintahan Daerah*, baik ditingkat I, maupun ditingkat II, jaitu:

1. *Pemerintahan Daerah Gaja Baru (dibentuk atas dasar Penpres No. 6 tahun 1959).*
2. *Pemerintahan Daerah Gotong Rojong (Dibentuk atas dasar Penpres No. 5 tahun 1960 disempurnakan).*

Pemerintahan Daerah Djawa Barat Gaja Baru.

- (1). Masa djabatannja berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1959 sampai tanggal 10 Desember 1960.
- (2). Pemerintah Daerah ini tersusun atas:
 - a. Bagian Eksekutif, terdiri dari Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Anggauta Badan Pemerintah Harian (B.P.H.).
 - b. Badan Legislatief jaitu D.P.R.D. Gaja Baru dimana Gubernur Kepala Daerah duduk sebagai Ketua.
- (3). D.P.R.D. Gaja Baru beranggautakan 75 orang, tersusun dengan komposisi sebagai berikut:

a. Golongan Islam:

(1). Masjumi	: 20 orang	
(2). N.U.	: 7 orang	
(3). P.S.I.I.	: 3 orang	
		30 orang.

b. Golongan Nasionalis:

(1). P.N.I.	: 11 orang	
(2). I.P.K.I.	: 3 orang	
(3). Gcrpis	: 1 orang	
(4). P.R.N.	: 1 orang	
(5). P.R.D.	: 1 orang	
(6). Prim.	: 1 orang	
		18 orang.

c. Golongan Marxisme:

(1). P.K.I.	: 11 orang	
(2). Murba	: 2 orang	
(3). P.S.I.	: 2 orang	
		15 orang.

d. Golongan² lainnja:

(1). Himpunan Tani Miskin :	2 orang	
(2). Baperki :	1 orang	
(3). Akoma :	1 orang	
(4). Partai Buruh :	1 orang	
(5). P3.R.I. :	1 orang	
(6). Front B.T.I. :	1 orang	
(7). Tani Mukti :	1 orang	
(8). Non Partai :	3 orang	
(9). G.P.P.S. :	1 orang	
	<u>12 orang</u>	
Djumlah semuanya		75 orang.

- (4). Menurut ketentuannya Gubernur Kepala Daerah dalam Badan Eksekutif mempunyai 6 orang Anggota B.P.H. sebagai pembantunya. Akan tetapi pada akhirnya selama masa jabatannya hanya dibantu oleh 3 (tiga) orang Anggota B.P.H., yaitu 1 orang wakil dari P.K.I. 1 orang wakil dari N.U. dan 1 orang wakil dari Murba, 2 orang wakil dari Masjumi dan 1 orang wakil dari P.N.I. menolak untuk diangkat sebagai Anggota B.P.H. dengan alasan mereka tidak dapat melepaskan keanggotaannya dari Partainya masing².

Pemerintahan Daerah Gotong Rojong.

- 1). Masa jabatannya berlangsung dari tanggal 10 Desember sampai *sekarang*.
- (2). Pemerintahan Daerah Gotong-Rojong ini sama susunannya dengan Pemerintahan² Daerah jang lama, terdiri dari:
 - a. Badan Eksekutif, dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah dengan dibantu oleh Anggota² B.P.H.
 - b. Badan Legislatif, yaitu D.P.R.D.-G.R. diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). D.P.R.D.-G.R. menurut ketentuannya beranggotakan 75 orang, tersusun dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. *Golongan Politik*: 34 orang
 1. Golongan Islam:
 - (a). N.U. : 7 orang
 - (b). P.S.I.I. : 4 orang
 - (c). Perti : 1 orang 12 orang
 2. Golongan Nasionalis:
 - (a). P.N.I. : 8 orang
 - (b). I.P.K.I. : 3 orang
 - (c). Partindo : 1 orang 12 orang

3. Golongan ~~Marxisme~~:

- (a). P.K.I. : 8 orang
- (b). Murba : 2 orang 10 orang

b. *Golongan Karya*: 38 orang

1. Sub Golongan bersendjata:

- (a). Angkatan Darat : 5 orang
- (b). Kepol. Negara : 2 orang
- (c). OPR./OKD. : 1 orang
- (d). Veteran : 1 orang 9 orang

2. Sub Golongan Kerochanian:

- (a). Alim Ulama Islam: 4 orang
- (b). Protestan : 1 orang
- (c). Katholik : 1 orang 6 orang

3. Sub Golongan Pembangunan Spirituil:

- (a). Tjendikiawan
Pendidikan : 2 orang
- (b). Wanita : 1 orang
- (c). Pemuda : 1 orang
- (d). Angkatan 45 : 1 orang
- (e). Seniman : 1 orang
- (f). Wartawan : 1 orang 7 orang

4. Sub Golongan Pemb. Materiil:

- (a). Buruh : 5 orang
- (b). Tani : 5 orang
- (c). Kooperasi : 3 orang
- (d). Pengusaha Nasional: 3 orang 16 orang

Djumlah semua : 72 orang

TJATATAN: Menurut ketentuan Anggauta D.P.R.D.-G.R. berdjumlah 75 orang, semula 3 tempat lagi disediakan untuk Partai Politik P.R.I.M., P.R.N. dan partai buruh, tetapi karena partai² tersebut tidak diakui oleh Pemerintah, maka kursi² dalam D.P.R.D.-G.R. itu djadi tidak terisi.

- (4). Masa djabatn Pemerintah Daerah Djawa Barat, baik sebagai Pemerintah Daerah Gaja-Baru, lebih² sebagai Pemerintah Daerah Gotong-Rojong ditandai oleh kesibukan² jang luar biasa serta djauh berbeda

serta lebih pesat dari jang telah lampau, satu dan lainnja dalam hubungan dengan tingkatan djalannja Revolusi jang kian hari kian meningkat.

- (5). Data^a atau kedjadian^a jang penting, sebagai gelombangnja Revolusi jang terus meningkat serta jang dengan sendirinja meningkat dan/ atau mempengaruhi djuga djalannja Pemerintahan di Daerah^a, jang penting untuk selalu mendapat perhatian kita, jaitu:
- a. Ketetapan^a M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 masing^a tentang Manipol sebagai Garis^a Besar Haluan Negara dan tentang Garis^a Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 s/d 1968, jang kemudian dipertegas dengan (1) Ketetapan M.P.R.S. No. IV tahun 1963 tentang: Pedoman^a Pelaksanaan Garis^a Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan dan (2) Resolusi M.P.R.S. No. I tahun 1963 tentang: Amanat dan Ichisar Tahunan Presiden Mandataris M.P.R.S. mengenai Pelaksanaan Ketetapan^a M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960.
 - b. Pengajunan tjangkul pertama oleh Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada tanggal 1 Djanuari 1961 sebagai tanda dimulainja pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama.
 - c. Tri Komando Rakjat (Tri-Kora), jang diumumkan oleh Presiden Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 19 Desember 1961 (berisi Komando):
 - (1). Gagalakan pembentukan Negara boneka Papua.
 - (2). Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
 - (3). Bersedia-sedia untuk mobilisasi umum.
 - d. Persetudjuan Republik Indonesia — Belanda dengan perantaraan P.B.B. dimana Belanda pada dasarnja menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia terdjadi pada tanggal 15 Agustus 1962.
 - e. Dalam bulan Mei 1962 pemimpin gerombolan D.I./T.I.I. Kartosuwirjo tertangkap. Ini berarti penting bagi kehidupan segenap lapisan masjarakat di Djawa Barat; bertalian dengan telah pulihnja kembali keamanan, rakjat jang sedjak lama harus meninggalkan kampung-halamannja, dengan leluasa dapat kembali ke tempat tinggalnja serta dapat menggarap tanah-ladangnja dengan tentram.
 - f. Tanggal 1 Oktober 1962 Irian Barat oleh Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia melalui P.B.B., jang pada tanggal 1 Mei 1963 setjara mutlak Irian Barat oleh P.B.B. diserahkan kepada Republik Indonesia.

- g. Bertambah meningkatnja Revolusi dengan diumumkannja „DWIKORA” pada tanggal 3 Mei 1964 oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, jang berisi:
 - (1). Memperkokoh ketahanan Revolusi Indonesia.
 - (2). Membantu perjuangana Revolusioner rakyat² di Malaja, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei.
 - h. Pada tanggal 17 Agustus 1964 Presiden/Pemimpin Besar Revolusi mengharuskan kita untuk *bervivere-pericoloso* atas dasar prinsip berdiri diatas kaki sendiri di segala bidang, terutama dibidang ekonomi.
- (6). Kesemuanja itu dijadikan arah dan pedoman didalam Pemerintahan Daerah Djawa Barat mendjalankan karyanja. Sebagai salah satu gambaran dari keadaan jang terdjadi di Djawa Barat ialah tentang pekerdjaan² jang bersangkutan-paut dengan penyelesaian TRIKORA dan pemulihan keamanan, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan tenaga² dalam kesatuan² pertahanan sipil untuk menghadapi segala kemungkinan jang timbul didalam pelaksanaan TRIKORA.
 - b. Pengerahan massa dalam bentuk O.P.R.² dan barisan² pagar betis sebagai pelaksanaan Doktrin Perang Wilajah.
 - c. Seluruh pengerahan potensi tersebut diatas telah meminta pembiayaan sebanyak $\pm 75\%$ dari budget Negara; sehingga pada tahun² terakhir ini tidak aneh apabila kita, baik di Pusat maupun di Daerah, telah mengalami defisit anggaran belandja jang besar sekali.
 - d. Sebagai akibat dari pada keadaan seperti dikemukakan diatas, maka volume uang jang beredar bertambah dengan pesatnja, sedangkan supply serta peredaran barang, baik produksi dalam negeri, maupun barang² impor, mengalami kemerosotan. Dengan tidak adanya keseimbangan antara tambahnja volume uang dengan persediaan/supply serta peredaran barang, maka gejala itu telah menimbulkan inflasi dibidang moneter. Karena itu pula, disebabkan uang jang tersedia untuk pembiayaan pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan meningkatnja harga barang jang diperlukan, maka disegala bidang dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdjadi kematjetan.
 - e. Dengan pulihnja kembali keamanan di Daerah Djawa Barat chususnja (sedjak bulan Djuni 1962) di Indonesia umumnja serta kembalinja Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi, maka tahun 1962 ini merupakan tahun Kemenangan.

f. Untuk mengkonsolidasikan kemenangan² tersebut, maka semendjak pulihnja keamanan pada pertengahan tahun 1962, dengan dipelopori oleh Kodam VI/Siliwangi beserta seluruh slagordenja telah dilaksanakan usaha² dibidang pembangunan. Tidak sedikit daerah² jang tadinja rusak telah dapat direhabilitir. Usaha² bhakti dari Kodam VI/Siliwangi ini telah dapat menumbuhkan kembali semangat gotong-rojong.

- (7). Khususnja sepanjang mengenai usaha mengkonsolidasi kedalam, maka baik mengenai fungsi, maupun mengenai kegiatannya, Sekertari Pemerintah Daerah Djawa Barat sebagai aparatuur Daerah, diarahkan kepada tingkat² djalannya perjuangan/Revolusi. Bertalian dengan itu, maka telah pula dilaksanakan pengorganisasian dalam tubuh Sekertari Pemerintah Daerah itu, a.l. dalam hubungan dengan diserahkannya Urusan Pemerintahan Umum (Pamong-Pradja) oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat.
- (8). Diarahkan kepada kenyataan bertambah luasnja lapangan tugas Sekertari Pemerintah Daerah Djawa Barat, maka djumlah penempatan pegawai dilingkungannya djadi bertambah pula.

Organisasi Sekertari Pemerintah Daerah Djawa Barat.

Tersusun sebagai berikut:

Biro I meliputi: 1. Bagian Pemerintahan.
2. Bagian Ekonomi Sosial
3. Bagian Pembangunan.

Biro II meliputi: 1. Bagian Urusan Keuangan.
2. Bagian Pajak Daerah dan Sumber Penghasilan.
3. Bagian Perusahaan Daerah.

Biro III meliputi: 1. Bagian Urusan Kepegawaian.
2. Bagian Tundjangan dan Pensiun.
3. Bagian Pendidikan dan Latihan.
4. Bagian Kesedjahteraan Pegawai.

Biro IV meliputi: 1. Bagian Hukum.
2. Bagian Politik dan Penerangan.
3. Bagian Perpetaan dan Dokumentasi/Perpustakaan.

Inspektorat Pengawasan Keuangan dan Pengawasan Umum,
meliputi: 1. Bagian Pengawasan Keuangan Daerah Tingkat II.
2. Bagian Pengawasan Keuangan Djawatan² Daerah Tk. I.
3. Bagian Pengawasan Umum.

Staf Sekertariat Daerah meliputi:

1. Pembantu Khusus Gubernur Kepala Daerah.
2. Urusan D.P.R.D.-G.R.
3. Bagian Tata Usaha Umum.
4. Bagian Urusan Umum.

b. Keadaan formasi dan pengisian pegawai dilingkungan Sekertari Pemerintah Daerah sedjak tahun 1960 adalah sebagai berikut:

Tahun	Formasi	Pengisian
1960	1 9 9 7	8 2 5
1961	1 9 9 7	8 1 3
1962	1 9 9 7	8 6 2
1963	1 5 7 5	1 1 2 6
1964	1 5 7 5	1 4 3 1

Aktivitas Pemerintah Daerah Djawa Barat dibidang Pemerintahan a.l. meliputi:

(A). *Keputusan² dari Konperensi² para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Djawa Barat selama tahun 1964*

1. Pada rapat dinas tanggal 20 s/d 21 Maret 1964.

Telah dikeluarkan beberapa keputusan dan pernyataan sbb.:

- a. Pengaturan pengintegrasian Pemerintah Daerah dengan Front nasional dalam rangka kepemimpinan jang berpusat pada Kepala Daerah.
- b. Mendjamin adanya kesatuan Komando dari Pusat sampai ke-desa² dalam bidang² jang harus dipetjahkan dan diselesaikan setjara kolektif oleh Pantja Tunggal dengan tidak mengurangi daya fungsionering jang maksimal dari masing² slagorde anggauta Pantja Tunggal.
- c. Bertekad bulat untuk melaksanakan keputusan rapat Presidium Kabinet Kerdja dengan para Tjatur Tunggal di Djakarta tanggal 11 s/d 14 Maret 1964 dibidang Pemerintahan dengan policy dan kerangka pelaksanaan sebagai berikut:
 - Menjelesaikan penjatuan aparatuur Pemerintah Pusat dengan aparatuur Pemerintah Daerah dengan berlandaskan Undang² No. 1 tahun 1957 beserta perubahan²-nja.
 - Mempertjepat realisasi penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan.

- Memperbaiki struktur Desa.
 - Pembiajaan Urusan² Pemerintahan Umum jang diserahkan pada Pemerintah Djawa Barat.
 - Penjelesaian masalah Perimbangan Keuangan.
- d. Dalam waktu djangka pendek mengusahakan seluruh Djawa Barat untuk dapat swa-sembada dalam bidang pangan setjara overall, dengan mendjadikan Daerah Djawa Barat Utara sebagai pilot-projek Nasional untuk mendjadi Daerah swa-sembada sendiri serta Daerah supply Djakarta-Raya, dengan setjepat mungkin membentuk Badan atau Lembaga serta gagasan²-nja untuk dapat menguasai produksi dan penjalurannya setjara efektif, disamping indoktrinasi dalam bentuk penerangan untuk merubah kebiasaan rakjat dalam menjesuaikan dirinja dalam perobahan² dibidang produksi, gizi dsb.
 - e. Dalam waktu djangka pandjang melaksanakan usaha mengatasi segala matjam kepintjangan jang menjangkut bidang sosial-ekonomi masjarakat tani jang berbentuk idjon, penghisapan² dan sebagainya dengan djalan menerbitkan kembali lumbung Desa, Bank Desa serta mempermudah penjaluran kredit Pemerintah untuk meningkatkan dan penguasaan produksi, dan menggiatkan usaha² penghidjauan, penjempurnaan dan perluasan pengairan, transmigrasi, perluasan areal tanah pertanian dsb.
 - f. Didaerah Djawa Barat Selatan diadakan usaha² untuk intensifikasi pertanian serta memperluas areal tanah pertanian dan peternakan, disesuaikan dengan kebutuhan² setempat dan diselaraskan dengan kebutuhan² dalam djangka pendek atau djangka pandjang.

2. Pada Rapat Dinas tanggal 11 s/d 13 Djuni 1964.

- a. Mengeluarkan Pernyataan jang berbunji:
 - Mendukung sepenuhnya dan tanpa reserve seluruh kebidjaksanaan P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam penjelesaian sengketa masalah projek neo-kolonialisme Malaysia.
 - Siap sedia melaksanakan segala komando P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam rangka konfrontasi dan penjelesaian masalah projek neo-kolonialisme Malaysia.

b. Mengeluarkan Keputusan jang berbunji:

Memperhebat persatuan Nasional dan daya tahan serta kemampuan Bangsa Indonesia dalam ber-revolusi khususnya di Daerah Djawa Barat, dengan tindakan² membangun didalam segala bidang terutama dibidang kemakmuran rakjat dan kepemimpinan di Daerah jang positif, produktif dan progressief revolusioner dengan perintjian sbb.:

— Dibidang Pemerintah dan Politik:

Menjempurnakan kepemimpinan di Daerah dengan djalan penjempurnaan lembaga² serta alat² kerdja-sama Pantja Tunggal dan membina segala potensi kemasjarakatan dalam hubungannya dengan kenegaraan dan pemerintahan demi terwujudnja kegiatan politik jang sehat, d.a. dengan djalan pengintegrasian disegala bidang.

— Dibidang Pembangunan dan Ekonomi:

Berusaha mempertinggi produksi pangan berhubung dengan tantangan perkembangan djumlah penduduk dan rongrongan musuh² Revolusi Bangsa Indonesia dengan djalan intensifikasi dan ekstensifikasi segala usaha dibidang pembangunan dan ekonomi.

— Dibidang Sosial:

Mengintegrasikan lembaga Sosial Desa dengan Organisasi² kemasjarakatan desa lainnya untuk meninggikan efisiensi dalam pengerahan funds and forces guna pembinaan dan pembangunan masjarakat desa dalam menghadapi persoalan² gelandangan, transmigrasi, lembaga² kemasjarakatan, kesehatan dan kebersihan dan kesedjahteraan masjarakat.

3. Pada Rapat Dinas tanggal 4 s/d 6 September 1964.

Mengeluarkan pernyataan kebulatan tekad, berbunji sebagai berikut:

- a. Bertekad bulat melaksanakan TAVIP karena ternjata konsekwen anti Imperialisme, Kolonialisme, Neo-Kolonialisme dan Feodalisme didalam segala bentuk dan manifestasinya.
- b. Seluruh Slagorde Pemerintah dan seluruh Masjarakat Djawa Barat tergalang dalam satu front jang kokoh-kuat untuk mengembangkan, mengamalkan dan mengamankan TAVIP sepenuhnya setjara konsekwen.

c. Siap-siaga didalam rangka mengamankan, mempertahankan dan menjelesaikan Revolusi Indonesia, dengan menjusun ketahanan, pembinaan dan pembangunan baik kedalam maupun keluar, dengan berpegang kepada azas² pokok:

- (1). Swadaja — Swakarya.
- (2). Swa — Sembada.
- (3). Daja mampu dan daja guna semesta.
- (4). Kepemimpinan setjara gotong-rojong dan merata.
- (5). Pantang mundur dibidang:
 - (a) Ideologi.
 - (b). Politik/Pemerintahan.
 - (c). Ekonomi.
 - (d). Sosial.
 - (e). Kebudayaan.
 - (f). Militer/pertahanan rakjat semesta.

4. Pada Rapat dinas tanggal 6 Oktober 1964.

Telah dikeluarkan pernyataan dan kebulatan tekad:

Setjara konsekwen, bagaimana banjaknja dan besarnja kesulitan² jang harus dihadapinja, bertekad mempertjepat pelaksanaan Landreform di Djawa Barat dengan mengerahkan segala potensi dalam masjarakat dan dengan bantuan² jang kongkrit dan positif.

(B). *Pembentukan Staf Harian Bersama Sapta Tunggal Djawa Barat.*

Untuk mengkonsolidir segala kemenangan jang sudah tertjapai dan demi tertjiptanja penggalangan persatuan dan kesatuan jang kokoh dan keutuhan dari segenap kekuatan² revolusioner dalam rangka pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat guna melaksanakan Manipol, maka Sapta Tunggal (dahulu Pantja Tunggal) Djawa Barat telah mengeluarkan suatu ketetapan dan pedoman pelaksanaan pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat dan pembentukan suatu staf Harian Bersama Sapta Tunggal Djawa Barat.

(C). *Ikrar Bersama Sapta Tunggal Djawa Barat dan Pimpinan 10 Partai Politik.*

Sebelum diadakan appel memperingati para Pahlawan pada tanggal 10 Nopember 1964, Sapta Tunggal Djawa Barat dan Pimpinan Sepuluh Partai Politik Djawa Barat, dalam hikmah Hari Pahlawan, dengan didjiwai TAVIP dan semangat pelaksanaan Dwikora didalam rangka mengamankan, mengamalkan dan mengembangkan Pantja

Sila, Manipol/Usdek serta Pedoman² Pelaksanaannya, telah menjetuskan Ikrar bersama, ikrar mana maknanya sesuai dengan Deklarasi Bogor. Ikrar Bersama ini harus dijadikan landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan over-all planning Djawa Barat, ialah antara lain Pola Ideologis, Pola Politis, Pola Ekonomis, Pola Kebudayaan, Pola Ketahanan dan Keamanan yang mentjerminkan land-use, Perentjanaan Penyebaran Penduduk (Transmigrasi), Land-reform, Bussinessreform & Tradereform yang tepat. Dengan demikian kita mempunyai over all planning yang memenuhi syarat² Sosial Support, Sosial Participation, Sosial Control, Sosial Understanding dan Sosial Responsibility.

Deklarasi Bogor.

Pada tanggal 12/13 Desember 1964 bertempat di Istana Bogor dibawah pimpinan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi, oleh pimpinan pusat dari seluruh partai² politik telah dikeluarkan suatu pernyataan bersama kebulatan tekad dalam menghadapi persoalan² penting yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, terutama dalam rangka mengsucceskan dan memperhebat ketahanan Revolusi Indonesia, mengembangkan aksi revolusioner dan pengganjangan Nekolim serta kontra-revolusi dan subversi dan memupuk serta memelihara persatuan nasional yang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.

(D). TAVIP dalam Pemerintahan.

Suatu hal yang penting sebagai bekal dalam tahun 1965 ini adalah Amanat Pemimpin Besar Revolusi yang terkenal dengan pidato TAVIP, yang tetap harus mendjiwai perjuangan kita pada waktu² ini dan pada hari² selanjutnya, bukan saja mendjiwai para pelaksana pemerintahan, tetapi pula mendjiwai seluruh rakyat yang memang telah diintegrasikan atau lebih tepat, mengintegrasikan diri dengan pemerintah.

TAVIP dalam bidang Pemerintahan meliputi:

1. Pengajoman, ialah sumber abadi dari kekuatan idiil dan bathin serta tenaga pembangkitan dan penggerak kepertjajaan masyarakat pada dirinya sendiri yang pula harus menghasilkan ketjintaan kepada semua kepahlawanan.
2. Open Management, ialah pembina kearah penggalangan seluruh kekuatan² Nasional progresif revolusioner, guna mentjapai tata masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila.
3. Follow-up Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9/1964, ialah instruksi untuk melakukan penjegaran dalam aparatur² peme-

rintah untuk meningkatkan kewaspadaan Nasional dan ketahanan Revolusi serta mempertinggi mutu dan efficiency kerja.

Ketiga perintah diatas memang merupakan faktor² yang penting dalam kita menyesuaikan usaha/tindakan kita dalam bidang Pemerintahan dengan jiwa dan semangat tahun *Vivere Pericoloso*.

Pada dasarnya didalam bidang Pemerintahan pada umumnya dan Pemerintahan Daerah pada khususnya, jiwa tindakan dan usaha kepemimpinan Pemerintahan dalam segala bidang, harus ditujukan kepada tertjapainya penggalangan serta penggalian semua tenaga dan kekuatan yang positif, dinamis, progresif dan revolusioner untuk mentjapai tujuan² revolusi kita, sesuai dengan derap langkah dan geloranya revolusi.

- Mengenai unsur Pengajoman, dalam rangka usaha kita menyesuaikan kepemimpinan pemerintahan didaerah dengan jiwa TAVIP, unsur ini harus merupakan simbul kepemimpinan Daerah yang berintikan jiwa yang dinamis, guna meningkatkan gelora Romantika Revolusi serta dibarengi dan dilengkapi dialektica, serta pula memberikan fungsi perlindungan terhadap ketidak-adilan dan kedoliman dan menghasilkan rasa keten-traman dan kepuasan.
- Mengenai Open Management, dapat dikatakan, bahwa unsur ini adalah bentuk tata-tjara yang tepat dalam menggaling semua kekuatan progresif revolusioner guna mentjapai tujuan revolusi se-baik²-nja, karena Open Management pada dasarnya mendjamin adanya prinsip² integrasi dan koordinasi dari pada semua kekuatan progresif revolusioner.
- Tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9/1964, dapatlah dikemukakan, bahwa didalam amanat TAVIP, Pemimpin Besar Revolusi telah menandakan djuga, bahwa untuk berhasil/baiknja usaha² perdjongan/revolusi itu perlu segera diadakan re-tooling terhadap segala aparatur revolusi dalam semua bidang dan seluruh tingkatan. Karenanja kitapun berpendapat, bahwa Instruksi tersebut perlu dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh kebidjaksanaan.

Maka sehubungan dengan ini pula P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi atas dasar pertimbangan, bahwa demi keutuhan persatuan dan kekuatan seluruh kekuatan Nasional yang progresif-revolusioner dan berhasilnja pelaksanaan Dwikora dewasa ini, gejala² perpetjahan diantara kekuatan Nasional tersebut yang tim-

bul dewasa ini perlu ditjegah dan dihindarkan, telah mengeluarkan Instruksinja No. 1/1965 tanggal 6 Djanuari 1965, jang menetapkan untuk sementara waktu Partai Murba baik Pimpinan Pusatnja, Daerah², Tjabang² dan sebagainya, maupun anggota² termasuk organisasi² massa dan badan² jang lainnja jang berinduk dan bernaung pada Partai Politik Murba dilarang melakukan kegiatan apapun. Sebagai follow-up dari pada Instruksi Presiden tersebut, Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat telah mengeluarkan surat Keputusan No. 40/SK/GKDH/Staf/65 tanggal 12 Djanuari 1965, jang memutuskan untuk membebaskan (dinon-aktifkan) untuk sementara petugas² Partai Politik Murba pada Dewan Legilsatif (D.P.R.D.-G.R.), Badan Eksekutif (B.P.H.) Daerah Tingkat I Djawa Barat dan Daerah Tingkat II dan semua Lembaga² dan Panitia² jang bersifat resmi dan/atau jang bersifat semi resmi (semi Pemerintah), baik jang didirikan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

- (E). *Pelaksanaan Pantja Program Front Nasional berhubung dengan konfrontasi disegala bidang.*

Schubungan dengan keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa², maka untuk mempertinggi kewaspadaan Nasional dalam rangka menghadapi konfrontasi terhadap segala djenis proyek Nekolim, kontra revolusi dan subversi, dirasakan sangat perlu untuk melaksanakan Pantja Program Front Nasional dengan lebih seksama dan dengan penuh kesadaran.

- (F). *Penetapan Presiden No. 52/1964 tentang Pepelrada.*

Masalah pelaksanaan Pen. Pres. No. 52/1964 mengenai Penguasaan Pelaksanaan Dwikora Daerah (Pepelrada) di Djawa Barat tidak menimbulkan ketegangan², berkat pengertian Panglima Kodam VI/Siliwangi, jang mendapat dukungan dari para Anggota Sapta Tunggal lainnja serta pemimpin² 9 partai politik di Djawa Barat. Pendirian Panglima tersebut pada azasnja adalah sebagai berikut:

- a. Tertib Sipil harus dipertahankan dan diperlantjar djalannja dengan Kepala Daerah tetap djadi Ketua Sapta Tunggal.
- b. Azas kegotong-rojongan dipegang seteguh-teguhnya.
- c. Menggiatkan Staf Harian Bersama Sapta Tunggal jang sudah ada.
- d. Wewenang Pepelrada, a.l. externering, internering, dan lain² langsung dipegang oleh Panglima, tanpa didelegasikan kepada instansi bawahan.

Pembagian Administratif.

(A). *Dalam periode 1945 — 1955 :*

1. Nama Propinsi:
2. Djumlah dan Nama² Keresidenan:

3. Djumlah dan Nama² Kotapradja:

4. Djumlah dan Nama² Kabupaten:

DJAWA BARAT

1. Banten
2. Djakarta
3. Bogor
4. Priangan
5. Tjirebon
1. Bogor
2. Bandung
3. Tjirebon
1. Serang
2. Pandeglang
3. Lebak
4. Tangerang
5. Djatinegara
6. Krawang
7. Purwakarta
8. Bogor
9. Sukabumi
10. Tjiandjur
11. Bandung
12. Sumedang
13. Garut
14. Tasikmalaja
15. Tjiamis
16. Tjirebon
17. Kuningan
18. Indramaju
19. Madjalengka

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 5. Djumlah Kewedanaan | : | 108 buah |
| Djumlah Ketjamatan | : | 349 buah |
| Djumlah Desa | : | 3802 buah |

(B). *Dalam periode 1955 sampai sekarang.*

1. Nama Daerah Tingkat I:
2. Nama Keresidenan:

DJAWA BARAT

1. Banten
2. Djakarta
3. Bogor
4. Priangan
5. Tjirebon

3. Djumlah dan Nama² Daerah Tingkat

II/Kotapradja:

A. Kotapradja:

1. Bogor
2. Sukabumi
3. Bandung
4. Tjirebon

B. Daerah Tingkat II:

1. Serang
2. Pandeglang
3. Lebak
4. Tangerang
5. Bekasi
6. Krawang
7. Purwakarta
8. Bogor
9. Sukabumi
10. Tjiandjur
11. Bandung
12. Sumedang
13. Garut
14. Tasikmalaja
15. Tjiamis
16. Tjirebon
17. Kuningan
18. Indramaju
19. Madjalengka

4. Djumlah Kewedanaan	:	108 buah
Djumlah Ketjamatan	:	356 buah
Djumlah Desa	:	3801 buah

TJATATAN

1. Sesuai dengan instruksi Jang Mulia Menteri Dalam Negeri No. 4/MDM/1964 tanggal 12 Maret 1964 dan Surat Perintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat No. 1875/L-47/B-I/PEG/1964 tanggal 1 April 1964; sedjak pertengahan 1964 Keresidenan dihilangkan dan fungsi² tersebut diganti dengan Penghubung² Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djawa Barat.
2. Idem, Kewedanaan² dihilangkan untuk sebagian fungsi ini diganti sebagai penghubung Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, Pelaksanaan diselenggarakan baru bulan April 1965.
3. Dalam tahun 1965 ini Djawa Barat sedang mempersiapkan untuk pembentukan Daerah Tingkat III setjara ber-angsur².

Keuangan Daerah.

Sebagaimana tertantum dalam salah suatu ketentuan dalam Undang² No. 22 tahun 1948, Anggaran pendapatan dan belandja pertama dari Daerah ditetapkan dengan Undang²”.

Undang-Undang tersebut sampai kini tidak kundjung datang, sedangkan sedianja pengharapan dengan dikeluarkannja Undang² No. 32 tahun 1956, jaitu Undang² Perimbangan Keuangan pada permulaan tahun 1957 Daerah akan dapat keluar dari lingkaran kekangan keuangan Pemerintah Pusat, ternyata hal itu masih tetap merupakan idam-idaman sadja. Sistim „sluitpost” jang terus-menerus berlaku pada dasarnya tidak memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur rumah-tangganya, karena ketentuan besarnya subsidi tidak berdasarkan keperluan Daerah, melainkan berdasarkan situasi keuangan Negara keseluruhan. Untuk memelihara situasi keuangan Negara, Pemerintah menetapkan plafond sedjumlah keuangan jang dapat diberikan kepada Daerah.

Djadi Daerah hanya dapat bekerja selama plafond subsidi itu mengizinkan. Diluar itu adalah tidak mungkin. Dengan lain Perkataan, perkembangan Pemerintah Daerah didalam mengatur dan mengurus rumah-tangganya dikuasai oleh keadaan keuangan.

Dari sumber manakah Daerah akan mendapat modal untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya itu ?

Sumber² penghasilan Daerah ialah:

- a. Pajak dan retribusi Daerah (Undang² No. 1 tahun 1957 pasal 56 memberikan wewenang kepada D.P.R.D. untuk mengadakan pajak dan retribusi Daerah. Dalam hal ini diatur berdasarkan Undang² Darurat No. 11 dan 12 Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 dan 57).
- b. Pajak² Negara dan penghasilan lain jang diserahkan kepada Daerah (satu dan lainnja, jang diatur dalam Undang² No. 32 tahun 1956, jaitu Undang² Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah). Tetapi Undang² ini sampai kini tidak/belum dilaksanakan.
- c. Daerah berhak mengadakan perusahaan. Djika daerah langsung menjalankan perusahaan itu, maka sifat perusahaan itu ialah „overheids-bedrijf”. Tetapi Daerah dapat djuga ikut dalam Perusahaan Swasta sebagai peserta/pemegang saham.
- d. Pajak verponding, pajak rumah-tangga, pajak kendaraan bermotor (P.P. No. 3 tahun 1957).
- e. Pajak peralihan, pajak upah, pajak meterai, masing² minimum 75% dan maksimum 90%.
- f. Sebagian dari penerimaan pajak kekayaan dan pajak perseroan menurut persentase jang ditetapkan tiap² tahun dengan Peraturan Pemerintah.

- g. Sebagian dari penerimaan bea-masuk, bea keluar dan tjukai dan bagi Daerah jang menghasilkan diberikan pula tambahan dari penerimaan bea-keluar dan tjukai jang dihasilkan di Daerah itu. Adapun besarnya persentase diatur dalam Peraturan Pemerintah tiap^a tahun.
- h. Gandjaran untuk usaha^a tertentu jang diatur dan ditentukan dengan P.P. No. 4 tahun 1957.
- j. Sumbangan bagi Daerah jang njata tidak mampu membiayai urusan rumah-tangganya jang biasa (P.P. No. 4 tahun 1957).

Akan tetapi karena pada kenjataanja uang jang diterima oleh Daerah tiap tahun dari berbagai matjam sumber seperti diperintji diatas tidak/ belum tjukup banjaknya dapat kiranya dikatakan, bahwa segala kekuasaan dan tugas jang didjalankan oleh Pemerintah Daerah sampai kini tidak mungkin dapat didjalankan sebagaimana jang diharapkan. Karena itu pula maka tiap tahun Anggaran Keuangan Daerah Djawa Barat harus mengalami defisit.

Adapun gambaran Keuangan Daerah dari sedjak tahun 1958 sampai dengan tahun 1963 adalah sebagai berikut:

Ichtitisar tentang Penerimaan dan Pengeluaran menurut perbitungan Anggaran tahun^a dinas 1958 sampai dengan 1963

	Tahun Dinas	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
<i>Dinas Biasa</i>	1953			
Sisa ^a tahun	s/d			
Dinas	1957	—	—	56.781.391,73
	1958	536.252.812,03	496.008.156,69 +	40.244.655,34
	1959	694.984.815,18	672.885.524,75 +	22.099.290,43
	1960	1.160.736.169,15	934.711.567,76 +	226.024.601,39
	1961	931.307.092,38	1.230.507.968,14 —	299.200.875,76
	1962	1.480.929.876,22	1.526.100.184,52 —	45.170.308,30
	1963	2.996.563.807,35	3.306.100.410,13 —	309.536.602,78
<i>Dinas Luar</i>	1953			
<i>Biasa</i>	s/d			
Sisa ^a Tahun	1957	—	— +	10.471.151,59
Dinas.	1958	49.096.022,31	60.346.305,12 —	11.250.282,81
	1959	267.183.199,68	75.789.503,97 +	191.393.695,71
	1960	100.438.346,34	266.471.007,68 —	166.032.661,34
	1961	586.841.084,77	588.107.133,52 —	1.266.048,75
	1962	458.180.442,55	368.784.298,55 +	89.396.144,—
	1963	1.288.413.701,14	1.471.734.112,77 —	183.320.411,63

Perkembangan Dinas² Vertikal/Aparatur² Pemerintah Pusat di Daerah Djawa Barat.

1. Apabila dalam periode/tahun² perdjongan fisik 1945 — 1950 djumlah dinas² vertikal di Daerah Djawa Barat dapat dikatakan tidak begitu banyak dan masjarakat dengan mudah dapat mengenalnja satu demi satu, lain halnya keadaan sedjak kita memasuki periode „Survival” dan tahun² berikutnya, dimana masjarakat merasa bingung dikarenakan mendjadi sangat banyaknja dinas² vertikal di Daerah Djawa Barat.
2. Bukan tidak mungkin, bahwa jang mendjadi alasan utama dari sangat pesatnja perkembangan/pertambahan dinas² vertikal di Daerah Djawa Barat itu ialah perkembangan lapangan tugas-pekerdjaan berbagai Departemen/Kementerian jang mendjadi semangkin luas di Daerah ini.
3. Tetapi pengalaman membuktikan, bahwa unsur² differensiasi jang berlebihan jang diakibatkan oleh langkah² kebidjaksanaan Departemen²/Kementerian² itu pada dasarnya tidak mentjerminkan adanya efisiensi kerdja jang diharapkan. Ketiadaan keseimbangan antara djumlah aparatur (di Djawa Barat tertjat tidak kurang dari 84 buah dinas vertikal pada waktu² itu) dengan banyaknja objek jang dihadapi-nya, pada kenjataanja tidak memberikan manfaat jang diharapkan.
4. Demi kepentingan terdjaminnja stabilitas dan efisiensi kerdja di lingkungan aparatur² Pemerintah, maka masalah tersebut telah dipadjukan kepada pihak Pemerintah Pusat pada kesempatan diadakannja Musjawarah Nasional Pembangunan di Djakarta dalam tahun 1957 untuk mendapat perhatian dari padanja.
5. Didalam Bangsa Indonesia memasuki periode Pantja-Warsa Manipol jang ditandai oleh pentjurahan tenaga dan fikiran untuk merealisasi Pembangunan setjara simultan dipelbagai bidang serta memuntjaknja perdjongan dalam menjelesaikan Revolusi melalui Trikora jang berhasil gilang-gemilang dengan kembalinja Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi serta kemudian meningkat lagi ketaraf perdjongan menghantjurkan projek Nekolim „British Malaysia” melalui Dwikora, maka gejala² penghalang atau hambatan² dalam bidang administrasi, begitu djuga kesimpang-siuran hubungan kerdja antara Departemen² dengan dinas²-nja jang ada di Daerah, berkat dilakukannya penertiban setjara ber-angsur² dari pihak jang berwenang, telah dapat teratasi.
6. a. Sedjak dikeluarkannja dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 jang didalam pelaksanaannja a.l. menjangkut pula penertiban terhadap partai² politik di Negara kita jaitu perombakan sistim multi-partai mendjadi sistim 10 partai (disederhanakan), maka kehidupan

administrasi Negara-pun nampak menjadi teratur, walaupun jumlah Departemen ditingkat Pusat dan aparatur²-nja yang ada di Daerah menjadi lebih besar.

- b. Meningkatkan taraf perdjongan Bangsa Indonesia didalam menyelesaikan Revolusi pada kenjataanja meminta pengerahan tenaga serta pikiran dari segenap lapisan masjarakat sebagai unsur Revolusi.
- c. Garapan² pekerdjaan dalam bidang Pembangunan Nasional Semesta yang setjara tahap demi tahap harus dilaksanakan disamping melaksanakan perdjongan setjara konsekwen terutama menghantjurkan projek Nekolim jaitu apa yang disebut Negara „Malaysia”, tjukup menggambarkan betapa luasnja serta kompleksnja dan maha beratnja lapangan tugas Negara dan Bangsa Indonesia didalam menyelesaikan Revolusi. Dengan lain perkataan pertambahan banjaknja Departemen² beserta aparatur²-nja di Daerah, mengingat fakta² tersebut diatas, adalah wajar.

BIDANG KEHIDUPAN POLITIK

Perkembangan kehidupan Politik dari masa ke masa.

Perkembangan dalam periode Revolusi fisik (1945 — 1950).

1. Kehidupan Politik di Daerah Djawa Barat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik diseluruh Nusantara.
2. Apabila pada saat diproklamirkannja Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selama beberapa bulan kemudian, dibawah naungan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 pada dasarnya bangsa Indonesia dilihat dari segi politis mempunyai wajah dan hati yang satu, akan tetapi sedjak tanggal 16 Nopember 1945 setelah dikeluarkannja „Maklumat Wakil Presiden No. 10”, maka timbullah dan kemudian tumbuhlah paham „multi-partai” di-tengah² masjarakat di Daerah².
3. Karena itu pula, maka Kabinet Presidentiil berubah menjadi Kabinet Parlementer, perubahan mana terkenal sebagai „Konvensi Sjahrir”.
4. a. Di Daerah Djawa Barat djuga pada waktu itu bertumbuhlah partai² politik dan Organisasi² massa laksana djamur dimusim hujan. Kita mengenal pada waktu itu Partai² politik Masjumi, N.U. (masih disebut Nachdatul Ulama = Nachdoh), P.N.I., P.S.I., P.S.I.I., P.K.I. dan sebagainja. Organisasi² massa dan Organisasi² Pemuda seperti B.T.I., Sarbupri, Pesindo, Acoma dll. sebagainja.

- b. Karena dalam tahun² itu dimana Belanda dengan Nicanja dengan menggunakan bantuan kekuatan dari Tentara Pendudukan (Inggeris dsb.) akan menanamkan kembali kuku pendjadjahannya, segenap perhatian dan tenaga masyarakat di Daerah Djawa Barat ditjurahkan kepada usaha mempertahankan Kemerdekaan, maka kegiatan partai² politik dan organisasi² massa serta pemuda di-bidang politik dapat dikatakan tidak menondjol. Walaupun tidak dapat disangkal, bahwa Negara Republik Indonesia setelah selama lebih dari 4 tahun harus bertempur, berkorban dan menderita, namun pada akhirnya dengan melalui persetudjuan K.M.B. pada tanggal 27 Desember 1949 ditjapailah kemenangan yang gilang-gemilang, yaitu dengan diakuinja kedaulatan Negara kita, dengan lain perkataan: Republik Indonesia tetap hidup tidak mati.

Dalam tingkatan tahun² „Survival” (1950 — 1955) dan tahun² „Investment” (1955 — 1959).

1. Pembentukan Daerah² yang berhak mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri (Daerah² Otonom) berdasarkan Undang²: No. 22 tahun 1948, telah dilaksanakan di Daerah Djawa Barat mulai tanggal 30 Desember 1950, masing² untuk:
 - a. Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat dengan Undang² No. 11 tahun 1950.
 - b. Daerah² Otonom Kabupaten diseluruh Propinsi Djawa Barat dengan Undang² No. 14 tahun 1950.
 - c. Daerah² Otonom Kota² Besar di Djawa dengan Undang² No. 16 tahun 1950.
 - d. Daerah² Otonom Kota² Ketjil di Djawa dengan Undang² No. 17 tahun 1950.
2. a. Dengan telah dikeluarkannya Undang² No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Djawa Barat, mendjelang pembentukan Pemerintahan Daerah, baik ditingkat Propinsi, maupun ditingkat Kabupaten dan Kota — Otonom, maka kehidupan serta kegiatan partai² politik dan organisasi² massa dalam tahun 1950 itu telah menjadi-djadi. Pada waktu itu di Daerah Djawa Barat tertjatat tidak kurang dari 40 partai politik dan organisasi² massa/buruh. Yang mendapat kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara (D.P.R.D. yang pertama), tertjatat 22 partai politik dan organisasi massa/buruh.
 - b. D.P.R.D.S. ini berlangsung dari tanggal 30 Desember 1950 sampai dengan tanggal 22 September 1956. Partai politik yang paling

banjak menduduki kursi dalam D.P.R.D.S. adalah Partai Politik Masjumi, jaitu dengan 29 kursi dari sedjumlah 60 kursi dalam D.P.R.D.S. Partai² besar lainnja seperti P.N.I., P.K.I. dan N.U. masing² hanja menduduki 4 kursi dan 3 kursi sadja.

- c. Mendjelang periode dilaksanakannja pemilihan umum jang diatur berdasarkan Undang² No. 7 tahun 1955, maka nampak sekali kesibukan dan kehangatan dilingkungan partai² politik didalam usahanja untuk sebanjak mungkin dapat menarik perhatian rakjat pilih. Bukan rahasiah lagi hampir di-mana² dilakukan taktik² „djual sapi” dilingkungan masjarakat, agar memilih tjalon partainja.
- d. Sebelum Pemerintah Daerah hasil pemilihan umum dapat dibentuk, maka di Daerah Djawa Barat atas dasar Undang² No. 14 tahun 1956 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 1956 dibentuk dulu Pemerintah Daerah Peralihan (berlangsung dari tanggal 22 September 1956 hingga 25 Djanuari 1958). Djumlah partai politik dan organisasi massa jang mendapat kursi dalam D.P.R.D.P. tertjatat 14, dimana Partai² Politik Masjumi dan P.N.I. masing² menduduki 16 dan 14 kursi dari sedjumlah 60 kursi dalam D.P.R.D.P.
- e. Pemerintah Daerah atas dasar Pemilihan Umum berlangsung dari sedjak permulaan tahun 1957 sampai dengan 20 Oktober 1959. Komposisi dari wakil² partai dan organisasi massa dalam D.P.R.D. dapat dikatakan hampir sama dengan komposisi dalam D.P.R.D.P., dimana partai² politik Masjumi dan P.N.I. mempunjai kekuatan jang hampir seimbang.

3. Adalah tidak akan berkelebihan untuk dikemukakan, bahwa kehidupan dan penghidupan sebagian terbesar dari Rakjat, terutama jang ada di-desa²/gunung² jang djauh dari keramaian di Kota², djauh berbeda dari kehidupan politik.

Mereka senantiasa dihadapkan kepada berbagai matjam kesulitan jang ditimbulkan oleh gerombolan² pengatjau bersendjata D.I. dan T.I.I., jang pada waktu² itu terus berketjamuk di-pelbagai daerah dan tempat. Puluhan ribu orang penduduk jang tidak berdosa di-desa² jang telah mendjadi korban keganasan dan be-ratus² djuta harta kekajaan mereka jang hantjur akibat pengatjauan gerombolan D.I. dan T.I.I. itu.

4. Akan tetapi walaupun kehidupan Negara dan Bangsa dalam tahun² „Survival” 1950 — 1955, senantiasa tidak lepas dari rongrongan dan penjelewengan, chususnja jang setjara langsung dialami oleh masjarakat Djawa Barat seperti pemberontakan „Apra” (Angkatan Perang Ratu Adil) dibawah pimpinan Westerling dan pengatjauan jang se-

tjara terus-menerus dilakukan oleh gerombolan D.I./T.I.I. Kartosuwirjo, namun Republik Indonesia tetap hidup, tetap „survive”.

5. a. Dimulai tahun 1956 kita memasuki periode Investment, kita memasuki Revolusi sosial-ekonomi untuk mentjapai tudjuan Revolusi, jaitu masyarakat adil makmur. Dengan tekad baik untuk menstabilkan Negara dibidang politik, maka melalui Pemilihan umum D.P.R. dan Konstituante ditingkat Pusat dan D.P.R.D. ditingkat Daerah telah tersusun.
 - b. Harapan^a baik stelah terbentuknja D.P.R. dan Konstituante hasil pemilihan umum, ternjata tidak dapat terbukti, karena sistim demokratis-leberal masih dipakainja.
 - c. Suasana panas dan keruh meliputi udara dibeberapa Daerah setelah dilangsungkannja setjara ber-turut^a Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan dalam tahun 1957 di Djakarta. Pemberontakan P.R.R.I. di Sumatera dan pemberontakan Permesta meletus, tetapi berkat kesigapan Angkatan Perang pemberontakan^a itu dapat ditindas.
 - d. Peristiwa jang sangat penting dibidang politik ialah keputusan jang telah diambil oleh Pemerintah mengenai „pemutusan ikatan^a K.M.B. setjara sefihak”.
6. Kedjadian^a seperti diperingati diatas, dengan sendirinja sangat mempengaruhi kehidupan politik di Daerah Djawa Barat, dan jang paling menentukan diantaranya ialah dikeluarkannja Dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959 tentang:
 - a. Dibubarkannja Dewan Konstituante dan
 - b. Berlakunja kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam periode Pantja-Warsa Manipol (1959-1964) dan dalam periode Mahkota Revolusi (1965):

1. *Perkembangan kepartaian sedjak dekrit Presiden 5 Djuli 1959.*

Dalam Manipol Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menandakan maksud beliau untuk mengadakan retooling disegala bidang agar Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin dapat berdjalan. Termasuk didalamnya retooling organisasi^a masyarakat — partai^a politik dan sebagainja.

Dalam rangka retooling kepartaian, pada tanggal 31 Desember 1959 dikeluarkanlah Pen. Pres. No. 7/1959 tentang penjederhanaan kepartaian jang dilaksanakan dengan Pen. Pres. No. 13/1960, dalam hal mana Departemen Dalam Negeri diberi tugas menjelenggarakan tata-usaha dan Dokumentasinja (Keputusan Presiden No. 307/1960). Dari djumlah 28 partai/organisasi jang pernah ikut pemilihan umum tahun

1955 kini dapat disederhanakan menjadi hanya tinggal 10 partai yang diakui sah sebagai partai berdasarkan Pen. Pres. No. 7/1959 jo. Pen. Pres. No. 13/1960 serta untuk selanjutnya dijamin hak hidupnya dan hak perwakilannya dalam lembaga Pemerintahan. Juga dalam rangka Pen. Pres. No. 7/1959 itu telah dibubarkan 2 partai yaitu Masjumi dan P.S.I. berdasarkan Keputusan Pres. No. 200 dan 201 tanggal 17 Agustus 1960. Disamping hak hidup dan hak perwakilan, Pen. Pres. No. 7/1959 juga menertibkan kehidupan partai² yang ada dengan menjegah kemungkinan munculnya partai baru, juga yang disebabkan karena perpetjahan/versplintering dalam tubuh partai. Demikian pula hak pengawasan ada ditangan Presiden dalam hal mana Presiden dapat membubarkan suatu partai apabila:

- a. Menjeleweng dari azas dan tudjuan Negara.
- b. Programnya bermaksud merombak azas dan tudjuan Negara.
- c. Melakukan pemberontakan atau tidak dengan resmi menjalahkan perbuatan angga²ta-nja yang turut serta/membantu pemberontak.
- d. Tidak memenuhi syarat² lain dalam Pen. Pres. No. 7/1959.

Sebagaimana dimaklum, 10 partai yang diakui sah itu ialah:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| (1). P.N.I. | (6). KATHOLIK. |
| (2). N.U. | (7). PARKINDO |
| (3). P.K.I. | (8). PARTINDO — Asmara Hadi |
| (4). MURBA. | (9). IP-KI — Nj. Ratu Aminah |
| (5). P.S.I.I. | (10). PERTI — K.H. Siradjudin Abas. |
2. Dalam pelaksanaan Pen. Pres. No. 13/1960 Bab II pasal 5 tentang pengawasan partai², maka dalam laporan partai² mengenai keanggotaan partai ternyata masih belum memberikan bahan² angka yang memuaskan, terutama untuk dipakai sebagai patokan pertimbangan dalam pembentukan c.q. penjegaran D.P.R.D.-G.R.² dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9/1964. Sebagai sekedar informasi maka disertakan sebagai lampiran daftar keanggotaan partai² tahun 1961 (dalam rangka pengakuannya) dan tahun 1964 (laporan landjutan), dengan tjatatan bahwa daftar tersebut hendaknya tidak disiarkan/diumumkan.
 3. Dalam hubungan dengan hak tersebut diatas telah diusulkan agar dari pihak Gubernur melalui/ber-sama² Pantja Tunggal dapat membantu mengusahakan angka² mengenai djumlah keanggotaan partai² dan ormas² golongan karya dalam wilayahnya masing², untuk dapat mempertjepat pelaksanaan Instruksi No. 9/1964 tersebut.

Persoalan² Sukarnoisme dan Nasakom.

Sukarnoisme:

1. Belum lama berselang telah timbul beberapa sengketa politik mitsal-nya soal: Nasakom, Pantja-Sila, Manipolis Munafik, Marhaenisme dan jang paling hangat mengenai Sukarnoisme.

Sengketa politik ini bermula timbul berhubungan dengan tjeramah Sdr. D.N. Aidit dalam kursus Kader Revolusi mengenai Pantja Sila R.I. — Golongan jang tidak puas dengan isi tjeramah tersebut bermula melakukan politik dalam surat kabar dengan alasan mempertahankan Pantja Sila R.I. ajaran Bung Karno, dan kemudian membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme B.P.S. ini mengambil tulisan² Sdr. Sajuti Melik dalam Berita Indonesia tentang Sukarnoisme sebagai bahan untuk dipeladjar.

Kemudian disusul oleh P.N.I. jang merasa lebih kompeten untuk mengemukakan ajaran Bung Karno dengan mengeluarkan „doktrin Marhaenisme”. Lebih dulu dari itu IP-KI dalam Kongresnja di Makassar s/d 22 Maret 1964 telah memutuskan Pantja Sila Sukarnoisme mendjadi azas partai tersebut.

2. Untuk mengetahui dimana letak perbedaan antara Pantja Sila dan Marhaenisme dalam rangka ajaran Bung Karno itu kiranya perlu dipeladjar dari sedjarah perkembangan alam fikiran dan ajaran² Bung Karno sendiri. Dalam tahun 1926 Bung Karno telah mengemukakan pendiriannya dalam madjalah Suluh Indonesia (dimuat dalam Buku Dibawah Bendera Revolusi) bahwa alam fikiran pergerakan Kemerdekaan di Indonesia dan di Negara² Asia lainnja dipengaruhi oleh aliran Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Ketiga Unsur falsafah ini telah terpaku dalam alam fikiran Bung Karno dan kemudian djuga mendjadi azas P.N.I. (1927) jang diketuai oleh beliau sendiri. Istilah² politik selalu berobah disesuaikan dengan ruang dan waktu, namun alam fikiran (azas/tudjuan) tetap tidak berobah.
3. Ketiga dasar falsafah jang berisi unsur² jang bertentangan ini bagi mereka jang Hollands denken agak onlogis bisa terpadu, tapi genialitas Bung Karno njatanja dapat mewujudkan trilogi ini dengan istilah Nasionalisme positif (Djawaban Bung Karno atas kritik alm. H.A. Salim dalam Persatuan Indonesia 1927). Nasionalisme positif itu berisi pengakuan kepada Tuhan Jang Maha Esa berisi perikemanusiaan, menentang Kapitalisme dan Imperialisme, pengakuan akan tanah air dan bangsa Indonesia jang satu, bertudjuan mendjadi bangsa jang merdeka sederajat dengan bangsa² lain didunia, berdjawa kerakjatan (Indonesia Menggugat). Kemadjuan kesadaran politik menghendaki „istilah” lain jang tjotjok dengan alam perdjongan diwaktu

itu, karena „Nasionalisme” sadja hanja diartikan oleh umum „Nasionalis bordjuis atau feodal”. Sebab itu ditjarinja nama baru jaitu „Marhaenisme”. Karena istilah „Marhaenisme” sadja dianggap kurang tepat bagi istilah ilmiah (misalnja tidak ada istilah proletarisme), maka ditambah lagi pendjelasan jaitu Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi. Setiap idee atau falsafah agar mentjapai tudjuannja perlu dipopulerkan, sebab itu perlu perumusan — Pada 1 Djuni 1945 perumusan dari pada idee jang sedjarahnja tertjatat sedjak 1926 itu berbentuk Pantja-Sila. Ini boleh disebut: Tri Sila atau Eka Sila (Gotong-Rojong) atau Nasionalisme sadja seperti nama bajinja.

4. Bila dipeladjar dari sedjarah penjusunannja, falsafah Bung Karno berisi toleransi kedalam diantara unsur-unsur revolusioner menentang keluar. Sebab itu setjara toleran dapat memadu 3 unsur falsafah mendjadi kesatuan jang tidak ter-pisah² — Demikian pula dalam pelaksanaannja sjarat mutlak harus ada persatuan nasional revolusioner atas dasar toleransi dari semua fihak (gotong-rojong). Djadi djelasnja bukan sekedar samenbundeling van alle krachten tapi samenbundeling van alle revolutionnaire krachten. Dua unsur revolusioner jang sesuai dengan kondisi² Indonesia jang disynkronisasikan.

Kesimpulan.

Istilah² Marhaenis, Pantja Silais, Manipolis, Nasakomis dan Sukarnoisme, semuanya sama sadja asal semuanya berisi adjaran² Bung Karno setjara komplit dan jang penting dilaksanakan tanpa reserve. TAVIP menerangkan bahwa ber-diskusi, berpolemik dan berdebat itu baik kalau ia memperkuat persatuan nasional demi pelaksanaan Manipol, bukan njerimpung manipol; ia buruk kalau melembekkan persatuan nasional.

Disini perlu dikemukakan siapa pemetjah-belah unsur² revolusioner progresif. Sengketa jang timbul diantara golongan² sebenarnja bukan berebut isi Sukarnoisme melainkan rebutan pengaruh. Istilah² munafik, palsu, penjeleweng, contra revolusi jang dipergunakan untuk memfitnah lawan politiknya, hanja „toverwoord” jang lazim dipergunakan dalam arena politik.

Bagi Pemerintah jang penting ialah, menilai tindakan² masjarakat, berlandaskan „Lima Azimat Revolusi” dan pedoman² pelaksanaannja.

Nasakom.

1. Selandjutnja jang mendjadi tophit of the day adalah soal pelaksanaan Nasakom. Mengenai istilah sudah terang apa jang dalam tahun 1926 disebut Nasionalisme, Islamisme, Marxisme itu sekarang meliputi Nasionalisme, Agama dan Marxisme.

2. Menurut P.J.M. Presiden Sukarno Nasakom adalah aliran² Politik jang hidup dalam Masjarakat Indonesia. Dalam bentuk kepartaian Nasakom meliputi 10 partai jang diakui. Nasakom mentjakup pula golongan Karya djadi bukan monopoli partai politik. Tudjuan pokok dari persatuan ber-poroskan Nasakom seperti ditandaskan dalam TAVIP ialah membentuk kerdja sama dari semua tenaga² revolusioner untuk melaksanakan tudjuan revolusi berdasarkan Pantja Sila.
3. Didalam alam fikiran masjarakat sesungguhnya hidup dua pengertian Nasakom. Pertama Nas-A-Kom jang berarti adanya tiga unsur njata dan terdiri dari tiga perwakilan² jang mengikuti masing² faham jaitu Nasionalisme sadja, faham Agama sadja serta Komunisme sadja. Sedang jang *kedua* ialah Nasakom, jang tidak perlu terdiri dari tiga perwakilan njata jaitu setiap wakil jang berdjawa Nasakomis sudah mewakili, faham² Nasionalisme, Agama dan Komunisme, jang dapat disebut orang jang menampakkan diri sebanjak mungkin sebagai perasan Nasakom.
4. Selain dari pada itu ada pengertian jang ditentang oleh partai² jang bersangkutan ialah Nasakom jang diartikan sebagai perwakilan collectief hanja dari P.N.I., N.U. dan P.K.I.
5. Dalam pelaksanaan menjusun kerdja-sama berdasarkan Nasakom hendaknja mengingat pada perimbangan² jang njata setempat, djadi tidak setjara a priori memasukkan sesuatu golongan jang tidak ada ditempat itu.
Nasakomis harus berbentuk 3 unsur falsafah jang tidak *ter-pisab²* dari pelaksanaan Pantja Sila, karena ketiga unsur tersebut telah tertjakup dalam Pantja Sila.
Penondjolan masing² unsur setjara mutlak²-kan dapat berakibat merombak dasar Negara, jaitu Pantja Sila Republik Indonesia, dilarang oleh Pen. Pres. 1959. Biarlah bunga² tumbuh dalam tamansari Pantja Sila.
6. Mengenai bunga mana jang paling menentukan wadjah tamansari itu ditentukan oleh hasil² kompetisi². Akan tetapi jang perlu didjaga djangan konkurensi (saling ganjang) tapi kompetisi (berbuat siapa jang paling berdjasa dalam revolusi), lebih² djangan menanamkan bunga diluar pagar tamansari Pantja Sila.

Usaha² Ketahanan Dalam Pelaksanaan Dwikora.

Bidang ketahanan Politik.

1. Selalu mengutamakan perpaduan dan konsultasi antara alat² Negara dan alat² Revolusi dari segenap lapisan dan golongan masjarakat, agar terhindar dari berbagai rongrongan jang mungkin timbul, meskipun setjara setempat.

2. Mengintensifkan indoktrinasi ideologi dan politik Negara, dan selalu memelihara serta mengobarkan semangat perjuangannya agar mereka selain mengerti buat apa kita harus berjuang, juga api perjuangan selalu menjaga-njala dalam dadanya.

Bidang Ketahanan Ekonomi.

1. Mengamankan kebidaksanaan² Pemerintah pada bidang perekonomian umumnya.
2. Berusaha untuk berdiri diatas kaki sendiri mengenai kebutuhan pangan (sektor pengumpulannya, distribusinya dan peningkatan produksinya).
3. Mengembangkan kooperasi (konsumsi, produksi pertanian, produksi kerajinan, Kredit d.l.l. sebagainya).
4. Memperkuat pengendalian harga pangan.
5. Mengganjang perbuatan² subversif dibidang ekonomi (termasuk perbuatan-perbuatan yang akibatnya mengganggu terlaksananya program sandang-pangan).
6. Mengusahakan rehabilitasi pengairan dan pentjegahan banjir.
7. Melaksanakan pemberantasan hama setjara massal.
8. Menggerakkan penanaman tanah² kosong dengan bahan pangan.
9. Melaksanakan pantja-usaha pertanian setjara massal.
10. Menjelenggarakan perubahan menu makanan (gizi).

Bidang Ketahanan Sosial.

1. Mempertinggi R.K. dan R.T. untuk:
 - (a). Memupuk jiwa kegotong-rojongan antara penduduk.
 - (b). Pembangunan rumah sekolah, tempat² beribadah, poliklinik dan sebagainya.
 - (c). Kebersihan dan kesehatan kampung dengan teratur dan berentjana.
 - (d). Perbaikan jalan² dan saluran air setempat.
 - (e). Penerangan² kampung.
 - (f). Menghadapi ketjelakaan dan kematian.
 - (g). Menghadapi kebakaran dan bentjana lain.
 - (h). Mengembangkan kesenian dan hiburan rakyat.
 - (i). Mengembangkan olah-raga sesuai dengan Rentjana 10 tahun.
 - (j). Pemerintah.
 - (k). Pembangunan Balai² pertemuan, dan tempat² rekreasi bagi kesedjahteraan anak².
2. Mengembangkan kesederhanaan hidup sesuai dengan suasana perjuangan meningkatkan konfrontasi terhadap „Malaysia”.
3. Mengembangkan kehidupan yang berkepribadian Indonesia.

Bidang Ketahanan Fisik.

1. Mempertinggi kewaspadaan dan kesiap-siagaan.
2. Mengganjang subversi dan infiltran musuh.
3. Memperhebat kegiatan Hansip.
4. Mempergiat pendjagaan bahaya udara (a.l.: memperlengkapi alat² komunikasi seperti tanda tong-tong, bendera², tanda, d.l.l. pos pengintaian/pengawasan, lobang perlindungan dsb.).
5. Menjelenggarakan pengawasan².
6. Meningkatkan gerakan sukarelawan.
7. Mengerahkan bantuan untuk daerah perbatasan.

Pelaksanaan perumusan tersebut menurut kebutuhan dan kemungkinan setempat.

Indoktrinasi tentang pengganjangan „Malaysia”.

Bahan² jang utama serta up-to-date untuk indoktrinasi tentang pengganjangan „Malaysia” hendaknja ditjari sumbernja pada amanat² Presiden (TAVIP dll.), wakil P.M. I/Menlu dan pedjabat² tinggi lainnja. Pola Perintjiaan indoktrinasi mentjakup beberapa unsur jang dirumuskan sbb., ialah mejakinkan:

1. Mengapa kita setjara prinsipiil mengganjang „Malaysia”.
2. Siapa musuh kita.
3. Tjara²/djalan² jang kita tempuh dalam rangka DWIKORA.
4. Prasarat persatuan Nasional Revolutioner.
5. Kita pasti menang.

KETERANGAN.

- Ad. 1. (a). Konflik jang pokok adalah konfrontasi antara kekuatan² NEFOS menghadapi tantangan dari kekuasaan² OLDEFOS, dus sifatnja perdjoangan internasional dalam rangka revolusi dunia.
- (b). Perdjoangan kita adalah prinsipiil anti-Nekolim. Oleh karenanja kita membantu perdjoangan kemerdekaan rakjat Kalimantan Utara.
- (c). „Malaysia” adalah projek neo-kolonialisme Inggeris jang difait-accomplikan kepada kita melalui komisi P.B.B. Micheltmore dan Sekdjen P.B.B. U Thant.
- (d). „Malaysia” dipakai untuk pangkalan militer Inggeris guna meliadungi kepentingan² Imperialis di Asia Tenggara, dan mengepung/mengantjam Republik Indonesia jang sedang berrevolusi menudju sosialisme Indonesia, jang

terang kaum Imperialisme tidak menjukainja; pengepungan oleh imperialisme dilakukan baik itu setjara politik, ekonomi maupun militer. Oleh karena itu politik (dalam arti luas) kita bersikap offensif revolusioner untuk melenjapkan projek neo-kolonialisme itu jang dijadikan kubu untuk me-rong² Revolusi kita.

- (e). „Malaysia” ditudjukan djuga untuk overvote penduduk Tionghoa di Singapura.
- Ad. 2. Kita menentang projek neo-kolonialisme Malaysia demi membantu perdjoangan Rakjat² Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara agar mereka mempunjai Negara jang Merdeka, bebas dari belenggu kolonialisme. Djadi kita memusuhi „Malaysia” bukan sebagai Rakjat atau Negara, tapi Imperialisme Inggeris.
- Ad. 3. (a). Kita bersedia berunding atas dasar doktrin SUMAC. Penjelesaian sengketa „Malaysia” dengan djalan perundingan harus sesuai dengan pelaksanaan Manipol.
(b). Mendjalankan peningkatan konfrontasi mendjadi offensif, terutama dibidang politik, ekonomi dan militer, terhadap British „Malaysia”, dengan dikomandokannja DWIKORA.
- Ad. 4. Untuk memenangkan DWIKORA mengganjang „Malaysia”, harus dengan sungguh² mengutamakan persatuan Nasional Revolusioner diatas se-gala²-nja. Melaksanakan segala tugas untuk mempertinggi ketahanan Revolusi disegala bidang home-front, disamping memperhebat barisan sukarelawan bantuan tempur digaris depan.
- Ad. 5. Perdjoangan menentang „Malaysia” adalah bagian dari perdjoangan menentang Nekolim umumnja dan ini adalah panggilan sedjarah. Revolusi dunia bertendensi kearah kemenangan sosialisme, kearah penghapusan penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa. Sebab itu kita, tidak berdiri sendiri; segenap perikemanusiaan dan pemerintah serta rakjat progresif didunia berada difihak kita.
Karena itu dalam perdjoangan menentang neo-kolonialisme „Malaysia” kita pasti menang.

Tingkatan Revolusi memasuki tahap Sosialisme atau tahap Pembangunan.

1. P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. dalam Amanat Politik „Berdikari” dimuka sidang Umum jang ke III M.P.R.S. jang baru lalu antara lain menegaskan, bahwa tahap perta-

ma dari pada Revolusi Indonesia, yaitu tahap Nasional Demokrasi sekarang sudah hampir selesai, dan kita memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap sosialisme atau tahap Pembangunan.

2. Amanat Politik „Berdikari” tersebut merupakan:

- a. Penegasan dalam bidang Politik mengenai Revolusi Indonesia pada tingkatnya sekarang dan peranan Indonesia dalam perjuangan membangun Dunia Baru.
- b. Pedoman pelaksanaan Haluan Negara MANIPOL.
- c. Landasan Program perjuangan Rakyat Indonesia dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, Pertahanan/Keamanan.

Atas dasar Amanat Politik „Berdikari” tersebut, telah ditetapkan antara lain Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965, tentang: Banting Stir untuk berdiri diatas Kaki Sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam Ketetapan ini mengenai Nation dan Character Building dapat ditondjalkan hal² sebagai berikut:

(a). *Pasal 2* mengenai proyek² prioritas, berbunyi:

Dalam kebidjaksanaan Pembangunan jangka pendek tersebut ditentukan *Prioritas*² dalam penjusunan dan pelaksanaan proyek² sebagai tersebut dibawah ini:

- (1). Proyek *Nation dan Character Building*.
- (2). Proyek² dibidang produksi *sandang-pangan*.
- (3). Proyek² pembangunan *Bidang Khusus* Keamanan/Pertahanan yang meliputi proyek² *prasarana*, industri pertahanan dan proyek² strategis, offensif, aerospace.
- (4). Proyek² *Pertanian*, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan.
- (5). Proyek² *Pertambangan*, Industri dan Tenaga Listrik.
- (6). Proyek² Industri pengolahan *bahan mentah*.
- (7). Proyek² *Prasarana* Nasional dibidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Telekomunikasi serta Industri² yang bersangkutan, diantaranya Industri Bahari untuk kelengkapan *pelajaran rakyat*.
- (8). Proyek² *Transmigrasi Gaja Baru*.
- (9). Proyek² *Penelitian dan Pengembangan* (research and development) dibidang Teknologi, Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan sebagainya.
- (10). Proyek² *Pendidikan tenaga kedjurnan*.
- (11). Proyek² *Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana* yang sudah dimulai.

- (b). *Pasal 23* berbunyi: Mentjiptakan *iklim politik* jang sesuai dengan kebidjaksanaan Banting Stir dalam pembangunan dengan memperkuat dan menjempurnakan team *pembantu Presiden* dengan tenaga² jang Pantja-silais dan Manipolis sedjati berporoskan Nasakom.
- (c). *Pasal 24* berbunyi: Disamping Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Mental/Agama dalam rangka nation and character building termasuk *indoktrinasi, kebudayaan, olah-raga* serta *pembangunan khusus angkatan Bersendjata* tetap diteruskan. Pembangunan Angkatan Bersendjata sebagai alat revolusi dan sebagai alat keamanan/pertahanan harus seirama dan sesuai dengan *peningkatan revolusi Indonesia*.

BIDANG KEAMANAN.

Dalam periode Revolusi fisik (1945 — 1950).

- a. Riwayat keamanan di Daerah Djawa Barat pada dasarnya tidak dapat terlepas dari jalannya Revolusi Bangsa Indonesia sendiri. Didalam masa Revolusi fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 di Daerah Djawa Barat terdapat keadaan, jang apabila harus dilihat dari segi keamanan, belum dapat dikatakan dalam keadaan tertib. Ketenangan hidup masyarakat umumnya masih terganggu. Keadaan demikian adalah wajar, apabila diinsjafi bahwa segenap lapisan masyarakat di Daerah ini pada waktu² itu masih berada dalam mempertahankan kemerdekaan jang telah kita rebut dari tangan pihak penjajah.
- b. Dalam pada itu diinsjafi pula, bahwa terutama sedjak permulaan tahun 1949 setelah Kartosuwirjo dengan antek²-nja setjara terang²-an merong-rong dan bahkan dengan mempunyai latar belakang politik untuk „memisahkan diri dari Republik Indonesia dengan membentuk Negara Islam Indonesia dalam wilayah sjah Republik Indonesia”, berkehendak melumpuhkan serta melenjapkan Negara Republik Indonesia, keadaan keamanan di Daerah Djawa Barat senantiasa djadi terganggu.

Dalam periode „Survival” (1950-1955) dan dalam periode „Investment”.

- a. Apabila dalam periode Revolusi fisik serta djuga dalam periode „survival” keadaan keamanan di Daerah Djawa Barat merupakan masalah jang latent, dimana aktivitas Kartosuwirjo tidak lagi merupakan masalah politik, melainkan telah berubah mendjadi gerombolan pengatjau keamanan belaka, satu dengan lainnya berkat tindakan² jang njata dan tegas dari pihak jang berwadjib, maka tidak dapat disangkal, bahwa

petjahnja pemberontakan diluar Djawa, seperti pemberontakan P.R. R.I. di Sumatera, pemberontakan Permesta di Sulawesi, sangatlah mempengaruhi pula kehidupan masjarakat di Djawa Barat, baik ekonomis, maupun politis.

- b. Keadaan perekonomian Rakjat pada waktu itu umumnja tidak men-
tjerminkan suasana jang menggembirakan. Ketenangan bekerdja
terutama di Daerah² Produksi pangan di-desa² terganggu oleh gerom-
bolan² pengatjau bersendjata. Berpuluh ribu rakjat jang tidak berdosa
mendjadi korban keganasan kaum pengatjau, sedangkan disamping
itu, harta-benda milik Rakjat jang hilang karena dibakar atau digarong,
sukar untuk dapat dinilai dengan mata uang, karena tidak terhitung
banjaknja.
- c. Dalam pada itu, karena djalannja kehidupan politik-pun tidak dapat
dipisahkan dari gejala² kehidupan lainnja di Daerah, maka pada
waktu itu nampak djalan kesibukan partai² politik dan organisasi²
massa didalam usahanja dalam Lembaga Pemerintahan, baik ditingkat
Pusat, maupun ditingkat Daerah.
Akan tetapi berkat dikeluarkannja Dekrit Presiden pada tanggal 5
Djuli 1959, jang berarti kembalinja Rakjat Bangsa Indonesia ke Un-
dang-Undang Dasar tahun 1945, maka kehidupan politik jang liberal-
istis jang pernah hidup dengan suburnja sepanjang massa dari tahun
1950 sampai tahun 1959 (tanggal 5 Djuli), telah dapat dihentikan
sama sekali.
- d. Dalam pada itu, walaupun gambaran kehidupan masjarakat selama itu
pada umumnja tidak memperlihatkan suasana jang menggembirakan
sebagaimana telah dikemukakan diatas, namun kesemuanja itu tidaklah
berarti, bahwa selama massa itu berlangsung tidak didapat hal² jang
positif.
Usaha² atau tindakan² pengamanan dalam pengertian menghantjur-
kan gerombolan pengatjau D.I. beserta T.L.I.-nja, jang dilakukan
oleh Territorium III Siliwangi diwaktu itu terus dengan giatnja di-
laksanakan.
Pemerintahan Daerah, baik ditingkat I, maupun ditingkat II/Kota-
pradja berdjalan sebagaimana mestinja.

**Dalam periode Pantja-Warsa Manipol (1959 — 1964) dan periode
Mahkota Revolusi (1965).**

- a. Periode sedjak dikeluarkannja Dekrit Presiden dalam tahun 1959 di
Daerah Djawa Barat ditandai oleh rupa-rupa kedjadian jang pada
umumnja bersifat positif dan konstruktif:

- (1). Pekerjaan^a rekonstruksi dari segala apa yang dapat dikatakan telah hantjur akibat penjelewengan-penjelewengan di bidang politik dan di bidang ekonomi dalam tahun^a 1950 sampai dengan tahun 1959 harus dihadapi dengan ketabahan hati oleh segenap lapisan masyarakat Djawa Barat dibawah pimpinan dan bimbingan Pemerintah Daerah.
- (2). Berbagai konsepsi dalam bidang pembangunan Daerah yang komplementer dengan ketentuan-ketentuan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960, yang berthemakan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, telah dipersiapkan dan setjara berangsur-angsur didalam batas^a kemampuan keuangannya, beberapa rencana pembangunan Daerah dilaksanakan pula.
- b. Berkat ketangkasan dan ketekunan Kodam VI/Siliwangi dengan melaksanakan Doktrin Perang Wilajah, maka dalam bulan Mei 1962 riwayat gerombolan pengatjau D.I. dan T.I.I. di Daerah Djawa Barat dengan tertangkapnja Kartosuwirjo yang mendjadi biangkeladinja, telah dapat diachiri.
- c. Dengan telah dipulihkannya kembali keadaan keamanan di Daerah Djawa Barat didalam suasana tertib-sipil, maka umumnya garapan^a pekerjaan, chususnja di-desa^a dipedalaman, yang tadinja sedjak lama ditinggalkan, telah dapat dikerdjakan kembali. Sedjak itu pula nampak sekali kesibukan masyarakat dalam lapangan pembangunan dipelbagai bidang.
- d. Keamanan yang pada tahun 1962 dipulihkan kembali oleh Angkatan Bersendjata, chususnja Kodam VI/Siliwangi bersama-sama dengan rakyat, yang pada tahun 1963 telah dikonsolidasikan, perlu kita djamin terus demi keutuhan persatuan, kestabilan pemerintahan dan karena merupakan sjarat mutlak bagi pembangunan disegala bidang, lebih^a dalam suasana kewaspadaan nasional pada dewasa ini.
- e. (1). Mengenai ketahanan fisik dalam rangka menghadapi serangan terbuka kaum Nekolim, semua unsur soko-guru Revolusi perlu dilatih dan djika perlu dipersendjatai untuk melaksanakan pertahanan/perlawanan totaal bersama Angkatan Bersendjata.
- (2). Sehubungan dengan itu telah dilakukan peningkatan gerakan sukarelawan/sukarelawati dan pengerahan bantuan untuk daerah-daerah perbatasan.
 Dalam tahun 1964 Djawa Barat telah dua kali mengirimkan bantuan kegaris depan di Kalimantan Utara, ja'lah :
 — pada tanggal 26 Djuni 1964 sebanyak 100 orang Guru^a,
 — pada tanggal 4 September 1964 sebanyak 75 orang mahasiswa dari Resimen Mahasiswa.

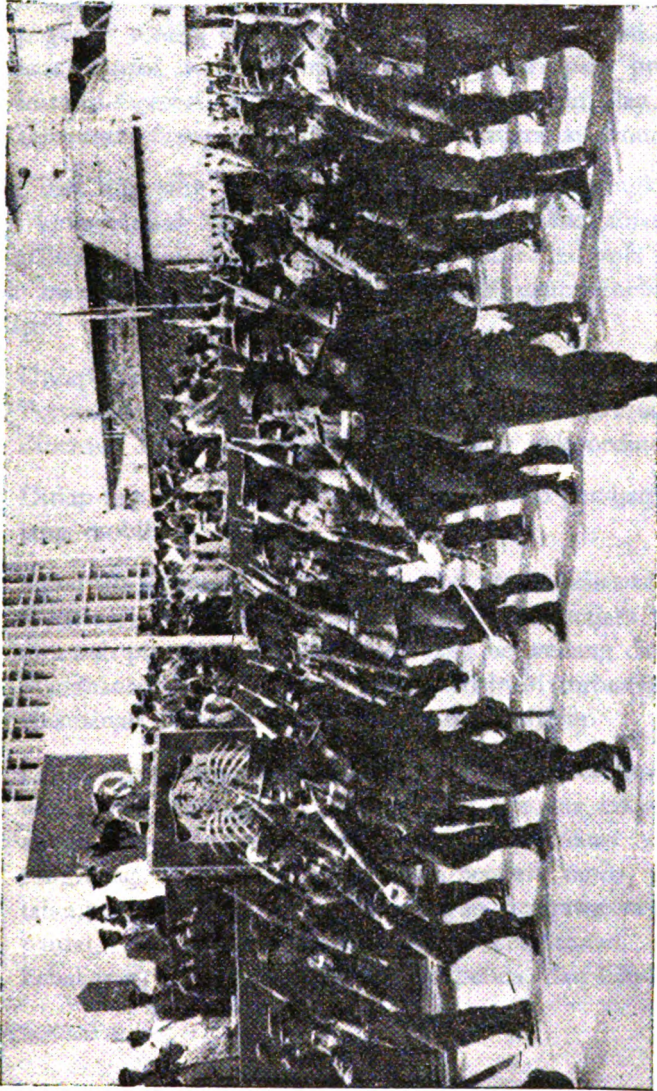


Foto P.a.f.

Pasukan Sukwati.

- (3). Para Sukarelawan jang tidak digunakan langsung atau tidak langsung untuk pertahanan, dikerahkan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan, mitsalnja diikut-sertakan dalam penyelesaian objek pembangunan nasional serba-guna Djatiluhur, d.a. penggalian saluran-saluran pengairan primair dan secundair.

Gerakan sukarelawati tidak sadja terbatas kepada pegawai-pegawai wanita atau wanita-wanita tidak bersuami, tetapi meluas sampai para ibu-ibu, baik isteri-isteri para pedjabat dari instansi-instansi Militer, Polisi, Pemerintahan dan Djawatan-Djawatan, maupun isteri-isteri dari masyarakat umum.

- f. Selain dari apa jang telah diuraikan diatas dalam rangka mempertinggi kewaspadaan dan kesiap-siagaan untuk mengganjang subversi dan infiltran musuh didalam Negeri, telah dilakukan pula usaha-usaha untuk memperkuat homefront, d.a. dengan memperhebat kegiatan Hansip:

- (1). Ditiap-tiap kantor instansi-instansi sipil, Djawatan², Perusahaan-Perusahaan Negara/Daerah dan Perusahaan² Swasta jang vital dibentuk kesatuan-kesatuan Hansip jang gekoordineerd.
- (2). Ditiap-tiap R.K., Desa diintensipkan Hansip pendjaga keamanan jang mobil.
- (3). Kesatuan-Kesatuan Hansip tersebut terus-menerus diberi indoktrinasi dan latihan² dasar kemiliteran setjara aktif oleh/dibawah pimpinan pelatih-pelatih jang berwenang dari L.K.P.S., Madahansip VIII, Puskif, Matorhansip-Matorhansip, Pembina Keamanan Desa dan lain-lain kesatuan Militer.
- (4). Latihan²/penerangan²/pengertian tentang pendjagaan bahaya udara oleh kesatuan-kesatuan Hansip bersama rakjat dipergiat, antara lain memperlengkapi alat-alat komunikasi seperti tanda tong-tong, lotjeng, sirene, bendera-bendera tanda, pos pengintaian/pengawasan, lobang perlindungan, pengawasan-pengawasan pantai, pertolongan pertama pada ketjelakaan, pemadaman kebakaran, pengungsian orang dan benda, dan lain-lain.

BIDANG EKONOMI

Keadaan perekonomian dari masa ke masa
dan kemungkinan dikemudian hari.

Keadaan geografis. *)

1. Luas Daerah	4.687.670 Ha.
2. Menurut fungsinya terbagi atas:	
a. tanah sawah	1.148.986 Ha.
b. tanah darat	1.329.339 Ha.
c. tanah perkebunan	549.928 Ha.
d. tanah hutan	946.335 Ha.
(tidak termasuk tanah ² asal pembelian/tukar/menukar dan V.D.O. seluas 114.585 Ha.).	
e. Sisa merupakan tanah ² yang menurut keadaannya belum dapat dipisahkan, seperti sungai ² , jalan ² , kota ² dsb.).	
3. Tanah sawah menurut pengairannya terdiri dari:	
a. Sawah dengan pengairan teratur	427.785 Ha.
b. Sawah dengan pengairan setengah teratur	253.436 Ha.
c. Sawah dengan pengairan tidak teratur	178.490 Ha.
d. Sawah tadah hujan	289.275 Ha.
Djumlah	<u>1.148.986 Ha.</u>
4. Tanah darat terbagi atas:	
a. Tanah pekarangan	259.512 Ha.
b. Tanah diluar tanah pekarangan	1.069.827 Ha.
Djumlah	<u>1.329.339 Ha.</u>
5. Tanah perkebunan terbagi atas:	
a. Tanah yang diusahakan	391.568 Ha.
b. Tanah yang tidak/belum diusahakan	158.355 Ha.
Djumlah	<u>549.923 Ha.</u>
6. Tanah hutan terbagi atas:	
a. Daerah hutan produksi	396.049 Ha.
b. Tanah hutan pelindung (489.064 ha hutan lin- dung dan 61.222 ha hutan tjarag alam).	550.286 Ha.
Djumlah	<u>946.335 Ha.</u>

Keadaan penduduk:

1. *Djumlah penduduk.*

Perkembangan pertambahan djumlah penduduk Daerah Djawa Barat
dari tahun ketahun memperlihatkan perangkaan sebagai berikut:

*) Angka² sebelum th. 1950.

a. Tahun 1930	11.397.146 orang.
b. Tahun 1950	13.907.487 orang.
c. Tahun 1951	14.732.306 orang.
d. Tahun 1955	15.050.585 orang.
e. Tahun 1961	17.614.555 orang.

Dengan kenaikan pukul rata tiap tahun 2,3% maka djumlah penduduk Daerah Djawa Barat dalam tahun 1965 ditaksir akan mentjatat 19,2 djuta djiwa.

TJATATAN: Sumber; a. B.P.S., b s/d d Kantor Gubernur Djawa Barat.

b. Hasil sensus tahun 1961.

2. *Pembagian penduduk menurut lingkungan mata pentjaharian.*

- a. Menurut tjara extrapolisi Biro Perantjang Negara ditaksir $37\frac{1}{2}\%$ dari djumlah seluruh penduduk Daerah Djawa Barat merupakan tenaga kerdja aktif dengan pembagiannja sebagai berikut:

(1). Dalam bidang produksi bahan mentah	60,7%
(2). Dalam bidang industri.....	13,3%
(3). Dalam bidang perhubungan/pengangkutan	2,7%
(4). Dalam bidang perdagangan	10%
(5). Dalam djabatan proffessions	0,3%
(6). Dalam Pemerintah	6%
(7). Dalam lingkungan pekerdjaan lain.....	6,6%
Djumlah	<u>100%</u>
- b. Penganggur ditaksir $2\frac{1}{2}\%$ dari seluruh angkatan kerdja.
- c. Setengah penganggur di-daerah² pertanian ditaksir antara 30 — 40% dari seluruh tenaga kerdja dalam bidang produksi bahan mentah.
- d. Tambahan tenaga kerdja baru: $1\frac{1}{2}\%$ dari seluruh tenaga kerdja aktif, tiap tahun.

Pandangan Umum Ekonomi.

1. Seperti dikemukakan diatas, luas daerah djawa barat adalah 4.687.670 Ha. (termasuk Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya). Diukur dari permukaan laut, maka Djawa Barat terdiri dari dataran rendah bagian Utara dan dataran tinggi bagian Tengah dan Selatan. Berpuluh-puluh Sungai mengalir dari tengah ke Utara dan Selatan.
2. Keadaan iklim dan tanah yang subur menjebabkan susunan ekonomi daerah Djawa Barat sedemikian rupa, sehingga sektor agraria merupakan sektor ekonomi yang terpenting disamping sektor³ lainnja.

Bilamana ditelaah setjara mendalam, maka sebagian besar dari seluruh tanah di Djawa Barat adalah tanah pertanian jang terdiri dari sawah dan tanah kering (50,7%), tanah kehutanan 19% dan perkebunan 12%.

3. Mengingat keadaan seperti dikemukakan tadi jang disertai mutu landasan idieel dimana faktor agraria adalah merupakan dasar dari pada pembangunan, maka sedjak berachirnja revolusi fisik hingga saat ini usaha pembangunan banjak diarahkan kepada usaha menaikkan produksi dari sektor agraria ini, dengan tidak melupakan pula usaha investasi pada projek-projek industri, jang terutama terlihat kemadjuannya jang pesat pada industri sandang.
4. Ketika kita dalam tahun 1945 merebut kekuasaan dari tentara Djepang, keadaan sebagian besar dari pada sumber² produksi baik pada sektor agraria maupun sektor industri adalah sangat lemah. Banjak perkebunan² besar jang dirusak oleh Pemerintah tentara Djepang dan penanaman baru (peremadjaan) sama sekali tidak diadakan. Djuga pada bidang industri keadaannya serba suram. Pada Pemerintah Djepang segala usaha ditudjukan kepada memenuhi kebutuhan tentara Tenno Heika untuk melanjutkan peperangannya di Pacifik. Tidak heranlah djika pada bulan Agustus 1945 keadaan perekonomian kita di Djawa Barat sangat lemah dan masjarakatnja telah mentjapai taraf hidup materiil jang sangat merosot (kurus-kering).
5. Belumlah kita sembuh dari penderitaan selama pendjadjahan Djepang, muntjullah tentara Sekutu dengan Nicanja di Djakarta, jang terus mengadakan operasinya ke pedalaman Djawa Barat, pertama-tama ke Bogor dan Bandung. Dengan semangat jang ber-api² dimulailah revolusi physiek kita dengan pertempuran dimana-mana.
6. Djelaslah bagi kita bahwasanja keadaan perekonomian di Djawa Barat selama tahun 1945 s/d 1949 pada umumnya sangat menjedihkan. Sebagian besar dari sumber penghasilan di bumi-hanguskan, dirusak musuh atau sama sekali tidak mendapat pemeliharaan.
7. Rakjat dari kota² mengungsi ke-desa² dan bahkan banjak jang meninggalkan kampung halamannya menudju ke Jogjakarta dll. tempat di Djawa Tengah (daerah R.I.).
8. Pada achir tahun 1947 ber-angsur² para pengungsi kembali ke-kota². Sedjak itu mulailah ada kehidupan dalam usaha industri dan perdagangan.
9. Sebagaimana dikemukakan dalam halaman² terdahulu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia diresmikan pada bulan Desember 1950 dan sedjak saat itulah dimulai dengan usaha² pembangunan.

10. Walaupun dari sedjak tahun 1950 Daerah Djawa Barat dalam usaha²nya mengadakan rehabilitasi dalam berbagai sektor itu selalu mengalami gangguan keamanan, namun hasil produksi baik pertanian maupun sektor² lainnja selalu menundjukkan progress jang menarik.
11. Sebagaimana dikemukakan diatas, keamanan di Djawa Barat terus menerus terganggu oleh gerombolan² D.I./T.I.I. jang melantjarkan kekatjauan dan membakar kampung² serta merampas harta kekajaan rakjat di-desa². Mudahlah untuk dimengerti bahwa usaha² pembangunan di Daerah Djawa Barat berdjalan sangat seret, karena perekonomian rakjat telah mendjadi lemah. Pada achir tahun 1957 disebabkan timbulnja suasana tegang antara beberapa Daerah dengan Pemerintah Pusat jang terus meningkat mendjadi pemberontakan a.l. P.R.R.I. di Sumatra dan PERMESTA di Sulawesi, maka dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 seluruh Negara Republik Indonesia dinjatakan dalam keadaan perang dan dengan demikian bagi Djawa Barat berlakulah Undang² No. 74 tahun 1957.
12. Djika sebelum itu usaha² pembangunan di Djawa Barat dilaksanakan tanpa adanja koordinasi, maka mulai saat itulah baru difikirkan/dilaksanakan usaha² untuk mengkoordinier segala usaha pembangunan.
13. Mula² dibentuk suatu Panitia dengan nama Panitia Perumus Persiapan Rentjana Pembangunan disingkat P3.R.P. jang mendjalankan tugasnja sedjak bulan Oktober 1957 sampai 1 April 1958. Banjak gagasan² jang dikemukakan oleh Panitia tersebut kepada Pemerintah Pusat.
14. Dengan surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat tgl. 1 April 1958 No. 60/3/P.P.D./1958 dibentuklah Biro Pembangunan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djawa - Barat. Dengan dibentuknja Biro tersebut, berangsur² diadakan penertiban dalam usaha² Pembangunan baik dari Djawatan², maupun masjarakat dalam pekerdjaan² gotong-rojong, terutama dalam rangka follow-up keamanan.
15. Meskipun keadaan keamanan dalam tahun 1958 untuk sebagian besar dari Djawa Barat masih belum mengidzinkan usaha² pembangunan jang intensip, namun segala daja telah dilakukan untuk melaksanakan tugas tsb. baik pada pembangunan spirituil, maupun materil:
 - a. Penggemblengan mental terus dilaksanakan sampai ke pelosok² daerah, sedang dalam pembangunan materiil segala usaha dititik beratkan kepada melipat-gandakan produksi dan melantjarkan distribusi.

- b. Jang mendapat sorotan utama dalam bidang produksi adalah sandang-pangan dan Perkebunan besar sebagai penghasil devisen.
- c. Dalam Bidang distribusi usaha² ditudjukan kepada:
 - (1). Stabilisasi harga.
 - (2). Allokasi barang sebaik mungkin.
 - (3). Pengangkutan jang teratur merata dengan tarip pengangkutan jang seimbang dengan harga barang.
16. Dalam hubungan dengan hal² tersebut diatas oleh Peperda Djawa Barat telah dikeluarkan beberapa peraturan dan keputusan a.l. tentang penguasaan penggilingan padi, penguasaan/ambil-alih perusahaan milik Belanda, jang terdiri dari perusahaan² pertambangan, perkebunan dan perdagangan serta lain²-nja jang ada di Djawa Barat.
17. Djuga dalam penjaluran bahan baku untuk industri diadakan usaha-usaha penertiban. Untuk menghindarkan adanja manipulasi dalam penjaluran benang tenun dan pada achir tahun 1958 oleh Peperda dikeluarkan peraturan jang mengatur pengangkutan, pendjualan dan penggunaan bahan baku tersebut di Djawa Barat.
18. Ber-bagai² usaha penertiban telah dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masjarakat Djawa Barat, jang dihubungkan dengan usaha² pemulihan keamanan dan menghantjurkan gerombolan Kartosuwirjo. Dalam sistimatik pemulihan keamanan, Djawa Barat dibagi atas 3 Daerah Operasi j.i.:
 - (1). Daerah Operasi A. (Daerah jang sudah aman dan perlu distabilisir).
 - (2). Daerah Operasi B. (Daerah jang setengah aman dan perlu dikonsolidasi).
 - (3). Daerah Operasi C. (Daerah jang belum aman, dimana perlu diadakan pengedjaran gerombolan pengatjau).

Susunan perioriteit dalam usaha pembangunan untuk mentjapai pemulihan keamanan adalah sebagai berikut:

- (1). Melantjarkan mobilitet dari petugas/alat pengamanan Negara.
 - (2). Melantjarkan distribusi.
 - (3). Mempertinggi produksi.
19. **Daerah Operasi A.**
- Usaha² jang dilaksanakan di daerah ini adalah:
- (1). Mempertinggi produksi.
 - (2). Melantjarkan distribusi.
 - (3). Memelihara mobilitet pengamanan.

Usaha tersebut dilakukan oleh Djawatan Sipil dengan bantuan angkatan bersendjata. Didaerah tersebut segala usaha terutama ditudjukan kepada mempertinggi produksi, baik produksi pertanian maupun industri. Djuga usaha rehabilitasi perkebunan² besar mendapat perhatian sepenuhnya. Di Daerah Banten perhatian ditudjukan kepada djalan² jang menghubungkan tempat² sebagai berikut:

- a. Malimping — Saketi
- b. Rangkasbitung — Leuwidamar
- c. Rangkasbitung — Gunung Kentjana
- d. Labuan — Teluk Lada
- e. Labuan — Tjarita

Di Daerah Bekasi, Krawang, Subang dan Indramaju segala daja upaja ditjoba/dilaksanakan untuk pentjegahan bahaya bandjir, jang setiap tahun selain menghantjurkan tanaman padi, djuga merusak djalan² dan djembatan. Dalam pada itu, usaha² perbaikan djalan desa dan saluran secundair/tertiar dilaksanakan setjara gotong-rojong. Banjak usaha gotong-rojong tersebut jang mentjapai hasil jang sangat baik. Dengan demikian dapat dibuat/direhabilitair ratusan kilometer djalan desa dan saluran irigasi jang bila digambarkan dengan uang, djumlah pembiajaan akan meliputi ratusan djuta rupiah.

20. Daerah Operasi B.

Didaerah ini perhatian lebih ditudjukan kepada distribusi keperluan pokok disamping usaha pengamanan daerah dan penambahan produksi. Usaha² pembangunan berkisar pada:

- a. Pembuatan/rehabilitasi djalan².
- b. Pengawasan atas alokasi/dislokasi barang² kebutuhan pokok (beras, minjak tanah, gula, garam, ikan asin dan tekstil kasar).
- c. Sebagai usaha pentjegahan tanah longsor diusahakan penanaman tanah² gundul dan reboisasi tanah² kehutan.
- d. Intesievering pengolahan tanah pertanian dan perikanan.
- e. Usaha Militer terutama ditudjukan kepada konsolidasi keamanan.
- f. Industri tekstil mendapat pengawasan dan bimbingan dalam mendapatkan bahan baku.

21. Daerah Operasi C.

Di Daerah Operasi C usaha² terutama ditudjukan kepada mobilitet keamanan, jang merupakan urgensi terpenting dari pada petugas Militer.

Tiap potensi baik manpower maupun ekonomi dipergunakan untuk menghantjurkan musuh. Dalam daerah ini jang betul² diperhatikan oleh petugas² Militer adalah:

- a. Mobilitet dari petugas/alat pengamanan.
- b. Alokasi/dislokasi dari bahan-pokok se-baik²-nja dan setjara continue. Pengamanan dari penjaluran tersebut.
- c. Pengamanan/pengawasan dari perusahaan² jang vital.
- d. Pembuatan/rehabilitasi djalan² bagi pengedjaran Gerombolan² pengatjau.

Usaha² Pembangunan sesudah pertengahan tahun 1962.

1. Pada achir semester I tahun 1962 pemulihan keamanan telah dapat diselesaikan dengan tertangkapnja pemimpin Gerombolan D.I. Kartosuwirjo. Dengan pulihnja keamanan di Djawa Barat maka segera di-tjabut undang² keadaan bahaya No. 20 tahun 1959 dan diumumkanlah keadaan tertib sipil (1 Mei 1962).
2. Dalam 5 tahun terachir ini Pemerintah masih tetap berusaha se-keras²-nja untuk mengadakan investasi dalam sektor agraria. Terutama usaha memenuhi kebutuhan bahan pangan dan export. Usaha tersebut diatas dilakukan dengan menetapkan pantja usaha. Bila kita lihat usaha Pembangunan ini setjara geografis maka daerah Djawa Barat ini dibagi dalam bagian Utara bagian Tengah dan Selatan.

a. *Bagian Utara.*

Jang terdiri dari dataran rendah (laagvlakte) dan mentjakup Daerah² Tingkat II Serang, Tangerang, Bekasi, Krawang, Purwakarta, Subang, Indramaju dan Tjirebon akan tetap dipertahankan dan diusahakan mendjadi Daerah penghasil beras (rijstschuur) jang terutama dan bahkan ditetapkan sebagai Pilot Projek Nasional untuk mendjadi Daerah Swa-Sembada dalam bidang pangan terutama beras, serta djadi Daerah supply untuk Daerah Djawa Barat beserta Daerah khusus Ibu Kota Djakarta Raya, bahkan Daerah² lainnja sekalipun. Dalam pada itu dengan tidak mengurangi fungsi utamanja seperti dikemukakan diatas, dalam hubungan dengan tersedianja tenaga listrik dengan selesainja pembangkitan tenaga listrik Djatiluhur, direntjanakan pula untuk mengisi Daerah² Tingkat II Purwakarta, Krawang dan Bekasi dengan sektor² industri baru, djika mungkin dengan industri berat jang komplementair dengan Projek Besi/Badja „Trikora” di Tjilegon.

b. *Bagian Tengah.*

Jang mentjakup d.a.l. sebagian dari Daerah² Tingkat II Bogor, Sukabumi Tjiandjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaja, Tjiamis, Kuningan dan sebagian dari Daerah Tingkat II Tjirebon, akan dipertahankan dan diusahakan mendjadi Daerah Industri,

Perkebunan, baik Perkebunan Besar maupun Perkebunan Rakyat (sajur²-an, buah²-an dan bunga²-an) dan Daerah² keparawisataan (tourisme) dengan tetap mempertahankan wilayah² hutan dan bahkan memulihkan jumlah luas hutan kepada jang diperlukan dengan djalan meneruskan melaksanakan rentjana reboisasi dengan konsekwen, satu dengan lainnja d.a.l. untuk kepentingan orologi termasuk untuk kepentingan pengendalian bandjir, jang dalam tiap² tahun melanda daerah² pesawahan terutama didaratan rendah di Bagian Utara Djawa Barat. Dalam pada itu mengingat bahwa di Bagian Tengah Djawa Barat ini, jang mentjakup djuga sebagian dari Daerah Tingkat II Pandeglang dan Lebak terdapat pula areal² sawah dan tanah² pertanian lainnja jang tjukup luas, maka telah diambil ketetapan untuk dilaksanakan usaha² intensifikasi dan ekstensifikasi, satu dengan lainnja dengan disesuaikan dengan kebutuhan² setempat dan diselaraskan dengan kebutuhan² dalam waktu djangka pendek atau djangka pandjang.

c. *Bagian Selatan.*

(Menjurus pantai Samudra Indonesia) jang mentjakup bagian disebelah Selatan dari Daerah² Tingkat II Pandeglang, Lebak (Banten Selatan), Sukabumi, Tjiandjur, Bandung, Garut, Tasikmalaja dan Tjiamis, jang umumnja masih merupakan Daerah jang ter-isolir, direntjanakan *akan dibuka dan didjadikan Daerah² jang hidup* jang memberi harapan/kemungkinan mendjadi Daerah² pertanian terutama perkebunan, seperti perkebunan² kelapa, tjengkeh dan perkebunan² karet baru dengan tetap dilaksanakannja pembinaan setjara intensip terhadap komplek² hutan jang sangat penting artinja untuk orologi.

Disamping itu bukan tidak mungkin pula terbukannja kemungkinan untuk dilaksanakannja usaha² dalam lapangan pertambangan (mangaan, titan, fosfaat, bruinkool dsb). Djuga sedjauh mungkin akan dilakukan pembinaan terhadap flora dan faona/binatang² hutan liar seperti banteng, matjan, badak dsb., jang dapat menarik perhatian para wisatawan (tourisme) dalam maupun luar negeri. Dalam hubungan dengan soal tersebut, ditjari pula daerah² jang mempunyai pemandangan indah untuk didjadikan Daerah² atau tempat² parawisata baru disamping memperbaiki/memperindah tempat²/daerah² parawisata jang telah ada seperti Pengandaran dengan Batu hiunja, Pameungpeuk dengan Tjilaut-Eureunnja, Pangumbahan (tempat penghasil telur penju), Udjung Genteng, Pelabuhanratu, d.l.l. sebagainja. Pembukaan Daerah Selatan ini direntjanakan/akan dilaksanakan *dengan membuka djalan*

baru, jang membentang dari Tjidjulung di Tjiamis Selatan terus menjusur pantai Lautan Indonesia kearah Barat melalui Pameungpeuk, Sindangbarang, Udjung Genteng, Pelabuhanratu ke Daerah Djawa Barat Bagian Selatan ini, tersimpul pula pengertian perbaikan djalan² jang telah ada jang menghubungkan Djawa Barat Bagian Tengah dengan Bagian Selatan. Untuk dapat mengenal lebih terperinci lagi mengenai hasil² usaha pembangunan ekonomi Djawa Barat, maka berikut ini beberapa hal patut diketengahkan setjara terperinci lagi.

Sektor Kehutanan.

1. Telah dikemukakan dalam prakata ekonomi bahwa Djawa Barat antara lain terdiri dari 19% tanah kehutanan jang meliputi:

- a. Hutan pelindung/Tjagar Alam.
- b. Hutan Industri.

Hutan Tjagar Alam terdapat di beberapa tempat di Djawa Barat j.i. di Udjung Kulon, Gunung² di Sekitar Sukabumi, Bandung dan Garut serta di Pengandaran. Daerah² tersebut dari dahulu sampai sekarang merupakan objek² *tourisme*. Terutama kawah Tangkuban Prahau dan Pangandaran banjak sekali dikundjungi wisatawan².

Sedjak sebelum perang, hutan² itu mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya, karena hutan merupakan sumber kekuatan alam, jang selain menghasilkan produksi kaju, djuga mendjadi sumber jang menampung air dan memberikannya kepada sungai jang dalam bentuk irigasi sangat dibutuhkan untuk pertanian.

2. *Kerusakan hutan².*

Pada waktu pendudukan Djepang di Djawa Barat telah dilakukan penebangan² hutan hingga melampaui batas, berhubung dengan besarnya kebutuhan akan kaju dan hasil² hutan lainnya bagi kepentingan peperangan di Pacific. Lain dari pada itu banjak tanah² hutan jang dipindjamkan kepada penduduk untuk ditanami palawidja dan lain² tanaman dengan maksud memperlipat gandakan bahan pangan jang sangat dibutuhkan bagi peperangan itu. Sampai dewasa ini penjerobotan tanah kehutanan di Djawa Barat masih tetap ada dan merupakan soal jang pelik bagi Djawatan Kehutanan. Kesemuanya itu telah mengakibatkan kerusakan² hutan besar sekali dan di beberapa daerah dengan demikian terdapat tanah² gundul, jang mudah longsor karena hudjan lebat. Penebangan hutan disebabkan pula karena adanya perkembangan industri jang membutuhkan kaju bakar sebagai bahan pembantu. Akibat dari pada kesalahan² jang dikemukakan tadi, maka terdjadilah hal² jang buruk, misalny:

- a. Diberbagai daerah telah timbul banjir yang sangat merugikan, seperti didaerah Tjiamis, Krawang, Indramaju dan Subang;
- b. Beberapa daerah telah nampak kekurangan air untuk mengairi sawah² sebagai akibat turunnya debit air di-sungai².
- c. Beberapa kota mengalami kekurangan air leiding.
- d. Beberapa sungai dan saluran² irigasi, begitu pula pelabuhan mendjadi dangkal.
- e. Dibeberapa daerah terdjadi erosi (tanah longsor), penghajutan tanah bagian atas yang merupakan faktor penghasil. Kerugian ini semua tidak dapat dinilai dengan uang.
- f. Penghasil kayu mendjadi berkurang.

Reboisasi.

3. Berhubung dengan keadaan itu maka telah diusahakan reboisasi, dan mengadakan penambahan hutan. Dari sedjumlah 868.000 Ha luas daerah hutan pada tahun 1951 telah ditambah dengan 40.000 Ha daerah hutan, sehingga pada achir tahun 1955 luas daerah hutan mendjadi $\pm$ 963.000 Ha. Pada tahun² selandjutnja dapat dilihat kelompok kayu industri sebagai berikut:

P i n u s	40.000 Ha.
D a m a r	61.000 Ha.
D j a t i	140.000 Ha.
Hutan Pelindung	412.000 Ha.
Hutan pajau	36.000 Ha.

Setelah menindjau selang pandang gambaran keadaan Kehutanan di Djawa Barat, selandjutnja setjara singkat akan dikemukakan perintjian kedjadian² dari tahun ke tahun, sedjak tahun 1945 sampai sekarang.

Selama periode revolusi fisik dari tgl. 17-8-1945 s/d 1950

4. Dalam periode ini Djawatan Kehutanan Djawa Barat dibela dan dipertahankan sesuai dengan semangat proklamasi 17-8-1945 oleh Sarikat Buruh Kehutanan, Angkatan Muda Kehutanan dengan laskar²-nja ber-sama² dengan angkatan perdjoangan lainnja terutama dalam bidang politik, sosial ekonomi dan mental. Situasi hutan pada waktu itu sebagai sumber produksi dan pelindung belum dapat ditertibkan sebagaimana mestinja setjara technis ilmiah dan pengelolaannja didasarkan atas prinsip² berdikari.
5. *Selama tahun² survival dari tahun 1950 — 1955.*
Situasi Kehutanan Djawa Barat mulai menundjukkan usaha² kearah penertiban, terutama dalam bidang manpower, inventarisasi dan perentjanaan.

Kegiatan^a para pedjabat Kehutanan terganggu oleh anasir^a pengganggu keamanan (D.I. — T.I.I. — Bambu Runtjing dll.) sehingga pembangunan Kehutanan tak dapat dilaksanakan menurut rentjana yang semestinja.

6. *Selama tahun^a investment tahun 1955 s/d 5 Djuli 1959.*

Dalam periode ini Kehutanan Djawa Barat dalam melaksanakan pembangunannya bekerdja-sama dengan instansi Militer. Situasi politik dalam negeri (Djaman Liberalisme kepartaian politik) dan tidak stabilnja pemerintahan (seringnja perobahan Kabinet) besar djuga pengaruhnja terhadap stabilitas policy Kehutanan dan ketenangan bekerdja para Karjawan Kehutanan.

7. *Selama tahun^a „Pantja Warsa Manipol” 5 Djuli 1959 — 1964.*

Sesudah dekreet Presiden Republik Indonesia 5-7-1959, dan pulihnja keamanan dalam tahun 1962 maka mulai tampak ketenangan bekerdja dan perentjanaan pembangunan Kehutanan sudah mulai dapat dikonkritkan terutama dalam bidang reboisasi, penghidjauan, dan produksi, sesuai dengan rentjana pembangunan semesta berentjana Nasional, dalam mana Djawatan Kehutanan termasuk dalam projek B.

8. Sesuai dengan policy Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah Djawa Barat periode 1965 ini menghadapi rentjana^a pembangunan yang besar demi tertjapainja manfaat hutan se-besar^a-nja untuk kemakmuran rakyat dan demi peningkatan ketahanan revolusi.

9. Kegiatan^a Kehutanan Djawa Barat dari masa ke masa tertudju kepada usaha membina dan mempertahankan hutan^a Negara dalam daerah Djawa Barat sedemikian rupa agar pengasuh^a hutan yang banyak mengandung unsur^a bagi kemakmuran Negara dan masjarakat benar^a dapat dinikmati setjara kekal.

10. Kegiatan^a dan hasil karya Djawatan Kehutanan Djawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun 1945 — 1950 : kegiatan^a politis.

Tahun 1950 — 1955 : kegiatan konsolidasi organisasi Djawatan.

Tahun 1955 — 1959 : memikirkan dan menjusunkan Pembangunan Hutan Industri.

Tahun 1959 — 1964 : Pembangunan Hutan Industri dan rehabilitasi/penghidjauan tanah^a kosong setjara besar^a-an.

Tahun 1964 — dst. : direntjanakan pembangunan projek^a khusus (quick yielding) dengan memperhatikan rising demands dari masjarakat.

Hasil²-nja jang dapat ditjapai adalah sebagai berikut:

- Kehutanan Djawa Barat baik struktureel maupun spiritueel dan organisatoris sudah dapat dianggap utuh kembali.
- Hasil² kegiatan pembangunan dapat dilihat dari perangkaan jang tersusun dibawah ini:

**PERANGKAAN DARI DJAWATAN KEHUTANAN DAERAH
TINGKAT I DJAWA BARAT**

T a h u n	Produksi hasil hutan M ³	Pendjualan hasil hutan M ³	Pembuatan tanaman M ³
1957	324.000	327.500	8.013,61
1958	286.000	285.300	10.371,16
1959	343.000	343.400	9.820,54
1960	416.800	411.000	10.372,16
1961	402.900	399.000	9.827,90
1962	335.600	220.600	12.123,85
1963	373.018	354.608	42.375,73
1964	400.100	390.000	40.700,—

- Dalam tahun 1965 ini sedang dilandjutkan usaha² pembangunan 19 projek² chusus, a.l.: Gondorukem, Lak, Persuteraan, Kajuputih, Kertas dan pulp, Kaju perkakas dan export pinus ke negara nefos.

Organisasi.

1. Selama periode djaman Feodial dan Negara Pasundan, Kehutanan Djawa Barat diorganiseer oleh para pedjuang² kemerdekaan dari Hutan, Pemerintahan Federal dan Negara Pasundan (17-8-1945 s/d achir 1950) dalam mana tenaga²-nja terdiri dari tenaga² jang mengutamakan keberanian melawan pendjadjah dan Neo kolonialisme Belanda; dari pada keachlian dalam bidang hutan dan kehutanan sendiri.
2. Sesudah tahun 1950 sampai tahun 1955 dimana kehutanan Federal sudah diganti dengan kehutanan Republik Indonesia maka struktuil kehutanan Djawa Barat dan penempatan-penempatan tenaga diatur lebih banjak berdasarkan atas axeptabiliteit politics dan capabeliteit keachlian oleh Djawatan Kehutanan Pusat dari Djakarta.
3. Sedjak Djuni 1958 s/d 17 Agustus 1965 Kehutanan Djawa Barat berdasarkan P.P. 64/1957 mendjadi instansi Otonom Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat dalam mana para pegawai Pusat me-

ngalami diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat sekarang. Bidang technis masih tetap diatur dan ditetapkan sesuai instruksi dari Djawatan Kehutanan Pusat (Direktorat/Departemen Kehutanan) sedang policy dan administratip diatur oleh Pemerintah Daerah.

Kesimpulan.

- Apabila 19 rentjana projek khusus dari Djawatan Kehutanan Djawa Barat dapat dilaksanakan dengan sukses, maka diharapkan deficit Pemerintah Daerah yang setiap tahunnja dialami, akan dapat diatasi.
- Djika seluruh tanah kosong selesai dihidjaukan dengan ditanami djenis² kaju untuk perindustrian, diharapkan produksi kaju akan meningkat se-kurang²nja mendjadi 5 sampai 10 x dari produksi sekarang, dimana pendirian industri-industri yang memakai hasil hutan sebagai bahan mentahnja, seperti pabrik pulp, potlot, triplex, rayon dlsb. dapat terdjamin.
- Disamping itu fungsi hydro orologish dari pada hutan diharapkan akan lebih effectief.

Sektor Perkebunan Besar.

1. Seperti telah dikemukakan dalam pandangan umum ekonomi, Daerah Djawa Barat sebagian besar terdiri dari gunung² yang tanahnja pada umumnya sangat subur. Tanah yang subur dan iklim yang baik itulah telah mendjadi Djawa Barat daerah Pusat Perkebunan yang terpenting di Indonesia. Terutama ex Daerah Keresidenan Priangan dan Bogor merupakan daerah kesibukan bagi perkebunan² besar, yang mendjadi sumber deviezen yang penting. Dari segala sesuatu itu dapat diambil kesimpulan bahwasanja perkebunan² besar sebelum perang mempunyai peranan yang penting. Djuga dewasa ini setelah kita menghirup alam kemerdekaan selama 20 tahun, perkebunan² besar ini masih tetap merupakan sebagian terbesar dari kekayaan Djawa Barat, yang sangat penting bagi sumber devisa Negara. Selain dari itu tidak kurang dari 40.000 buruh mendapat mata pentjaharian di perkebunan. Djenis perkebunan yang diusahakan di Djawa Barat adalah terutama perkebunan karet, teh, kina, tebu dan kelapa sawit. Perkebunan teh dan kina terdapat dipengunungan daerah ex-Keresidenan Priangan, Bogor dan Kabupaten Purwakarta (Subang) pada ketinggian ± 600 m keatas, sedangkan karet djuga didaerah tersebut dan ex Keresidenan Banten pada daerah² dibawah ketinggian dibawah 600 m.

DAFTAR PABRIK GULA

Kabupaten	Pabrik Gula	Daja-giling
Madjalengka	Kadipaten	1.230 Ha.
	Djatiwangi	1.350 Ha.
Tjirebon	Gempol	2.300 Ha.
	Sindanglaut	2.250 Ha.
	Karangsuwung	1.100 Ha.
	Terasana Baru	2.970 Ha.

2. Keadaan sebelum perang.

- a). Menurut tjatatan djumlah perkebunan besar di Daerah Djawa Barat pada masa sebelum perang ada 692 buah. Luas tanah erf-pacht seluruhnja tertjatat 549.923 ha atau $\pm 12\%$ dari luas Daerah Djawa Barat. Tanah jang diusahakan ada seluas 391.568 ha. Dengan demikian, maka luas tanah tjadangan berupa hutan d.l.l. sebagianja tertjatat 158.355 Ha.
- b). Dari djumlah 692 buah perkebunan itu ada 576 buah perkebunan jang masing² mempunjai pabrik sendiri dan jang terdiri dari 310 buah perkebunan teh dan 51 buah perkebunan kina. Disamping djumlah tersebut tertjatat djuga 17 buah pabrik teh opkoop (opkoop-pabriken), jang se-mata² mengolah putjuk teh hasil dari pembelian.
- c). Produksi standar (tahun 1940) untuk karet tertjatat 5.576.418 Kg./bulan atau 66.917.016 Kg/tahun.
Produksi standar (tahun 1940) untuk teh tertjatat 13.348.282 pon/bulan atau 80.089.692 Kg/tahun.
Produksi standar (tahun 1940) untuk kina adalah 1.186.797 Kg/bulan atau 14.241.564 Kg/tahun.
- d). Potensi produksi perkebunan² besar di Djawa Barat, pada masa sebelum perang (tahun 1940) adalah 161.248 ton lebih.

3. Keadaan pada masa Revolusi fisik (1945 — 1950).

Selama l.k. 2 tahun (sedjak penguasa Djepang meninggalkan perkebunan² dan Negara Pasundan belum terbentuk) umumnja perkebunan² besar berdjalan seperti biasa, walaupun tidak dapat disangkal karena adanja kesulitan² liquiditas, umumnja perkebunan² tidak dapat menghasilkan produksi jang diharapkan. Pada masa Pemerintahan Negara Pasundanpun Perkebunan² itu umumnja tidak dapat berdjalan seperti pada masa sebelum perang.

4. Keadaan dalam periode „survival” (1950 — 1955).

- a). Menurut tjatatan jang ada dalam tahun 1950 tertjatat ada 467 buah perkebunan besar di Daerah Djawa Barat atau $\pm 80\%$ dari djumlah perkebunan pada masa sebelum perang, jang diusahakan dan menghasilkan. Menurut perintjiannja, jang 467 buah perkebunan itu terdiri dari 275 buah perkebunan karet, 141 buah perkebunan teh dan 51 buah perkebunan kina.
- b). Sebagian besar dari perkebunan^a milik Belanda setjara ber-angsur^a berpindah tangan kepada perusahaan^a/pengusaha^a Swasta dan sebagian lagi kepada Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.).
- c). Sesisanja, sedjumlah (692 perkebunan — 467 perkebunan) 225 perkebunan dapat dikatakan telah rusak sama sekali dan/atau telah mendjadi tanah pertanian biasa jang digarap oleh rakyat setempat.
- d). Keadaan produksinja pada masa itu dapat dikatakan masih baik jaitu rata^a 400 a 500 Kg. per Ha. tiap tahun, sehingga selama tahun^a itu hasil produksinja, baik karet, maupun teh tiap tahun memperlihatkan angka pukul rata antara 52.000 ton dan 60.000 ton karet dan antara 25.000 ton dan 33.000 ton teh. Hanya produksi kina sedjak tahun 1950 memperlihatkan angka jang sungguh tidak menggembirakan dan hanya dapat menghasilkan antara 4% dan 8% dari produksi sebelum perang.

5. Keadaan dalam periode „investment” dan tahun^a berikunja hingga kini (1955 — 1959 sampai 1964).

Memang pada dasarnya sungguh harus disesalkan, bahwa sektor pem-bikin devisen Negara ini sedjak tahun 1956 hingga kini tidak dapat memperlihatkan perkembangan jang menggembirakan, bahkan mem-perlihatkan gambaran jang sebaliknya, terutama apabila keadaannya itu harus dibandingkan dengan keadaan diwaktu sebelum perang. Dari djumlah 467 buah perkebunan dalam periode „survival” ternjata tidak sedikit perkebunan^a jang rusak. Menurut tjatatan hasil sensus terachir pada saat ini terdapat 50 a 60 buah perkebunan dalam keadaan terlantar.

6. Luas areal perkebunan dalam tahun 1956.

Luas areal	$\pm$ 316.000 Ha.
Luas tanaman	$\pm$ 180.000 Ha.
dengan perintjian: Karet	$\pm$ 128.000 Ha,
T e h	$\pm$ 48.000 Ha.
Lain ^a	$\pm$ 3.000 Ha.
(kina, kelapa sawit dan kelapa).	



Perkebunan Teh di Tjiater (kaki Gn. Tangkuban Perahu)

Foto P.a.f.

7. Dimulai dalam tahun 1962 setjara ber-angsur² tidak sedikit pula perkebunan-perkebunan jang melaksanakan pekerdjaan rehabilitasi a.l. dengan djalan replanting, pemupukan dan sebagainya dihindungkan kebunja masing².
8. Pada waktu ini pemilikan perkebunan² besar terdiri dari:
P.P.N. Karet XI dan XII; Antan VII, VIII, IX dan X.
P.P.N. Dwikora III, IV dan V.
Perusahaan² Swasta Nasional.
Perusahaan² Swasta Asing.
9. Dibawah ini disadjikan angka² produksi perkebunan² besar dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tahun	Perkebunan karet (t o n)	Perkebunan teh (t o n)	Perkebunan kina (t o n)	Keterangan
1940	66.917	80.000	161.000	Produksi standar.
1953	59.887	25.245	654	
1954	56.518	33.510	1.133	
1955	52.095	29.555	1.987	
1956	49.698	28.504	1.731	
1960	± 40.000	± 25.000	± 850	
1961	± 39.000	± 23.000	± 800	
1962	± 38.000	± 24.000	± 800	

Usaha² rehabilitasi.

Sebagaimana dikemukakan diatas usaha rehabilitasi perkebunan berdjalan sangat seret. Terutama peremadjaan tanaman karet memerlukan perhatian sepenuhnya. Menurut rentjana luas tanaman karet jang tiap² tahun perlu diremadjakan berkisar pada lebih kurang 10%. Akan tetapi berhubung dengan keadaan monitair dewasa ini rentjana tersebut tidak dapat direalisasikan. Terutama para pengusaha swasta nasional jang pada umumnja lemah keuangannya dan kurang keachliannya sampai saat ini belum dapat mentjapai target penanaman jang direntjanakan. Pada umumnja hasil peremadjaan jang ditjapai adalah lebih kurang 6% dari areal tanaman.

Sektor Karet Rakjat dll. tanaman keras.

1. Disamping perkebunan² besar sebagai penghasil devisa di Djawa Barat terdapat perkebunan² rakjat, jang djuga menghasilkan bahan² export, seperti: karet, teh, kelapa dll.

Usaha tersebut berada dibawah bimbingan Dana Tanaman Keras/Djawatan Karet Rakjat yang tugas dan perkembangannya adalah sebagai berikut:

Djawatan karet rakjat mulai dibuka pada awal tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakjat Tjabang Bogor, kemudian menjadi Djawatan Karet Rakjat Propinsi Djawa Barat dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Djawa Barat pada tanggal 31 Mei 1958. Sebelum tahun 1950 segala urusan mengenai perkaretan rakjat menjadi tugas dari pada Djawatan Pertanian Rakjat. Dengan dileburnya Djawatan Karet Rakjat Pusat di Djakarta serta dibentuknya Dana Tanaman Keras pada tahun 1962 maka Djawatan Karet Rakjat Djawa Barat diintegrasikan dengan Perwakilan Dana Tanaman Keras Djawa Barat. Tugas dari Djawatan Karet Rakjat/Dana Tanaman Keras Djawa Barat dapat disimpulkan dalam tiga pokok jaitu:

- a. Mempertinggi mutu perkebunan karet/tanaman keras rakjat.
- b. Memperbaiki perekonomian Petani karet/tanaman keras.
- c. Memberi pertimbangan kepada Pemerintah dalam urusan yang bersangkutan-paut dengan bidang tanaman keras rakjat seperti penjurusan rentjana kerdja, pengawasan, pabrik², remilling/ rumah-asap.

Perkembangan Djawatan Karet Rakjat/Perwakilan Dana Tanaman Keras Djawa Barat sedjak didirikannya hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Selama Revolusi Physik (17 Agustus 1945 s/d 1950) urusan karet rakjat masih menjadi tanggung djawab Djawatan Pertanian, yang waktu itu termasuk Kementerian Kemakmuran.
- b. Selama tahun² survival (1950 — 1955). Periode ini ditandai dengan dipisahkannya urusan karet rakjat dari Djawatan Pertanian dan dibentuknya Djawatan Karet Rakjat di Djawa Barat. Dimulai dengan mengadakan registrasi areal karet rakjat serta keadaan karet rakjat dari sudut tehnik, ekonomis serta kemungkinan² untuk memperbaikinya sesuai dengan tugas Djawatan. Penjurusan rentjana kerdja yang konkrit serta susunan formasi dari Djawatan Karet Rakjat.
- c. Selama masa investment (1955 — 9 Djuli 1959). Djawatan karet rakjat Pusat membuat rentjana (5 tahun (1956 — 1960) untuk memperbaiki perkaretan dengan meremadjakan tanaman karet rakjat, menjelenggarakan pembibitan, penerangan, kursus dan sebagainya.
- d. Selama masa pantja-warsa Manipol 5 Djuli 1950 sampai 1964). Penjurusan 5 tahun pertama peremadjaan karet rakjat (replanting dan new-planting) bagi daerah Djawa Barat sesuai dengan

Instruksi Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Jawa Barat No. 39/10/PPD/58 tgl. 21-10-1958, dimulai tahun 1959 s/d 1963. Pelaksanaan rentjana pembangunan semesta tahapan pertama (1961 — 1968) sesuai Ketetapan MPRS. No. 2/1960. Dikeluarkan-nya Peraturan Menteri Pertanian No. 9/PMP/61 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 12/PMPA/1963 tentang pemberian premi bagi para petani yang meremajakan tanaman karetnja menurut sjarat² yang telah ditetapkan, dalam rangka mensukseskan rentjana pembangunan Semesta.

Pembentukan Dana Tanaman Keras di Jakarta serta Perwakilan Dana Tanaman Keras Jawa Barat (8-11-1963), pengintegrasian-nya dengan Djawatan Karet Rakjat Jawa Barat, serta perluasan tugas² sehingga meliputi juga tanaman keras lainnja seperti kelapa, tjengkeh dsb-nja, disamping karet. Penjerahan tugas² pengawasan pabrik² remilling karet dan rumah² asap dari Departemen Perindustrian Rakjat kepada Departemen Pertanian dan Agraria, dalam hal ini Dana Tanaman Keras beserta Perwakilan-Perwakilannya.

Pembentukan Perwakilan Badan Urusan Karet Rakjat (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) Jawa Barat, dalam mana Perwakilan Dana Tanaman Keras duduk sebagai anggota dan Ketua Sekretariat bersama.

Pengintegrasian tugas² pembangunan dengan Badan Produksi Daerah, Pemerintah Daerah serta instansi² daerah lainnja dan dengan seluruh masyarakat yang bersangkutan-paut dengan bidang tanaman keras rakjat.

- e. Selama masa Mahkota Revolusi 1965 sampai sekarang. Mulai melaksanakan peremadjaan karet rakjat dalam kesatuan² ekonomis yang luasnja tiap kesatuan minimal 50 Ha. Menjelenggarakan pembibitan tjengkeh sebanyak 80.000 butir dalam rangka menambah areal tanaman tjengkeh seluas 600 Ha. dalam tahun 1965, Merentjanakan dan mulai melaksanakan kredit bibit² karet bagi Petani dalam rangka mensukseskan rentjana pembangunan Semesta Tahapan Pertama disamping pemberian premi. Melaksanakan rentjana peremadjaan tanaman kelapa seluas 2.500 Ha. dan menjelenggarakan pembibitan kelapa unggul sebanyak 150.000 butir untuk keperluan peremadjaan tersebut. Dengan semangat berdikari mengintensipkan kordjasana integrasi dengan instansi² di Daerah, ormas² tani, kooperasi serta kesatuan pimpinan badan Produksi Daerah.

Diharapkan untuk tahun² selanjutnya dapat dimulai dengan rehabilitasi, peremadjaan dan peningkatan mutu hasil tanaman² keras rakjat lainja seperti teh, kopi dsb-nja.

2. Objek² Kegiatan.

Tugas dari Djawatan Karet Rakjat adalah mengadakan pembinaan untuk mempertinggi mutu pertanaman karet rakjat meningkatkan mutu hasil produksinja serta mempertinggi tarap hidup Para Petani karet, sedang tugas Dana Tanaman Keras pada pokoknja adalah untuk merealisir bimbingan dan penjujukan yang telah dilakukan oleh Djawatan Karet Rakjat serta Djawatan Pertanian Rakjat dibidang tanaman keras dengan djalan membiajai proyek² peremadjaan dan peningkatan mutu hasil, satu dan lain dalam batas² keadaan keuangan yang tersedia.

Djadi objek kegiatan Djawatan Karet Rakjat Perwakilan Dana Tanaman Keras Djawa Barat adalah melakukan bimbingan dan penjujukan dibidang tanaman keras sampai kepada menjelenggarakan serta membiajai usaha² yang bertudjuan untuk meremadjakan, memperluas dan meningkatkan mutu produksi dari pada tanaman keras rakjat seperti karet, kelapa, tjengkeh dsb-nja.

3. Perentjanaan.

Untuk memperbaiki keadaan Perkaretan rakjat serta meningkatkan tarap hidup para Petaninja, sedjak tahun 1945 telah disusun berbagai rentjana.

Oleh karena soal karet rakjat ini merupakan soal Nasional dan djuga sebagai penghasil devisa yang terpenting diantara hasil² export dari sektor pertanian, maka semua rentjana² perkaretan rakjat disusun setjara Nasional pula dan diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Pusat.

4. Peremadjaan Karet.

Hasil² herregistrasi yang mulai didjalankan pada tahun 1950 menjatakan bahwa luas tanaman karet rakjat di Djawa Barat tidaklah 15.048 Ha seperti yang diberitahukan oleh Kantor Pusat Statistik, tetapi 26.071 Ha. Dari tahun 1950 s/d 1958 tidak tertjatat adanya peremadjaan bahkan dalam tahun 1959 tertjatat penurunan areal disebabkan pembongkaran. Hal ini mungkin karena kurang sempurnanja penelitian statistik pada masa itu.

Akan tetapi yang pasti adalah, bahwa perhatian petani terhadap tanaman karet tetap kuat, sebab pasaran karet diwaktu itu memang baik. Sampai masa pantja warsa Manipol, tertjatat peremadjaan karet rakjat seluas 13.095 Ha (1959 s/d 1963) dan diantaranja

4.914 Ha. memperoleh premi peremadjaan (hanja untuk tahun tanam 1961 dan 1962).

5. Penbibitan Karet.

Untuk mendjamin terlaksanaja peremadjaan dengan bibit unggul, maka Djawatan Karet Rakjat/Perwakilan Dana Tanaman Keras telah menjelenggarakan pembibitan^a karet djenis unggul sedjak tahun 1952 sampai 1964 sebanyak 4.217.921 batang bibit, dan jang diselenggarakan setjara gotong rojong dengan rakjat ada sebanyak 1.575.916 batang bibit.

Djumlah semua ada 5.793.837 batang bibit, jang dapat dipergunakan untuk meremadjakan tanaman karet rakjat seluas 11.588 Ha.

Mulai tahun kerdja 1965 persediaan bibit karet hasil penjelenggaraan Perwakilan Dana Tanaman Keras dapat dikreditkan pada para Petani jang tidak mampu, dengan djaminan sjarat^a untuk memperoleh premi peremadjaan dapat dipenuhi oleh para Petani tersebut.

6. Kebun^a Pameran.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan kepada Petani karet, sampai dengan tahun 1964, Djawatan Karet Rakjat telah menjelenggarakan sedjumlah 65 buah kebun^a pameran. Kebun^a ini dibimbing dan diawasi langsung oleh Djawatan, tetapi hasilnja mendjadi hak pemilik kebun.

Penelitian data^a mengenai kebun pameran tersebut sedang berlangsung.

7. Model Sheetbedrijven.

Dalam tahun 1952 di Tjipanas (Lebak) telah didirikan sebuah model Sheetbedrijf, tetapi pada waktu ini tidak bekerdja lagi karena terbakar rusak, dan perusahaannja sendiri selalu rugi.

Sedang diusahakan untuk merehabilitirnja dan memindahkannya ke tempat lain jang lebih sesuai.

8. Pendidikan dan Kursus^a.

Untuk menaikkan mutu dan kesanggupan dari para pegawai serta untuk memperoleh tenaga^a guna mengisi kebutuhan pegawai teknik kedjuruan, telah diadakan pendidikan tjalon mantri karet.

Sedjak tahun 1951 sampai dengan 1964 telah dihasilkan 59 orang Pengusaha karet jang seluruhnja diperkerdjakan pada Djawatan Karet Rakjat Djawa Barat.

Djuga dalam rangka membina dan meningkatkan taraf hidup Petani karet, telah diselenggarakan kursus^a kader tani karet diseluruh daerah

Djawa Barat. Sampai sekarang Djawatan telah mendidik 988 orang kader tani karet di 11 Kabupaten.

Djuga sebagian dari tenaga² staf teknik telah pernah mengikuti kursus² yang diselenggarakan oleh Balai Penyelidikan dan Pemakaian Karet di Bogor.

9. Penjelenggaraan Kebun² Induk.

Mulai tahun 1963 dimulai membuat kebun² induk karet diberbagai tempat di Djawa Barat dalam usaha untuk mendjamin tersedianja bibit² unggul dikemudian hari.

Sampai dengan tahun 1965 telah dapat ditanam 37 Ha. di Kabupaten² Lebak, Bogor dan Garut. Direntjanakan akan ditambah lagi ditempat² lain dan setiap kebun induk akan merupakan djuga unit² ekonomis (50 Ha.).

10. Pengolahan karet Rakjat.

Djawa Barat tidak menghasilkan slabs seperti di daerah² luar Djawa, karena semua karet diolah mendjadi sheets dan bahan² sisa diolah oleh pabrik² Remiling. Memang di Djawa Barat tjukup terdapat penggilingan² tangan dan Rumah² Asap Rakjat. Dalam tahun 1951 tertjatat 500 pasang Penggilingan Tangan dan 500 Rumah Asap Rakjat, sedang dalam tahun 1964 djumlah tersebut masing² telah meningkat mendjadi 1303 pasang dan 1378 buah. Kapasitas dari Penggilingan² dan Rumah² Asap ini sudah mentjukupi untuk mengolah seluruh hasil karet rakjat Djawa Barat. Walaupun demikian permintaan² akan penggilingan tangan (handmangels) masih terus mengalir, yang diperlukan untuk menggantikan yang sudah lama (rusak) maupun untuk mendirikan unit² pengolahan baru (Rumah Penggilingan dan Rumah Asap). Sajang sekali banjak unit² pengolahan ini tidak digunakan setjara efisien, sehingga setjara tidak langsung merugikan Petani sendiri. Dalam hal ini perlu kerdja sama yang lebih erat antara D.K.R./Pedatak dengan Pemerintah Daerah Setempat dalam memberikan penerangan dan pemberian² idzin (H.O). mendirikan Rumap-Asap baru, untuk menghindarkan ketidak efisienan ini.

11. Peremadjaan Kelapa.

Mulai tahun 1965 ini Perwakilan Dana Tanaman Keras telah aktif merentjanakan dan melaksanakan peremadjaan kelapa. Dientjanakan tahun 1965 ini akan diremadjakan 2.500 Ha. tanaman kelapa. Dalam pelaksanaannja akan diperlukan kerdja sama dan bantuan, dalam rangka pengintegrasian tugas, dari Badan Produksi Daerah, Pamong

Pradja, Kooperasi, Ormas² Tani, dan Instansi² lain jang ada saagkut-pautnja dengan perkelapaan ini.

12. Pembibitan.

Dalam tahun 1964 direntjanakan penjelenggaraan pembibitan kelapa sebanjak 100.000 butir di Daerah² Banten dan Priangan Timur. Tapi target ini tidak dapat dipenuhi karena kesukaran mendapatkan bidji² (butiran) kelapa djenis unggul menurut petundjuk Balai Penelitian Kelapa dan Tanaman lemak lainnja, serta kesukaran pengangkutan bibit² tersebut. Dari rentjana tersebut jang dapat direalisasikan kira² 15.000 bibit jang terletak di Daerah² Pandeglang, Lebak, Garut dan Tasikmalaja. Dalam tahun 1965 direntjanakan untuk menjelenggarakan pembibitan kelapa sebanjak 150.000 bibit.

13. Pohon Induk.

Karena kesukaran memperoleh butiran (buah) kelapa djenis unggul untuk bibit maka Perwakilan Dana Tanaman Keras berusaha untuk mentjari sendiri pohon² induk kelapa djenis unggul dengan petundjuk² dari Balai Penelitian Kelapa dan Tanaman Lemak lainnja di Bogor. Dalam hal ini telah didapat pohon² induk djenis unggul di Daerah² Banten, Tasikmalaja dan Tjiamis. Usaha² pentjarian ini akan diteruskan pula di Daerah² lain. Untuk mendjamin tersedianja bibit² kelapa djenis unggul ini dikemudian hari direntjanakan akan dibuat kebun induk kelapa menurut petundjuk Balai Penelitian jang berwenang.

14. Peremadjaan Tjengkeh.

Minat Petani akan peremadjaan tanaman tjengkeh tjukup besar, jang dapat dilihat dari ada peremadjaan/perluasan tanaman tjengkeh setjara spontan di berbagai daerah. Hal ini disebabkan harga² tjengkeh jang baik dan djuga karena tanaman tjengkeh dapat ditanam di pekarangan bertjampur dengan tanaman² lain.

Tanaman tjengkeh rakjat di Djawa Barat kebanyakan masih muda sehingga peremadjaan sifatnja hanya perluasan sadja. Dalam tahun 1964 telah dikirimkan ke Daerah² bibit² tjengkeh dari Bogor sebanjak 21.221 batang bibit untuk disalurkan, jang diharapkan dapat menambah areal tanaman tjengkeh selusa 200 Ha. tetapi sajang menurut laporan² sementara bibit tjengkeh tersebut banjak jang mati diperdjalan dan di-tempat² penampungan. Untuk tahun 1965 telah diselenggarakan pembibitan tjengkeh sebanjak 80.000 bidji.

15. Pembibitan.

Target pembibitan tjengkeh sebanjak 80.000 bidji untuk tahun 1965 ini telah dilaksanakan di 11 daerah/tempat. Diharapkan sedjumlah bibit^a tsb. itu nanti dapat meremajakan/memperluas areal tanaman tjengkeh sebanjak 600 Ha.

16. Tanaman Keras jang lain.

Masih dalam pemikiran dan survey untuk menetapkan rentjana peremajaan/pembina dan peningkatan mutunya.

Sektor Pengairan.

1. Dalam tahun^a antara 1945 — 1949 jang diutamakan ialah perdjangan bersendjata melawan Belanda hingga pada areal sawah tidak terdapat perluasan dan pemeliharaan pada bangunan pengairan dan pembangunan pengairan baru tidak begitu dipikirkan, hingga keadaannya menjadi mundur kalau dibandingkan dengan keadaan sebelum perang dunia kedua.
2. Bendungan jang ambruk pada waktu itu ialah bendungan Sungapan di Kali Tjilamaja hingga 3000 Ha. sawah teknis dan 7000 Ha. $\frac{1}{2}$ teknis terhenti pengairannya. Pembangunan kembali bendungan tersebut dilakukan dengan menjatukan Kali Tjiherang dan Tjilamaja di Barugbug dan pembikinan bendungan jang moderen jang menghasilkan 5000 Ha. teknis 5000 Ha. $\frac{1}{2}$ teknis. Pekerdjaaan ini selesai dalam tahun 1950.
3. Dari tahun 1950 hingga 1955 mulai setapak demi setapak pada pemeliharaan dan pembangunan pengairan baru, tapi berhubung keadaan keamanan Djawa Barat terganggu, maka pemeliharaan tersebut tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
4. Tetapi walaupun demikian kemajuan dapat dirasakan seperti terlihat dibawah ini:

Tahun	Sawah teknis. ha.	Sawah $\frac{1}{2}$ teknis. ha.	Sawah liar (Pengairan desa) ha.
1945	427.785	253.436	178.490
1959	496.099	199.386	247.503
1965	504.778	198.395	247.311

5. Pekerdjaaan^a baru jang dikerdjakan antara 1950 — 1965 ialah sbb.:

Nama Pekerjaan	Dimulai dlm. th.	Tudjuan untuk mengairi ha.	Keadaan pekerjaan pada tahun 1965
1. Pengairan Tjisedane Barat (Dt. II Tanggerang).	1954	12.055	Tinggal memperlebar saluran lama sepanjang 4½ Km.
2. Pengairan Lakbok (Bendungan Petaruman Dt. II Tjiamis).	1958	12.600	Baru selesai untuk 7.033 ha. perlu dilandjutkan.
3. Waduk Darma (Dt. II Kuningan).	1938	langsung 15.636 tidak „ 12.425	Pekerdjaan Waduk telah selesai tinggal merehabilitateer saluran.
4. Pengairan Tjidurian (Dt. II Tanggerang).	1961	memperbaiki 8.045 baru 4.255	Pekerdjaan baru ½ selesai dan harus dilandjutkan.
5. Pengairan Baranangsiang (Dt. II Garut).	1959	lama 500 baru 2.500	Baru selesai separuhnja dan perlu sekali dilandjutkan.
6. Pengairan Tjikunten (Dt. II Tasikmalaja).	1961	6.323	Baru selesai bagian I dan perlu dilandjutkan.
7. Pengairan Djatiluhur.	1960	240.000	Dalam achir th. 1965 diharapkan saluran induk + bangunannja selesai. Pekerjaan detailbevloeiing perlu dilandjutkan dalam th.² kemudian.

Sektor Pertanian.

1. Seperti telah dikemukakan dalam perincian luasnya Daerah Jawa Barat, luas tanah pertanian adalah $\pm 25\%$ dari luas Jawa Barat, dari luas mana $\pm 1.148.000$ ha. terdiri dari tanah sawah dan sisanya tanah darat, angka tersebut pada umumnya dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan² yang berarti.
2. Sedjarah memperlihatkan pula bahwa sedjak zaman purbakala daerah Jawa Barat dalam sektor pertanian mempunyai riwayat yang penting, meskipun penjelenggaraannya belum mempergunakan alat² modern akan tetapi dalam beberapa hal telah menjapai kemajuan dan dilakukan setjara intensif.
3. Pada dewasa ini pertanian masih merupakan sektor yang utama dalam aktivitas perekonomian bangsa, dimana hampir 70% penduduk Jawa Barat hidup dari sumber pertanian.
Tanaman² yang terpenting adalah:
 - a. Tanaman padi
 - b. Tanaman palawidja
 - c. Tanaman untuk perdagangan.
4. Usaha-usaha pertanian bahan makanan sedjak tahun 1950 sampai dewasa ini pada umumnya memperlihatkan kemajuan. Produksi dalam garis besarnya terus meningkat djika tidak terdjadi hal² yang tidak diharapkan, berupa bentjana bandjir, hama/penjakit tanaman dsb.
5. Penanaman padi merupakan aktivitas terbesar dari pada pertanian rakjat dimana sumber² beras berada di Jawa Barat bagian Utara/Timur dan Jawa Barat bagian Tengah.
Produksi padi mengalami kemajuan yang menggembirakan. Hal ini tertjapai berkat keinsjafan para petani sendiri dibantu dengan penju-luhan dan bimbingan para petugas pertanian dan Djawatan lainnya. Achir² ini jaitu pada tanggal 20 Mei j.b.l. seorang penduduk desa Sukasono, Kabupaten Garut telah menerima hadiah pertama sebagai radja Padi seluruh Indonesia (Djuara Nasional). Usaha² pembangunan dalam sektor pertanian dikerdjakan terus-menerus, lebih² setelah dinjatakan untuk tidak mengimport beras lagi.
Usaha intensifikasi pengairan diusahakan se-baik²-nja dengan a.l. menjatakan tahun 1964 sebagai tahun irrigasi Jawa Barat. Dengan selesainya proyek Djatiluhur, yang dapat mengairi setjara teratur sawah seluas 240.000 ha., diharapkan dalam tahun 1965 ini, Jawa Barat dapat memperlihatkan kelebihan produksi padinya angka² kemajuan/perkembangan disektor pertanian dapat dilihat dibawah ini:

Produksi padi dalam ton (kering).

Tahun	Padi Sawah	Padi Gogo	Djumlah P. Sawah + P. Gogo	Keterangan
1950	—	—	—	—
1951	—	—	—	—
1952	—	—	—	—
1953	2.955.415	113.769	3.069.182	Rata ² th. 1950 s/d 1956.
1954	—	—	—	—
1955	—	—	—	—
1956	3.349.236	113.419	3.462.655	—
1957	3.379.254	138.713	3.518.172	—
1958	3.338.308	126.378	3.464.686	—
1959	3.397.597	152.676	3.550.273	—
1960	3.309.685	206.516	3.516.201	—
1961	3.279.999	249.836	3.529.835	Angka sementara
1962	3.323.366	329.999	3.653.365	BPS. Angka Djawa-
1963	3.424.413	280.446	3.704.860	tan Pertanian Dt. I
1964	3.962.913	291.627	4.254.558	Djawa Barat.

b. Luas panen padi Sawah dan padi Gogo di Daerah Tingkat I Djawa Barat (dalam Ha.).

Tahun	Padi Sawah	Padi Gogo	Djumlah P. Sawah + P. Gogo	Keterangan
1950	—	—	—	—
1951	—	—	—	—
1952	—	—	—	—
1953	1.363.723	97.740	1.461.463	Rata ² th. 1950 s/d 1956.
1954	—	—	—	—
1955	—	—	—	—
1956	1.501.279	93.931	1.595.250	—
1957	1.526.524	112.949	1.639.473	—
1958	1.526.881	121.060	1.647.941	—
1959	1.498.891	123.205	1.622.096	—
1960	1.484.382	153.924	1.638.306	—
1961	1.341.075	159.263	1.500.338	Angka sementara
1962	1.368.435	209.805	1.578.240	BPS. Angka Djawa-
1963	1.245.425	205.615	1.451.037	tan Pertanian Dt. I
1964	1.331.933	219.491	1.551.424	Djawa Barat.

c. Rata² basil (Kw/Ha padi kering) padi sawah dan padi gogo di Dt. I Djawa Barat (Angka² dari Biro Pusat Statistik).

Tahun	Padi sawah	Padi Gogo	Djumlah padi Sawah + P. Gogo	Keterangan
1950	—	—	—	Rata ² tahun 1950 s/d 1956.
1951	—	—	—	
1952	—	—	—	
1953	21,39	11,48	21,—	
1954	—	—	—	
1955	—	—	—	Angka sementara Angka Djaw. Pertanian Dt. I Djabar.
1956	22,31	12,07	21,71	
1957	22,14	12,30	21,46	
1958	21,86	10,44	21,02	
1959	22,67	12,39	21,46	
1960	22,30	13,42	21,46	
1961	24,46	15,69	23,53	
1962	24,29	15,73	23,15	
1963	27,40	13,60	20,50	
1964	29,80	13,30	21,10	

d. Produksi djenis tanaman palawidja dan tanaman untuk perdagangan menurut angka² dari Djawatan Pertanian pada umumnya djuga memperlihatkan kenaikan. Produksi sajian dari tahun ke tahun terus meningkat. Pasaran dari produksi ini bukan sadja kota² di Djawa Barat melainkan djuga Djakarta bahkan sampai ke Palembang. Produksi sajian dalam tahun 1953 tertjatat 292.708 ton, dalam tahun 1954 berdjumlah 384.275 ton dan dalam tahun 1955 meningkat djodi 482.117 ton.

e. Produksi Djagung didaerah Tingkat I Djawa Barat (Angka² dari Biro Pusat Statistik).

Tahun	Luas punggu- tan (ha).	Prod. Bidji kering (ton)	Hasil rata ² (Kw/ha)	Keterangan
1951	—	—	—	Rata ² tahun 1950 s/d 1956.
1952	—	—	—	
1953	59,659	60,647	10,3	
1954	—	—	—	
1955	—	—	—	
1956	76,178	78,525	10,31	Angka sementara, Angka Djaw. Pertanian Dt. I Djabar.
1957	68,417	66,922	9,78	
1958	86,992	86,742	9,97	
1959	75,470	66,180	8,77	
1960	103,649	108,104	10,43	
1961	101,713	119,864	11,78	
1962	150,895	193,754	12,84	
1963	138,652	183,078	13,1	
1964	245,303	348,998	14,2	

f. *Produksi Ketela pohon di Daerah Tk. I Djawa Barat (Angka² dari Biro Pusat Statistik).*

Tahun	Luas Pengu- tan (ha.)	Prod. Umbi berkulit (ton)	Hasil rata²	Keterangan
1951	—	—	—	—
1952	—	—	—	—
1953	136.871	1.082.301	79	Rata² tahun 1950 s/d 1956.
1954	—	—	—	—
1955	—	—	—	—
1956	157.449	1.366.626	87	—
1957	134.600	1.555.571	85	—
1958	235.343	2.011.534	85	—
1959	270.009	2.409.955	89	—
1960	262.027	2.470.035	94	—
1961	259.459	2.286.164	88	—
1962	242.496	1.934.470	80	Angka² sementara.
1963	299.155	2.213.371	73,9	Angka² Djw. Pert.
1964	301.800	2.446.512	81	nian Dt. I Djabar.

g. *Produksi Ketela rambat di Daerah Tingkat I Djawa Barat (Angka² dari Biro Pusat Statistik).*

Tahun	Luas Pengu- tan (ha.)	Prod. Umbi (ton)	Hasil rata² (Kw/Ha.)	Keterangan
1951	—	—	—	—
1952	—	—	—	—
1953	60.134	330.537	54,8	Rata² tahun 1950 s/d 1956.
1954	—	—	—	—
1955	—	—	—	—
1956	94.635	509.605	54,—	—
1957	106.994	590.353	55,—	—
1958	109.955	584.395	53,—	—
1959	99.067	522.297	53,—	—
1960	99.334	594.815	60,—	—
1961	83.458	467.938	56,—	Angka² sementara.
1962	134.024	722.687	54,—	Angka² Djw. Pert.
1963	104.652	545.575	52,1	Rakjat Dt. I Djawa
1964	137.306	745.720	54,3	Barat.

h. *Produksi Katjang tanah di Daerah Tingkat I Djawa Barat (Angka³ dari Biro Pusat Statistik).*

Tahun	Luas Pungutan (ha.)	Prod. biji kering (ton)	Hasil rata ² (Kw/Ha.)	Keterangan
1951	—	—	—	Rata ² th. 1950 s/d 1956.
1952	—	—	—	
1953	57.142	40.566	7	
1954	—	—	—	
1955	—	—	—	
1956	63.703	42.370	6,65	Angka ³ sementara. Angka Djw. Pertanian Rakjat Dt. I Djawa Barat.
1957	66.781	46.653	6,99	
1958	72.083	47.408	6,38	
1959	68.247	44.224	6,48	
1960	78.813	48.424	6,56	
1961	68.424	45.678	6,68	
1962	68.621	46.007	6,70	
1963	68.820	88.293	12,8	
1964	89.899	127.813	14,4	

i. *Produksi Kedele di Daerah Tingkat I Djawa Barat (Angka³ dari Biro Pusat Statistik).*

Tahun	Luas Pungutan (Ha.)	Prod. biji kering (ton)	Hasil rata ² (Kw/Ha)	Keterangan
1951	—	—	—	Rata ² th. 1950 s/d 1956.
1952	—	—	—	
1953	24.106	14.510	6,—	
1954	—	—	—	
1955	—	—	—	
1956	26.335	14.896	5,66	Angka ³ sementara. Angka Djw. Pertanian Rakjat Dt. I Djawa Barat.
1957	23.047	15.312	6,64	
1958	27.260	18.297	6,94	
1959	27.211	18.984	6,98	
1960	29.690	19.888	6,70	
1961	31.604	18.809	5,95	
1962	33.692	20.612	6,12	
1963	29.807	18.921	6,3	
1964	39.986	27.326	6,8	

j. *Produksi hasil Pertanian Rakjat bahan Perdagangan (dalam ton).*

No.	M a t j a m	1953	1954	1955	1956
1.	K a p o k	695	725	783	783
2.	K a p a s	180	147	143	120
3.	R a m i	—	—	3	1
4.	Tembakau Rakjat	3.317	4.952	3.545	4.000
5.	Tjoklat	1	1	1	1
6.	Pandan	**)	**)	**)	**)
7.	Sereh	405	561	452	460
8.	Pinang	2.589	2.347	2.027	2.027
9.	P a l a	2	2	2	2
10.	Tjengkeh	34	35	32	32
11.	L a d a	36	40	45	45
12.	Teh Rakjat	5.712	12.225	12.676	12.750
13.	K o p i	372	400	400	425
14.	Tebu Rakjat	11.200	28.157	91.542	78.750
15.	Mendong	157.460	51.985	45.000	45.000
16.	Kelapa	140.000	140.000	140.000	140.000
17.	K i n a	8	12	12	20

Diatas telah diuraikan perkembangan/peningkatan produksi pertanian rakjat, jang dari angka² statistik pertumbuhannya dari tahun ke tahun dapat dilihat dengan djelas.

Akan tetapi jang sungguh harus disesalkan adalah, bahwasanja dibalik kenaikan produksi seperti diterangkan diatas, masih terdapat hal-hal jang mengetjewakan.

Kenaikan produksi bahan makanan jang terpenting terutama beras pada kenjataanja di Djawa Barat tidak dapat menutupi kebutuhan masjarakat pada umumnya, s.d.l. disebabkan karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan kesulitan pengangkutan. Djuga kota Djakarta jang tidak sedikit menjedot beras Djawa Barat, mengakibatkan hal² seperti diuraikan diatas.

Disamping itu terdapat pula faktor² jang umumnya terdjadi dalam lingkungan kesibukan perdagangan. Beras lambat-laun mendjadi objek

Sumber: Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Djawa Barat.

**) Produksi Pandan:

1953: 59.202 ton tika; 659.345 buah topi; 685.410 buah kantong.

1954: 84.008 ton tika; 5.862.744 buah topi; 1.110 buah; expt.

1955: 480.000 kodi tika; 358.000 kodi topi; 74.000 kodi kantong/karung.

1956: 48.000 kodi tika; 350.000 kodi topi; 74.000 kodi kantong.

perdagangan jang penting sekali; bahkan akhir² ini dalam perdagangan beras terlihat tendens² spekulatif.

Harganja dari masa ke masa terus meningkat. Djika harga beras di Bandung pada tahun 1950 berkisar pada Rp. 1,— dan Rp. 1,50 per liter, pada bulan Djuli 1965 harganja mendjadi Rp. 300,— dan Rp. 330,— per liter. Dengan meningkatnja harga beras, ikut naik pula harga bahan makanan dan barang keperluan hidup lainnja.

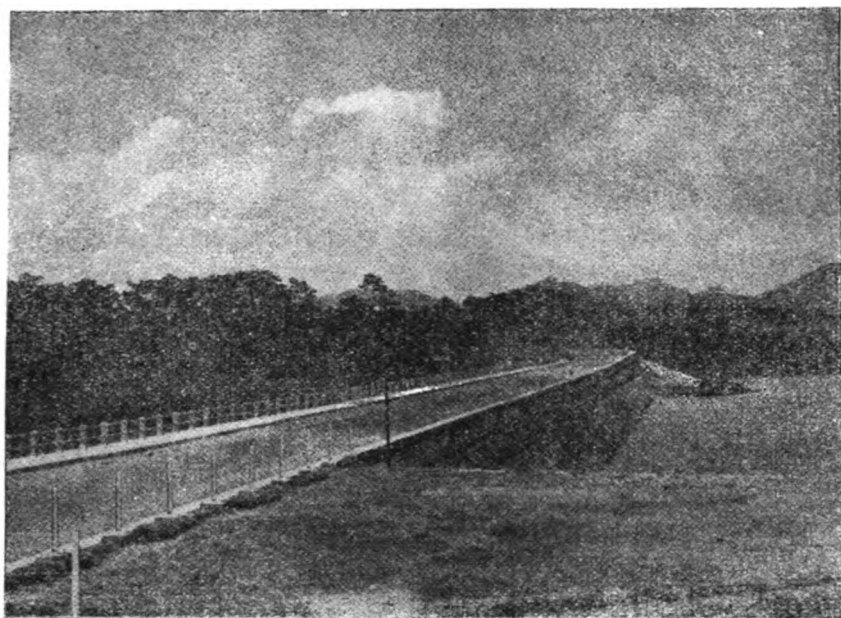
Bahwasanja bahan hidup rakjat di Djawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, diantara lain dapat terlihat dari angka² indeks dltimbang dari harga 19 matjam bahan makanan terpenting.

Statistik harga 19 matjam bahan makanan terpenting.

Tahun	Angka ² — Indeks	
1945		
1946		
1947		
1948	100.—	Bulan Djuli
1949	—	
1950	403.—	„
1951	2.287.—	„
1952	2.473.—	„
1953	2.632.—	= 100.—
1954		101.—
1955		133.—
1956		150.—
1957		156.—
1958		234.—
1959		304.—
1960		390.—
1961		434.—
1962		1.301.—
1963		3.145.—
1964		„
1965		„

A. Sektor Perikanan Darat.

1. Usaha masjarakat dalam lapangan Perikanan Darat sedjak tahun 1951 hingga saat ini memperlihatkan perkembangan jang tjukup



Projek Irrigasi „Waduk Darma”.

membesarkan hati. Angka² produksi seperti tertijantum dibawah ini memberikan bukti jang njata:

<i>Tahun</i>	<i>Hasil dalam ton</i>
1951	15.000
1952	15.800
1953	25.400
1954	32.100
1955	44.300
1956	47.900
1957	48.000
1958	51.700
1959	48.400
1960	55.600
1961	49.500
1962	50.200
1963	58.400
1964	65.300

2. Pada saat² Rakjat Djawa Barat menjelenggarakan rehabilitasi disegala sektor ekonomi, maka sektor perikanan daratpun digiatkan, bahkan dalam menudju pada kesempurnaan pengusahaan ikan darat ini di Bandung telah diselenggarakan pertemuan² Internasional jang membahas masalah² perikanan darat, antara-lain dalam tahun 1957 (Conferensi Indo Pacific Fishery Council).
3. Sedjalan dengan usaha penjempurnaan ini pula pada periode ini Djawatan Perikanan mengadakan kursus² ditiap Kabupaten, dan khusus di Singaparna terdapat Sekolah Perikanan Darat jang menghasilkan tenaga² Kader dalam bidang ini. Daerah Singaparna hingga sekarang merupakan sumber bibit ikan darat dari seluruh Indonesia.
4. Usaha² jang hingga sekarang sedang digiatkan terus dalam sektor perikanan darat adalah:
 - a. Mengadakan demonstrasi/propaganda.
 - b. Pendidikan, jaitu kursus² mengenai perikanan darat.
 - c. Memberikan penerangan/petunjuk² tentang koperasi/ organisasi dalam usaha perikanan darat.
 - d. Memberikan petunjuk dalam peternakan, pembesaran dan penjebaran benih ikan.
 - e. Mengatur/membimbing pemusatan pendjualar² benih.
 - f. Mengusahakan alat²/bahan² perikanan.
 - g. Mengadakan pertjobaan².

- h. Pembasmian hama/penjakit.
- i. Usaha perbaikan teknik perikanan.

B. Sektor Perikanan Laut.

1. Perikanan Laut sebagai salah satu penghasil/sumber protein ikan jang penting bagi bahan makanan, pada umumnja masih dalam pertumbuhan.
2. Usaha² kearah modernisasi dari tjara² penangkapan ikan, boleh dikatakan baru mulai dalam tahun 1950. Meskipun dalam usaha² tadi ditjapai djuga kemadjuan² jang menggembirakan akan tetapi haruslah diakui, bahwa dibanjak lapangan, pembangunan belum dapat dilaksanakan seperti jang diinginkan.
3. Begitu pula keadaan perikanan laut dipesisir Djawa Barat, jang meskipun penangkapan ikan itu telah mendjadi mata pentjaha-rian sedjak dari dahulu kala, namun pada umumnja tjaranja dan alat²-nja masih tetap dilakukan dengan sederhana (belum modern).
4. Dibawah ini tertera angka² produksi Perikanan Laut di Daerah Djawa Barat dari tahun ke tahun.

Tahun	Banjaknja (ton)	Keterangan
1951	17.459	
1952	17.424	
1953	18.117	
1954	20.432	
1955	13.532	
1956	13.532	
1957 s/d 1959		Angka ² belum lengkap
1960	19.000	
1961 s/d 1962		Angka ² belum tersedia
1963	20.020	dinilai dengan uang mendjadi Rp. 1.393.110.449,30
1964	30.409	dinilai dengan uang mendjadi Rp. 2.627.524.498,05

Dalam tahun 1964 mengalami kenaikan sebanyak 1.389 ton scharga Rp. 123.344.048,75 dikarenakan beberapa pihak jang mempengaruhi:

- a. Pentjataan angka produksi lebih sempurna.

- b. Successnja motorisasi.
- c. Adanja penambahan alat² Gill-net dan lain²-nja.
- d. Giatnja penangkapan dari para karyawan.
- e. Kadaan musim jang baik guna penangkapan.
5. a. Kooperasi perikanan laut dalam tahun 1960 tertjatat 30 buah.
- b. Organisasi perikanan laut swasta dalam tahun 1960 tertjatat 7 buah.
- c. Pelelangan ikan laut ada sebanjak 7 buah.
- d. Banjaknja ikan laut jang diawetkan dalam tahun 1960 tertjatat + 10.000 ton.
6. Banjaknja nelajan dan perahu penangkap ikan.

	1955	1956	1960	1961	1962	1963	1964
1. Nelajan	27.913	24.498	45.000	*)	*)	51.257	55.537
2. Perahu motor	95	128	—			46	49
3. Perahu lajar:							
a. Besar	978	973				1.465	1.647
b. Sedang	1.511	1.480				2.523	2.917
c. Ketjil	1.564	1.967				2.534	2.849

7. Hasil penangkapan ikan seperti tertera pada daftar diatas tadi dalam tahun 1956 baru mentjapai djumlah produksi jang memenuhi 1/3 (sepertiga) dari kebutuhan protein chewani jang dibutuhkan dan dianggap lajak bagi keperluan kesehatan.
8. Dalam 5 tahun jang terachir ini dalam rangka usaha mempertinggi produksi, telah diusahakan hal² sebagai berikut:
 - a. Menambah alat² perikanan termasuk perahu².
 - b. Menambah djumlah tenaga nelajan.
 - c. Mengusahakan modernisasi, motorisasi dan mekanisasi perikanan rakjat.
 - d. Dibidang keilmuan teknik mengadakan penjelidikan.
 - e. Dibidang biologis mempeladjadi sifat² dan tabiat ikan.
 - f. Tabiat² ikan beserta sarang² tempat ikan (fisground).
 - g. Penjelidikan teknis mengenai type dari kapal² jang sesuai dengan keadaan setempat.
 - h. Penjelidikan mengenai kemungkinan mengintensifkan alat² penangkapan ikan jang disesuaikan dengan keadaan setempat. Baik alat itu didatangkan dari luar negeri, maupun dari lain tempat, dari dalam negeri.

7 Bahan belum lengkap, begitu pula mengenai tahun 1957 s/d 1959.

9. *Banjaknja alat seperti majang, djabur sero dsb.*

Tahun 1963 — 24.015 buah

Tahun 1964 — 25.229 buah

10. *Pemakaian Garam.*

Tahun 1963 — 3.708.289 Kg. seharga Rp. 43.906.404,30

Tahun 1964 — 5.771.056,5 Kg. seharga Rp. 111.370.390.—

11. *Pengolahan Ikan terdiri dari:*

Tahun	Pindang kg.	Gereh kg.	Peda kg.	d.l.l. kg.	Djumlah kg.
1963	5.357.240	7.696.788	23.145	50.609.730	18.106.900
1964	9.032.958	15.054.930	505.493	4.816.479	30.409.860

12. *Pendapatan ikan basah.*

Tahun 1963 — 29.020.707,30 Kg. seharga Rp. 1.393.110.449,10

Tahun 1964 — 30.409.860,— Kg. seharga Rp. 2.627.524.498,05

13. *Usaha² modernisasi/motorisasi merupakan sarat utama.*

Sedjak tahun 1957 dimana pembagian kapal motor dilakukan oleh Djawatan Perikanan laut Pusat dalam rangka rentjana kesedjahteraan istimewa (R.K.) terus-menerus diadakan sampai dengan tahun 1963 hanya tjorak dan bentuknja berlainan.

Dalam tahun 1950 Djawatan Perikanan Laut Resort I Djawa Barat mengadakan pertjobaan penangkapan ikan dengan kapal bermotor bernama *Ikan² Merah* selama 3 bulan.

Tahun 1951 s/d 1955 diadakan pembagian kapal motor sebanyak 5 buah atas dasar sewa beli setjara kolektiv. Tjara kolektiv ini ternjata mendapat hasil jang kurang memuaskan hingga tahun 1954/1955.

Awal tahun 1957 usaha motorisasi dengan djalan memberikan kapal motor setjara sewa beli perseorangan dengan dipungut tjitjilan 15% memperbaiki kegagalan termaksud diatas.

Sektor Kehewan.

1. Sebegitu djauh sedjak tahun 1940 hingga kini belum diketahui dengan pasti keadaan „veestapel” di Daerah Djawa Barat, baik hewan ternak besar, maupun hewan ternak ketjil dengan diperintji menurut djenisnja.

Menurut angka² statistik jang terdapat pada Djawatan Kehewan, banjaknja hewan ternak di Daerah Djawa Barat dalam

tahun 1950 dibanding dengan keadaan dalam tahun 1940 adalah sebagai berikut:

Djenis Ternak	Banjaknja (ekor)	
	Tahun 1940	Tahun 1950
K u d a	63.000	36.000
S a p i	102.000	88.000
K e r b a u	826.000	632.000
Kambing	5.949.000	4.317.000
D o m b a	1.891.000	1.999.000
B a b i	1.267.000	1.184.000

Dari angka² tersebut diatas dapat diketahui, bahwa keadaan „vee-stapel” selama 10 tahun itu telah merosot dengan $\pm 22\%$.

Kemudian dalam tahun 1961 tjatatan angka veestapel itu memperlihatkan perobahan jang menjolok apabila dibandingkan dengan perangkaan tersebut diatas, ialah seperti tertera dibawah ini:

Daftar banjaknja hewan ternak didaerah Djawa Barat

Djenis Ternak	D j u m l a h e k o r			
	1961	1962	1963	1964
Kuda	33.336	40.463	41.110	38.478
Sapi	141.467	115.135	115.313	115.263
Kerbau	656.890	699.965	797.829	801.416
Kambing	2.863.793	1.047.210	1.173.709	1.178.460
Domba		1.262.730	1.347.009	1.557.712
Babi	45.023	50.891	61.904	57.123
Ajam/Itik	11.537.603	9.799.892	9.968.244	9.858.826
Kelintji	—	—	—	45.440

Lima Daerah Tk. II belum melaporkan djumlah unggas.

- Memang telah tjukup diketahui, bahwa Daerah Djawa Barat sedjak lama merupakan Daerah minus akan hewan ternak, terutama hewan² besar seperti sapi dan kerbau. Kekurangan akan hewan besar untuk dipotong didatangkan dari Daerah² lainnja, teristimewa dari Djawa Tengah dan Djawa Timur, jang tiap tahunnja berkisar antara 150.000 sampai 200.000 ekor.

Kebutuhan Rakjat Djawa Barat akan protein hewani menurut perhitungan adalah ± 15 gram sehari seorang, sedangkan pada waktu² ini kebutuhan itu baru terpenuhi 4,5 gram saja.

3. Penyakit hewan berbahaja jang banjak terdapat di Daerah Djawa Barat adalah: Antrax, Septichaemia — Epizootica, Aphthae — Epizootica dan Rabies. Penyakit jang senantiasa mengganas pada hewan² ternak dari tahun ke tahun adalah Aphthae-Epizootica. Dalam tahun 1952 tertjat 9.570 ekor hewan ternak jang terserang penyakit ini diantara mana tertjat sapi sebanjak 3.468 ekor. Dalam tahun berikutnya terutama dalam bulan September tertjat 3.998 ekor sapi perah di Lembang dan Tjisarua jang terserang penyakit ganas ini. Angka ini sampai kini merupakan angka jang tertinggi.
4. Guna memberantas dan mendjaga mendjalarnya penyakit hewan menular, maka setjara terus-menerus dilakukan penjurukan preventif dan/atau kuratif dipelbagai tempat, sedangkan disamping itu dilakukan pula tindakan² observasi/pengasingan bila dianggap perlu.
5. Dalam menghadapi usaha membina dan memperbesar djumlah hewan ternak, baik hewan besar maupun ketjil, termasuk unggas (ajam/itik), Djawatan Kehewanan sebagai petugas Pemerintah dalam dunia kehewanan, menitik beratkan garapan pekerdjaannya pada 7 (tudjuh) pokok usaha jaitu:
 - a. Memperbanjak djumlah ternak jang telah ada.
 - b. Mempertinggi usaha ternak rakjat.
 - c. Memperbesar djumlah djenis ternak.
 - d. Mentjegah mendjalarnya penyakit hewan jang menular kepada manusia.
 - e. Mentjegah berdjangkitnja penyakit menular.
 - f. Mendjinakkan kerbau liar di Selatan Djawa Barat.
 - g. Pembelian bibit ternak bagi rakjat.

Pendjelasan:

- a. Usaha pokok 1 s/d 3 sangat erat hubungannya dengan pembelian bibit ternak bagi rakjat, bahkan tergantung pada realisasi dari pembelian tersebut.
- b. Usaha pokok 4, dilakukan dengan djalan usaha penggunaan Vaccin dan serum, baik setjara curatief maupun setjara preventif.
- c. Usaha pokok ke 5, didjalankan dengan berbagai tjara:
 - (1). Membunuh hewan sakit berbahaja.
 - (2). Mengasingkan hewan jang berpenjakit menular sampai sembuh atau mati.
 - (3). Mengobati ternak setjara besar²-an dengan Vaccin atau Serum.

- d. Usaha pokok ke 7, dengan djalan menjalurkan bibit ternak kepada rakjat dengan sistim „Sumber Kontrak”.
6. Disamping usaha peningkatan Djiwa ternak, protein chewani di-tingkatkan dengan djalan meningkatkan produksi susu perah. Usaha kearah ini a.l., usaha untuk mempopulerkan susu kambing, dengan berbagai tjara:
 - a. Penempatan unit² kambing perah di Daerah².
 - b. Usaha extensi kepada rakjat perseorangan, baik dengan djalan pertundjukan/pameran.

Sektor Kelistrikan.

1. Dalam abad atom sekarang ini listrik merupakan sesuatu jang sangat penting. Kemadjuan dan ketertiban dalam bidang ekonomi, kebudaajaan, pendidikan kemasjarakatan dan keamanan rakjat, sungguh banjak sekali tergantung pada madju mundurnja dunia kelistrikan. Sungguh tepat apa jang telah diamanatkan oleh P.J.M. Presiden pada waktu hari listrik & gas tahun 1961 dimana beliau mengatakan bahwa „LISTRIK ADALAH SOSIALISME dan SOSIALISME ADALAH LISTRIK”. Djelaslah disini, listrik merupakan salah satu alat revolusi jang utama dalam menudju kepada masjarakat jang adil dan makmur. Bahwasanja peranan tenaga listrik dalam pembangunan adalah sangat penting, dapat ditandakan kembali kesimpulan² Musjawarah Nasional Pembangunan tahun 1957 jang antara lain berbunji sebagai berikut: Kelistrikan adalah;

- a. sjarat mutlak untuk perindustrian,
- b. alat jang amat besar faedahnja dalam perkembangan hidup modern baik hidup kenegaraan maupun hidup perorangan.

Tersedianja listrik jang tjukup dan murah memang akan merupakan suatu dorongan jang langsung kepada swadaja rakjat, guna perbaikan tjara kerdja, peninggian daja guna kerdja serta memperluas usaha² dalam bidang pertanian, perindustrian dan sebagainya.

Pandangan dari sudut sosial ekonomi menundjukkan, bahwa dengan meningkatnja taraf ketjerdasan dan djumlah penduduk maka kebutuhan akan tenaga listrik meningkat pula. Njatalah bahwa pembangunan dan perluasan pembangkitan dan penjaluran tenaga listrik harus dilakukan setjara maksimal.

Tenaga listrik mempunyai pengaruh² pembiakan (multiplying effect) bagi pertumbuhan usaha² ekonomi di-bidang² lainnja jang besar sekali. Tetapi disamping dasar² perhitungan pengusahaan listrik jang bersifat sosial ekonomi, perlu pula didasarkan atas pertimbangan² segi ekonomi perusahaan, sehingga perusahaan² listrik setjara keseluruhan .

dapat mendjamin dirinja sendiri untuk pembiajaan exploitasi, pcmba-
haruan dan sebagainya jang diperlukan.

Dalam bidang pertahanan negara listrik mempunyai peranan jang
besar sekali, sebab suatu pertahanan negara jang sempurna sangat
bergantung kepada industri² berat dan industri² berat ini memerlukan
tenaga listrik jang banjak pula. Adanja tenaga listrik jang banjak dan
industri² berat akan membuka pula lapangan kerdja jang sangat luas
bagi masjarakat. Oleh sebab itu betapa pentingnja arti pengusahaan
listrik jang merupakan unsur inti dari perkembangan kemakmuran
dan pertahanan negara, sudahlah djelas.

Berhubung dengan sifat²-nja jang vital dan merupakan unsur inti
ini, serta sesuai dengan U.U.D. '45 pasal 33, maka kebidjaksanaan
dari usaha² pembangkitan dan penjaluran scrta tarip tenaga listrik
jang pada mulanja sebagian dikuasai oleh pihak swasta, setjara ber-
angsur² telah dapat dikuasai seluruhnja oleh negara.

Berdasarkan amanat PJM. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Man-
datis MPRS pada tanggal 11 April 1965 di lepan sidang pleno ke-
III MPRS, jang berdjulul „BANTING STIR UNTUK BERDIKARI”,
maka dengan ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965, pasal 2, *listrik
dan ketenagaan telah ditetapkan sebagai projek prioritas jang berarti bahwa
tenaga listrik merupakan sarat utama bagi pelaksanaan ekonomi dan PEM-
BANGUNAN, demi suksesnja penjelesaian Program Ekonomi Perdjua-
angan.*

2. *Perkembangan kelistrikan di Djawa Barat.*

Seperti telah dikemukakan terlebih dahulu, Djawa Barat terdiri seba-
gian besar dari daerah pegunungan, dimana terdapat sumber² air bagi
penggerak tenaga listrik. Dibandingkan dengan daerah² lain di In-
donesia, maka sampai saat ini Djawa Barat memiliki potensi tenaga
listrik jang terbesar dari seluruh Indonesia dan merupakan penghasil
hydro-electric jang utama. Perkembangan elektrifikasi di Djawa Barat
adalah sebagai berikut:

Tahun 1900, elektrifikasi Bandung dan Tjimahi.

Tahun 1925, elektrifikasi Bogor, Sukabumi dan Garut.

Tahun 1928, elektrifikasi Tasikmalaja, Tjibadak, Bandjaran, Soreang,
Krawang dan Padalarang.

Tahun 1930, elektrifikasi Serang dan Rangkasbitung.

Dewasa ini di Djawa Barat terdapat sentraal hydro-electric (PLTA) di:

- | | | |
|---------------|------------------|-------------|
| (1). Sukabumi | — Ubrug | 17.100 Kva. |
| (2). Bogor | — Kratjak | 16.500 Kva. |
| (3). Sumedang | — Parakankondang | 10.000 Kva. |
| (4). Bandung | — Tjikalong | 19.000 Kva. |

- | | | | |
|------|------------|------------------|--------------|
| (5). | Bandung | — Plengan | 5.150 Kva. |
| (6). | Bandung | — Lamadjang | 19.000 Kva. |
| (7). | Bandung | — Dago + Bengkok | 3.950 Kva. |
| (8). | Purwakarta | — Djatiluhur | 125.000 Kva. |

Di-Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta-Raya terdapat sentral Termo-

- electric di:
- | | | | |
|------|----------------|---|----------|
| (1). | Antjol | — | 25.000 |
| (2). | Kebajoran Baru | — | 12.500 |
| (3). | Tandjung Priok | { | — 25.000 |
| | | { | — 25.000 |

Dengan meningkatnja perusahaan² industri, disertai dengan bertambahnja kebutuhan masjarakat Djawa Barat akan tenaga listrik, maka djumlah tenaga listrik jang sampai sekarang dihasilkan masih sangat kurang dan tidak dapat mengimbangi kebutuhan jang terus meningkat dengan tjepat.

3. *Organisasi.*

Usaha produksi dan distribusi kelistrikan diseluruh Indonesia dewasa ini dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara atau disingkat P.L.N. Djika sampai bulan Desember 1958 distribusi listrik di Djawa Barat diselenggarakan oleh GEBEO dan Aniem, maka perusahaan² itu sedjak saat tersebut diatas diambil-alih dan seluruhnja mendjadi milik Negara. Mendjelang tahun 1953 di Djawa Barat terdapat perusahaan listrik jang pengusahanja dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Melalui masa² nasionalisasi (tahun 1953-1954) dan pengambil-alihan sekitar tahun 1957-1959 (sdl. berdasarkan UUD 1945 ps. 33) serta pembentukan BPU-PLN pada tahun 1961 (berdasarkan UU No. 19 Prp. tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961), di Djawa Barat terdapat tiga buah kesatuan PLN jang bekerdja dibidang kelistrikan (1961-1964).

Kesatuan² tersebut adalah:

- a. PLN. Expl. XI khusus mengurus *distribusi* tenaga listrik dengan wilayah kerdja meliputi Djawa Barat ketjuali DCI Djakarta Raya + Dst. II Tanggerang.
 - b. PLN. Expl. XII khusus mengurus *distribusi* tenaga listrik dengan wilayah kerdja meliputi daerah DCI Djakarta Raya + Dst. II Tanggerang.
 - c. PLN. Expl. XIII khusus mengurus pembangkitan & penjaluran (transmissie) tenaga listrik dengan wilayah kerdja meliputi seluruh Djawa Barat termasuk DCI Djakarta Raya + Dst. II Tanggerang.
- Reorganisasi BPU-PLN mendjadi PLN dan PGN (gas) pada awal tahun 1965 (berdasarkan Peraturan Menteri P.U. & T. No. 9/1964 tgl. 28 Desember 1964) melebur ketiga Eksploitasi tsb. mendjadi dua

PERKEMBANGAN ORGANISASI

Tahun	Pembangunan		Pembangkitan & Penyaluran	
	Pengusaha	Wilayah Kerdja	Pengusaha	Wilayah Kerdja
1913-1920	L.W.B. (sLands Waterkracht Bedrijf)	Seluruh Indonesia	L.W.B.	Seluruh Indonesia
1920-1942	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
1942-1943	Shibu Djawa Denki Denki Djikgiosha.	Djawa	Shibu Djawa Denki Djikgiosha	Djawa
1943-1945	Denki Kosha		Denki Kosha	Djawa
1945-1948	Djawatan Tenaga Air	Djawa	Djaw. Listrik	
1948-1957	Djawatan Tenaga Air Direksi Konstruksi Daerah Priangan	Djawa Djawa-Barat	Penupetel (Perusahaan Neg. utk pembangkit tenaga listrik	Djawa-Barat
1957-1961	PLN. Daerah Pembangunan Priangan	Djawa-Barat	PLN. Pembangkitan	Djawa Barat excl. Dst. I DCI Dkt. Raya
1961-1965	PLN Pembangunan Perluasan PLTA ²	Djawa-Barat	PLN Expl. XIII	idem dan Dst. II Tangerang.
1965-skr.	Badan Pelaksana Projek ² Ketenagaan XI (dlm lingkungan Direktorat Ketenagaan dari DEPUT	Djawa-Barat	PLN Daerah Eksploitasi XI	Priangan, Tjirebon, Purwakarta, Tjiandjur, Tjima-hi, Garut dan Tasikmalaja

PENGUSAHAAN KELISTRIKAN

Distribusi		Keterangan
Pengusaha	Wilajah Kerdja	
B. E. M. (Bandoeng- sche Electriciteit Maat- schappy)	Bandung dan sekitar- nja.	
Gebeo (Gemeenschap- pelijk Electrisc B- drijf Bandoeng En Om- streken)	Djawa Barat excl. Dst. I Dkt. Raya Dst. II Tangerang — Tjire- bon Kota.	<i>Masa pergerakan Kemerdekaan.</i>
Shibu Djawa Denki Djikgiosha	D j a w a	<i>Masa Pendudukan Djepang.</i>
Denki Kosha		
Djawatan Listrik	D j a w a	<i>Masa Revolusi Pbisik.</i>
Gebeo.	Djawa Barat excl. Dst. I DCI Dkt. Raya Dst. II Tangerang, Tjire- bon Kota	<i>Tabun² „survival“.</i>
PLN. Bandung	Djabar excl. Dst. I DCI Dkt. Raya Dst. II Tangerang, Tjire- bon	<i>Tabun² „investment“ Sesuai dengan UUD '45 pas. 33, perus. jg vital, jang dapat menguasai hadjat hi- dup orang banjak harus dikuasai oleh Negara. Dlm hal ini dilaku- kan oleh Penguasaan Perusahaan² Listrik & Gas).</i>
PLN Exploitasi XI	idem	<i>Tabun² Pembangunan. B.P.U. P.L.N. (Badan Pimpinan Umum Perusa- haan Listrik Negara) jang ada dalam lingkungan DEPUT sedjak awal th. 1965 dipetjah mendjadi: PLN = Perusahaan Listrik Negara PGN = Perusahaan Gas Negara.</i>
idem	Priangan, Tjirebon, Purwakarta, Tjiandjur, Garut dan Tasikmalaja (Djabar Bagian Timur).	

buah Exploitasi Umum yang mengurus baik pembangkitan & penyaluran maupun distribusi tenaga listrik. Pembagian wilayah kerdjannya adalah sebagai berikut:

- a. PLN. Daerah Expl. XII berkedudukan di Djakarta, meliputi Daerah² Bogor, Sukabumi, Banten serta DCI Djakarta-Raya + Dst. II Tanggerang.
- b. PLN. Daerah Expl. XI berkedudukan di Bandung, meliputi Daerah Djawa Barat sisanja.

Chusus mengenai bidang pembangunan kelistrikan adalah mendjadi tugas dari pada PLN. Pembangunan (PLN. Pusat, sebelum reorganisasi tsb. diatas) dan kini mendjadi tugas Direktorat Ketenagaan Dept. P.U. & T'.

4. *Pemakaian Tenaga Listrik.*

Dalam melajani kebutuhan tenaga listrik dari masjarakat Djawa Barat selama 20 tahun j.l., PLN praktis bekerdja dengan mesin² pembangkit (generating unit) yang pada umumnya sudah „landjut” usianja. Walaupun sementara itu ada pembangunan² sentral baru/penambahan unit pada sentral lama, misalnja:

Sentral Ubrug didaerah Sukabumi (1951, tambah 1 mesin), sentral Parakankondang didaerah Tjirebon (1955), Sentral Kratak didaerah Bogor (1958, tambah 1 mesin), Sentral Tjikalong di Priangan Selatan (1960), Sentral Plengan di Priangan Selatan (1962, tambah 1 mesin) dan Sentral² lainnja didaerah DCI Djakarta Raya, namun kebutuhan tenaga listrik demikian meningkatnja sehingga PLN sampai masa ini belum dapat melajani setiap permintaan tenaga listrik setjara besar-besaran.

Perlu kiranja ditambahkan bahwa setjara teknik kelistrikan djaringan-listrik diseluruh Djawa Barat dan Daerah Djakarta-Raya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (interconnected system).

Ketidak seimbangan antara kebutuhan tenaga listrik (exploding demands) dengan kemampuan pembangkitan (sebagian besar terdiri dari sentral² hydris sedangkan sentral² termis yang ada di Djakarta sudah tjukup tua) mulai sangat terasa sedjak awal tahun 1963 j.l. Hal ini mengakibatkan perlu diadakannja pengurangan bebas (—pemadaman bergilir—) pada waktu² tertentu dimana beban/pemakaian tenaga listrik melebihi kemampuan membangkit dari sentral² tersebut. Pemadaman bergilir tersebut tiada lain dari pada usaha PLN untuk mengamankan penjediaan tenaga listrik.

Djelaslah bahwa untuk dapat mengikuti „exploding demand” terhadap kebutuhan tenaga listrik, perlu kiranja diadakan peningkatan yang berlipat ganda terhadap kemampuan penjediaan tenaga listrik

agar benar² dapat ditjapai apa jang di-tjita²-kan oleh revolusi Indonesia untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil; tjontohnja pembangunan sentral hydro Djatiluhur.

Walaupun demikian sentral Djatiluhur tersebut masih belum merupakan pembebas (verlosser) dari pada „kesengsaraan listrik” dewasa ini, akan tetapi lebih merupakan pengganti dari pada sentral² lainnja jang sudah tjukup „berusia”. Tudjuan utama adalah pengamanan kelangsungan penjediaan tenaga listrik (tanpa pemadaman²).

Usaha² untuk perluasan/pemberatan djaring transmisi/distribusipun dilakukan. Pelaksanaan kedua usaha itu pada dasarnya dilakukan oleh Direktorat Ketenagaan Departemen P.U. & T. dan tjepat atau lambatnja tergantung kepada tersedianja biaja serta peralatan jang diperlukan pada waktu jang bersangkutan.

Sebagai suatu public utility, PLN selalu berusaha membantu memenuhi kebutuhan masjarakat akan tenaga listrik, antara lain dengan tjara:

- mengamankan kontinuitas penjediaan tenaga listrik dengan sebaik-baiknja disesuaikan dengan keadaan mesin² pembangkit tenaga listrik pada saat ini.
- dengan tidak meninggalkan sjarat² teknis, demi untuk pengamanan tersebut dalam titik 1, mengerahkan setiap kemampuan penjediaan tenaga listrik untuk sedjauh mungkin membantu terlaksanaja program Ekonomi Perdjuaan, terutama dibidang pertumbuhan industri.
- sebanjak mungkin menggunakan bahan² dalam negeri untuk keperluan pemeliharaan/pembangunan instalasi² listrik (misalnja tiang² kaju, isolator² tegang tinggi dari bahan keramik, kawat listrik untuk instalasi tegang rendah dan lain²).

Dari seluruh tenaga listrik jang dibangkitkan pada masa-masa jang lampau, terlihat bahwa $\pm 70\%$ digunakan untuk penerangan, keperluan rumah tangga dan sebagainya dan hanja $\pm 30\%$ jang dapat disediakan untuk keperluan-keperluan industri, traksi d.l.l. prosentage mana sangatlah kurang.

Dalam membahas perkembangan penduduk di Djawa Barat telah disinggung adanja suatu keharusan perubahan dari struktur agraria kepada industri.

Djumlah pemilikan tanah jang ± 0.2 ha per capita tidak akan dapat memberikan hidup jang lajak, djika perkembangan ekonomi tidak dibarengi dengan perkembangan kearah industri.

Atas dasar pengertian ini pula, maka usaha² baik jang sudah maupun jang akan dilakukan diarahkan kepada perubahan procentage penggunaan

K E A D A A N KELISTRIKAN		T A		
		1) Pembangkitan: L.W.B. 2) Distribusi: GEBEO		
		1920	1930	1940
DAJA TERPASANG PADA PUSAT-PUSAT TENAGA LISTRIK (M.W)		1.2	42.7	49.1
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (× 1000 KWH)		5.461	81.809	143.660
PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK OLEH KONSUMEN (× 1000 KWH)	Penerangan	—	—	32.228
	Industri	—	—	50.403
	Pen. Djalan	—	—	—
	Djumlah	—	41.054	82.631
DAJA TERPASANG PADA PEMAKAI (× 1000 VA)	Penerangan	—	—	—
	Industri	—	—	—
	Pen. Djalan	—	—	—
	Djumlah	—	—	—
DJUMLAH PEMAKAI (KONSUMEN)	Penerangan	—	31.847	49.815
	Industri	—	412	766
	Pen. Djalan	—	—	—
	Djumlah	2.641	32.259	50.581

DJA.W. LISTRIK	1) PENUPETEL. 2) GEBEO	1) PLN. PEMB. 2) PLN. BDG.	1) PLN Exploitasi XI 2) PLN Expl. XIII, Sektor ² Priangan, Bogor & Tjirebon.			
			1961	1962	1963	1964
1945 - 1950	1955	1960	1961	1962	1963	1964
Dalam masa Revolusi Fisik tidak ada Data yang cukup dapat dipertanggung- jawabkan.	66.3	91	91	93	93	93
	166.548	234.545	236.235	287.592	258.948	284.234
	114.665	151.874	156.698	184.554	175.566	188.287
	39.791	46.780	45.059	46.926	40.692	46.463
	—	—	—	2.940	2.685	2.277
	154.456	198.654	201.757	234.420	218.943	237.027
	—	49.113	53.352	62.513	67.640	68.651
	—	40.055	42.674	45.689	53.288	55.289
	—	547	638	674	692	685
	—	39.715	96.664	108.876	121.620	124.625
	—	153.322	173.151	182.751	187.968	189.507
	—	1.453	1.624	1.723	1.801	1.831
	—	88	114	121	119	117
	115.960	154.863	174.889	184.597	189.888	191.455

tenaga listrik menjadi 70% untuk industri dan 30% untuk penerangan, sebab tenaga listrik merupakan alat yang utama bagi dunia industri modern.

Sektor Industri.

1. Dalam membahas perkembangan penduduk telah disinggung tentang pesatnya penambahan penduduk di Jawa Barat.

Pemilikan tanah yang berkisar pada l.k. 0.2 ha per capita tidak akan dapat memberikan hidup yang layak, jika usaha peningkatan produksi pertanian tidak dibarengi dengan usaha kearah industrialisasi disamping transmigrasi ke Luar Jawa.

Dalam hubungan ini sedjak sebelum perang di Jawa Barat telah diadakan usaha² kearah industrialisasi.

Dalam sektor kelistrikan telah dikemukakan, bahwa Jawa Barat memiliki sumber tenaga hydro-electric yang sangat besar, bahkan yang terbesar dari seluruh Indonesia.

Pemilikan tenaga listrik inilah yang memungkinkan sebagian besar dari Daerah Jawa Barat untuk melaksanakan industrialisasi.

Terutama industri sandang sedjak sebelum perang menempati tahapan yang tertinggi dan merupakan tidak kurang dari $\pm 58\%$ dari capaiciteit pertenunan yang berdjalan di Indonesia.

Di Bandung terdapat pabrik kina, yang sebelum perang adalah satu-satunya pabrik kina di Indonesia yang menghasilkan 9/10 dari jumlah garam kina, yang diproduksi diseluruh Dunia.

Perkembangan sektor industri tidak terlepas dari perkembangan monitair dan sektor² ekonomi lainnya. Juga masalah keamanan di-desa² mempunyai akibat timbal-balik atas perkembangan industri di Daerah Jawa Barat.

Dilihat dari sudut yang dikemukakan diatas, periode dalam perkembangannya akan dibagi dalam 4 babak.

Babak pertama 1945 — 1950 (tahun revolusi)

Babak kedua 1951 — 1955 (tahun penjesuaian)

Babak ketiga 1956 — 1960 (tahun konsolidasi)

Babak keempat 1961 — 1965 (tahun pembagian perluasan).

2. Dilihat dari sudut keempat babak tersebut maka yang dalam garis besar dapat diuraikan disini ialah progress sedjak tahun 1960 sampai sekarang.

Periode pertama merupakan periode perjuangan revolusi fisik untuk mentjapai kemerdekaan. Pada periode ini tidak dimiliki data² yang dapat menggambarkan perkembangan industri dan bila inipun ada, hal ini tidak atau kurang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dengan demikian maka data² jang dapat dipertanggung djawabkan adalah mulai tahun 1950.
Untuk dapat menjelami perkembangan selandjutnja dari pada sektor perindustrian, uraian selandjutnja berkisar mengenai:
 - a. Perkembangan industri pada umumnja.
 - b. Perkembangan industri sandang.
 - c. Perkembangan industri pangan.
 - d. Perkembangan industri keradjinan rakjat.
 - e. Perkembangan industri lainnja.
4. Djawa Barat merupakan salah satu daerah industri jang terpenting di Indonesia. Berbagai usaha industri terdapat di Daerah ini, dari industri keradjinan rakjat sampai pabrik² jang besar. Daerah Tangerang dan Tasikmalaja sedjak sebelum perang menghasilkan keradjinan anjam²-an jang diekspor keluar negeri. Pabrik pertenunan terdapat di beberapa daerah kabupaten jang meliputi potensi $\pm 58\%$ dari seluruh Indonesia sedang di Bogor kita djumpai pabrik ban jang terbesar dari seluruh Indonesia dan di Tjirebon pabrik roko sigaret, di Bogor dan Tjirebon terdapat pabrik permadani pertama di Indonesia.
5. Dari data² jang tersedia dapat perkonstatir bahwa pada tahun 1950:
 - a. Keadaan alat² pada perusahaan² umumnja sudah sangat tua.
 - b. Usaha² rehabilitasi dari pada kerusakan² akibat revolusi belum dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Meskipun demikian dalam periode 1950 — 1955 perkembangan industri dengan berbagai-bagai kesulitan berangsur-angsur menemui penjesuaian dengan geraknja revolusi.

Salah satu faktor jang menghambat perkembangan industri adalah kesukaran didapatkannja bahan baku dan spare-parts jang pada umumnja harus didatangkan dari luar Negeri.

Disamping itu ketidak stabilan harga mempunjai pula pengaruh jang besar terhadap madju-mundurnja sektor industri.

Namun dengan mengalami up and down, sektor industri berdjalan terus menudju kearah perkembangan jang lebih pesat.

Gambaran dari djumlah perusahaan dan buruh industri tertera di bawah ini.

Dari djumlah perusahaan 132.322 dalam tahun 1964 itu sudah termasuk perusahaan keradjinan/samben jang berdjumlah ± 77.000 perusahaan, jang tersebar di Kabupaten Tasikmalaja, Tangerang, Tjiamis, Sumedang, Madjalengka dan Indramaju. Djadi disini dapat kita hitung perusahaan jang ketjil, sedang dan besar ada ± 55.322 perusahaan industri.

Tahun	Djumlah Perusahaan	Djumlah buruh
1956	100.983	222.983
1957	106.869	292.135
1958	124.323	236.317
1959	125.447	281.174
1960	129.043	282.109
1961	130.174	285.240
1962	130.672	285.270
1963	131.109	320.410
1964	132.322	356.563

Bertambahnja perusahaan industri seperti tertjantum pada daftar tersebut diatas jang menundjukkan peningkatan dalam 9 tahun sebanjak ± 31.000 perusahaan atau $\pm 31\%$ jang memberikan pekerjaan/penghidupan kepada ± 132.000 buruh.

Dengan adanja Sensus Perindustrian tahun 1964 (Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1964) jang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, maka dengan sendirinja akan dapat diketahui kegiatan² dibidang perindustrian.

Adapun sensus ini mentjakup:

- a. Sensus untuk industri besar/sedang jaitu industri jang berkapasitet buruh dari 10 orang keatas ataupun kurang disensus 100%, artinja tiap² industri tersebut akan disensus.
- b. Sensus Pertambangan dan Industri Gas dan listrik termasuk djuga 100% sensus dalam hal ini untuk pelaksanaannja diadakan team khusus oleh B.P.S. bersama-sama dengan Deperdatam dan D.P.U.T.
- c. Sensus Industri ketjil dan keradjinan rumah tangga jaitu industri jang berkapasitas buruh kurang dari 10 orang dan djuga jang tidak mempergunakan machine-power. Untuk ini tidak disensus seluruhnja, tetapi disample paling banjak dari tiap² lingkungan jang terpilih diambil hanja 15 buruh perusahaan sadja.

6. Perkembangan Industri Sandang.

Perkembangan pertekstilan di Djawa-Barat sedjak tahun 1945 terus menerus meningkat hal ini dapat dilihat dari bertambahnja perusahaan² tekstil jang terus menerus. Pada tahun 1956 dapat kami sadjikan angka jang menundjukkan djumlah perusahaan tekstil sebanjak 2.072 buah dan pada tahun 1964 ini ada sedjumlah 5.527 bh. Dari angka ini dapat kami hitung penambahan perusahaan $\pm 167\%$.

Perusahaan ini merupakan industri yang mempunyai potensi yang terbesar diseluruh Indonesia dan merupakan 58% dari kapasitas pertenunan yang ada di negara kita.

Pada tahun 1964 dengan jumlah perusahaan yang telah ada dan bekerja dengan 1 shift (7 jam kerja) saja, kita akan dapat menghasilkan tekstil untuk keperluan Jawa-Barat sendiri, akan tetapi karena pertekstilan merupakan proyek nasional, maka produksi Jawa-Barat disalurkan pula ke berbagai daerah lain di Indonesia. Terutama sarong tenun dari Madjalaja, Bandung dan Garut sangat digemari oleh konsumen^a diluar Jawa. *)

Seperti pula dalam bidang industri lainnja, juga pertekstilan/pertenunan tidak luput dari kesulitan^a bahan baku, seperti benang tenun dan bahan^a kimia lainnja serta spare-parts yang harus diimpor dari luar negeri.

Usaha untuk berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang sandang mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah, a.l. dengan didirikannya pilot Pemintalan Nupiksa Yasa di Bandung dengan kekuatan 8.000 spindel, pabrik Tjipadung yang telah selesai $\pm$ 70% dan dimulainya pembangunan pemintalan Bandjaran dengan kekuatan masing^a 30.000 spindel. Pihak Swasta turut pula berusaha dalam menjediakan bahan baku benang tenun dengan kekuatan 10.000 spindel (Wisma Oesaha).

Untuk mendekati, kebutuhan bahan baku benang tenun direntjanakan dalam jangka waktu 3 tahun sudah dapat didirikan selain di daerah Bandung, juga daerah lain^a-nja. Seluruh kapasitas yang direntjanakan adalah 300.000 spindel (termasuk yang sudah dimulai di Bandung dan sekitarnya). Juga dalam bidang perkapasan, telah diadakan research dan pertjobaan^a penanamannya.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah pada tahun 1964 telah didirikan Badan Pembina Perkapasan Jawa-Barat yang bertugas meneliti dan memberi bimbingan kepada pengusaha^a penanam kapas bagi perkembangan bahan baku tersebut.

Berbitjara tentang mutu dan kualitas tekstil yang dihasilkan oleh perusahaan tenun di Jawa-Barat, dapat dikemukakan disini bahwa hal inipun mendapat sorotan yang utama baik dari pemerintah, maupun masyarakat pertenunan sendiri.

Bukti^a yang nyata dalam hal ini adalah dengan adanya sekolah pertekstilan pemerintah di Bandung (Sekolah rendah, menengah dan Tinggi).

-
- *) Pada tahun 1963 tertjatat:
a. 16.124 alat tenun mesin
b. 304.205 alat tenun bukan mesin
c. 2314 alat peradjudan

Dalam tahun 1964 Soteki Djawa-Barat telah pula mendirikan Akademi Tekstil Swasta di Bandung.

Disamping itu pemerintah daerah Djawa-Barat memiliki Induk Pentjelupan dan finishing di Madjalaja yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat tenun dalam mempertinggi kualitas hasil produksi. Pembuatan alat^a mesin tenun telah juga dapat dimulai di Bandung oleh ± 20 perusahaan. Hasil produksinya dapat mengimbangi mesin^a import. Diharapkan perkembangan selanjutnya agar perusahaan pertekstilan dapat berdjalan dengan lancar.

7. Perkembangan industri Pangan.

Industri ini sedjak tahun 1945 sampai tahun 1965 menunjukkan perkembangan yang baik sekali biarpun pada tahun^a sesudah tahun 1960 bahan baku agak sukar didapat, juga keadaan moneter yang tidak stabil.

Djumlah industri makanan besar kecil pada akhir tahun 1959 adalah ± 16.268 buah dan pada akhir tahun 1964 djumlah tersebut djadi 18.500 buah. Kalau kita perhitungkan, dalam jangka waktu sekian tahun itu sudah ada penambahan $\pm 13\%$.

Industri makanan yang besar^a, terutama industri makanan dalam kaleng melayani order^a, dari angkatan bersenjata.

Adapun mutu dari pada hasil produksi makanan dalam kaleng sudah cukup dapat dibanggakan dan jika dibandingkan dengan hasil produksi luar-negeripun setidak-tidaknya harus sama bahkan mungkin bisa menjaingi.

8. Perkembangan industri kerajinan rakyat.

Industri ini sebelum tahun 1945 pun sudah cukup berkembang dengan baik, bahkan hasil produksinya sudah pernah diekspor.

Pada tahun 1957 ada sedjumlah ± 61.000 perusahaan.

tahun 1959 ada sedjumlah ± 70.500 perusahaan dan pada tahun 1964 ada ± 77.000 perusahaan.

Dari angka^a tersebut jelas dan nyata bahwa ada kemajuan yang pesat sekali.

Usaha kerajinan tangan di Djawa-Barat ini pada umumnya merupakan pekerjaan sampingan di desa^a. Dilihat dari jenis dan aneka ragam penggunaannya usaha ini merupakan sektor yang penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Djawa-Barat.

Adapun industri kerajinan tangan yang terdapat di Djawa-Barat terdiri dari:

A. Anjaman^a.

B. Gerabah/alat dan barang^a dari tanah.

C. Ukiran² dari kayu.

D. Pandai besi.

Kerajinan anjaman terutama pembuatan tudung terdapat di Kabupaten Tasikmalaja/Radjapolah dan Tangerang.

Pada sebelum perang produksinya banjak sekali yang dikirim ke Luar Negeri yang jika dikembalikan ke Indonesia tidak dikenal lagi bahwa barang² tersebut asalnya dari kita juga. Dari angka yang diketahui perkembangan² dalam industri kerajinan tangan ini, sedjak tahun 1950 s/d sekarang terus meningkat dalam volume produksi disamping perbaikan kualitas. Meskipun demikian export keluar negeri belum dapat mentjapai taraf seperti sebelum perang.

Ini mungkin disebabkan karena hal² sebagai berikut:

- a. Kesulitan bahan² untuk finishing sehingga siap untuk diexport.
- b. Permodalan bagi pengusaha² pengexport barang² tersebut.
- c. Perkembangan moneter yang belum stabil.

Dalam hubungan dengan bimbingan daripada usaha kerajinan tangan ini telah didirikan pilot projek bambu processing yang diharapkan dapat membantu kearah penjemputan dan perkembangan yang pesat dari pada kerajinan anjaman. Sampai dewasa ini harapan tersebut belum dapat dipenuhi karena Bambu Processing ini belum menjalankan fungsi bimbingan dan penediaan bahan sebagaimana yang diharapkan.

Diharapkan perkembangan usaha anjaman Tasikmalaja, Tangerang dan lain² daerah mentjapai taraf yang dapat dibanggakan dan menjadi bahan perdagangan internasional.

Usaha² lain diantaranya; anjaman tikar/mendong dari Tasikmalaja dan Tangerang juga berkembang dengan pesat dengan mutu yang diterima, baik oleh masyarakat di Djawa-Barat sendiri, maupun di luar daerah sehingga lambat laun dewasa ini telah menjadi bahan perdagangan interinsuler.

Disamping itu seperti pula didaerah lain di Pulau Djawa juga diusahakan kerajinan tangan untuk kepentingan rumah tangga yang sangat penting artinya untuk kerdja samben para petani yang dengan demikian menambah penerimaan untuk hidup sehari-hari.

9. Gerabah.

Dengan istilah gerabah ini dimaksudkan barang² tanah yang dihasilkan melalui proses pembakaran. Usaha ini di Djawa-Barat berkisar pada pembikinan:

1. Barang² kerajinan seni dari tanah.
2. Barang² keperluan dapur.
3. Barang² keperluan bahan bangunan.

Kerajinan seni ini hanya terdapat di Bandung sadja dan produksinja telah mentjapai mutu jang tinggi, jang telah dapat penghargaan dan banjak dibeli oleh wisatawan dalam dan luar negeri jang datang di Bandung. Sebagaimana biasanja dalam setiap usaha segala sesuatu-nya tidak terlepas dari kesulitan²; dalam hal ini dapat dikemukakan terutama kesulitan untuk mendapatkan bahan kimia bagi peningkatan kwaliteitnja.

Adapun kerajinan barang² keperluan dapur dan bahan bangunan terdapat di Djatiwangi, Palimanan, Krawang, Plered dan lain² daerah di Djawa-Barat, mutu produksinja belum begitu memuaskan, ketjuali barang² keperluan bangunan.

Produksinja mentjapai djumlah dan kwantitas jang sangat besar dan menghasilkan tiap² tahun puluhan bahkan mungkin ratusan djuta rupiah.

Bimbingan dalam meningkatkan kwalitas senantiasa diusahakan oleh pemerintah a.l. dengan diadakan sekolah/kursus² untuk mendidik kader dalam usaha tersebut. (Balai Penyelidikan Keramik). Pilot projek untuk mekanisasi pembuatan bata/genteng di Serang. Djuga dalam usaha pembuatan piring dll. keperluan rumah tangga/porcelain jang kwalitasnja dapat menjamai barang import terus menerus diusahakan. Bahan kaolin untuk produksi ini terdapat djuga di Djawa-Barat, di Tjawi. Tempat tersebut dan Garut dewasa ini sudah dapat menghasilkan batu tahan api jang sangat diperlukan bagi pembakaran barang² gerabah/kapur.

Diharapkan dalam waktu jang tidak begitu lama perkembangan usaha pembuatan porselein dapat mentjapai taraf jang direntjariakan.

10. Pandai besi.

Usaha ini boleh dikatakan terdapat disemua daerah Kabupaten di Djawa-Barat karena barang² daripada besi penggunaannya merupakan kebutuhan jang tidak terlepas dari pada mata pentjaharian sehari² (patjul untuk tani, bedok untuk pembangunan dsb.).

Dalam hubungan dengan perkembangan pandai besi kiranya perlu dikemukakan disini dua daerah jang sangat maju jaitu Tjisaat dan Tjiwidej. Meskipun barang² besi/badja jang dihasilkan di tempat² tersebut belum mentjapai mutu produksi pabrik² di luar negeri, namun kwaliteitnja pada umumnya telah memuaskan. Untuk bimbingan selandjutnja dalam meningkatkan kwaliteit sedjak tahun 1953 telah didirikan induk pandai besi di Tjisaat dan Tjiwidej. Induk² ini selain memberikan bimbingan/penjuluhan djuga mengerdjakan finishing barang² jang dihasilkan oleh pandai² besi disekitarnja. Sampai dewasa ini hasil pandai besi selain dapat memenuhi kebutuhan masja-

rakat pada umumnya, dapat menjediakan alat² pertanian dll. bagi keperluan² perkebunan² dan pisau belati/klewang untuk militer dan pramuka.

11. Ukiran daripada kaju dll²-nja.

Ukiran dari kaju terdapat didaerah Sumedang/Tjipatjing dimana dibuat wajang golek dan ukiran lainnja. Jang mutunja dapat dibanggakan terutama pembuatan wajang golek jang selalu mendapat perhatian besar dari wisatawan luar negeri. Tempat² lain jang menghasilkan keradjinan kaju dll. biasanja menghasilkan alat² rumah tangga. Kechususan bimbingan dan penjujukan dalam bidang ini belum ada.

12. Perkembangan industri² lainnja.

Selain dari usaha² industri jang digambarkan diatas tadi di Djawa-Barat dibeberapa daerah seperti di Tagogapu, Tjibadak, Palimanan, Serang, Selatan Tasikmalaja dll. tempat, terdapat pula perusahaan perkapuran.

Pada tahun 1956 tertjatat $\pm$ 44 buah perusahaan, djumlah mana dalam tahun 1960 meningkat djadi 560 buah dan dalam tahun 1964 mendjadi 675 buah.

Dilihat dari sudut djumlah dan volume produksinja industri ini menundjukkan perkembangan jang baik.

Djika 2 a 3 tahun berselang hampir semua pembakaran kapur mempergunakan kaju sebagai bahan bakar, maka achir² ini telah banjak dipergunakan bahan bakar solar.

Alat² pembakar dengan solar pertama-tama dibuat oleh P.T. „Pabrik Mesin Bandung”, alat mana diberi nama „*Vulkan*”.

Selain untuk pembakaran kapur, bata/genteng dan barang² lain dari tanah, alat tersebut dapat djuga dipergunakan untuk pembakaran semen rakjat, jang mutu dan kwalitasnja dapat dikatakan sama dengan portland-cement.

Bahan² jang dipergunakan untuk membuat semen-rakjat adalah sama dengan bahan untuk semen Geresik jaitu Kapur, tanah liat dan bila perlu gips, hanja prosesnja melalui tjara² jang sederhana (dengan tangan/setengah mekanis). Research dan pertjobaan pertama dilakukan oleh P.T. Pabrik Mesin Bandung jang selanjutnja setjara ketjil-ketjilan commerciell diteruskan oleh Almarhum Sdr. Sukarna di Tagogapu.

Dari Semen rakjat ini telah ditjoba untuk membuat tegel (ubin) jang hasilnja djuga memuaskan.

Berbitjara tentang alat pembakar dengan solar, maka perlulah dikemukakan disini, bahwa alat tersebut sangat penting artinja bagi penghematan penggunaan kaju bakar. Dengan penggunaan solar dapat diperketjil usaha² penebangan hutan dan dengan demikian

dapat dihindarkan bertambahnya tanah gundul yang mengakibatkan erosi dan banjir pada sungai².

13. **Pertjetakan.**

Djenis perusahaan ini, djika dilihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun, memperlihatkan kemajuan yang tjukup pesat. Apabila dalam tahun 1956 terdapat 119 buah, maka dalam tahun 1960 djumlah tersebut mentjapai 156 dan tahun 1960 170 buah tersebar ditiap-tiap ibukota Kabupaten dan Kotapradja terutama di Bandung. Produksijapun memperlihatkan gambaran yang memuaskan, meskipun kertas dan alat² lainnya dalam pasaran harganya sangat tinggi. Hal ini tidak menghambat kemajuan produksi, karena barangnya masih didapat dipasaran bebas.

Diharapkan, mudah-mudahan dengan direntjanakan dan didirikan-nya pabrik kertas di Tjipetir (Tjandjur) kebutuhan Djawa-Barat akan kertas dapat dipenuhi.

14. Dalam sektor perkebunan telah dikemukakan bahwa Djawa-Barat adalah salah satu daerah penghasil karet yang utama.

Melihat persediaan bahan-bakunya, maka mudahlah dimengerti bahwa orang akan mendengar tentang pesatnya perkembangan industri ini di Djawa-Barat.

Akan tetapi dibandingkan dengan produksi bahan bakunya, djumlah perusahaan pengolahan karet adalah tidak seimbang. Di Djawa-Barat hanya terdapat 3 perusahaan barang² dari karet yang agak besar jaitu 2 di Bandung yang membuat alat dan barang² dari karet dan satu pabrik Ban di Bogor (ex-Goodyear).

Diharapkan perkembangan industri karet akan mendjadi pesat, sehingga yang diexport bukanlah bahan mentah karet akan tetapi barang-alat² dari karet.

Selandjutnja dibawah ini tertera angka² yang menundjukkan industri ketjil lainnya yang ada di Djawa-Barat. *)

15. **J.P.I.P.K.**

Pada tahun 1954 oleh Jang Mulia Menteri Perekonomian didirikan Pusat Induk Perindustrian Ketjil disingkat J.P.I.P.K., jang sedjak itu mendirikan Induk² perindustrian ketjil.

Pada saat itu mulai didirikan 5 (lima) Induk jaitu:

1. Induk Pentjelupan dan Penjempurnaan tekstil Madjalaja.
2. Induk perusahaan dan penjempurnaan besi Tjiwidej.
3. Induk perusahaan dan penjempurnaan besi Tjisaat.
4. Induk perusahaan keramik Plered.
5. Pilot Proyek Wallboard di Serang.

Diantara lima induk tersebut, yang paling pesat kemajuan adalah

*) Tjataan: *balaman 103 dan 104.*

Djenis Perusahaan	Tahun 1956			Tahun 1959			Tahun 1964		
	Djum- lah Perus.	Djum- lah buruh	Djumlah Produksi	Djum- lah Perus.	Djum- lah buruh	Djumlah Produksi	Djum- lah Perus.	Djum- lah buruh	Djumlah Produksi
1. Pengawetan makanan dlm kaleng	3	100	128.751 kg.	4	150	130.000 kg.	4	262	176.750 kg.
2. Susu	31	360	700.000 lt.	31	282	738.163 lt.	32	345	976.765 lt.
3. Hulle/gabah	160	270	tidak ada data ^a	164	276	tidak ada data ^a	170	320	tidak ada data ^a
4. Hongkwee	3	14	150.000 kg.	6	65	375.405 kg.	17	113	421.120 kg.
5. Roti/Kueh/ biskuit	1260	4219	15.000.000 kg.	1277	4137	16.000.000 kg.	1927	5337	15.070.122 kg.
6. Kembang gula	66	540	810.077 kg.	114	634	1.415.635 kg.	132	693	1.676.147 kg.
7. Tioklat	11	160	780.132 kg.	11	230	951.795 kg.	8	114	354.150 kg.
8. Kopi	68	179	529.828 kg.	121	201	601.889 kg.	108	230	510.880 kg.
9. Mie/Bihun	235	771	3.633.631 kg.	295	913	3.000.000 kg.	216	686	2.138.310 kg.
10. Krupuk	778	3288	7.400.000 kg.	905	3949	8.000.000 kg.	940	3828	8.904.506 kg.
11. T a h u	1152	2803	8.114.000 kg.	1264	2834	8.000.000 kg.	1278	3174	10.787.572 kg.
12. Oncom	703	1192	8.311.675 kg.	759	1169	2.500.000 kg.	830	1335	20.000.000 kg.
13. Keiap	558	1249	3.807.790 lt.	622	1917	2.700.000 lt.	624	1500	3.000.000 lt.
14. Tempe	683	1467	4.274.155 kg.	719	1300	3.616.270 kg.	673	1083	2.000.000 kg.
15. Taadji	18	52	72.415 kg.	21	49	62.715 kg.	22	50	53.625 kg.
16. Strop	80	235	2.165.201 lt.	108	660	1.547.648 lt.	257	730	1.406.145 lt.
17. Limun/air Soda	52	699	5.624.890 lt.	53	833	4.178.038 lt.	54	800	4.000.000 lt.
18. Rokok putih	3	2212	4.978.056.690 bkg.	3	2515	5.250.000.000 bkg.	3	2500	4.500.000.000 bkg.
19. Rokok Kretek	36	480	66.875.590 kg.	32	376	50.000.000 kg.	31	244	26.000.000 kg.
20. Sepatu/Sandal	504	3372	1.877.038 ps.	615	3200	1.000.000 ps.	592	3298	750.000 ps.

Jenis Perusahaan	Tahun 1956			Tahun 1959			Tahun 1964		
	Djum- lah Perus.	Djum- lah buruh	Djumlah Produksi	Djum- lah Perus.	Djum- lah buruh	Djumlah Produksi	Djum- lah Perus.	Djum- lah buruh	Djumlah Produksi
21. Kompleksi/ pendjajahan	983	3928	3.414.271 ptg.	1000	3500	20.000.000	1716	3968	27.000.000 ptg.
22. Batik	1828	10000	3.553.411 p.	3000	9125	1.912.082	3900	12500	1.907.860 ptg.
23. Pajang	902	2093	1.881.693 bh.	1095	2706	2.774.167	744	1973	500.000 bh.
24. Penggera- djan kayu	352	1715	tidak ada data	401	1200	tidak ada data	236	631	tidak ada data
25. Meubels	849	4828	tidak ada laporan	1062	4949	93.656 stel 385.525 bh.	1352	5765	20.000 stel 199.072 bh.
26. Penjamakan kulit	123	738	1.276.396 kg.	129	770	1.200.000 kg.	131	839	1.300.000 kg.
27. Barang ² dari kulit	34	316	605.925 bh.	49	323	1.300.568 kg.	63	375	770.000
28. Barang ² dari Karet	33	3500	tidak ada data	43	3230	tidak ada data	45	3050	700.000 kg.
29. Vulkanisir	40	209	61.366 bh.	57	407	69.804 bh.	80	660	170.180 bh.
30. Minjak Kela- pa/keletik	1570	5026	30.411.150 kg.	1500	5000	27.000.000 kg.	1600	3500	25.299.763 kg.
31. Sabun	87	326	4.722.531 kg.	98	425	5.365.000 kg.	175	400	4.000.000 kg.
32. Perusahaan Gelas	9	1148	275.116 kg.	12	1131	12.512.886 bidj.	121	2142	tidak ada laporan
33. Tegel	69	1849	23.302.646	92	1926	21.358.631 bh.	121	2142	25.000.000 bidj.
34. Reparasi spe- da/becja	393	865	165.622	472	932	189.524 bh.	647	1124	200.000 bh.
35. Pabrik es baru	23	379	76.488.964 kg.	24	600	72.782.814 kg.	28	620	62.307.175 kg.

Induk Pentjelupan dan Penjempurnaan tekstil Madjalaja. Induk tsb. dewasa ini melaksanakan usaha² pentjelupan, finishing dan printing. Pada saat ini diharapkan penyelesaian terahir dari pembangunan sebuah unit pengandjian benang, jang dalam waktu singkat akan dapat memulai pekerdjaannya. Pada induk ini djuga telah dimulai dengan penjelenggaraan projek feederpoint benang tenun.

Disebabkan kesulitan teknis dan finansiell Pilot Projek Wallboard di Serang, terpaksa dihentikan dan sedjak beberapa bulan jang lalu dalam bangunannya telah ditempatkan mesin² tenun jang sekarang telah menghasilkan produksi tekstil.

Pabrik tersebut sekarang diberi nama Dwikora I.

Dalam usaha perkembangan industri rakjat berangsur-angsur didirikan pilot-projek a.l. Penggaraman Rakjat di Astanadjapura (Sindanglaut), Pekapuran Tjigading dan Palimanan dll.

Sektor Pertambangan.

1. Bumi Djawa-Barat, selain subur tanahnya, djuga mengandung bahan² galian jang tjukup baik kwaliteitnja.

Sumber² bahan galian jang kini telah diusahakan setjara intensif adalah:

- a. *Tambang Mas dan Perak di Tjikotok.*

Tambang ini diusahakan sedjak sebelum perang dan dewasa ini diusahakan oleh Pemerintah Pusat (B.P.U. Pertambangan).

Produksi tiap² bulan meliputi $\pm$ 20 kg. mas dan 75 kg. perak.

- b. *Tambang Batu Bara di Bajah.*

Sumber ini telah diusahakan pada zaman pendudukan Djepang. Tetapi karena mutunya termasuk batu-bara muda, maka pengaliannya tidak terus dilaksanakan.

- c. *Tambang minjak tanah di Bongas.*

Kini dalam penyelesaian oleh P.N. Permigan. Sumber tsb. tiap² hari menghasilkan minjak kasar untuk bahan bakar industri rakjat sebanyak 20 ton tiap hari.

- d. *Tambang Belerang di Wanaradja sedjak awal tahun 1965 diusahakan bersama oleh B.P.U. Pertambangan dan P.D. Pertambangan Djawa-Barat.*

- e. *Tambang fosfaat di Tjibinong diserahkan oleh perusahaan Swasta.*

- f. *Tambang Jarosit di Tjiater diusahakan oleh P.D. Pertambangan Djawa-Barat.*

- g. *Tambang Mangaan Karangnunggal.*

- h. *Produksi fosfaat Tjirebon:*

Tahun 1938 6.078 kg.

Tahun 1939 3.104 kg.

Tahun 1940 3.878 kg.

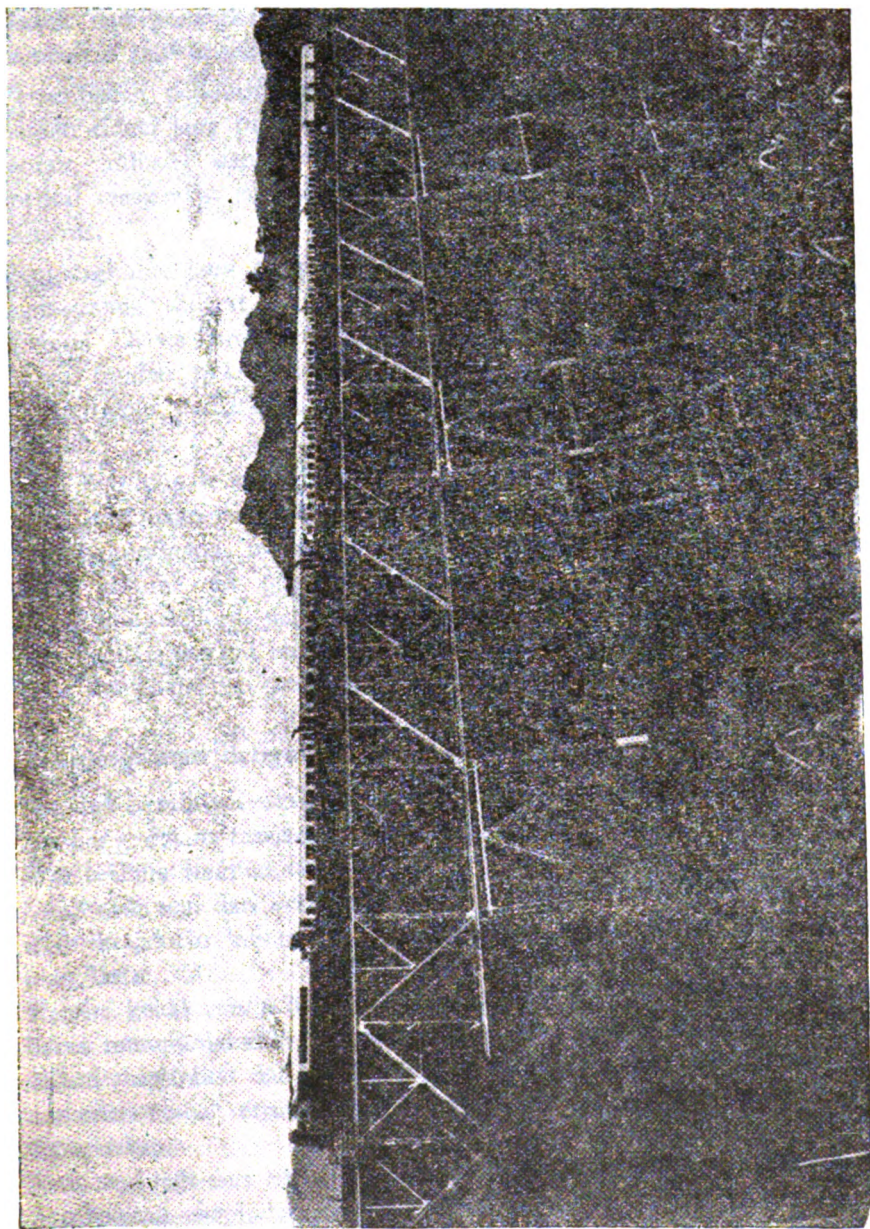
Tahun 1953 738 kg.

Daftar sumber² bahan galian.

No.	Tempat sumber	Keadaan endapan	Reserve	Keterangan
I. Air Raksa				
1.	Gunung Parang	endapan alluvial	—	—
2.	Sepandjang sungai dari Gng. Lembu	—	—	—
3.	Tjiseuit	primair	—	—
4.	Pantai Djunti Karangampel Tjirebon	—	—	—
II. Antimonit				
1.	Krawang	—	—	—
2.	Purwakarta	—	—	—
3.	Dekat Sukawajana	—	—	—
4.	S. Tjipitjung	ber-sama ² dengan endapan cinnabar	—	—
III. Batu Bara.				
1.	Udjungkulon-Peninsular	3-6- lap. tebal 0,4 M	—	—
2.	Bodjongmanik	dalam neogene muda lap. tuff. 2 lap. tebal 1,5 M	7.890.000 ton	—
3.	Bangkarang	idem	900.000 „	—
4.	Tjimandiri	Eocene, tebal lap. 0,7 — 1,2 M	6.200.000 „	kwalitet baik
5.	Bajah	Batuannja sediment dari cocene	6.900.000 „	idem
6.	Gunung Buleud	Dlm. lap. oligocene andesit	266.000 „	idem
7.	Garung	Lap. tipis dari cocene 1 lap tebal 0.35 M	—	tak berarti
8.	Tjiheang	idem	—	idem
9.	Tjiambali Barat	Tebal max. 3 M dari oligocene	—	idem

No.	Tempat sumber	Kedudukan endapan	Reserve	Keterangan
10.	Mandjak	1. lap. tebal 0,8 M oligocene	—	tak berarti
11.	Tjihideung	4 outcrop tebal 0,4 M	—	idem
12.	Tjibareno	Lignit, tebal 0,6 M	—	idem
13.	Tjitjalengka	1 lap. lignit antara Batupasir andesit tebal 1 M	—	idem
14.	Daerah Djasingr	—	—	idem
15.	Sukabumi	Lap. Batubara dgn. shale diantaranya	25.000 ton	
16.	Tjihuni	Lignit tebal 1 M me- ochni	—	
17.	Tjirandji	Tebal lap. 0,6 M. per- alihan lignite dgn. shale	—	
18.	Bendul Timur (Krawang).	Lap. lignit tebal 2 M neogene atas	—	
19.	Tjihondje	Lignit dalam oligocene tuff batu pasir	—	
IV. <i>Belerang</i>				
1.	Kawah Putih	Lumpur	30.000 kgt.	
2.	Tangkuban Pra- hu	Crust	14.000 „	
3.	Telaga Bodas	Lumpur	300.000 „	
4.	Kawah Karaha	Lumpur	30.000 „	
5.	Papandajan	Crust	2.000 „	
6.	Tjiremai	Crust	10.000 „	
V. <i>Besi.</i>				
	Djampang	Besi titan sedimen	3.769.784 ton	
VI. <i>Mas dan Perak</i>				
1.	Merak	Allivial	—	—
2.	Gunung Parang	„	—	+
3.	Djampang	„	—	+
4.	Gn. Megamen- dung	„	—	+
5.	Banten Selatan	Primair	569.041 ton	+
6.	Djampang	„	—	+

No.	Tempat sumber	Kedadaan endapan	Reserve	Keterangan
7.	Tjikondang	Primair	—	—
8.	Tjiwangun	„	—	—
9.	Gunung Parang	„	—	—
10.	Gunung Tjariu	„	—	—
11.	Gunung Sawal	„	—	—
VII. Jarosit.				
1.	Tjiater	Endapan sinter	800.000 ton	—
2.	Kantjah	—	325.000 ton	—
VIII. Mangaan.				
1.	Tjikotok	Dalam lap. kwarsa	—	—
2.	Tjibalong	—	10.000 ton	Sedang di- eksploitasi
3.	Karangnunggal	Dalam batu atau brisia dgn. api	—	—
IX. Fosfaat.				
1.	Tjibitong Timur	Diatas permukaan tanah	—	—
2.	Gua di Parigi Utara	—	—	—
3.	Gua di Tjidju- lang Selatan	—	—	—
4.	Kaliputjang Uta- ra Tjitandujbarai	Dalam. gua & diatas permukaan tanah	—	—
5.	Peg. Kromong	idem daerah batu ka- pur miocene	—	—
X. Tembaga.				
1.	Banten Selatan	di Tjikotok & Tjipi- tjung Tjirotan bersama mas & perak	538.000 ton	—
2.	Djampang	Dlm. formasi gunung api miocene tua	21.000 ton	—
3.	Tjikendang	idem miocene	—	—
4.	Karangnunggal	idem andesit tuff mio- cene	—	—



Djembatan K.A. Tjisomang.

Sektor Pengangkutan/komunikasi.

Adalah suatu hal yang tak dapat diabaikan bahwasanya pengangkutan, baik didarat maupun dilaut, merupakan soal yang sangat vital bagi laju lalu-lintas ekonomi Djawa-Barat, yang dalam perkembangan penduduk dan peningkatan usaha industrialisasi sangat membutuhkan penambahan alat² untuk meningkatkan volume angkutan.

Penambahan penduduk dengan $\pm 2,3\%$ tiap tahun memperluas pembagian rizki yang mendatangkan berbagai kegiatan dalam lapangan pertanian, industri dan perdagangan, hal mana sekaligus merubah pula mental masyarakat yang sebelumnya umumnya statis menjadi hidup dan dinamis.

Pengangkutan yang sangat vital bagi penduduk Djawa-Barat adalah pengangkutan didarat j.i. kereta api dan pengangkutan di Djalan Raya. Karena Djawa-Barat sebagian terbesar terdiri dari daerah pegunungan, maka mudah pula dimengerti bahwasanya sifat daerah pegunungan ini memerlukan perhatian sepenuhnya dibandingkan dengan daerah dataran rendah.

Kota Bandung sebagai ibukota Daerah Tingkat I Djawa-Barat merupakan pusat kesibukan dalam berbagai lapangan. Karena letaknya kota ini di daerah pegunungan, maka hal ini mengakibatkan handicap dalam peningkatan volume dan ketepatan pengangkutan. Jika pada dataran rendah kereta api sekaligus dapat mengangkut ± 800 ton, maka di daerah pegunungan daya angkut ini hanya terbatas sampai ± 40 a 45% . Kesulitan ini sama halnya dengan pengangkutan di jalan raya.

Pengangkutan dengan Kereta-Api (P.N.K.A.).

Masalah kereta-api tidak dapat dipisahkan dari masalah² lainnya yang berkembang dalam masyarakat, baik yang bersifat sosial; maupun yang bersifat teknis ataupun ekonomi.

Salah satu segi dari kereta-api yang dapat dikatakan tidak menguntungkan ialah kekakuan kereta api, karena organisasinya dan penanaman modal yang besar.

Karena kekakuannya itu, maka sesuatu rentjana pembangunan kereta-api harus mempunyai sifat: memperhatikan dan mengindahkan perkembangan dalam masyarakat dan melihat jauh kedepan, untuk menghindari penanaman modal setjara sia-sia, karena pada waktu yang terlalu dekat harus dihapuskan.

Satu segi lagi dari kereta-api, yang tidak menguntungkan, ialah mengenai pemberian eksploitasi dan pendapatannya.

Sebagian terbesar dari beaya² eksploitasi sangat tergantung dari harga² dipasaran bebas, sedangkan sebaliknya tarif²nya sangat mempengaruhi

penghidupan rakyat, sehingga Pemerintah selalu mengelakannya dengan keras, bahkan lebih tjonjong untuk memberikan subsidi dari pada memperkenankan kenaikan tarif sampai ketinggian sesuai dengan pengeluaran² eksploitasi.

Chususnja di Indonesia uraian diatas menjadi sebab dari kesukaran² yang dihadapi oleh Perusahaan Negara Kereta-Api.

Selama Perang Dunia II dan revolusi physik sampai 1950, dalam perusahaan kereta api diseluruh Indonesia tidak diadakan penanaman modal yang berarti, yang dapat mempertinggi daya angkut dari kereta api.

Sedangkan selama pendudukan Djepang dan sesudahnja sampai 1950 banjak lintas² yang dihapuskan dan materiil yang diangkut ke negeri lain, pun banjak materiil yang dibumi-hanguskan.

Dengan demikian, maka pada tahun 1950, sewaktu Pemerintah mulai menguasai seluruh kereta api, terketjuali D.S.M. di Sumatera Utara, yang harus dieksploitasi lebih baik dinamakan „rosokan”.

Kekurangan uang (devizen) menjebabkan pembangunan tidak dapat sesuai dengan rentjana, sedangkan perkembangan masyarakat yang sangat tjepat, menempatkan kereta api dalam kedudukan djauh ketinggalan.

Eksplorasi Barat.

Pembagian djaring kereta api di Djawa menjadi 3 eksploitasi tidak tepat sesuai dengan pembagian Djawa dalam daerah² tingkat I.

Eksplorasi Barat P.N.K.A. meliputi semua lintas kereta-api di ibu kota Djakarta Raya, didaerah Tk. I Djawa-Barat dan sebagian di Djawa-Tengah dengan batas²-nja:

Tegal, Prupuk dan Rantjakole (Bandjar) dan ditambah dengan lintas tambahan Merak-Pandjang.

Unit² dalam daerah Djawa-Barat yang tidak termasuk kekuasaan eksploitasi Barat ialah: Balai Besar P.N.K.A. di Bandung, Gudang² Persediaan di Bandung dan Manggarai, Balai Kerdja Manggarai, Balai Kerdja Konstruksi di Bandung, Kantor Inklaring di Tandjung-priok yang semuanya langsung dipimpin oleh Direksi di Bandung.

Pandjangnja djalan kereta api Eksploitasi Barat berdjumlah 1.398 km. diantara mana: 153 km. lintas kembar (double track) dan 78 Km. lintas sempit (lebar 60 Km.).

Meskipun djumlah lokomotip dan typenja, kereta penumpang dan bagasi, dan gerobag barang, masing² eksploitasi ditetapkan, namun karena seluruh Djawa merupakan daerah² yang saling bergantung, maka kereta² api terusan merupakan satu keharusan, dan materiil mengalir ke Barat dan ke Timur, pun diadakan mutasi² yang kini belum selesai, sehingga menjantumkan djumlah materiil menurut djatah dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Pada adanya konfrontasi dengan „Malaysia” menempatkan eksploitasi di Sumatera pada kedudukan yang terpenting, sehingga Djawa harus melepaskan ber-puluh² materiil (lokomotip dan gerobag²) untuk dikirimkan ke Sumatera.

Uraian diatas menundukkan kesukaran², yang dihadapi oleh P.N.K.A. di Djawa, chususnya eksploitasi Barat, yang kwantitatif menjelenggarakan pengangkutan yang terbanjak.

Kesukaran² tentang materiil tersebut ditambah dengan kesukaran mengenai bahan bakar, chususnya batu bara, yang datangnja dari Palembang (Tanjungenim) tidak kontinu dan dalam djumlah yang djauh dari mentjukupi. Djumlah kebutuhan akan batu bara untuk eksploitasi Barat setiap bulan ada ± 10.000 ton, sedang yang diterima hanya rata² 6000 ton, ada kalanja tidak terima sama sekali.

Dengan adanya incontinutas batu bara, maka dinas lokomotip terpaksa dilakukan dengan lok² diesel dan minjak residu, yang harus mendjalani dinasan rangkap, sedangkan lok² diesel yang baru masih harus mengatasi penjakit² anak².

Rentjana semula untuk mendjalankan di Djawa 90.000 Km/sehari terpaksa dikurangi setjara tetap mendjadi 75.000 Km/sehari dan yang dalam praktek didjalani hanjalah 60 sampai 65.000 Km/sehari.

Pengurangan² itu menjebabkan:

1. penuh sesaknja kereta² api yang djalan, yang pengaturannja sulit dan menjebabkan:
 - a. kerusakan² pada materiil.
 - b. kontrol sangat sukar sehingga uang yang masuk kurang.
 - c. kelambatan² kereta api untuk menghindarkan ketjelaakaan.
2. mengurangi waktu untuk pemeliharaan lok dan materiil lainnja sehingga kerusakan² dipertjepat.
3. Kereta² api kerdja untuk pemeliharaan baan dikurangi atau tidak dapat didjalankan karena lokomotip tidak ada atau bahan bakar tidak ada; dan karenanja pada banjak tempat terpaksa diadakan pengurangan ketjepatan, yang memperlambat kereta api.
4. Karena kelambatan² itu, para pegawai, yang djumlahnja sudah kurang, dibebani tugas lebih berat dari pada seharusnya, sehingga mempengaruhi kesehatannja karena kurang istirahat dan dengan demikian mempengaruhi pula pelaksanaan tugasnja.

Dalam keadaan yang serba kurang ini Perusahaan Kereta Api di Djawa-Barat menjelesaikan tugasnja dalam bidang pengangkutan, meskipun harus menghadapi ber-bagai² kesulitan dari luar a.l. selama masa masih belum pulihnja keamanan akibat masih terdapatnja gangguan pengatjau oleh gerombolan D.I./T.I.I.

Ketjelakaan kereta api jang mengerikan, dimana terdapat banjak korban manusia telah terdjadi 2 kali di Tjipeundeuj pada lintas Tasikmalaja — Tjibatu.

Kekurangan materiil/alat planting tidak memungkinkan penambahan frekwensi perdjalananan kereta api.

Berkat keuletan para karyawan kereta api, meskipun dengan penuh rintangan terutama pada waktu berketjamuknja gangguan keamanan, pengangkutan kereta api tetap dapat dilaksanakan meskipun belum dapat memenuhi apa jang diharapkan.

Angkutan penumpang.

Dilihat dari angka² statistik, angkutan penumpang memperlihatkan kenaikan jang sangat pesat, djika dalam tahun 1950 dapat diangkut dengan kereta api sedjumlah 33.835.422 penumpang, maka dalam tahun 1960 dapat diangkut 64.103.451 penumpang. Angka² tersebut agak menurun lagi meskipun pada pertengahan tahun 1962 keamanan di Djawa-Barat seluruhnja pulih kembali.

Angkutan barang.

Seperti telah dikemukakan, dalam uraian terdahulu Djawa-Barat memiliki perkebunan² besar, jang menghasilkan karet, teh, kina dll. Pada sebelum perang pengangkutan produksi seperti ini merupakan volume jang utama.

Angkutan barang pada umumnja memperlihatkan angka² jang tinggi, akan tetapi angka² jang tersedia mengenai angkutan barang sesudah tahun 1950 memperlihatkan kebalikannja. Djika pada tahun tersebut dapat diangkat 1.736.179 ton barang, maka dalam tahun 1960 hanya diangkut 1.239.355 ton. Hal ini mungkin disebabkan karena pengusaha² lebih menginginkan pengangkutan dengan truck jang lebih tjepat, meskipun bea angkutannja djauh lebih tinggi. Selain dari itu mungkin pula jang mendjadi sebab mundurnja angkutan barang tersebut adalah kurangnya jumlah gerobak kereta api. Djuga bentjana² jang sering menimpah lin² di Djawa-Barat, mengakibatkan mundurnja angkutan barang. Jang perlu dikemukakan disini adalah soal pengangkutan bahan-bakar bagi kendaraan bermotor dari Tandjung Priok — ke Bandung selalu mendapat perhatian sepenuhnya. Stagnasi dalam pengangkutan bahan tersebut sangat berpengaruh terhadap angkutan di Djalan Raya. Kekurangan lok dan kr. tidak memberikan kemungkinan jang baik untuk dapat mengangkut bahan bakar tersebut sesuai dengan rentjana kebutuhan.

Namun meskipun demikian, fiak jang bersangkutan terus berusaha dengan serba kekurangan itu mentjoba untuk mendapatkan hasil jang semaksimal-maksimalnja.

Tahun	Djumlah Penumpang	Bagasi Kg.	Barang Hantaran/ Pot./Gerob. ton.
1950	33.835.422	2.060.563	1.736.179,90
1951	34.835.891	5.090.370	1.780.225,89
1952	32.969.625	43.729.703	1.391.151,97
1953	38.750.918	70.801.473	1.391.557,10
1954	46.332.707	89.897.055	1.462.308,05
1955	55.109.240	117.544.464	1.755.702,85
1956	50.892.710	96.468.562	1.654.570,09
1957	50.216.192	89.189.278	1.486.441,33
1958	54.461.071	109.026.738	1.379.198,42
1959	59.621.876	128.634.988	1.403.125,28
1960	64.103.451	155.868.001	1.695.146,30
1961	62.741.641	115.623.307	1.656.774,04
1962	52.875.576	93.776.244	1.390.904,63
1963	40.102.184	88.378.949	1.433.046,94
1964	39.512.752	91.681.280	1.372.950,39
1965	11.115.243	35.051.071	299.755,24
			s/d Maret 1965.

Demikianlah setjara global keadaan P.N.K.A. Eksploitasi Barat.

Rentjana 5 tahun.

Rentjana 5 tahun khusus untuk Eksploitasi Barat tidak dibuat, karena merupakan bagian yang terdjalin dengan eksploitasi² lain sehingga oleh Balai Besar sedang disusun rentjana pembangunan untuk seluruh P.N.K.A. sehingga sangat praematuur untuk mengadjukannya sekarang. Jang sudah dapat diadjukan sekarang, ialah bahwa rentjana itu nantinja akan didasarkani atas kemampuan reil dari P.N.K.A. sekarang, sehingga ada kepastian, bahwa rentjana dapat terlaksana.

Dapat diadjukan, bahwa rentjana² pembangunan jang dulu, tidak dapat dilaksanakan seluruhnja, sebagian karena kesulitan keuangan dan sebagian djuga karena terdesak oleh pelaksanaan dari projek² jang mendadak menjadi urgent. Khusus jang akan mempengaruhi penghidupan masjarakat Djawa Barat, dapat diutarakan, bahwa sudah mulai dilaksanakan dan akan diteruskan:

1. Penjaluran setjara continue minjak² bumi dari Tandjung-priok ke pedalaman.
2. Penertiban penjaluran gerobag² kosong ke Timur untuk nantinja kembali ke Barat isi barang² jang dibutuhkan di Djawa Barat.

3. Perbaikan² emplasemen di Tandjung-priok berhubung „Pilot projek Tandjung-priok/Pasarikan”, jang mengharuskan kereta api menja-
— lurkan barang-barang sebanjak 4.000 ton sehari dari Tandjung-priok.
 4. Pembuatan emplasemen-emplasemen untuk depot bahan bangunan di Lemahabang, Durenkalibata, Klender dan Tanahabang.
- Sedangkan rentjana² lain masih ditunggu dari Direksi P.N.K.A.

Angkutan di Djalan Raya.

1. Adalah kurang bidjaksana, djika dalam membahas pengangkutan didjalan-raya tidak digambarkan terlebih dahulu keadaan infrastruk-
tur dari pada djalan² di Djawa Barat.

Telah kita ketahui setjara luas bahwasanja sedjak dahulu kala djalan merupakan urat nadi bagi perekonomian, pertahanan maupun peng-
hubung antara satu tempat ke tempat lain dalam penghidupan sehari-
hari.

Makin maju perkembangan hidup masjarakat, makin tinggi kebu-
tuhan akan djalan jang baik dan modern serta mentjukupi kebutuhan
lalu-lintas.

Mengingat perkembangan kendaraan bermotor setelah perang dunia
ke II, maka keadaan djalan di Indonesia pada umumnja dan chususnya
— di Djawa-Barat, sudah tidak seimbang lagi dengan kebutuhan lalu-
lintas, jang dalam djumlah dan berat/ketjepatan kendaraan bermotor
sangat meningkat.

Pandjangnja djalan-raya di Djawa-Barat adalah sbb.:

Diaspal	: 2.139 Km.
Diperkeras (tidak diaspal)	: 1.614 Km.
Djumlah	<u>3.753 Km.</u>

Dilihat dari sudut pengelolaan dan penguasaan, djalan tersebut dibagi
atas:

a. Djalan Negara	632 Km.
b. Djalan Daerah Tk. I	1.881 Km.
c. Djalan Daerah Tk. II	1.240 Km.
d. Djalan Swasta	

Pada waktu proklamasi kemerdekaan dalam tahun 1945 keadaan
djalan sangat menjedihkan, lebih² setelah terdjadi revolusi bersendjata,
dimana banjak bagian djalan dan djembatan dibumi-hanguskan.

Kerusakan semula ditaksir 90% jang pada kira² achir 1948 sebagian besar
dapat dirhabilitier. Pada achir 1951 rehabilitasi tersebut mentjapai hasil
jang sebaiknja, sehingga di Djawa-Barat hanya terdapat kerusakan djalan

rata² 30%. Disebabkan kurangnya biaya sedjak tahun 1952 kerusakan bertambah lagi dan pada tahun 1955 mentjapai rata² 45%. Meskipun diadakan usaha dengan sekuat tenaga, namun disebabkan oleh berbagai kesulitan pada awal tahun 1965 kerusakan tersebut terus bertambah hingga $\pm$ 60%. Dengan adanya komando Operasi djalan diharapkan segala sesuatu akan berhasil dengan baik.

2. Perkembangan usaha angkutan.

Dalam zaman modern ini angkutan bermotor didjalan raya merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Desa².

Pengangkutan yang sangat flexible ini memberikan kemungkinan² yang besar bagi usaha² produksi dan distribusi, lebih² bagi Daerah Jawa-Barat yang memiliki perkebunan² besar penghasil divisen diploksok-ploksoknja.

Bagaimana pentingnya, sektor ini dapat dilihat dari perkembangannya yang sangat tjepat, baik dalam pertambahan djumlah alat² maupun ketjepatan dan kekuatan muat.

Tambahan alat² angkutan serta penambahan frekwensi ini mengakibatkan banjak kerusakan djalan, yang pada umumnya belum disesuaikan dengan meningkatnja kemadjuan dalam konstruksi alat² pengangkutan bermotor.

Kerusakan djalan² di Jawa-Barat merupakan salah satu segi yang memerlukan pemikiran yang mendalam dalam memperlantjar dan meningkatkan pengangkutan di Djalan Raya.

Perkembangan moniter yang menunjukkan gejala² yang tidak diharapkan, mempunyai effect sangat besar dalam perkembangan dan lantjanja pengangkutan di djalan raya.

Berbitjara mengenai djalan² yang ada di Jawa-Barat, kita kenal disini:

Djl. kls. I	dengan tekanan sumbu 7.000 kg.
Djl. kls. II	dengan tekanan sumbu 5.000 kg.
Djl. kls. III	dengan tekanan sumbu 3.000 kg.
Djl. kls. III A	dengan tekanan sumbu 2.500 kg.
Djl. kls. IV	dengan tekanan sumbu 2.000 kg.
Djl. kls. V	dengan tekanan sumbu 1.500 kg.

Kebanyakan djalan² di Jawa-Barat terdiri kelas III kebawah, hal mana menghambat kelantjaran pengangkutan barang, karena truck yang melalui djalan kelas III harus menjesuaikan muatannya dengan ketentuan tersebut. Pengusaha bukanlah pengusaha apabila tidak berusaha untuk mentjapai 100% dari capaciteit muatnja dengan mengambil risiko daripada segala konsekwensinya. Akibatnja adalah bahwasanja selalu terdjadi overbelading dengan membawa kerusakan² yang lebih besar kepada djalan² yang dilaluinya.

3. Taman kendaraan bermotor (wagenpark).

Menurut angka² jang tersedia maka dalam tahun 1950 di Djawa-Barat terdapat $\pm$ 4.862 mobil penumpang, 4.005 truck dan 417 bis milik swasta dan Pemerintah sipil.

Djumlah tersebut meningkat dalam tahun 1961 mendjadi 14.374 mobil penumpang, 8.261 truck dan 1.245 bis.

BANJAKNJA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DJAWA-BARAT.

Matjam kendaraan	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1961
Mobil penumpang	4.862	5.137	7.333	8.529	8.985	10.359	10.588	14.374
Truck	4.005	4.728	5.200	5.846	6.752	7.057	8.876	8.261
Bis	417	527	699	826	925	972	1.027	1.245
Lain ³	1.516	2.168	6.000	11.004	14.359	15.300	17.786	20.082
Djumlah	10.800	12.560	19.232	26.205	31.021	33.488	38.277	43.960

Gambaran tersebut memperlihatkan kenaikan jang sangat tinggi, namun meskipun demikian masih dirasakan kurangnja alat² pengangkutan umum berupa truck², otobis dan otolet untuk memenuhi kebutuhan masjarakat. Pada umumnja taman kendaraan jang dikemukakan tadi sebagian besar terdiri dari kendaraan jang umumnja melebihi waktu 5 tahun, jang sebetulnja telah harus dihapus dari peredaran (afgeschreven).

Mudahlah dapat dimengerti, bahwasanja dewasa ini setelah meningkatnja taman kendaraan itu, kekurangan akan pengangkutan umum masih tetap sangat dirasakan. Kiranja hal ini akan dapat diatasi sedjauh mungkin bila penambahan wagenpark itu diatur sebagai berikut:

- Adanja penambahan sebagai pengganti efschrijvingen.
- Adanja penambahan sebagai tambahan kemadjuan (tambahnja penduduk dan perkembangan ekonomi).
- Adanja Standarisatie import alat pengangkutan, jang memudahkan penggunaan spare-parts tertentu untuk kendaraan jang beredar.

4. Angkutan penumpang.

Sebagaimana dikemukakan diatas kebutuhan pengangkutan umum terus meningkat. Dalam hubungan ini baiklah kiranja diperhatikan gambaran mengenai keadaan otobis jang sangat dibutuhkan oleh masjarakat sebagai alat angkutan jang termurah diluar kereta api.

Djika sedjak tahun 1950 sampai dengan 1962 volume pengangkutan penumpang bis tiap² tahun terus meningkat 20% a 25%, maka sedjak tahun 1962 angka² menundjukkan tiap² tahun kemerosotan.

Diseluruh Djawa-Barat pada achir tahun 1964 tertjatat 1118 buah otobis umum. Dibandingkan dengan tahun 1963 djumlah tersebut mendapat kenaikan sebanjak 102 buah bis. Djumlah rit perdjalan turun dari 2823 pada tahun 1963 djadi 2732 pada tahun 1964.

Perlu diterangkan disini bahwa faktor² menundjukkan djumlah rit perdjalan jang rata² dilaksanakan tiap harinja tidak melebihi angka 2000. Ini berarti bahwa tiap hari djumlah otobis jang didjalkan hanya berkisar pada 75% atau kemerosotan ruang muat dari $\pm 25\%$.

Ditegaskan dalam djumlah penumpang, maka dalam tahun 1964 tiap hari hanya dapat diangkut $2000 \times 35 = 70.000$ penumpang. Kapasitas tersebut merupakan hal jang menjedihkan sekali bagi daerah Djawa-Barat, jang berpenduduk $\pm 19.500.000$ orang.

Adapun jang mendjadi sebab utama dari kemerosotan jang digambarkan tadi, ialah karena perusahaan² otobis mengalami berbagai kesulitan, selain apa jang dikemukakan diatas, ditambah pula dengan sangat beratnja biaja eksploitasi, sehingga mengakibatkan:

1. Ada diantaranya jang mengundurkan diri dan kalau tidak tjepat dioperkan kendaraannya lebih baik digantung sadja.
2. Ada djuga beberapa perusahaan otobis jang meninggalkan trajek jang dilajani karena buruknja djalan dan pindah melajani trajek jang dipandang agak baik.

Djuga sulitnja bahan bakar benzin terutama didaerah pegunungan (Bandung dan sekitarnya) merupakan suatu faktor jang mengakibatkan mundurnja volume angkutan penumpang.

Angkutan barang.

Dilihat dari angka² jang dapat dikumpulkan djuga djumlah truck sedjak tahun 1950 sampai sekarang terus meningkat. Kesulitan² jang dihadapi oleh pengusaha² truck pada umumnya sama dengan apa jang dihadapi oleh pengusaha² otobis. Djuga volume angkutan barang sedjak tahun 1950 s/d 1962 tiap² tahun rata² meningkat dengan 20 a 25%, sedangkan sedjak tahun 1962 keadaannya mendjadi mundur, seperti pula dengan perusahaan otobis hal ini disebabkan karena berkurangnya truck jang berdjalan berhubung dengan sulitnja/mahalnja spare-parts.

Perbandingan angka² djumlah pengusaha dengan truck dari tahun 1951 sampai tahun 1964:

T a h u n	U m u m		Bukan umum		D j u m l a h	
	Pengu-saha	Truck	Pengu-saha	Truck	Pengu-saha	Truck
1951	1.000	1.591	564	908	1.564	2.499
1952	1.593	2.391	731	1.374	2.324	4.765
1953	1.059	1.851	436	873	1.495	2.765
1954	1.298	2.349	377	810	1.675	3.159
1955	1.421	2.505	527	1.123	1.948	3.628
1956	962	1.909	331	784	1.293	2.693
1957	967	2.076	422	916	1.389	2.992
1958	1.003	2.160	466	985	1.469	3.145
1959	1.064	2.276	541	1.124	1.605	3.400
1960	984	2.221	553	1.092	1.537	3.313
1961	1.495	2.708	444	788	1.939	3.496
1962	1.255	2.494	268	592	1.523	3.496
1963	3.565	4.953	1.735	4.227	5.300	9.180
1964	4.115	5.704	2.623	4.119	6.738	9.823

- KETERANGAN:** 1. Angka² dalam tahun 1951 s/d 1962 diisi menurut banjaknja pengusaha jang mempunyai idzin trajek tertundjuk.
2. Sedangkan angka² dalam tahun 1963 dan 1964 adalah perusahaan² truck jang wadjib kir diseluruh Djawa-Barat.
3. Pengambilan angka² tahun 1963 dan 1964 tersebut diatas disebabkan dengan adanya pembebasan trajek dalam propinsi, menurut surat edaran Departemen Perhubungan D.P.T.P. tertanggal 1-9-1962 No. L. 14/39/19.

Dalam pengawasan pengangkutan barang, maka sehubungan dengan penggunaan djalan sesuai dengan peraturan² jang berlaku, diperlukan djembatan² timbang, dimana dapat diukur beratnja muatan setiap truck melalui djalan raya. Sebelum tahun 1958 di Djawa-Barat hanya ada sebuah djembatan timbang, jaitu di Padalarang.

Sedjak tahun 1958 berangsur-angsur didirikan djembatan timbang di Bogor, Tjikampek, Tanggerang dan Tjinunuk (Bandung Timur). Dengan demikian diseluruh Djawa Barat terdapat 5 (lima) djembatan timbang. Diredjanakan pendirian djembatan timbang di Losari (Tjirebon) jang alat²-nja sudah tersedia.

5. Usaha^a pengamanan Lalu-lintas di djalan raya.

Usaha pengamanan lalu-lintas teknis-polisioneel terus diusahakan sebaik mungkin.

Untuk dapat menambah tenaga terdidik dalam bidang ini maka sejak tahun 1962 Djawatan lalu-lintas djalan Daerah Tingkat I Djawa-Barat telah mengadakan kursus^a sebagai berikut:

Pemeriksa L.L.D.	tahun 1962 = 22 orang
Pengamat L.L.D.	tahun 1963 = 15 orang
Pengamat teknik kendaraan	tahun 1963 = 13 orang
Djuru L.L.D. I	tahun 1963 = 40 orang
Djuru L.L.D. II	tahun 1963 = 45 orang
Djuru L.L.D. III	tahun 1964 = 50 orang
Djuru teknik kendaraan	tahun 1964 = 20 orang
Pemeriksa L.L.D.	tahun 1965 = 34 orang
Pengudji kendaraan	tahun 1965 = 15 orang

BANJAKNJA: PENGUSAHA OTOBIS/TRAJEK/OTOBIS/RITTEN/ PENUMPANG

dari tahun ke tahun mulai tahun 1953.

Tahun	Peng- usaha	Trajek	Otobis	Ritten	Banjakenja penumpang, berdasarkan tempat duduk 35 orang per-otobis.	
					Sehari	Setahun
1953	140	121	585	1.892	66.220	19.866.000
1954	194	163	783	2.607	91.245	27.373.500
1955	210	159	785	2.652	92.820	27.846.000
1956	219	148	779	2.577	90.195	27.058.500
1957	251	170	891	2.826	98.910	29.673.000
1958	271	214	937	2.981	104.335	31.300.500
1959	266	230	914	2.952	103.320	30.996.000
1960	286	235	998	3.150	110.250	33.075.000
1961	260	225	1.053	2.432	85.190	25.557.000
1962	268	231	1.342	3.544	124.040	37.212.000
1963	222	220	895	2.216	77.560	23.268.000
1964	269	212	933	2.138	74.830	22.449.000

TARIP ANGKUTAN BIS DAN TRUCK.

Tarip penumpang bis		Tarip angkutan truck	
Tahun	per penumpang Km.	Tahun	per ton Km.
1957	Rp. 0,10 [*]	1953	Rp. 0,94
1958	0,12	1956	0,98
1960	0,23	1960	2,30
1962	0,36	1962	3,10
1963	0,40	1963	18,60
	0,80	<i>Keterangan.</i> Sesudah Dekon belum ditertibkan dan berlaku tarip menurut per- mintaan dan penawaran.	
	1,60		
	2,40		
1964	2,40		
1965	4,50		

Dengan pendidikan tersebut, diharapkan Djawa-Barat berangsur-angsur dapat memenuhi tenaga² kader terdidik. Usaha ini merupakan jang pertama, dibandingkan dengan daerah Tingkat I lainnya di Indonesia.

DJAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA. Damri adalah singkatan dari DJAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA.

Asal mulanja adalah dari dua organisasi angkutan jang didirikan oleh Pemerintah Djepang, jaitu:

- I. DJAWA UNJU ZIGYOSHA (perusahaan angkutan barang dengan truck dan tjikar di Djawa).
- II. ZIDOSHA SOKYOKU (perusahaan angkutan penumpang dengan bis).

Dekat sesudahnja hari proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17-8-1945) kedua organisasi angkutan diatas ini masing² diambil-alih oleh kaum-buruhnja dan selandjutnja diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan perubahan nama sebagai berikut:

Djawa Unju Zigyosha dirubah mendjadi
 DJAWATAN PENGANGKUTAN.

Zidosha Sokyoku dirubah mendjadi
 DJAWATAN ANGKUTAN DARAT.

Kedua-duanja ditempatkan dalam lingkungan KEMENTERIAN PER-HUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

Terhitung semendjak tanggal 25-11-1956 kedua Djawatan ini digabungkan menjadi satu dengan diberi nama:

DJAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA penggabungan mana dinjatakan dengan maklumat Menteri Perhubungan No. 1/DAM/45 tanggal 20-11-19546.

Pada waktu masih menggunakan nama lama ialah DJAWATAN ANGKUTAN DARAT dan DJAWATAN PENGANGKUTAN, karena nama DAMRI pada waktu itu oleh Pemerintah masih belum diberikan, maka pada tanggal 10-11-1945 pertempuran sengit meletus di Surabaya, jang kini terkenal dengan sebutan HARI PAHLAWAN.

Djuga di Djawa-Barat pertempuran² mulai berkobar di beberapa tempat. Sebagai alat revolusi DAMRI-pun tidak ketinggalan dan karyawannya terus mentjurahkan tenaga dan fikiran, bahkan menjerahkan jiwa dan raga² demi hasilaja revolusi.

Selanjutnja DAMRI — tidak ketinggalan ikut serta mengangkut orang² BELANDA dan INDO dari kamp² Perlindungan ke kota² jang dikuasai oleh Militer Belanda, pengangkutan mana terkenal dengan istilah pengangkutan APWI (Allied Prisoners of war and Interneers). Dalam tugas ini DAMRI bertindak sebagai pengangkut dari kamp² perlindungan ke Stasiun² Kereta-Api.

Seterusnya pada waktu Pemerintah kita menggerakkan pengumpulan PADI untuk membantu Pemerintah INDIA dalam usahanya mengatasi bahaya kelaparan, bantuan mana dilakukan setjara — tukar-menukar — PADI dengan TEKSTIL.

DAMRI djuga tidak ketinggalan ikut serta menjelenggarakan pengangkutan PADI dari tempat² penimbunan ke suatu pelabuhan jang dapat didatangi oleh kapal INDIA. Di Djawa-Barat usaha ini dilaksanakan ke pelabuhan Tjirebon.

Tanggal 21 Djuli 1947 Kota Tasikmalaja, tempat kedudukan Kantor Eksploitasi Djawa-Barat, di bom oleh Tentara Belanda.

Sebagian pegawai² DAMRI turut serta bergerilja dan ada pula jang pergi ke Djogjakarta untuk melanjutkan perjuangan DAMRI.

Kemudian oleh Pemerintah Belanda didirikan Motor Transport Dienst (M.T.D.).

Dalam perjuangan Rakjat Indonesia jang dirasakan oleh Belanda mangkin lama mangkin menghebat dan gigih, Belanda mempergunakan taktik petjah-belah, dan dibentuklah di Djawa-Barat negara Boneka „Pasundan”. Sebagian dari kendaraan M.T.D. diserahkan kepada Negara Pasundan tersebut, dengan diberi nama Motor Dienst Pasundan (M.D.P.).

Dalam tahun 1950 pada masa perjuangan jang terus meningkat, M.D.P. direbut dan diambil-alih oleh para pegawai dan buruhnja dari Pemerintah

Negara Pasundan — dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia M.D.P. dirubah menjadi Djawatan Motor Republik Indonesia dengan singkatan D.M.R.I.

Tidak lama kemudian dikembalikan lagi kepada nama semula, ialah menjadi DJAWATAN ANGKUTAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA, dengan singkatan D.A.M.R.I.

Tahun² survival.

Dalam periode survival MODAL PERDJUANGAN dalam arti MATERIIL berkeadaan agak lebih besar dari pada sebelumnya.

Keadaan Keuangan Negara terasa agak lebih longgar, kekuasaan politik kita telah diakui oleh sebagian besar dunia Internasional, sedang kekuasaan de facto kita telah melebar sampai daerah dimuka pintu-gerbang Irian-Barat.

Djika diatas dikemukakan kemadjuan dalam materiil, lain halnya perkembangan mental yang dialami oleh D.A.M.R.I., dimana dirasakan adanya kemunduran. Dengan berbagai jalan kedudukan D.A.M.R.I. selalu digojahkan dengan usaha² sbb.:

- a. Status DAMRI dari tingkat DJAWATAN diturunkan hingga hanya berstatus URUSAN (bahagian dari Djawatan L.L.D.);
- b. Organisasi DAMRI — tidak dipusatkan — melainkan dipetjah-petjah mengikuti tata-wilayah propinsi, diantaranya wilayah Djawa-Barat;
- c. Anggaran Belandja Modal tidak disediakan; yang disediakan terbatas hanya Anggaran Belandja Pegawai dan Belandja Barang, sedang djumlahnya — sangat tipis — sehingga sulit melakukan — gerak usaha komersil — dimana persaingan telah mulai menghebat;
- d. Permintaan izin trajek — sangat dipersulit — dengan alasan bahwa dalam Undang² Lalu-lintas — tidak terdapat — sepetah katapun yang memberikan fasilitas kepada DAMRI, sehingga DAMRI — perlu dilajani sama — seperti pelayanan berlaku bagi pengusaha² angkutan Swasta;
- e. Systim PEMBIAJAN dan ADMINISTRASINJA diatur berdasarkan ICW, sehingga sulit untuk bergerak atas dasar KOMERSIL dalam arti kata Komersil hanya sekedar untuk memutar modal karena DAMRI diberi tugas yang bersifat sosial.

Meskipun banjak rintangan yang dihadapi namun eksploitasi Wilayah Djawa-Barat melebarkan sayapnya membentuk Stasiun² dalam tingkatan Kabupaten, dengan tudjuan melakukan angkutan penumpang dan barang, dari pedalaman ke kota² Ibu Kabupaten dan kota² Ibu propinsi.

Setasiun² yang dibentuk adalah sebagai berikut:

SERANG — BOGOR — SUKABUMI — PURWAKARTA — BANDUNG — GARUT — TASIKMALAJA — dan — TJIREBON.

Untuk membantu rakyat yang berkedudukan di tempat³ yang ge-isoleerd akibat daripada terganggunja keamanan dan pula dalam membantu para anggota angkatan bersendjata untuk bergerak kedaerah dalam memulihkan keamanan tidak sedikit pegawai dan material DAMRI yang menjadi korban dan rusak.

Tahun³ investment.

Mendjelang achir tahun 1955 — setelah melalui perdjjuangan — jang tjukup gigih, DAMRI dapat berhasil memperoleh kembali status DJAWATAN seperti jang pernah dimiliki dalam periode revolusi phisik, sedang organisasinja dapat disusun vertikal kembali dengan kantor pusat di Djakarta, dengan surat-keputusan Menteri Perhubungan No. U 14/17/15 tanggal 12-11-1955.

Dalam tahun 1956 dibentuk Bengkel Induk Eksploitasi Djawa-Barat berkedudukan di Bandung dan dibentuk pula Setasiun DAMRI Rangkasbitung.

Disamping diadakan Bengkel Induk dan Setasiun³ dalam Wilayah Djawa-Barat, maka diadakan pula penambahan³ kendaraan Bis/Truck jang baru. Kepada pegawai³ diberikan pula pendidikan³, dengan djalan „aplikasi“ ke-tata-usahaan dan ke-tehnikan, untuk mempertinggi pengetahuan para pegawai.

Perlu dapat dibanggakan, bahwasanja pada pembentukan DAMRI diluar Djawa, seperti di Eksploitasi Sumatra-Selatan — Sulawesi Selatan Tenggara dan didalam perdjjuangan Trikora di Irian-Barat, sebagian besar dari djabatan³ penting di Eksploitasi³ tersebut oleh Kantor Pusat DAMRI diserahkan kepada pegawai³ dari Eksploitasi DAMRI Djawa-Barat, pun pula pada pembentukan Kantor Eksploitasi Kalimantan-Barat di Pontianak dalam rangka perdjjuangan Dwikora. Hal³ tersebut merupakan kehormatan bagi Eksploitasi Djawa-Barat.

Tahun Pembangunan.

Hasil³ Musjawarah Kerdja BPU-DAMRI seluruh Indonesia jang berlangsung di Bandung pada tanggal 26-12-1963 s/d 31-12-1963 malam 1-1-1964, diantaranya telah mengeluarkan suatu pernyataan jang merupakan Pernyataan Induk dimana dimuatkan GENERAL POLICY dari BPU-DAMRI setjara djelas sekali.

Dalam pernyataan tersebut, diantaranya telah dikemukakan terlebih dahulu *Landasan Idiil Bidang Ekonomi*, dengan memperhatikan UUD — 1945 pasal 33 dan selandjutnja *Landasan Materiilnja*, dengan memperhatikan pula diantaranya Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pasal 6.

Landasan Politik Perniagaan BPU-DAMRI:

Objek perniagaan BPU-DAMRI adalah DJASA ANGKUTAN, oleh karena itu perumusan POLITIK PERNIAGAAN BPU-DAMRI perlu mengikuti „sifat” dan „fungsi” dari DJASA ANGKUTAN, karena kedua unsur DJASA ANGKUTAN itu masing² memiliki „kepribadian” jang dapat menentukan „arah” dan „tudjuan” POLITIK PERNIAGAAN termaksud.

Perlu diketahui pula, bahwa dalam Ringkasan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran B. V BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN, Perhubungan Darat, dikemukakan sbb.:

„13. DAMRI sebagai Perusahaan Negara untuk angkutan djalan raya, baik mengenai djumlah kendaraannya (terutama pengangkutan dengan truck), maupun mengenai wilayah kegiatannya, supaja diperluas.

Dengan demikian DAMRI dapat dijadikan satu „taman kendaraan tjadangan strategis” bagi keperluan „Keamanan/Pertahanan dan dapat mengatur penjaluran barang-barang penting bagi masyarakat”.

Untuk memperkuat kedudukan DAMRI sebagai alat Revolusi, maka BPU-DAMRI jang berada diwilayah Djawa-Barat, berusaha menudju kepada „BERSWASEMBADA”, dengan djalan memperhebat perdjuangan serta memprodisir alat² sbb.:

1. membuat onderdil² — kebutuhan kendaraan².
2. vulcanisir ban sendiri.

Disamping melajani angkutan penumpang umum sehari-hari, maka angkutan² lain pun mendapat perhatian sepenuhnya a.l.:

1. Angkutan untuk Tamu Negara.
2. Angkutan untuk Konperensi² Negara.
3. Angkutan untuk projek² penting, seperti „Projek Djatiluhur”.
4. Angkutan untuk Hari Raya Idil Fitri.

Pada tahun 1962 sewaktu ada penghentian perdjalan Angkutan PNKA karena gangguan pihak gerombolan DI/TII jang terdjadi di „TROWEK”, maka pada waktu itu DAMRI tampil kemuka untuk menggantikan pengangkutannya.

Pada saat ini disamping melajani angkutan penumpang, DAMRI mengerahkan 1 (satu) unit jang terdiri dari 8 truck untuk tiap² hari melaksanakan pengangkutan barang pangan dari Tjiandjur ke Djakarta jang rata² berdjumlah 50 ton/sehari.

Harapan kemudian.

Pada tahun 1963-1964 dunia angkutan, termasuk DAMRI merosot akibat sukarnya ban, spare-part, bahan bakar/pelumas disamping djalan jang tidak menguntungkan dan pada tahun 1965 pun masih dirasakan akibatnya.

Maka rentjana untuk 3 tahun jang akan datang, ialah tahun² 1966 — 1967 dan 1968 direntjanakan penambahan kendaraan untuk Eksploitasi BPU-DAMRI Djawa-Barat, sbb.:

1. Bis — 90 buah.
2. Truck — 64 buah.
- Djumlah — 154 buah Kendaraan.

Akibat dari penambahan bis tersebut angkutan penumpang akan dapat ditingkatkan dari 4.200.000 Km. menjadi 6.000.000 Km. dan banjaknja penumpang jang diangkut dari 1.834.980 menjadi 2.258.000.

Untuk melantjarkan angkutan sandang & pangan dan pembangunan direntjanakan penempatan Unit truck jang terdiri dari 8 buah kendaraan truck di Setasiun²:

1.	Setasiun DAMRI	Serang.....	8 buah.
2.	„	Bogor.....	8 „
3.	„	Sukabumi.....	8 „
4.	„	Purwakarta.....	8 „
5.	„	Bandung.....	8 „
6.	„	Garut.....	8 „
7.	„	Tasikmalaja.....	8 „
8.	„	Tjirebon.....	8 „
Djumlah			64 buah.

Dalam tahun 1965 ini diluar rentjana 3 tahun tahap terachir, DAMRI Eksploitasi Djawa-Barat diperkirakan akan menerima 60 buah Truck merk „CSEPEL”.

Dengan rentjana, seperti jang dilukiskan diatas itu, maka angkutan barang dapat diselenggarakan dengan rata² 100 buah Truck aktif setiap harinja dan dapat mengangkut 190.000 ton setahun dengan perhitungan angkutan djarak sedang dan djauh:

Perlu diketahui, bahwa mas'alah pendapatan tidak ditjantumkan, berkenaan dengan selalu adanya perubahan² tarief.

Sebagai tambahan perlu didjelaskan, bahwa dalam rentjana 3 tahun tahap terachir ini, direntjanakan penambahan² sbb.:

1. Kendaraan Dinas Gangguan dan Pengawasan.
2. Mesin² untuk perbengkelan.
3. Bangunan² baru termasuk rumah² dinas.
4. Inventaris dan meubilair.

Objek perniagaan BPU-DAMRI, seperti apa yang telah dilukiskan dalam Peraturan Pemerintah No. 233 tahun 1961, adalah sbb.:

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang angkutan umum sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan angkutan umum diatas jalan raya dengan kendaraan bermotor, baik untuk penumpang maupun untuk barang.

Organisasi.

Periode Revolusi Fisik dari tanggal 17-8-1945 s/d 1950 DAMRI berstatus DJAWATAN — (I.C.W.).

Kemudian pada periode tahun „Survival” 1950 — 1955 DAMRI berstatus DJAWATAN — (I.C.W.).

Selanjutnya pada periode „investment” 1955 — 1959 DAMRI berstatus DJAWATAN — (I.C.W.) dan organisasi Djawatan menjadi vertikal dengan Kantor Balai-Besarnya di Djakarta dan mulai tanggal 1 Januari 1960 menurut surat-Keputusan Menteri Perhubungan Darat & P.T.T. tanggal 2-5-1960 No. T/a/1/21 DAMRI diperlakukan sebagai Perusahaan Negara dalam arti pasal 2 „Indische Bedrijvenwet”.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 233 tahun 1961 yang berlaku pada tanggal 31 Oktober 1961 DAMRI berstatus Perusahaan Negara dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor „DAMRI” dan pendirian BPU-DAMRI itu dengan surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 24 Mei 1963 No. A 7/1/10 berlaku mulai tanggal surat-keputusan tersebut.

Djadi sekarang DAMRI berstatus Perusahaan Negara dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor „DAMRI”.

Kesimpulan.

Untuk memasuki tahun² yang akan datang dimana kita dihadapkan kepada tuntutan ekonomi yang mendesak, sebagaimana telah digariskan dalam Ampol Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno pada pembukaan Sidang ke III MPRS, berjudul „Berdikari” a.l.:

1. Mensukseskan proyek-proyek Nation dan Character Building;
2. Memetjahkan masalah sandang-pangan setcepat mungkin;

3. Melanjutkan proyek-proyek yang setengah-djadi, atau yang bersifat ekonomis yang sangat penting dalam strategi perjuangan kita;
4. Mengatasi dan menyingkirkan hambatan-hambatan pembangunan yang kita hadapi, dengan menggali dan mendorong kekuatan manusia dan alam Indonesia, untuk lebih banyak lagi menemukan dan memproduksi barang-barang baru;
5. Menyelesaikan masalah modal-asing yang sudah ada di Indonesia, hingga kita mentjapai kebebasan penuh dibidang ekonomi.

Kita harus bersama menghadapi tantangan² dan djuga harus menoleh kebelakang untuk meneliti kepada pengalaman² yang telah dialami, hambatan² apa yang menyebabkan kurang lantjarnya roda pembangunan kita. Untuk mengsucceskan tahap „Pembangunan” sekarang ini dimana kita hampir memasuki tahap yang kedua, jaitu tahap sosialisme demi untuk tertjapainja tjita² kita bersama, jaitu masyarakat sosialis Indonesia, masyarakat adil dan makmur perlu adanya kegotong-rojongan didalam pemikiran maupun pelaksanaannya untuk meninggalkan tjara² yang leberaal menudju kepada tjara² sosialis.

Pelabuhan.

Pada masa sebelum perang di Daerah Djawa-Barat disamping Pelabuhan Tjirebon dan Pelabuhan Merak dikenal djuga Pelabuhan² Tjilauteureun (Pameungpeuk/Garut Selatan) dan Udjung-Genteng di Selatan Sukabumi. Pada dewasa ini hanya Pelabuhan Tjirebon dan Pelabuhan Merak sadja yang dibuka, karena Pelabuhan² Tjilauteureun dan Udjung-Genteng beberapa saat sebelum Tentara Djepang mendarat telah tidak digunakan lagi. Pelabuhan Udjung Genteng telah rusak sama sekali, sedangkan Pelabuhan Tjilauteureun dilihat dari keadaanja pada dewasa ini masih bisa dirchabilitir, karena kade²-nja masih utuh.

Dalam periode Revolusi fisik Pelabuhan Tjirebon hanya disinggahi kapal² dari beberapa Negara sadja. Dalam tahun 1950 Pelabuhan ini disinggahi oleh kapal² dari 6 Negara asing jaitu Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Norwegia, Panama dan Selandia-Baru.

Dalam periode² „Survival”, „investment” dan terutama sedjak tahun 1959 sampai kini sebagai akibat dari didjalankannya politik bebas aktif, maka tiap tahunnja tertjatat kapal² dari tidak kurang dari 17 Negara Asing yang singgah di Pelabuhan Tjirebon (Kapal² dari Negara² Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Djepang, Panama, Muang-Thai, Djerman-Barat, Rusia, Norwegia, Leberia, Grik, Libanon, Perantjis, Brasil, Denemarken, Swedia dan Italia.

Daftar banjaknja kapal² yang masuk ke-dan berangkat dari Pelabuhan Tjirebon dari tahun 1947 s/d tahun 1965.

**Daftar kapal yang masuk dan belajar/berangkat dipelabuhan
Tjirebon dalam tahun 1947 s/d 1965.**

TAHUN	M a s u k			Keluar/Berlajar		
	buah	m ³	ton bruto	buah	m ³	ton bruto
1947	91	457635,68	162545,40	91	457635,68	162545,40
1948	347	1964107,26	157019,86	347	1964107,26	157019,86
1949	463	4017742,65	1338063,16	463	4017742,65	1338063,16
1950	375	4826214,23	1703653,62	375	4826214,23	1703653,62
1951	416	4826911,35	1622899,71	413	3796720,76	1340242,43
1952	574	5548433,14	1958596,90	575	573211,08	1967343,51
1953	603	5664967,00	1999733,35	604	5667904,00	2000770,11
1954	635	5849008,43	2064699,98	635	5845695,53	2063530,52
1955	620	5461437,55	1933947,45	619	5460303,65	1927487,88
1956	494	3557718,01	1255974,46	494	3557718,01	1255874,46
1957	530	3539942,68	1249599,77	529	3538725,38	1099170,06
1958	435	2351049,57	829920,50	424	2341432,57	826525,70
1959	452	2323635,59	820243,36	448	2300672,21	812137,29
1960	452	2190124,35	773113,90	453	2195461,32	774997,85
1961	420	3468890,13	1224518,22	415	2437509,63	860440,90
1962	343	1633986,19	576797,13	336	1571289,89	554663,33
1963	281	1453501,73	513286,11	281	1453501,73	513286,11
1964	290	1645554,00	580880,56	288	1620838,59	572156,02
1965	55	295007,33	104137,59	54	276201,01	97498,96

TJATATAN: tahun 1965 sampai bulan Maret.

Banjaknja perusahaan Pelajaran/Keagenan/Veem di Tjirebon tertjatat sebagai berikut:

Pada saat sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah No. 5/1964 yang berlaku mulai tanggal 1 Nopember 1964, terdapat:

4 Tjabang Perusahaan Pelajaran

5 buah Keagenan

6 buah P.M.K.L. (Veem)

Setelah 1 Nopember 1964 tertjatat:

5 buah Perusahaan Pelajaran, jaitu:

- (a). P.N. Pelni
- (b). P.N. Djakarta-Lloyd.
- (c). P.T. Bahari.
- (d). P.T. Sang Saka.
- (e). P.T. Samudera.

6 buah Perusahaan Angkutan Laut, jaitu:

- (a). P.N. V.T.P.
- (b). P.T. Yala Citha Tama.
- (c). P.T. Samudera Putera.
- (d). P.T. Gunung Sembung.
- (e). P.T. Kalidjati.
- (f). P.T. Kalianjar.

TJATATAN: Khusus Keagenan dan P.M.K.L. dihapus.

Reede-transport sedjak tanggal 2 Djuli 1964 dikuasai dan diselenggarakan oleh P.N. Peln.

Alat²-nja jang dikuasai terdiri dari 33 buah tongkang, 4 buah kapal gandeng dan 1 buah motorboot.

(Sebelumnja Reede-transport ini dikuasai dan didjalankan oleh P.V. I.P.P.A.).

Sektor Telekomunikasi.

Segera setelah bom atoom didjatuhkan diatas kota² Nagasaki dan Hiroshima, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 Pemerintah Djepang bertekuk lutut dihadapan tentara Sekutu dan tamatlah riwayat pendjadjahan Pemerintah Djepang atas Indonesia.

Pada waktu itu oleh pimpinan tertinggija di Djakarta disebarkan pengumuman, bahwa meskipun Balatentara Dai Nippon sudah menjerah kalah, akan tetapi segala-galanja harus tetap berdjalan. Demikianlah maka Balatentara Dai Nippon diwadjibkan mendjaga agar keadaan diseluruh Kepulauan Indonesia tetap utuh, dan tetap berdjalan lantjar dalam segala bidang administrasinja, untuk kemudian pada waktunja menjerahkan segala kekuasaan atas Indonesia kepada Tentara Sekutu (batja; Belanda dan Nicanja).

Seperti kita semua telah maklum, maka pada tanggal 17-8-1945 tepat djam 10.00 pagi berkumandanglah keseluruh peloksok dunia teks Proklamasi tentang kemerdekaan Indonesia, jang pada waktu itu ditjanangkan oleh Bung Karno bersama Bung Hatta dari Gedung bersedjarah didjalah Pegangsaan Timur 56 Djakarta atas nama seluruh Bangsa Indonesia. Semendjak detik itu pulalah roda revolusi Bangsa Indonesia mulai berputar. Sungguhpun tentara Djepang pada waktu itu masih penuh bersendjata dan menempati garnizoornja dimana-mana, akan tetapi moril tentara ini sudah patah sama sekali. Sebaliknja bangsa Indonesia dimana-mana bangkit semangatnja, dadanja penuh dengan tjita² merdeka, ingin menguasai negerinja sendiri, kendatipun apa sджа jang terdjadi dengan dirinja sendiri. Semua perhatian tertudju pada tudjuan „pendjadjah harus dienjakkan”. Dengan adanya semangat jang demikian sutji-murninja ditambah

lagi dengan keharusan untuk membalas dendam kepada kekedjaman sipendjadjah selama pendudukan, maka lebih mendjadi bergelora lagilah hasrat untuk merdeka. Sifat agresip dari rakjat terasa dimana-mana.

Setiap tenaga revolusioner mulai bergerak dan ingin bertindak untuk mengisi kemerdekaan, jang baru diproklamasikan. Bangsa Indonesia jang telah insjap sebagai Bangsa jang merdeka, telah bertekad bulat dan tidak ingin didjadjah lagi oleh Bangsa lain, bahkan ingin mengurus rumah tangganja sendiri sesuai dengan kepribadian Nasionalnja.

Untuk melaksanakan hasrat dan tjita^a itu, satu^anja djalan ialah dalam waktu singkat melenjapkan segala kekuasaan de facto pihak asing jang pada waktu itu masih bertjokol ditanah air kita. Sesuai dengan panggilan Revolusi, maka terbentuklah di Bandung setjara spontan Angkatan Muda P.T.T. (A.M.P.T.T.) dibawah pimpinan sdr. Soetoko (kini Kolonel Tjandangan), jang bertudjuan menggerakkan aksi serta mempersiapkan diri dalam rangka pelaksanaan dan pengisian proklamasi, jaitu memindahkan kekuasaan atas Djawatan P.T.T. seluruhnja dari tangan Djepang ketangan Bangsa Indonesia sendiri.

Pada waktu itu Djawatan P.T.T. jang berkantorpusat di Djl. de Kat (Djl. Tjisanggarung) dengan nama Tsuushin Shokyoku dikepalai oleh Djen-deral Haneda selaku Tsuushin Shokyokucho.

Antara tanggal 25/8 dan 25/9 telah berulangkali diadakan perundingan^a oleh pegawai^a tertinggi P.T.T. bangsa Indonesia dengan Pimpinan Djepang agar kekuasaan atas Djawatan P.T.T. diserahkan sadja kepada Bangsa Indonesia, sebab njatanja Djepang sudah kalah perang dan karena Indonesia sudah merdeka. Pegawai^a tertinggi Bangsa Indonesia pada waktu itu ialah: Mas Suharto dan Raden Dyar.

Setelah rundingan^a tersebut untuk kesekian kalinja menemui djalan buntu dan sampai pada tanggal 26-9-1945 itu pihak Djepang tetap ngotot, bahkan kata mereka, mereka harus menjerahkan kekuasaan atas Djawatan P.T.T. kepada pihak Sekutu, maka hilanglah kesabaran para pimpinan pegawai P.T.T. terutama para pimpinan dan segenap anggota A.M.P.T.T.

Tanggal 26-9-1945 beberapa kali diadakan pertemuan antara tokoh^a A.M. P.T.T., keputusan rapat^a pada hari itu ialah bulat „Tanggal 27 September 1945 kekuasaan atas Djawatan P.T.T. harus direbut dengan kekerasan dari tangan Djepang, tidak perduli korban apa sadja jang mungkin harus diberikan.

Sore hari tanggal 26-9-1945 pimpinan A.M.P.T.T. menemui Mas Soeharto dirumah di Djl. Djawa No. 2 Bandung untuk memberitahukan maksud keras A.M.P.T.T. jang akan dilaksanakan pada keesokan harinja. Pak Soeharto memberikan restunja.

Malam itu djuga segenap anggota A.M.P.T.T. disebar dan dipentjar dengan tugas untuk mentjari dan mengumpulkan sendjata tadjam^a, kenda-

raan² bermotor, sandjata² api dan kebutuhan² lainnja yang akan dipergunakan pada perebutan kekuasaan tanggal 27-9-1945. Taktik dan siasat disusun. Segenap penduduk tua-muda semua organisasi² perjuangang yang berkedudukan ditempat² berdekatan dengan Kantor Pusat P.T.T. dihubungi dan kesemuanya menajatakan kesanggupan mereka untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada A.M.P.T.T. pada saat perebutan kekuasaan yang dimaksud itu.

Pada tanggal 27 September 1945, Mas Soeharto dan Raden Dyar, disertai oleh beberapa anggota A.M.P.T.T. untuk yang paling achir berunding lagi dengan pimpinan Djepang di Pusat P.T.T. Pada waktu perundingan tersebut berdjalan, maka segenap pendjuru gang², pintu² dan djen-dela² yang penting telah didjaga rapih oleh segenap anggota A.M.P.T.T. masing² siap siaga dan waspada dengan instruksi tertentu dari pimpinan A.M.P.T.T.

Pada hari itu djam 07.00 pagi mengalirlah orang² tua-muda, besar-ketjil, pemuda-pemudi segenap pegawai P.T.T. memenuhi lapangan dengan gedung kantor Pusat P.T.T. berdjumlah ratusan ja ribuan orang. Dengan tenang Ketua A.M.P.T.T. Sdr. Soetoko mengawasi dan memperhatikan segala gerak-gerik.

Setelah ada isjarat dari salah seorang anggota A.M.P.T.T. yang berdjaga di djendela atas dekat kamar perundingan, segera Sdr. Soetoko menjuruh dua orang anggota A.M.P.T.T. haik keatas untuk mengambil/mendjemput Pak Soeharto dan Pak Dyar.

Perundingan terachir gagal.

Setibanja Pak Soeharto, Pak Dyar dan beberapa pemuda dibawah, maka didepan segenap pegawai P.T.T. dan rakjat, mulailah dilaksanakan perebutan kekuasaan. Oleh segenap pegawai P.T.T. ditegaskan tidak lagi mengakui pimpinan Djepang, akan tetapi sebaliknja mengangkat Mas Soeharto sebagai Kepala Djawatan P.T.T. Republik Indonesia dan Raden Dyar sebagai wakilnja. Segera mendengung lagu Indonesia Raya dinjanjikan oleh ribuan mulut. Selesai lagu kebangsaan, segera disusul dengan pengibaran Sang Merah Putih diatas gedung Kantor Pusat P.T.T. dan diturunkanlah papan nama Tsuushin Shokyoku.

Semua orang² Djepang kemudian diberitahu, bahwa sendjata dan kenda-raan mobil² mereka dirampas. Perebutan kekuasaan berachir tanpa korban apa². Pada saat itulah riwayat PTT Kolonial berachir dan lahirlah Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon Republik Indonesia.

Peristiwa perebutan pimpinan atas Djawatan P.T.T. dari tangan Djepang, tidaklah hanja terdjadi di Bandung atau di Kantor Pusat P.T.T. sadsja, akan tetapi ditempat-tempat lainpun para pegawai P.T.T. serta para pe-mudanja tidak ketinggalan mentjetuskan semangatnja yang menggelora

ialah hasrat untuk memberikan isi kepada kemerdekaan yang baru diproklamasikan yang berbunyi: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain² diselenggarakan dengan tjara² seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja²”.

Djepang yang merasa tidak dapat memenuhi perintah sekutu berulang kali mentjoba merebut kembali Pusat P.T.T. dari tangan Indonesia. Korban mulai berdjatuhan. Pertempuran² mulai berkobar dalam kota Bandung. Pusat P.T.T. tetap dapat dipertahankan. Setelah tentara sekutu merasa kuat kedudukannja di kota Bandung, maka Kantor Pusat P.T.T. terus-menerus dihudjani peluru² bedil²; tekidanto, mortier dan meriam. Pertempuran terus berkobar. Achirnja sebelah Utara Kota Bandung diduduki tentara Sekutu. Djepang sudah tidak berdjaja lagi. Setelah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka kantor Pusat P.T.T. terpaksa ditinggalkan dalam keadaan tidak dibumihanguskan dengan pertimbangan² siasat dan kebutuhan dikemudian hari.

Dengan dikosongkannja Gedung Pusat P.T.T., maka seluruh Bandung Utara lengkap diduduki sekutu.

Pimpinan Pusat P.T.T. pindah ke Bandung Selatan dekat gedung Kantor Pos Bandung.

Sementara itu Ketua A.M.P.T.T. Sdr. Soetoko mengerahkan pemuda² perdjjuangan dan membentuk pasukan² bersendjata untuk melawan serangan² pihak sekutu yang bertubi-tubi. Ia didjadikan komandan seluruh pasukan² tempur Bandung Selatan.

Sebelah Utara Djalan Kereta Api sepenuhnya diduduki Sekutu dan sebelah selatan dikuasai oleh Republik Indonesia.

Mengingat suasana yang sudah begitu gentingnja, ditambah dengan pertempuran-pertempuran antara kita dan pihak Djepang yang diperkuda oleh tentara sekutu, maka harus tjepat² diambil tindakan untuk mengamankan benda² Negara (P.T.T.); organisasi/personalia yang penting² dan dipindahkan ke-daerah² pedalaman dimana masih belum terdapat tentara sekutu.

Pimpinan P.T.T. djuga terpaksa mengungsi ke Priangan Timur dan mengambil kedudukan di Tasikmalaja, Tjiamis, Bandjar dll. Pun Dinas Telekomunikasi yang mendjadi bagian dari Kantor Pusat PTT setelah keadaan memaksa, ikut pula hidjrah ke sebelah Selatan Kereta Api.

Pada awal bulan Maret 1946 terasa sekali niat pihak Belanda untuk dalam waktu singkat menguasai seluruh Kota Bandung. Oleh sebab itu Dinas Telekomunikasi mengambil tindakan² untuk memindahkan semua aparatur, yang berupa pesawat² pemantjar, pesawat penerima, alat² radio, pokoknja segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat perhubungan, diangkut keluar kota, untuk kemudian setjara ber-angsur² dipindahkan lebih djauh kearah pedalaman.

Barang² dari Stasiun² Radio Malabar, Dajeuhkolot, Rantjaek dari gudang² radio Laboratorium adalah yang pertama diangkut keluar.

Berhubung ultimatum pihak Belanda agar pihak Indonesia mengundurkan diri sed jauh 11 Km ke arah Selatan, maka pihak tentara Indonesia menginstruksikan tanggal 24 Maret 1946 sore kepada Djawatan Pemerintah untuk meninggalkan Kota Bandung karena pada malam harinja semua objek penting dibagian selatan Kota Bandung akan dibumihanguskan. Pada malam hari tanggal 24 Maret 1946 djam 20.00 Bandung mendjadi lautan api. Kantor Telepon Bandung juga dibumihanguskan.

Kemudian alat² Telekomunikasi yang telah diungsikan ke arah Selatan diungsikan pula ke Priangan Timur, Tasikmalaja, dan achirnja ke Djawa-Tengah, Jogja, Solo dan Poerworedjo.

Telekomunikasi tahun 1950.

Lalu-Lintas telegrap dan Telepon menundjukkan tendens ke arah kema-djuan. Beberapa route penting dari djaringan interlokal diperlengkapi dengan pesawat² carrier dengan hasil yang memuaskan. Sungguhpun begitu penambahan itu belum mentjukupi untuk melajani lalu lintas yang ada lebih sesuai dengan ukuran² teknik dan perusahaan pada masa sekarang. Selain dari itu dialami pula gangguan² yang disebabkan oleh pentjurian² kawat dan saluran² telegrap dan telepon diatas tanah. Kehilangan-kehilangan kawat itu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit djumlahnja. Berat kawat tembaga yang hilang telah meningkat sampai ± 43000 kg. Projek teknik yang mendekati penjelesalannja, antara lain,

1. Sentral telepon otomatis di Bandung.
2. Instalasi² modern yang dibuat di Puntjak Gunung Tangkubanprahu yang dinamakan „Straalverbinding”.

Tahun 1952.

Kehilangan kawat pada tahun 1952 agak kurang sedikit, tetapi masih besar, jaitu 37000 kg.

Sentral Telepon otomatis Bandung sedang sibuk dikerdjakan.

Pelaksanaan hubungan draads golf telegrap dan telepon, demikian djuga radio straalverbinding Djakarta — Bandung — Tjirebon berdjalan dengan memuaskan. Bengkel Pusat P.T.T. di Tegallega Bandung telah diperluas.

Tahun 1953.

Untuk mengedjar ketinggalan dalam lapangan telekomunikasi dari Negara² lain, diadakan pembangunan dan pembaharuan alat² seperti:

- a. Dimulainja pemakaian systim teleprinter untuk menggantikan systim morse dalam perhubungan telegrap Djakarta — Bandung — Surabaja, Bandung — Makasar dari Bandung — Medan.

- b. Penggantian sentral telepon lama dengan sentral telepon otomatis diantaranya yang telah selesai sentral otomatis Bandung.
- c. Diadakannya hubungan sinar Radio (Straal verbinding) antara Bandung — Djakarta dan Bandung — Tjirebon.

Selain itu telah diselesaikan juga pembangunan kembali Stasiun Radio di Rantjaek yang dilengkapi oleh alat² modern.

Tahun 1955.

Dalam rangka rentjana 5 tahun telekomunikasi direntjanakan:

1. Pemasangan otomat telex Bandung — Djakarta.
2. Perhubungan printer Tjirebon — Djakarta.
3. Penjelenggaraan hubungan telegraf untuk konperensi A.A.
4. Penjelenggaraan hubungan telepon untuk konperensi A.A.
5. Pemasangan Carrier 1 + 3 antara Tjirebon dan Bandung; dan 1 + 1 antara Tjirebon dan Tegal.
6. Pemasangan Carrier 1 + 3 antara Bandung — Djakarta untuk Konperensi A.A.
7. Pemasangan hubungan sinar 12 + 3 antara Bandung — Djakarta untuk Konperensi A.A.
8. Pemasangan hubungan sinar 12 untuk Konperensi A.A. antara Bandung — Djakarta.

Tahun 1956.

Sehubungan dengan perdjalan P.J.M. Presiden ke Negara Eropah dan Tiongkok dibuka hubungan Telepon radio Bandung — Moscow, khusus untuk pertjakapan Pemerintah. Djam kerdja hubungan telepon radio dengan Tiongkok diperpanjang sedemikian rupa, sehingga senantiasa dapat diadakan perhubungan telepon Radio sepanjang Intel Bandung terbuka, jaitu antara pk. 07.00 — 22.000 waktu Djawa.

Guna keperluan anggaute² Konstituante yang sedang bersidang di Bandung, sentral telepon di Bandung diperluas dengan 500 nomor.

Tahun 1957.

Akibat peraturan BE dalam bulan Djanuari 1957 maka didjumpai kesulitan-kesulitan mengenai kebutuhan akan alat² baru sehingga banyak alat² yang harus disuruh dibuat di Bengkel Pusat di Bandung.

Dalam tahun 1957 telah selesai dimulai pemasangan saluran distrik Rangkasbitung Malingping, Pandeglang — Labuhan, Serang — Tjirebon.

Perhubungan Telepon radio internasional dibuka antara:

1. Bandung — Macao transito Hongkong.
2. Bandung — Bern.
3. Bandung — Hongaria, Austria transito Bern.

Berkenaan dengan kunjungan Presiden Rusia ke Indonesia telah diadakan hubungan telepon radio langsung antara Bandung — Moskow dari tanggal 25 April 1957 s/d Mei 1957.

Sehubungan dengan kunjungan tamu agung itu pula telah dibuka perhubungan telepon printer antara Djakarta — Sindanglaja dari tanggal 8 s/d 10 Mei 1957.

Selama Konperensi I.P.F.C. (International Pasific Fishery Council) jang dilangsungkan dari tanggal 13 s/d 29 Mei 1957 di Bandung telah diadakan hubungan point-to point on telex antara kantor Telegrap Bandung dan Gedung Konperensi Djl. Raya Timur 246 Bandung.

Dalam tahun 1957 telah dibuka sentral otomatis pembantu Tjitjadas Bandung.

Tahun 1958.

Kerugian akibat kehilangan^a kawat telegrap/telepon berdjumlah Rp. 473.608,81.

Dalam tahun 1958 telah selesai pemasangan baru saluran^a distrik Rangkasbitung — Malingping, — Serang — Tjilegon, Pandeglang — Labuhan, Djasinga — Rangkasbitung, Pagadenbaru — Pamanukan.

Atas permintaan Singapore djam kerdja perhubungan Bandung — Singapore diperpanjang dari djam 07,30 — 10,50 wd. dan 14.00 — 15.00 wd. mendjadi 07.30 — 15.30 wd.

Dalam mengimbangi kemadjuan teknik, pembangunan dan pembaharuan alat^a oleh berbagai Sub — Bagian telah/sedang diselenggarakan pekerjaan sebagai berikut:

Telegrap.

1. Persiapan pemasangan transistor V.F.T. Ericson ZGE — 130 antara Bandung — Djakarta dan Bandung — Tjirebon.
2. Dalam rangka Siemens „Long Distance” telah dipersiapkan pemasangan sisa 12 channel dari WTS — 24 jang masih kurang antara Djakarta — Bandung.
3. Penjelesaian pemasangan pesawat^a gelombang pembawa/Sinar:
 - a. Hubungan telegrap-carrier WTS 24 Siemens & Halske antara Bandung — Djakarta (12 saluran — Channel).
 - b. Hubungan telegrap carrier ZGE 130 Ericson antara Bandung — Djakarta dan Bandung — Tjirebon.
 - c. Penambahan 12 Channel dari PFM — 24/300 Siemens & Halske antara Bandung — Djakarta.
 - d. Penjelesaian 2 channel HFR dari standard Federal antara Bandung — Djakarta.

4. Pemasangan alat² tenaga listrik oleh Laboratoria P.T.T. pada Kantor Télégrap/Telepon di Bandung.

Telepon.

1. Memperbesar kapasitas kantor telepon Tjirebon, Subang, Tjikampek dan Rengasdengklok masing² mendjadi 1220 nomor, 100 nomor, 80 nomor dan 50 nomor.
2. Penggeseran tiap² besi route interlokal ditanah D.K.A. antara Bogor km 04 — Djatinegara km 01.
3. Penambahan dengan 1 kawat sehingga mendjadi 8 kawat pada perhubungan interlokal Bogor — Djakarta.
4. Pemindahan perhubungan interlokal Telex (Tw. 39) Bandung — Djakarta ke WTS. 24 dengan mempergunakan 4 channel.
5. Penjelesaian pemasangan pesawat² gelombang pembawa/Sinar:
 - a. Hubungan Z12F Siemens & Halske antara Tjirebon — Djakarta, Tjirebon — Semarang.
 - b. Hubungan Z 3 F Siemens & Halske antara Tjirebon — Semarang.
 - c. Hubungan darurat gelombang pembawa 12 channel dengan FTR 31000 Philips antara Bandung — Djakarta.

Radio:

1. Pemasangan 5 buah aparatur „Closed Cooling Systim” jang memakai air distilata distasiun Pemantjar Dajeuhkolot Bandung, alat² mana telah dipesan dari Brown Boverie.

Telekomunikasi

Tahun 1959.

Dalam tahun 1959 telah dibuka perhubungan telepon radio Bandung — Makasar. Perhubungan ini dimaksudkan untuk menambah kemungkinan² berbitjara antara Djawa dan Sulawesi Selatan dan terutama untuk menampung kebutuhan publik diluar Djakarta. Sebelum itu perhubungan antar kedua daerah itu dilaksanakan melalui perhubungan telepon radio Djakarta — Makasar.

Pula telah dibuka perhubungan telepon radio dengan Republik Demokrasi Vietnam melalui perhubungan Bandung — Shanghai (mulai 2-5 1959); dengan Libanon melalui perhubungan Bandung — Bern (mulai 25-5-1959) dan dengan Rusia melalui perhubungan Bandung — Shanghai mulai 1-7-1959).

Untuk keperluan rombongan Presiden Republik Demokrasi Vietnam selama kunjungannya ke Indonesia begitu pula untuk keperluan rombongan Presiden R.I. selama kunjungan muhibahnja telah diadakan

perhubungan² telepon radio istimewa/ sementara antara negeri asal dengan negara² jang dikundjungi, baik setjara langsung maupun transito.

Dalam tahun 1959 telah dibuat perentjanaaan penempatan alat telegraf dengan selfcorrection unit untuk printer (Mux-ECA) digedung Sentral Telegraf Bandung guna perhubungan telegraf radio ke Manilla dan Osaka.

Tahun 1960.

Seperti dalam tahun 1959 perhubungan telegraf masih belum berdjalan lantjar disebabkan ber-matjam² kesulitan antara lain pesawat rusak, kawat rusak/hilang, kekurangan bensin untuk agregaat, gangguan keamanan dll. sehingga banjak telegraf² jang terpaksa harus diteruskan dengan pos (udara).

Dalam usaha mengimbangi kemadjuan teknik, pembangunan dan pembaharuan alat² oleh berbagai bagian telah/sedang diselenggarakan pekerjaan² sebagai berikut:

Telepon.

1. Perentjanaaan pembangunan gedung Kantor telepon otomat Tjirebon 3000 nomor.

Radio.

1. Pembagian saluran liwat stasiun Sinar Tangkubanprahu antara Bandung — Djakarta (17); Bandung — Tjirebon (6); Djakarta — Tjirebon (6); diantaranya 2 diteruskan ke Semarang (tanggal 25-8-1960) selesai.
2. Pertjobaan hubungan sinar radio Puntjak — Djakarta (3 channel) tanggal 12-6-1960 selesai.
3. Persiapan dan pelaksanaan pembuatan djalan ke Puntjak Sumbul dalam rangka hubungan Sinar Radio Bandung — Puntjak — Bogor Djakarta (12-6/1960 selesai).
4. Persiapan pembangunan stasiun Radio Sinar di Anjer Kidul dan Bukit Bunut dalam rangka hubungan Sinar Radio Djawa — Sumatra.

Tahun 1961.

Kerugian akibat kehilangan kawat telepon lokal dan distrik dalam tahun 1961 berdjumlah Rp. 117.000,— dan kawat telegraf/interlokal berdjumlah Rp. 675.000,— Djumlah kerugian seluruhnja disebabkan kehilangan itu adalah sebesar Rp. 792.000,— jang $\pm 4 \times$ lipat dari kerugian tahun 1960.

Dalam tahun 1961 telah dibuka perhubungan transito melalui perhubungan Bandung — Tokyo dengan Birma dan Kambodja.

Pekerjaan pembangunan dalam tahun 1961 jang selesai/mendekati penyelesaian:

1. 1 hubungan V.H.F. dengan perobahan system dropping Bandung — Tangkubanperahu Djakarta — Tjirebon.
2. 1 hubungan radio sinar Bandung — Tangkubanperahu — Djakarta dengan 60 channel.
3. 1 stasiun radio sinar di Anjerkidul Gedung² 90% selesai.
4. 1 stasiun relay radio sinar di Bukit Sumbul, djalan 90% selesai.

Tahun 1962.

Dalam pelaksanaan pembangunan lebih dari pada tahun jang lalu didjumpai kesulitan² disebabkan kekurangan² dana jang tersedia, perlengkapan², membumbung tingginya harga barang², meningkatnja biaya² pengangkutan dan lain sebagainya.

Tahun 1963.

Dalam tahun 1963 Dinas Telegrap Bandung dipindahkan dari Dinas Pos ke Dinas Telekomunikasi.

Pembangunan jang telah selesai/sedang dikerdjakan:

1. Bulan Djuni 1963 penggantian instalasi Kantor Telepon Tjabang Madjalaja dari L.B. mendjadi C.B. dan kapasitasnja ditambah mendjadi 600 nomor.
Peresmian pembukaan dilakukan pada bulan itu djuga.
2. Dimulai pembangunan gedung Kantor Telepon Tasikmalaja dan direntjanakan untuk mengganti instalasi dari L.B. mendjadi C.B. dan kapasitasnja diperbesar mendjadi 900 nomor.
Pemasangan kabel² tanah untuk mengganti saluran atas tanah mulai dikerdjakan.

Telah direvisi pesawat gelombang pembawa I.T.I. 1 + 3 hubungan Bandung — Tjirebon.

Dalam bidang telepon radio dengan dipulihkannya hubungan dengan negeri Belanda telah dibuka kembali:

1. Hubungan telepon radio Bandung — Amsterdam transito Bern.
2. Hubungan langsung Bandung — Amsterdam akan diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan demikian lalu lintas dengan Eropah disalurkan melalui 2 perhubungan langsung, ialah Bandung — Bern dan Bandung — Amsterdam.
3. Mendjelang penjerahan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia daerah Irian Barat diikut sertakan dalam lalu lintas telepon antar negara melalui Bandung.

4. Dipasang Twentyfour — channel systim type Mitsubisi:
Bandung — Rantjaeck.
Bandung — Dajeuhkolot.
guna saluran modulasi dari intel ke stasiun pemantjar/penerima Dajeuhkolot dan Rantjaeck.

Tahun 1964.

Dalam rangka aksi meningkatkan service telah diadakan pilot project di P. Djawa antara Kantor² telegrap Djakarta — Bandung — Jogjakarta — Surabaya dan bila kehilangan kawat tidak terdjadi, maka kemadjuan dari hasil pilot project tersebut akan terasa.

Guna usaha mengimbangi kemadjuan teknik pembangunan dan pembaharuan alat² telah/sedang dikerdjakan:

1. Pembuatan Gedung Kantor Telepon Tasikmalaja dan pemasangan instalasi telepon baru C.B. telah selesai dan diresmikan bulan Djuni 1964.
2. Pembuatan Gedung Kantor Telepon Tjabang Losari dan pemasangan instalasi Kantor selesai dan diresmikan tanggal 3-10-1964.
3. Penambahan saluran modulasi antara Intel Bandung — Stasiun Pemantjar Dajeuhkolot dan Stasiun penerima Rantjaeck dengan masing² 24 channel.

Demikianlah kegiatan² P.N. Postel bidang Telekomunikasi di daerah Djawa-Barat dan harapan kemudian dalam rentjana pembangunan P.N. Postel bidang Telekomunikasi di Djawa-Barat ini dalam djangka waktu 8 tahun mendatang meliputi:

1. modernisasi/otomatisasi telepon
2. pelipat gandaan saluran/saluran interlokal
3. konsolidasi, modernisasi dan expansion hubungan telegrap.

Modernisasi telepon pada umumnja disamping perluasan dititik beratkan kepada pengubahan systim dari:

Batre local ke Batere Central.

Kantor² telepon jang akan segera mengalami modernisasi/perluasan:

1. Garut dari 400 L.B. mendjadi 640 C.B. (tahun 1965 selesai)
2. Purwakarta 400 L.B. mendjadi 640 C.B.
3. Tjiandjur dari 400 L.B. „ 800 C.B.
4. Bandjarsari 100 C.B.

Kantor Telepon jang akan didjadikan Sentral otomat:

1. Bandung Centrum 6000 nomor (penggantian) 1966
2. Bogor 3000 nomor 1967
3. Tjirebon 4000 nomor 1967
4. Sukabumi 1200 nomor
5. Tjimahi 1000 nomor 1966

Pelipat gandaan saluran-saluran dengan pelaksanaan projek Microwave dengan fasilitas:

1. Telepon
2. Telegraf
3. Fascimili
4. T.V. program transmission

Projek ini meliputi route Djakarta — Denpasar melalui tempat² terpenting di Djawa seperti Djakarta — Bandung Semarang dst.

Dengan tersedianja tjukup saluran, maka pada otomatisasi telepon Bandung akan segera dimulai pula dengan otomatisasi hubungan Interlokal Bandung — Djakarta dengan sistim „Subscreberdialing”. Dengan begitu hubungan interlokal Bandung — Sukabumi; Sukabumi — Bogor — Djakarta djuga akan mengalami perbaikan.

Konsolidasi, modernisasi dan Expansion telegraf akan dilaksanakan dengan:

1. Pembangunan sentral telegraf Bandung di Djl. Lembang, dengan membongkar dan membangun baru sajak kanan gedung Kantor Telepon Bandung.
Dalam gedung tersebut akan diinstalir semua instalasi telegraf.
2. Perluasan hubungan telegraf ke Luar negeri dengan pelaksanaan Internasional Telex.
3. Penjempurnaan hubungan telex jang sekarang dengan penggunaan saluran telegraf melalui „Microwave”.

Sektor Pariwisata.

Dalam pandangan umum ekonomi telah dikemukakan, bahwa Djawa Barat sebagian besar terdiri dari gunung² jang pemandangannya sangat indah. Baik pegunungan Parahiangan, jang oleh orang asing dinamakan „the Abode of the Gods”, maupun pantai Samudera Indonesia jang berjiku² merupakan atraksi jang sangat mengesankan bagi setiap wisatawan lang mengundjungi Djawa Barat. Sedjak mulai Bogor dengan „Kebun Rayanja” jang termashur diseluruh dunia, perdjalanen ke Bandung „the Paris of Indonesia” melalui djalan raya Puntjak dengan kebun tehnya jang pemandangannya sangat indah, merupakan kenangan jang sukar terlupakan.

Memang Daerah Djawa Barat terutama Daerah Priangan sedjak sebelum perang merupakan objek tourisme jang bertingkat internasional. Waktu itu di Garut terdapat hotel² seperti Hotel Papandayan, Hotel Ngamplang, Hotel Tjisurupan dll. jang telah mempunyai riputasi internasional. Sekarang hotel² tersebut telah dibumi-hanguskan dalam revolusi.

Dewasa ini hotel² taraf internasional jang masih ada di Bandung, jaitu Hotel Savoy Homan, Hotel Preanger dll: jang selalu digunakan da-

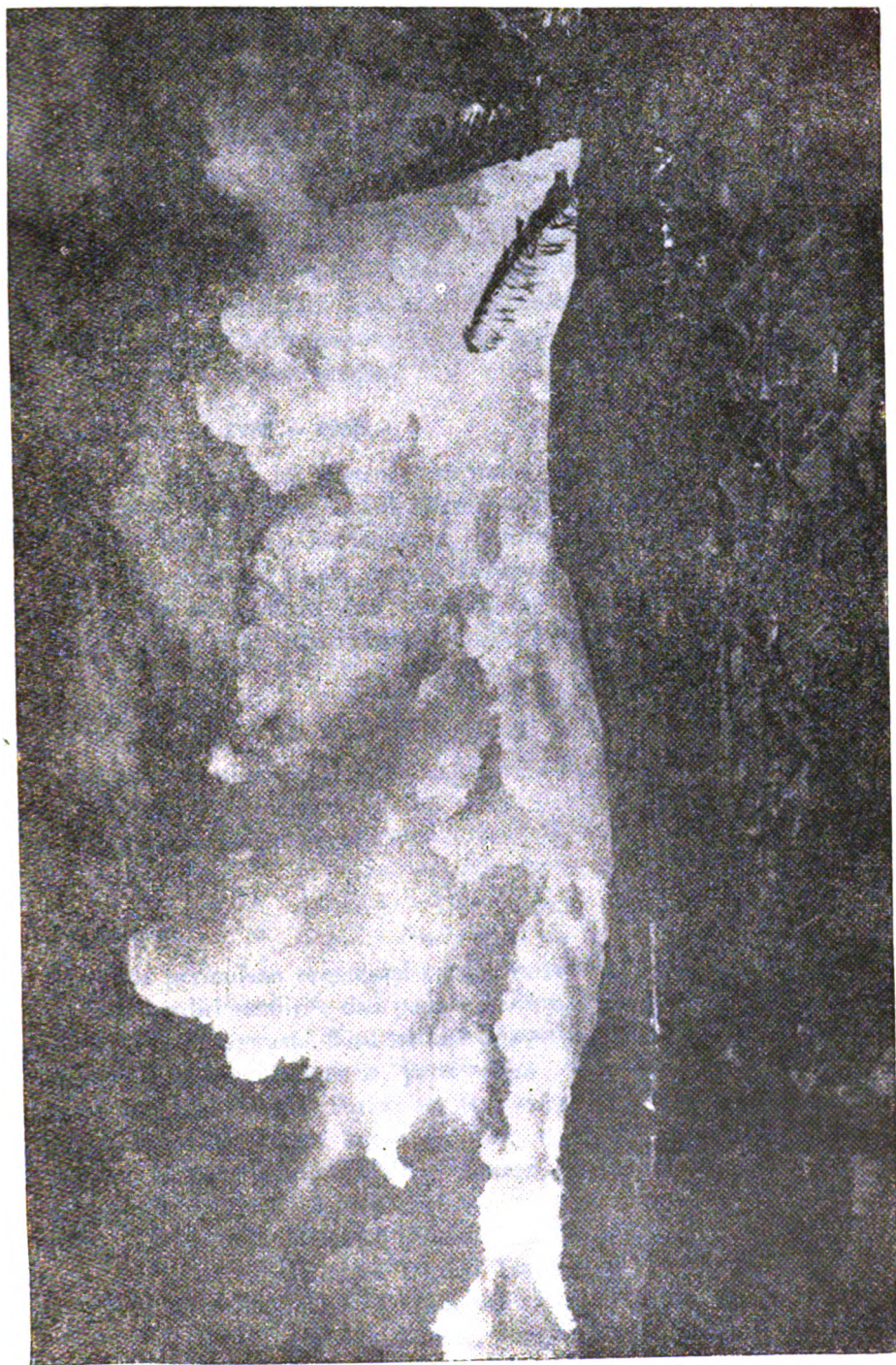


Foto P.a.f.

Pemandangan Indah di Parahiangan.

lam konperensi² internasional seperti K.A.A. I, I.P.F.C., ECAFE., K.I.A.A. dan sebagainya. Untuk mendapatkan sekedar gambaran dari perkembangan tourisme di Djawa Barat, uraian selanjutnja akan berkisar pada periode tahun 1945 s/d 1949 dan periode tahun 1950 s/d 1965.

Periode revolusi phisik 1945 — 1950.

Praktis semua kegiatan kepariwisataan jang besar tidak ada, karena seluruh potensi pada umumnja ditjurahkan perhatiannja kepada revolusi phisik tersebut tadi. Paling djuga ada kegiatan² kepariwisataan dalam bentuk kelompok² ketjil di-daerah² jang lingkungannja sangat terbatas sekali. Objek² pariwisata dan akomodasipun kebanyakan dipakai untuk kepentingan jang lebih penting bagi revolusi phisik itu dari pada dipergunakan untuk kepariwisataan.

Periode tahun 1950 — 1965.

Dalam periode ini dimana kita mulai dapat mentjurahkan perhatian terhadap kepariwisataan, untuk daerah Djawa Barat ini masih ada faktor lain jang mengurangi kegiatan ini, jaitu masih adanja masa pemulihan keamanan, sehingga segala matjam kegiatan kepariwisataan djadi terhenti.

Setjara keseluruhan dan untuk lebih mudah mendapat gambaran mengenai kegiatan² kepariwisataan ini, kita bagi pokok² pikirannja dalam bidang²:

1. Organisasi.
2. Akomodasi.
3. Tour operation field.
4. Pariwisata luar negeri.
5. Pariwisata dalam negeri.
6. Pendidikan.

Organisasi.

Pada permulaan organisasi kepariwisataan itu tidak ada kooordinasi-nja dan berdiri sendiri²; dan pada umumnja berbentuk badan² jang didirikan oleh pihak swasta. Baru sesudah ada pembentukan apa jang dinamakan Dewan Tourisme Indonesia, pada tahun 1957, jang kemudian berubah nama mendjadi Dewan Pariwisata Indonesia, di Djawa Barat pun dibentuk Dewan Pariwisata Indonesia Daerah Djawa Barat. Dan didaerah Tingkat II-nja dibentuk DEPARI Daerah. Daerah² jang sampai sekarang mempunyai DEPARI daerah adalah:

- DEPARI Daerah Tingkat II Serang.
- DEPARI Daerah Tingkat II Sukabumi.
- DEPARI Daerah Tingkat II Tjiamis.
- DEPARI Daerah Tingkat II Bandung.

Organisasi² lain disamping DEPARI jang bergerak didalam bidang kepariwisataan ialah:

Jajasan Tourisme Bogor didaerah tingkat II Bogor.
Jajasan Bandung Permai didaerah Tk. II Kopra Bdg.
Jajasan Pangandaran di Tjiamis.

Ada pula organisasi² lain jang bergerak dalam kepariwisataan jang bentuknja merupakan travel²-bureau atau travel²-agent, ataupun badan² jang bergerak mengadakan tour² pariwisata dalam daerah Djawa Barat, baik untuk umum ataupun untuk para pelajar/mahasiswa; kebanyakan dari pada badan² (organisasi) ini adalah badan swasta.

Jang perlu diperhatikan adalah travel bureau NITOUR jang mulai mengadakan usahanja di Bandung pada 1 Djuni 1961, dan jang pada 1 Djuni 1963 telah mengadakan suatu joint enterprise dengan pemerintah Daerah Djawa Barat.

A k o m o d a s i .

Banyak bangunan² jang berupa hotel ataupun restaurant jang dahulu sebelum perang baik sekali untuk kepariwisataan, hantjur pada zaman revolusi phisik.

Didaerah, di Ibu Kota daerah tingkat II ataupun di-tempat² objek pariwisata pada dewasa ini belum didapat hotel² atau restaurant pariwisata. Kegiatan pariwisata dalam bidang akomodasi ini jang telah diwujudkan, adalah menjadikannja 5 buah hotel di Bandung djadi hotel pariwisata semendjak diselenggarakannja konperensi PATA. Dan diubahnja hotel² tersebut menjadi hotel dan restaurant.

Hotel² ini adalah:

1. Hotel Savoy Homann dengan kapasitas kamar 152.
2. Hotel Preanger dengan kapasitas kamar 91.
3. Hotel Istana dengan kapasitas kamar 30.
4. Hotel Kumala dengan kapasitas kamar 46.
5. Hotel Panghegar dengan kapasitas kamar 50.

Suatu harapan baru bagi dunia kepariwisataan Indonesia di Djawa Barat ini ialah dengan akan dibukannja Samudera Beach Hotel di Pelabuhan-Ratu pada achir tahun 1965, jang tarafnja merupakan hotel pariwisata Internasional.

Tour Operation Field.

a. *Objek² Pariwisata.*

Diantara sekian banjakknja objek² pariwisata di Djawa Barat, jang telah dihidupkan kegiatannja, ialah:

Dt. II Serang : Daerah pesisir Suralaja (Florida), Peninggalan² sedjarah didaerah Banten dan Serang.

Kedua objek ini masih bertaraf pariwisata regional.

Dt. II Kopra Bogor : Kebun Raya, jang telah bersifat nasional/ Internasional.

Dt. II Sukabumi : Situ Lido jang bertaraf regional. Pesisir pantai selatan Pelabuhan Ratu jang dengan dibangunja Samudera Beach Hotel akan mendjadi objek pariwisata International.

Dt. II Tjiandjur : Dengan Daerah² peristirahatan jang sudah terkenal dari dahulu didaerah Puntjak, Tjipanas, Tjipajung, jang kebanyakan berupa bungalow² sadja.

Dt. II Bandung : Dalam daerah tingkat II ini terdapat objek² pariwisata jang sudah betul² maju jang dapat mendjadi kebanggaan daerah Djawa Barat, Tangkuban Perahu telah mempunyai taraf internasional. Kawah ini adalah satu²-nja kawah di Indonesia, mungkin pula diseluruh dunia jang mudah ditjapai dengan mobil. Sampai sekarang dipelihara dan dibangun oleh Jajasan Bandung Permai, ber-sama² dengan pemerintah Dt. II Bandung.

Objek tersebut sampai sekarang masih belum ada pemeliharaan jang memuaskan. Restoran jang ada sekarang masih bersifat sementara dan keadaan sekitarnja masih belum dibangun. Sambil menudju ke kawah tadi kita masih dapat mengundjungi objek pariwisata lainnja, jaitu pemandian air panas Maribaja dan peneropong bintang di Lembang jang telah mendjadi proyek nasional. Daerah Bandung Selatan, seperti Telaga Patengan di Tjiwidej, Situ Tjileuntja di Pengalengan, kawah Papan-dajan dan aneka matjam tanaman perkebunan, sebetulnja dahulu telah merupakan suatu objek pariwisata jang baik sekali. Gagasan dari Bapak Gubernur Djawa Barat, untuk mendjadikan objek ini mendjadi show window dari Djawa Barat,

jang merupakan pariwisata nasional adalah tepat sekali. Dan sekarang untuk lebih mengenal objek ini, NITOUR Bandung telah merintisnja mengadakan tour² melalui route² tersebut, meskipun keadaan djalannja masih djauh dari memuaskan.

Dt. II Kopra Bandung : Terutama mendjadi pusat akomodasi bagi wisatawan. Objek pariwisata jang bertaraf nasional jang didapat di Kota Bandung ialah musium Geologi. Dan djuga terdapat banjak tempat untuk entertainment.

Dt. II Subang : Pemandian air panas Tjiater, sifatnja masih pariwisata regional. Objek ini masih asli, belum dibangun lebih landjut. Sebetulnja akan mendjadi objek jang baik karena letak jang dekat ke Bandung dan hawanja sedjuk, kandungan air panasnja baik untuk pengobatan alam. Bendungan serba guna Djatiluhur, dengan adanja bendungan ini bertambah kajalah objek pariwisata di Djawa Barat ini, dan projek ini akan dibangun mendjadi pariwisata nasional, dimana akan terdapat tempat peristirahatan dan ber-matjam² olah raga air.

Dt. II Garut : Pesisir selatan Tjilauteureun. Pemandian air panas Tarogong, air terdjun Tjitiis dan Situ Bagendit. Semuanja ini masih merupakan pariwisata regional. Jang menarik perhatian adalah adanja kegiatan pengusaha swasta jang mau mengexploteer objek² pariwisata di Dt. II Garut ini, jang terasa memberikan kemadjuan kepada bidang kepariwisataaan.

Dt. II Tasikmalaja : Home industry, keradjinan tangan.

Dt. II Tjiamis : Daerah pesisir Pangandaran dan Situ Pandjalu jang sifatnja regional. Objek Pangandaran setelah pulihnja keamanan di Djawa Barat ini makin ramai dikundjungi, kelemahannja kekurangan akomodasi dan masih kurang baiknja djalan untuk menudju daerah itu.

- Dt. II Tjirebon : Tempat Beribadat di Gunung Djati.
- Dt. II Kuningan : Tempat pemandian Tigugur, Tjibulan dan pemandian air panas Sangkan Urip, semuanya bersifat regional. Jajasan Linggar-djati mempunyai maksud untuk membuka objek² pariwisata didaerah ini.
- Dt. II Pandeglang : Hutan Margasatwa Udjungkulon (Badak Djawa).

b. *Transport Pariwisata.*

Dalam melaksanakan dan melantjarkan aktivitas ini NITOUR Bandung telah melakukan kerdja sama yang baik dengan DAMRI., P.N.K.A. PN. GARUDA dan instansi² lainnja, yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Untuk turut membantu kelantjaran perhubungan, NITOUR Bandung telah menjelenggarakan intercity pada tahun 1963 dan yang akan dirintis lagi pada tahun 1965 ini. Semendjak tahun 1964, dengan P.N.K.A. telah ditjapai kerdja sama untuk turut membantu memperlantjar pendjualan ticket K.A.

c. *Kesenian/Hiburan/Entertainment.*

Entertainment centre dipergunakan untuk relaxasi dalam mengisi kesibukan/kekosongan dari atjara wisatawan².

Di Djawa Barat banjak sekali hasil² karya seni daerah yang dapat ditondjolkkan tapi kesukarannya adalah belum adanja tempat gedung kesenian yang baik, yang dapat memberikan pertundjukan³ dengan atjara² yang tetap, agar tidak mendjadikan kesukaran untuk mengadajak wisatawan² itu menikmati kesenian kita.

Di Bandung pada dewasa ini baru ada gedung kesenian Dwikora yang kegunaannya dirasakan tjukup membantu untuk kemadjuan kita itu, meskipun gedungnja sendiri belum betul² representatif.

Suatu hal yang baik telah dilaksanakan oleh NITOUR Bandung adalah mengadakan pertukaran kesenian dengan daerah² lain atau mendatangkan kesenian Luar Negeri yang baik.

Pariwisata Luar Negeri.

Jang dimaksudkan adalah pariwisata orang Indonesia ke Luar Negeri, dan wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

a. *Pariwisata orang Indonesia ke Luar Negeri.*

Terutama tour yang diselenggarakan oleh Nitour yang diadakan berhubung dengan kegiatan² Indonesia di Luar Negeri, misalnja sebagai

supporter Thomas Cup, New York World's Fair, ataupun tour² lainnja kenegara sahabat seperti Peking Tour, Japanese Autum Tour, European Golden Tour dsb., jang kesemuanja ini diselenggarakan oleh NITOUR pusat dengan kerdja sama NITOUR Bandung. Hal lain jang perlu dikemukakan adalah pelajanan dari pada NITOUR terhadap djemaah hadji di kapal, jang telah dirintis mulai tahun 1963.

b. *Wisatawan Asing jang ke Indonesia.*

Kegiatannja meningkat setelah pulihnja keadaan keamanan di daerah Djawa Barat ini. Djawa Barat dengan segala matjam keindahan alamnja merupakan daja penarik jang kuat bagi wisatawan² Asing.

Sebagian besar dari wisatawan² Asing ini datang di Bandung dengan melalui saluran distribusi wisatawan NITOUR. Djadi sebelumnya Nitour membuka tjabang di Bandung, sukar untuk dapat mengumpulkan data² mengenai djumlah dari wisatawan² Asing itu.

Djumlah jang dapat diberikan oleh NITOUR sebagai berikut:

Tahun 1962 sebanyak 708 wisatawan.

Tahun 1963 sebanyak 620 wisatawan.

Tahun 1964 sebanyak 510 wisatawan.

Kegiatan lainnja adalah dengan didjadikannja Bandung Kota tempat konperensi-konperensi International, jang biasanja diteruskan dengan post conference tour.

Suatu konperensi International jang pernah diadakan di Bandung jang penting buat dunia kepariwisataan adalah diselenggarakannja konperensi PATA pada bulan Maret 1963.

Hal lainnja jang menjebabkan banjak wisatawan Asing mengundjungi Djawa Barat ini jaitu kegiatan lainnja jang bersifat nasional atau kenegaraan, a.l. rombongan tamu Agung, Duta² olah raga, Duta² kesenian dan sebagainya.

Pariwisata Dalam Negeri.

Sebelum pulihnja keamanan di Djawa Barat kegiatan dalam bidang ini kurang dan keaktifannja sangat terbatas sekali. Setelah pulihnja keamanan kegiatan ini berkembang dengan pesat.

Dalam rangka membangkitkan tour minded dikalangan masjarakat Indonesia umumnja dan masjarakat Djawa Barat chususnja, pula untuk memberikan pengertian bahwa pariwisata itu bukan suatu kemewahan jang hanja dinikmati oleh segolongan orang sadja, tapi merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan setiap orang, NITOUR Bandung semendjak didirikannja mengadakan trip² mingguan jang kontinue ke objek-objek pariwisata di Djawa Barat ataupun daerah lainnja di Indonesia.

Perlu pula disinggung suatu kegiatan yang dirintis oleh para mahasiswa/peladjar yang bertudjuan semata-mata untuk tudjuan menanamkan prinsip diatas tadi itu, yang perlu disebutkan adalah:

I. S. C. T. (Indonesian Students Council for Tourism) yang telah didirikan sedjak tahun 1959.

Dan kegiatan yang diasuh oleh DEPARI Djawa Barat jaitu Social Tour, yang biasanja bekerdja selama masa libur.

Tahun 1964 memberangkatkan 300 peserta.

Tahun 1965 memberangkatkan 450 peserta.

Suatu objek baru dalam bidang kepariwisataan di Indonesia, yang dimulai pada bulan Djuli 1965 adalah pariwisata udara.

Hal ini terbentuk atas kerdja sama NITOUR Bandung dengan LAPIP, dengan tudjuan untuk memberi kepertajaan atas produksi dalam negeri sendiri dalam bidang industri pesawat terbang, untuk menambah air minded dan pula untuk makin memperkaja perbendaharaan kepariwisataan, dengan tambahnja djenis kepariwisataan yang baru.

Pendidikan.

Di Bandung terdapat pendidikan-pendidikan yang bergerak dibidang kepariwisataan ialah:

1. Akademi Perhotelan Nasional yang dahulu bernama Akademi Perhotelan dan Perestoranan.
2. Sekolah kedjuruan Perhotelan dan Perestoranan.
Keduanja didirikan oleh Departemen Perhubungan Darat, Postel dan Pariwisata.
3. Akademi Industri Pariwisata (AKTRIPA) yang didirikan pada tahun 1962, dan Akademi Bahasa Asing (ABA) yang didirikan tahun 1963, keduanja dibawah bimbingan DEPARI daerah Djawa Barat.
4. Pendidikan Crash Program yang diadakan untuk membentuk karyawan di Samudera Beach Hotel Pelabuhan Ratu yang telah diadakan sedjak bulan Mei 1965 dan yang akan berachir pada bulan September 1965.

Sektor Distribusi dan Perdagangan.

1. Sektor kegiatan dalam lapangan distribusi/perdagangan didaerah Djawa Barat selama 20 tahun ini telah banjak djuga memperlihatkan kemadjuan² yang tjukup membesarkan hati.
Gambaran dari perkembangan² tersebut dapat dilihat dari data² sebagai berikut:

a). *Periode Revolusi fisik tahun (1945 — 1950).*

Dalam periode ini semua kekuatan Nasional sedang dipusatkan guna memenangkan Revolusi fisik tersebut.

b). *Periode „Survival” (tahun 1950 — 1955).*

Setelah ada pengakuan Kedaulatan atas Republik Indonesia, maka mulailah diadakan pengaturan dalam sistim distribusi/perdagangan untuk mewujudkan suatu Perekonomian Nasional. Dalam pase ini kegiatan terutama ditujukan untuk mengusahakan agar perlengkapan barang² jang dibutuhkan untuk penghidupan Rakjat dan Pembangunan baik jang diimpor dari luar negeri maupun jang dihasilkan didalam negeri dapat dipenuhi serta dapat merata dalam masjarakat.

Disamping itu diusahakan pula agar Bangsa Indonesia dapat memperoleh kedudukan jang penting dalam lapangan perdagangan, pengangkutan antar-pulau, perkreditan dsb.;

Untuk ini maka diaturlah suatu sistim penjaluran barang², antara lain dalam menjalurkan barang² import telah dilakukan pembagian sbb.:

- dibentuk suatu „*importir Benteng*” tugasnja untuk mengimpor barang² esensiil dalam perekonomian ketjuali beras. (Untuk mendatangkan barang² esensiil ini hanja bisa dijalankan oleh importir benteng tersebut sadja jang djumlahnja pada waktu itu untuk seluruh Djawa Barat $\pm$ 12 perusahaan).
- Disamping itu ada „*Impotrir Umum*” (ada 40 perusahaan) tugasnja untuk mendatangkan barang² untuk keperluan umum ketjuali jang esensiil tersebut diatas, misalnja; onderdil² mesin², sepeda motor dsb.
- dan selandjutnja ada djuga „*Middenstand Importir*”, (20 perusahaan) jang khusus mengimpor barang lux dan obat²-an jang telah disetudjui oleh Kementerian Keschatan.

c). *Periode „Investment” dan selandjutnja (tahun 1955 — sampai sekarang).*

Sedjak tahun 1955 ini maka pengaturan² dalam bidang distribusi/perdagangan makin mendjadi tegas sesuai dengan tuntutan² Revolusi. Didalam memuntjaknja konfrontasi kita terhadap kolonialis Belanda atas Irian Barat, telah diambil tindakan tegas jaitu dengan menasionalisir perusahaan² dagang Belanda, jang ada di Indonesia, jang terkenal dengan „Big Five” itu. Dan sedjak ini maka makin kuat dan makin madjulah kekuatan kita dalam bidang perdagangan.

2. Adapun pengaturan dalam bidang aparatur distribusi/perdagangan pada pokoknja dimulai sedjak tahun 1957 dimana setelah dibentuknja suatu Departemen tersendiri jaitu Departemen Perdagangan.

Indonesianisasi dalam lapangan Perdagangan.

- a. Kemadjuan² jang telah ditjapai dalam hal pengaturan dalam bidang perdagangan/distribusi ini terutama ialah mengenai penertiban dan perbaikan dari pada alat²/aparat distribusi tersebut. Oleh karena lantjar tidaknja suatu penjaluran barang sedikit banjak sangat tergantung dari ketertiban dari pada alat penjalurannja. Maka suatu penertiban pada alat penjalur tersebut dapat diharapkan adanja kelantjaran dalam penjaluran barang²-nja.
- b. Sebagai landasan jang dipakai untuk mengadakan penertiban dan mengatur aparat² distribusi/perdagangan² ialah:
 - (1). Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934;
 - (2). Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957;
 - (3). Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/Perind
No. 2430/M/Perdag tanggal 3 September 1957;
 - (4). Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/M tgl. 8 Djanuari 1959;
- c. Sebagai phase pertama dengan berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Perindustrian/Menteri Perdagangan tersebut diatas, telah diusahakan adanja „keadaan status quo” terhadap perusahaan² dagang asing. Status quo mana diperlukan untuk mempertjepat proses Indonesianisasi dalam lapangan perdagangan disamping memberikan bimbingan, penerangan dan fasilitas² lainnja pada perusahaan² perdagangan Nasional.
Keadaan status quo tersebut adalah sebagai berikut:
 - (1). Perusahaan² perdagangan Asing jang sudah ada pada tanggal 3 September 1957 dapat berdjalan terus sampai pada waktu dikeluarkannja peraturan² mengenai peridzinan;
 - (2). Idzin untuk mendirikan perusahaan² perdagangan Asing, memperluas, memindahkan hak dari perusahaan tersebut pada hakekatnja tidak diperkenankan.
- d. Dalam phase kedua jaitu pada tahun 1958 perusahaan² Asing tersebut diatas selandjutnja untuk mendjalankan perusahaannja *diharuskan* mempunjai idzin, dan didalam hal ini untuk tiap² usaha perdagangan harus diperoleh idzin tersendiri baik untuk kantor pusatnja maupun untuk tiap² kantor Tjabangnja.
Permohonan idzin² ini dinjatakan ditutup, untuk daerah Djawa sampai tgl. 1 September 1958, untuk luar Djawa sampai dengan 31 Desember 1958.
- e. Adapun kegiatan dalam lapangan perusahaan perdagangan tersebut dibagi terutama menjadi 3 golongan jaitu:

- (1). *Perusahaan Perdagangan besar*; yaitu perusahaan² yang bergerak dalam lapangan impor, ekspor, dan perdagangan yang berhubungan langsung dengan produsen besar.
- (2). *Perusahaan Perdagangan Perantara*; yaitu perusahaan² yang menjadi perantara dari perusahaan² perdagangan Besar pada satu pihak dan Perusahaan perdagangan Ketjil/Etjeran dilain pihak.
- (3). *Perusahaan Perdagangan Ketjil/Etjeran*; yaitu perusahaan² yang menjadi penghubung terakhir untuk menjampaikan langsung barang² pada konsumen (perdagangan penjebaran). Atau membeli barang² dari produsen ketjil lalu meneruskannya pada alat² perantara-selanjutnya (perdagangan pengumpulan).

Pada tahun 1959, dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/M tgl. 8 Januari 1959, diadakan peraturan peridzinan terhadap perusahaan-perusahaan perdagangan Nasional.

3. Tentang P.P. No. 10 tahun 1959.

- a. Dalam usaha untuk mempertjepat proses pemberian kedudukan yang lajak kepada para pengusaha Nasional dalam segenap lapangan perdagangan, telah ditetapkan jangka waktu berlakunya surat² lisensi dan surat idzin sementara yang telah diberikan kepada perusahaan² ketjil/etjeran yang bersifat Asing dan yang bertempat kedudukan diluar ibukota² Kabupaten, Karesidenan, Kotapradja dan Propinsi sampai dengan tgl. 31 Desember 1959, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M tgl. 14 Mei 1959, yang kemudian diperkuat dengan P.P. No. 10 tahun 1959 itu.
- b. Dalam rangka mengganti usaha perdagangan ketjil/etjeran bangsa asing yang berkedudukan diluar ibukota² Kabupaten/Kotapradja/Propinsi tersebut diatas telah diambil tindakan² antara lain sebagai berikut:
 - (1). Melakukan penerangan setjara luas guna menjadarkan rakjat untuk berusaha kearah berdagang etjeran/ketjil²-an dan berorganisasi.
 - (2). Pemindahan hak perusahaan² itu kepada pengusaha² nasional atau pemindahan tempat dagang ketjil etjeran bangsa Asing ke-tempat² baru.
 - (3). Dalam mengisi tempat yang terluang tersebut dan penerimaan pemindahan hak perusahaan dilakukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

- (a). Kooperasi²;
 — toko²/warung milik kooperasi.
 — toko²/warung² milik anggauta kooperasi toko.
 - (b). Toko pedagang menengah Indonesia.
 - (c). Toko² pedagang nasional lainnja.
 - (d). Perseorangan Warganegara Indonesia.
- (4). Usaha didalam bidang Kooperasi guna mengganti tempat jang terluang jang ditinggalkan pengusaha asing dilakukan dengan djalan:
- oleh kooperasi² jang sudah ada.
 - dengan menggiatkan tumbuhnja kooperasi baru.
 - dengan mengorganisasi warung² jang telah ada mendjadi kooperasi.
 - dengan membentuk pilot projek pertokoan di-ketjamatan² jang achirnja harus diselenggarakan oleh organisasi kooperasi.

4. Tentang Organisasi perusahaan sedjenis (OPS) dalam perdagangan.

- a. Sebagai kelandjutan dari peraturan peridzinan tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan dari pada ekonomi terpinpin, maka pada tgl. 24 September 1962, dengan surat keputusan Menteri Perdagangan No. 177 s/d 181/MSK/62 telah ditetapkan organisasi perusahaan sedjenis.

Didalam penggabungan ini, maka seluruh kegiatan perdagangan di-golong²-kan menurut *fungsinja* jaitu:

- (1). OPS. — Importir & Pedagang Besar (ketjil eksportir)
 - (2). OPS. — Perantara
 - (3). OPS. — Antar Pulau
 - (4). OPS. — Pertokoan
 - (5). OPS. — Etjeran (warung) dan
 - (6). GPEIS. (Gabungan Pedagang Eksportir Indonesia Sementara).
- b. Dengan telah terbentuknja OPS² ini maka makin mudahlah dalam mengadakan pengawasan dalam hal penjaluran barang², bimbingan dan penerangan² terhadap para pengusaha² tersebut jang dengan demikian akan memudahkan bagi Pemerintah untuk membawa kearah iklim ekonomi terpinpin. Boleh dikatakan pada waktu hampir ini seluruhnja perusahaan perdagangan di Djawa Barat telah tergabung dalam OPS.

Mengenai ke-OPS-an ini sekarang telah diatur lagi setjara lebih tegas jaitu dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1965.

5. Tentang penjaluran barang².

Penjaluran barang-barang pada pokoknja bertudjuan pada:

- Mendjaga agar supaja bahan² baku jang didatangkan kedaerah dapat sampai pada perusahaan² produksi jang membutuhkannya *setjara kontinue* dengan harga jang lajak.
- Mendjaga agar supaja barang² konsumsi baik jang asalnja dari impor, maupun jang dihasilkan dari perusahaan² didalam negeri sendiri dapat sampai kepada konsumen *setjara kontinue* atas harga jang lajak, dengan spreiding jang se-luas²-nja.
- Memperpendek saluran barang² dengan meniadakan „onnodigeschakels” dimana Organisasi Kooperasi dan Organisasi Perusahaan Sedjenis (OPS) dapat diikuti sertakan dengan pengertian penjerahan kepadanya hanja pengawasan dan bimbingan, segala sesuatu untuk mentjegah adanja kelambatan arus barang.

DAFTAR banjaknja Perusahaan dagang Asing, Nasional & Gudang berdasarkan dari pendjualan dan penerimaan Surat Permohonan Idzin dari/oleh K.P.D.N.² diseluruh Djawa Barat sampai dengan kwartal pertama tahun 1965.

No.	K.P.D.N. Daerah	S.P.I. (Srt. Permohonan Idzin)	S.P.I. jang diterima dari LPP. oleh KPDN. *) jang bersangkutan				Lisensi jang sudah dikeluarkan oleh K.P.D.N. jbs.			
			kuning.	Biru	Putih	Djmlh.	PB.	PP.	P.K.	Djmlh.
1.	Priangan	Asing Nasional Gudang	184 425 —	3.341 4.200 —	6.423 11.600 —	9.948 16.225 15.200	26 79 —	822 765 —	2.424 2.264 —	3.272 3.108 3.400
2.	Tjirebon	Asing Nasional Gudang	35 140 —	816 3.800 —	700 6.350 —	1.551 10.290 3.603	10 16 —	293 1.000 —	456 3.630 —	759 4.646 2.971
3.	Djakarta	Asing Nasional Gudang	75 53 —	700 1.300 —	3.400 8.750 —	4.175 10.103 7.000	— 2 —	134 346 —	862 2.912 —	996 3.260 1.680
4.	Bogor	Asing Nasional Gndang	48 50 —	— 2.300 —	50 5.350 —	98 7.700 7.200	— 9 —	154 177 —	204 1.003 —	258 1.189 585
5.	Banten	Asing Nasional Gudang	25 15 —	197 600 —	393 2.800 —	615 3.415 3.400	— 5 —	13 323 —	374 816 —	387 1.144 620
	Recapitulasi	Asing Nasional Gudang	367 683 —	5.054 12.200 —	10.966 34.850 —	16.387 47.733 38.403	36 111 —	1.416 2.611 —	4.320 10.625 —	5.772 13.347 9.265

*) Banjaknja formulir S.P.I. jang tersedia di K.P.D.N.

Pendjelasan: Djumlah angka² pendjualan formulir permohonan idzin dagang Asing, Nasional dan Gudang dengan peridizinan/lisensi jang telah dikeluarkan terdapat perbedaan jang sangat menjolok.

Hal ini antara lain dikarenakan banjak perusahaan² jang menggunakan formulir lebih dari satu untuk satu perusahaan misalnja; Perusahaan perdagangan Grossier dan Etjeran menggunakan formulir warna Biru dan warna Putih, dan selain dari pada itu banjak diantara perusahaan² jang belum memenuhi sjarat² untuk dikeluarkan lisensinja.

Mengenai perusahaan Asing, terutama sekali jang berada pada Wilajah KPDN. Bogor, djumlahnja sedikit sekali, karena perusahaan² jang terkena dengan P.P. No. 10 tahun 1959 tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Keterangan: S.P.I. kuning; Perdagangan Besar
S.P.I. biru ; Perdagangan Perantara
S.P.I. Putih ; Perdagangan Ketjil/Etjeran.

Sektor Kooperasi.

Perkembangan Kooperasi dalam periode Revolusi fisik 1946 — 1950.

1. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 perhatian Pemerintah terhadap Kooperasi sudah mulai nampak dengan adanya Djawatan Kooperasi dan Perdagangan Dalam Negeri, jang ditempatkan dibawah naungan Kementerian Kemakmuran.
Pada waktu Djepang hampir di-tiap² Ketjamatan diseluruh Djawa, didirikan usaha untuk mengurus pembagian barang Pemerintah pada rakjat dan untuk mengumpulkan hasil bumi (padi — kapas dsb.) guna keperluan peperangan Asia Timur Raya.
2. Kumiai² (sebutan untuk kooperasi pada waktu Djepang) ini se-mata² mendjadi alat² Pemerintah dengan modal Rakjat. Kursus² kader, sudah mulai diadakan sedjak bulan Pebruari 1945 oleh „Jumin Keizaiyoku” di Djakarta selama 2 bulan.
3. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Kumiai² tadi terus berdiri dengan nama kooperasi. Mulai pada saat ini timbullah beberapa kesulitan, jang diikuti oleh ketjurangan dalam hal mempergunakan barang dan uang. Alat² distribusi ini jang menamakan diri „Kooperasi” mulai kurang mendapat kepertajaan dari rakjat. Nama Kooperasi² mulai buruk dan oleh kebanyakan orang kooperasi diartikan dengan badan² saluran barang Pemerintah. Pada saat ini mulai pula nama „Kooperasi” dipakai sebagai kedok untuk berdagang dengan perlindungan Pemerintah.

4. Stempel jang diberikan oleh rakjat pada kegiatan² koperasi sebagai alat distribusi barang-barang Pemerintah masih tetap tertanam kuat dihati rakjat pada tahun² berikunja. Semangat mendirikan koperasi mulai nampak dimana-mana, partai politik menjadari se-dalam²-nja manfaat adanja koperasi (dalam arti tersebut diatas) sebagai alat propaganda untuk tjari pengaruh.
Baru pada achir tahun 1946 Djawatan Koperasi mengadakan pendaftaran setjara sukarela dengan maksud untuk mengawasi perkembangan koperasi jang mulai nampak.
5. Berhubung dengan blokade ekonomi oleh pihak Belanda, antara tahun 1947 — 1948, maka barang² Pemerintah jang disalurkan melalui koperasi berkurang, sehingga tidak salahlah apabila dikatakan bahwa kegiatan koperasi pada saat itu lumpuh.
6. Faham untuk mendirikan koperasi masih dikendalikan oleh idee² jang muluk dengan maksud tetap mentjari pengaruh. Aktivitas dari petugas² Djawatan Koperasi tak dihiraukan, walaupun sudah terkandung maksud untuk merobah dasar pemikiran dibentuknja koperasi. Kursus² kader pemimpin koperasi Desa, pada bulan Mei 1948 hampir ditiap Keresidenan di Djawa (chususnja Djawa Barat) mulai diintensifkan. Pada bulan Djuli 1949, setelah Pusat Djawatan Koperasi Republik Indonesia di Jogjakarta dan Djawatan Koperasi Daerah Jogjakarta dihidupkan kembali, mulailah ditempuh langkah² baru untuk merobah dasar pemikiran dibentuknja Koperasi. Aktivitas² Djawatan Koperasi di Djawa Barat diutamakan untuk mempererat hubungan dengan Djawatan² Koperasi di Daerah², Perkumpulan² dan Gerakan² Koperasi lainnja di Daerah.
7. Rentjana² untuk merobah dan menjalurkan Bank dan Lumbung Desa mendjadi Koperasi, menundjukkan adanja kemadjuan berfikir dalam pembentukan Koperasi, jang tadinja koperasi diberi arti sebagai alat distribusi barang² Pemerintah sadja.
8. Dengan terbentuknja negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, ada perobahan pula dalam organisasi kegiatan Koperasi, jaitu agar dileburkannja Pusat Djawatan Koperasi Republik Indonesia di Jogjakarta dengan aparat Koperasi jang telah terbentuk di Djakarta.

Perkembangan Koperasi dalam Periode „Survival” dan „Investment”.

1. Setelah terbentuknja negara Kesatuan Republik Indonesia sedjak 17 Agustus 1950, kegiatan² perkumpulan Koperasi mulai dapat bergerak dengan lebih njata lagi. Di Djawa Barat dalam tahun 1951 didirikan Badan Koordinasi Koperasi jang berkedudukan di Ban-

dung. Badan ini merupakan penghubung jiwa antara koperasi² yang ada di daerahnya dan merupakan pula suatu badan yang memberikan penerangan dan pendidikan pada anggota²-nya yang berada di Propinsi Djawa Barat.

2. Lebih jauh dari itu Djawa Barat dalam tahun 1951 ini mendirikan sebuah Bank Propinsi Djawa Barat yang maksudnya mengkoordinir usaha dalam lapangan keuangan koperasi dari gerakan² koperasi di Djawa Barat. Perhatian Pemerintah dalam kegiatan koperasi telah direalisasikan dengan memberi kedudukan Koperasi kepada usaha² Badan² Negara (misalnya B.I.N. — B.T.N.).

Pada akhir tahun ini mulai diadakan pentjataan serentak guna menjusun perangkaan dan mengetahui dalam garis besarnya luas dan besarnya gerakan Koperasi. Hari Koperasi yang pertama mulai diperingati pada tahun ini (12 Djuli) untuk selanjutnya diperingati pada tiap² tahun berikutnya. Sudah menjadi suatu atjara dalam merayakan Hari Koperasi itu selalu diadakan Pekan Tabungan, untuk menanamkan koperasi-minded dikalangan masyarakat luas.

3. Tidak boleh dilupakan bahwa gangguan gerombolan dan bentjana² alam yang menimpa pada masyarakat menjadi salah satu penghalang untuk pemupukan perkembangan koperasi, terutama dalam periode-periode investment. Hasil panen tidak terpetik seluruhnya disebabkan karena adanya banjir, hama² dan gerombolan pengatjau yang memetik hasil atas djerih pajah keringat rakyat. Akibat lain dari adanya halangan² tersebut diatas, kehidupan ekonomi pada masa itu sangat berat sekali dirasakan oleh masyarakat. Keadaan inipun sangat mempengaruhi pada tugas² yang diberikan pada Djawatan Koperasi.
4. Akan tetapi walaupun demikian perkembangan koperasi dari tahun ke tahun boleh dikatakan berkembang dengan pesat, berkat adanya kegiatan dari Djawatan Koperasi Daerah Tingkat I Djawa Barat untuk menanamkan kejakinan pada masyarakat akan manfaat koperasi. Apabila dalam tahun-tahun sekitar tahun 1950 — 1960 diadakan klasifikasi koperasi dalam 8 jenis ja'ni:

- a. Gabungan Pusat Koperasi.
- b. Pusat Koperasi.
- c. Koperasi Desa.
- d. Koperasi Kredit.
- e. Koperasi Lumbung.
- f. Koperasi Produksi.
- g. Koperasi Konsumsi.
- h. Koperasi lain².

Data² Perkembangan Kooperasi di
jang dapat dikumpulkan

TAHUN	M a t j a m K o					
	Gab. Pusat Kooperasi	Pusat Koope- rasi	Kooperasi Desa	Koope- rasi Kredit	Kooperasi Lumbung	Kooperasi Produksi
1951	—	—	—	—	—	—
1952	—	—	—	—	—	—
1953	—	—	—	—	—	—
1954	1	25	1.375	421	2	135
1955	1	25	1.554	571	3	204
1956	2	26	1.641	700	6	174
1957	2	29	1.720	757	6	305
1958	2	33	2.306	859	6	345
1959	2	34	2.391	910	6	376

	M a t j a m K o					
	Kooperasi Pusat	Kooperasi Serba Usaha	Kooperasi Pertanian	Kooperasi Peternakan	Kooperasi Perikanan	Kooperasi Keradj./ Industri
1960	—	2516	134	—	41	217
1961	—					
1962	—	—	—	—	—	—
1963	123	3562	780	3	84	395

Daerah Tingkat I Djawa Barat
adalah sebagai berikut;

Kooperasi		D j u m l a h		
Kooperasi Konsumsi	Kooperasi lain ^a	Kooperasi	Anggauta	Simpanan (tak termasuk simpanan dlm „Hari Kooperasi”)
—	—	1.017	340.000	14.741.945,70
—	—	1.461	382.146	27.925.800,00
—	—	1.795	450.545	48.100.069,56
41	78	2.078	531.418	72.244.334,40
53	71	2.482	617.239	101.774.029,06
128	69	2.746	649.073	
101	67	2.987		
132	69	5.752	818.080	155.581.239,95
229	76	4.024	1.104.471	274.782.137,51

Kooperasi		D j u m l a h			
Kooperasi Simpan/ Pindjam	Kooperasi Konsumsi	Koop. Djasa ^a lain ^a	Koo- perasi	Anggauta	Simpanan idem.
939	266	51	4164	1.102.489	300.849.155,04
			3171	1.150.208	129.461.936,49
—	—	—	—	—	264.784 Kg. padi
5878	333	71	11229	2.320.409	1.324.442.568,22

Maka dalam tahun 1960 sampai sekarang klasifikasi Kooperasi itu didasarkan kepada objek kegiatannya, yang dapat dibagi dalam:

- a. Pusat Kooperasi.
 - b. Kooperasi Serba Usaha.
 - c. Kooperasi Pertanian.
 - d. Kooperasi Peternakan.
 - e. Kooperasi Perikanan.
 - f. Kooperasi Kerajinan/Industri.
 - g. Kooperasi Simpan/Pindjam.
 - h. Kooperasi Konsumsi.
 - i. Kooperasi Djasa²/lain².
5. Tanggal 12 Djuli, merupakan hari Kooperasi yang dalam tiap-tiap tahun diperingati dengan menjelenggarakan Pekan Tabungan yang hasilnya dapat dilihat dari daftar tersebut dibawah ini:

Tahun	Besarnya dalam rupiah.
1951	429.845,22
1952	964.689,88
1953	2.515.500,20
1954	7.054.917,34
1955	13.809.107,80
1956	8.532.909,26
1957	5.354.963,91
1958	5.585.949,84

6. Djenis² kooperasi yang tersebut diatas tersebar luas di Daerah² di Djawa Barat ini.

Sektor Perbankan.

Pada pembahasan terdahulu sektor² lainnya dari pada Bidang Ekonomi telah dikemukakan, bahwa Djawa Barat sedjak sebelum perang merupakan potensi yang dapat dibanggakan. Sektor industri, perkebunan besar dan perdagangan merupakan usaha² yang tidak dapat terlepas dari pada usaha² perbankan. Djika pada sebelum perang bank-minded masyarakat Djawa Barat sangat kurang, maka dewasa ini keadaannya menjadi berubah. Sektor perkreditan dan perbankan telah mengalami kemajuan yang pesat, hal mana dibuktikan dengan bertambahnya bank² yang tersebar diseluruh Djawa Barat, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta.

Bilamana sebelum perang ditiap Ibu Kota Kabupaten hanya terdapat Algemene Volkscrcdiet Bank (A.V.B.), jang pada zaman Djepang dikenal sebagai Shomin Gunko, jang sedjak 1950 dirobah mendjadi Bank Rakjat Indonesia dan dirobah lagi djadi B.K.T.N., maka sekarang disamping Bank tersebut dibeberapa Kota Kabupaten terdapat pula Tjabang² Bank Negara Indonesia dan Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat. Bank² jang ada di Bandung adalah sebagai berikut:

Bank Pemerintah.

1. Bank Indonesia.
2. Bank Negara Indonesia.
3. Bank Kooperasi Tani dan Nelajan.
4. Bank Dagang Negara.
5. Bank Umum Negara.
6. Bank Pembangunan Indonesia.
7. Bank Tabungan Negara.
8. Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat.

Bank Umum Swasta (Kantor Pusat).

1. Bank Ekonomi.
2. Bank Pembina Nasional.
3. Bank Dagang Umum.
4. Sedjahtera Bank Umum.
5. Commercial Bank.
(Kantor Tjabang).
6. Bank Banten.
7. Bank Sukapura.
8. Bank Perniagaan Indonesia.
9. Bank Umum Nasional.
10. B.A.N. K.A.P.

Bank Tabungan Swasta (Kantor Pusat).

1. N.I.S.P.
2. Bank Tabungan Bandung.
3. Bank Tabungan Perintis.
4. Perkumpulan Himpunan Saudara.
5. Perhimpunan Studie Bank.

Di Tjirebon terdapat.

Tjabang Bank Indonesia.
Tjabang Bank Umum Negara.
Tjabang Bank Dagang Negara.
Tjabang Bank Kooperasi Tani dan Nelajan (exim).

Djumlah Bank jang terdapat di Djawa Barat:

	<i>Kantor Pusat</i>	<i>Tjabang</i>	<i>Djumlah</i>
Bank Sentral	—	2	2
Bank Umum Pemerintah	—	41	41
Bank Pembangunan Indonesia	—	1	1
Bank Tabungan Negara	—	1	1
Bank Pembangunan Daerah	1	3	4
Bank Umum Swasta	6	5	11
Bank Tabungan Swasta	5	—	5
	12	53	65

Sebagaimana telah dikemukakan diatas perbankan/perkreditan di Djawa Barat memperoleh kemajuan jang sangat pesat sesuai dengan irama perkembangan industri dll. bidang usaha. Karena tidak dimiliki data² jang lengkap, dengan sangat menjesal disini tidak dapat dikemukakan gambaran² jang djelas mengenai perkembangannya. Satu hal jang djelas adalah, bahwa sesuai dengan fungsinya Bank² tersebut telah banjak membantu usaha² pembangunan.

Jang dalam garis besar setjara khusus dapat dikemukakan disini, adalah beberapa soal mengenai Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat, jang merupakan satu²-nja Bank milik Pemerintah Daerah dan bertugas membantu membiyai projek² pembangunan regional di Djawa Barat.

Bank Karya ini didirikan pada tahun 1961 dengan maksud dan tujuan, seperti tertjantum dalam pasal² akte pendiriannya jang setjara umum dapat dikatakan terutama berusaha untuk memelopori bidang pembangunan di Djawa Barat dengan memperhatikan unsur² bank-tehnis.

Dengan memperhatikan ketentuan² Pemerintah dalam bidang perbankan seperti tertjantum dalam Undang² No. 13 tahun 1960, Bank Karya Pembangunan telah menetapkan suatu kebidjaksanaan tertentu guna mentjapai tujuan tersebut. Dibawah ini tertera usaha² jang dilaksanakan oleh Bank Karya sedjak didirikan sampai dewasa ini.

Usaha penarikan dana dari masyarakat.

Selain memberi ber-bagai² djalan seperti lazimnja dalam usaha Bank untuk menarik para client giro dan deposito, sedjak tahun 1964 Bank Karya telah mengadakan gagasan dalam pengerahan dana jang sangat penting artinja sebagai sumber keuangan. Gagasan ini berupa simpanan terpinpin bagi tjalon² djemaah hadji jang dimulai pada tahun 1964. Gerakan ini telah memberikan hasil jang sangat memuaskan.

Usaha tersebut telah pula disusun dengan tabungan terpinpin bagi murid² sekolah dasar di Djawa Barat, jang pelaksanaannya akan dimulai

pada tahun peladjaran 1965 — 1966. Dalam usaha tabungan terpimpin ini diharapkan tiap² murid saban tahun dapat menabung Rp. 1.000,—. Untuk sementara akan dimulai pada sekolah² dasar pada Ibu Kota Kabupaten.

Penjaluran Kredit.

Dalam membantu melantjarkan usaha pembangunan, Bank Karya telah memberikan bantuan kredit kepada projek² menurut bidang² sebagai berikut:

Pertama: Industri sandang-pangan.

- a. Sandang:
 - 1. Pertenunan.
 - 2. Pentjelupan.
 - 3. Konfeksi.
- b. Pangan:
 - 1. Peternakan/Pedjagalan.
 - 2. Pertanian.
 - 3. Perikanan.
 - 4. Penggilingan padi.
 - 5. Minjak kelapa.
 - 6. Penggaraman rakjat.

Kedua: Perindustrian Rakjat.

- 1. Keramik (bata-genteng).
- 2. Karet.
- 3. Perkapuran.
- 4. Pertukangan.
- 5. Pertjetakan.
- 6. Semen rakjat/bahan bangunan.

Ketiga: Pengangkutan/Pertambangan.

- a. Pengangkutan:
 - 1. Angkutan djalan-raya.
 - 2. Pelajaran.
- b. Pertambangan:
 - 1. Mangaan.
 - 2. Meni besi.

Keempat: Perkebunan dan lain².

- Kelima:**
- a. Parawisata.
 - b. Kooperasi.
 - c. Perhotelan.
 - d. Perdagangan.

Dilihat dari perkembangannja setjara kuantitatif, maka kredit jang diberikan oleh Bank Karya sedjak didirikannja sampai sekarang telah meningkat mendjadi lebih dari 80 × besarnja semula.

Skill investment dalam perbankan.

Untuk menambah tenaga-tenaga terdidik dalam perbankan, Bank Karya telah mengadakan latihan-latihan, kursus-kursus dan seminar management/administrasi perbankan.

Hasil-hasil yang ditjapai adalah memuaskan dan akhir-akhir ini telah pula mendapat didikan di Bank Karya petugas-petugas/pimpinan bank dari Sulawesi Tengah, Nusatenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Djambi dan Bali.

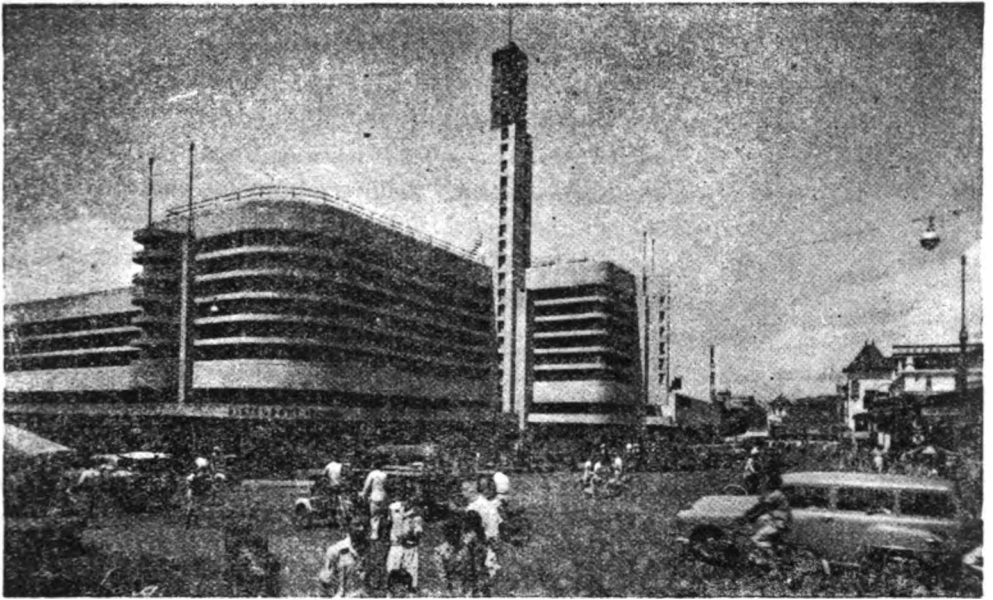
Usaha-Usaha tersebut memberikan gambaran bahwa Bank Karya merupakan pelopor dalam kegiatan/perkembangan bank daerah.

Pendirian Tjabang² Bank Karya.

Tjabang Bank Karya telah didirikan di:

1. Tjirebon.
2. Tasikmalaja.
3. Tjiamis dan
4. Krawang.

Diharapkan supaya di semua Ibu Kota Kabupaten lainnya dapat didirikan tjabang Bank tersebut.



Bank Karya Pembangunan Daerah.

BIDANG SOSIAL.

Rakjat Djawa Barat sedjak dahulu kala mempunjai kehidupan sosial jang sangat tinggi. Keramah-tamahan penduduk adalah sebagai bukti dari pada nilai kehidupan sosial jang dapat dibanggakan. Kehidupan gotong-rojong dari masjarakat desa mentjerminkan kepribadian sosial rakjat sedjak nenek-mojang kita. Pada waktu Pemerintahan pendjadjahan jang berabad-abad lamanja, sifat sosial jang diuraikan diatas makin lama makin merosot.

Untuk mengembalikan sifat sosial itu kepada kepribadian kita, maka Pemerintah kita berusaha dengan segala daya-upaja dan sekuat tenaga untuk mensukseskan usaha tersebut.

Bimbingan dan pengawasan sosial di Djawa Barat dilaksanakan oleh Djawatan Sosial Daerah Tingkat I Djawa Barat. Perkembangan Djawatan tersebut serta tugas-tugasnja merupakan uraian selandjutnja.

Djawatan Sosial jang dilahirkan sebagai suatu alat revolusi dan merupakan djuga suatu national product, tidak dapat memberikan penjusunan gambaran perkembangan djawatan jang sempurna, karena kurangnya bahan dokumentasi.

Dalam periode physiek djawatan tersebut hanya merupakan suatu bagian dari Kantor Kabupaten/Residen/Gubernur sadja, dimana kepala Bagian Sosial termaksud dalam melakukan tugasnja langsung bertanggung djawab kepada Kepala Daerah jang bersangkutan.

Tugas pokok selama pemerintahan Federal, Negara Pasundan adalah:

- (a). Membantu perbekalan kepada pedjoang² jang ada digaris depan.
- (b). Mengurus keluarga pedjoang jang bertempur digaris depan.
- (c). Selama hidjrah memberi bantuan kepada para pengungsi jang ratusan ribu djumlahnja.

Segera setelah pemerintahan Negara Pasundan berachir dalam periode tahun „Survival” dibentuklah Inspeksi Sosial jang langsung berada dibawah Menteri Sosial Republik Indonesia disertai tjabang-tjabangnja berbentuk kantor Sosial Keresidenan dan Kabupaten.

Tugas utama beralih kepada pembimbingan dan pembinaan masjarakat atas dasar kesadaran dan pertanggungan djawab sosial. Semua potensi Djawatan dikerahkan untuk rehabilitasi daerah akibat gangguan D.I./T.I.I. dimana banjak sekali waktu, tenaga dan biaja jang harus dipergunakannja.

Sehubungan dengan keluarnja Peraturan Pemerintah No. 5/1958, maka „Kantor” Djawatan Sosial Djawa Barat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat dengan bentuk barunja „Djawatan” Sosial

Daerah Tingkat I Djawa Barat, disertai sekaligus pelaksanaan penghapusan Kantor Sosial Keresidenan.

Pada tahun² investment itu Djawatan Sosial telah melakukan intensifikasi dikalangan bimbingan Sosial, dimana telah banjak pula didirikan lembaga² Sosial Desa dan badan² kemasjarakatan lainnja yang bergerak dibidang penjantunan korban² kekatjauan dan usaha² pembangunan.

Achirnja selama tahun Pantja-Warsa Manipol, status dan tugas Djawatan Sosial Daerah Tingkat I Djawa Barat tidak mengalami perubahan yang besar, hanja soal persediaan biaja yang diperlukan masih seringkali merupakan penghalang bagi lantjarnya pelaksanaan tugas termaksud diatas.

Untunglah dalam periode Mahkota Revolusi Djawatan Sosial Daerah Tingkat I Djawa Barat telah dapat menemukan djalan perkembangannja kearah mana ia harus bergerak dan apa yang mendjadi tudjuan atas dasar prinsip politik „Berdikari” demi kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Objek² Kegiatan.

Dibidang Sosial, yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan² masjarakat setjara keseluruhan, Pemerintah Daerah Tingkat I terus-menerus berdaja-upaja melakukan pemberantasan penjakit masjarakat, pentjegahan timbulnja kaum tuna-karya dan penjaluran serta pemberian bimbingan terhadap mereka yang telah mendjadi dirinja demikian.

Selain dari itu Pemerintah Daerah berusaha mempergiat aktivitas R.K. dan R.T. antara lain untuk:

1. Memupuk djiwa kegotong-rojongan antara penduduk.
2. Melaksanakan rupa-rupa pembangunan di-des²-nja setjara gotong-rojong.
3. Mendidik kebersihan dan kesehatan kampung dengan teratur berentjana.
4. Mengembangkan kesenian, kebudajaan, hiburan Rakjat dan olah-raga.
5. Mengembangkan kesederhanaan hidup sesuai dengan suasana per-djoangan meningkatkan konfrontasi terhadap „Nekolim”.
6. Mengembangkan kehidupan yang berkepribadian Indonesia.

Hasil pekerdjaan dari masa - kemas.

Sampai tahun 1950 usaha² sosial masih merupakan tugas Pamong-pradja, yang berkisar pada perawatan para korban pertempuran dengan pihak Belanda dan memberikan bantuan kepada para pengungsinja.

Djumlah Lembaga Sosial Desa di Djawa Barat menurut angka² yang masih tersedia adalah sebagai berikut:

Dacrah	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Keresidenan Banten	—	—	51	293	343	343
Keresidenan Bogor	—	—	170	327	379	467
Keresidenan Djakarta	—	—	—	229	502	546
Keresidenan Priangan	—	—	14	134	324	334
Keresidenan Tjirebon	—	—	128	551	817	1057

Dalam periode investment 90% dari banjaknja desa di Djawa Barat telah mempunyai Lembaga Sosial Desa untuk achirnja dalam masa Pantja Warsa Manipol *setiap desa* di Djawa Barat mempunyai Lembaga tersebut dengan penambahan terbentuknja Badan P.engawasan L.embaga S.sial D.esa *disemua* ketjamatan.

Dibidang pembangunan sendiri L.S.D.² itu telah melaksanakan se-tjara gotong rojong perbaikan² perumahan, solokan, djalan desa dan se-kolah² madrasah disamping membuat tempat peribadatan/perumahan dll. itu.

Organisasi dan Personalia.

Organisasi Djawatan Sosial baru mempunyai kedudukan tetap sewaktu pemerintahan Negara Pasundan dengan adanja Kementerian Sosial Negara Pasundan, dimana pegawainja terdiri dari pegawai Pemerintahan Federal jang diperbantukan dan pegawai Negara Pasundan sendiri untuk kemudian beralih kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta.

Achirnja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5/1958 sebagian tugas Pemerintah Pusat dibidang Sosial dalam lingkungan Kementerian Sosial telah diserahkan-terimakan kepada Daerah Tingkat I Djawa Barat dengan bentuk baru „Djawatan Sosial Daerah Tingkat I Djawa Barat”.

Bagi tugas jang tidak atau belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, dibentuknja Perwakilan Departemen Sosial di Bandung dengan personalia bekas Kantor Inspeksi Sosial Djawa Barat.

Dengan dibentuknja Djawatan Sosial Daerah Tingkat I Djawa Barat dan Perwakilan Departemen Sosial di Bandung, maka Kepala Djawatan Sosial Daerah Tingkat I itu, jang berstatus pegawai Daerah, merangkap Kepala Perwakilan Departemen Sosial.

Kesimpulan.

Djawatan Sosial Daerah Tingkat I Djawa Barat mempunyai harapan dapat lebih banjak lagi mendarma-baktikan kemampuan-kemampuannja

dengan berpidjak kepada amanat politik P.J.M. Presiden „Berdiri diatas kaki sendiri” jang terkenal dengan nama singkatannja „BERDIKARI”

Tidak berkelebihan kiranja djika dibawah ini dikemukakan salah suatu gambaran jang menimpa Djawa Barat sekitar kedjadian² bentjana alam pada tahun 1960 dimana Djawatan Sosial telah memberikan bantuan seperlunja.

Hal ini menundjukkan perangkaan antara lain sebagai berikut:

a. Rumah ² rusak/hantjur	67.712 buah
b. Manusia luka ² /meninggal	168 orang
c. Manusia jang menderita	139.774 orang
d. Sawah dan ladang jang rusak	38.339 Ha.

Kalau dinilai dengan uang, kerugian tersebut ditaksir

sebesar Rp. 227.347.831-

Biaja jang dikluarkan atas beban:

a. Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat	Rp. 83.192,75
b. Departemen Sosial	Rp. 859.000,—
c. P.P.U.M.B. Djawa Barat	Rp. 2.400.000,—

BIDANG KESEHATAN.

Sebagaimana dikemukakan dalam pandangan umum Ekonomi, penambahan penduduk Djawa Barat tiap² tahun berkisar pada l.k. 2,3%. Perkembangan penduduk ini dengan sendirinja, membutuhkan perhatian Pemerintah pada bidang kesehatan.

Djika pada sebelum Perang Dunia ke II masjarakat desa kurang perhatiannja terhadap pengobatan oleh seorang dokter, maka dewasa ini sudah lebih maju keadaannja. Rakjat desa kini sudah banjak sekali jang pergi kekota atau poliklinik jang dekat, untuk meminta pertolongan seorang dokter atau mantri djuru-rawat.

Usaha Pemerintah dalam pemberantasan penjakit menular mendapat pula perhatian masjarakat sepenuhnya.

Tugas pemeliharaan kesehatan rakjat di Djawa Barat dilaksanakan oleh Djawatan Kesehatan Daerah Tingkat I Djawa Barat, jang perkembangannja sedjak tahun 1945 akan diuraikan dibawah ini.

1. Djawatan Kesehatan Djawa Barat pada masa Revolusi fisik berada langsung dibawah kekuasaan Kementerian Kesehatan di Djakarta jang mendelegeer tugas pokoknja kepada para dokter Keresidenan untuk:

- a. Bersama-sama dengan P.M.I. membantu para pedjuang kemerdekaan dalam bidang pengobatan, perawatan dan pemberian obat².

- b. Melaksanakan kebidaksanaan dalam pengamanan persediaan obat²-an dan alat² kedokteran.
- c. Menjelenggarakan pengungsian rumah sakit jang berada diluar kota.
- d. Melakukan pengawalan rakjat jang mengungsi keluar kota. Perdjuaan dibidang kesehatan di Djawa Barat dipusatkan di Bandung dengan terselenggaranja persiapan pengungsian antara lain:
 - (1). Institut Pasteur ke Klaten.
 - (2). Rumah Sakit Rantjabadak, Tjitjendo dan Situ-Sacur ke Tjiparaj, Madjalaja dan Tjitjalengka.
 - (3). Obat² jang berasal dari Apotek² jang diambil alih Djepang ke Tasikmalaja.

Baru pada bulan April 1946 terbentuklah Djawatan Kesehatan Propinsi Djawa Barat dibawah pimpinan almarhum Dr. PURWOSU-WARDJO dimana tugas pokok hanja diarahkan pada pemeliharaan kesehatan dari para pedjoang kemerdekaan dan para pengungsi sadja. Setelah mengalami penghidjrahan ke Garut dan Wanaradja karena penjerangan Belanda, aktivitas² Djawatan Kesehatan Propinsi Djawa Barat terhenti sementara, untuk kemudian dapat bekerdja aktip kembali melalui bentuk Kementerian Kesehatan Negara Pasundan disusun dengan terbentuknja Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tgl. 17 Maret 1950 bertepatan dengan tergabungnja Djawa Barat pada Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta. Kesukaran² banjak diderita karena gangguan keamanan dan kekurangan tenaga² Medis dan para medis.

2. Selandjutnja dalam periode survival Djawatan Kesehatan Propinsi Djawa Barat melaksanakan tugas pokoknja dalam bidang kuratip maupun prepentip dan berhasil pula membentuk organisasi kesehatan, jang terkenal dengan nama pertjontohan „Bandung plan” dimana telah diusahakan, untuk mentjapai target 1 tempat tidur Rumah sakit, untuk tiap² 1.000 orang.
Timbang terima sebagian urusan Kesehatan kepada Propinsi dan kabupaten/Kotapradja pada waktu itu telah dilaksanakan, dengan keluarnja P.P. No. 49/1952.
3. Masa tahun² investment dipergunakan untuk mengembangkan usaha² kesehatan dibidang kuratip dan prepentip jang lebih luas lagi dengan tambahan penjelenggaraan pendidikan tenaga medis dan kadervorming dalam bidang B.K.I.A., Gizi, M.K.S. dan Pemberantasan penjakit mata.
4. Achirnja pada tahun Pantja Warsa Manipol perkembangan Kesehatan disesuaikan dengan Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9/1960

dimana segala sesuatu dilaksanakan setjara gotong-rojong ber-sama² masjarakat seluruhnja.

Andjuran² untuk „Berdikari” telah segera dilaksanakan tahap demi tahap dalam bidang Pharmasi dan Susunan makanan baji disamping pelaksanaan usaha² kuratif jang dilakukan setjara continue.

Aktivitas.

A. Aktivitas Djawatan Kesehatan Propinsi Djawa Barat senantiasa diarahkan kepada *penjempurnaan* usaha kuratif dan *perluasan* usaha preventif jang dapat menundjukkan hasil njata sebagai berikut:

a. *Perkembangan Objek² Kuratif di Djawa Barat.*

TH.	Djumlah Rumah ² Sakit dan Kapasitet						Djum- lah Balai ² Pengo- batan	Djuml. Balai ² Kes. Gigi Umum	Djuml. Balai ² Kes. Gigi Sek.	Djuml. Balai ² Kes. Gigi BKJA	Djumlah B.K.I.A.	
	Pemerintah		Swasta		Djumlah							
	Rs	Cap	Rs	Cap	Rs	Cap						
1945	}											
1946												
1947		Belum ada ketertiban										
1948												
1949												
1950		38	4141	8	1170	46	5311	483	4	4	—	100
1951		39	4496	8	1170	47	5666	530	4	4	—	166
1952		58	5892	12	1316	70	7208	558	5	4	—	190
1953		63	7160	17	1583	80	8743	630	6	4	—	205
1954		68	7399	17	1723	85	9122	711	10	9	—	220
1955		68	7461	17	1753	85	9214	693	11	12	—	252
1956		81	8102	18	1790	99	9892	806	13	13	3	278
1957		84	8410	21	1854	105	10264	892	15	20	4	313
1958		84	8277	24	1973	108	10247	865	15	25	4	344
1959		85	8287	25	2029	110	10316	837	15	27	4	364
1960		86	8166	30	2125	116	10291	850	16	27	4	388
1961		91	8289	30	2133	121	10422	924	22	28	4	409
1962		92	7807	29	2125	121	9932	942	22	29	4	449
1963		92	7946	30	2148	122	10094	963	22	29	4	468
1964		92	7964	32	2168	124	10114	980	25	30	4	493

b. *Dinas Kesehatan Gigi.*

Apabila dalam tahun 1950 di Djawa Barat tertjatat hanja ada 12 buah Balai Pengobatan Gigi, dalam tahun 1955 djumlahnja telah berobah mendjadi 15 buah.

Kemudian dalam tahun 1962 tertjatat ada 19 buah ditambah dengan 25 buah Klinik Gigi Sekolah (untuk melajani Sekolah^a). Dalam tahun 1963 djumlah ini tetap tidak berubah dan pada akhir tahun 1964 ditambah lagi dengan 3 buah.

B. Pelaksanaan usaha-usaha prepentif.

a. *Usaba^a pemberantasan penjakit menular.*

- (1). Pemberantasan penjakit tjatjar. Berhubung dengan djangkitnja wabah dalam tahun 1950, maka pemberantasannja setjara terus-menerus dilaksanakan sampai tahun 1956. Setelah 6 tahun berikuttnja penjakit ini tidak begitu menampakkan diri dalam tahun 1962 serangan penjakit tjatjar di Djawa Barat telah mendjadi-djadi.

Apabila pada permulaannja hanya tertjatat 54 orang jang kedjangkitan, ternjata angka ini dalam tempo singkat telah meningkat mendjadi wabah dan jang sakit tertjatat 11.735 orang.

Usaha mentjegah penjakit agar tidak mendjalar ialah dengan djalan isolasi dan pentjatjaran dilingkungan masjarakat setjara terus-menerus seluruh tahun, dikota-kota, maupun didedesa-desa.

b. *Usaba pemberantasan penjakit-penjakit menular lainnja.*

Angka-angka jang dihinggap i penjakit-penjakit seperti Para Cholera Eltor, Typhus dan Dysenterie terutama dalam tahun 1962 nampak lebih banjak dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha pentjegahannja dilakukan disamping isolasi dirumah-rumah sakit, djuga dengan djalan penjuntikan setjara incidentil ditempat-tempat sekitarnja dengan vaccin Chotypa.

c. *Pemberantasan penjakit malaria.*

Untuk mentjegah tumbuhnja wabah dalam musim hudjan, maka pada dasarnya telah mendjadi pekerdjaan routine dari pihak Dinas Kesehatan untuk bersama-sama dengan instansi-instansi lainnja, terutama dengan pihak Dinas Pembasmi Malaria mengadakan gerakan penekanan wabah penjakit tersebut, teristimewa didaerah-daerah pantai Sclatan dengan djalan melakukan semprotan terhadap sarang-sarang njamuk serta pemberian obat kepada para penderita sakit Malaria.

d. *Usaba perbaikan makanan dan gerakan kebersihan.*

Usaha-usaha lainnja jang penting didalam usaha mentjegah pe-penjakit dilakukan pula dengan djalan pemberian pencerangan/

pendidikan serta demonstrasi antara lain tentang perbaikan makanan dan usaha-usaha kebersihan dilingkungan masyarakat.

C. Pemerintah Daerah Djawa Barat untuk pembelian obat²an dari tahun 1959 s/d 1964.

Tahun	1959	1960	1961	1962	1963	1964
T'jatjar	970.000	802.900	1.100.000	1.100.000	2.500.000	4500.000
Malaria	1.800.000	900.000	1.234.500	1.234.500	2.500.000	2500.000
Patek	40.000	40.000	60.000	60.000	200.000	200.000
Kusta	130.000	130.000	180.000	180.000	500.000	500.000
Mata	10.000	10.000	20.000	20.000	200.000	200.000

Organisasi dan Personalia.

Penertiban kembali organisasi dan personalia baru dapat dimulai dengan didirikannya Kantor-Kantor Keresidenan di Banten, Bogor, Djakarta Barat, Djakarta Timur, Priangan dan Tjirebon, setelah Djawatan Kesehatan Propinsi Djawa Barat pada tanggal 17 Maret 1950 berada langsung dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jogjakarta. Pada saat itulah kekosongan pegawai, ber-angsur² dapat diisi kembali dengan pegawai² yang mulai bersedia lagi untuk bekerdja di Djawa Barat.

Adapun perkembangan djumlah tenaga² Dokter di Djawa Barat memperlihatkan progress sebagai berikut:

TAHUN	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
A. Dok. Pem. Umum	70	69	77	83	82	80	60	*)	61	54	54	55	57	65
B. Dok. Part.	—	—	—	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—
C. Dok. Gigi Pem.	4	4	7	9	10	10	13	**)	—	—	—	—	—	—
D. Dok. Gigi Part.	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—

Lebih sempurna lagi keadaan organisasi dan personalia itu setelah pada tahun 1956 dikeluarkan garis-garis tertentu mengenai hal termaksud, dimana pada umumnya Djawatan-Djawatan Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kotapradja menjadi pembantu utama Kepala Daerah yang bersangkutan dalam bidang urusan kesehatan, sedangkan soal-soal teknis medis Djawatan dan dinas tersebut tetap berada dibawah pengawasan Departemen Kesehatan.

Kesimpulan.

Perkembangan Djawatan Kesehatan Daerah Tingkat I Djawa Barat tampaknya meningkat terus, meskipun seringkali terbentur pada biaya-biaya yang diperlukan.

*) Belum tertjatat khusus.

**) Dalam keadaan S.O.B. banjak yang mendaftarkan diri.

Lebih-lebih dengan adanya amanat politik Berdikari dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia, Djawatan Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Barat mempunyai harapan besar untuk dapat menjumbangkan funds and forcesnya seluas-luasnya menuju kearah terlaksananya tjara-tjara masyarakat adil dan makmur.

BIDANG MENTAL/ROCHANI.

Pandangan Umum.

1. Mental menurut Pola Pendjelasan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 dalam keseluruhan adalah susunan dinamis tjintarasakarsa yang tertjermin dalam tjita², sifat², tingkah-laku dan perbuatan seseorang. Mentalita seseorang atau mentalita masyarakat merupakan pentjerminan masyarakat dimana ia hidup.

Sifat, tingkah laku serta perbuatan seseorang adalah merupakan tuntunan dari masyarakat. Djadi tegasnya pengaruh lingkungan kepada jiwa seseorang itu besar sekali.

Terdjadinja perubahan² dalam masyarakat berarti mengubah pula mentalita anggauta²-nja. Individu dengan setjara aktif dan kreatif ikut menentukan tjorak masyarakat, yang selandjutnja memberikan pentjerminannja pula pada mentalita itu.

2. *Pengaruh Agama terhadap mentalita masyarakat Jawa Barat.*

Sebelum agama Islam berpengaruh di Jawa-Barat, keradjaan Hindu Padjadjaran telah lama menanamkan pengaruhnja di Jawa-Barat ini.

Pengaruh kedua agama ini sedemikian kuatnya sehingga tidak mustahillah, apabila dalam suatu upatjara adat terdapat kedua pengaruh agama itu.

Individu² yang beragama Islam dan Hindu setjara aktif dan kreatif ikut menentukan tjorak masyarakat dan selandjutnja memberikan pentjerminan pula pada mentalita itu. Antara individu dan masyarakat ada hubungan timbal-balik yang dinamis.

Sehubungan dengan uraian diatas maka sukarlah untuk menarik garis yang tegas sifat, watak asli masyarakat Jawa-Barat. Pada hakekatnja pengaruh agama tidak mengubah pandangan spirituil bangsa Indonesia bahkan menjuburkan realisasi faham gotong-rojong dikalangan masyarakat, sebab agama mengadjarkan supaya selama hidupnya mengumpulkan amal kebaikan, agar nanti diakhirat dapat kembali kepada Tuhan.

Berhubung dengan itu maka dalam uraian selandjutnja tidak/sedikit disinggung soal agama. Djika Pantjasila (gotong-rojong) masih tertjermin dalam kehidupan masyarakat *didesa* yang nampak dalam berbagai

aktivitas; jang dikumpulkan oleh Prof. Dr. Kuntjaraningrat sebagai berikut:

- a. Aktivitas gotong-rojong jang tumbuh pada waktu ada peristiwa² kematian atau ketjelakaan pada salah satu keluarga penduduk desa.
 - b. Aktivitas² gotong-rojong jang dilakukan oleh seluruh desa pada waktu ada proyek² pekerdjaan jang diusahakan oleh seluruh desa sebagai suatu kebutuhan umum — misalnja membuat djalan, saluran² air dsb.
 - c. Aktivitas gotong-rojong jang ditudjukan pada waktu seseorang desa mengadakan pesta.
 - d. Aktivitas gotong-rojong jang ditudjukan kepada pemeliharaan dan pembersihan dari kuburan-kuburan nenek mojang.
 - e. Aktivitas gotong-rojong jang timbul pada waktu seseorang penduduk membuat/memperbaiki rumah.
 - f. Aktivitas² gotong-rojong pada waktu melakukan pekerdjaan² jang ada hubungannya dengan pertanian misalnja: panen, mentjangkul, merambet (sunda) dsb.
 - g. Aktivitas² gotong-rojong jang berdasarkan kewadajiban para pekerdja untuk menjumbangkan tenaga kepada masjarakat.
3. Penggerakan bangsa Indonesia, chususnja menggerakkan masjarakat Djawa-Barat dengan dipengaruhi oleh pengertian² nasionalisme, demokrasi, marxisme d.l.l.

Pantjasila jang merupakan falsafah bangsa Indonesia, setjara turun-temurun diwariskan pada kita pada hakekatnja adalah merupakan „lima mutiara”, „intisari” dari peradaban bangsa Indonesia selama dua ribu tahun.

Isi djiwa bangsa Indonesia (chususnja isi djiwa Djawa-Barat) jang tergambar tersebut diatas lambat laun berkurang, terlebih-lebih dengan adanya revolusi 1945. Rupa²-nja sifat² jang individualistis jang terdapat pada masjarakat kota dan jang mempengaruhi tjara² mereka berfikir, berubah karena arus revolusi. Djiwa kesadaran nasional jang telah ditanamkan oleh pemimpin² rakjat sedjak pendjadjahan mentjapai kulminasinja pada dewasa itu. Kesadaran berbangsa, bernegara makin bergelora, kesadaran akan harga diri timbul kembali. Tjita² untuk menggolong negara jang adil, makmur dan bermoral tinggi merupakan ideal bagi sebagian besar putera Indonesia, mendjadi impian bagi setiap golongan, mendjadi harapan segala lapisan masjarakat.

Disamping pengaruh agama, djuga tidak sedikit pengaruhnja kerdjaan² dan susunan masjarakat feodal terhadap pandangan hidup dan

sikap hidup masyarakat Djawa-Barat ini, jang menghambat kemadjuan menudju masyarakat jang kita tjita²-kan.

4. Pengaruh zaman Pendjadjahan dan sistim Kapitalisme, dengan kemadjuan teknologi modern dan pengaruh aliran² fikiran baru terhadap mentalita masyarakat Djawa-Barat:

- a. Akibat Politik memetjah-belah dalam masa pendjadjahan Belanda memperkuat dan mempertebal rasa kesukuan jang menghalang-halangi tumbuhnja rasa kebangsaan.

Merendahkan taraf hidup jang dipupuk oleh sistim Pendidikan jang dilaksanakan dengan maksud mendidik „abdi-abdi” pemerintahan pendjadjahan tak sedikit pengaruhnja terhadap mentalita/pandangan hidup masyarakat Djawa-Barat.

Eksplotasi tenaga manusia (romusha), pengerukan kekajaan dan tjara militerisme jang dilakukan oleh imperialisme Djepang, setjara negatif mempunjai akibat buruk. Usaha² Pemerintah jang kadang² diinstruksikan setjara paksa, diterima oleh rakjat dengan asosiasi pengertian romusha.

Gerakan wadajib menabung, mendirikan koperasi d.l.l. jang sifatnja menampung dana dan daja untuk kemudian disalurkan demi kemandjanaan umum, diterima oleh masyarakat dengan asosiasi pengerukan kekajaan oleh negara. Rasa tidak senang dikalangan masyarakat dengan methode pemerintahan kekerasan adalah akibat negatif dari sistim pemerintahan militer pada masa Djepang.

- b. Berkembangnja pengetahuan teknik modern, pandangan hidup masyarakat Djawa-Barat baik di desa apalagi di kota² besar mempunjai pengaruh jang tidak bisa diabaikan. Kesemuanja menimbulkan istilah „orang desa” dan „orang kota” jang njata dapat ditarik garis pemisah baik dilihat dari segi sosial, ekonomi dan culturnja.

Djiwa bersatu makin kuat, rasa kedaerahan terdorong kebelakang dalam suasana perdjjoangan bersendjata melawan Belanda. Tjita² untuk membentuk masyarakat Indonesia jang Loh Djiniawi, adil parasmaarta didengungkan dimana-mana jang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar jang berlandaskan Pantja Sila.

Petani jang dulu terpendam kini muntjul, daja kreasi rakjat nampak disegala lapangan. Sementara gotong-rojong timbul kembali. Rakjat desa jang setjara relatif biasanja statis, berubah mendjadi dinamis.

Demikianlah kira² semangat heroik masyarakat Djawa-Barat, sesudah revolusi 1945.

5. Tahun 1945 sampai tahun 1950 merupakan masa pendobrak dan masa penuh idéalisme, jang didalam manipol disebutnja tingkatan physical Revolution.

Tahun 1950 — 1955, tingkatan revolusi „Survival” artinja tetap hidup, tidak mati. Dalam masa survival inilah kita memulai masa pelaksanaan yakni, masa pelaksanaan tentang apa yang kita idamkan. Dalam manipol ditegaskan „diantara tahun 1950 — 1955 kita semuhkanlah luka² itu, kita sulami mana yang bolong, kita tutup mana yang djebol”.

Didalam masa survival inilah rupanja banjak terdjadi penjelewengan² disegala bidang, baik dalam lapangan politik, ekonomi maupun sosial dalam berbagai matjam bentuk.

Selama revolusi fisik kita harapkan „Pantjasila” sebagai „Pelita” untuk membangun masjarakat adil dan makmur, tetapi pada masa survival Pantjasila dipakai alat untuk mentjari pengaruh.

6. *Pengamalan dan Pengamanan terhadap mental dan Agama.*

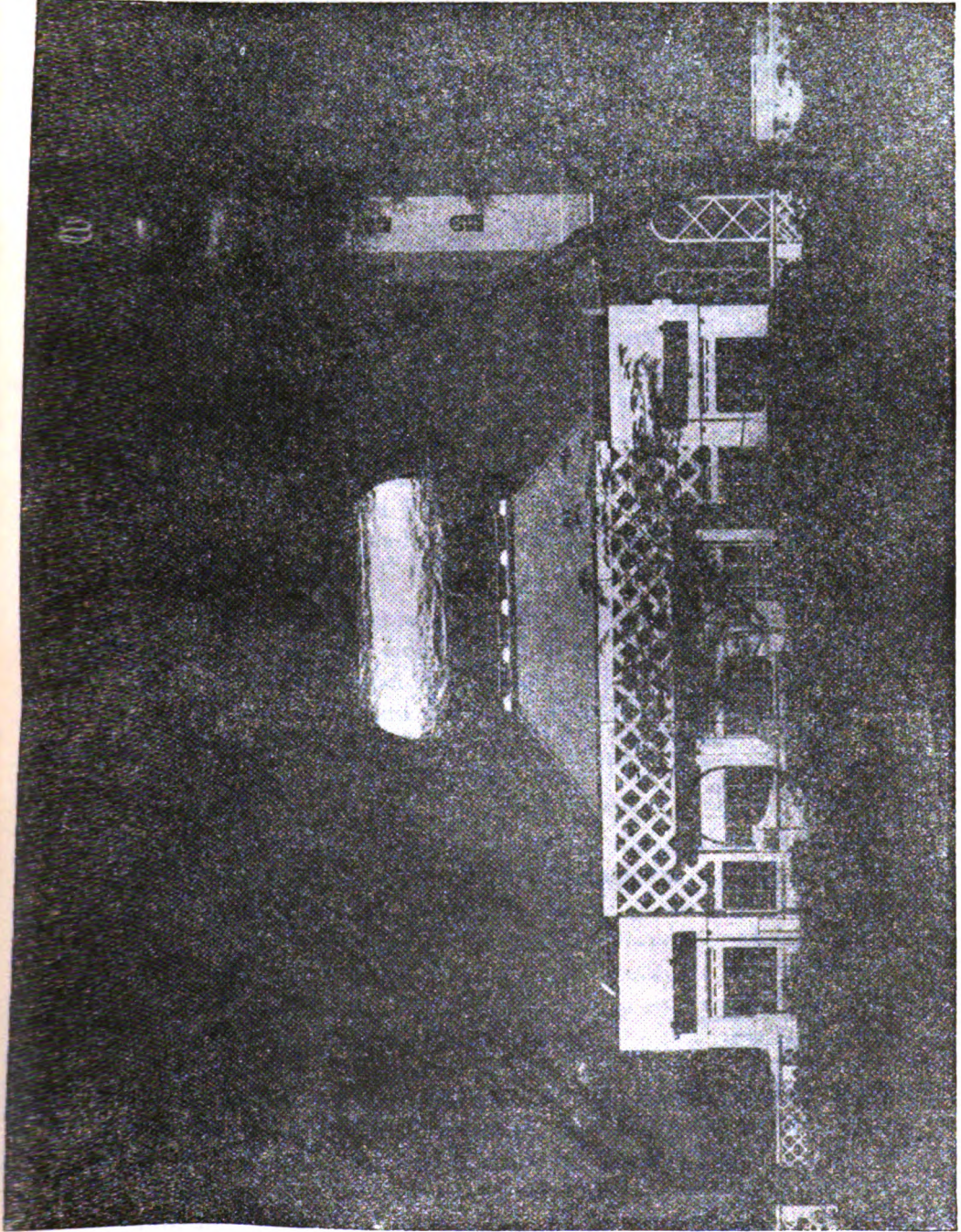
1. Manipol Usdek dengan pedoman² pelaksanaannya, dijadikan mata pelajaran wadajib mulai dari sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi, djuga dilingkungan kantor² Djawatan² dsb.-nja; mendapat perhatian sepenuhnya.
2. Intensifikasi dan extensifikasi kegiatan Front Nasional di seluruh Jawa-Barat.
3. Agama dijadikan mata pelajaran wadajib dikalangan murid² sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi dan djuga digiatkan dilingkungan kaum buruh di Djawatan, Kantor², Perusahaan² dan sebagainya.

A g a m a :

1. Sedjarah menjatakan, bahwa semendjak direbutnja Banten dan diduduknja Sunda Kalapa (Djakarta) pada tahun 1527, maka Sjarif Hidajatullah, Sunan Gunung Djati menjebarkan Agama Islam di Jawa-Barat. Kemudian pada tahun 1552 pemerintahan di Banten diserahkan oleh Sjarif Hidajatullah kepada puteranja, Sultan Hasanuddin dan beliau sendiri bersemajam di Tjirebon.

Pada tahun 1529 direbutnja Pakuan, maka djatuhlah keradjaan Padjadjaran, benteng Hindu-Budha yang penghabisan di Jawa-Barat. Maka semendjak itulah menjebarnya Agama Islam di Jawa-Barat sampai ke daerah² pedalaman.

Agama Islam di Jawa Barat hidup subur, berkembang dengan pesatnja. Hal ini terbukti sampai sekarang dengan bukti banjaknja Alim-Ulama, tempat² beribadat (mesjid²), Langgar/tadjug² dll. sebagainya), pesantren² dan tempat² pengadjan yang lainnja. Pertumbuhan Agama Islam terus meningkat.



Mesjid Agung di Bandung.

Foto P.a.f.

Kemudian, setelah V.O.C. masuk dan pemerintahan Belanda berdiri di Indonesia, maka masuklah peladjaran Agama Kristen/Roma Katholik dengan Missi dan Zendingnja.

2. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 3 Djanuari 1946 Pemerintah mengumumkan, bahwa Kementerian Agama didirikan tersendiri (untuk melaksanakan azas ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Undang-Undang Dasar Bab XI pasal 29) dengan H. Rasjidi B.A. sebagai Menteri Agama pertama.

Kemudian dibentuklah Kantor² Urusan Agama Daerah Keresidenan, begitu djuga didaerah Djawa-Barat.

Pada zaman pendudukan, di Djawa-Barat ada Djawatan Agama dari Kementerian Pengadjaran dan Agama Negara Pasundan, jang mana setelah Negara Pasundan bubar dan Propinsi Djawa-Barat djadi daerah Komisariat Republik Indonesia, maka Djawatan Agama itu didjadikan Departemen Penerangan dan Agama.

Selandjutnja setelah R.I.S. dan R.I. dilebur djadi Negara Kesatuan, maka terhitung mulai bulan Djuni 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Propinsi Djawa-Barat di Bandung dan Kantor³ Urusan Agama Daerah Karesidenan.

3. Pekauman³ di ibu kota Kabupaten, Kewedanaan dan Ketjamatan seluruh Djawa-Barat didjadikan Kantor² Urusan Agama Kabupaten dan Ketjamatan dengan status Djawatan Pemerintah, sebagai saluran dari Kementerian Agama dan pegawai³-nja diangkat mendjadi pegawai Negeri, jang banjarknja pada waktu itu $\pm$ 2.500 orang pegawai. Kantor Urusan Agama Propinsi/Daerah Tingkat I Djawa-Barat terdiri dari:

1. K.U.A. Propinsi/Daerah Tingkat I	1 buah kantor
2. K.U.A./Pengawas U.A. Daerah Karesidenan..	4 buah kantor
3. K.U.A. Kabupaten/Daerah Tk. II	19 buah kantor
4. K.U.A. Kotapradja	1 buah kantor
5. K.U.A. Ketjamatan	363 buah kantor
6. K.U.A. Ranting	50 buah kantor

Djumlah 438 buah kantor

Kemudian menjusul dibentuk di ibu kota Propinsi/Daerah Tingkat I Djawa-Barat kantor² Penerangan Agama dan Pendidikan Agama, begitu djuga di ibu kota Kabupaten/Daerah Tingkat II dibentuk Kantor³ Pendidikan Agama dan Peradilan Agama serta Staf Penerangan Agama.

4. Rakjat di Djawa-Barat pada umumnja taat sekali kepada peladjaran Agama, baik Islam maupun Kristen dan Katholik.
Pertumbuhan keagamaan meningkat terus, sebagaimana ternjata dalam gambaran/statistik dibawah ini:
 - a. Di desa²/kampung² jang tadinja tidak ada mesdjid/langgar, maka atas keinsjafan rakjat sendiri dengan djalan bergotong-rojong telah didirikan mesdjid²/langgar² dan jang telah rusak diperbaiki atau dibangun kembali.
 - b. Pesantren² dan madrasah²/sekolah² Agama, terutama setelah keamanan di Djawa-Barat pulih kembali, mendapat kundjungan/perhatian besar dari para santri/murid.
 - c. Di sekolah² dari paling rendah/S.D. sampai di Perguruan Tinggi kini diadakan peladjaran Agama sebagai mata peladjaran wadjib.
 - d. Di beberapa tempat di Djawa-Barat sekarang telah banjak didirikan Sekolah² Agama; Menengah/Landjutan Pertama Atas dan Perguruan Tinggi Agama Islam, baik Negeri maupun Swasta.
 - e. Kalau dahulu perajaan² perkawinan/chitanan diramaikan dengan berbagai tontonan jang menjimpang djauh dari tuntunan Agama, maka pada achir² ini telah banjak jang diganti dengan pembatjaan Qur'an dan atau diadakan tablighg.
 - f. Di ibu kota Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Ketjamatan telah dibentuk:
Madjelis Ulama, sebagai saluran dari Madjelis Ulama Pusat, jang dipimpin oleh J.M. Menteri Penghubung Alim Ulama, dan B.P.4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penjelesaian Pertjeraian) untuk memberi djasa² baik kepada masjarakat dalam penjelesaian NTR.
 - g. Banjaknja Organisasi² Partai² Agama dan lain² sebgainja.
5. *Banjaknja/statistik pemeluk² Agama.*
keadaan pada achir tahun 1964.

1. Islam	± 19.344.622 orang
2. Kristen/Protestant	65.000 orang
3. Katholik	24.272 orang
4. Budha	43.128 orang
5. Hindu Bali	2.500 orang
6. Kong Hu Tju	150.000 orang
7. Animisme	2.584 orang
8. Kepertjajaan lain ²	55.205 orang
Djumlah	19.677.311 orang

Banjaknja pemeluk Agama Islam diperkirakan dengan berdasarkan kepada banjaknja penduduk Djawa-Barat ± 19½ djuta orang.

6. *Statistik banjak bidang^a unsur^a keagamaan:*

a. Tempat^a peribadatan:

Islam.

Mesdjid	21.038 buah
Langgar/Surau/Tadjud	65.741 buah
Musolla di tempat Umum	2.288 buah
Idem di Kantor ^a , station K.A., Bus, Perusahaan, Asrama dan sebagainya	45 buah
Djumlah	89.112 buah

Kristen.

Geredja	81 buah
Rumah kebaktian	92 buah
Djumlah	173 buah

Katholik.

Geredja	23 buah
Kopol	23 buah
Djumlah	46 buah

Agama/Kepertjajaan lain^a.

Kuil Budha	12 buah
Puri Hindu Bali	3 buah
Klenteng	24 buah
Djumlah	39 buah

b. Tempat^a pengadjan/peladjaran Agama:

1. Pesantren	2.767 buah
2. Madrasah/sekolah Agama	5.491 buah
3. Tempat pengadjan umum	17.749 buah
4. Perguruan Tinggi Agama Islam	2 buah
5. Perguruan Agama Kristen tk. Tinggi	1 buah

c. *Guru^a Agama:*

Islam:

1. Kiaji/Adjengan/Alim Ulama	25.253 orang
2. Guru Ngadji di Pasantren	4.042 orang
3. Guru Agama/Madrasah	14.860 orang
4. Guru Agama Tetap (Pegawai Negeri di S.D., S.L.T.P. dan S.L.T. Negeri/ Swasta	6.136 orang
5. Guru Agama Honorarium	795 orang

Kristen.

Pendeta	129 orang
Pemb. Pendeta/Guru Indjil	9 orang

Katolik.

Uskup (Mgr).	2 orang
Pastoor	54 orang
Suster	277 orang
Bruder	24 orang

d. *Banjakanja santri|murid|pengadjan.*

Santri pesantren	209.409 orang
Murid Madrasah	489.821 orang
Murid/pengundjung pengadjan	2.082.078 orang

e. *Banjakanja pengundjung mesjid².*

Djami' pada tiap² hari Djum'at kurang lebih .. 3.555.550 orang

Kebudajaan.

(f) Suatu pendapat jang tak dapat disangkal bahwa kebudajaan itu tidak berkembang sendiri, melainkan mempunyai hubungan jang erat dengan perkembangan dibidang-bidang lainnja. Khusus di Indonesia perkembangan kebudajaan ini erat hubungannja dengan kehidupan keagamaan dan kepertjajaan, perkembangan kenegaraan serta politik Pemerintah, pendidikan didalam dan diluar sekolah, perkembangan ekonomi sosial, rekreasi² rakjat dan sebagainja.

a. Pengaruh agama Hindu, Budha dan Islam chususnja di Djawa Barat tidak sedikit ikut serta memberi bentuk dari kehidupan kebudajaan.

b. Kebudajaan² warisan dari perkembangan kenegaraan/keradjaan² Hindu, Islam di Djawa-Barat dan datangnya bangsa² imperialis Spanjol, Pertugis, Belanda, Inggris dan Djepang sedikit banjak mempengaruhi pula kehidupan kebudajaan Indonesia, chususnja kebudajaan di Djawa-Barat.

Perkembangan politik pemerintahanpun mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebudajaan di Djawa-Barat ini Didalam Manipol ditegaskan, bahwa „Tudjuan djangka pendek jang saja hadapkan kepada Saudara² ialah: program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu: sandang-pangan, keamanan, melandjutkan anti imperialisme — ditambah dengan mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan kekanan dan kekiri, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolongan dunia menudju kepada satu imbangen baru”.

Tindakan selanjutnya dari Pemerintah untuk melarang dansa-dansi, lagu² ngok-ngik, dilarangnya import film² Barat dari Negara² Oldefo dsb. dan disamping itu mempergiat pula aktivitas inspeksi² Kebudayaan dan membentuk inspeksi² kebudayaan di daerah² Tingkat II di Djawa-Barat ini, memberikan harapan pada kita untuk maju terus mengikis habis imperialisme kebudayaan dan tertjiptanja manusia Budaya Indonesia.

- c. Begitu pula peranan pendidikan baik didalam sekolah maupun diluar sekolah mempunyai pengaruh jang menentukan dalam pembentukan manusia budaya Indonesia. Dengan tjara mendidik adjaran² jang sesuai dengan watak bangsa Indonesia inilah, generasi² jang akan datang dapat terselamatkan daripada pengaruh² kebudayaan asing.

Bagaikan tjendawan dimusim hudjan di Djawa-Barat ini dibentuk Lembaga²/Balai² Kesenian jang pada prinsipnja menggali; memelihara dan mengembangkan kesenian asli daerah.

Sebegitu djauh langkah² jang telah ditempuh oleh Djawa-Barat ini, ialah disesuaikanja Desa² Pantjamarga di berbagai Daerah Tingkat II. Kedalam wadah ini dituangkan unsur² untuk mempertebal kejakinan akan kemampuan diri sendiri untuk menudju pada prinsip berdiri diatas kaki sendiri disegala bidang, termasuk bidang kebudayaan.

- d. Perkembangan ekonomi rakjat dan keadaan sosial dari masjarakat ikut pula memberi kehidupan perkembangan kebudayaan.
- e. Menjalurkan rekreasi² rakjat setjara terpimpin guna menggali, membina dan mengembangkan kebudayaan rakjat jang bermutu dan bertjorak nasional.

(II) Badan² jang bertugas dibidang kebudayaan.

Badan² jang bergerak didalam bidang kebudayaan di Djawa-Barat pada pokoknja dapat dibagi dalam 2 bagian:

- a. Badan Pemerintah.
- b. Badan Swasta.
- a. *Badan Pemerintah.*

Di Djawa-Barat terdapat:

- (1). Inspeksi Daerah Kebudayaan, jang berada dibawah Perwakilan P.D. dan K., jang didirikan tahun 1948.
- (2). Lembaga Kesenian Universitas Negeri Padjadjaran.
- (3). Kegiatan² lainnja dilingkungan Angkatan Bersendjata, Djawatan dsb.

Pada achir² ini inspeksi Daerah Kebudayaan Djawa-Barat mengembangkan kegiatannja kedaerah-daerah tingkat II.

b. *Badan Swasta.*

Terlalu banjak kiranja apabila disebutkan setjara terperintji badan² Swasta jang bergerak dalam bidang kebudayaan di Djawa-Barat, baik dalam bentuk Jajasan maupun dalam bentuk² lain jang merupakan kegiatan² diberbagai Universitas, fakultas, perhimpunan² mahasiswa extra universitas, kantor², Djawatan², Perusahaan² dsb.nja.

Menggali, memelihara dan mengembangkan kebudayaan asli daerah dan atau menggali, memelihara dan mengembangkan kebudayaan jang bertjorak nasional mendjadi pegangan dari Badan² tersebut tadi.

Olah - Raga.

1. *Olah-raga dan Kesehatan.*

Perkembangan olah-raga pada saat² revolusi fisik belum mendapat perhatian dari Pemerintah sebagaimana mestinja.

Akan tetapi walaupun demikian masjarakat Djawa-Barat sudah menja-dari manfaat olah-raga dalam bidang keschatan.

Motto, Olympiade Roma "men in corpore sano", telah mendjiwai kegiatan olah-raga dikalangan masjarakat Djawa-Barat, kegiatan ini hanjalah dilakukan dalam waktu² jang senggang sadja, dan dilakukan dengan alat² jang sederhana sadja.

Pada saat itu belum ada suatu organisasi Pemerintah jang khusus mengkoordinir kegiatan olah-raga. Pengertian olah-raga ditindjau dari sudut Politik belum terpikirkan oleh Pemerintah.

2. *Olah-Raga dan Politik.*

Prestasi olah-raga, khususnja bulu tangkis, telah dibuktikan dengan digondolnja Piala Thomas (Thomas Cup) pada tahun 1958, suatu pertanda bahwa kegiatan olah-raga di Indonesia sudah sepantasnja mendapat perhatian jang sepenuhnya dari Pemerintah.

Kemenangan jang gilang-gemilang ini mengakibatkan harkat deradjat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang terhormat dimata dunia. Pengertian olah-raga mulai dihubungkan dengan politik Pemerintah. Olah-raga adalah alat revolusi hal mana adalah wadjar karena kaum Nekolim jang sedang kita kikis, telah merembes pada organisasi² keolah-ragaan dunia.

Dengan keluarnja Indonesia dari organisasi olah-raga Internasional jang telah dikendalikan oleh kaum Nekolim, mendjadi suatu pendo-

rong bagi kita untuk segera menjelenggarakan Ganefo, beberapa tahun jang lalu dengan hasil jang sangat memuaskan. Tidak ikut sertanja Republik Indonesia pada Olympic Games di Djepang, mempunjai latar belakang politik.

3. *Olah-raga di Djawa-Barat.*

a. Organisasi:

- (1). Terbentuknja Departemen Olah-Raga di tingkat Pusat, jang terpisah dari Departemen² lainnja, dan di Djawa-Barat terbentuknja Perwakilan Departement Olah-raga disamping DORI (Dewan Olah-Raga Republik Indonesia), maka perkembangan Olah-Raga di Djawa-Barat ini mendapat perhatian khusus.
- (2). DORI jang anggauta² nja terdiri dari unsur² Pantja Tunggal ormas² dan Orpol², para olah-ragawan lainnja, mendjadi suatu organisatie tertinggi di Djawa-Barat untuk mengkoordinir dan memberikan komando untuk melakukan kegiatan² Olah-Raga.

b. *Pendidikan Olah-Raga.*

- (1). S.M.O.A. (Sekolah Menengah Olah-Raga Atas) jang asalnja SGPD.
- (2). STORA — (Sekolah Tinggi Olah-Raga) dahulu A.P.D. mendjadi bagian dari Universitas Indonesia, jang kemudian didjadikan bagian dari Unpad dengan nama Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD) jang ada dibawah naungan Departemen P.T.I.P. Akan tetapi mengingat fungsi Olah-Raga demikian pentingnja maka Pemerintah membentuklah STORA jang langsung ada dibawah naungan Departemen Olah-Raga.
- (3). Dilingkungan Angkatan Bersendjata dibentuk suatu Lembaga pendidikan khusus mengenai keolah-ragaan.

4. *Kegiatan :*

- a. Boleh dikatakan suatu tradisi bahwa pada hari² Besar misalnja; 1 MEI, 17 AGUSTUS d.l.l., selalu digiatkan pertandingan² olah-raga antar Djawatan, Kantor dsb., disamping untuk maksud memeriahkan Hari Besar djuga untuk mentjari bibit guna ditampung dalam suatu latihan Pusat. (Trainning-centre).
- b. Olah-Raga ditiap sekolah, merupakan suatu mata peladjaran wadajib.

- c. Perkembangan² Olah-Raga jang diorganisir oleh perseorangan, maupun oleh suatu badan/instansi dsb., sudah menampakkan dirinja.
- d. Sedjalan dengan Rentjana 10 tahun Pemerintah dibidang Olah-Raga di Djawa-Barat umumnja, di Bandung chususnja diselenggarakan pertandingan² antara murid² S.D., S.L.P., S.M.A. dan PMDA antara berbagai Universitas/Fakultas di Djawa-Barat.

BIDANG PENDIDIKAN.

Pandangan Umum.

Sebelum menguraikan perkembangan pendidikan di Djawa-Barat pada masa setelah tahun 1945, kiranja untuk dengan djelas dapat mengikuti kemadjuannja dengan seksama terlebih dahulu perlu diuraikan usaha² pendidikan pada zaman Pemerintahan Belanda dan Djepang.

Pada zaman pendjadjahan Belanda pada umumnja di Indonesia ada 3 matjam sekolah, baik sekolah rendah, maupun landjutannja:

1. Europese scholen jang diperuntukkan bagi anak² orang Belanda atau asing lainnja.
2. H.I.S. dan Schakel Scholen dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan diperuntukkan bagi anak² prijaji atau kaum middenstand bangsa Indonesia.
3. Sekolah desa (3 tahun) dan kelas II (5 tahun) jang pada umumnja diperuntukkan bagi rakjat djelata.

Sekolah landjutannja terdiri dari:

1. H.B.S. atau Lyceum dan sekolah menengah pendidikan vak, jang muridnja terdiri dari bangsa Belanda/Belanda Indo atau Asing lainnja.
2. Mulo, A.M.S. dan pendidikan vak dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan diperuntukkan bagi murid² bangsa Indonesia/sebagian ketjil Belanda Indo/Tiong Hoa.
3. Inlandse Normaal Scholen, ambachtscholen dan sekolah² vak lainnja, sebagai landjutan dari sekolah kelas II.

Dilapangan Perguruan Tinggi diseluruh Indonesia hanja terdapat 3 perguruan tinggi, j.i.:

1. Geneeskundige Hoge School di Djakarta.
2. Rechts Hoge School di Djakarta.
3. Technise Hoge School di Bandung.

Bahwasanja masalah pendidikan pada sebelum perang kurang mendapat perhatian, terutama dapat dilihat dari djumlah sekolah rendah dan menengah. Di Djawa-Barat H.I.S. hanja terdapat diibukota kabupaten/kota-pradja dan sekolah kelas II dikota² kewadanan/Ketjamatan, sedangkan

Mulo hanja dimiliki oleh kota² Keresidenan, ketjuali di Serang, bahkan sekolah landjutan atas hanja terdapat di Bandung dan Bogor dan itupun pada umumnja diperuntukkan bagi orang² Belanda.

Setelah Belanda bertekuk lutut kepada Djepang dalam tahun 1942, mulailah bendera matahari berkibar di Indonesia.

Sekolah² model Belanda dihapuskan. Dalam pada itu perhatian terhadap pendidikan bukan mendjadi baik, akan tetapi sebaliknya. Jang ada diseluruh Djawa-Barat hanja sekolah² rendah. Usaha² untuk mempertinggi mutu peladjaran tidak ada.

Djelaslah kiranja bahwa sistim pendidikan baik zaman pendjadjahan Belanda maupun Djepang dilaksanakan dengan maksud melatih pegawai² jang patuh terhadap pemerintah djadjahan.

Disamping itu maksud utamanja adalah menekan tingkat intelegensi bangsa Indonesia supaja tetap rendah, sehingga kebudajaannjapun tidak berkembang.

Keadaan jang demikian itu memberikan kemungkinan kepada fihak pendjadjah untuk menggali kekajaan bumi Indonesia, bagi perkembangan/kemadjuan perekonomian di Negeranja.

Perkembangan pendidikan setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Dengan ditjetuskannja Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulailah revolusi Bangsa Indonesia bergerak disegala bidang setjara simultan.

Usaha dan sistim pendidikan mulai saat itu berangsur-angsur mengalami perobahan, walaupun harus melalui rintangan² jang sukar untuk ditembus. Mulai saat inilah Djawa-Barat pun bergerak dalam pembangunan dibidang pendidikan sesuai dengan irama revolusi, jang dilaksanakannja dalam keadaan serba darurat.

Terutama sedjak tahun 1954, perkembangan serta penambahan sekolah, baik pada pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi terlihat sangat pesat.

Kalau menganalisa perkembangannja maka njatalah bahwa dalam kegiatan pendidikan di Djawa-Barat ini terlihat adanya kepintjangan. Kepintjangan dalam arti keadaan jang tidak seimbang antara pendidikan peladjaran umum dan pendidikan peladjaran kedjuruan berbanding 80 : 20.

Oleh karena pendidikan merupakan salah-satu alat revolusi maka usaha Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa-Barat, untuk mengarahkan Pendidikan kearah pembangunan, mempunjai gagasan menambah pendidikan kedjuruan untuk ditingkatkan lagi sehingga perbandingan tersebut diatas berbanding antara 60 : 40.

Selain pendidikan didalam sekolah djuga pendidikan masjarakat (diluar sekolah) mendapat perhatian sepenuhnya dari Pemerintah Daerah. Usaha² ini terutama ditudjukan kepada:

1. Pemberantasan Buta huruf.
2. Latihan Guru² P.B.H.
3. Kursus Kemasjarakatan orang Dewasa.
4. Kursus Rumah Tangga.
5. Kursus Kedjuruan Rendah.
6. Kursus Kader Masyarakat.
7. Kursus Kader Kepandaian/Olah-Raga.
8. Penjelenggaraan Perpustakaan rakyat.

Dengan di proklamirkannja Djawa-Barat Bebas Buta Huruf, maka dje-laslah bahwa Pemerintah Daerah meneropong soal pendidikan itu sangat urgent sekali. Tindakan selandjutnja adalah pada tanggal 24 Maret 1965, pada saat mana di proklamirkan Kewadajiban Beladjar bagi Daerah Djawa-Barat, halmana merupakan proklamasi Kewadajiban Beladjar jang pertama di Indonesia.

Untuk lebih dalam dapat menelaah perkembangan pendidikan di Djawa-Barat, uraian selandjutnja akan berkisar pada tindjauan masing² pendi-dikan dasar, landjutan dan perguruan tinggi serta pendidikan masja-rakat

Sekolah Dasar.

Perkembangan pendidikan dasar sedjak achir tahun 1945 sampai tahun 1955 tidak memperlihatkan gambaran jang djelas. Hal ini disebabkan karena tidak dimilikinja data² jang lengkap.

Sampai tahun 1945 usaha pendidikan pada umumnja ditudjukan kepada kepentingan pendjadjah, sedangkan dari tahun 1945 sampai tahun 1955 karena masih belum diketemukan dasar² jang kokoh bagi perkembangan selandjutnja tidak mengalami perobahan² jang berarti.

Baru pada achir tahun 1955 dimulai dengan perobahan pendidikan jang diarahkan kepada Pendidikan Nasional, dimana perasaan kebangsaan dan persatuan mulai ditanam, sedangkan semangat perdjoangan dinja-lakan.

Sekolah Dasar 3 tahun berangsur-angsur didjadikan sekolah Dasar 6 tahun, disamping didirikannja sekolah² swasta oleh Lembaga² Pendidikan Swasta. Kegiatan masyarakat dalam membantu usaha² pendidikan sangat memuas-kan, kalangan Angkatan Bersendjata mengambil bagian jang sangat besar. Selandjutnja untuk membentuk tenaga² kader Pembangunan masyarakat Desa jang serba guna, bagi penampungan anak² tamatan sekolah Dasar telah pula didirikan kelas Kesedjahteraan Masyarakat.

Sedjak tahun 1960 sekolah Dasar di Djawa-Barat, jang berada didesa-desa sebagian besar telah dilengkapi dengan tanah berupa kebun atau sawah dan tempat²/kandang² ternak.

Objek kegiatan.

Dibidang didaktik/metodik Inspeksi Pendidikan Dasar Djawa-Barat telah melantjarkan kegiatan²-nja berupa:

1. Science Teaching.
2. Metode Audio Visual.
3. Metode Global (membatja/menulis permulaan).
4. Mata peladjaran expressi.

Dengan dikeluarkannja Instruksi dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1 tahun 1959, jang terkenal dengan nama „Sapta Usaha Tama”, kegiatan dalam memperkembangkan kebudayaan dan olah-raga lebih meningkat.

Disamping itu disekolah-sekolah dasar diselenggarakan usaha „Wadajib Tabung” dalam hal mana setiap anak sekolah diwadajibkan menabung sebesar Rp. 1,— sebulan, dengan uang tabungan mana kemudian diusahakan kebutuhan murid, seperti alat tulis dll., oleh Jajasan Tabungan Murid² Sekolah Dasar, jang bagi Djawa-Barat pusatnja berkedudukan di Bandung. Pada setiap sekolah djuga diadakan koperasi dan warung sekolah, jang pelaksanaannja diserahkan kepada para murid sendiri.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat No. 74/BI/BPD/SK/65 tanggal 4 Mei 1965 sedjak awal tahun peladjaran 1965/1966 disekolah² dasar di Djawa-Barat dimulai dengan tabungan terpinpin, jang berdjumlah Rp. 1000,—/tiap tahun dan dipungut dalam 10 angsuran.

Usaha ini sebagai permulaan dilaksanakan disekolah-sekolah dasar ditiap-tiap ibu kota Kabupaten dan Kotapradja.

Hasil pekerdjaan jang ditjapai.

Setelah Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954, tentang pelaksanaan Kewadajiban Beladjar, diselenggarakan, maka penampungan anak² di sekolah² Dasar di Djawa-Barat meningkat sampai 2.664.083 orang anak, sedang sisa jang belum masuk sekolah menurun hingga 136.000 orang anak.

Banjaknja sekolah dasar dalam tahun 1945 hanja 1556 buah dan terbagi atas 80 wilajah Penilik Sekolah. Pada tahun 1965 djumlah tersebut meningkat sampai 7136 buah dibawah pengawasan 269 wilajah Penilik Sekolah.

Untuk lebih djelasnja lagi dibawah ini disadjikan perangkaan perkembangan Sekolah Dasar sebagai berikut:

**PERKEMBANGAN SEKOLAH DASAR (S.D.) DAERAH TINGKAT I
DJAWA-BARAT TAHUN 1945 — TAHUN 1965.**

No. urut	Uraian & Tarich	Djumlah S. D.				Djumlah Ruangan				Djumlah Guru			Djumlah murid
		Pem.	Swas- ta	Djum.	Pem.	Swas- ta	Djum.	Pem.	Swas- ta	Djum.			
1.	<i>Tabun 1945</i> (Masa Permulaan Revolusi Kemerdekaan R.I.).	1556	—	1556	4081	—	4081	6672	—	6672	—	6672	358.000
2.	<i>Tabun 1952</i> (Permulaan Penjerahan we- wenang pengurusan SD. ke- pada DT. I)	3548	123	3547	11845	6593	18439	17444	615	18059	615	18059	1.015.000
3.	<i>Tabun 1955</i> (Achir periode survival Re- volution mulai meningkatnja gangguan keamanan).	4040	130	4170	16050	6444	22494	20486	645	21131	645	21131	1.379.512
4.	<i>Tabun 1959</i> (Dekrit Presiden/Keluarnja Instruksi Menteri PDK No.1)	4937	155	5092	20615	6647	27289	44579	690	45269	690	45269	1.558.448
5.	<i>Tabun 1965</i> (Dimulainja Pelaksanaan KB. di Djabar tahun pelajaran 1964/1965).	7028	313	7341	25125	7287	32410	46405	1770	48175	1770	48175	2.306.146

Keterangan:

- a). Umumnja Guru SD. Swasta adalah merangkap mendjadi guru SD. Negeri dengan tjara mengadjar pagi-sore.
- b). Djumlah murid ini tidak termasuk murid² Madrasah Wadajib Beladjar jang diurus oleh Departemen Agama.
- c). Gangguan keamanan menghambat usaha² Pend. Dalam tahun 1955 sadsja ada 36 bangunan SD. jang dibakar gerombolan — 17 SD ditutup — 5 orang guru dibunuh dan 28 orang digarong harta bendanja.
- d). Sementara ruangan² sekolah belum mentjukupi maka penjelenggara SD. dilakukan pagi + siang, bahkan di Kopra. Bandung didjalkan 3 ploeg.

4. Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65/1951, maka tugas Pendidikan Dasar berada dibawah pimpinan Djawatan P.D.K. sebagai aparatuur Pemerintah Daerah Tingkat I dan I.P.D.A.P. selaku aparatuur Pemerintah Pusat.

Untuk mengisi kelas jang telah ada setjara routine (klas I s/d kelas VI Sekolah Dasar Negeri) terdapat kekurangan guru sedjumlah 19.448 orang.

Kekurangan ini dapat diatasi dengan djalan mengadakan formasi guru dan kelas darurat (guru merangkap kelas I/II, tiap kelas maximaal 50 murid dsb).

Dengan tjara demikian djumlah kekurangan guru dapat diturunkan sampai 6.073 orang.

S.M.P.

Dalam periode Revolusi fisik (1945 — 1950).

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Djawa-Barat hanja ada beberapa S.M.P. sadsja, sebagai kelandjutan dari Tsugakko pada djaman pendudukan Djepang.

Pada djaman pemerintahan Belanda sementara pada tahun 1948 — 1950, S.M.P. dirobah mendjadi M.S. (middelbare school) dan masa beladjar dari 3 tahun mendjadi 4 tahun. Curriculum terdiri dari mata peladjaran² jang diberikan kepada M.U.L.O. pada djaman sebelum perang dengan perbedaan bahasa pengantar yakni bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Belanda didjadikan bahasa asing pertama.

Murid²nja terdiri dari murid² jang ditampung dari bekas Tsugakko dan murid² lulusan Sekolah Rakjat 5 — 6 tahun, sedangkan guru² pengadjaranja terdiri dari guru² bekas klas M s/schakelschool.

Disamping M.S.² negeri ini, pihak swastapun di-kota² besar mendirikan pula MS²Swasta jang diselenggarakan oleh Jajasan² dan organisasi² se-

perti Katholik, Protestan, Pasundan, Muhammadiyah dsb., sebagai kelanjutan dari usaha²nja pada djaman Belanda dulu.

Udjian penghabisan merupakan udjian sekolah dan terdiri dari bagian³ A, B dan C.

Dalam periode Survival (1950 — 1955).

Dalam periode ini pertumbuhan S.M.P. menunjukkan kemadjuan jang pesat, hingga pada tahun 1955 djumlah S.M.P. Negeri mendjadi 41 buah dan djumlah S.M.P.³ subsidi/bantuan/Swasta kira² sebanjak 20 buah.

Djuga S.M.P. mulai menjebat dari ibu kota — ibu kota Kabupaten ke kota² Kewedanan. Sedjak tahun 1950 S.M.P. mengalami perobahan, jaitu masa beladjar jang tadinja 4 tahun mendjadi 3 tahun sedangkan curriculum ikut dirobah, djumlah peladjaran ditambah dan bahasa Belanda dihilangkan. Kekurangan tenaga pengadjar, dapat dipenuhi oleh tenaga² baru, jaitu lulusan „Kweekschool Nieuwe Styl”, S.G.A. dan S.G.P.D. bahkan ada pula lulusan² dari S.M.A.

Murid² jang diterima terdiri dari murid² lulusan udjian masuk S.L.P. Negeri.

Disamping S.M.P.² jang sudah ada baik Negeri, subsidi, bantuan maupun Swasta, oleh Jajasan² atau organisasi², lembaga² jang berlandaskan Agama, Nasional dll. didirikan sekolah² jang baru.

Udjian penghabisan diselenggarakan oleh Pusat dan merupakan udjian negara dan terdiri dari bagian A. dan B.

Dalam periode investment (1955 — 1960).

Pada periode ini djumlah S.M.P. terus menunjukkan kemadjuan jang sehingga djumlahnja bertambah mendjadi 2 kali lipat. Di kota² Kewedanan didirikan S.M.P.³ baru atau filial dari S.M.P. induk jang berada di ibu kota Kabupaten.

Masa beladjar tidak mengalami perubahan dan curriculum disempurnakan. Tambahan sekolah jang begitu pesat hanjalah mungkin tertjapai dengan adanya bantuan jang besar dari pihak masjarakat sendiri. Para P.O.M. dan pemerintah Daerah setempat setjara gotong-rojong mendirikan sekolah baru. Untuk tenaga pengadjar selain jang sudah ada, diambil pula pengadjar² lulusan P.G.S.L.P. dan kursus BI.

Udjian penghabisan masih tetap udjian negara hanja penjelenggaraan dan penjusunan bahan udjian diserahkan kepada Daerah masing³ d.h.i. Inspeksi S.M.P. Daerah Djawa-Barat.

Dalam periode machkotanja Pantjasila. (1960 — 1965).

S.M.P. makin tersebar keseluruh wilayah sampai di kota² Ketjamatan, bahkan sampai di beberapa desa. Angka² dibawah ini menunjukkan bagaimana besarnya djumlah S.M.P. pada periode ini.

S.M.P. negeri berstatus induk	158 buah
S.M.P. negeri filical	53 buah
S.M.P. subsidi	20 buah
S.M.P. bantuan	10 buah
S.M.P. Swasta	479 buah.

Mulai tahun peladjaran 1962/1963 dibuka S.M.P. Gaja Baru sebagai pelaksanaan dari Pantjawardana.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pengadjar, diambil pula tenaga pengadjar jang disalurkan dari S.G.B.² jang ditutup dan tenaga² lulusan T.K.P./K.I.P. Udjian penghabisan sedjak tahun peladjaran 1962 — 1963 hanja ada satu matjam idjazah S.M.P. sadja, dengan dihapusnja bagian² A dan B. Disamping idjazah diberikan djuga sertipikat mengenai mata-peladjaran² pelengkap.

S.M.A.

Pada umumnja perkembangan S.M.A. tidak berbeda djauh dari perkembangan S.M.P.

Dalam periode Revolusi fisik (1945 — 1950).

Sesudah R.I. diproklamirkan pada tahun 1945 S.M.T. (Sekolah Menengah Tinggi) bikinan Djepang berubah mendjadi S.M.A.

Dengan adanja perlawanan fisik dari rakjat Indonesia terhadap Belanda, S.M.A. selalu berpindah-pindah dari satu ke lain tempat, sedangkan murid²nja banjak jang ikut berdjuaug mempertahankan tanah air.

Pada djaman pendudukan Belanda di negara Pasundan didirikan 2 matjam sekolah menengah, jaitu:

1. V.H.O. (Voorbereidend Hoger Onderwijs) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Masa beladjar lamanja 2 tahun sesudah S.M.P.
2. S.M.A. dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Masa beladjar lamanja 3 tahun sesudah S.M.P.

Dalam periode Survival (1950 — 1955).

Dengan kembalinja pemerintah R.I. sekolah V.H.O. dihapuskan dan tinggal S.M.A., jang sampai tahun 1962 terbagi dalam 3 bagian:

1. Bagian A = Bahasa dan Sastra
2. Bagian B = Ilmu Pasti dan Alam
3. Bagian C = Ekonomi.

Dalam periode investment sampai kini (1955 — 1965).

Pada tahun 1962 S.M.A. mengalami perubahan dengan dibentuknja S.M.A. Gaja Baru; mulai kl. 2 diadakan seleksi dan murid² dibagi-bagi menurut kemampuan dan bakatnja dalam 4 bagian:

1. Bagian A = Sastra dan Budaya
2. Bagian B = Sosial Ekonomi
3. Bagian C = Ilmu Pasti dan Alam
4. Bagian D = Ilmu Pasti.

Dibawah ini tertjantum angka² jang menundjukkan kemadjuan S.M.A. pada tahun² jang lampau.

<i>Tahun pelajaran</i>	<i>Sekolah</i>	<i>Guru</i>	<i>Murid</i>
1958 — 1959	50	1.015	17.051
1959 — 1960	75	1.215	17.305
1960 — 1961	110	1.249	14.305
1962 — 1963	125	1.024	13.417
1963 — 1964	83	2.745	26.729

Keterangan: termasuk S.M.A.² Swasta.

Pendidikan Kedjuruan.

(1). Pendidikan Guru.

Pada permulaan tahun revolusi 1945, terdapat pendidikan guru sebagai kelanjutan sekolah² Pemerintah Djepang.

Pada waktu Negara Pasundan dalam permulaan kursus tahun 1949 dibuka Normaalschool 4 tahun di Tjitjalengka dan Djakarta, sekedar untuk menjukupi kebutuhan akan tenaga pengadjar.

Kemudian disusul dengan pendirian Sekolah Guru 6 tahun (3 tahun diatas S.M.P.), jang terkenal dengan nama Kweekschool Nieuwe Stijl.

Hampir ditiap kabupaten didirikan sekolah Guru 2 tahun jang disebut O.V.V.O.

Sekolah² tersebut diatas dalam periode Negara Republik Indonesia Serikat sifatnja berubah sebagai berikut:

- a). Kweekschool Nieuwe Stijl dijadikan S.G.A.
- b). Normaalschool berubah menjadi S.G.B.
- c). O.V.V.O. dihapuskan, dan para peladjar² dimasukkan ke S.G.B. jang terdekat.

Disampingnja diusahakan pula upgrading para guru dilingkungannya masing² kursus² keguruan antara lain:

— K.L.P. S.G.A. untuk mentjapai deradjat guru berwewenang S.G.A.

— K.L.P. S.G.B. untuk memperoleh deradjat guru berwewenang S.G.B.

Pada tanggal 1 Agustus 1958 S.G.B. mulai dihapuskan dan diubah sebagian menjadi S.G.A. dan sebagian lagi diilandjutkan menjadi S.M.P.

Untuk menghindarkan adanya:

- a). Ketjanggungan kedudukan peladjar² lulusan S..T.K. dalam wewenang dan penilaian kedudukannya.

- b). Kesulitan dalam penempatan tenaga pengadjar pada sekolah² jang kekurangan guru,
- c). Kekurangan guru dalam pelaksanaan Kewadajiban beladjar, -- -- --
maka dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan R.I. No. 70/1964 tanggal 21-7-1964, telah diadakan integrasi antara S.G.A. dan S.G.T.K. kedalam S.P.G. (Sekolah Pendidikan Guru) dan pembukaan S.P.G. — CI dan S.P.G. — CII.

2. *Objek kegiatan.*

Pada umumnya politik pendidikan selalu bertalian erat dengan politik Pemerintah.

Djika dalam waktu pendjadjahan peladjaran² jang diberikan itu berkenaan menanamkan rasa rendah diri pada para peladjar, maka pada waktu sekarang ini dasar pendidikan diarahkan kepada memupuk harga diri dan tanggung-djawab sebagai bangsa jang Merdeka berazaskan Pantjasila dan bersendikan Nasional-Demokratis.

Achirnja pendidikan Guru diselenggarakan dengan penuh kesadaran untuk membentuk para guru jang sanggup bertugas membentuk bangsa Indonesia Pantjasila.

Untuk mentjapai tudjuan ini, senantiasa diusahakan penjelenggaraan, perbaikan dan peninggian mutu guru setjara continue.

Bagi para guru jang bertempat tinggal dipeloksok-peloksok dikirimkan setiap minggu Himpunan Peladjaran dari Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru Bandung untuk menetapkan aliran² baru dalam Ilmu keguruan dan istilah² Indonesia, sebagai pengganti istilah² bahasa Belanda.

Sebagai pilot projek untuk mengadakan hubungan sekolah dan masyarakat ditundjuknja S.G.B. Sumedang dan Tasikmalaja.

Tudjuan Pemerintah pada waktu sekarang ini adalah memperoleh guru² sekolah Dasar jang harus bersendikan S.G.A.

Untuk upgrading para guru jang beridjazah S.G.B., telah didirikan Guru A (K.G.A./Negeri). Sebagai pilot projek S.G.A. ditetapkan S.G.A. Sumedang dan S.G.A. Tambun, dimana S.G.A. jang pertama itu telah mengadakan pertjobaan dalam metode progressief, sedangkan S.G.A. Tambun menjelenggarakan pengintegrasian antara sekolah dengan masyarakat. (Selandjutnja lihat daftar² statistik).

Pendidikan Kewanitaan.

Pendidikan kewanitaan senantiasa mendapat perhatian penuh dari masyarakat maupun dari Pemerintah.

Seleksi dan adoptasi dengan pendidikan kewanitaan jang berlaku diluar Negeri terus dilaksanakan dengan mengingat pula adanya kondisi² sosial

**Keadaan Sekolah Guru di
Djawa-Barat pada tahun 1960 s/d 1965.**

TAHUN	NAMA SEKOLAH	Banjarknja Sekolah					Keterangan
		Negeri	Subsidi	Bantuan	Swasta	Djum.	
1960	SGB	76	—	—	—	76	
	SGA	18	3	—	—	23	
	SGTK	1	1	—	1	3	
	PSGB	5	—	—	—	5	
	KGA	10	—	—	21	31	
1961	SGB	51	—	—	—	51	
	SGA	18	3	—	2	23	
	SGTK	1	1	—	1	3	
	PSGB	5	—	—	—	5	
	KGA	10	—	—	21	31	
1962	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	19	3	—	2	24	
	SGTK	1	1	—	2	4	
	PSGB	5	—	—	—	5	
	KGA	12	—	—	26	38	
1963	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	19	3	—	1	23	
	SGTK	1	1	—	1	3	
	PSGB	5	—	—	—	5	
	KGA	15	—	—	19	34	
1964	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	19	3	—	1	23	
	SGTK	1	1	1	2	5	
	PSGB	5	—	—	—	5	
	KGA	16	—	—	19	35	
1965	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	20	4	1	2	27	
	SPG	—	—	—	—	—	
	PSGB	5	—	—	—	—	
	KGA	16	—	—	19	35	

Keadaan Murid Sekolah Guru di
Jawa-Barat pada tahun 1960 s/d 1965

TAHUN	NAMA SEKOLAH	Banjaknja Murid					Keterangan
		Negeri	Subsidi	Bantuan	Swasta	Djum.	
1960	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	2273	277	—	—	2550	
	SGTK	198	—	—	—	198	
	PSGB	—	—	—	—	—	
	KGA	1121	—	—	1684	2805	
1961	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	3292	283	—	—	3575	
	SGTK	184	191	—	61	436	
	PSGB	—	—	—	—	—	
	KGA	1121	—	—	1684	2805	
1962	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	3400	199	—	—	3599	
	SGTK	135	263	—	—	398	
	PSGB	—	—	—	—	—	
	KGA	1775	—	—	1675	3450	
1963	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	3313	160	—	93	3566	
	SGTK	127	263	—	83	473	
	PSGB	—	—	—	—	—	
	KGA	2403	—	—	1259	3662	
1964	SGB	—	—	—	—	—	
	SGA	3802	167	—	138	4107	
	SGTK	171	215	215	145	746	
	PSGB	—	—	—	—	—	
	KGA	2378	—	—	1893	4271	
1965	SGB	—	—	—	—	—	
	SPG	4223	189	197	269	4878	
	PSGB	—	—	—	—	—	
	KGA	2750	—	—	1193	3943	

jang berlaku di Indonesia, jang achirnja membawa tjorak dan gaja baru dalam lapangan pendidikan kewanitaan di Indonesia sendiri.

Adapun perkembangannja dari masa ke masa dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada permulaan tahun 1945 Pemerintah mulai mendirikan Sekolah Kepandaian *Gadis* (S.K.G.) 3 tahun kemudian diberi nama Sekolah Kepandaian *Putri* (S.K.P.).

Untuk memperoleh guru vak (kedjuruan) S.K.P. tersebut diatas, didirikannya di Djakarta Opleidingschool voor vakonderwijzeressen (OSVO) jang kemudian dirubah mendjadi Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP). Achirnja SKP jang telah ada dirubah djuga mendjadi SKP. 4 tahun dengan penambahan beberapa djurusan kedjuruan.

Bagi para pengadjar S.K.P. jang tidak mempunjai wewenang mengadjar pada S.K.P. telah dibuka Kursus tertulis Persamaan SGKP jang dewasa ini telah ditutup sementara.

S.G.K.P. setjara berangsur-angsur dihapuskan untuk dirubah lagi mendjadi sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) dimana para peladjar dapat melanjutkan peladjarannya ke I.K.I.P. djurusan Home Economies.

S.K.P. 4 tahun pun kemudian berubah mendjadi sekolah Kesedjahteraan Keluarga Pertama (S.K.K.P.) jang memberikan kemungkinan melanjutkan sekolah ke S.K.K.A.

Kursus B.I. Pendidikan Kepandaian Putri (B.I P.K.P.) jang pernah didirikan di Djakarta pada permulaan tahun 1951 achirnja diintegrasikan djuga ke I.K.I.P. djurusan Home Economies.

Objek Kegiatan.

Pada bulan Desember 1964 di Bogor telah diselenggarakan Pusat Latihan Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga (BLPKK), dimana pendidikannya ditudjukan kepada perwujudan „Keluarga Sedjahtera” jang mendjadi sendi masjarakat.

Di Bandung telah pula diadakan latihan kerdja (Workshop) selama 5 hari dengan maksud mempertinggi ketrampilan dalam bidang Keradjinan Tangan bagi para guru SLP/SLA dibawah pimpinan tenaga² ahli jang telah kembali dari tugas beladjarnya di Djepang.

Perkembangan selanjutnja dapat dilihat dari daftar keadaan dibawah ini: (lihat halaman 195).

Organisasi.

Pendidikan Kewanitaan berada dibawah pengawasan Inspeksi Pendidikan Wanita Daerah (IPWD) jang bernaung dibawah Inspeksi Pusat Pendi-

Keadaan S.K.P. Negeri/Subs./Bantuan/Swasta di Djawa-Barat.

TAHUN	B A N J A K N J A					
	Sekolah	Murid	Guru	Pegawai	Pengikut udjian	Hasil udjian
1958/1959	20	3025	216	—	—	—
1959/1960	25	3716	223	—	435	398
1960/1961	29	4258	261	—	556	487
1961/1962	32	4094	263	113	654	553
1962/1963	30	4595	302	117	663	598
1963/1964	32	4795	312	124	733	558
1964/1965	----- Angka ^a belum lengkap -----					

Daftar Keadaan SGKP/SKKA. NEGERI/SUBSIDI/BANTUAN/ SWASTA/DJABAR.

TAHUN	B A N J A K N J A					
	Sekolah	Murid	Guru	Pegawai	Pengikut udjian	Hasil udjian
1958/1959	2	340	50	*)	—	—
1959/1960	2	412	70	*)	—	—
1960/1961	4	420	80	*)	—	—
1961/1962	5	658	115	—	—	—
1962/1963	6	228	150	—	52	39
1963/1964	7	353	126	20	85	54
1964/1965	9	350	142	14	---	—

dikan Wanita (IPPW) Djakarta jang kemudian namanja berubah mendjadi Urusan Pendidikan Kedjuruan Kewanitaan (UPKK) dengan tjabangnja Inspeksi Daerah Pendidikan Kewanitaan (IDPK). Achirnja mengalami lagi reorganisasi dengan sebutan Inspektorat Pendidikan Kedjuruan Kesedjahteraan Keluarga dan Kedjuruan Kewanitaan (IPKS) dibawah Direktorat Pendidikan Kedjuruan Departemen P.D.K.

Pendidikan teknik teknologi.

Pendidikan teknik dimulai tahun 1853 di Surabaja jang diselenggarakan oleh fihak Swasta. Pada tahun 1901, Pemerintah membuka sekolahnja jang pertama di Dja-

*) data^a belum masuk.

karta dengan nama Koningin Wilhelmina School (KWS) jang kemudian disusulnja dengan sekolah jang serupa diantaranya:

- a. Di Surabaya jang diberi nama Koningin Emma School (KES).
- b. Di Jogjakarta jang bernama Prinses Juliana School (PJS).
- c. Di Bandung Technische School.

Disampingnja telah didirikan pula Ambachtschool dan Ambachtsleergang 2 tahun bagi lulusan HIS dan Vervolgschool.

Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950 semua sekolah teknik bentuk Federal (Belanda) dirobah dan disesuaikan dengan sekolah teknik Pertama dan Menengah R.I.

Pembukaan sekolah terus menerus diselenggarakan, dimana sekolah Pertukangan dirubah menjadi sekolah Teknik Pertama untuk kemudian dijadikan pula sekolah Kerajinan tangan; tujuan mendidik anak lulusan sekolah Dasar untuk memasuki lapangan industri ringan dan industri rumah tangga.

Ahirnja sekolah Kerajinan tersebut disalurkan kembali kedalam Sekolah Teknik setjara menjeluruh menuju pada pelaksanaan idee Dr. Prijono. Para siswa dari sekolah jang kurang lengkap peralatannja, ditampung dalam sebuah training-centre, dimana kepada mereka diberikan didikan tambahan, untuk memperoleh keahlian guna terdjun kedalam industri.

Objek² kegiatan.

Djumlah sekolah teknik di Djawa-Barat hingga sekarang ada 50 buah. Untuk dapat melaksanakan idee pendidikan setjara bertingkat (Kas Kade), kini telah terhimpun 5 buah mesin di sekolah Teknik Tjiliwung Bandung. Dalam pembangunan training-centre ini selalu diadakan kerdja sama jang erat dengan pentjipta idee-nja Prof. Dr. Ir. Hong Djie dari I.T.B. Bandung. Selama dua tahun ahir ini telah dapat didatangkan dari Djakarta alat² dan mesin seberat 40 ton.

Pembangunan ruangan² baru bagi S.T. telah dilaksanakan dibeberapa tempat di Djawa-Barat.

Pada permulaan tahun 1965 Menteri P.D.K. telah menugaskan kepada Direktorat Pendidikan Teknologi untuk membuka beberapa sekolah teknologi djurusan pertanian, perikanan dan peternakan, jang kini tengah menghubungi Kepala Daerah tertentu diantaranya dari Sumedang, Bogor, Subang dan Garut bagi keperluan termaksud.

Organisasi.

Pendidikan teknologi diawasi oleh Inspeksi Daerah. Pendidikan Teknologi jang setjara administratif bergabung dengan Kantor Perwakilan Departemen P.D.K. dan setjara teknis kepada Direktorat Pendidikan Teknologi Departemen P.D.K. Djakarta.

Pendidikan Ekonomi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Djawa-Barat hanya terdapat sebuah sekolah Dagang jang semula disebut Klein Handelschool, kemudian diberi nama Sekolah Dagang Negeri.

Untuk mengedjar ketinggalan akan tenaga ekonomi nasional dan sebagai pengisian kekosongan jang disebabkan oleh perginja tenaga² asing ditingkatkan perekonomian, maka segera dibuka sekolah Dagang Negeri dibeberapa kota.

Dalam tahun 1950 dibukalah sekolah Ekonomi Menengah (SEM) jang pertama di Bandung.

Sewaktu periode Survival dimulai dengan usaha² kearah konsolidasi, penjempurnaan dan pengisian rentjana peladjaran.

Sekolah Dagang Negeri (SDN) dan Sekolah Ekonomi Menengah (SEM) diintegrasikan dan diubah mendjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (SMEP) dan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA). Pada permulaan tahun 1955 S.M.E.P. dan S.M.E.A. makin dikenal oleh chalajak ramai sebagai sekolah kedjuruan jang berfaedah dan berguna bagi masjarakat.

Achirnja dalam tahun 1959 permintaan pembukaan S.M.E.P. dan S.M.E.A. tidak dapat dilajani semuanya berhubung dengan kesukaran² gedung dan alat² peladjaran.

Objek kegiatan.

Dengan bimbingan Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi, S.M.E.P. dan S.M.E.A. selalu berusaha menjesuaikan diri dengan kebutuhan Negara dan Daerah lingkungan pengaruhnja kearah tertjapainja masjarakat Indonesia jang adil dan makmur.

Peladjar² dididik untuk mendjadi pengusaha² dan karyawan² Nasional. Kerdja sama dengan masjarakat, badan² perekonomian, instansi² Pemerintah dan fihak lain, senantiasa dipelihara dengan baik.

Tidak berkelebihan kiranja, djika dikemukakan disini bahwa hampir ditiap kantor Pemerintah/Swasta dan perusahaan Negara/Swasta di Djawa-Barat sekarang telah banjak abiturient²/S.M.E.P. dan S.M.E.A. sebagai karjawan.

Kesempatan belajar ke Akademi dan Perguruan Tinggi terbuka luas bagi lulusan S.M.E.A. atas dasar prinsip demokratisering dari Pendidikan pada umumnya.

Pihak jang telah mengetahui serba-gunanja lulusan SMEP/SMEA mempergunakannya kesempatan itu untuk mempekerdjakan mereka.

Hasil usaha jang telah ditjapai adalah sebagai berikut:

Hasil usaha jang ditjapai.

TAHUN	Djumlah Sekolah Ekonomi						Idjazah jang dikeluarkan		
	S.M.E.P.			S.M.E.A.					
	Neg.	Sw.	Djml.	Neg.	Sw.	Djml.	SMEP	SMEA	Djml.
1945	1	---	1	—	—	—	—	—	---
1946	..	..	..	—	—	—		—	
1947	..	..	..	—	—	—		—	
1948	..	..	..	—	—	—		—	
1949	..	..	..	—	—	—		—	
1950	7	1	8	1	—	1		—	..
1951	9	1	10	1	..	..		—	
1952	10	1	11	1	..	..			
1953	10	1	11	1	..	..			
1954	10	1	11	1	..	..			
1955	10	3	13	1	..	..			
1956	14	3	17	1	..	..			
1957	14	3	17	1	..	..			
1958	15	3	18	1	..	..		..	
1959	17	3	20	2	5	7	1268	324	1592
1960	19	6	25	4	4	8	1348	1012	2360
1961	20	10	30	4	5	9	1472	1144	2616
1962	21	14	35	6	5	11	1664	1496	3160
1963	22	13	35	7	6	13	1743	2298	4041
1964	22	6	28	8	9	17			

Organisasi.

Setjara administratif Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi (IDPE) termasuk urusan Perwakilan Departemen P.D.K. Djawa-Barat, sedang setjara tehnik berada langsung dibawah pengawasan Inspektorat Pendidikan Ekonomi dan Direktorat Pendidikan kedjuruan Djakarta.

Tugas utama adalah membimbing dan mengawasi peladjaran/pendidikan di S.M.E.P./S.M.E.A. Negeri dan Swasta di Djawa-Barat.

Pada tahun 1952 Inspeksi Daerah terbagi atas:

- Daerah I berpusat di Bandung dengan wilayah jang meliputi Djawa-Barat, Djakarta Raya, sebagian dari Djawa-Tengah sampai garis Jogja, Magelang, Pekalongan dan Sumatra seluruhnja.
- Daerah II jang terdiri dari bagian jang tidak termasuk daerah I.

Dalam tahun 1958 daerah Pendidikan Ekonomi disesuaikan dengan batas²

Daerah Tingkat I dan sedjak tahun 1959 wilayah I.D.P.E. Djawa-Barat khusus hanya meliputi Djawa-Barat sadja.

V. Pendidikan (Kursus²/Kedjuruan).

1. Pembentukan dan pembinaan kursus² Kedjuruan di Djawa-Barat adalah suatu usaha jang baru untuk menambah tenaga² jang terlatih dan mempunjai ketrampilan dalam bidang administrasi. Pada umumnja penjelenggaraan kursus² tersebut memperlihatkan kemadjuan jang pesat ditindjau dari segi kwantitas maupun dari segi kwalitas.

2. *Objek² kegiatan.*

Kursus² dinas jang berada dalam pengawasan dan pembinaan Inspeksi Daerah.

4 kursus Pegawai Administrasi Tingkat Pertama (KPA)

4 kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA)

1 kursus Karjawan Perusahaan Tingkat Pertama (KKP)

1 kursus Karjawan Perusahaan Tingkat Atas (KKPA)

1 kursus Administrasi Negeri (A.A.N.)

Sebanjak 6 buah kursus² Dagang Tingkat Pertama (KDP) jang pengawasannja diserahkan kepada Urusan Kursus² Kedjuruan telah dirubah mendjadi Kursus Karjawan Perusahaan Tingkat Pertama (KKP).

Ahirnja karena djumlah peladjar dan kebutuhan lainnja tidak seimbang lagi, maka KKP jang terus berdiri hanya di Bandung sadja.

Penertiban dan pembinaan kursus² Swasta telah dilaksanakan dengan djalan menjelenggarakan pendaftaran.

Setiap matjam kursus telah tergabung dalam suatu organisasi sebagai berikut:

a. PERKUBISI untuk Perhimpunan Kursus² Bahasa Inggris seluruh Indonesia.

b. PERKASMI untuk Perhimpunan Kursus² Steno dan Mengetik.

c. PERKUTEKSI untuk Perhimpunan Kursus² Tekstil.

Untuk mendjamin mutu idjazah jang dikeluarkan oleh kursus² tersebut idjazah itu terlebih dahulu disjahkan oleh Inspeksi Kursus² Kedjuruan Djakarta jang menjusun pula bahan² udjian dan melakukan pemeriksaan pekerdjaan udjian setjara sentraal.

Udjian² Kursus Negeri Gaja Baru kini telah memberikan hasil sebagai berikut:

K.P.A. — 448 orang tamatan.

K.P.A.A. — 336 orang tamatan.

Karena KKP, KKPA dan AAN belum lama dibuka, hasilnjapun belum ada djuga.

Sekedar untuk memberikan gambaran hasil² kegiatan jang telah diperolehnja dibawah ini ditjantumkan djumlah kelas dan peladjar² kursus² Dinas, keadaan bulan April 1955.

N a m a K u r s u s	Djumlah kelas	Djumlah Peladjar
K.P.A.	13	478 siswa
K.P.A.A.	13	469 siswa
KKP.	4	116 siswa
K.K.P.A.	4	172 siswa
A.A.N.	6	210 siswa

3. Untuk menertibkan kursus² swasta, kini sedang diusahakan pembentukan Organisasi² Kursus Sedjenis (O.K.S.).

Mulai tahun kursus 1964/1965 djumlah organisasi kursus sedjenis bagi Kursus² Swasta direntjanakan penambahan „Kursus² Kedjuruan Negara” jang meliputi:

- 1). Golongan Kursus² umum (SMP, SMA. dsb.).
- 2). Golongan Kursus² Kewanitaan/Keradjinan (Djahit-mendjahit, masak-memasak, menghias dsb).
- 3). Golongan Kursus Bahasa Timur dan Barat (Indonesia, Djepang, Tionghoa, Inggris, Belanda, Spanjol dsb.).
- 4). Golongan Kursus Niaga (Tata Buku, Korespondensi, Steno, Mengetik dsb.).
- 5). Golongan Kursus² lain (Perindustrian, Keradjinan dsb.).



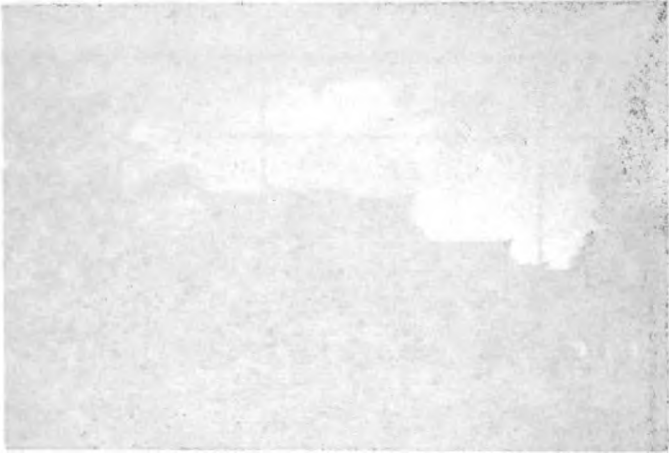
Foto P.a.f.

I.T.B.



Foto P.a.f.

I.K.I.P.



PERGURUAN TINGGI

Sebagaimana tadi telah dikemukakan diatas, pada sebelum perang di Djawa Barat hanya terdapat satu perguruan tinggi jaitu Technische Hoge School di Bandung (didirikan tahun 1921) yang menghasilkan para insinjur-teknik untuk seluruh Indonesia. Pada sekolah inilah P.J.M. Presiden „Pemimpin Besar Revolusi” mendapat pendidikannya sebagai insinjur sipil.

Pada sebelum perang djumlah mahasiswa berkisar pada l.k. 100 orang. Dari djumlah tersebut hanya sedikit mahasiswa bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Djepang sekolah ini pernah ditutup.

Pada zaman Federal sekolah tinggi tersebut dibuka kembali sebagai fakultas teknik dari Universitas Indonesia yang berkedudukan di Djakarta. Sedjak tahun 1950 perkembangan fakultas ini nampak sangat djelas. Pelajarannya ditambah dengan beberapa djurusan.

I.T.B.

Dalam tahun 1959 Fakultas tersebut dirobah mendjadi „Institut Teknologi Bandung” dan merupakan institut yang berdiri sendiri (lepas dari Universitas Indonesia) dengan departemen² sebagai berikut :

1. Departemen Ilmu Pasti & Ilmu Alam.
2. Departemen Teknik sipil
3. Departemen Perentjanaan & Seni Rupa.
4. Departemen Mesin dan Elektro.
5. Departemen Fisika Teknik dan Kimia Teknik.
6. Departemen Kimia dan Biologi.
7. Departemen Teknologi Mineral.

Dilihat dari sudut pertumbuhannya/penambahan mahasiswa sangat pesat. Djumlahnya pada saat ini adalah 4.594 orang.

Universitas Negeri Padjadjaran.

Universitas ini didirikan pada tahun 1957 sebagai kelandjutan dari universitas Swasta Merdeka, dengan fakultas² sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum & Peng. Masjarakat.
2. Fakultas Ekonomi.
3. Fakultas Kedokteran.
4. Fakultas Kedokteran Gigi.
5. Fakultas Ilmu Pasti & Peng. Alam.
6. Fakultas Sospol.
7. Fakultas Pertanian.
8. Fakultas Peternakan.
9. Fakultas Sastra.

10. Fakultas Djurnalistik & Publisistik.

11. Fakultas Psychologi.

Djuga pada universitas ini terlihat sekali arus permohonan untuk mendjadi mahasiswa.

Disamping perguruan² tinggi tersebut telah pula didirikan di Bandung pada tahun 1955 Universitas Katholik Parahijangan, jang disusul dengan universitas² Swasta lainnja, sebagaimana tertera dalam daftar dibawah ini.

DAFTAR UNIVERSITAS/PERGURUAN TINGGI

No. urut	Nama Universitas	Djumlah M.	Djumlah D.	Djumlah A.1.	Djumlah Fak/F. Djur.	A l a m a t	Status	Tahun didirikan
1.	Universitas Padjadjaran	11503	772	450	11	Dj. Dipati-ukur 57	Negeri	1957
2.	Universitas Katholik Parahyangan	4240	196	119	4	„ Merdeka	Dipersamakan	1955
3.	Universitas Nahdatul 'Ulama	700	79	—	2	„ Halimun 37	idem	1958
4.	Universitas Pasundan	747	68	—	3	„ Lengkong Besar 76a	Swasta	1960
5.	Universitas Bandung	750	68	—	5 Ak } 6	„ H. Wasjid 31	Swasta	1958
6.	Universitas 17 Agustus 1945	355	29	—	2	„ Gatotsu-broto 65	Swasta	1964
7.	Universitas Kristen Indonesia	592	102	—	5	„ Ambon 3A	Swasta	1962
8.	Perguruan Tinggi Kudjang	209	27	—	2	„ Keutamaan Istri	Swasta	1964
9.	Universitas Kescn-nian Rakjat	450	45	—	3 Ak	„ Malabar 58	Swasta	1962
10.	Universitas Sawe-rigading	800	35	—	4 Ak } 5	„ Embong 17	Swasta	1956
11.	Universitas Maulana Jusuf	86 145*)	13 12	—	1 2*)	di Serang	Swasta	1961
12.	Universitas Sunan Gunungdjati	—	—	—	—	di Tjirebon	Swasta	Tidak se-dia data ²
13.	Tjabang Unpad	—	—	—	—	di Garut	Negeri	—
14.	Tjabang Unpad	—	—	—	—	di Tasikmalaja	Negeri	—

A K A D E M I

No. urut	Nama Akademi	Djumlah M.	Djumlah D.	Djumlah A.1.	Djumlah F/D.	A l a m a t	Status	Tahun didirikan
1.	Akademi Pos dan Telekomunikasi	750	48	799	—	Djl. Djamu-dju 21	Negeri	1963
2.	Akademi Pendidikan Tck. Nasional	435	58	24	—	„ Dr. Wahidin 2	idem	1963

*) Akademi Technik.

No. urut	Nama Akademi	Djumlah M.	Djumlah D.	Djumlah A1.	Djumlah F/D.	A l a m a t	Status	Tahun didirikan
3.	Akademi Adjun A-kuntan	200	24	120	—	Djl. A-A 72	Negeri	1954
4.	Akademi Tekstil	385	42	71	—	„ Raya Timur 318	idem	1954
5.	Akademi Ilmu Ke-tata-negaraan	97	12	—	—	„ H. Djuanda 277	idem	1964
6.	Sekolah Tinggi Kesedjahteraan Sosial	35	15	40	—	„ H. Djuanda 271	idem	1964
7.	Akademi Perhotelan Nasional	207	25	—	—	„ Bukit Dago	idem	1962
8.	Akademi Militer Nas. Djurusan Tek	107	207	915	5	„ Panorama	idem/AD	1961
9.	Akademi Ilmu Administrasi	80	12	—	2	„ Gatot Subroto 228	Negeri	1965
10.	Akademi Administrasi Niaga	223	16	—	2	„ Tjitarum 23	idem	1964
11.	Akademi Teknik Pkerdjaan Umum	388	77	776	5	„ Diponegoro 22	idem	1951
12.	Akademi Kooperasi „12 Djuli”	324	10	—	—	„ G. Subroto 38	idem	1964
13.	Akademi Djurnalist Dr. RIVAI	118	24	—	—	„ Djamudju 21	Swasta	1963
14.	Akademi Industri Parawisata	397	22	—	—	„ Tjikapundung Barat 1	Swasta	1963
INSTITUT PERGURUAN TINGGI								
1.	I.T.B.	4594	207	3111	7D	Djl. Tamansari 64	Negeri	1959
2.	I.K.I.P.	2767	598	548	5F	„ Sriabudhi 8	Negeri	1954
3.	STORA	353	56	110	3	„ V. Deventer 10	Negeri	1947
4.	I.P.B.	—	—	—	—	di Bogor	Negeri	—

Pendidikan Masyarakat.

1. Pada saat Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 $\pm$ 94% dari djumlah seluruh penduduk berada dalam keadaan „buta huruf latin” akibat adanya siasat pendjadjahan Belanda dan Djepang. Tetapi dilihat dari sudut „cultureel” djumlah prosentase tersebut masih dapat diturunkan, karena tidak sedikit pula diantaranya jang „melek huruf Sunda” dan atau „huruf Arab”. Didalam pendjadjahan, Pendidikan Masyarakat itu tidak dikenal sama sekali, tetapi unsur pendidikan masyarakat nasional sebelumnya telah tertanam. Dalam tingkat Revolusi fhyisik usaha Pendidikan Masyarakat jang paling menonjol adalah usaha „pemberantasan buta huruf”.

Pada periode survival dimulainja dengan pembahasan idee, dasar tudjuan Pendidikan Masjarakat setjara mendalam, jang achirnja menelurkan „Rentjana 10 tahun Pendidikan masjarakat” (dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1960).

Permulaan tahun 1956 Pendidikan Masjarakat mulai memasuki taraf intensifikasi untuk dapat membaktikan „Dharma” bagi terselenggaranja investment jang harus dipersiapkan terlebih dahulu.

Amanat P.J.M. Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 jang berisikan suatu Komando mengharuskannja habis sama sekali buta huruf pada achir tahun 1964, merupakan tugas jang sangat berat dan memerlukan kesungguhan bekerdja dengan djiwa besar dan penuh optimisme demi kemenangan dan kedjajaan bangsa.

Sehubungan dengan ini maka menjelang Hari Pahlawan 10 November 1961 para petugas Pendidikan Masjarakat Djawa-Barat telah mengeluarkan „Ikrar Bersama” membulatkan tekad dan mejakinkan, bahwa seluruh Djawa-Barat pasti dapat bebas dari penjakit buta huruf sebelum achir tahun 1962.

Untuk ini dengan segera disusunlah ditiap-tiap Daerah Tingkat II/ Kotapradja suatu Panitia Pelaksana Komando P.J.M. Presiden tentang penjelesaian buta huruf (diisingkat Panitia „Pelkompres P.B.H.).

Daja kreasi mulai berkembang, methode jang tepat muntjul dimasing-masing daerah, seperti methode massal, global, sistim Kartu Kata Kuntji dsb.

Berkat semangat gotong-rojong jang bergelora, maka satu demi satu Daerah Tingkat II/Kotapradja menjatakan dirinja bebas buta huruf, untuk achirnja pada tanggal 14 Agustus 1962 bertempat di Tangerang olch Djawa-Barat, „diproklamirkannja „Bebas Buta Huruf”.

Panitia Pelaksana Komando P.J.M. Presiden tentang penjelesaian buta huruf kemudian diintegrasikan dengan Panitia Pendidikan lain jang telah ada.

Namanja dirubah mendjadi „Panitia Pelaksana Komando P.J.M. Presiden Kelandjutan Pembebasan Buta Huruf, kewadajiban Beladjar dan kesedjahteraan keluarga (diisingkat „Panitia Pelkompres PBH/KB/KK).

Selandjutnja mulai tanggal 1 Oktober 1962 Djawa-Barat telah mendapat kepertjajaan didjadikan „Pilot Projek Penjusunan Bahan Batjaan bagi Aksarawan Baru”.

Langkah ini telah melahirkan „Ikatan Pengarang bagi Aksarawan Baru” dengan djumlah anggauta 197 orang dan menghasilkan naskah² bahan batjaan berupa 197 booklets, 32 phamplets dan 64 folders.

Kemudian telah pula diselenggarakan „Latihan Kader Penjelenggaraan Perpustakaan Desa” bagi pimpinan „Perpustakaan Desa” dimana Djawa-Barat adalah jang pertama kali menjelenggarakan suatu „experiment on the rural library service” itu.

Achirnja follow-up dari hal² tersebut diatas adalah usaha² meletakkan dasar pembangunan masjarakat melalui Pendidikan Masjarakat dalam bentuk wadah „Pantja Marga” jang dipelopori oleh Dacrah Tingkat II Tjiandjur.

Mudah-mudahan achir tahun 1965 semua Dacrah Tingkat II di Djawa-Barat dapat dinjatakan mendjadi Dacrah Pantja Marga jang pertama di Indonesia.

2. Objek² kegiatan.

a. Pendidikan Fordamentil.

Untuk memberikan landasan dan menanzmkan pendidikan dasar bagi masjarakat dalam periode konsolidasi telah diselenggarakan:

- 1). Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.) dengan setjara berkursus dan massaal.
- 2). Latihan Guru Pemberantasan Buta Huruf bagi tenaga² Sukarelawan untuk didjadi² tenaga pengadjar dalam kursus P.B.H.
- 3). Kursus Kader Orang Dewasa (KKOD) untuk melatih menggunakan suatu ketjakapan jang telah didapat didalam Kursus² K.P.B.H. dengan memberikan suatu ketjakapan praktis.
- 4). Taman Pustaka Pengantar (TPP) dimana tersedia batjaan² jang selaras dengan kebutuhan masjarakat desa.

Hasil² jang diperolehnja adalah sebagai berikut:

No. urut	TAHUN PPMK.	P. B. H.					
		Djumlah Penduduk	Djum. B. H.	Kursus	Guru	Murid	Lulus
1.	1945						
2.	1946						
3.	1947						
4.	1948						
5.	1949						
6.	1950			13.303			108.610
Djumlah							108.610

No. urut	TA-HUN	PPM K.	P. B. H.					
			Djumlah Penduduk	Djumlah B. H.	Kursus	Guru	Murid	Lulus
1.	1951				9.734	7.445		217.634
2.	1952				21.596	10.729		365.834
3.	1953				19.799	10.562		356.061
4.	1954	343		6.130.794	18.554	18.298		347.818
5.	1955	359	14.813.427	4.993.311	18.690	18.615		325.609
6.	1956	359	14.835.927	4.711.433	26.730	20.015		300.055
7.	1957	362	15.302.751	4.429.555	28.815	21.185		320.080
8.	1958	361	15.536.541	3.981.990	32.859	26.900		306.286
9.	1959	358	15.885.739	4.063.896	10.970	37.830		313.909
10.	1960	361	16.385.855	4.156.458	10.605	32.378	266.232	103.866
11.	1961	356	15.886.047	3.279.791	10.372	10.422	278.196	25.085

Tahun	Latihan Guru P.B.H.				K. K. O. D.				T. P. P.		
	Kur-sus	Gu-ru	Murid	Lulus	Kur-sus	Gu-ru	Murid	Lulus	Tempat	Buku	Pembatja
1945	*)										
1946											
1947											
1948											
1949											
1950											
1951									2.136	117.001	25.918
1952					6	19	120		1.935	152.668	74.628
1953					55	165	1.574		2.063	199.494	45.595
1954					118	354	3.628		1.146	602.495	104.005
1955	82	180	1.347	1.344	120	362	3.741		1.917	294.862	84.722

*) Keterangan: chusus untuk daerah Djawa-Barat Pendidikan Masjarakat baru lahir dengan resmi pada tanggal 1 Djuni 1950.

Tahun	Latihan Guru P.B.H.				K. K. O. D.				T. P. P.		
	Kur-sus	Gu-ru	Murid	Lulus	Kur-sus	Gu-ru	Murid	Lulus	Tempat	Buku	Pembatja
1956	40	120	1.015	1.015	40	200	820		1.575	238.800	25.015
1957	65	155	1.444	1.442	33	270	832		1.471	238.901	235.069
1958					86	196	2.263		1.595	242.710	309.094
1959					97	391	2.449		1.357	217.991	52.418
1960					30	113	1.302		304	704.826	7.371
1961					134	450	3.398		295	30.287	9.861
1962					292	935	6.911				
1963					115	434	3.243				
1964					389		18.063	4.667			

b. *Pendidikan kader/Tenaga.*

Usaha Pendidikan kader/Tenaga diselenggarakan dengan djalan mendirikan:

- 1). Kursus Pengetahuan Umum/A (KPU/A) ditingkat Ketja-matan.
- 2). Kursus Pengetahuan Umum/B (KPU/B) ditingkat Kabu-paten.

Pada permulaan tahun 1955 K.P.U. diganti dengan Kursus Kader Masjarakat (K.K.M.), jang ternyata lebih tepat dan sesuai dengan azas dan tudjuannya.

Selandjutnja pada awal tahun 1961 didirikan Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masjarakat (P.L.N.P.M.) „Djajagiri” di Lembang.

Usaha-Usaha lain jang dapat dikemukakan adalah:

- a). Kursus Praktek Dagang (K.P.D.) jang menghasilkan Ikatan Pedagang Ketjil.
- b). Craft Projek Perwarungan.
- c). Latihan Gizi/inseniet training gizi.
- d). K.P.D. P.M. Wanita Tasikmalaja.
- e). Pusat Latihan Pendidikan Masjarakat (P.L.P.M.).

Adapun mengenai perkembangannya dapat terlihat pada daftar statistik sebagai berikut:

TAHUN	K. P. U./A. Kursus Pengetahuan Umum Tingkat A.				
	Kursus	Guru	Murid		Lulus
			Laki²	Wanita	
1951	125	954	5.405	549	2.790
1952	193	1.089	4.440	737	2.713
1953	147	820	4.186	—	2.372
1954	139	707	3.796	428	2.011
1955	118	704	2.871	—	1.890

TAHUN	K. P. U./B. Kursus Pengetahuan Umum Tingkat B.					
	Kursus	Guru	Murid			Lulus
			Laki ²	Wanita	Djumlah	
1951	1	6	42	3	45	—
1952	2	11	57	8	65	13
1953	3	16	—	—	60	43
1954	3	14	—	—	131	47
1955	3	—	—	—	107	85

K. K. M./A.									
No. urut	Tahun	Kursus	Guru	S i s w a			L u l u s		
				Laki	Wnt.	Djml.	Laki	Wnt.	Djml.
1.	1956	173	997	5357	638	5995	3796	428	4224
2.	1957	98	24	1970	329	2299	1594	192	1586
3.	1958	114	—	—	—	1735	—	—	1594
4.	1959	85	545	—	—	2199	—	—	1479

K. K. M. / A.											
No. urut	Tahun	Kursus	Guru			S i s w a			Lulus		
			Lk.	Wnt.	Djml.	Lk.	Wnt.	Djml.	Lk.	Wnt.	Djml.
1.	1960	87	—	—	—	2280	1200	3480	2008	412	2420
2.	1961	119	—	—	—	3406	192	3598	3414	178	3596
3.	1962	78	425	78	501	1199	572	1771	1237	515	1752
4.	1963	122	592	49	841	2537	427	2984	2537	427	2984
5.	1964	153	453	31	484	3371	800	4171	1789	362	2151

K. K. M. / B.

No. urut	Ta- hun	Kur- sus	Guru	S i s w a			L u l u s		
				Lk.	Wnt.	Djml.	Lk.	Wnt.	Djml.
1.	1956	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	1957	2	11	47	14	61	37	13	50
3.	1958	4	23	—	—	130	—	—	65
4.	1959	5	30	8	203	—	—	—	90

K. K. M. / B.

No. urut	Ta- hun	Kur- sus	G u r u			S i s w a			K a d e r		
			Lk.	Wnt.	Djml.	Lk.	Wnt.	Djml.	Lk.	Wnt.	Djml.
1.	1960	5	—	—	—	—	—	—	—	—	325
2.	1961	7	—	—	—	196	48	244	196	48	244
3.	1962	6	—	—	—	1462	9	1462	9	9	1471
4.	1963	3	19	—	19	67	32	99	67	32	99
5.	1964	5	38	1	39	199	18	2177	185	26	227

K. K. M. / C.

1.	1961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	1962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	1963	1	4	3	7	61	5	65	—	65	—
4.	1964	1	4	3	7	39	4	43	—	43	—
5.	1965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

c. Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga.

Dalam tiap bidang usaha Djawatan Pendidikan Masyarakat, senantiasa segi kewanitaannya terdiri dari:

- 1). Kursus Ibu
- 2). Kursus Kader Wanita
- 3). Kursus P.B.H. Wanita
- 4). Kursus Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga (PKK.) dengan tjabang² lainnya.

Hasil usaha Pendidikan kesedjahteraan keluarga memperlihatkan angka² sebagai berikut:

No. urut	Tahun	Banjarknja Kursus	Guru	Siswa	Lulus	Keter.
1.	1956	159	259	1675	1452	
2.	1957	72	319	1693	1493	
3.	1958	124	604	2945	2738	
4.	1959	101	426	1921	1843	
5.	1960	169	507	3286	3123	
6.	1961	886	2558	16724	13542	
7.	1962	573	1719	11472	10954	
8.	1963	893	3885	19529	15351	
9.	1964	882	1889	26109	8772	
10.	1965	—	—	—	—	

d. *Pendidikan Taruna Karya.*

Djawatan Pendidikan Masjarakat telah mengadakan specialisasi bagi Taruna jang terdiri dari:

- 1). Keolah — Ragaan
- 2). Pemuda
- 3). Kepanduan.

Pada umumnja Taruna berkembang pesat dalam arti kwanntitas dan kwalitas.

e. *Pendidikan Perpustakaan.*

Perpustakaan umum jang semula berada dibawah Departemen Sosial, didjadikan bagian dari Djawatan Pendidikan Masjarakat. Untuk mendidik masjarakat melalui buku batjaan, dibukalah perpustakaan^a dibeberapa tempat dengan pembagian tingkat jang diberi nama Taman Pustaka Rakjat (TPR) tingkat A/B/C.

3. **Organisasi.**

„Djawatan Pendidikan Masjarakat” didirikan dengan surat keputusan Menteri P.P.K.R.I. tanggal 24 Nopember 1949 No. 423/A dan berkedudukan di Jogjakarta.

Dengan terbentuknja aparatuur ini, maka di Djawa-Barat lahirilah suatu badan jang disebut „Panitia Pendidikan Masjarakat Ketjamatan” berdasarkan surat keputusan Menteri P.P.K. R.I. tanggal 24 Nopember 1949 No. 427/A.

Baru pada tanggal 1 April 1950 di Djawa-Barat sendiri terbentuk Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah IV Propinsi Djawa-Barat, jang didasarkan atas surat keputusan Menteri P.P.K. R.I. tertanggal Jogjakarta 30 Maret 1950 No. 2396/C.

Mengenai penempatan tenaga teknis yang mendapat pendidikan khusus dibidang Pendidikan Masyarakat jumlahnya masih jauh dari banyaknya kebutuhan.

Lain halnya dengan pengisian tenaga administrasi yang dapat ditetapkan menurut golongan dan ruang yang telah tersedia.

Pengawasan Pendidikan Asing.

1. Inspeksi Pengadjaran Asing lebih banyak bergerak dibidang politis daripada dibidang teknis pengadjaran. Pada tanggal 1 Nopember 1951 dibentuklah Inspeksi Pengadjaran Asing sebagai sebuah kader dalam lingkungan Djawatan Pengadjaran.

Pada pertengahan tahun 1956 diubah namanya menjadi Inspeksi Pusat Pendidikan Asing dengan 14 buah Inspeksi Daerah, untuk kemudian dalam tahun 1957 diberi nama Biro Pendidikan Asing, sedangkan Inspeksi Daerahnya menjadi Kantor Pengawasan Pendidikan Asing dan dimasukkan kedalam Kantor Perwakilan Pendidikan dan Pengadjaran Daerah Jawa-Barat.

2. **Objek² kegiatan.**

Menurut pendaftaran pada tahun 1957 di Jawa-Barat terdapat sekolah² asing di 47 tempat dengan jumlah 140 sekolah.

Kemudian dengan surat keputusan Penguasa Perang Pusat tanggal 31-3-1958 No. Kpts/Peperpu/0113/58 diadakan penertiban seperlunya sehingga sekolah² asing itu hanya terdapat di 11 tempat dengan jumlah sekolah 53 buah.

Achirnya Jawa-Barat menunjukkan jumlah angka banyaknya sekolah asing 52 sekolah, 1176 guru dan 27973 murid dan tersebar di 10 tempat.

PROJEK² NASIONAL.

Dalam usaha menudju kearah industrialisasi, Pemerintah telah mendirikan **Projek Nasional** di Daerah Djawa-Barat sebagai berikut:

(1). Bidang produksi Pangan:

- (a). **Projek Pengairan Djatiluhur.**
- (b). **Projek rehabilitasi dalam daerah² jang baru pulih keamanan-
nja a.l. projek Teluk-lada, civic mision Angkatan Bersendjata
dipelbagai daerah di Selatan Djawa-Barat.**
- (c). **Pabrik Teh Batjang-Baru.**

(2). Bidang produksi Sandang:

- (a). **Projek Pemintalan pada Balai Penelitian Tekstil Bandung.**
- (b). **Projek Pemintalan Tjipadung.**
- (c). **Projek Rayon Pilot/Balai Rayon Bandung.**
- (d). **Projek Pemintalan di Bandjaran.**

(3). Bidang Produksi Industri:

- (a). **Projek P.L.T.A. Djatiluhur.**
- (b). **Projek P.L.T.A. Tjikalong.**
- (c). **Projek P.L.T.A. Plengan.**
- (d). **Projek P.L.T.A. Bengkok.**
- (e). **Projek P.L.T.A. Ubrug.**
- (f). **Projek Penambangan Mas Tjikotok (rehabilitasi).**
- (g). **Projek Industri Mesin/Logam; Besi/Badja TRIKORA Tji-
legon.**
- (h). **Projek Bata/genting di Tjilegon.**
- (i). **Projek Pengerdjaan bambu di Tasikmalaja.**
- (j). **Projek Battery di Tjiawi.**
- (k). **Projek Parawisata, Hotel „Samudera” di Pelabuhanratu Suka-
bumi.**
- (l). **Projek Lapip (Lembaga Perindustrian Penerbangan) di Ban-
dung.**
- (m). **Projek Pabrik Belerang di Wanaradja, Garut.**
- (n). **Projek khusus Penjusunan Undang² Kehutanan di Bogor.**
- (o). **Projek Penelitian di Bogor.**

(4). Bidang industri Perobatan:

- (a). **Projek Assembling obat²an Bhineka Kina Farma di Bandung.**
- (b). **Projek Produksi Vaccin di Bandung.**
- (c). **Projek Produksi Vaccin Penyakit hewan di Bogor.**

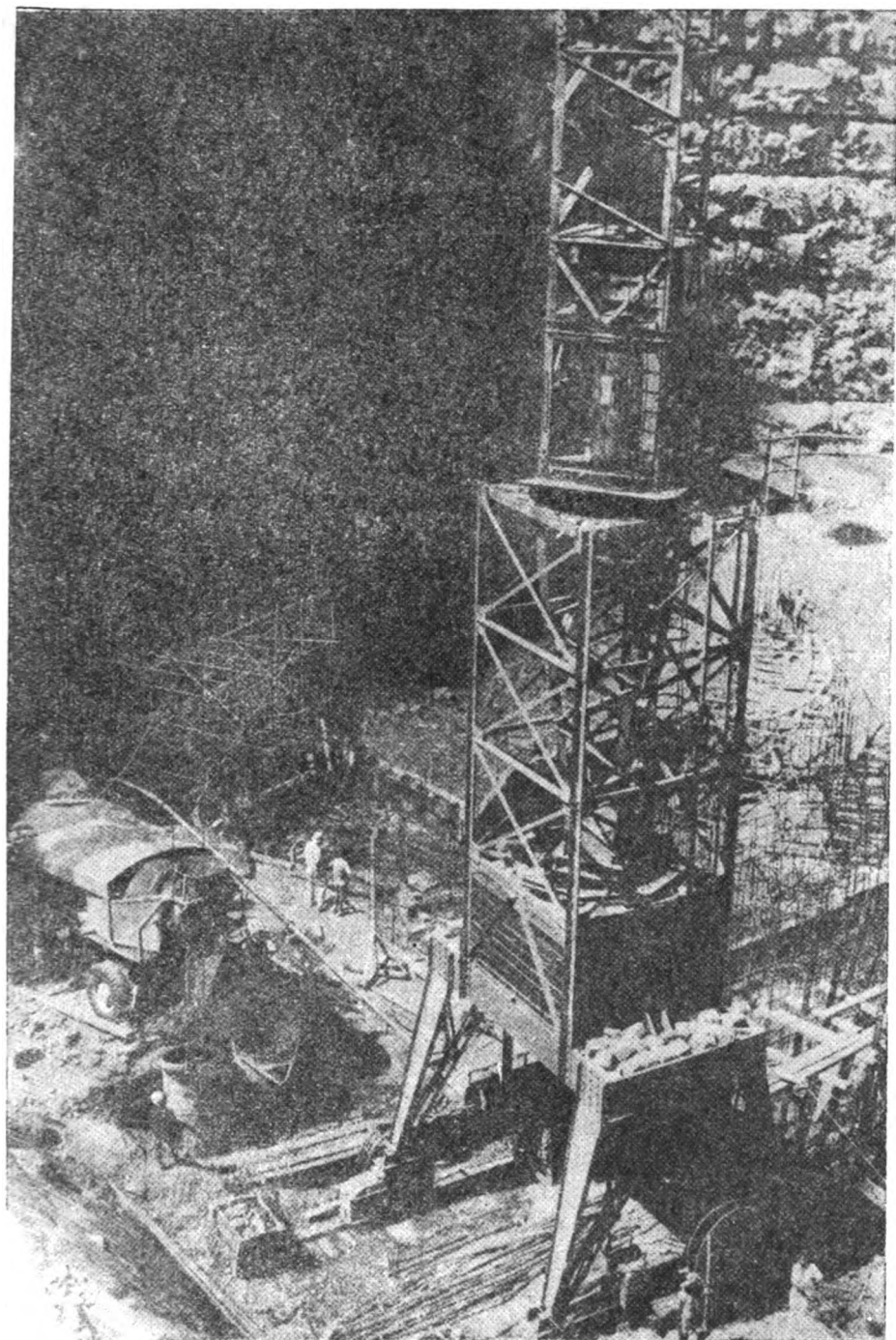


Foto P.a.f.

Projek P.L.T.A. Djatiluhur.

Progres Projek² yang sedang dibangun.

(I). Projek Besi/Badja „TRIKORA” di Tjilegon:

- a. Fase pertama dari pembangunan Projek ini a.l. pembinaan djalan² dan perumahan telah selesai.
- b. Pemasangan saluran air dan pembuatan djalan kesumber airnja sedang berangsur-angsur dilaksanakan.
- c. Untuk pengangkutan alat² besar bagi perlengkapan pabrik perlu dirobah beberapa djembatan antara Djakarta dan Tjilegon. Usaha ini sedang berangsur-angsur dilaksanakan.
- d. Pada umumnja pembangunan projek ini tidak begitu pesat sebagaimana diharapkan.

(II). Projek P.L.T.A. Djatiluhur:

- a. Projek ini terdiri dari: 1). Pembuatan waduk.
2). Menara untuk turbin.

b. Waduk.

Permukaan air normal 107 M.

Permukaan air maximum 111,50 M.

Permukaan air minimum 75 M.

Isi waduk pada 107 M 3.000.000.000 M³.

Luas waduk pada permukaan 107 M. = 83 Km².

Pandjang bendungan 1.135 M.

c. Menara dari Beton:

Menara tinggi 110 M., diameter 50 M.

Pada taraf pertama akan dipasang 5 turbin dengan kekuatan tiap² generator 25.000 kw. Jang akan selesai terpasang seluruhnja pada achir 1964. Dalam kenjataan pekerdjaan tersebut karena hal² jang tak terduga baru dapat selesai pada achir 1965. Debiat melalui turin 45M³/detik.

- d. Pekerdjaan dilaksanakan oleh Pemborong² dari Perantjis, jang pada umumnja berdjalan lantjar.
- c. Pada pertengahan 1965 telah selesai dipasang 2 generator a 25.000 kw. = 50.000 kw. Listrik ini pertama-tama disalurkan ke Tjigereleng (Bandung), pemasangan aliran tegangan tinggi udara ke Bandung telah selesai dikerdjakan dan pada achir 1964 telah dapat disalurkan ke Bandung 25.000 kw. Kapasitas dari central dikemudian hari dapat ditambah dengan 1 turbin lagi dari 250.00 kw. Kesulitan² teknis dalam pelaksanaan projek ini tidak ada. Pembangunan distribusi lijnen dari induk² trafo ke trafo² ketjil sedang direntjanakan oleh designe studiegroep dari Perantjis, jang kelak akan

melaksanakan pekerjaan tersebut. Jang mendjadi persoalan adalah equipment bagi installasi² konsumen, jang membutuhkan devisen tidak sedikit. Proyek P.L.T.A. pada saat ini telah mentjapai taraf penyelesaian ± 80 a 90%.

(III). **Projek Pengairan Djatiluhur.**

- a. Projek ini akan dapat mengairi sawah setjara teratur 240.000 ha.
- b. Projek terdiri:

- (1). Saluran utama 144 km. (Barat 72 Km./Timur 72 Km).
- (2). Dam Utama 5 buah:

- (a). Bekasi.
- (b). Tjuruk.
- (c). Tjibeet.
- (d). Tjikarang.
- (e). Tjiasem.

- (3). Taraf penyelesaian dam²:

- (a). Dam Bekasi telah selesai seluruhnja.
- (b). Dam Tjuruk : galian selesai 100%
- (c). pasangan batu 74%
- B e t o n 20%
- (c). Dam Tjibeet : galian copure 57%
- galian selesai 100%
- pasangan batu 99%
- b e t o n 0%
- copure 75%
- (d). Dam Tjikarang: galian selesai 100%
- pasangan batu 30%
- b e t o n 0%
- copure 47%
- (e). Dam Tjiasem: galian selesai 100%
- pasangan batu 100%
- b e t o n 90%
- copure 100%

- (4). *Saluran utama.*

- (a). Barat dan Timur (galian selesai 60%
- (timbunan selesai 55%
- (b). Bangunan dalam saluran (kunstwerken) pada umumnya dapat dilaksanakan dengan lantjar.

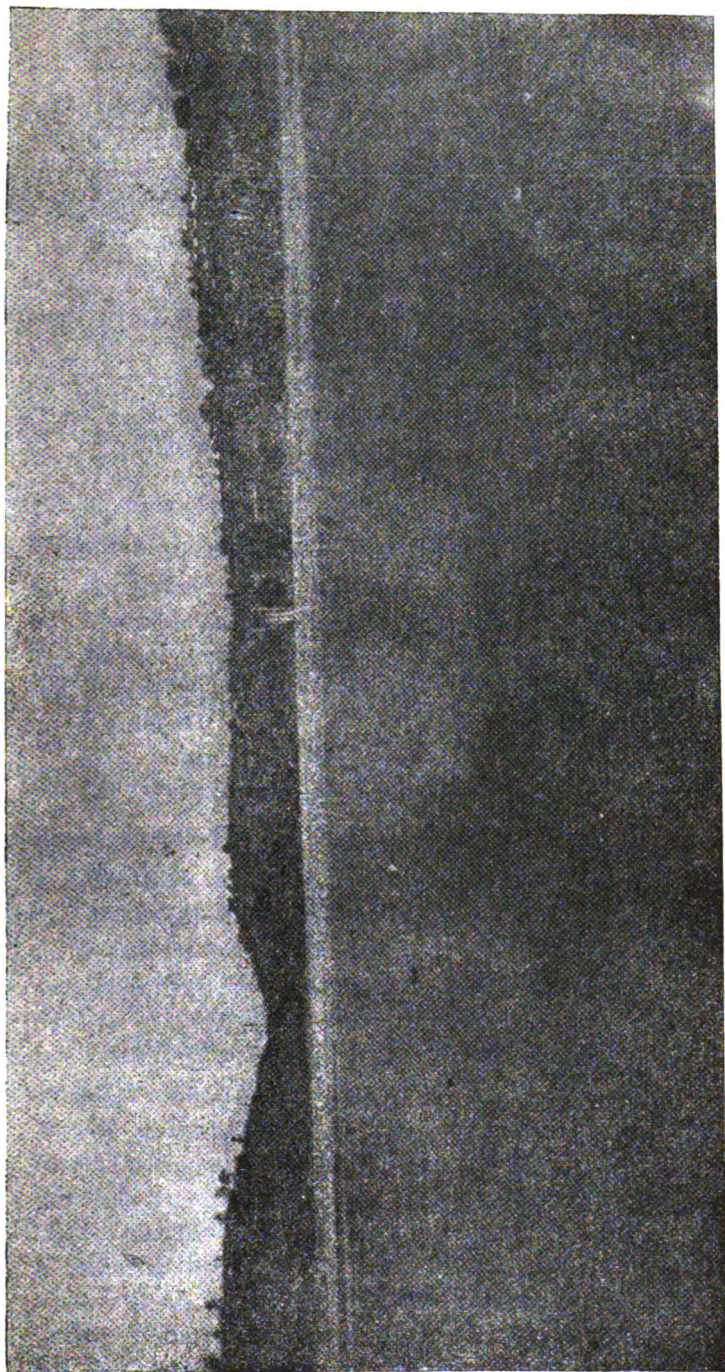


Foto. Ktr. Gub. Kepda.

Projek Serbaguna Djatiluhur.



- (c). Taraf penjelesaian bangunan dalam saluran adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------|-----|
| galian | 95% |
| pasangan batu | 50% |
| beton | 50% |

(d). Kesulitan²:

1. Soal lambatnja penjelesaian otorisasi keuangan menghambat lantjarnja pelaksanaan.
2. Kesulitan semen dan besi beton.

Projek Pengairan Djatiluhur ini tidak dapat diselesaikan menurut rentjana.

Tjatatatan: Angka² tersebut memperlihatkan gambaran penjelesaiannya pada pertengahan tahun 1963. Pada saat ditulisnja dokumentasi ini semua pekerdjaan berada dalam taraf penjelesaian terachir.

(IV). Projek Bata-Genting Tjilegon.

Capasiteit perusahaan: 1.500.000 bidji bata/genting setahun.

- a. Bangunan² sudah selesai.
- b. Mesin² sudah dipasang.
- c. Oven belum dipasang.
- d. Pembangunan pabrik ini telah selesai $\pm 70\%$.
- e. Kesulitan:
 - (1). Sukar bahan baku semen dan besi beton.
 - (2). Penjelesaian otorisasi keuangan kurang lantjar.

(V). Projek Pabrik Battery di Tjiawi Bogor.

- a. Rentjana capasiteit 24.000.000 standaard cellen setahun.
- b. Mesin² akan didatangkan dari Djepang dan sebagian ketjil sudah datang.
- c. Bangunan baru selesai fundasinja.
- d. Djalan² jang diperlukan telah selesai.
- e. Kesulitan²: Bahan baku semen/besi beton.

(VI). Projek Pemintalan Tjipadung.

Mesin² didatangkan dari Inggris sedjumlah 30.000 spindels. Mesin² sebagian besar sudah datang.

Rentjana produksi 8.000 ton/setahun, bekerdja dengan 3 shift. Djenis produksi benang 20/s s/d 42/s.

Kebutuhan listrik 5.000 kw. dengan mempergunakan *agregaat sendiri*. Telah selesai $\pm 70\%$. Pekerdjaan dapat berdjalan dengan lantjar. Diharapkan supaja pada pertengahan tahun 1965 dapat selesai dipasang dan mulai bekerdja 10.000 spindels.

(VII). Projek Pemintalan Bandjaran.

- a. Projek tersebut akan dibangun di Bandjaran (Bandung).
- b. Telah dimulai dengan mendirikan bangunan²nja.

(VIII). Bamboo Processing di Tasikmalaja.

Pendirian pabrik telah seluruhnya selesai, hanya belum didjalankan setjara rendabel.

Disamping Projek² Pembangunan Nasional seperti tertjantum dalam ajat c diatas, di Daerah Djawa-Barat tertjatat pula beberapa buah Projek² Pembangunan Regional/lokal sebagai berikut:

(1). Bidang Produksi Pangan a.l.:

- (a). Projek pengairan/bendungan Baranangsiang di Garut.
- (b). Projek pengairan (waduk) Tjipanas di Sumedang.
- (c). Projek pengairan (bendungan) Tjikunten di Tasikmalaja.
- (d). Projek pengairan (bendungan) dan pekerdjaan² pengairan Lakbok pada Kali Tjitanduj di Bandjar Tjiamis.

(2). Bidang produksi sandang a.l.:

- (a). Projek Induk Tekstil Madjalaja (Perluasan).
- (b). Projek feeder-point.
- (c). Projek pertenunan Serang.
- (d). Projek sterkerij Madjalaja.
- (e). Projek persuteraan dan perkapasan dipelbagai daerah.
- (f). Projek pabrik cambric di Tasikmalaja.

(3). Bidang produksi industri lainnya:

- (a). Projek industri semen Rakjat (di Padalarang, Serang, Tasikmalaja).
- (b). Projek industri batu tahan-api (di Bandung, Garut, Tasikmalaja).
- (c). Projek mempertinggi produktivitas dilingkungan perusahaan² pembakaran kapur diberbagai Daerah, (dengan djalan semi-mekanisasi dalam arti kata tidak lagi menggunakan kaju bakar, tetapi dengan alat pemanas penemuan baru dengan menggunakan solar/resedu).
- (d). Projek perusahaan² kertas dan karton (di Sumedang, Krawang).

(IX). Projek Pemintalan Credit R.R.T.

1. Projek tersebut akan dibangun di Bandjaran (Bandung).
2. Telah dimulai dengan mendirikan bangunan²-nja.

(X). Projek P.U. (Djalan dan Djembatan).

1. Projek ini merupakan usaha:
 - a. Pemeliharaan djalan² jang sempurna.

- b. Penjesualan djalan/djembatan dengan lain², baik intensiteit maupun berat.
- c. Peninggian (peningkatan) kelas.
- 2. Perbaikan/peningkatan djalan antara Djakarta — Merak belum dimulai dan Tjirebon — Sumedang baru dengan perbaikan² ketjil sadja.
- 3. Bagian² lainnja tidak mentjapai hasil jang diharapkan, ini disebabkan kenaikan harga² jang terus membumbung. Biaja jang tiap-tiap tahun diterima hanja tjukup untuk menjelesaikan $\pm 10\%$ dari projek jang direntjanakan untuk tahun jang bersangkutan.

(XI). Selandjutnja mengenai usaha penjempurnaan Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung dapat dikemukakan usaha sebagai berikut:

- 1. Penambahan guru² besar dsb.
 - 2. Penambahan laboratoria beserta alat²-nja.
 - 3. Perluasan bangunan fakultas²/departemen².
 - 4. Pembangunan rumah² bagi tenaga² pengadjar.
-

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PEMERINTAH.

Perusahaan Negara.

1. Sampai tahun 1958 di Indonesia terdapat perusahaan² Negara yang diatur menurut I.B.W. dan I.C.W. a.l. Djawatan Kereta Api, P.T.T. (I.B.W.) Instituut Pasteur, Rumah² Sakit dsb. (I.C.W.).
2. Sedjalan dengan meningkatnja perdjongan untuk mengembalikan Irian Barat kepada pangkuan Republik Indonesia maka pada achir tahun 1957/awal tahun 1958 semua perusahaan Belanda diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan² Belanda yang ada di Djawa Barat pada umumnja merupakan tjabang dari perusahaan² yang Direksinja berkedudukan di Djakarta.
Selain dari perusahaan² tersebut di Bandung terdapat pula perusahaan lokal yang ketjil dan djumlahnja meliputi $\pm$ 50 buah.
3. Perusahaan² yang diambil-alih di Djawa Barat adalah:
 - a. Perusahaan² Perkebunan Besar/Agraria.
 - b. Perusahaan perdagangan.
 - c. Perusahaan industri dan perhotelan.
 - d. Perusahaan Bank dan Asuransi.
4. Untuk dengan mudah dapat mengikuti perkembangannya, pembahasan selandjutnja akan diatur sesuai dengan pembagian tersebut:
 - a. *Perusahaan Perkebunan Negara (Baru).*
Perkebunan Besar yang diambil-alih di Djawa Barat djumlahnja setelah diadakan penggabungan adalah 65 buah.
Direksi/Perwakilannya yang ada di Bandung adalah Tiedeman van Kerchem, Watering & Loeber dan Parakan Salak, sedangkan lain²-nja seperti John Peet, Cultuur Mij dsb. tidak berada di Bandung.
Segera setelah perusahaan² perkebunan Belanda diambil-alih, maka oleh Pemerintah Pusat (Menteri Pertanian) didirikan Perusahaan Perkebunan Negara (Baru) yang berpusat di Djakarta, disamping Perusahaan Perkebunan Negara Lama (Gouvernements Landbouw bedrijven).
P.P.N. Lama di Djawa Barat adalah:
 - (1). Tjinjiruan dan Pasir Junghun di Bandung.
 - (2). Tjipetir di Sukabumi.
 - b. *Perusahaan Perkebunan Negara Baru.*
Di Bandung didirikan Perwakilan Pimpinan P.P.N. Baru. Segala aktivitas Direksi perkebunan² Belanda yang diambil-alih di Djawa Barat dilandjutkan oleh Perwakilan P.P.N., sedangkan nama²

perkebunan banjak jang dirobah/disesuaikan dengan irama revolusi.

c. *Aktivitas.*

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian mengenai sektor perkebunan besar, pada zaman² pendudukan Djepang dan selama revolusi physik perkebunan² tersebut sangat menderita, bahkan banjak jang dirusak oleh Djepang dan pada waktu revolusi bersendjata banjak pula pabrik² jang dibumi-hanguskan.

Dibandingkan dengan masa sebelum perang produksinja sangat turun. Hal ini disebabkan karena tanaman-tanamannya banjak jang telah tua. Disamping itu kesulitan mohtair mengakibatkan pula kesukaran² dalam explotasi sehingga peningkatan produksi sangat terganggu. Usaha² terutama ditujukan kepada:

- (1). Rehabilitasi tanaman dan pabrik.
- (2). Perluasan areal tanaman.
- (3). Mempertinggi produksi, baik kwalitatif maupun kwan-titatif.
- (4). Upgrading para karyawan dalam bidang tehnik.
- (5). Pembinaan karyawan dalam bidang mental/politik.
- (6). Mempertinggi kesedjahteraan karyawan dengan mengadakan kooperasi, S.S.B.M., olah-raga/kesenian dsb.

d. Untuk mengintensifkan pengusahaannya, pada tahun 1963 diadakan reorganisasi dalam P.P.N.

Berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1963 pada perkebunan² karet dibentuk kesatuan² Direksi, sedangkan untuk teh dibentuk kesatuan dengan nama Aneka Tanaman.

Daftar Kesatuan

Kesatuan	Djumlah Perkebunan.
Antan VII	8
Antan VIII	7
Antan IX	6
Antan X	7
Karet X	12
Karet XI	12
Karet XII	13

Dengan meningkatnja perjuangan Dwikora dalam konfrontasi dengan Malaysia djuga perkebunan² Inggris telah diambil-alih

Target produksi tahun 1965 P.P.N. Djawa Barat

No.	Perkebunan dari	Djenis	Target 1965 Kg./Hkg.	Djml. pelem- p. export Kg./Hkg.	Productie lokal Kg./Hkg.
1.	Karet XI	Karet	5.775.000	4.042.500	1.732.500
2.	Karet XII	Karet	4.714.000	3.299.800	1.414.200
3.	Dwikora IV	Karet	8.442.000	6.753.600	1.688.400
4.	Dwikora V	Karet	979.000	685.300	293.700
5.	Dwikora III	Karet	558.000	390.600	167.400
	Djumlah ...	Karet	20.468.000	15.171.800	5.296.200
1.	Antan VIII	Kina	476.500	—	476.500
2.	Antan IX	Kina	14.000	—	14.000
3.	Antan X	Kina	8.000	—	8.000
4.	Karet XI	Kina	36.000	—	36.000
	Djumlah ...	Kina	534.500	—	534.500
1.	Antan X	Kopra	8.000	—	8.000
2.	Dwikora IV	Tjoklat	32.600	—	32.600
3.	Antan IX	Kopi	400	—	400
4.	Karet XI	Gutta- Percha	21.000	—	21.000
1.	Antan VII	Teh	11.440.000	8.396.960	3.043.040
2.	Antan VIII	Teh	9.296.000	6.972.000	2.324.000
3.	Antan IX	Teh	8.500.000	5.950.000	2.550.000
4.	Antan X	Teh	10.200.000	6.969.000	2.986.000
5.	Dwikora IV	Teh	5.991.500	5.375.355	616.145
6.	Karet XI	Teh	1.447.600	1.013.320	434.280
	Djumlah ...	Teh	46.875.100	34.676.635	11.953.463

jang selandjutnja di Djawa Barat diberi nama Dwikora III, Dwikora IV dan Dwikora V.

TJATATAN: Target produksi perkebunan Swasta 1965.

Teh 15.768.827 Hkg. (11.038.178 export)

Karet 13.277.635 Kg. (9.294.345 export).

Perusahaan² Dagang.

Perusahaan² Dagang Belanda jang diambil-alih jang mempunjai Tjabang² njang di Bandung adalah:

1. N.V. Jacobson v.d. Berg.

2. N.V. Internatio
3. N.V. Borsomij
4. N.V. Geowhery & Co.
5. N.V. Lindeteves
6. N.V. Java Staal Stockvis
7. N.V. Hoppenstedt
8. N.V. Tels & Co.
9. N.V. Guntzel & Schumacher
10. N.V. Harmsen & Verwey
11. N.V. Deli Atjeh
12. N.V. R u h a a k
13. N.V. Van Dorp & Co.
14. N.V. Visser & Co.
15. N.V. Onderling Belang
16. N.V. Hagemeyer

Guna menampung segala aktivitas perusahaan² tersebut, Pemerintah Pusat segera mendirikan P.T.² Negara yang ditugaskan melanjutkan pekerjaan² yang tadinya dilaksanakan oleh Perusahaan Dagang Belanda. Pimpinannya dilaksanakan oleh Badan Urusan Dagang (B.U.D.). Di Bandung perwakilan B.U.D. untuk sementara dijalankan oleh Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri dengan Peperda.

P.T.² Negara yang ada tjabangnja di Bandung adalah sbb.:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. P.T. Juda Bhakti | = N.V. Jacobson v.d. Berg. |
| 2. P.T. Satya Negara | = N.V. Internatio |
| 3. P.T. Indevitra | = N.V. Borsomij |
| 4. P.T. Triangle | = N.V. Geowhery & Co. |
| 5. P.T. Indestins | = N.V. Lindeteves |
| 6. P.T. Wadja Djawa | = N.V. Java Staal Stockvis |
| 7. P.T. Sapta Putra | = N.V. Hoppenstedt |
| 8. P.T. Telsari | = N.V. Tels & Co. |
| 9. P.T. Indexim | = N.V. Guntzel & Schumacher |
| 10. P.T. Puspaka | = N.V. Harmsen & Verwey |
| 11. P.T. Djasanegara | = N.V. Deli Atjeh |
| 12. P.T. Remadja | = N.V. R u h a a k |
| 13. P.T. Permata | = N.V. Van Dorp & Co. |
| 14. P.T. Tantular | = N.V. Visser & Co. |
| 15. P.T. Obor Baru | = N.V. Onderling Belang |
| 16. P.T. Anditia | = N.V. Hagemeyer |

Sesuai dengan Undang² No. 19 Prp. tahun 1960 dan P.P. No. 71 tahun 1960 dibentuklah Direksi Perusahaan² Dagang Negara dan Badan Pimpinan Umumnya berkedudukan di Djakarta. Di Bandung didirikan Per-

wakilan B.P.U. jang melaksanakan tugas koordinasi dan Pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 1961 Perusahaan¹ Dagang Negara tersebut diintegrasikan, sehingga dengan demikian hanya terdapat 9 P.D.N. jaitu:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. P.D.N. Fadjar Bhakti | { P.T. Juda Bhakti
P.T. Tantular
P.T. Permata |
| 2. P.D.N. Aneka Bhakti | { P.T. Satya Negara
P.T. Sapta Putra
P.T. Puspaka |
| 3. P.D.N. Tulus Bhakti | P.T. Indestins |
| 4. P.D.N. Budi Bhakti | { P.T. Indevitra
P.T. Indexim |
| 5. P.D.N. Marga Bhakti | { P.T. Triangle
P.T. Telsari
P.T. Anditia |
| 6. P.D.N. Tri Bhakti | P.T. C.T.C. |
| 7. P.D.N. Djaya Bhakti | { Usindo
P.T. Djasanegara |
| 8. P.D.N. Sinar Bhakti | P.T. Wadja Djawa |
| 9. P.D.N. Sedjati Bhakti | J.B.P. |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964 pada perusahaan² dagang negara diadakan lagi reorganisasi dan spesialisasi, jang dilaksanakan pada awal tahun 1965.

Dalam rangka ini perusahaan² tersebut dirobah namanja mendjadi Perusahaan Negara Niaga dan djumlahnja diperketjil mendjadi 6 buah:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. P.N. Aneka Niaga | 1. P.D.N. Aneka Bhakti |
| 2. P.N. Pantja Niaga | 2. P.D.N. Sedjati Bhakti |
| 3. P.N. Satia Niaga | 3. P.D.N. Tri Bhakti |
| 4. P.N. Pembangunan Niaga | 4. P.D.N. Fadjar Bhakti |
| 5. P.N. Dharma Niaga | 5. P.D.N. Tulus Bhakti |
| 6. P.N. Aduma Niaga | 6. P.D.N. Djaya Bhakti |
| | 7. P.D.N. Sinar Bhakti |
| | 8. P.D.N. Budi Bhakti |
| | 9. P.D.N. Marga Bhakti |

Aktivitas.

Tugas dari Perusahaan² Dagang Negara adalah:

- a. Melaksanakan import dan export.
- b. Melaksanakan distribusi barang² import dan lokal.

Import terdiri dari: Mesin², spare-parts, kendaraan bermotor, tekstil, benang tenun, tjelup, chemicalien, kertas/perlengkapan kantor, bahan bangunan dan besi dsb. serta alat² jang tidak dapat dibuat dalam Negeri.

Eksport terdiri dari: Hasil² perkebunan besar, hasil pertanian rakjat seperti tapioca, minjak²-eberis dll., hasil hutan dsb. Eksport pada umumnja dilaksanakan ke Europa, U.S.A., Djepang, Hongkong dan lain² Negara di Asia dan Afrika.

Dilihat dari sudut djumlah rupiah, maka omzet dari pada P.D.N.² sangat meningkat, akan tetapi djika diperhatikan volume barangnja jang didistribusikan, maka hal ini tidak mengalami perobahan jang berarti. Keadaan ini disebabkan karena kesulitan monitair dimana harga rupiah terus menurun.

Diharapkan dalam waktu jang akan datang segera ditjapai perbaikan jang diharapkan.

Perusahaan² Industri.

Perusahaan industri dan perhotelan Belanda jang ada di Djawa Barat sebagian besar terdiri dari perusahaan² lokal. Hanja sebagian ketjil sadja merupakan tjabang, jang direksinja berkedudukan di Djakarta dan a.l. terdiri dari:

Industri kimia dan obat²-an.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Papierfabriek Padalarang | = Pabrik Kertas Padalarang. |
| b. Bandungsche Kinine Fabriek | = Bio Kina Farma. |

INDUSTRI TEKSTIL.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| Preanger Bontweverij | = P.T.G. AMPERA I. |
|----------------------|--------------------|

Industri Karet.

- | | |
|----------------------|----------|
| Java Rubberindustrie | = Pikan. |
|----------------------|----------|

Pabrik Es.

- | | |
|-----------------|-------------|
| a. Sari Petodjo | di Tjirebon |
| b. Kesepuhan | di Tjirebon |
| c. Sari Petodjo | di Bandung |
| d. Priangan | di Bandung |
| e. Sari Petodjo | di Garut |
| f. Sari Petodjo | di Bogor |
| g. Sari Petodjo | di Sukabumi |
| h. Sari Petodjo | di Krawang |

Industri Bangunan.

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Pabrik Kaju Kibodas | di Sukabumi |
| b. Pabrik Keramik | di Plered. |

Disamping perusahaan² P.N.P.R. tersebut diatas di Bandung dan sekitarnya terdapat pula 47 Perusahaan² lokal, yang melaksanakan berbagai-bagai bidang usaha. Perusahaan² yang disebut terakhir pada bulan Agustus tahun 1961 oleh Peperda Djawa Barat penguasaan dan pengusahaannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Djawa Barat.

Aktivitas perusahaan.

Perusahaan² industri tersebut pada umumnya berdjalan baik. Meskipun dialami berbagai-bagai kesulitan terutama dalam soal memenuhi kebutuhan bahan baku dan spare-parts, yang harus diimport dari Luar Negeri, namun perusahaan² itu dapat mempertahankan hidupnya dengan baik, bahkan diantaranya ada pula yang dapat mengadakan perluasan/merhabilitateer alat²-nja.

Pada akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965 semua perusahaan P.N.P.R. oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Segera setelah penjerahan tersebut dilaksanakan, di Djawa Barat dibentuk Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Daerah dan Direksi dari pada industri² yang bersangkutan.

Perusahaan Daerah.

1. Dalam tahun 1960 Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa Barat mulai mendirikan perusahaan² Daerah. Pertama-tama pada tgl. 27 Oktober mengusahakan tambang mangaan di Tasikmalaja. Kegiatan² selanjutnya ditujukan pula kepada penggalian/pengambilan belerang dan jarosit (meni).

Pada tanggal 19 Oktober 1960 telah pula didirikan P.T. Bank Karya Pembangunan Daerah yang melandjutkan usaha² yang tadinya dilaksanakan oleh Bank Denis. Setelah pendirian Bank tersebut, pada tgl. 24 Desember 1960 menjusul P.T. Ternak sebagai joint interprise antara Pemerintah Daerah Tk. I Djawa Barat dan Gabungan Perusahaan Daging dan Kulit (G.P.D.K.).

Tugas P.T. Ternak adalah:

- a. Melaksanakan penertiban dalam masalah penjaluran/pemasukan ternak potong/daging ke Djawa Barat.
- b. Mengatur dan mengurus distribusi ternak potong/daging di daerah Djawa Barat.
- c. Menstabiliseer harga hewan potong/daging supaya dapat disesuaikan dengan daya beli rakyat.
- d. Mengadakan koordinasi dalam lapangan perdagangan ternak di Djawa Barat.

Usaha P.T. Ternak ini mengalami kegagalan dan setelah berdiri ± 4 tahun P.T. Ternak tersebut dilikwideer.

2. Pada tanggal 24 Maret 1961 didirikan „P.T. Indonesia Lloyd”, jang djuga merupakan „joint interprise” dengan Swasta dalam bidang pelajaran inter insulair. Djuga perusahaan baru ini menemui banjak kesulitan. Setelah berdjalan l.k. satu tahun, satu-satunya kapal jang dimilikinja menderita kerusakan di Palembang dan tidak dapat diperbaiki, sehingga aktivitasnja mendjadi beku. Pada tahun 1963 semua saham swasta dibeli oleh Pemerintah Daerah Tk. I dan dengan demikian perusahaan tersebut mendjadi milik daerah penuh. Usaha selanjutnja didjalankan dengan mengadakan charter kapal jang dilaksanakan sampai dewasa ini. Pesanan kapal jang diharapkan selesai pada awal tahun 1964 sampai sekarang belum dapat direalisasi penjerahannja dari galangan kapal jang bersangkutan. Dilihat dari perkembangannja hanya Bank Karya-lah jang memperlihatkan perkembangan jang pesat. Disamping itu P.T. Pertambangan Djawa Barat jang achir² ini telah disesuaikan dengan Undang² No. 5 tahun 1960, djuga dapat melandjutkan hidupnja meskipun dengan banjak kesulitan, terutama dalam segi keuangan.
3. Dengan surat Keputusan Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Djawa Barat tgl. 9 Agustus 1961 No. Kpts. 52/8/PPD/61 telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. I Djawa Barat semua perusahaan lokaal Belanda jang diambil-alih sebagai berikut:

Daftar Perusahaan² Lokal dalam lingkungan BAPPIT
Djawa Barat jang diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I
Djawa Barat

No.	Nama Perusahaan	Tempat kedudukan	Keterangan
1.	Perda „Gaja Loka”	Bandung	Perusahaan Logam
2.	Perda „Gaja Daja”	Bandung	Perusahaan Logam
3.	Perda „Gaja Karya”	Sukabumi	Perusahaan Logam
4.	Perda „Gaja Bina”	Bandung	Perusahaan Logam
5.	Perda „Gaja Eka”	Bogor	Perusahaan Logam
6.	Perda „Gaja Ika”	Tjibadak	Perusahaan Logam
7.	Perda „Gaja Tjipta”	Bandung	Perusahaan Logam
8.	Perda „Interna”	Bandung	Perusahaan Tegel
9.	Perda „O r i s”	Bandung	Perusahaan Tegel
10.	Perda „Sugriwa”	Bandung	Perusahaan Tegel
11.	Perda „Sekarwangi”	Tjibadak	Perus. Penggergadjian
12.	Perda „Plered”	Plered	Perusahaan Keramik

No.	Nama Perusahaan	Tempat Kedudukan	Keterangan
13.	Perda „Wisma Suka”	Bandung	Perusahaan Meubel
14.	Perda „Inkaba”	Bandung	Perusahaan Karet
15.	Perda „Krida Juda”	Bandung	Perusahaan Sepatu Karet
16.	Perda „Naripan”	Bandung	Perusahaan Roti/Kuwe
17.	Perda „Waringin”	Bandung	Perusahaan Roti/Kuwe
18.	Perda „Merdeka”	Bandung	Perusahaan Roti/Kuwe
19.	Perda „Salawati”	Sukabumi	Perusahaan Roti/Kuwe
20.	Perda „Tjikapundung”	Bandung	Perusahaan Grafica
21.	Perda „Sumur Bandung”	Bandung	Perusahaan Grafica
22.	Perda „Tjibantar”	Bandung	Perusahaan Grafica
23.	Perda „Tjikapajang”	Bandung	Perusahaan Grafica
24.	Perda „Riung Gunung”	Bandung	Perusahaan Grafica
25.	Perda „Sirnagalih”	Bandung	Perusahaan Bioscoop
26.	Perda „Putra Ria”	Bandung	Perusahaan Mainan Anak ¹
27.	Perda „R a p i h”	Bandung	Perusahaan Konfeksi
28.	Perda „Lukisan”	Bandung	
29.	Perda „Daja Guna”	Bandung	Perusahaan Bengkel Mobil
30.	Perda „Tjipta Karya”	Bandung	Perusahaan Bengkel Mobil
31.	Perda „Singaradja”	Bandung	Perusahaan Bengkel Mobil
32.	Perda „Pantjaniaga”	Bandung	Perusahaan Bengkel Mobil
33.	Perda „Dua Roda”	Bandung	Perus. Assembling spada.

Daftar Perusahaan Lokal ex. B.U.D. Tjabang

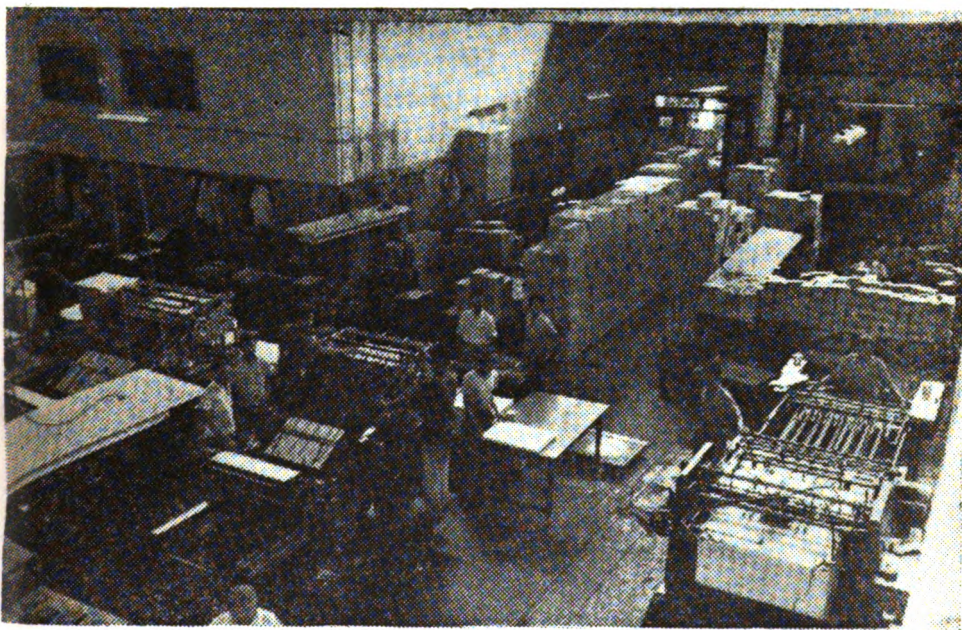
Djawa — Barat

No.	Nama Perusahaan	Tempat Kedudukan	Keterangan
1.	I. <i>Hotel dan Penginapan</i> Grand Hotel Preanger	Bandung	
2.	Grand Hotel Lembang	Lembang	
3.	Hotel Pendawa	Sindanglaja-	
		Tjiandjur	
4.	Hotel Salak	Bogor	
5.	Penginapan P. Kornel	Bandung	
6.	Flat P.T. Pakungara (Olcotpark)	Bandung	

No.	Nama Perusahaan	Tempat Kedudukan	Keterangan
	<i>II. Toko dan Service</i>		
7.	Au Bon Marche	Bandung	
8.	La Femme Chic	Bandung	
9.	Fa Perryl	Bandung	
10.	Broadcast Braga Bandung	Bandung	
11.	N.V. Luwes (Luyks)	Bandung	
12.	Rumah Kidang	Bandung	
13.	Bijouterie Friedler	Bandung	
14.	Het Triplexhuis	Bandung	
15.	Het Radiohuis (Genta Djaja)	Bandung	
	<i>III. Perusabaan Dagang Umum</i>		
16.	Fa Setrawara	Bandung	
	<i>IV. Perus. Pendjualan Susu</i>		
17.	Bandoengsche Melk Centrale	Bandung	
	<i>V. Perus. Pemelibaraan Ketjantikan.</i>		
18.	Nigella	Bandung	
	<i>VI. RESTORAN</i>		
19.	Dago Theehuis	Bandung	
	<i>VII. Perusabaan Ternak/ Daging/Susu.</i>		
20.	P.T. Badranaja n/d Food Trading Coy	Bandung	Pengawetan daging
21.	Eka Hardja n/d Eigen Hulp	Bandung	Pengawetan daging
22.	Perusahaan Susu Sampurna- sari n/d De Friesche Terp N.V.	Pengalengan	Perus. Susu & Pe- ternakan/Pertanian.
23.	Perusahaan Susu Tridaya n/d Meyer	Lembang	Perusahaan Susu & Paternakan.
24.	Perusahaan Susu Sawahlega n/d Westbroek	Bandung	idem
25.	Perusahaan Susu Purbasari n/d De Sierken	Bandung	idem
26.	Perusahaan Susu Kantja n/d De Kantja	Tjimahi	idem

Untuk melaksanakan penguasaan, pengusahaan dan pengawasan perusahaan tsb, telah dibentuk B.P.U. Perusahaan Daerah Djawa Barat. Sewaktu diambil-alih mesin² dsb. dari pada perusahaan² ini pada umumnya sudah tua. Namun meskipun demikian kesemuanya dapat meneruskan hidupnya dengan ber-bagai² kesulitan. Perkembangan monitair jang tidak meng-gembirakan, disebabkan sangat turunnya nilai rupiah memberikan pukulan jang berat terhadap perusahaan² daerah, terutama perusahaan² jang memerlukan bahan² baku jang diimport dari luar Negeri. Berkat djerih pajah para karyawannya perusahaan tersebut sampai dewasa ini masih dapat terus berdjalan.

	Bandung	Her Radiobios (Genta Djaja)	Bandung
	Bandung	Her Triplex	Bandung
	Bandung	Hijosier Frieder	Bandung
	Bandung	Kimah Kidang	Bandung
	Bandung	III. Perusahaan Dagang Ujung	Bandung
	Bandung	IV. Pers. Pembangunan Sisa	Bandung
	Bandung	Bandungsche Melk Central	Bandung
	Bandung	V. Pers. Pembangunan Kertanika	Bandung
	Bandung	VI. RESTORAN	Bandung
	Bandung	Dago Theatris	Bandung
	Bandung	VII. Perusahaan Travel	Bandung
	Bandung	P.T. Badannja n/d Food	Bandung
Pengawetan daging	Bandung	Trading Coy	Bandung
Pengawetan daging	Bandung	Eka Hardja n/d Eigan Halp	Bandung
Pers. Sisa & Per- tamanan/Pertanian.	Pengawetan	Pertanian Sisa Sampurna	Pengawetan
Pertanian Sisa & Pertamanan.	Bandung	Band n/d De Friesche Telp	Bandung
idem	Bandung	N.V.	Bandung
idem	Bandung	Pertanian Sisa Tindaya	Bandung
idem	Bandung	n/d Meyer	Bandung
idem	Bandung	Pertanian Sisa Sawahdaya	Bandung
idem	Bandung	n/d Westbrock	Bandung
idem	Bandung	Pertanian Sisa Purbasari	Bandung
idem	Bandung	n/d De Sietken	Bandung
idem	Bandung	Pertanian Sisa Kandi	Bandung
idem	Bandung	n/d De Kandi	Bandung



Pertjetakan B.P.U. „Tjikapundung”.

Dipertjetakan ini ditjetak buku „Sedjarah Perkembangan Pembangunan Daerah
Djawa Barat tahun 1945 — 1965”.



Digitized by Google

PERKEMBANGAN KEGIATAN SWASTA DALAM BIDANG PEREKONOMIAN/PERUSAHAAN.

Untuk menggambarkan kegiatan masyarakat dalam perekonomian/perusahaan, maka disadikjan naskah² berupa laporan² singkat, mengenai sektor² tertentu jang disusun oleh O.P.S.² jang bersangkutan dibawah pimpinan Bamunas Djawa Barat.

Dengan tjara demikian, diharapkan dapat digambarkan perkembangan kegiatan swasta dalam bidang perekonomian/perusahaan, serta sekaligus dapat pula disinggung perkembangan dari pada O.P.S.² jang dalam rangka pembantingan stir dalam Ekonomi Perdjjoangan, merupakan alat jang penting, untuk membina para pengusaha swasta didalam merealisasikan tugas² revolusioner dan nasionalnja.

Didalam bahagian ini, berturut-turut disampaikan laporan-laporan singkat dari Bamunas Djawa dan k.l. 20 OPS jang meliputi sektor²:

Perkebunan, Perindustrian Rakjat, Keradjinan Rakjat, Perdagangan, Perbankan, Pergudangan dan Per-asuransian, Pengangkutan, Per-tjetakan dan Penerbitan, Persurat-kabaran, Perobatan dsb.

**PERKEMBANGAN KEGIATAN PIMPINAN PENGORGANISASI-
AN DUNIA PERUSAHAAN SWASTA DARI
1950 sampai 1965.**

**Bamunas dalam Pertumbuhannya sampai Status dan kedaannya
pada Tahun 1965.**

Perdjoangan untuk mengisi kemerdekaan dengan kemerdekaan dalam ekonomi, dengan positif baru dilakukan sesudah tahun 1949.

Dalam tahun 1950, konperensi² antar Indonesia dalam berbagai bidang, dilangsungkan di Jogjakarta. Diantara Konperensi² itu terdapatlah konperensi dalam bidang perekonomian, yang disebut Inter Indonesia Economic Conference (IINEC), didalam konperensi mana tidak kurang dari 20 orang tokoh perekonomian Djawa Barat turut serta.

Konperensi ini bertudjuan untuk memindahkan kuntji² perekonomian/perusahaan dari tangan asing ketangan orang² Indonesia. Konperensi tersebut menghasilkan berdirinja Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (D.E.I.P.) di Djakarta dengan Konsulat²-nja, yang kemudian diganti dengan Dewan² Ekonomi Propinsi, diibukota propinsi². Maka demikianlah Bandung mengenal badan² tersebut diatas itu.

Dewan² Ekonomi di Pusat dan di Daerah² ini merupakan pelopor² dari perdjoangan usahawan² nasional untuk merebut kuntji² perekonomian dari unsur² asing.

Tudjuan dari pada usaha² itu pada waktu² jbs. belum djelas ditudjukan untuk mentjapai suatu masyarakat Sosialis Indonesia, akan tetapi sadar atau tidak sadar hanya sekedar berusaha untuk menggantikan kedudukan orang² asing dan meniadakan pengaruh² asing sadja.

Pada tahun 1956, Dewan² Ekonomi di Pusat dan di Daerah² ini, menghasilkan didirikannya Dewan Perniagaan dan Perusahaan (D.P.P.) di Djakarta dan Madjelis² Perniagaan dan Perusahaan (M.P.P.) di daerah² Daerah Tingkat I.

D.P.P. dan M.P.P.² ini merupakan „*Chambers of Commerce*” yang melaksanakan tugas² pendaftaran dan lain² kegiatan untuk kepentingan konsolidasi pengorganisasian perindustrian dan perniagaan pada umumnya (Dasar hukum D.P.P. dan M.P.P. adalah P.P. No. 11 tahun 1956).

Didalam bentuk² yang tidak seragam, dalam berbagai bidang usaha, didirikan Organisasi² Perusahaan Sedjenis (OPS gaja lama — OPS gaja liberal).

Disamping D.P.P. dan M.P.P.² tsb. yang bersifat *semi-resmi* itu, didirikan pula KENSI di Pusat dengan tjabang² dan ranting²-nja diibukota² Daerah² Tingkat I dan Daerah² Tingkat II.

KENSI singkatan dari Konperensi Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia melahirkan sebutan² *swasta nasional asli* dan *swasta nasional tidak asli*, disamping *swasta asing*.

KENSI bersifat *swasta sepenuhnya* dan se-akan² merupakan kelanjutan dari pada Dewan² Ekonomi sebagai alat perdjongan para pengusaha dalam menghadapi kegiatan² usaha asing dan nasional tidak asli, sedangkan D.P.P. dan M.P.P. melanjutkan perdjongan Dewan² Ekonomi dalam aspek² penertiban pengorganisasian kegiatan usaha pada umumnya.

Disamping badan² tersebut kita mengenal pula jang disebut Madjelis Industri Indonesia (M.I.I.), jang bersifat swasta sepenuhnya dengan mendapatkan wewenang-wewenang tertentu dari Kementerian Perindustrian.

Selanjutnja terdapat pula a.l. Madjelis Usaha Veteran Indonesia (MUVI) jang memperdjongkan kepentingan² para pengusaha jang termasuk dalam golongan Veteran² perdjongan bersendjata.

Demikianlah keadaan sebelum 1959, dimana pertama-tama tiada kedjelasannya pola pegangan bagi perdjongan kita dalam bidang perekonomian dan perusahaan pada umumnya, melainkan lebih memperlihatkan sifat² perekonomian liberal.

Berobahlah sama sekali, djiwa jang mendasari perdjongan dan kegiatan perusahaan² swasta setelah keluarnya Manipol dalam tahun 1959, dan dimulainya masa Ekonomi Terpimpin sebagai salah satu segi dari pada djiwa dan pelaksanaan Manipol itu.

D.P.P., M.P.P., KENSI, MUVI dan organisasi² lainnya, berangsur-angsur menjesuaikan *tudjuannya*, *tjara kerdjanja* dan *semangat kerdjanja* kepada tjara Ekonomi Terpimpin untuk menudju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pantja-Sila. Setelah keluarnya Deklarasi Ekonomi dalam Maret 1963, lebih tegaslah lagi pola perdjongan jang harus ditaati oleh semua usahawan swasta dalam gerak-gerik usahanya.

Pada 20 Pebruari 1964 dilantiklah Bamunas Pusat di Djakarta oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung Karno jang segera disusul oleh Bamunas Daerah Tingkat I Djawa Barat jang dilantik oleh J.M. Menteri F3 pada 23 Maret 1964, sebagai Bamunas Daerah jang sulung ditanah air kita ini. (Landasan hukum dari pada Bamunas adalah Per. Pres. No. 2 tahun 1964).

Berangsur-angsurilah keluar peraturan-peraturan jang mengatur penertiban dan keseragaman dari pada perorganisasian OPS² dan badan² lain sebangsanja.

Ekonomi Terpimpin sebagai alat untuk merealisasikan masyarakat adil dan makmur, berangsur-angsur mendapatkan landasan² kokoh dalam bentuk peraturan-peraturan, undang-undang dsb.

Bamunas Djawa Barat, beserta OPS² tingkat Djawa Barat bekerdja giat untuk melaksanakan tjita² Bamunas dan OPS² seperti tertjantun

dalam Peraturan-Peraturan jbs. dengan pendirian Bamunas dan OPS² itu, ialah membina para pengusaha swasta agar supaya setjara positif dan kongkrit ikut melaksanakan penyelesaian revolusi dan merupakan unsur mutlak dalam pembangunan ekonomi nasional (OPS gaja baru diatur dengan Per. Pres. No. 2 tahun 1965).

Gerakan Pemutihan Modal dan Gerakan Kebaktian Pengusaha Swasta terhadap Revolusi, diselenggarakan segiat-giatnja.

Kerdja-sama untuk mengintegrasikan Pemerintah Daerah dengan tenaga-tenaga masyarakat dalam perekonomian, mendapat sambutan hangat dari segala fihak yang bersangkutan.

Disamping usaha² pembangunan, para pengusaha swasta tidak kurang pentingnja dalam hal kegiatan² kemasjarakatan, terutama sosial, dalam hal mana mereka memberikan sumbangan² materiilnja.

Kerdja-sama antara Bamunas dengan Djawatan-Djawatan yang mempunyai perusahaan swasta dalam bidang wewenangnja, mungkin dipererat dan dengan golongan pengusaha² asing domestic diadakan pula rentjana kerdja-sama yang konstruktif.

Dalam tahun 1964 yang baru lalu, Bamunas setjara kongkrit ikut serta dalam pelaksanaan kerdja Bhakti pada projek Djatiluhur dengan mengirimkan 2 kali pasukan kerdja bhakti yang terdiri dari pengusaha² dan karyawan-karyawan sebagai utusan dari k.l. 60 OPS Tingkat Djawa Barat.

Dalam bidang keamanan, usaha Bamunas Djawa Barat ditudjukan kepada pembentukan HANSIP Bamunas yang pada waktu ditulis laporan ini diharapkan dapat direalisir sebelum achir Mei 1965.

Dalam bidang mental dan ketrampilan usaha, Bamunas menjelenggarakan Latihan Pimpinan Perusahaan (B.M.T. = Business Management Training) yang dalam k.l. 6 tahun dari 1959 s/d 1965, tidak kurang dari 600 pengusaha² telah lulus melalui latihan yang lamanja k.l. 2 tahun.

Indoktrinasi mental kerevolusian dan kesadaran ber-Amanat Penderitaan Rakyat, oleh Bamunas diadakan terhadap para usahawan swasta dengan bantuan dari tokoh-tokoh dan instansi-instansi yang berwenang untuk itu.

Disamping itu, kerdja-sama ekonomi antar Bamunas Daerah telah mulai diadakan, a.l. dengan Sulawesi Selatan dan Lampung.

Dalam badan² resmi seperti: Bakopda, Dori, Dewan Tranmigrasi Nasional, Dewan Produksi d.l.l. Bamunas Djawa Barat ikut serta setjara aktif, begitu pula dalam Panitia² Negara untuk persoalan² khusus insidental.

Personalia Bamunas Djawa Barat.

Bamunas Daerah Djawa Barat beranggautakan 135 orang dan setjara rieel ditetapkan baru sedjumlah 125 orang, dengan perintjiaan untuk:

1. Sektor perekonomian swasta = 103 orang.
 2. Pengusaha Nasional yang menjadi anggota DPRD.
Tingkat II/Kotapradja = 20 orang.
 3. Wakil Front Nasional = 1 orang.
 4. Golongan Veteran = 1 orang.
- Djumlah = 125 orang.
-

Telah ditetaskan sebagai pengganti dan pengisi lowongan keanggotaan oleh Gubernur kepada J.M. Menteri Penasihat Presiden/P.M. Urusan Funds and Forces sebanyak 8 orang.

Pimpinan Harian Daerah terdiri dari 12 orang, dengan personalia, sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. A. Mamoeer.
2. Wk. Ketua I : R.M. Soddak.
3. Wk. Ketua II : Djamal Ali, S.H.
4. Wk. Ketua III : Soemarna Wirasoedarma.
5. Sekertaris : Julias Rasjid, S.H.
6. Anggota : P.M. Simatupang, S.H.
7. " : A. Suwarma.
8. " : Urip Sugandi.
9. " : Moh. Kasmiri.
10. " : Sularso.
11. " : A. Warsoma.
12. " : Tan Ek Ho.

Pimpinan Umum Daerah terdiri dari 45 orang, yang terbagi dalam:

1. Bidang Industri : 12 orang.
 2. Bidang Agraria : 3 orang.
 3. Bidang Perdagangan : 10 orang.
 4. Bidang Djasas : 15 orang.
 5. Yang ditunjuk oleh Pemerintah : 5 orang.
- Djumlah 45 orang.
-

Tanggapan mengenai OPS²:

Dalam rangka penjadjian kegiatan OPS² itu, perlu dikemukakan hal² sebagai berikut:

1. OPS² dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dalam menjelaskan para pengusaha swasta baik mental maupun fisik kepada *tudjian* revolusi dan *menjelaskan tjara kerdja* dan berpikir guna menjelesaikan

revolusi untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila.

2. Untuk itu segala sesuatu dalam bidang ke-swastaaan ini harus dितर-tibkan sebaik-baiknya, dan berangsur-angsur telah keluar peraturan² Pemerintah jang memberikan dasar kepada OPS² untuk menjelenggarakan tugas-tugas penertiban itu.
3. Dalam kenjataan sampai sekarang banjak OPS² jang tidak berdjalan sebagaimana diharapkan. Banjak kesulitan² terdjadi dan malahan didapat kesan seakan-akan OPS² itu menjimpang dari tugasnja semula.
Ini diakibatkan oleh karena a.l. dangkalnja pengertian terhadap OPS dari instansi-instansi dan orang² jang langsung berhubungan dengan ke-OPS-an jang bersangkutan, sehingga mau tidak mau OPS² jang bersangkutan berdjalan diluar rel, jang sebetulnja telah dibentangkan oleh Pemerintah sebelumnya.
4. Sangsi² dari pembangkangan pengusaha² jang tidak mau mendjadi anggauta dari sesuatu OPS belum pernah dipraktekkan, sehingga timbul, gejala bahwa „*met of zonder OPS*” segolongan pengusaha-pengusaha swasta dapat bergerak terus, dan disepelekaninja segala andjuran/peraturan jang diadakan oleh OPS² dalam usahanja untuk membantu Pemerintah itu.
5. Tidak berlebih-lebihanlah kiranja pula, apabila dikemukakan, bahwa pengusaha² jang taat didalam segala pengaturan, dalam kenjataannya banjak menderita jang a.l. dikarenakan oleh tindakan-tindakan swasta liar itu.
6. Bila terdapat bahwa misalnja OPS² itu banjak jang tidak memenuhi harapan-harapan Pemerintah dan Masjarakat, itu bukanlah terletak pada ide ke-OPS-annya, melainkan terletak pada dangkalnja pengertian dari berbagai fihak jang bersangkutan, baik dari fihak djawatan-djawatan sendiri, maupun dari fihak masjarakat dan para pengusaha swasta sendiri.
7. Memperhatikan hal-hal jang tertera diatas itu mudah-mudahan selanjutnja dapatlah persoalan OPS ini digalang sebagaimana mestinja, sehingga dapat berwujud mendjadi alat pembantu Pemerintah dan pelajaran masjarakat jang baik, untuk mempertjepat sampainja kita kepada tudjuan revolusi kita, ialah masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila.

PERTUMBUHAN OPS PERKEBUNAN BESAR SWASTA DJA- BAR DARI TAHUN 1963 SAMPAI TAHUN 1965

Pembentukan.

OPS Perkebunan Besar Swasta Djawa Barat didirikan pada tanggal 29 Djuli 1963 sebagai hasil keputusan musjawarah dari Pengusaha-Pengusaha Perkebunan Besar Swasta di Djawa Barat, jang diadakan pada tanggal 27 s/d 29 Djuli 1963 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Dst. I Djawa Barat No. 35/GKDH/BPD/62 tanggal 19 Oktober 1962.

Sesudah dikeluarkannya Pen. Pres. No. 2 tahun 1965 tentang peraturan pokok OPS, maka OPS Perkebunan Besar Swasta Djawa Barat itu disesuaikan dengan Pen. Pres. No. 2 tahun tersebut. Alamat keduanya: Djl. Sunda No. 42 Telp. 4842 — Bandung.

Kcanggautaan.

Semua Perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional maupun Asing diwadjabkan mendjadi anggota OPS Perkebunan Besar Swasta Djawa Barat. Djumlah anggota seluruhnya ada:

Perkebunan Karet	= 194
Perkebunan Teh	= 69
Perkebunan Kina	= 5
Perkebunan Kelapa	= 4
Perkebunan Kelapa sawit	= 3
Perkebunan Kapuk	= 1
Perkebunan Tapioka	= 1
Djumlah	= 277 Perkebunan.

Setelah diadakan pengambilan-alih dari Perusahaan² Perkebunan Swasta Asing, kepunjaan Inggris dan Amerika (mendjadi Unit² Perkebunan „Dwikora”, maka djumlah anggota tersebut berkurang mendjadi 241 Perkebunan.

Luas Bidang Perusahaan.

OPS Perkebunan Besar Swasta Djawa Barat meliputi Perkebunan²: Karet, Teh, Kina, Kelapa, Kelapa-Sawit, Kapuk dan Tapioka dengan luas sebagai berikut:

Matjam Perkebunan	Produktif Ha.	Blm. Produktif Ha.	Djumlah Ha.
Karet	52.805,0354	22.103,0135	74.908,0489
Teh	12.718,5399	11.549,9939	24.268,5336
Kina	1.326,—	—	1.326,—
Kelapa	278,500	—	278,500
Kelapa-Sawit	1.210,090	—	1.210,090
Kapuk	400,—	—	400,—
Tapioka	836,350	—	836,350

Kegiatan² yang telah dilaksanakan/ditjapai.

1. Dalam bulan² Agustus dan September menjelenggarakan pembentukan Sub². OPS di:
 - a. Tasikmalaja untuk Sub. OPS Priangan Timur.
 - b. Tjiandjur „ „ „ Tjiandjur.
 - c. Sukabumi „ „ „ Sukabumi.
 - d. Bogor „ „ „ Bogor.

Sub. OPS Banten berhubung dengan berbagai kesulitan, baru dapat dibentuk dalam bulan April 1965.
2. Dalam usaha mempertinggi tindakan-tindakan kulturtechnis Perkebunan pada tanggal 15 Oktober 1963 bertempat di Perkebunan Batulawang (Bandjar), OPS Perkebunan bersama Inspektorat Perkebunan Sub. Inspeksi Priangan timur membentuk Planterskring Priangan Timur. Pada pembentukan itu diadakan tjeramah mengenai „penjadapan karet” dan pemberantasan alang², tjeramah mana mendapat sambutan baik.
3. Pada tanggal 18 Nopember 1963 di Garut diadakan penggantian Pengurus Planterskring daerah Garut.
4. Mengadakan kerdja-sama antara OPS Perkebunan Besar Swasta Djawa Barat dengan filhak Inspektorat Perkebunan Daerah Tingkat I Djawa Barat dan „Persatuan Sardjana Pertanian dan Kehutanan” (I.S.P.K.) tjabang Bandung dengan tudjuan untuk memperlantjar usaha Pemerintah dalam hal:
 - a. Rehabilitasi dari kebun² yang terlantar.
 - b. Peremadjaan tanaman (chusus karet).
 - c. Mempertinggi kwantitet dan kwalitet Produksi Perkebunan.
 - d. Usaha demokratisering kearah sosialisering Perusahaan² Perkebunan Swasta (dalam bentuk Kooperasi):

Kerdja-sama tersebut diresmikan dalam suatu pernyataan bersama yang diadakan pada tanggal 7 Desember 1963 bertempat Kantor Inspektorat Perkebunan Daerah Tk. I Djawa Barat Bandung.

5. Dalam rangka kerdja-sama tersebut tadi maka OPS Perkebunan menjelenggarakan Survey keberbagai Perkebunan, yang dilakukan oleh Sardjana-Sardjana Pertanian dari UNPAD. Perkebunan² dimana telah dilakukan Survey ialah:

- a. Perkebunan Karet Tjikupa (Bandjar), mengenai perkoopèrasian Perkebunan tersebut.
- b. Perkebunan Karet Kiarapajung (Tjiandjur) mengenai; penanaman baru dan soal² reboisasi.
- c. Perkebunan Karet Wangunwatu (Tasikmalaja) mengenai; pemeliharaan, penjadapan, pengolahan dan peremadjaan.
- d. Perkebunan Karet Tjilangla (Tasikmalaja) mengenai; idem c.
- e. Perkebunan² Teh: Tjisudjen, Takokak, Bungamelur dan Ramawati, yang kesemuanya terletak didaerah Tjiandjur selatan, mengenai Hama Helopeltis.

6. Berusaha membantu kebutuhan-kebutuhan pokok Perkebunan, yaitu beras dan minjak tanah yang harus diberikan dengan pertijuma kepada buruh-buruh Perkebunan.

Dalam bulan Agustus segera dibentuk sebuah Panitia yang khusus ditugaskan untuk mempelajari masalah kebutuhan beras bagi Perkebunan².

Dalam hal kebutuhan beras diusahakan untuk mendapatkan kembali pendjatahan beras dari JUBM kepada Perkebunan² dan untuk mendatangkan beras dari daerah² surplus diluar Djawa, a.l. dari Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Pendjatahan beras dari JUBM ternyata tak dapat dikabulkan, karena tiada tjukup persediaan. Untuk mendatangkan beras dari daerah² Sulsel dan Sumut tertumbuk kepada soal² transport (idzin dapat diperoleh) dan permodalan. Mengenai kebutuhan minjak tanah bagi Perkebunan² hingga kini belum dapat disentralisir djatahnja.

7. Untuk melaksanakan segala usaha dibidang kebutuhan Perkebunan² (Estate-supply) dan untuk dapat mengkoordinir usaha² bersama dari Perkebunan² di Djawa Barat, maka pada tgl. 14 Djanuari 1964 dibentuk sebuah Badan Usaha yang diberi nama „PT. DJABAR ESTATE“. Akan tetapi Badan Usaha ini tak dapat berdiri lama, karena tidak dapat diberi Surat Pengesjahan, satu dan lainnya berhubungan dengan ketentuan bahwa OPS itu tidak diperkenankan mempunyai Badan Usaha.

8. Dalam masa kesulitan beras (patjeklik) pada permulaan tahun 1964 (bandingkan: harga beras ketika itu sekitar Rp. 200,—/Kg dan Karet Sheet I sekitar Rp. 250,—/Kg) di beberapa Perkebunan timbul ketegangan-ketegangan, karena pemberian tjatu beras tjampuran (yaitu beras ditjampur dengan djagung, hal mana sebenarnya sesuai dengan Pemerintah).

Untuk menghilangkan/mentjegah ketegangan² itu maka OPS Perkebunan dengan dibantu oleh Kepala Djawatan Hubungan Perburuhan Daerah IV di Bandung pada tgl. 19 Maret 1964 mengadakan musjawarah dengan Pimpinan Serikat² Buruh Perkebunan Tingkat Djawa Barat jaitu:

- (1). Sarbupri Sobsi,
- (2). Sarbupri Gasbiindo,
- (3). S o b r i,
- (4). Sarbumusi,
- (5). K. B. K. I.,
- (6). K.H.M.

Dari Musjawarah itu diperoleh keputusan yang menegaskan bahwa Serikat² Buruh dalam keadaan darurat itu dapat menjetudjuai pemberian tjatu beras tjampuran kepada buruh Perkebunan. Keputusan ini segera diumumkan kepada Pengusaha² Kebun dan ketegangan² akhirnya dapat diredakan.

9. Ikut aktif membentuk „Badan Pelaksana Bursa Djabar” yang diinstruksikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Dt. I Djawa Barat (dalam bulan Djanuari 1964).
10. Bersama PPN ikut aktif menjelenggarakan Pameran Pembangunan Djawa Barat disektor Perkebunan, yang berlangsung dari tgl. 17 Agustus s/d 5 September 1964 di Bandung.
11. Pada tgl. 4 Oktober s/d 6 Oktober 1964 atas perkasa Sub OPS Priangan Timur diselenggarakan Musjawarah Perkebunan Besar Swasta di Pangandaran (Tjiamis Selatan) yang dihadiri oleh Menteri Perkebunan, dimana beliau berkenan memberikan amanatnya.

Rentjana² yang akan dilaksanakan.

1. Membentuk Badan Musjawarah antara OPS Perkebunan dengan Serikat² Buruh Perkebunan tingkat DT. I Djawa Barat untuk dengan setjara musjawarah dapat memetjahkan pelbagai persoalan perburuhan, sehingga ketegangan² antara Pengusaha Perkebunan dengan pihak buruh bisa dihindarkan/diperketijil.
2. Menertibkan madjalah bulanan OPS Perkebunan dalam bentuk stensilan, dimana dapat dimuat segala petunjuk dan saran² mengenai

soal² kulturtechnis dan management Perusahaan Perkebunan. Staf redaksi akan dipegang oleh Sardjana² Pertanian dari UNPAD.

3. Mengadakan kursus² aplikasi dalam hal management dan soal² kulturtechnis Perkebunan. Djuga dalam hal upgrading.
4. Di-tiap² daerah Perkebunan mengadakan kebun bibit (entrijuinen) untuk memudahkan mendapat bibit djenis² unggul.
5. Mengadakan koordinasi dalam hal Estate-supply dan marketing hasil-hasil Perkebunan.

PERTUMBUHAN OPS KONPEKSI DT. I DJAWA BARAT DARI TAHUN 1962 SAMPAI TAHUN 1965

Organisasi.

Sedjak OPS KONPEKSI Perwakilan Dt. I Djawa Barat dibentuk dan disjahkan dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat No. 76/16/OPS-DR/62 tgl. 28 Pebruari 1962 atas realisasi dari Perpu. No. 19/th. 1960 telah berusaha sekuat tenaga dengan segala kemampuannja untuk membangun dan mengembangkan saiap organisasi, sehingga di-bidang administratif di-daerah² Tingkat II dan Keresidenan telah mem-bentuk Tjabang-Tjabang jang s/d achir bulan April 1965 djumlahnja meliputi 15 daerah Tjabang termasuk Kotapradja dan Dt. II Bandung. Jang diurus/diselenggarakan oleh Perwakilan, adapun ke 15 Tjabang tersebut ialah sbb.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tjabang Tangerang. | 9. Tjabang Tjiamis. |
| 2. Tjabang B o g o r. | 10. Tjabang Tjirebon. |
| 3. Tjabang Lebak/Rangkasbitung | 11. Tjabang Purwakarta. |
| 4. Tjabang Sukabumi. | 12. Tjabang Krawang. |
| 5. Tjabang Tjiandjur. | 13. Tjabang Serang. |
| 6. Tjabang Sumedang. | 14. Tjabang Dt. II Bandung. |
| 7. Tjabang G a r u t. | 15. Tjabang Kopra Bandung. |
| 8. Tjabang Tasikmalaja. | |

Susunan pengurus.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat No. 76/16/OPS-DR/62 tgl. 28 Pebruari 1962 pada mulanja Dewan Pengurus Perwakilan terdiri dari 5 orang j.i.:

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. K e t u a | : Tb. Amar. |
| 2. Anggauta | : Agus Kemal. |
| 3. Anggauta | : Abdullah. |
| 4. Anggauta | : Oey al. Agus. |
| 5. Anggauta | : Ach. Djupri. |

Ternjata bahwa formasi Pengurus tersebut diatas mengalami peru-bahan² berhubung satu dan lain diantara Anggauta Pengurus mempunjai kesibukan² didalam mendjalankan Perusahaannja, maka beberapa dian-tarannya mengajukan surat permohonan berhenti sebagai anggauta pengur-rus; selandjutnja oleh karena mengingat pentingnja serta mengingat pula pada perkembangan lainnja sesuai dengan andjuran Dewan Pengurus OPS Tekstil dengan melalui kebidjaksanaan dan rapat² Pengurus OPS KONPEKSI Perwakilan Dt. I Djawa Barat mengadakan beberapa kali

reformasi pengurus dengan formasi terachir dari Pengurus Perwakilan Dt. I Djawa Barat sebagai berikut:

1. K e t u a : Tb. A m a r.
2. Wakil Ketua : Abdullah.
3. Sekertaris : Ach. Djupri.
4. Bendahara : R.A. Suwarjo.

Sambil menunggu surat keputusan dari Menteri jang bersangkutan, kepada Sdr. R.A. Suwarjo telah dikeluarkan Surat Pengangkatannja oleh Dewan Pengurus Perwakilan dengan Surat Keputusan Sementara. Dan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tertanggal 20 Nopember 1963 No. 129/B-I/Eksos/SK/63 tentang Pengangkatan Pengurus OPS KONPEKSI Djawa Barat, maka susunan Pengurus OPS KONPEKSI Djawa Barat terdiri sebagai berikut:

1. K e t u a I : Opang Wachju.
2. „ II : Tb. Amar.
3. Anggauta : Achmad Djupri.
4. „ : Abdullah.
5. „ : R.A. Suwarjo.

Perkembangan Organisasi.

Dibidang administrasi/personalia:

- a. Sedjak terbentuknja OPS KONPEKSI Perwakilan Djawa Barat sampai sekarang telah terbentuk 14 Tjabang ditiap Dt. II/Karesidenan diseluruh Dt. I Djawa Barat lengkap dengan susunan personalianja.
- b. Keanggautaan telah terdaftar 650 Perusahaan Konpeksi/Pendjaitan diseluruh Djawa Barat dengan pembagian:
 1. Sebanjak 128 Perusahaan jang telah berlisensi dan
 2. Sebanjak 522 Perusahaan jang sedang menjelesaikan peridjinan lisensi.
- c. Alat produksi telah terdaftar sebanjak 7.500 buah mesin djahit.

Dari hasil usaha² tersebut diatas ternjata sampai sekarang belum bisa di-realisir kearah tertjapainja usaha² Pemerintah dalam pembentukan² OPS² terutama dalam pelaksanaan Program Sandang Pemerintah dimana di-njatakan didalamnja bahwa setiap hasil produksi harus lebih dilipatkan untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur, adapun kematjetan² ini setelah merasakan dan mengadakan penampungan² pendapat setjara sek-sama dan terutama menampung segala keluh kesah jang dihadapi para pengusaha diantaranja adalah sebagai berikut:

Kesulitan² jang dihadapi perusahaan Konpeksi.

- a. Dalam keadaan meningkatnja harga bahan² baku jang diperlukan seperti sekarang ini dimana sebagian besar konsumen lesu dalam daja belinja, mengakibatkan merosotnja kapasitas produksi.
- b. Terutama dengan meningkatnja harga bahan² pokok ekonomi masjarakat jang dibutuhkan se-hari² mengakibatkan tuntutan upah² buruh sedangkan pengusaha dari akibat itu perusahaannja tidak bisa lantjar memproduksi dan setelah djadi sulit djuga untuk didjual.
- c. Dengan tidak lantjarnja untuk mendapatkan bahan² jang diperlukan, karena sulitnja didapat, mengakibatkan pula industri berdjalan seret, jang sudah barang tentu dalam keadaan vacuum Pengusaha harus memberikan uang tunggu kepada buruhnja.
- d. Penjaluran bahan baku/pembantu jang diharapkan bisa berdjalan dan lantjar dapat diberikan OPS, ternyata sampai sekarang belum bisa memenuhi harapannja.

Usaha²/Perdjoangan OPS Konpeksi.

- a. Untuk mempertahankan/melaksanakan pembangunan organisasi di bidang materi jang diperlukan, OPS Konpeksi Djawa Barat mengusahakan order² pembuatan pakaian setjara maakloon dan usaha² tersebut bukan sadja diperlukan khusus untuk itu akan tetapi dalam rangka menondjalkan kemampuan Anggauta² dalam pembuatan pakaian djadi setjara massal.
- b. Kemampuan memproduksi pakaian djadi bagi para anggauta pernah diperlihatkan sewaktu penjelenggaraan Asia Games ke IV dan Ganefo ke I di Djakarta dimana produksi pakaian djadi sedjumlah l.k. 80.000 stel untuk keperluan tsb. dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari seminggu, hal ini ternyata para anggauta bukan sadja telah menunjukkan kemampuannja akan tetapi demi penyelesaian revolusi Nasional mereka dengan tekun dan kesadaran jang penuh telah menunjukkan kesadaran kerdjanja.
- c. Perdjoangan nasional lainnja seperti usaha² sosial OPS Konpeksi beserta para anggautanja jang tersebar diseluruh Djawa Barat pada tahun³ jang lalu tidak pernah absen dan penuh kesadaran dalam memberikan sumbangan² kepada korban bentjana alam, seperti korban Gunung Agung, korban banjir dlsb. jang bersifat sosial, baik berupa uang ataupun berupa pakaian djadi.

Kantor OPS Konpeksi.

Kantor OPS Konpeksi sampai waktu ini masih menumpang pada Kantor BPU RAPIH Djl. Merdeka 25 Bandung demikianpun tilponnja BPU. RAPIH djuga.

**PERTUMBUHAN OPS ASSEMBLING SEPEDA
DT. I DJAWA BARAT
DARI MULAI TIMBANG TERIMA TH. 1964 — 1965**

Jang dimaksud dengan OPS ini ialah OPS Assembling Sepeda Gaja Baru OPS jang sekarang ini dibentuk sedjak tanggal 25 Djanuari 1964, berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tertanggal 20 Nopember 1963, No. 129/B-I/Eksos/SK/63.
- b. Surat Djawatan Perindustrian Rakjat Dt. I Djawa Barat tertanggal 17 Desember 1963 No. 3081/C-11 jang menggantikan OPS jang lama.

Dengan ditimbang terimakanja OPS jang lama kepada OPS jang sekarang ini tanpa anggauta, kas, hutang/piutang dan investarisasi serta harus berdjalan dengan langkah² sendiri sebagaimana ditekankan dalam Naskah Timbang Terima itu, maka sebagai hasilnja dari pada surat² Pengumuman, ber-angsur² beberapa Perusahaan/Bengkel Sepeda jang telah mempunyai idzin usaha /H.O. dan serta jang menudju kearah per-assembling-an Sepeda pada mendjadi anggauta OPS dengan kedudukan a.l. di Bandung, Tjirebon, Madjalengka, Tasikmalaja dan Bogor.

Perubahan-Perubahan diwaktu jang lampau dan sekarang oleh para anggauta benar² dirasakan dan merasakan adanja OPS serta benar² menerimanja pembagian dari allokasi Bicycle spare parts ex. Import jang 10% itu. Hal ini sebelumnja harus diakui adanja kesangsian dari fihak anggauta², akan tetapi kesangsian itu hilang setelah barang jang pertama dari allokasi ex. Import itu diberikan tanpa memungut uang pembajaran dimuka dari mereka. Penebusannja dilaksanakan dengan mengadakan sekali pindjaman modal.

Diatas digunakan kata „Benar²”, karena menurut keterangan dari beberapa anggauta jang kemudian diketahui bahwa mereka telah lama mendjadi anggauta OPS jang lama, selama masuk anggauta tak pernah menerima pembagian, soalnya adalah diluar wewenang.

Usaha² kearah mental ideologi Negara, bidang pembangunan dan kemasjarakatan, dikarenakan sebagaimana dikatakan diatas bahwa masuknja anggauta² itu setjara berangsur-angsur, baharu dilantjarkan setjara „Obrolan” dahulu dalam hal merombak Ekonomi Kolonial mendjadi Ekonomi Terpimpin Nasional dll. karena mereka pada waktu sekali-kali datang kekantor OPS dan belum pada taraf rapat² khusus ataupun mengeluarkan Brochure².

Walaupun demikian effectnja lumayan djuga sebagaimana jang dapat dilaksanakannja berupa sumbangan² diantaranya:

- a. Sumbangan Dana Dwikora.
- b. Sumbangan Gekerev.
- c. Sumbangan P.M.I.

Banjaknja Anggauta.

Banjaknja Anggauta jang hingga kini terdaftar, adalah:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Di Kotapradja Bandung | : 13 anggauta. |
| 2. Di Tjirebon | : 1 „ |
| 3. Di Madjalengka | : 1 „ |
| 4. Di Tasikmalaja | : 1 „ |
| 5. Di B o g o r | : 3 „ |

Djumlah 19 anggauta.

Djumlah tersebut diantaranja banjak anggauta dalam kopra Bandung, djika dibandingkan dengan djumlah perusahaan/Bengkel Sepeda jang telah mendapat idzin usaha/H.O. dari Kopra Bandung jang diterima daf-tarnja (sebanjak: 142 perusahaan) djauh dari pada memuaskan.

Kemungkinan djumlah anggauta akan ditambah seandainja apa jang termaktub dalam Per. Pres. No. 2 tahun 1965 Bab VI, pasal 8, punt 4 pula mendasarkan pada Bab I, pasal 1 punt 4 discrukan oleh Instansi jang lebih tinggi dari OPS, dikarenakan adanja perusahaan/bengkel sepeda jang masuk pada OPS lain.

Rentjana Sel² Production dll.:

1. Membikin rupa-rupa Bicycle Parts sedjauh jang dapat dibuat sendiri dalam batas-batas kemampuan.
2. Menstabilisier nama dan functie OPS Assembling Sepeda dalam arti kata jang sebenarnja baik keluar maupun kedalam dan tidak hanja organ penjalur barangnja.
3. Membentuk Tjabang-Tjabang dalam Dacrah Tingkat I Djawa Barat dimana anggauta berada sebagai perluasan organisasi.

Realisasi Allokasi Barang-Barang:

Allokasi barang-barang Import 10% jang didapat dari Gubernur Kepala Dacrah Djawa Barat Eksos, *sejak berdirinja OPS jang diketabui* sampai bulan Oktober 1964 sebanjak 12 (dua belas) surat penebusan ba-rang, jang dapat direaliseer kepada anggauta² dengan nilai nominal C/F Rp. 467.884,20.

**PERTUMBUHAN OPS LOGAM MULIA/BATU PERMATA
DT. I DJAWA BARAT DARI BLN. DJUNI 1963
S/D BLN. MARET 1965.**

Organisasi Perusahaan Sedjenis atau disingkat OPS Logam Mulia/Batu Permata Dt. I Djawa Barat didirikan pada tgl. 1 Djuni 1963 atas persetujuan dari Bapak Kepala Djawatan Perindustrian Dt. I Djawa Barat, dan pada tgl. 28 Nopember 1963 dengan surat keputusannja Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat dengan suratnja No. 109/B-I/Eksos/SK/63 terhitung mulai tgl. 20 Nopember 1963 mengangkat sebagai anggota Dewan Pengurus:

- Ketua I : SABANA Toko Perhiasan Mas dan Perak BPU Djawa Barat „BHINNEKA FADJAR”
Djl. Merdeka No. 38 Bandung.
- Ketua II : PANG YO HAN Toko Mas „INTEN BIDURI”
Djl. Oto Iskandardinata No. 86 Bandung.
- Penulis : KWA TONG IN Toko Mas „PRIATNA”
Gg. Suniaradja 14 Bdg.
- Komisaris : THE TONG HAY Toko Mas „HOK SIN”
Djl. Oto. Iskandardinata 126 Bdg.

Sebelum dibentuknja OPS Logam Mulia/Batu Permata Dt. I Djawa Barat, maka OPS Logam Mulia/Batu Permata Pusat di Djakarta telah berdiri dan sebagai djumlah ketjil dari pengusaha emas/perak jang ingin masuk mendjadi anggota OPS-nja mereka langsung mendaftarkan diri ke Djakarta. Akan tetapi setelah berdirinja OPS Logam Mulia Dt. I Djawa Barat jang berkedudukan di Bandung sekarang ini, maka tugas keseluruhannja di Djawa Barat dibebankan kepada kami untuk mengurus keanggotaannja demikian pula mengenai pendjataan bahan² keperluan perusahaan² tersebut.

Atas kerdja-sama antara OPS Logam Mulia dengan Djawatan Perindustrian Dt. I Djawa Barat maka pada achir tahun 1964, 75% dari pengusaha² jang ada di Kotapradja Bandung telah masuk mendjadi anggota. Sampai achir bulan Maret 1965 OPS Logam Mulia telah mempunjai 550 anggota sjah. Kalau dilihat dalam surat permohonan akan pembagian perak jang diajukan oleh tiap² Dst. II, maka djumlah pengusaha jang belum masuk anggota masih banjak sekali lebih kurang 1750 pengusaha, djumlah tsb. sedang ditekankan supaja mereka itu masuk mendjadi anggota.

Disamping mendapatkan djatah perak dari Bank Indonesia dalam tahun 1964 setjara continue (tiap² kwartal), djuga mulai dari bulan Djuni 1964 OPS Logam Mulia telah diangkat oleh BPU Perusahaan² Tambang

Negara di Djakarta sebagai penjalur dari Logam Perak jang telah dihasilkan oleh Pertambangan tsb. Tidak hanja terbatas kepada logam perak sadja jang disalurkan kepada anggauta/bukan anggauta tapi logam emas pun disalurkan jang djuga didapatkan dari BPU Pertambangan tsb. diatas. Penjaluran emas ini hanja dibagikan kepada Pengusaha² emas jang memiliki idzin A jang dikeluarkan oleh L.A.A.P.L.N. sadja.

Pemerintah sangat bidjaksana dengan ditampungnja pengusaha² Swasta kepada djenisnja masing², djustru dengan djalan demikian Pemerintah dapat mengontrol sampai dimana aktivitas mereka sebagai pengusaha swasta, apa lagi dengan dibentuknja Bamunas sebagai Soko Guru dari pengusaha swasta tsb. jang membawa mereka kepada pengusaha progresif dan revolusioner mengemban kepada Ampera dan Dekon.

Dibidang produksi OPS Logam Mulia mempunjai rentjana agar pembikinan keradjinan perak tsb. misalnja, jang biasa dikerdjakan dengan tangan, supaja dikerdjakan dengan alat² mesin demi produksi jang mengikat pula motif² dari barang² keradjinan jang dibikinnja harus disesuaikan dengan kepribadian Nasional kita, djelasnja menggali lagi kebudayaan leluhur kita jang tidak kalah oleh bangsa² lain, sehingga dapat digemari bukan sadja oleh rakjat Indonesia bahkan lebih digemari pula oleh orang² asing pengundjung tanah Air kita jang molek ini. Untuk melaksanakan rentjana tsb., diharapkan bantuan bahan baku dan memudahkan dibelinja alat² baru jang didatangkan dari luar negeri.

PERTUMBUHAN OPS PLASTIK DARI TAHUN 1960 S/D TAHUN 1965.

OPS Barang² Plastik dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Perindra tanggal 15 September 1961 No. 47/SK/TKR/1961 di Djakarta berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 19 tahun 1960 jo Undang² No. 1 tahun 1961 (L.N. No. 3 tahun 1961).
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 17 Djuli 1961 No. 987.

Tudjuan dari OPS ialah:

- a. Menertibkan dan membina djenis industri swasta, terutama untuk memperlantjar dan mempertjepat usaha kearah akan hasil produksinja dengan mutu jang baik.
- b. Mengembangkan perusahaan² plastik didaerah tingkat I/II Djawa Barat serta meninggikan daja gunanja dalam rangka pcbangunan Negara dan Masjarakat.

Pada bulan Agustus 1963 ada perubahan susunan pengurus dan dibentuk susunan pengurus baru lagi pada bulan itu djuga (bulan Agustus 1963) sebagai berikut:

Ketua I : R.E. Sanjoto M.Sc. Djl. Ganeça No. 10 Bandung.
Ketua II : Soedarto Djl. Raya Barat 486 Bandung.
Sekertaris : Soma Sunardi Blok. Tarogong Timur 184/196A.
Bendahara I : Liauw Tiauw Lie Djl. Tjibadak 176 Bandung.
Bendahara II : Thie Keng Phiauw Gg. H. Sapari No. 20 Bandung.

Aktipitas jang telah dilakukan sedjak bulan Agustus 1961 s/d Agustus 1964 (selama 3 tahun) sebetulnja telah berdjalan dengan baik jaitu setelah dilakukan atas beleid pengurus daerah untuk mengurus penjaluran bahan baku kebutuhan para anggauta jang didapat dari P.T. Shell Indonesia Djakarta via agen tunggalnja N.V. Agung dan selandjutnja dipusatkan tempat pembagian bahan baku tsb. pada Tjabang N.V. Agung Bandung (Djl. Trunodjojo 11) langsung kepada para anggauta OPS.

Untuk mentjegah penjelewengan bahan baku tsb. dan untuk mempererat hubungan para Pengurus OPS dengan anggautanja bahkan telah disusun dalam OPS, suatu Panitia Social Control jang tugasnja melakukan pengawasan pembagian bahan baku tsb. dll. agar sesuatu dapat dilakukan dengan seadil-adilnja.

OPS telah mengikuti dan turut serta dengan Pameran Industri Djawa Barat I tahun 1962. Mulai pada waktu itu djumlah anggauta ber-angsur² tambah banjak hingga mentjapai 60 anggauta. Setelah melihat perkem-

bangun yang baik, maka dikandung maksud akan mentjaba menjempurnakan OPS Plastik, dengan jalan:

1. Akan mendirikan kantor OPS selengkapnja (dengan alat² kantor dan pegawai) dengan beaja dari para anggauta OPS.
2. Akan mendirikan perbengkelan OPS untuk perbaikan mesin² dan matrijzen para anggauta dimana kelak akan menguatkan keuangan OPS. Belum sampai pada pelaksanaan rentjana tsb. diatas OPS Plastik telah terbentur dengan kenaikan harga bahan baku jaitu: Djuni 1963 kenaikan harga sekaligus 200%; dua bulan kemudian (Agustus 1963 naik lagi 100%. Dengan kenaikan yang terus-menerus itu mengakibatkan para Pengusaha anggauta OPS kehilangan semangat bekerdja.

Mengingat sukarnja bahan baku untuk Plastik tsb. para anggauta tiada menaruh perhatian lagi atas bahan baku yang selandjutnja akan disalurkan oleh OPS. Karena hal² tsb. diatas maka berangsur berobah djumlah anggauta yang sampai pada waktu sekarang hanya sebanjak kurang lebih 15 anggauta sadsja (yang masih bekerdja). Kebanyakan dari mereka telah berhenti bekerdja, mengganti haluan dari usahanja dll. dan selandjutnja ada yang mengundurkan diri dari keanggautaan OPS. Perlu didjelaskan bahwa, kebanyakan dari anggauta OPS bersifat „home industry” dan pengusahanja hampir semua berbangsa Tionghoa yang alam fikirannja hanya ditudjukan kepada soal djaminan ataupun bantuan Pemerintah agar usahanja dapat berdjalan lantjar. (maksudnja mendapatkan bahan baku dari OPS dengan harga yang rendah).

PERTUMBUHAN OPS GELAS DT. I DJAWA BARAT DARI 1-1-1964 SAMPAI 1965.

Organisasi.

OPS Gelas Dt. I Djawa Barat didirikan atas Instruksi J.M. Menteri Deprindra dengan penundjukan Gubernur Kepala Dacrah Djawa Barat dengan Sk. No. 129/B-I/Eksos/SK/63 tgl. 20-12-1963.

Personalia jang ditundjuk adalah:

1. Darubroto M.Sc. dari PNPR Penelitian Balai Keramik sebagai Ketua.
2. Nadjib dari N.V. Lima Pabrik Gelas Tjirebon sebagai anggauta Pengurus.
3. R.A. Somamihardja dari N.V. Perdagangan dan Industri Gelas R.A.S. sebagai anggauta Pengurus.

Sebelum OPS Gelas didirikan, maka N.V. „RAS” pada waktu itu telah ikut serta didalam OPS Logam. OPS Gelas sebagai aparat Departemen Perindustrian Rakjat dengan maksud dan usaha:

1. Ikut serta mensukseskan Triprogram Pemerintah.
2. Memupuk dan mengembangkan kerdja-sama antara anggauta² OPS.
3. Aktivitas² jang dapat menimbulkan pengharapan² untuk madjunja organisasi OPS.
4. Memperbesar daja guna serta produktivitas dari kegiatan² perusahaan dan memberikan petundjuk², bimbingan dan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para anggautanja.

Untuk masa enam bulan kemudian dari saat itu OPS Gelas belumlah dapat merealisir hal² tersebut diatas dan baru meletakkan dasar² dan landasan² kerdja selandjutnja dan telah melangkahkan kakinja didalam memenuhi tugasnja jang telah digariskan.

Setapak demi setapak para Pengurus OPS Gelas dengan disertai suka dan duka, walaupun belum mempunjai kantor Sekertariat dan keuangan jang permanen, telah berusaha untuk menjempurnakan dan memperkokoh dasar² landasan tersebut. Maka untuk merealisir hal tersebut dan agar segala sesuatu dapat berdjalan sebagaimana jang diharapkan, kepada Sdr. Ketua OPS Gelas telah dimintakan idzin tertulis, agar supaja Kantor Sekretariat OPS Gelas disentralisir di Gg. Bantjeuj 71/13C dengan mempergunakan Kantor N.V. RAS.

Didalam memulai tugas kewadjabannja baik sebagai alat revolusi maupun sebagai satu²-nja forum golongan pengusaha swasta Nasional jang berfungsi sebagai aparat Departemen Perindustrian Rakjat, maka hal² jang mendapat prioritas OPS Gelas kini ialah:

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan gerakan tanda kebaktian pengusaha Swasta Nasional (Gekerev).

- b. Mengkoordinasikan anggota² OPS Gelas Daerah Tingkat I Jawa Barat dan
- c. Perlu mempertinggi ketahanan Revolusi, dalam segala bidang lebih diperkuat dengan meninggikan tarap kewaspadaan.

Sambil menunggu Instruksi selanjutnya dari J.M. Menteri/Ketua Umum Bamunas, maka dalam masa transisi OPS Gelas yang telah dibentuk oleh para Menteri yang bersangkutan sebelum dikeluarkannya peraturan Presiden No. 2/1965, maka OPS Gelas kini akan menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.

Bidang Mental dan Ideologic.

- a. Memberikan kesadaran kepada para anggota OPS Gelas dalam kedudukannya sebagai bagian dan salah satu Soko Guru dari pada Revolusi.
- b. Mengamalkan makna TAVIP agar supaya diresapi didalam rangka meningkatkan perjuangan Revolusi sekarang ini dengan jalan menjabarkan dan memberikan formulier² Sajembara Gerakan Mendalami TAVIP, supaya segenap anggota OPS Gelas ikut serta aktif mengikuti sajembara.

Kegiatan² Anggota.

Hingga kini belum ada data² yang lengkap mengenai kegiatan² anggota OPS Gelas.

Mengingat telah dilaksanakannya gerakan tanda kebaktian pengusaha Swasta Nasional (GEKEREV) sebagai keputusan Presiden Kabinet Dwikora, walaupun hasilnya kini belum konkrit, maka setelah GEKEREV berachir, dapat diharapkan segala sesuatunya diralisir sesuai dengan maksud dan usaha OPS.

Keanggotaan:

Perusahaan² yang terdaftar sebagai tjalon anggota adalah kurang lebih 17 perusahaan, tiga perusahaan diantaranya yang telah memasukkan surat permohonan sebagai anggota OPS ialah:

1. Pabrik Gelas P.T. Sinar Pagi berkedudukan di Bogor.
2. Pabrik Gelas P.T. Pagenas berkedudukan di Bogor dan
3. Pabrik Alat² Laboratorium N.V. RAS berkedudukan di Bandung.

Perusahaan Veteran C.V. „KARYA” berkedudukan di Bandung dengan suratnya No. 111/IV/65 tgl. 5-4-1965 telah mengundurkan diri sebagai tjalon anggota dengan alasan, bahwa C.V. „KARYA” sedjak pertengahan tahun 1964 tinggal namanya saja, dengan lain perkataan tidak ada aktivitas apa².

Kegiatan dalam tjabang usaha ini. ,

Di Indonesia banjak terdapat batuan kapur jang dapat dipakai untuk pembuatan gelas. Begitu pula tidak kurang sumber² pasir putih. Karena itu pertumbuhan industri gelas dinegara kita mempunyai landasan kuat. Karena industri gelas merupakan suatu potensi industri jang tidak boleh diabaikan, maka kiranya lebih banjak lagi perhatian perlu ditjurahkan dalam usaha kita untuk membina pertumbuhannja. Beberapa persoalan jang butuh perhatian segera adalah:

1. Supply bahan² solar jang tidak terdjamin kelantjarannja,
2. Supply bahan² kimia sebagai pengubah gelembung² (purifier) jang djuga masih perlu diimpor.
3. Supply bahan soda jang masih perlu diimpor.
4. Alat² pembentukan jang dapat mempertinggi kapasitas peralatan jang telah ada dengan tjetakan² (bahan²-nja) jang dapat tahan pemakaian lebih lama.

Diharapkan, bahwa perusahaan² gelas dapat menggunakan Organisasi OPS Gelasnja mendjadi suatu medium untuk setjara bersama-sama memec-tjahkan persoalan² jang dapat menjangkut kelangsungan kerdja mereka pada umumnja. Jang termasuk wewenang dan tugas-tugas OPS Gelas adalah:

- a. Pabrik Alat² Laboratorium.
- b. Pabrik Genting Katja.
- c. Pabrik Katja Mobil.
- d. Pabrik Gelas.
- e. Pabrik Gelas Optik dan
- f. Pabrik Katja Tjermin.

P e r s o n a l i a.

Untuk kelantjaran djalannja sekertariat dan segala sesuatu dapat direalisir dan dilaksanakan, maka mulai bulan Maret 1965 telah dipekerdjakan seorang tenaga pembantu Sekertaris dengan merangkap segala tjabang pkerdjaan.

Keluaran Sekertariat.

Kesulitan² keuangan Sekertariat OPS Gelas disebabkan karena ge-djala² pembayaran uang pangkal dan iuran anggauta, jang hingga kini belum ada jang memenuhi kewadjibannja.

Sebagai way out untuk mentjegah adanja vacuum dan demi kehormatan pengusaha Swasta Nasional progresief revolusioner maka segala sesuatu seperti:

- a. Ruangan Kantor, Sekertariat OPS Gelas untuk sementara telah mempergunakan Kantor N.V. RAS.

- b. Kebutuhan akan alat² tulis, mesin tik, honorarium seorang petugas untuk sementara telah dipikul oleh N.V. RAS.

Penggerakan Tenaga dan Modal (Funds and Forces).

Penggerakan forces telah dilaksanakan dengan jalan menggerakkan tenaga sukarelawan dengan bantuan segenap anggauta OPS Gelas keprojek Djatiluhur.

Telah mengerahkan segenap anggauta OPS Gelas untuk ikut serta dalam Pavilion GPS Keramik pada Pameran Pembangunan Djawa Barat 1964 yang diselenggarakan pada bulan Agustus/September 1964.

Pada malam penutupan Pameran Pembangunan Djawa Barat 1964 di Sport Hall Gelora maka Pavilion GPS Keramik telah dinjatakan sebagai juara pertama dengan piala dan penghormatan dari Ibu dan Bapak Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat.

OPS Gelas telah pula mendapat perhatian khusus dari Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat dan J.M. Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena dibidang Alat² Laboratorium.

Rentjana-Rentjana.

Telah direntjanakan untuk menghubungi Instansi² Pemerintah dalam hal-hal yang ada hubungan seperti:

- a. Djatah² untuk keperluan dan kebutuhan para anggauta OPS Gelas.
- b. Kebutuhan² akan mesin² pembikinan gelas dan mesin² lainnja untuk Gelass Industrie dan para anggauta.

Lain-lainnja.

Susunan Pengurus OPS Gelas Daerah Tingkat I Djawa Barat adalah sebagai berikut:

1. K e t u a I — Darubroto M.Sc. Kepala BNP penelitian Balai Keramik Djl. Raya Timur 322 Bandung.
2. K e t u a II — R.A. Somamihardja dari N.V. RAS Gg. Bantjeuj No. 71/13C Bandung.
3. K e t u a III — Nadjib dari Pabrik Gelas N.V. Lima Tjirebon.
4. Sekertaris — Surodji dari C.V. SAMI ADJI Gg. Saleh 1 Bdg.
5. Bendahara — Djie Siouw Hien dari N. V. KERTALAKSANA Djl. Raya Timur 360 Bandung.
6. Komisaris — Drs. Ibnu Suroso Majoor Veteran dari perusahaan Veteran C.V. KARYA Bandung.
— Usman dari Pabrik Gelas Optik A. Kasum Djl. Braga 21 Bandung.

PERTUMBUHAN OPS MAKANAN UMUM.

OPS Makanan Umum adalah pendjelmaan dari „GAPOTTI” Dst. I Djawa Barat berdasarkan surat Djawatan Perindustrian Tk. I Djawa Barat No. 1901-08 tanggal 9 Oktober 1964.

Gapotti singkatan dari Gabungan Perusahaan Ontjom Tempe Tahu Indonesia didirikan pada tanggal 5 Agustus 1959, dasar dan pedoman pembentukannya berlandaskan dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 tentang kembali kepada U.U.D. 1945.

Dalam perdjolongan untuk mentjapai tudjuan tersebut mengalami berbagai rintangan dan/atau djatuh bangun, karena anggauta²-nja terdiri dari pengusaha² Industri Rakjat Ketjil/Makanan Umum Rakjat Ketjil jang lemah dalam segala bidang terutama dalam soal modal/dana, oleh karenanya tidak mampu menguasai bahan baku jang diperlukan para anggauta²-nja, sebab bahan² baku jang diperlukan oleh Pengusaha²/anggauta² Gapotti hampir seluruhnja/100% dikuasai oleh pengusaha Modal Besar/Domestic Asing. Tantangan² ini dianggap sebagai romantika, dinamika dan dialektikanja perdjolongan dan/atau Revolusi.

Pada tahun 1960 keluarlah U.U. No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 dengan ketentuan² pokok mengenai Gabungan Perusahaan Sedjenis.

Berhubung dengan keluarnya Undang² dan Peraturan Pemerintah tsb. Gapotti berusaha untuk menjesuaikan diri supaja Organisasi Gapotti diakui dan/atau dibentuk/didjadikan OPS, sesuai dengan Undang² dan P.P. tersebut diatas dan mengingat pula pada andjuran² Pemerintah. Maka untuk itu diadjukan surat kepada Djawatan Perindustrian Daerah Tk. I Djawa Barat tertanggal 26 Djanuari 1962 No. 020/A/62, perihal pengesahan/peleburan Gapotti mendjadi OPS jang diakui oleh Pemerintah.

Pada waktu itu Djawatan Perindustrian Daerah Tk I Djawa Barat belum berani mengakui setjara resmi Gapotti sebagai OPS karena terbentur pada Peraturan² jang masih belum djelas, dan baru tanggal 2 Oktober 1963 didapat panggilan dari Djawatan Perindustrian Daerah Tk. I Djawa Barat dengan suratnja No. 2393Clo perihal OPS. Dalam pertemuan itu didapat pendjelasan² terutama pendjelasan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat No. 102/SK/VII/63 tentang pelaksanaan P.P. No. 243 tahun 1961, jang mana dalam daftar lampirannya terdapat 56 djenis OPS jang ada didalam lingkungan Deperindra dan diantaranya ada jang tergolong/sesuai dengan Organisasi Gapotti ialah OPS Makanan Umum jang di Djawa Barat belum ada dan dipusatpun belum terbentuk, maka dengan itu diadakanlah pembitjaraan² persiapan pembentukan OPS Makanan Umum Daerah Tk. I Djawa Barat sambil menunggu pembentukannya dipusat/Djakarta.

Selama waktu satu tahun Gapotti masih belum mendapat pendje-lasan lagi apakah dipusat sudah terbentuk atau belum. Schubungan de-ngan itu mengingat Gapotti belum mempunjai pegangan hukum/berbadan hukum guna menggiatkan usahanja, karena djika menghubungi Instansi² Pemerintah dan Perusahaan² Negara guna mendapatkan pasilitas ban-tuannja, sering terbentur kepada pertanjaan tentang status/badan hukum dari Gapotti. Maka karena itu pada tanggal 5 Agustus 1964 dikirimkan lagi surat desakan/permintaan Pembentukan/Peresmian OPS Makanan Umum bersapta rentjana usahanja.

Pada permulaan bulan Maret 1965, berhubung belum didapat pen-djelasan/djawaban atas surat tersebut diatas, dan mengingat pula adanya kegiatan dan siaran² dari Bamunas Djawa Barat tentang GEKEREV, jang mana Gapotti pada waktu itu tidak/belum pernah diadjak berbitjara dan diberikan petunjuk² mengenai GEKEREV, mau dihubungi Dja-watan Perindustrian untuk mendapatkan penjelasannya, karena Gapotti merasa berkewadajiban mengintegrasikan organisasi didalam penyelesaian Revolusi Indonesia bersama-sama alat Revolusi lainnya.

Dalam menghubungi Djawatan tersebut didapat djawaban bahwa Djawatan Perindustrian Daerah Tk. I Djawa Barat telah mengirimkan surat djawaban mengenai pembentukan OPS Makanan Umum Tk. I Djawa Barat, seperti tersebut dalam ajat a diatas.

Dalam Perdjaoangannya.

1. Gapotti pada tgl. 1 Oktober 1962 mendaftarkan diri dan mendjadi anggauta Front Nasional Dst. Djawa Barat dan melulu aktif mengikuti rapat² dan gerakannya, tertjatat/daftar FN/D Djabar No. 74/Org/XI/62.
2. Dalam bidang pemeliharaan anggauta², Gapotti mengeluarkan siaran-siaran dan pertemuan² dengan Perusahaan² jang tergolong dan/atau masuk mendjadi anggauta Gapotti terutama pengusaha Ketjil, mengi-ngat pentingnja persatuan/pendjenisan perusahaan dalam bidang usaha khusus untuk menghilangkan konkurensi jang akan menga-kibatkan djatuh dan gulung tikarnya perusahaan ketjil dan lemah.
3. Untuk mendorong dan memberikan semangat dan memberikan ke-banggaan para anggauta², maka Gapotti mengeluarkan pernyataan²/dukungan mengenai Trikora, Dwikora dll. supaya anggauta merasakan benar² dirinja telah diintegrasikan dengan alat² Revolusi lainnya jang progressif.
4. Pengurus telah mengikuti coaching indoktrinasi Manipol Usdek Daerah Tk. I Djawa Barat jang diselenggarakan oleh team Indoktri-nasi Daerah Dst. I Djawa Barat pada tanggal 15 s/d 19 September 1962.

Keanggotaan.

Banjaknja anggauta hingga saat ini baru mentjapai 150 anggota dan menurut perkiraan didaerah Djawa Barat jang wadjib daftar dan masuk mendjadi anggauta $\pm$ 5.000 anggauta/perusahaan² jang tergolong dalam OPS Makanan Umum. Jang mendjadi sebab matjetnja pendaftaran karena baru sadja Gapotti dilebur mendjadi OPS Makanan Umum (ada kekuatan hukumnja) dalam hal ini sebagian para pengusaha jang bersangkutan belum mengetahuinja.

Bidang dan luasnja tjabang perusahaan (bedrijfstack) jang ditjakup oleh OPS Makanan Umum diantaranya:

Perusahaan Industri Rakjat:

Tahu, Tempe, Ontjom, Taoge, Ketjap, Tautjo, Kerupuk dll. Industri Makanan Umum jang tidak termasuk dalam kelima OPS jang bernaung dalam OPS Makanan berdasarkan Surat Keputusan J.M. Menteri Perindustrian Rakjat No. 102/SK/VII/63.

Rentjana Usaha.

Telah dikirimkan kepada Djawatan Perindustrian Daerah Tk. I Djawa Barat dan Deperindra Djakarta, tapi dengan ini tidak ada salahnja dikirimkan salinannja untuk bahan pertimbangan dalam penjusunan Pembangunan jang diharapkan.

Lain-lain.

Susunan Pengurus bersama ini dilampirkan Pengumuman No. 04/Peng/OPS/II/65, tanggal 28 Maret 1965.

„PERKEMBANGAN O.P.S. PERADJUTAN” DT. I DJAWA - BARAT

Riwayat OPS.

OPS Radjut Pusat didirikan pada tgl. 6-9-61 berdasarkan keputusan Menteri Deperindra No. 41 SK/TKR/61 dengan susunan pengurus: Ketua J.C. Tambunan dan 6 anggota dari pelbagai daerah di Indonesia, diantaranya Maskoen dari Djawa Barat, pada siapa kemudian diserahkan tugas untuk membentuk perwakilan di Djawa Barat.

Baru pada bulan April 1962 tersusunlah setjara resmi untuk wilayah Djawa Barat jang terdiri atas:

1. **Ketua** — Maskoen dari NV. Eversweat.
2. **Wakil Ketua** — Moh. Samin Pohan dari NV. Burangrang.
3. **Anggota** — Tarja dari Bandung P.T.

Adapun banjaknja anggota dalam tahun 1962 meliputi 84 perusahaan jang mana 52 perusahaan berkedudukan di Bandung, sedangkan sisanya tersebar di daerah²: diantaranya 5 di Tasikmalaja, 3 di Bogor, 2 di Tjirebon dan di Tangerang, Sukabumi, Purwakarta masing² ada 1 perusahaan.

Dalam tahun 1962 OPS Peradjudan Perwakilan Djawa Barat telah menjalurkan benang tenun sebanjak 2.041 baal. Waktu itu perdjoangan dititik beratkan pada memperoleh kontinuitas pembagian benang guna tertjapainja target Pemerintah, disamping itu untuk membimbing para anggota kearah terwujudnja Masyarakat adil dan makmur.

Lama atau tjepat tertjapainja tudjuan ini tergantung dari pelbagai faktor, tapi jang terpenting ialah mentjiptakan suatu iklim jang selaras dengan kepribadian dan kondisi di Negara kita.

Dalam tahun 1963 selama 1 tahun berdirinja perwakilan telah mengalami 2 kali perobahan:

1. Dalam tahun 1963 menurut keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat No. 129/B-I/Eksos/SK/63 tgl. 20-10-1963 pengurus terdiri dari:
 - a. **Ketua I** — Soedjajoto B.Sc. dari PNPR Nupiksa Yasa.
 - b. **Ketua II** — Maskoen dari NV Eversweat.
 - c. **Anggota** — Moh. Samin Pohan dari NV. Burangrang.
 - d. „ — Tarja dari Bandung P.T.
 - e. „ — Tjoa Eng Tjin dari Adiguna.
2. Dalam tahun 1964 ada lagi perobahan dari susunan pengurus menurut surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat No. 7207/B-I/Eksos/64 tgl. 8-6-64, jang mendjadi terdiri dari:

- a. Ketua I — Soedjajoto B.Sc. dari PNPR Nupiksa Yasa.
- b. Ketua II — Tarja dari Bandung P.T.
- c. Anggauta — Tjoa Eng Tjin dari Adiguna.
- d. „ — Jusuf Rosjid dari Gunung Kawi.
- e. „ — Chung Soen Woen dari NV RGM.

Untuk memperlengkapi dan menjempurnakan susunan pengurus maka kemudian pada pertengahan 1964 menurut surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat No. 85/B-I/Eksos/SK/64 tgl. 1-7-1964 diadakan reshuffle sebagai berikut:

1. Ketua I — R. Moh. Hasan dari Insin Djawa Barat.
2. Ketua II — R. Soedjajoto dari PNPR Nupiksa Yasa.
3. Anggauta — Tarja dari Bandung P.T.
4. „ — Tjoa Eng Tjin dari Perusahaan Adiguna.
5. „ — Jusuf Rosjid dari Perusahaan Gunung Kawi.
6. „ — Chung Soen Woen dari Perusahaan NV. RGM.

Perubahan tersebut adalah (perubahan tahun 1963/1964) atas dasar PP. No. 243/tahun 1963 dimana:

1. Ketua-schap harus mutlak dipegang oleh Perusahaan Negara,
2. Penjerahan kekuasaan pengangkatan pengurus dari J.M. Menteri Deperindra kepada Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat.

Riwayat sebelum ada lembaga OPS dapat dikatakan semuanya perusahaan industri belum mempunyai organisasi yang khusus, mereka hidup masing² dalam alam leberal, hingga timbul tenggelamnya tergantung dari pada baik buruknya perekonomian.

Setelah Repnblik Indonesia — tahun 1959 — jaitu kembali ke undang-undang dasar 45, maka perusahaan Industri memulai dengan penghidupan baru, menjusun masjarakat baru dengan dasar masjarakat sosialisme Indonesia.

Dalam rangka penertiban kembali alat² produksi dan distribusi, maka oleh Pemerintah dikeluarkan undang-undang No. 19 tahun 1960 dimana pelbagai Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Kooperasi dan Swasta ditentukan kedudukannya didalam kostellasi — sosialisme Indonesia.

OPS Peradjudan adalah termasuk keluarga GPS. Tekstil jang meliputi 6 OPS dibawahnja.

Azas dan Tudjuan OPS Radjut.

- a. Mengabdikan pada negara dan Masjarakat berdasarkan Manipol/Usdek.
- b. Menertibkan dan membina djenis² industri Peradjudan Swasta terutama untuk memperlantjar dan mempertjepat usaha kearah akan hasil produksinja dengan mutu dan harga jang lajak.

c. *Tugas.*

Mengembangkan perusahaan² yang menurut sifatnya termasuk dalam jenis Peradjudan, serta meninggikan daya gunanya dalam rangka pembangunan Negara.

Usaha.

Antara lain mengusahakan penjaluran dari berbagai bahan yang diperlukan oleh anggauta²-nya setjara teratur.

Perkembangannya.

Apa yang telah ditjapai dalam djangka waktu 4 tahun ialah:

1. Mental omschakeling para pengusaha dari alam liberal kepada pengertian sosialisme Indonesia. Timbulnja pengertian yang baik diantara para pengusaha.
Meskipun di lain² OPS dalam masa peralihan timbul pelbagai excses² yang tidak diinginkan, berkat pimpinan yang baik dalam OPS Radjut Daerah Tingkat I tidak ada hal² yang mengetjewakan.
Alhasil dalam bidang mental dan ideologi telah ada pengertian dan kesadaran yang mendalam.
2. Dalam bidang technis operationeel: Penjaluran bahan² baku dan spare-parts setjara kontinue meskipun banjak kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
Namun demikian kami tidak boleh menutup mata terhadap rintangan² yang kami hadapi yang sering kali disebabkan oleh hal² diluar kemampuan OPS Peradjudan.
Lebih² lagi djika diingat bahwa petualang² ekonomi dan musuh² revolusi dalam keadaan yang demikian sulit ini menggunakan kesempatan untuk menarik keuntungan bagi diri sendiri, bahkan lebih dari pada itu sering tidak segan² berusaha agar funds and forces kita dilumpuhkannya sama sekali.

Peristiwa² yang penting dalam kehidupan lembaga tersebut:

1. Terselenggaranja Braga Festival dalam tahun 1962.
2. Gelanggang Dagang dalam tahun 1963.
3. Pameran Pembangunan Djawa Barat tahun 1964.
4. Kerdja Bhakti di Projek Djatiluhur.

Dimana OPS Peradjudan Perwakilan Djawa Barat tidak pernah absen, sehingga memperoleh pelbagai penghargaan dan pujian.

Dengan demikian OPS bukan s saja membantu Pemerintah dalam usaha pembinaan pengusaha serta aparat produksinya, tapi setjara aktif membantu pula dalam soal² pemasaran marketing dari pada hasil produksi, serta pembiajaan dalam pencbusan bahan² baku.

Dalam rangka sales/promotion ini telah mentjapai hasil² jang gemilang bagi para pengusaha dengan pasaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnja ini dibantu pula oleh instansi² sipil dan militer baik di pusat maupun di daerah.

Pada achir 1964 banjaknja anggauta jang telah mendjadi warga OPS Peradjudatan Perwakilan Djawa Barat ada sebanjak 102 perusahaan, baik perorangan maupun jang badan hukum dan untuk keperluan ini telah disalurkan benang tenun sebanjak 2.322 baal dan 5.000 kg kaporit.

Dihuar itu masih ada pula beberapa perusahaan² jang belum memenuhi peraturan² untuk mendjadi anggauta OPS dan dalam waktu singkat oleh Pengurus akan/sedang diusahakan agar mereka ini semua dapat diterima mendjadi warga OPS.

Rentjana² jang akan diselenggarakan dalam waktu jad. untuk memenuhi seruan Pemerintah untuk berdiri diatas kaki sendiri, adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam pelbagai kegiatan Penanaman Kapas.
2. Menggiatkan export-drive pelbagai djenis hasil produksi para anggauta, hingga dengan demikian perusahaan² dapat pula menghasilkan devisa bagi Negara disamping memenuhi home — consumption.

PERTUMBUHAN PERWAKILAN OPS BARANG KARET DAN LAIN² DT. I DJAWA BARAT DARI TAHUN 1962-1965.

Berdasarkan.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 19 tahun 1960 jo. Undang² No. 1 tahun 1961 (L.N. No. 3 tahun 1961).
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 17 Djanuari '61.
3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 10 Djuni 1961 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Sedjenis Barang² Karet lainnja dibidang Perindustrian Rakjat dan,
4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 30 Mei 1962 No. 136/16/OPS/DR/62 dibentuklah Perwakilan Organisasi Perusahaan Sedjenis dibidang Perindustrian Rakjat jaitu pada tgl. 30 Mei 1962, disingkat OPS-BKL Daerah Tingkat I Djawa Barat.

Setelah didirikan OPS semakin terasa perubahannja dan manfaatnja, misalnja sadja menurut laporan² tahunan dari anggauta semakin njata perkembangan/kegiatan² usaha, terutama dibidang industri. Jang mendjadi kebanggaan adalah dari tahun ketahun tingkat perkembangan produksi makin maju dan teratur, sehingga memberikan kejakinan jang konkrit, bahwa dalam beberapa waktu lagi dibidang industri kitapun sudah pasti akan bisa menjamai negara lain.

Apa lagi dalam waktu² ini, sekalipun belum mentjukupi kebutuhan dan djarang sekali terdjadinja, djatah bahan² jang sangat penting dengan terorganisasi dapat disalurkan melalui OPS kepada anggauta dengan adil dan merata, jang sebelumnja memang tidak demikian. Ini memungkinkan kelantjaran produksi akan lebih terdjamin dan kedudukannjapun akan lebih stabil.

OPS Berdjuaug terus, memberikan penerangan²/gembleran untuk menjadarkan anggauta dimana Perusahaan swasta sebagai Soko Guru Revolusi perdjjoangan Bangsa Indonesia, lebih² dalam rangka peningkatan kesiap-siagaan dalam segala bidang, sebagai alat untuk menjelesaikan idee besar kita, jaitu mengemban Amanat Penderitaan Rakjat Bangsa Indonesia chususnja dan Amanat Penderitaan Rakjat Dunia umumnja.

Dalam bidang Pembangunan OPS-BKL giat terus, dengan turut sertanja dalam pameran² seperti:

- Pameran Industri tahun 1962 di Djalan Merdeka Bandung.
- Pameran Industri tahun 1963 di Gedung Wanita Bandung.
- Pameran Pembangunan dengan djulukan jang terkenal Pameran DWIKORA pada tahun 1964 di Bandung.

Kesemuanja dengan hasil jang sangat memuaskan.

Dalam bidang kemasjarakatanpun OPS-BKL tak pernah absen, misalnja:

- Ikut serta dalam Gelanggang Dagang dalam tahun 1963, dimana mendjual barang² hasil industri Perusahaan² jang tergabung dalam OPS-BKL dengan harga jang semurah-murahnja.
- Aktipitas² untuk membantu meringankan beban Pemerintah dengan memberikan sumbangan² seperti:
 - + sumbangan Dana Dwikora,
 - + sumbangan FF AA,
 - + sumbangan P.M.I.
 - + sumbangan Projek Djatiluhur dan bentjana alam lainnja.

Djumlah anggauta makin lama makin bertambah dan sekarang berdjumlah 39 (tiga puluh sembilan) anggauta. Menurut penjelidikan djumlah tersebut baru mentjapai $\pm 70\%$ dari djumlah jang seharusnja mendjadi anggauta diseluruh Djawa Barat.

Jang sedang dihadapi sekarang, adalah OPS-BKL bekerdja giat menginstruksikan kepada anggauta, untuk mempertinggi hasil produksi baik kwaliteit maupun kwantitet, agar supaja segera dapat menghasilkan barang² eksport jang sangat berguna.

Sebagai hasil penjelidikan barang² jang akan dieksport itu diantaranya ialah:

- Tali dari karet,
- Sandal karet kwalitet Djepang,
- Ban dalam sepeda,
- Zool/Hak,
- Karpet lantai dan mobil,
- Slang air,

dan barang-barang lain jang banjak mempergunakan karet.

Dengan demikian OPS-BKL mentjakup seluruh Perusahaan-Perusahaan anggauta jang memproses produksi barang-barang dari karet.

Susunan Pengurus.

- Ketua I : Trisnani.
- Ketua II : Harma.

PERTUMBUHAN OPS KEMBANG GULA DT. I DJABAR DARI MEI 1961 SAMPAI MEI 1965.

OPS Kembang Gula Daerah Tingkat I Djawa Barat dibentuk pada tgl. 26 Mei 1961 berdasarkan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat No. 07/SK/TKR/61 dan mulai aktif pada tgl. 26 Mei 1961, dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

K e t u a : The Joe Twan.
Wakil Ketua : Drs. Khoe Han Liat.
Anggauta : Ir. The Joe Wie.
Anggauta : Nj. Tjiong Sin Hong.

Sebelum diresmikan OPS Kembang Gula, pabrik² Kembang Gula diwilajah Daerah Karesidenan Priangan (Bandung, Tasikmalaja, Tjirebon, Sukabumi, Garut) merupakan suatu gabungan.

Susunan Pengurus OPS Kembang Gula di ad. 1, disahkan dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 15 Desember 1962 No. 206/BPP/VI/A-2/OPS-DR/62.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat ttgl. 17 Djanuari 1963 No. 017/M/I/63, maka susunan Pengurus OPS Kembang Gula mengalami perobahan atas instruksi Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tgl. 8 Pebruari 1963 No. 63/Inst/E.S/63 dan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tgl. 20 Nopember 1963 No. 129/B-I/Eksos/SK/63 telah diangkat Pengurus OPS Kembang Gula Daerah Tingkat I Djawa Barat sebagai berikut:

K e t u a : The Joe Twan.
Wakil Ketua : Drs. Khoe Han Liat.
Anggauta : Ir. The Joe Wie.
Anggauta : Nj. Tjiong Sin Hong.

Perlu dijelaskan bahwa Pengurus OPS Kembang Gula Pusat jang berkedudukan di Bandung dengan alamat Djl. Dr. Setyabudhi 242, jang mana susunan Pengurus OPS Kembang Gula Pusat adalah sebagai berikut:

K e t u a : Ouw Kong Hiap.
Wakil Ketua I : Drs. Tirtakusumah.
Wakil Ketua II : Tjiong Tjoan Kim.
Anggauta DEPU : Sugeng Tirtosiswojo.
" " : H. Soetopo.
" " : Achmad Susandi.
" " : Kho Hing Tjiat.
" " : Lim Tiong Ing.

Dalam rangka usahanya OPS Kembang Gula Daerah Tingkat I Djawa Barat telah berhasil melaksanakan synchronisasi perusahaan² Kembang Gula di Daerah³ Tingkat II/Kabupaten dengan terbentuknja Tjabang⁴ OPS sbb.:

1. Tjabang OPS Kembang Gula Keresidenan Tjirebon.
2. Tjabang OPS Kembang Gula Dt. II Tasikmalaja/Garut.
3. Tjabang OPS Kembang Gula Dt. II Sukabumi.

Dalam bidang Pembangunan antara lain telah ikut serta dalam tiap Pameran Pembangunan Djawa Barat 1962, 1963, 1964 di Bandung.

Dalam bidang kemasjarakatan, senantiasa ikut serta dalam pengumpulan sumbangan² untuk Dana³ PMI/DWIKORA/GANEFO dll., dan pada bulan⁴ jang baru lalu pernah ikut mengirimkan Sukarelawan⁵ ke Projek Djatiluhur.

Pengurus³ OPS Kembang Gula telah mengusahakan kebutuhan bahan⁴ baku maupun bahan penolong untuk kepentingan anggauta²-nja. Djumlah anggauta menurut tjatatan pada achir tahun 1964 ada 119 perus.

a. Kotapradja Bandung/Tjimahi	: 68 perusahaan.
b. Kabupaten Tasikmalaja	: 35 perusahaan.
c. Kabupaten Tjirebon	: 9 perusahaan.
d. Kabupaten Sukabumi	: 4 perusahaan.
e. Kabupaten Garut	: 3 perusahaan.
Djumlah	: 119 Perusahaan.

PERTUMBUHAN OPS SABUN DT. I DJAWA BARAT DARI TAHUN 1961 SAMPAI TAHUN 1965

- a. O.P.S. Sabun Dt. I Djawa Barat didirikan pada tanggal 9 Nopember 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat:
 1. Tanggal 17 Djuli 1961 No. 987 tentang Pembentukan dan Pengakuan Gabungan Perusahaan Sedjenis Kimia sebagai Gabungan Perusahaan Sedjenis dibidang Perindustrian Rakjat;
 2. Tanggal 14 September 1961 No. 46/SK/TKR/61 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Sedjenis Sabun Swasta dibidang Perindustrian Rakjat;
- b. Sebelum terbentuknja OPS Sabun Dt. I Djawa Barat telah ada 2 Gabungan Perusahaan Sabun ialah:
 1. Bandung.
 2. Tasikmalaja.

Kedua Gabungan tersebut berdjalan tidak lantjar (pasip) dikarenakan bahan² pokok jang dibutuhkan oleh para Pengusaha Sabun bisa dengan mudah didapatkan dari pasaran bebas dengan harga tidak begitu berbeda dengan harga E.Z.

Setelah O.P.S. Sabun Dt. I Djawa Barat terbentuk, maka para Pengusaha Sabun jang berada diwilajah Djawa Barat terus mendaftarkan diri untuk mendjadi anggauta. Kepatuhan mereka ini disebabkan dengan adanya Surat Keputusan Menteri No. 805 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 243.

Para anggauta Perusahaan Sabun terdiri dari 2 golongan:

1. Perusahaan² Sabun jang didirikan sebelum tahun 1961 dengan djumlah kurang lebih 40%;
2. Perusahaan² Sabun jang didirikan setelah terbentuknja O.P.S. SABUN Dt. I Djawa Barat dengan djumlah kurang lebih 60%;
3. Golongan jang kedua ini selaku new-commers akan mentjoba-tjoba untuk berusaha dalam bidang perindustrian, akan tetapi sebagian dari pada mereka mendapatkan banyak kesulitan misalnja tentang afzet-gebied.

O.P.S. Sabun Dt. I Djawa Barat dalam tugas kewajibannja terhadap para anggautanja:

1. Melaksanakan pembagian² bahan baku ex import, jang diterima dari Insin. Djawa Barat dan ex lokal dari Djawatan Perdagangan Dalam Negeri Priangan;
2. Memberikan petundjuk² dalam bidang penjempurnaan administrasi dan organisasi Perusahaan;

3. Memberikan nasehat² agar kwalitet produksi Sabun tetap menurut Type jang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Berhubung pembagian djatah bahan pokok ex import (caustic-soda) hanya sebesar 10% dari pada kebutuhan jang sebenarnya, maka para Pengusaha new-commers itu sebagian tidak dapat dipertahankan dan dengan sendiri-nja harus berhenti.

Para Pengusaha jang telah mempunjai afzet-gebied-pun tidak dapat memproduksi menurut daja kemampuannja, asal tjukup untuk menutupi ongkos² pengeluarannja.

Jang telah tertjatat sebagai anggauta O.P.S. Sabun Dt. I Djawa Barat kurang lebih 168 Perusahaan, akan tetapi pada waktu sekarang (tahun 1965) menurut laporan² dari K.D.P.² setempat, Perusahaan² Sabun jang masih berdjalan djumlahnja kurang lebih ada atau tinggal 107 Perusahaan.

Terdaftar.

Jang masih berdjalan.

1. Kotapradja Bandung	49 Perusahaan	20 Perusahaan
2. Kabupaten Bandung	5 Perusahaan	5 Perusahaan
3. Kabupaten Sumedang	3 Perusahaan	5 Perusahaan
4. Kabupaten Garut	9 Perusahaan	7 Perusahaan
5. Kabupaten Tasikmalaja	23 Perusahaan	9 Perusahaan
6. Kabupaten Tjiamis	15 Perusahaan	4 Perusahaan
7. Kabupaten Indramaju	2 Perusahaan	2 Perusahaan
8. Kabupaten Kuningan	3 Perusahaan	3 Perusahaan
9. Kabupaten Tjirebon	2 Perusahaan	2 Perusahaan
10. Kotapradja Tjirebon	13 Perusahaan	13 Perusahaan
11. Kabupaten Subang	2 Perusahaan	2 Perusahaan
12. Kabupaten Krawang	6 Perusahaan	5 Perusahaan
13. Kabupaten Djakarta	1 Perusahaan	1 Perusahaan
14. Kabupaten Tjiandjur	7 Perusahaan	7 Perusahaan
15. Kotapradja Sukabumi	6 Perusahaan	6 Perusahaan
16. Kabupaten Bogor	5 Perusahaan	4 Perusahaan
17. Kotapradja Bogor	5 Perusahaan	4 Perusahaan
18. Kabupaten Tangerang	5 Perusahaan	4 Perusahaan
19. Kabupaten Pandeglang	1 Perusahaan	1 Perusahaan
20. Kabupaten Serang	4 Perusahaan	3 Perusahaan
21. Kabupaten Rangkasbitung	2 Perusahaan	2 Perusahaan
Djumlah	168 Perusahaan	107 Perusahaan.

Jang sedang direntjanakan oleh O.P.S. Sabun Dt. I Djawa Barat ialah untuk pengumpulan modal guna keperluan stockpiling dalam bahan² baku, jang diutamakan mengenai minyak kelapa jang mana sampai sekarang belum dapat diatasi.

Berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Rakjat No. 017/M/I/63 tertanggal 17 Djanuari 1963 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat No. 62/Inst./E.S./63 tertanggal 8 Pebruari 1963 tentang pengangkatan anggauta² pengurus O.P.S. Daerah, maka anggauta pengurus O.P.S. Sabun Daerah Tk. I Djawa Barat terdiri dari 4 orang:

1. K e t u a — Soehana dari B.P.U. Kimia
2. Anggauta — Soesman dari Swasta
3. Anggauta — Saroyo dari Swasta
4. Anggauta — Soewita dari Kooperasi.

Jang aktip bekerdja hanja 2 orang (anggauta pengurus):

1. Soesman selaku Ketua Harian
2. Saroyo selaku Sekretaris.

PERTUMBUHAN OPS SIRUP SARI BUAH DAERAH TINGKAT I DJAWA BARAT DARI APRIL 1962 SAMPAI APRIL 1965.

OPS Sirup Sari Buah Daerah Tingkat I Djawa Barat dibentuk pada tanggal 15 Nopember 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² (Perpu) No. 19 tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tertanggal 15 Nopember 1961 No. 58/SK/BPP/61 dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua : Lie Pok Khee, Pabrik Sirup „Crown & Star”.
Wakil Ketua : Koo Tiong Soen, Pabrik Sirup „Brantas”.
Anggauta : M. Idris, Pabrik Sirup „Harum Manis”.
Anggauta : Lie Kian Seng, Pabrik Sirup „T r o s”.

Sebelum diresmikannja OPS Sirup Sari Buah, Pabrik² Sirup diwilajah Kotapradja Bandung telah tergabung dalam Gabungan Pabrik-Pabrik Sirup dan Kembang Gula.

Susunan OPS berikut Pengurus tersebut diatas, disjahkan dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 15 Desember 1962 No. 207/BPP/VI-B-6/OPS-DR 62.

Berdasarkan surat Menteri Perindustrian Rakjat ttgl. 17 Djanuari 1963 No. 017/M/I/63, maka susunan Pengurus OPS Sirup Sari Buah mengalami perobahan atas Instruksi Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tgl. 8-2-1963 No. 62/Inst/E.S./63 dan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tgl. 20 Nopember 1963 No. 129/B-I/Eksos/SK/63 telah diangkat anggauta Pengurus OPS Sirup Sari Buah Daerah Tingkat I Djawa Barat sebagai berikut:

Ketua I : Daradjat, Perusahaan BPU Djawa Barat „PRESCO”.
Ketua II : Idris, Perusahaan Sirup „HARUM MANIS”.
Anggauta : Lie Pok Khee, Perusahaan Sirup „CROWN & STAR”.
Anggauta : J.M. Panggabean, Perusahaan Sirup „RAPOLO”.
Anggauta : Lie Kian Seng, Perusahaan Sirup „T R O S”.

Dalam rangka usahanja OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. I Djawa Barat telah berhasil melaksanakan sinchronisasi perusahaan² sirup di Daerah² Tk. II/Kabupaten dengan terbentuknja Tjabang² OPS sebagai berikut:

1. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Karesidenan Tjirebon.
2. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Purwakarta.
3. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Tjiamis.
4. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Sukabumi.
5. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II B o g o r.
6. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Tangerang.
7. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Krawang.

8. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Serang.
9. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II L e b a k.
10. Tjabang OPS Sirup Sari Buah Daerah Tk. II Bekasi.

Dalam bidang pembangunan antara lain telah ikut serta dalam tiap Pameran Pembangunan Djawa Barat 1962, 1963 dan 1964.

Dalam bidang kemasjarakatan, senantiasa ikut serta seperti dalam pengumpulan sumbangan untuk dana² P.M.I., Dwikora, Ganefo dan lain². Djumlah anggauta menurut tjatatan pada achir tahun 1963 ada sebanjak 264 perusahaan, sedangkan djumlah anggauta jang masih aktif pada waktu ini ada:

1. Kotapradja Bandung	48 Perusahaan.	
2. Kabupaten Bandung	16 Perusahaan.	
3. Kabupaten Sumedang	— —	(tidak ada laporan).
4. Kabupaten Tjiamis	— —	idem.
5. Kabupaten Purwakarta	— —	idem.
6. Karesidenan Tjirebon	42 Perusahaan.	
7. Kabupaten Krawang	31 Perusahaan.	
8. Kabupaten Bekasi	— —	idem.
9. Kabupaten B o g o r	— —	idem.
10. Kabupaten Sukabumi	3 Perusahaan.	
11. Kabupaten Tangerang	— —	idem.
12. Kabupaten Serang	— —	idem.
13. Kabupaten L e b a k	— —	idem.
140 Perusahaan.		

Perusahaan² Sirup Sari Buah sebagian besar merupakan home industry. Kesulitan² jang dihadapi oleh perusahaan² Sirup, terutama terletak dalam segi tingginja harga² bahan baku seperti gula pasir, essence dll.

PERTUMBUHAN OPS PENJAMAKAN & PENDJEMURAN KULIT DST. I DJAWA BARAT DI BANDUNG.

1. OPS Penjamakan didirikan atas andjuran MPRS dengan ketentuan² No. I dan II/96 di bidang Ekonomi jo Undang² No. 19/1960 dan P.P. No. 243/1961.
2. Perusahaan², jang tadinja mendjadi anggauta dari Gabungan Penjamak Kulit Priangan, telah dianggap mendjadi anggauta OPS Penjamakan mulai dari tanggal 1 Djuli 1961 dan dengan sendirinja tidak diharuskan membayar uang pangkal. Besarnja uang iuran ditetapkan menurut tarip OPS Penjamakan Kulit di Djakarta. Utang² serta beban² lainnja pada Gabungan lama harus dilunasi.
3. Pimpinan untuk pertama diangkat dan dilantik oleh J.M. Menteri Departemen Perindustrian Rakjat dan terdiri atas:
Ketua : Liauw Tiauw Liong.
Penulis : Oey Kok Lim.
Bendahara : Bong Kim Liat.
Anggauta : Moh. Jusuf.
„ : Ho Njan Kong.
4. Aktivitas OPS dalam tahun² 1961 hingga sekarang:
 - a. Mengurus organisasi intern, mentjatat anggauta, dan menarik iuran penjamakan kulit.
 - b. Ikut serta dalam konperensi Tjipajung dengan saran² untuk mempertinggi produktivitas maupun kualitas penjamakan kulit.
 - c. Ikut serta dalam panitya² perkembangan perbaikan mutu kulit, jang disarankan dalam laporan lengkap konperensi Tretes di Surabaya.
 - d. Ikut serta dalam pengumpulan sumbangan² untuk Irian Barat, Trikora, Dwikora (Penganjangan Malaysia), dharma bakti ke Djatiluhur, Gekerev, Jakindra, dan lain² projek Pemerintah, sesuai dengan andjuran Pemimpin Besar Revolusi kita.
5. Pimpinan untuk tahun 1964 — 1965, terdiri atas:
Ketua : Tee Siong Wie, Djl. O.I. Dinata 2 Bandung.
Wakil Ketua : Moh. Jusuf, Djl. Raya 256 Soreang.
Anggauta : Bong Kim Liat, Djl. Panaitan 1 Bandung.
Anggauta : S u d a r, Djl. Kopo 229 Bandung.
Anggauta : Liauw Tiauw Liong, Djl. Raya Barat 546 Bandung.
6. Dengan lahirnja Bamunas OPS Penjamakan & Pendjemuran Kulit ikut serta sebagai anggauta jang aktip.

7. Keterangan umum.

Anggauta OPS Penjamakan Kulit Djawa Barat dapat dibagi dalam 4 golongan:

- (1). Golongan jang mempunjai mesin² lengkap .5 Anggauta.
- (2). Golongan jang mempunjai mesin² ala kadarnja 5 Anggauta.
- (3). Golongan jang tidak mempunjai mesin 12 Anggauta.
- (4). Golongan jang mengerdjakan sendiri (home industry), perusahaan jang disebut dibelakang ini banjak terdapat di Soreang, Garut, Tasik dan Bogor.

Keadaan industri kulit pada waktu ini agak matjet, pasaran sepi, sedangkan obat² penjamak masih mahal harganja, berhubung djatah obat² sedari awal 1963 tidak pernah ada, dan banjak obat²-an harus diimport atas dasar SPP. umum.

PERTUMBUHAN OPS TEPUNG MAKANAN DAERAH TINGKAT I DJAWA BARAT DARI BLN AGUSTUS 1961 SAMPAI TAHUN 1965.

Sedjarah lahirnja OPS Tepung Makanan.

Organisasi Perusahaan Sedjenis Tepung Makanan ini didirikan karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 19 tahun 1960 beserta adanya Instruksi J.M. Menteri Perindustrian Rakjat No. 236/MDM/60 tgl. 26 Oktober 1960 kepada 2 orang pendjabat tinggi Deperindra, masing²: Ir. Martono dan Ir. D. Nasserie untuk membentuk Organisasi Perusahaan Sedjenis Terigu (OPS Terigu).

Sebagai persiapan dari pelaksanaan Instruksi tersebut, telah diselenggarakan Konperensi Pembentukan OPS Terigu di Tjipajung, Bogor pada tgl. 12 s/d 14 Nopember. Konperensi ini telah dihadiri oleh Wakil² beberapa Gabungan Pengusaha Pengolah Terigu dari 4 Kota di Djawa dan 3 Kota dari Sumatera serta beberapa pengusaha pengolah terigu sejara perseorangan.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa sebelum adanya OPS Terigu ini telah ada terlebih dahulu beberapa Gabungan² Pengusaha Pengolah Terigu baik di Djawa maupun diluar Djawa (Gabungan Pabrik² Roti, Mie dan Biskuit).

Dalam Konperensi Pembentukan OPS Terigu ini telah dapat dibentuk Susunan Pengurus Sementara OPS Terigu yang terdiri dari 4 anggauta Pengurus inti, 3 orang pengurus masing² sebagai kepala² seksi Mie, Biskuit dan Roti dan 6 orang pengurus lainnja selaku komisaris² OPS Terigu yang berkedudukan di Djawa dan Sumatera.

Dengan surat Keputusan J.M. Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 25 Mei 1961 No. 05/SK TKR/61, struktur OPS Terigu yang pertama mengalami perubahan dan perubahan nama. Berdasarkan surat keputusan yang terbaru ini, nama OPS Terigu telah diubah menjadi OPS Tepung-Makanan dengan susunan pengurusnja yang baru pula dan terdiri dari 4 orang anggauta.

Pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 1961 telah diselenggarakan Konperensi Kerja OPS Tepung Makanan seluruh Indonesia di Lembang (Bandung). Dalam Konperensi kerdja ini oleh pengurus telah dilaporkan segala aktivitas yang telah dilakukan selama masa djabatannja yang meliputi bidang organisasi, keuangan, keanggautaan dan usaha² konsolidasi lainnja.

Salah satu atjara yang terpenting pula dalam Konperensi ini ialah pelantikan Perwakilan² OPS Tepung Makanan dari beberapa Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia a.l. ialah *dilantikenja setjara resmi Perwakilan OPS Tepung Makanan Daerah Tk. I Djawa Barat pada tgl. 4 Agustus 1961.*

Sebagai aktivitas pertama dari OPS Tepung Makanan Perwakilan Dt. I Djawa Barat, ialah melaksanakan keputusan² Konperensi ini, a.l.:

Rentjana Djangka Pendek:

- a. Inventarisasi perusahaan² anggota OPS Tepung Makanan.
- b. Melaksanakan pendjataan/penjaluran bahan² penting kebutuhan Perusahaan anggota.
- c. Memperlengkapi apparaat organisasi dengan melantik komisaris¹ di beberapa daerah Tingkat II di Djawa Barat yang dianggap penting.
- d. Mengusahakan adanya „understanding” yang baik antara Djawatan¹ Pemerintah/Badan²/Organisasi² yang ada hubungannya dengan OPS.

Rentjana Djangka Pandjang.

- a. Membantu dengan pengumpulan dana seluruh anggota untuk pendirian beberapa proyek penting yang kelak dapat menghasilkan bahan² baku kebutuhan anggota sendiri (selfsupporting).
- b. Mengusahakan pertambahan skill, baik dalam kalangan buruh maupun pengusaha untuk mendapatkan hasil daja guna (efficiency) setinggi-tingginya.

Disamping adanya rentjana djangka pandjang dan rentjana djangka pendek telah tersusun pula beberapa proyek yang sudah harus segera dimulai pendiriannya ialah a.l.:

1. Melaksanakan proyek pendirian pabrik Gandum Triticum dengan kapasitas 90.000 ton tiap tahun. Sebagai modal dari pendirian proyek ini Konperensi Kerdja memutuskan supaya uang Simpanan Wadji² 5% pembelian terigu yang ditahan oleh Pemerintah dapat dipakai untuk membiayainya, yang pada tahun 1961 telah berdjumlah l.k. 300 djuta rupiah.
2. Mendirikan Pabrik Ragi Kering (Dried Yeast) dengan kapasitas 120 ton setahun.

Lain dari pada itu OPS Tepung Makanan Dt. I Djawa Barat telah menghubungi Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Bandung untuk bekerja-sama dalam penanaman Gandum dan Soba sebagai pertjobaan didaerah Pengalengan. Usaha² ini selalu terbentur kepada keuangan yang sangat sukar sekali dikumpulkannya.

Dalam bidang pendaftaran anggota sedjak tahun 1961 sampai pada saat ini telah terdaftar 1.720 perusahaan diseluruh Djawa Barat (Exklusief Djakarta Raya) yang terdiri dari perusahaan *Roti, Biskuit & Mie*.

Djumlah anggota ini kemungkinan masih dapat bertambah lagi, berhubung sampai saat ini masih ada beberapa pengusaha, yang belum mau masuk organisasi yang didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang masih menghinggapi beberapa jiwa pengusaha a.l. ialah:

1. Mereka hanya mengharapkan dajatah sadja dari OPS.
2. Belum sadarnja pengertian kearah sistim ekonomi Terpimpin yang setjara konsekwen akan kita laksanakan.

Usaha untuk mengadjak pengusaha² tersebut telah kami lakukan, tetapi masih memberikan hasil yang sangat negatif sekali.

Usaha OPS Tepung Makanan yang sangat konkrit ialah seperti telah pernah dilakukan kerdja-sama antara OPS Tepung Makanan dengan Perwakilan Daerah lain. Pada pertengahan bulan Djuni 1962, OPS Tepung Makanan Daerah Dt. I Djawa Timur telah memberikan bahan Terigu kepada OPS Tepung Makanan Dt. I Djawa Barat sebanyak 12.000 bantal a 50 Lbs. Kerdja-sama antar OPS Tepung Makanan ini diharapkan dalam waktu yang singkat.

Sedjak adanya peraturan pembebasan barang² bahan baku dari pengawasan Pemerintah terutama Terigu, maka perhatian anggauta terhadap OPS sangat berkurang sekali. Sebagian besar anggauta meragu-ragukan status dari pada OPS. Demikian mengenai bidang keanggautaan OPS Perwakilan Dt. I Djawa Barat.

Mengenai bidang kepengurusan sedjak tahun 1961 sampai sekarang telah mengalami penggantian 3 kali. Susunan Pengurus yang terachir ialah yang didasarkan kepada instruksi J.M. Menteri Perindra tgl. 17 Djanuari 1963 No. 017/M/1/63 dimana Pengurus² OPS diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang terdiri dari:

Ketua : E. Misdja.
Wakil Ketua : Drs. Tan Liang Lee.
Anggauta : Licm Kiat Siang.

Demikian setjara singkat progress report OPS Tepung Makanan dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1965.

PERTUMBUHAN OPS BARANG LOGAM SWASTA DARI TANGGAL 1 AGUSTUS 1961 SAMPAI 1965.

Kegiatan Organisasi.

OPS Barang Logam Swasta didirikan berdasarkan S.K. J.M. Menteri Deperindra No. 29 S.K./TKR/61 tgl. 1-7-1961. Dalam pembentukan OPS Barang² Logam Swasta, Kepala Djawatan Perindustrian Dt. I dalam rapatnja tgl. 15 Maret 1962 telah menundjuk Sdr. R.A. Somamihardja dari N.V. „RAS” untuk menjusun pengurus.

Dalam rapat anggauta jang diselenggarakan pada tgl. 13 Djuli 1963 telah diuraikan hasil² kerdja para Pengurus selama 15 bulan. Rapat telah menerima baik dan selandjutnja rapat telah memilih Pengurus lama untuk menjusun landasan kerdja selandjutnja. Dua orang anggauta pengurus pindah kelain tempat. Untuk mengisi lowongan ini telah ditundjuk Sdr. Ir. A. Pamuntjak dan Sdr. Mugni Ali Basah mendjadi penggantinya. Adapun susunan Pengurus OPS Barang² Logam ialah sebagai berikut:

1. R.A. Somamihardja — sebagai Ketua dari N.V. „RAS”.
2. Oey Kiat Tjoan — sebagai Penulis dari Perusahaan Dagang „SILVER CITY”.
3. Louw Kok Lin — sebagai Bendahara dari Perusahaan MISSOURI.
4. Wakidjan — sebagai anggauta Pengurus dari Perusahaan „SUCCESUS”.
5. Hadi Jasin — sebagai anggauta Pengurus dari Perusahaan „BINTANG LIMA”.

Sedangkan susunan Pengurus jang baru adalah sebagai berikut:

1. R.A. Somamihardja — sebagai Ketua dari NV. „RAS”.
2. Ir. A. Pamuntjak — sebagai Wakil Ketua.
3. Oey Kiat Tjoan — sebagai Penulis I.
4. Mugni Ali Basah — sebagai Penulis II.
5. Louw Kok Lin — sebagai Bendahara.

Pada bulan Djuni 1964 Pengurus OPS Barang² Logam telah mengalami lagi perubahan dan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat susunan Pengurus OPS Barang² Logam mendjadi sebagai berikut:

1. Budhi Santosa — sebagai Ketua.
2. Ir. A. Pamuntjak — sebagai Wakil Ketua.
3. Oey Kiat Tjoan — Penulis merangkap Bendahara.
4. R.A. Somamihardja — Anggauta Pengurus.
5. Mugni Ali Basah — Anggauta Pengurus.
6. Louw Kok Lin — Anggauta Pengurus.

Kegiatan Keanggotaan:

Sedjak dibentuknja OPS Barang² Logam Swasta Dt. I Djawa Barat maka perusahaan² jang telah mendaftarkan pada waktu itu adalah 58 perusahaan, antara lain 21 perusahaan dari luar Kota dan selebihnja dalam lingkungan Kotapradja Bandung.

Setahun sebelumnja OPS Daerah dibentuk, maka di Djakarta telah dibentuk OPS Barang² Logam jang kini mendjadi OPS Barang² Logam Pusat.

Dengan demikian ada beberapa perusahaan jang ada di Daerah telah mengabungkan kepada OPS tersebut dan hingga sekarang tetap mendjadi anggota OPS Barang² Logam Pusat, ketjuali 3 perusahaan telah beralih ke OPS Daerah.

Kegiatan² OPS Barang² Logam.

- a. Pada Pameran Industri jang diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Djawa Barat dari tgl. 17-8-1962 s/d 8 September 1962, maka OPS Barang² Logam telah ikut serta pula memamerkan hasil² karya dari beberapa anggota OPS Barang² Logam.
- b. Begitu pula dalam Pameran hasil Industri Nasional Djawa Barat pada tanggal 17 Agustus s/d 25 Agustus 1963, OPS Barang² Logam telah ikut serta pula.
- c. Kegiatan forces telah dilaksanakan dengan djalan mengerahkan tenaga Sukarelawan dengan bantuan segenap anggota OPS Barang² Logam keprojek Udug² Djatiluhur dibawah Pimpinan R.A. Somamihardja.
- d. Turut serta aktif mengumpulkan uang sumbangan guna korban Gunung Agung atas andjuran dari Kepala Djawatan Perindustrian Djawa Barat.

Tugas kewadjiban OPS Barang² Logam.

Djenis perusahaan² jang tergabung pada OPS Barang² Logam Dt. I Djawa Barat selainnja dari perusahaan logam djuga perusahaan² seperti:

1. Pembikinan timbangan.
2. Perbengkelan Besi.
3. Pabrik Klise dan Huruf Tjetak.
4. Perusahaan Galvanir.
5. Industri alat Pengukur Pengetahuan.

Lain-Lain.

- a. Mengenai pendaftaran gerakan tanda kebaktian pengusaha swasta nasional telah selesai dilaksanakan.

- b. Untuk melantjarkan segala usaha, supaja hasil jang diharapkan akan lebih produktif, maka dikandung maksud agar Kantor Sekertariat OPS Barang² Logam dialihkan kekantor OPS Gelas Dt. I Djawa Barat.
- c. Susunan Pengurus OPS Barang² Logam jang sekarang adalah sebagai berikut:
1. Budhi Santoso — sebagai Ketua.
 2. Ir. A. Pamuntjak — sebagai Wakil Ketua.
 3. Oey Kiat Tjoan — sebagai Penulis merangkap Bendahara.
 4. R.A. Somamihardja — sebagai Anggauta Pengurus.
 5. Mugni Ali Basah — sebagai Anggauta Pengurus.
 6. Louw Kok Lin — sebagai Anggauta Pengurus.
-

PERTUMBUHAN OPS KERAMIK PUTIH DT. I DJABAR DARI TAHUN 1957 S/D APRIL 1965.

OPS/Organisasi.

OPS Keramik Putih Dt. I Djawa Barat didirikan tgl. 20-10-1963 dengan surat keputusan Gubernur No. 129/B-I/Eksos/SK/63. Sebelum adanya OPS Keramik Putih tahun 1957 di Bandung telah ada satu Organisasi Perusahaan Keramik PPKB (Persatuan Pengusaha Keramik Bandung), dengan 5 perusahaan anggotanya. Tahun 1959 PPKB diperluas sifatnya dan dirubah menjadi GAPKERNI Pusat (Gabungan Perusahaan² Keramik Nasional Indonesia) dan dengan adanya perintah mengenai pendirian OPS, maka GAPKERNI berubah menjadi OPS Keramik Putih dengan anggauta 95 perusahaan yang tersebar diseluruh Djawa Barat.

Kemungkinan Pertumbuhan Industri Keramik Indonesia.

Faktor² yang memberi harapan baik bagi Industri dan hal² yang menguntungkan adalah:

- a. Dengan mengambil perumpamaan bagi setiap keluarga yang terdiri dari 5 orang dengan kebutuhan:

1 piring makan untuk tiap orang;
1 tjangkir untuk tiap orang,
1 tjawan/pisin untuk tiap orang,
1 teko/potji untuk seluruh keluarga,

maka bagi k.l. 100 djuta penduduk Indonesia dibutuhkan 50 ton bahan baku tiap harinja.

- b. *Kebutuhan Devisen.*

Industri Keramik tidak begitu butuh devisen seperti industri² lain dan apabila memerlukan devisen hanya untuk bahan² glasir/pewarna untuk industri Keramik djenis aardewerk dan untuk alat² modal/mesin², sedang untuk bahan pokok seluruhnya ada dinegeri kita. Sebaliknya dari industri keramik yang bergerak dibidang aardewerk memungkinkan pula menghasilkan devisen. Belakang ini sudah ada Industri Keramik yang bergerak khusus menghasilkan barang² hias, barang² rumah tangga dan ada pula yang memproduksi bata tahan api.

- c. *Kesulitan² yang dihadapi.*

Kesulitan umumnja yang dihadapi adalah:

- (1). Kurangnya kesadaran berorganisasi dari pengusaha,
- (2). Kurang ketelitian dalam perentjanaan perusahaan,
- (3). Kurang akan tenaga skill,

- (4). Tidak stabilnja perekonomian dewasa ini jang menjebabkan:
 - (a). Dasar² kerdja perusahaan mendjadi gojah,
 - (b). Investasi berkurang dan sering dialihkan keusaha lain.
- (5). Kesulitan akan alat transport untuk membawa bahan baku,
- (6). Kekurangan modal.

Kesulitan² diatas menjebabkan kalkulasi harga bersifat tidak stabil dan untuk menghindarkan diri dari kesulitan tersebut diatas biasanja diadakan kalkulasi jang bersifat spekulatip. Untuk keluar dari kesulitan² tersebut diatas maka OPS Keramik Putih sedang mempertimbangkan suatu tjara usaha untuk dilaksanakan:

- (1). Koordinasi penggalian, pengolahan dan suply bahan baku asal dalam Negeri.
- (2). Koordinasi pembelian dan pendjualan bahan² pembantu asal Luar Negeri dan sampai saat ini OPS Keramik Putih belum pernah menerima djatah bahan² jang diperlukan.
- (3). Mengusahakan local buffer stock pilling.
- (4). Menjelenggarakan pembinaan dan petundjuk dalam hal:
 - (a). Sjarat² dari mutu bahan jang dipakai,
 - (b). Sjarat² dari mutu produksi,
 - (c). Mentjapai effeciency kerdja jang tinggi,
- (5). Mengintensivceer kerdja sama antara anggauta.
- (6). Menjelenggarakan latihan² kerdja dan menjelenggarakan pendidikan untuk djangka pandjang.
- (7). Mengkoordinasikan segala bantuan jang didapat baik dari Pemerintah ataupun dari luar Negeri.
- (8). Mengambil peranan dalam perentjanaan usaha² keramik baru.
- (9). Mengadakan iklim pasaran sehat atas dasar kepentingan bersama.

Rentjana usaha mengatasi kesulitan tersebut diatas, tidak akan berdjalan dengan baik bila tidak ada kerdja-sama dengan instansi Pemerintah jang langsung berhubungan dengan Perindustrian jaitu:

1. Djawatan Geologi dari Pertambangan mengenai sumber alam dan penggaliannja.
2. PNPR Nupiksa Yasa dengan Balai Penelitian dari pendidikan Keramik serta Balai Penjelidikan Bahan²-nja.
3. PNPR Keramik Yasa dengan unit²-nja.
4. Dinas Perindustrian Rakjat.

Usaha Untuk memperoleh Proteksi.

Bahwasanja perindustrian didalam Negeri harus dilindungi oleh Pemerintah adalah sudah seharusnja dan fakta² jang dipenuhi adalah:

- a. Kemampuan produksi dalam negeri.
- b. Kwaliteit produksi.
- c. Imbangan harga antara barang dalam negeri dengan barang import.
- d. Memberi kemungkinan mengexport hasil² produksi Keramik Putih.

Hasil² jang ditjapai.

- a. Mengkoordinasi bahan baku lokal dan antar daerah perwakilan.
- b. Mengkoordinasi supply bahan import luar negeri.
- c. Pengolahan bahan² glasir melalui standard frit (T.D.S.).
- d. Dalam bidang penjumlahan:
Andjuran pemakaian bahan standard, penggunaan peralatan baru jang dapat bekerdja lebih murah, memperbaiki tjara kerdja dll.

Penjumlahan.

Tugas ini dilakukan dengan tjara collegiaaI dan persoalan jang dihadapi ialah:

1. Mentjari bahan pengganti, karena bahan jang biasa dipakai sulit didapat.
2. Penelaahan process produksi applied methode of trouble shoorting.
3. Penerangan² perentjanaaan perusahaan baru dan memupuk kerdja-sama perusahaan baru dengan perusahaan lama.

Organisasi.

OPS Keramik Putih meliputi daerah: 1. Resort Bandung dan sekitarnja, 2. Resort Plered, Purwakarta, 3. Koordinator daerah Priangan Timur dan Tengah di Tasikmalaja, 4. Resort Tjirebon dan sekitarnja, 5. Persiapan Resort untuk Sukabumi dan Bogor. Umumnja 75% anggauta terdiri dari Home-industry terutama di Plered.

Kegiatan lainnja.

Dalam pengerahan Dana tidak pernah absen begitu pula dalam setiap pameran di Djabar dan telah pernah diminta ikut dalam pameran di Colombo. Dalam pengerahan Forces telah pula mengirimkan tenaga² suka-relawan Pembangunan ke Djatiluhur.

Susunan Pengurus. Dengan surat keputusan Gubernur No. 129/B-I/Eksos/Sk/63 diangkat Pengurus sbb.:

Ketua I Achmad Barma	— PNPR Keramik Yasa Plered.
Ketua II Jojo Harjono	— C.V. Majolica Bandung.
Anggauta Oey Kier Liong	— P.T. Indabco Bandung.
Anggauta E. Sasmita	— Pabrik Keramik PKS. Bandung.

Kegiatan² lainnja.

Dibidang pengerahan Dana OPS Keramik Putih Daerah Djawa Barat tidak pernah absen dan selalu aktif, dan pada masa sekarang ini sedang giat melaksanakan Pendaftaran Gerakan Tanda Kebaktian Pengusaha Swasta terhadap Revolusi (GEKEREV), dengan kesadaran jang tinggi para anggauta berusaha melaksanakannja dengan sebaik-baiknja.

Pada setiap Pameran jang pernah diadakan di Bandung dan tempat lainnja OPS Keramik Putih Djawa Barat selalu mengikutinja, dan telah berulang-kali anggauta dari OPS Keramik Putih Djawa Barat diminta ikut dalam pameran² International misalnja di Amerika Serikat tahun 1963 dan sebelumnja-pun pernah di Colombo, d.l.l. Negeri dengan mendapat perhatian jang baik. (Pameran² Keramik Seni). Dibidang kemasjarakatan ada pula anggauta OPS jang telah mendirikan Sekolah Dasar jang kemudian diserahkan kepada Pemerintah.

Dibidang pengerahan Tenaga OPS telah pula mengirimkan Sukarelawan² Pembangunannja ke Projek Pengairan Djatiluhur di UDUK² Tjurug, dan rombongan Sukarelawan Pembangunan Pertama Bamunas Daerah Djawa Barat Pimpinannja dipertjakan kepada Ketua II OPS Keramik Putih Djawa Barat (Sdr. J. Harjono).

Dibeberapa Perusahaan Anggauta OPS Keramik Putih telah pula diadakan/dibentuk HANSIP² dilingkungan perusahaannja masing². Disamping hal² jang telah diuraikan terlebih dahulu pada uraian ini OPS Keramik Putih Daerah Djawa Barat masih pula mempunyai RENTJANA KERDJA jang sedang dalam penelaahan guna pelaksanaannja kemudian, adapun Rentjana tersebut adalah sebagai berikut:

Usaha pembukaan daerah baru Keramik Putih di Priangan Timur:

OPS Keramik Putih Daerah Djawa Barat dengan program utamanja mengadakan perbaikan, penjemputnaan, dan perkembangan terhadap Industri² jang telah ada serta membangun dan meneliti perkembangan² daerah Keramik BARU. Dapat diharapkan dalam waktu jang tidak lama lagi Djawa Barat akan dapat mendjadi daerah Keramik Utama diseluruh Indonesia.

Usaha Pembukaan daerah baru dalam djangka waktu jang tidak lama lagi ditudjukan kepada DAERAH PRIANGAN TIMUR. Melihat kemungkinan² besar jang dimiliki oleh Priangan Timur seperti adanja Bahan² Dasar jang mentjukupi, adanja Man-power jang terlatih dalam berusaha dan berswadaja merupakan modal pertama jang tiada terhingga. Sedang untuk djurusan produksinja Priatim dapat mengchususkan pada pembuatan alat² rumah tangga, keperluan alat makan dan minum, sehingga dengan demikian dapatlah diharapkan setiap daerah Keramik mempunyai tudjuannja masing² (spesialisasi dalam produksi). Seperti kita sama telah menge-

tahuinja bahwa Plered adalah daerah Keramik tertua di Djawa Barat dengan produksinja berupa keramik (gerabah) Kasar dan Halus jang tjoraknja pun mudah dikenal, menjusul dengan daerah Bandung bertjorak ragam mulai dari jang soft sampai pada porselen lunak dan dari mulai membuat alat² teknik gerinda dan ampelas, alat laboratorium sampai pada keramik rumah tangga dan Seni jang sifat dan tjoraknja lebih madju (up to date).

Priangan Timur dengan rakjatnja jang radjin dari mulai industri/keradjinan rumah tangga hingga perusahaan besar dapat didjalankannja. Setjara organisatoris perusahaan industri keramik di Priatim itu nanti dapat dibentuk dengan sistim Unit. Djadi pada tingkat pertama haruslah lebih dahulu dibentuk sebuah Induk Keramik jang akan dapat menjuluhi perusahaan/industri² ketjil, dan kita harapkan perkembangan Priatim akan banjak berlainan dengan Perkembangan didaerah keramik lain jang telah ada. Persoalan jang kini dihadapi oleh OPS Keramik Putih Djawa Barat, ialah membentuk/merintis djalan jang menudju kepada terwujudnja Priatim sebagai daerah Keramik Putih jang Baru. Usaha itu pada Tingkat pertama dengan sendirinja menghendaki kerdja sama jang erat dengan seluruh Instansi Pemerintahan setempat dan Djabar. Menarik para usahawan didaerah Priatim (Tasikmalaja, dlsb) untuk membuka usahanja dalam bidang perindustrian Keramik Putih. Sedang bahan² pokoknja telah tersedia dan dimiliki Priatim jaitu Bahan Mentah dan Man-nower jang terlatih.

PERTUMBUHAN OPS BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR PERWAKILAN DAERAH DJABAR

OPS termaksud diatas kami pimpin mulai bulan Djanuari 1964 berdasarkan P.P. No. 243 tahun 1961, jang sebelumnya dipimpin penuh oleh para anggauta pengusaha Swasta dan berdiri sedjak tahun 1961.

Pada masa sebelum ada P.P. jang menentukan dasar² pembentukan OPS², maka di Djawa Barat tealah didirikan satu Gabungan Bengkel Kendaraan Bermotor, jang didasarkan pada andjuran dari Pemerintah pula jang sehubungan dengan pembentukan M.P.P. dan M.I.I.

Perubahan² jang dilalui OPS, terutama mengenai perubahan organisasi dan status sebagaimana ditentukan dalam P.P. diatas. Dalam usahanya se-hari² banjak sekali terdapat perubahan jang menjangkut tjampur tangan mengusahakan keperluan² baik bahan keperluan pokok maupun keperluan bahan² lainnya seperti sabun, kain drill dsl.

Sesuai dengan perubahan² tjara penjaluran oleh Pemerintah, maka usaha sematjam tersebut diatas tidak dilaksanakan lagi. Dalam tugasnya untuk membantu meningkatkan perusahaan² ke tingkat jang lebih tinggi lagi dari pada sekarang, OPS Bengkel Kendaraan Bermotor belum sampai dapat mentjapai hasil jang langsung, karena sedari terbentuknja Pengurus Gaja Baru, terdapat sesuatu kekosongan belaka, tidak ada kekompakan dari anggauta² Pengurus dan begitu pula para anggauta OPS sebelum pernah ternjata suatu kekompakan.

Maka setiap rapat jang diusahakan untuk sekedar memberikan keterangan menampakkan kehadiran jang minimal, dan oleh karena itu setiap usaha melaksanakan projek Pemerintah dihadapi kesukaran dan ketidak lantjaran. Tugas ini ternjata dilaksanakan oleh seorang diri selaku Ketua sedapat mungkin dijalankan dengan bantuan seorang pegawai (full-timer).

Djumlah anggauta jang dengan resmi tertjatat pada OPS Bengkel Kendaraan Bermotor ada 30 Perusahaan, jang diantaranya 7 di luar kota Bandung sebagai hasil usaha konsolidasi pada tahun 1963 dengan mengutus pegawai tersebut diatas ke Kota² Pradja lainnya dan Ibu Kota Dt. II di Djawa Barat selama 3 bulan ber-turut².

Nampaknja ada kemadjuan² pada beberapa perusahaan, itu adalah hasil usahanya masing² pengusaha pribadi. Dengan keadaan Pengurus seperti jang digambarkan diatas, maka rentjana OPS Bengkel Kendaraan Bermotor adalah merubah susunan Pengurus jang baru, jang lebih memenuhi sjarat.

Untuk melaksanakan itu kami sedang berusaha mengadakan hubungan dengan Kepala Insin untuk mendapatkan pendapatnja terlebih dahulu, terutama jang berhubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden soal pembaharuan/penjegahan OPS².

PERTUMBUHAN OPS „PENSI” DT. I DJAWA BARAT DARI TAHUN 1955 SAMPAI DENGAN TAHUN 1965

OPS PENSI.

Organisasi Perusahaan Sedjenis PELAKSANAWAN NASIONAL SELURUH INDONESIA, disingkat OPS „PENSI”, dibentuk oleh Pemerintah cq. J.M. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan Peraturan Menteri P.U. & T. No. 8 Pprt/th. 1963 — ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 Mei 1963, berdasarkan atas:

1. Undang² No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961, tentang ketentuan² pokok mengenai Gabungan Perusahaan Sedjenis.
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1962 tentang Gabungan Perusahaan Sedjenis Bangunan, Lembaran Negara No. 56 tahun 1962.¹
4. Setelah mendengar saran² dan pendapat Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara.

Dewan Pimpinan Pusat telah diangkat oleh J.M. Menteri P.U. & T., dengan keputusan Menteri P.U. & T. No. 4 tahun 1964 tgl. 11 Djanuari 1964 jang terdiri dari sepuluh orang dengan diketuai oleh Sdr. E. KOWARA dan berkedudukan di Djakarta. Dewan Pimpinan Daerah OPS „PENSI” Dt. I Djawa Barat telah diangkat oleh DPP-OPS PENSI dengan surat keputusan No. 10/1964 tgl. 4 Mei 1964 dan dilantik dengan resmi oleh Pd. Tn. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Djawa Barat pada tanggal 30 Nopember 1964 jang anggauta²-nja terdiri dari Saudara²:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. K e t u a | : Ir. R.E. PADMAKUSUMA |
| 2. Wakil Ketua | : R. M A C H D A R |
| 3. Sekertaris I | : E.H. KHUSWARA |
| 4. Sekertaris II | : ROY ABDULLAH |
| 5. Bendahara | : S. DIRDJOATMODJO |

Anggauta² Pengurus lainnja untuk urusan²:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Organisasi | : D. Suhardi, |
| 2. Penerangan | : Isnadi Gondokusumo, |
| 3. Bangunan Sipil | : R. Darmawan, |
| 4. Instalasi Listrik-Air & Gas | : Rachman, |
| 5. Konstruksi Badja | : Ir. So Khing Liem, |
| 6. Perbankan | : R. Djuchro Sumitradilaga, |
| 7. Badan Usaha | : B. Rachim, |
| 8. Peralatan | : Agus dan Ma'sum Kamaludin, |
| 9. Pendidikan | : Ir. Soesatio H. Poerwo. |

Tugas dan kewajiban dari pada OPS PENSI adalah untuk ikut serta membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kegiat-
rahan kerdja dalam perusahaan² yang tergantung didalamnya menuju
masjarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diatas, maka OPS PENSI
berkewajiban:

- a. Mengadakan kerdja sama dan kesatuan tindakan dalam menjeleng-
garakan kepentingan dan/atau kebutuhan perusahaan² yang tergabung
didalamnja.
- b. Mengadakan kerdja sama dengan OPS² yang tergantung dalam GPS
BANGUNAN, dan membantu dan ikut serta dalam pelaksanaan
program Pemerintah.
- c. Mendjamin dan mengembangkan daja-guna serta produktivitas dari
kegiatan perusahaan² yang tergabung didalamnya.
- d. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada perusahaan² yang
tergabung didalamnya.
- e. Membantu dan ikut serta dalam pelaksanaan program Pemerintah.

Perkembangan² OPS PENSI dalam dunia Pelaksanaan Bangunan:

1955. Dalam bulan Mei 1955, di Bandung telah didirikan suatu gabungan
dari pemborong² Nasional yang berada di Bandung dan sekitarnya yang
diberi nama „GABUNGAN PEMBORONG INDONESIA” disingkat
„GAPI”. Sesuai dengan perkembangan² ekonomi dan djalannya revolusi
Indonesia, maka sangat dirasakan oleh golongan pengusaha swasta Na-
sional bahwa dominasi ekonomi oleh golongan asing harus segera diachiri.
Usaha² Nasional harus diberi tempat dan bimbingan yang lebih lajak dari
pada dalam waktu yang sudah². Begitu pula halnya dibidang usaha pem-
borongan yang bersangkutan langsung dengan pelaksanaan pembangunan².
1959. Dengan dorongan demikian tersebut maka atas inisiatif I.A.B.N.
dari Djawa Timur, GAPI dari Djawa Barat dan IPEMBI dari Djakarta
Raya, pada tgl. 5 — 9 Djanuari 1959 diadakanlah kongres yang pertama
dari pemborong² seluruh Indonesia di Tretes Malang dan lahirlah ketika
itu: GABUNGAN PEMBORONG NASIONAL SELURUH INDO-
NESIA yang disingkat sebagai „GAPENSI” Kongres pertama telah me-
mutuskan untuk mendesak kepada Pemerintah agar GAPENSI diakui
sebagai „Bedrijfs-group” bagi para pemborong Nasional dan supaya men-
djadi anggota KENSI.

1961. Kongres ke II, diadakan di Tawangmangu — Sala dari tgl. 4-8
Djanuari 1961, tepat dua tahun setelah kongres ke I di Tretes Malang.
Keputusan² terpenting yang ditjetuskan dalam kongres tersebut, adalah
bahwa GAPENSI mendukung sepenuhnya MANIPOL-USDEK yang

di-decrect-kan oleh P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi A.B./Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tgl. 17 Agustus 1959 dan keputusan MPRS pada tgl. 10 Desember 1960 tentang penerimaan MANIPOL-USDEK sebagai haluan Negara dengan pertimbangan bahwa GAPENSI adalah salah satu golongan KARYA yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan pembangunan Negara dan ikut serta bertanguung dijawab sepenuhnya atas terlaksananya „PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA”. Diselaraskan pula dengan derapnja revolusi, kongres memutuskan dengan suara bulat bahwa istilah „PEMBORONG” yang mengandung selera kolonial dirubah menjadi „PELAKSANAWAN” sesuai dengan tugas dan fungsi Nasional dalam melaksanakan pembangunan² semesta berentjana. Dengan demikian GAPENSI adalah singkatan dari pada „GABUNGAN PELAKSANAWAN NASIONAL SELURUH INDONESIA”. Selanjutnja didalam Kongres ke II itu, masalah Perpu 19 ditindjau setjara mendalam.

1964. Kongres ke III GAPENSI terachir diadlakan di Tjipajung — Bogor pada tgl. 1 — 5 Maret 1964 yang membahas kedudukan GAPENSI dan pembentukan OPS PENSI oleh Pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1962 dan Peraturan Menteri P.U. & T. No. 8/Prt/tahun 1963, peraturan² mana hampir 100% sesuai dengan keputusan Kongres Tawangmangu sidang Pleno ke III di Tjipajung 18 — 21/-1961 dan sidang Paripurna ke IV di Djakarta 28/11 — 1/12-1962.

Aktivitas² di Djawa Barat.

Mengingat bahwa OPS bukan suatu badan usaha, maka untuk memenuhi kebutuhan bahan², terutama bahan² baku bagi para anggauta, maka pada bulan Djuni 1959 didirikan suatu badan usaha yang berbentuk koperasi jaitu „KOOPERASI PELAKSANAWAN NASIONAL SELURUH INDONESIA” disingkat „KOPENSI” yang berkedudukan di Bandung.

Dibidang Perbankan, Djawa Barat telah memelopori pula dengan didjadikannja BANK PEMBINA NASIONAL P.T. = NATION GUIDING BANK Ltd. yang berkedudukan di Bandung menjadi Bank para Pelaksanawan seluruh Indonesia. Begitu pula tidak ketinggalan turut sertanja didalam aktivitas² BANK PEMBANGUNAN SWASTA yang diharapkan dapat memiliki potensi yang lumayan dalam rangka pembangunan semesta berentjana. Didalam Dewan Normalisasi Indonesia (DNI), Lembaga Masalah Bangunan² dan badan² lainnja OPS selalu menundjukkan aktivitasnja. Begitu pula didalam usaha upgrading para anggautanja dengan mengacikan seminar² dan kursus².

Dengan Adanja BAMUNAS, maka dapat diharapkan bahwa aktivitas² selandjutnja dapat dipertinggi, terutama yang menjangkut bidang pelak-

sanaan pembangunan². Projek terahir jang kini sedang dilaksanakan, jaitu turut serta mentjari pemetjahan „Masalah kekurangan perumahan dalam Kota Bandung dan sekitarnja” untuk mana telah direntjanakan sebuah Pilot Projek PENSI dan telah dibeli setjara gotong-rojong sebidang tanah jang tjukup untuk didirikan perkampungan baru terdiri atas lebih kurang 200 rumah. Jang dimaksud dengan Perusahaan Pelaksanawan Nasional disini ialah perusahaan² jang djenis usahanja bergerak dibidang pelaksanaan bangunan, bangunan sipil, konstruksi badja dan instalasi.

PERTUMBUHAN GABUNGAN KOPTEXI/PERWAKILAN OPS- TT. DT. I DJAWA BARAT

1. Gabungan Koptexi Dt. I Djawa Barat didirikan pada tgl. 22 Maret 1961, sesuai dengan keputusan rapat tgl. 22 Maret 1961 tersebut. Adapun pendiri²-nja:

- a. Atot Soemarna.
- b. R.H.Z. Darwat.
- c. S. Sudjani.

Sebelum mendjadi Gabungan Koptexi dahulunya adalah bernama Gaperti. Sebetulnja OPS — TT. itu tidak dominant pada Koptexi tersebut OPS TT. hanjalah untuk sementara belaka. Setelah agak lama maka Gabungan Koptexi diakui sebagai suatu organisasi Kooperasi dengan dibentuknja hak Badan Hukum pada tgl. 8 Djanuari 1964 No. 8166.

2. Hasil jang telah ditjapai pada saat ini ialah membentuk suatu organisasi jang beregerak dibidang sandang dengan wadah Daerah Tk. I Djawa Barat. Sampai saat ini Koptexi bergerak dilapangan penjaluran dan pengolahan bahan baku textiel sampai mendjadi bahan² keperluan sandang bagi rakjat.

Bidang² jang bergerak dalam objek² ini terdiri atas:

- (1). Bidang usaha — a). Pembelian/Penjaluran bahan baku.
b). Pengolahan Bahan baku.
- (2). Bidang Bahan Dasar.

Bidang Bahan Dasar, ditudjukan untuk memenuhi andjuran Presiden untuk berdiri diatas kaki sendiri dalam Swa Sembada bahan Sandang. Bidang ini bergerak dalam bagian² perkapasan dan persutraan.

3. Gabungan Koptexi/perwakilan OPS. TT. Dt. I Djawa Barat bergerak meliputi Dacrah Tingkat I Djawa Barat dengan beranggautakan 19 Anggauta.

Tiap² Anggauta (Pusat Koptexi Dt. II) beranggautakan Primer Koptexi (Koptexi Desa).

Djumlah keseluruhan Primer Koptexi (Koptexi Desa) di Djawa Barat ini sampai sekarang ada 311 dengan djumlah kekuatan Alat Tenun Tangan sedjumlah 194.710 buah.

4. Sesuai dengan maksud Pemerintah, untuk memodernisir ATBM, maka dimasa jang akan datang Koptexi tidak sadsja bergerak dilapangan alat tenun tangan, tapi djuga akan madju ke alam modern dengan alat²-nja jang machinal (ATM) Surat Keputusan Wakil Panglima Besar III KOTOE No. Kpts. 27/WPR/KOTOE/th. 1965.

5. Susunan Pengurus Gabungan Koptexi/Perwakilan OPS. TT. Dt. I
Djawa Barat untuk tahun 1964 adalah:

- | | | |
|-------|-------------------------|---------------------|
| (1). | M. Karmana Tanumihardja | — Ketua I |
| (2). | Madomiharna | — Ketua II |
| (3). | R. Sendjaja | — Ketua III |
| (4). | Aut Kartadiredja | — Sekertaris I |
| (5). | Sugandhi | — Sekertaris II |
| (6). | A. Barnadi | — Bendahari |
| (7). | A. Ariffin | — Pembantu Umum |
| (8). | R.I. Efiendy | — Komisaris Daerah |
| (9). | A. Sardji | — Komisaris Daerah |
| (10). | Sahrudin | — Komisaris Daerah |
| (11). | Alwi | — Komisaris Daerah. |
-

PERTUMBUHAN OPS LIMUN DAERAH TK. I DJAWA BARAT DARI APRIL 1962 SAMPAI APRIL 1965.

OPS Limun Daerah Tingkat I Djawa Barat dibentuk pada tgl. 15 Nopember 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang³ (Perpu) No. 19 tahun 1960 dan surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tertanggal 31 Oktober 1961 No. 55/SK/BPP/61, dan mulai aktif pada bulan April 1962 dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua : Koo T'iong Soen, Pabrik Limun „BRANTAS”.
Anggota : The King Hwie, Pabrik Limun „UNIVERSAL”.
Anggota : Ko King Swan, Pabrik Limun „ORION”.

Sebelum diresmikannya OPS Limun, Pabrik³ Limun diwilayah daerah Karesidenan Priangan (Bandung, Tjimahi, Garut dan Tasikmalaja) tergabung dalam Gabungan Pabrik Limun Priangan yang berkedudukan di Bandung.

1. Susunan OPS berikut Pengurus tersebut diatas disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakjat tgl. 15 Desember 1962 No. 206/BPP/VI-A-2/OPS-DR/62.
2. Berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Rakjat tertanggal 17 Januari 1963 No. 017/M/I/63, maka susunan Pengurus OPS Limun mengalami perubahan atas Instruksi Gubernur/Kepala Daerah Djawa Barat tgl. 8 Februari 1963 No. 62/Instr/E.S./63 dan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tgl. 20 Nopember 1963 No. 129/B-I/Eksos/63 telah diangkat anggota Pengurus OPS Limun Daerah Tk. I Djawa Barat sbb.:

Ketua : Koo T'iong Soen, Pabrik Limun „BRANTAS”.
Anggota : The King Hwie, Pabrik Limun „UNIVERSAL”.
Anggota : Ko King Swan, Pabrik Limun „ORION”.

Dalam rangka usahanya OPS Limun Dt. I Djawa Barat telah berhasil melaksanakan sinchronisasi Perusahaan³ Limun di Daerah³ Tingkat II/ Kabupaten dengan terbentuknya Tjabang² OPS sebagai berikut:

1. Tjabang OPS Limun Keresidenan Tjirebon
2. Tjabang OPS Limun Dt. II Tasikmalaja/Garut.
3. Tjabang OPS Limun Dt. II Krawang.
4. Tjabang OPS Limun Keresidenan Bogor.
5. Tjabang OPS Limun Keresidenan Banten di Tangerang.
6. Tjabang OPS Limun Dt. II Purwakarta.

Dalam bidang Pembangunan antara lain telah ikut serta dalam Pameran Pembangunan Djawa Barat 1962, 1963 dan 1964.

Dalam bidang kemasjarakatan, senantiasa ikut serta seperti dalam pengumpulan sumbangan untuk Dana³ P.M.I./Dwikora/Ganefo dll.

Djumlah anggauta sekarang jang masih aktif ada sebagai berikut:

1. Kotapradja Bandung	15 Perusahaan.
2. Kabupaten Bandung	1 Perusahaan.
3. Kabupaten Tasikmalaja/Garut	6 Perusahaan.
4. Kabupaten Krawang	3 Perusahaan.
5. Kabupaten Purwakarta	4 Perusahaan.
6. Keresidenan Tjirebon	11 Perusahaan.
7. Keresidenan Bogor	7 Perusahaan.
8. Keresidenan Banten	5 Perusahaan.
	52 Perusahaan.

Kesulitan² jang dihadapi oleh Perusahaan² Limun, terutama terletak dalam segi tingginja harga² bahan baku seperti Gula pasir essence dll. sehingga ada diantara Pabrik Limun pada permulaan tahun 1965 menutup usahanya.

PERTUMBUHAN OPS ETJERAN DAERAH TINGKAT I D J A W A - B A R A T

Historis & Perkembangan Organisasi.

Kegiatan berorganisasi yang teratur dan tertib adalah sebagai salah satu tjiri chas bagi suatu Negara yang Merdeka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kita, Republik Indonesia, jaitu setelah tgl. 17 Agustus 1945 kegiatan berorganisasi tersebut bukanlah se-mata² dibidang Politik sджа (kepartaian) akan tetapi djuga diantara warganegara yang berada dalam lapangan ekonomi baik ia yang berada dan berketjimpung dalam sektor² perindustrian, pertanian, pengangkutan dan perdagangan dengan penuh rasa tanggung-djawab terhadap pengisian Kemerdekaan Negeranja, maka *chusus* dalam perdagangan djenis ketjil etjeran, rasa tanggung djawab itu ditumpahkan pada persatuan dalam organisasi melalui berbagai matjam organisasi, antara lain tertjatat didacrah Djawa Barat pada tahun 1956 — 1960 terdapat:

1. Ikatan Warung Indonesia Djawa Barat (IWI Djabar).
2. Ikatan Pengusaha Warung Nasional Indonesia Djawa Barat (IPWARNI Djabar).
3. Gabungan Pedagang Ketjil Veteran Indonesia Djawa Barat (GAP-KEVI Djabar).
4. Pusat Tenaga Ekonomi Rakjat Djawa Barat (PUTERA Djabar).
5. Maskapai Andil Indonesia Djawa Barat (MAI Djabar).
6. Gabungan Pedagang Pengetjer Indonesia Djawa Barat (GAPPI Djabar), dlsb.

Dalam hubungan pertumbuhan organisasi² perdagangan termasuk pedagang djenis ketjil etjeran didacrah Djawa Barat untuk tidak menimbulkan terbentuknja ber-puluh² organisasi didalam satu djenis lapangan usaha yang sama, maka Pemerintah mengeluarkan Undang² No. 19 Prp. tahun 1960, satu dan lain demi untuk ketertiban, jaitu perlu dibentuknja satu organisasi perusahaan sedjenis (OPS, bedrijfsgroep) dalam lapangan satu djenis usaha. Timbullah suatu gagasan untuk menjatukan seluruh pedagang ketjil etjeran seluruh Indonesia kedalam satu Organisasi Perusahaan Sedjenis (OPS) yang sesuai dengan UU. No. 19 Prp. tahun 1960, maka pada bulan Nopember 1960 gagasan itu dimusjawarahkan di Tjipajung Bogor sehingga menghasilkan ikrar-bersama untuk meleburkan organisasi² lokalnja masing² dan menjatukan diri kedalam „Organisasi Perusahaan Sedjenis Pedagang Ketjil Etjeran Seluruh Indonesia”.

Demikian pula didacrah Djawa Barat terbentuklah Organisasi Perusahaan Sedjenis Pedagang Ketjil Etjeran Seluruh Indonesia Daerah Djawa Barat, disingkat OPS PKE Djawa Barat. Sedjak terbentuknja OPS PKE

Djawa Barat pada tahun 1960 sampai dengan sekarang tahun 1965, dalam susunan pengurusnya mengalami beberapa perubahan, sedangkan yang ada dan tetap adalah:

Ketua : K.S. Natamihardja.
Wk. Ketua I : Achmad Iskandar.
Wk. Ketua II : Achmad Laconi.
Wk. Ketua III : E. Abtu.

dan dilengkapi oleh Sekertaris dan Sekertaris Muda. Dalam rangka pembagian tugas dalam peningkatan urgensi usaha, K.S. Natamihardja menonaktifkan diri sebagai Ketua dan tenaganya dipusatkan kepada pembinaan dan memimpin setjara langsung badan usaha OPS Etjeran Djawa Barat, jaitu P.T. OPSET, sedangkan Achmad Iskandar mendjabat sebagai PD. Ketua. Pembagian tugas tersebut, ditentukan sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan Per Pres No. 2 tahun 1965.

Alamat Kantor sekarang adalah:

- BPD OPS ETJERAN DJABAR; di Djl. Ir. H. Djuanda 31 Tilp. 5015.
- P.T. OPSET badan usaha OPS Etjeran Djabar Djl. Braga 71 (atas) Tilp. 4301.

Periode pembentukan & perubahan.

1. Pada bulan Nopember 1960 dibentuk Organisasi Perusahaan Sedjenis Pedagang Ketjil Etjeran Indonesia oleh Musjawarah Tjipajung di Bogor dengan nama „OPS Pedagang Ketjil Etjeran” dan disingkat OPS-PKE. Para pengurusnya didacrah Djawa Barat ini disahkan oleh Direktorat Perdagangan Dalam Negeri dengan surat keputusan No. 3082/C-III-O/Dpdn 15 Nopember 1961.
2. Kemudian OPS-PKE diganti menjadi OPS Etjeran dengan surat keputusan Menteri Perdagangan No. 181/M/SK/62, 24 September 1962. Para pengurusnya disahkan dan diangkat dengan surat keputusan No. 353/C-III-O/Dpdn, tgl. 12 Maret 1963.

Dasar Hukum & perkembangan kedudukan hukum.

1. Landasan pokok OPS Etjeran adalah pasal 33 Undang^a Dasar 1945 dengan berpegang kepada Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin sesuai dengan Kepribadian Indonesia.
2. Melalui Musjawarah Tjipajung pada bulan Nopember 1960, tertjetus ikrar bersama, penjesuaian dengan undang^a No. 19 Prp. tahun 1960.
3. Surat Keputusan Direktorat Perdagangan No. 3082/C-III-O/Dpdn tertanggal 15 Nopember 1961, mengenai Badan^a Pengurus Harian Organisasi Dacrah OPS Pedagang Ketjil Etjeran.

4. *Surat Keputusan Menteri Perdagangan* No. 181/M/SK/62 tertanggal 24 September 1962.
5. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1965 tentang Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sedjenis.

Struktur Organisasi, banjaknja anggota dan fungsi OPS Etjeran.

1. OPS Etjeran mempunyai Badan Pimpinan Pusat (BPP) yang berkedudukan di Djakarta.
2. Ditiap-tiap Daerah Tk. I, termasuk Daerah Tk. I Djawa Barat, mempunyai Badan Pimpinan Daerah (BPD).
3. Ditiap Daerah Tk. II Kabupaten/Kotapradja mempunyai Badan Pimpinan Tjabang (BPT).
4. Ditiap-tiap Ketjamatan mempunyai Badan Pimpinan Ranting (BPR).
5. Tjabang² (BPT²) diseluruh daerah Djawa Barat telah terbentuk sebanyak 24 BPT (termasuk daerah Purwakarta berstatus BPT).
6. Anggota² sebanyak 121 BPR.
7. Anggota² jang pada umumnja terdiri dari warung² sebanyak:
 - a. 30.103 tertjatat pada LPP s/d tahun 1963.
 - b. 8.570 tertjatat pada BPD Djawa Barat s/d tahun 1964.
 - c. jang telah disahkan adalah sedjumlah 4.265, jaitu jang terdiri dari 2.728 anggota Nasional dan 1.537 anggota Asing (WN. RRT).
8. Anggota² OPS Etjeran didaerah Djawa Barat tersebar ditiap-tiap Kota sampai kepeloksok-peloksok desa, bahkan sampai ke-gunung² dan pantai, mereka mempunyai tempat dan modal sendiri, memiliki keuletan dan kemampuan berusaha, setjara co. operative dapat disatukan funds & forcesnja dalam pelaksanaan atas prinsip „berdiri diatas kaki sendiri”. Kedudukan OPS Etjeran memegang peranan penting sekali jang dalam hal ini dapat dibuktikan apa bila ditarik garis pertikal dalam lalu-lintas ekonomi, *dari saluran atas* perdagangan distribusi (distriburende handel) OPS Etjeran adalah sebagai tangan terachir didalam menjampaikan kebutuhan rakjat, sedangkan *dari saluran bawah* OPS Etjeran adalah sebagai tangan pertama, dalam melaksanakan perdagangan pengumpulan (collecterende handel). Dalam pelaksanaan perdagangan pengumpulan, membantu mengumpulkan barang² export satu dan lain dapat menentukan peningkatan export barang² (export drive) jang setjara tidak langsung dapat menentukan pula terhadap peningkatan penambahan devisen bagi Negara.

Kesimpulan pendapat, saran dan usul.

Berdasarkan living reality, OPS Etjeran jang pada umumnja para anggauntanja terdiri dari warung², didaerah Djawa Barat tertjatat k.l. 30.000

anggota perlu dipupuk dan dibimbing, karena ia adalah sebagai potensi yang hidup dan milik revolusi, milik kita bersama, sedangkan OPS Etjeran Djawa Barat adalah juga termasuk sebagai milik Pemerintahan daerah tingkat I Djawa Barat, maka sebagai potensi yang cooperative hidup dapat disertakan setjara langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Tingkat I Djawa Barat, oleh karenanya pula berpendapat dan mengemukakan saran dan usul sbb.:

1. Dibutuhkan adanya bimbingan/perlindungan dari pihak Pemerintah setjara langsung untuk dapat terdjaminnya kelantjaraan usaha² bagi pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat setjara penuh.
2. Untuk menghilangkan atau memperketjil mata — rantai perdagangan, penting adanya barang² yang mudah didapat langsung dari produsen.
3. Dalam pengerahan kedalam perdagangan pengumpulan, jaitu pengumpulan barang² yang dapat diexport, dibutuhkan adanya bantuan pinjaman dari Pemerintah.
4. Perlu diadakan pembukaan pasar² masjarakat (mendirikan pasar²) yang pelaksanaannya diadakan kerdja-sama antara OPS Etjeran dengan Pemerintah, jaitu baik dengan Pemerintah Tingkat I maupun Pemerintah Tingkat II Kabupaten² dan Kotapradja, dll. termasuk penerbitan pedagang² etjeran liar dalam memberikan tempat usaha.
5. Menghimpun modal melalui pembentukan suatu Bank Pasar yang dapat memberikan bantuan permodalan kepada para anggautanja/para pedagang Etjeran.

PERTUMBUHAN OPS PERTOKOAN DT. I DJAWA BARAT DARI TAHUN 1962 SAMPAI 1965

OPS Pertokoan didirikan pada tgl. 1 Oktober 1962 dan dibentuk dengan S.K. Menteri Perdagangan No. 180/M/SK/62 tgl. 24 September 1962. OPS Pertokoan adalah salah satu hasil retooling yang dilakukan Pemerintah/Dep. Perdagangan seperti yang dimaksud oleh Manipol. OPS Pertokoan adalah hasil dari pada re-organisasi dari pada 3 organisasi sebelum Manipol. Jaitu S.P.M.I., GAPATI dan P.T.B.I. (Serikat Pedagang Menengah Indonesia, Gabungan Pedagang Alat² Tulis Indonesia dan Persatuan Toko Buku Indonesia).

OPS Pertokoan adalah organisasi perusahaan/Pengusaha yang berusaha dilapangan (Sektor) pertokoan Swasta. Namun OPS Pertokoan tidak hanya milik pengusaha toko Swasta, tetapi juga milik Pemerintah dan masyarakat. OPS Pertokoan adalah saluran Komando Revolusi Kepada anggautanja. OPS Pertokoan harus berusaha memberi manfaat kepada masyarakat yang sebaik dan se-besar²-nja. OPS Pertokoan pun saluran keinginan pengusaha Toko Swasta untuk disampaikan kepada Pemerintah.

OPS Pertokoan adalah salah satu ALAT, PESERTA dan PELAKSANA Revolusi Indonesia, Pantjasila-Manipol-Usdek-Ampera. Karena itu tindakannya harus seirama dengan romantiknya Revolusi Indonesia menudju sasarannya: Masyarakat Sosialis Pantjasila/Indonesia yang tata-tenteram, karta-rahardja-adil-makmur, aman-sentosa, bahagia-sedjahtera.

Tudjuan Organisasi ini adalah:

1. Turut memperjuangkan terlaksananya Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila.
2. Turut membantu memperlantar dan memperkembangkan lapangan usaha Perdagangan Etjeran pada umumnya dan sektor usaha Toko Etjeran pada khususnya sehingga tertjapai daja guna dan daja hasil yang se-besar²-nja dalam rangka pembangunan ekonomi Nasional dengan mengutamakan kemanfaatan umum.
3. Mejakinkan dan membina rasa dan daja gotong-rojong diantara anggautanja. (menurut SKM. No. 180/M. SK/62 pasal 6 dan A.D. pasal 6).

Tugas dan usaha.

1. Mengkoordinasikan kegiatan perdagangan dalam sektor usaha Toko Etjeran sesuai dengan peraturan² dan petunjuk² Pemerintah.
2. Memberikan keterangan² tehnis yang diperlukan/diminta oleh Pemerintah dalam sektor usaha Toko Etjeran.

anggauta perlu dipupuk dan dibimbing, karena ia adalah sebagai potensi jang hidup dan milik revolusi, milik kita bersama, sedangkan OPS Etjeran Djawa Barat adalah djuga termasuk sebagai milik Pemerintahan daerah tingkat I Djawa Barat, maka sebagai potensi jang cooperative hidup dapat disertakan setjara langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Tingkat I Djawa Barat, oleh karenanja pula berpendapat dan mengemukakan saran dan usul sbb.:

1. Dibutuhkan adanja bimbingan/perlindungan dari pihak Pemerintah setjara langsung untuk dapat terdjaminnja kelantjaran usaha^a bagi pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat setjara penuh.
2. Untuk menghilangkan atau memperketjil mata — rantai perdagangan, penting adanja barang^a jang mudah didapat langsung dari produsen.
3. Dalam pengerahan kedalam perdagangan pengumpulan, jaitu pengumpulan barang^a jang dapat diexport, dibutuhkan adanja bantuan pinjaman dari Pemerintah.
4. Perlu diadakan pembukaan pasar^a masjarakat (mendirikan pasar^a) jang pelaksanaannja diadakan kerdja-sama antara OPS Etjeran dengan Pemerintah, jaitu baik dengan Pemerintah Tingkat I maupun Pemerintah Tingkat II Kabupaten^a dan Kotapradja, dll. termasuk pener-tiban pedagang^a etjeran liar dalam memberikan tempat usaha.
5. Menghimpun modal melalui pembentukan suatu Bank Pasar jang dapat memberikan bantuan permodalan kepada para anggautanja/para pedagang Etjeran.

PERTUMBUHAN OPS PERTOKOAN DT. I DJAWA BARAT DARI TAHUN 1962 SAMPAI 1965

OPS Pertokoan didirikan pada tgl. 1 Oktober 1962 dan dibentuk dengan S.K. Menteri Perdagangan No. 180/M/SK/62 tgl. 24 September 1962. OPS Pertokoan adalah salah satu hasil retooling yang dilakukan Pemerintah/Dep. Perdagangan seperti yang dimaksud oleh Manipol. OPS Pertokoan adalah hasil dari pada re-organisasi dari pada 3 organisasi sebelum Manipol. Jaitu S.P.M.I., GAPATI dan P.T.B.I. (Serikat Pedagang Menengah Indonesia, Gabungan Pedagang Alat² Tulis Indonesia dan Persatuan Toko Buku Indonesia).

OPS Pertokoan adalah organisasi perusahaan/Pengusaha yang berusaha dilapangan (Sektor) pertokoan Swasta. Namun OPS Pertokoan tidak hanya milik pengusaha toko Swasta, tetapi juga milik Pemerintah dan masyarakat. OPS Pertokoan adalah saluran Komando Revolusi Kepada anggotanya. OPS Pertokoan harus berusaha memberi manfaat kepada masyarakat yang sebaik dan se-besar²-nja. OPS Pertokoan pun saluran keinginan pengusaha Toko Swasta untuk disampaikan kepada Pemerintah.

OPS Pertokoan adalah salah satu ALAT, PESERTA dan PELAKSANA Revolusi Indonesia, Pantjasila-Manipol-Usdek-Ampera. Karena tu tindakannya harus seirama dengan romantiknya Revolusi Indonesia menudju sasarannya: Masyarakat Sosialis Pantjasila/Indonesia yang tata-tenteram, karta-rahardja-adil-makmur, aman-sentosa, bahagia-sedjahtera.

Tudjuan Organisasi ini adalah:

1. Turut memperdjuangkan terlaksananya Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila.
2. Turut membantu memperlantjar dan memperkembangkan lapangan usaha Perdagangan Etjeran pada umumnya dan sektor usaha Toko Etjeran pada khususnya sehingga tertjapai daja guna dan daja hasil yang se-besar²-nja dalam rangka pembangunan ekonomi Nasional dengan mengutamakan kemanfaatan umum.
3. Mejakinkan dan membina rasa dan daja gotong-rojong diantara anggotanya. (menurut SKM. No. 180/M. SK/62 pasal 6 dan A.D. pasal 6).

Tugas dan usaha.

1. Mengkoordinasikan kegiatan perdagangan dalam sektor usaha Toko Etjeran sesuai dengan peraturan² dan petunjuk² Pemerintah.
2. Memberikan keterangan² teknis yang diperlukan/diminta oleh Pemerintah dalam sektor usaha Toko Etjeran.

13. Mengadjudikasi saran-saran dari usul² kepada Pemerintah/Lembaga¹ Negara mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan usaha-usaha dalam sektor usaha Toko Etjeran.
4. Mengadakan kerdja-sama yang teratur dengan Organisasi² Perusahaan Sedjenis lainnja.
5. Mengadakan hubungan dengan Perusahaan² Negara/Daerah/Kooperasi/Swasta untuk kepentingan penjaluran barang.
6. Memberikan pimpinan dan bimbingan kepada para anggauta berupa petunjuk-petunjuk dari saran².
7. Turut melakukan pengawasan terhadap para anggauta, agar soal penjaluran barang berdjalan dengan sempurna.
8. Memberikan pendidikan khusus yang kreatif dan dinamis kepada pimpinan dan para anggauta.
9. Mengadakan badan² usaha Gotong-rojong ditiap wilayah yang dianggap perlu untuk melajani para anggauta.
10. Mengadakan biro konsultasi bagi para anggauta serta mendjadi djuru pemisah (arbiter) dalam hal perselisihan diantara anggauta².
11. Mengadakan usaha khusus untuk memetjahkan soal permodalan dari anggauta.
12. Mengusahakan agar tempat² yang strategis letaknja bagi sektor usaha Toko Etjeran dapat ditempati oleh para anggauta.
13. Mengadakan usaha² lainnja yang sjaah yang dianggap perlu untuk kepentingan para anggauta.

Dasar/Sumber pembentukan OPS Pertokoan antara lain adalah:

Undang² Dasar pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 22 dan pasal 33, Manifesto Politik Republik Indonesia (ketetapan MPRS No. 1 tahun 1960) Perpu No. 10 tahun 1960.

Undang² No. 19 Prp 1960.

Undang² No. 60 tahun 1960.

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957.

Undang² Perusahaan (Bedrijfsreglementeringsordonnantie tahun 1934).

Perkembangan OPS Pertokoan di Djawa Barat.

Susunan Pengurus BP. Daerah Djawa Barat yang terakhir yang diangkat oleh J.M. Menteri Perdagangan.

Ketua : H. Aloen Surjana, Alamat Gg. Abuja No. 182/14/B Bdg.

Wakil Ketua : (lowong).

Wakil Ketua II : H. Rustama, Alamat Djl. O.I. Dinata No. 176 Bandung.

Sekretaris Muda : Darisoen K.R., Alamat Gg. Natawidjaja No. 79 Bandung.

Bendahari : Lie Tjiap Hak, Alamat Djl. O.I. Dinata No. 111 Bandung.
Anggauta² : I. Distomi.
 : H.A. Muiz Alie.
 : R. Rachmat Marta Disubrata.
Penasehat : R.H. Moch. D. Ramelan (I.P.D.N.).
 : P a r m a (Aduma Niaga).

Tjabang-Tjabang.

Disemua Dst. II/Kopra diseluruh Djawa Barat telah terbentuk Tjabang-Tjabang OPS Pertokoan. Ketjuali Dt. II Bogor, Dt. II Tjirebon dan Dt. II Sukabumi. Para pengurusnja diangkat oleh IPDN atas nama Menteri Perdagangan. Tjabang² tersebut adalah:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Kopra Bandung | Djl. Lembang 1 D. |
| 2. Dt. II Bandung | Djl. Ps. Antri 1099/H |
| 3. Dt. II Sumedang | Djl. Raya 488 |
| 4. Dt. II G a r u t | Djl. Tjikendi 5 |
| 5. Dt. II Tasikmalaja | Djl. H.Z. Mustopa 120 |
| 6. Dt. II Tjiamis | Djl. Kawali 29A |
| 7. Kopra Bogor | Djl. R.D. Sartika 44A |
| 8. Kopra Sukabumi | Djl. Gng. Parang 5 |
| 9. Dt. II Tjiandjur | Djl. Ibu Dewi/Depan Pomp. Bensin
Djoglo/Stanplat Bus |
| 10. Dt. II Serang | Djl. Banten 39 |
| 11. Dt. II L e b a k | Djl. Tirtajasa 19 |
| 12. Dt. II Pandeglang | Djl. Merdeka 15 |
| 13. Dt. II Purwakarta | Djl. Raya Utara 222A |
| 14. Dt. II Krawang | Djl. Pasar Baru 86 |
| 15. Dt. II Tangerang | Djl. D. Mogot 3 |
| 16. Dt. II Bekasi | Djl. Raja Bekasi Barat 763 |
| 17. Dt. II Tjirebon | Djl. Kantor 16 Atas |
| 18. Dt. II Kuningan | Djl. Letnan Pribadi 144/B Karanganjar |
| 19. Dt. II Indramaju | Djl. Tjigugur 244 |
| 20. Dt. II Madjalengka | Djl. Complex Girilawungan. |

Banjaknja Anggauta.

Banjaknja anggauta² OPS Pertokoan diseluruh Djawa Barat s/d tgl. 20-4-1965 tertjatat 4457 perusahaan sedang menurut taksiran pihak Inspeksi Perdagangan perusahaan² jang seharusnja mendjadi anggauta OPS Pertokoan di Djawa Barat ada sebanyak 25.000 perusahaan.

Kegiatan².

OPS Pertokoan dengan mempergunakan Badan Usaha (B.U.) jang dibentuk didaerah Tk. I dan di tiap-tiap Dt. II berupa P.T. membantu Pemerintah

menjalurkan barang² keperluan pokok rakjat seperti tekstil, gula pasir dll. Perlu dikemukakan disini bahwa organisasi OPS Pertokoan oleh peraturan³ jang mengaturnja dilarang melakukan tindak niaga/tidak boleh berdagang. OPS Pertokoan bergerak dibidang idiil. Maka untuk memenuhi fungsi dan tugasnja selaku alat ekonomi terpimpin OPS Pertokoan, sesuai dengan Job. Instruction J.M. Menteri Perdagangan (Lampiran Surat Instruksi No. 9/M/instrs/63 tgl. 1 Mei 1963), mengadakan alat pelengkap organisasi jaitu B.U. mana berbentuk P.T. tetapi bersifat kooperatif.

B.U.² jang telah terbentuk.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. P.T. Bupetin | (B.U. Djabar) Djl. Kepatihan 1 Bandung. |
| 2. P.T. Bupetin | Djl. Pasaranjar Selatan 24 Tangerang. |
| 3. P.T. Bupetin | Djl. Raja Bekasi Barat 763 Bekasi. |
| 4. P.T. Bupetin | Djl. Raja Utara 222 Purwakarta. |
| 5. P.T. Bupetin | Djl. Pasar Baru 86 Krawang. |
| 6. P.T. Ganefo | Djl. Tirtajasa 19 Rangkasbitung. |
| 7. P.T. Gafsi | Djl. Merdeka 15 Pandeglang. |
| 8. P.T. Bupetin | Djl. Banten 39 Serang. |
| 9. P.T. Budi Dharma | Djl. Perniagaan 265 Bogor. |
| 10. P.T. Unass | Djl. Gunungparang 5 Sukabumi. |
| 11. P.T. Djaja Dharma | Djl. Ibu Dewi Tjiandjur. |
| 12. P.T. Tenass | Djl. Kantor 16 Atas Tjirebon. |
| 13. P.T. Gapbenas | Djl. Kapten Aris 120/E Indramaju. |
| 14. C.V. Pertoks | Djl. Raja Timur 71/F Madjalengka. |
| 15. P.T. Mudjur | Djl. Tjigugur 244 Kuningan. |
| 16. P.T. Udani | Djl. Pasar Antri 1099/H Tjimahi. |
| 17. P.T. U m i | Djl. Lembong 1D Bandung. |
| 18. P.T. Sumedang | Djl. Raja 488 Sumedang. |
| 19. P.T. Permig | Djl. Telagabodas 18 Garut. |
| 20. P.T. Bupetin | Djl. O.L. Dinata 28 Tasikmalaja. |
| 21. P.T. Udami | Djl. Kawali 29A Tjiamis. |

OPS Pertokoan Djawa Barat adalah anggauta Front Nasional Daerah Djawa Barat sebagaimana djuga OPS Pertokoan Pusat mendjadi anggauta Front Nasional setempat. OPS Pertokoan ikut menggerakkan massa anggauta untuk ikut serta dalam segala kegiatan nasional. Pada saat ini OPS Pertokoan sedang giat menggerakkan „Gekerev” jang dilaksanakan oleh Bamunas. OPS Pertokoan adalah anggauta BAMUNAS baik dipusat maupun didaerah.

Per-Pres No. 2/1965.

Baru² ini telah keluar Peraturan Presiden No. 2 tahun 1965 tentang peraturan pokok O.P.S. Hal mana sudah tentu akan membawa perubahan² lagi kedalam tubuh OPS chusunsja OPS Pertokoan.

PERTUMBUHAN OPS PERANTARA DJAWA BARAT PERIODE MARET 1963 — MARET 1965.

PEMBENTUKAN.

OPS Perantara dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 178/M/SK/62 tanggal 24 September 1962. Sebagai inti dari pembentukan OPS ini ialah Organisasi Persatuan Pedagang Gula Indonesia (P.P. G.I.) yang dilebur dimana segala harta kekajaannya hak serta kewadajiban PPGI tersebut diambil alih.

PEMBENTUKAN OPS PERANTARA DT. I DJAWA BARAT.

Pengurus^a OPS Perantara Djawa Barat diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 300/C-III-O/DPDN tgl. 1 Maret 1963 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Ketua — Memed Ahmad — Djl. Tjipaganti 16 Bandung.
2. Wakil Ketua I — Fadil Dasuki — Djl. Titiran No. 2 Bandung.
3. Wk. Ketua II — Nj. Otto Subrata — Djl. Diponegoro Bandung.
4. Anggauta — S. Admawiria — Djl. Njengseret 7A Bandung.
5. Anggauta — R. Moh. Saddak — Djl. R. Patah 81 Bandung.

Sedjak pengangkatan tersebut hingga sekarang sudah berdjalan 2 tahun. Alamat Kantor: Djalan Burangrang No. 38 — Tilpon 5505 Bandung.

PEMBENTUKAN TJABANG^a.

Untuk menampung pendaftaran pada tiap^a Keresidenan, maka mulai Maret 1963 diangkat Koordinator^a yang berstatus sementara. Setelah berdjalan $\pm$ 6 bulan maka Koordinator^a ini ditetapkan mendjadi Tjabang, terdiri dari:

1. Tjabang Keresidenan Banten, yang kemudian dipetjah mendjadi 2 Tjabang jaitu:
 - a. Tjabang Dt. II Serang/Pandeglang.
 - b. Tjabang Dt. II Lebak.
2. Tjabang Keresidenan Djakarta, yang kemudian dipetjah mendjadi 2 Tjabang jaitu:
 - a. Tjabang Dt. II Subang, Bekasi dan Krawang.
 - b. Tjabang Dt. II Tangerang.
3. Tjabang Daerah Tingkat II Bogor/Sukabumi.
4. Tjabang Daerah Tingkat II Tjiandjur.
5. Tjabang Keresidenan Tjirebon.
6. Tjabang Priangan Timur, meliputi Dt. II Tasikmalaja dan Dt. II Tjiamis.

7. Tjabang Priangan Barat, meliputi Kopra Bandung, Dt. II Bandung, Madjalaja, Dt. II Garut dan Dt. II Sumedang.

Tjabang Priangan Barat ini untuk sementara diurus langsung oleh OPS Perantara Daerah Djawa Barat.

BANJAKNJA ANGGAUTA. NASIONAL ASING DJUMLAH

1. Banten (term. Dt. II Lebak)	82	2	84
2. Djakarta (term. Dt. II Tangerang.)	61	7	68
3. Bogor/Sukabumi	78	20	98
4. Tjiandjur	21	9	30
5. Tjirebon	226	227	353
6. Priangan Timur	81	92	173
7. Priangan Barat	524	751	1275
	<u>1073</u>	<u>1008</u>	<u>2081</u>

Mengenai djumlah seluruhnja yang seharusnja terdaftar, kurang diketahui, berhubung pada Kantor² Perdaganganpun masih belum ada keterangan yang pasti. Perkiraan yang terdaftar baru $\pm 25\%$.

SEKSI².

Menurut rentjana, OPS Perantara dibagi dalam 8 Seksi:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Seksi Pangan. | 5. Seksi Alat ² Tehnik. |
| 2. Seksi Sandang. | 6. Seksi Stationary. |
| 3. Seksi P & D. | 7. Seksi Pengumpulan & Djasa. |
| 4. Seksi Bahan Bangunan. | 8. Seksi lainnja. |

Dalam kenjataanja berlainan sekali dengan rentjana tersebut, sebab yang semula dimasukkan Sub Seksi berubah mendjadi Seksi dan Khusus untuk di Djawa Barat telah kami usahakan beberapa Seksi, dimana dari Seksi² tersebut ada yang terus hidup, tapi ada djuga yang matjet.

Seksi² tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seksi Gula Pasir — dibentuk bulan Mei 1963 yang merupakan landjutan dari PPGL-sampai sekarang masih berdjalan dengan baik.
2. Seksi Perminjakan — dibentuk bulan Mei 1963 yang merupakan pengleburan dari GAMIBALU-sampai saat ini masih berdjalan.
3. Seksi Sajur-Majur — dibentuk bulan Mei 1963, berdasarkan Piagam Pemerintah Djabar dan Djakarta Raja dengan mengadakan kerdja-sama dengan PKD Djaya-sampai saat ini belum berdjalan.

4. Seksi Ban — dibentuk bulan Mei 1963 hanya berlangsung beberapa bulan saja berhubung harga ban disesuaikan dengan harga pasar.
5. Seksi Hasil Bumi — dibentuk bulan Mei 1963 merupakan pengelburan dari Persatuan Pedagang Hasil Bumi — Seksi ini tidak berdjalan.
6. Seksi Gula Merah — dibentuk bulan Desember 1963 — merupakan pengelburan dari P.P.G.D.I. — setelah beberapa bulan matjet.
7. Seksi Kapok — dibentuk bulan April 1964 — berdjalan hanya beberapa bulan saja.
8. Seksi Perhotelan — belum aktif.
9. Seksi Djasa — hanya berdjalan beberapa bulan saja — karena kurang perhatian dari anggauta.
10. Seksi Beras — dibentuk bulan Djanuari 1965 — masih berdjalan.
11. Seksi Ternak — masih dalam taraf rentjana.

BIDANG MENTAL.

1. Mengumpulkan sumbangan² untuk Ganefo, Korban Bandjir, Korban Gunung Agung, Thomas Cup, Festival Film Asia Afrika, Tuna Netra, Gekerev dll.
2. Mengerahkan anggauta² untuk turut serta dalam pawai 17 Agustus 1963.
3. Mengerahkan anggauta² sebagai Sukarclawan Pembangunan Dja-tiluhur.
4. Mendjadi anggauta BKS OPS Perdagangan Djawa Barat.
Rentjana² masa depan belum ada berhubung dikeluarkannja Pen. pres. No. 2/1965.

PERTUMBUHAN OPS IMPOR/PEDAGANG BESAR INDONESIA DT. I DJABAR TAHUN 1963 SAMPAI DGN 1965.

Pendahuluan.

Sebelum dibentuknja OPS Import, para pengusaha jang bergerak dalam sektor Impor terdiri:

- Impor Umum, jang memang semendjak berdirinja bergerak dalam bidang Impor.
- Middenstand terdiri dari pengusaha¹ Toko, baik jang berdagang engros maupun etjeran. Kemudian Middenstand jang memenuhi sjarat² tersebut sesuai dengan keputusan Pemerintah, disamping bergerak dalam usaha Toko disjahkan sebagai Importir Umum.

Dengan dikeluarkan keputusan Menteri Perdagangan No. 177/M/SK/62, tgl. 24 September 1963, setjara otomatis kedua djenis perusahaan tersebut dimasukkan dalam satu Organisasi dengan nama „Organisasi Perusahaan Sedjenis” Importir Indonesia (OPSIM).

Sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Perdagangan, maka berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Perdagangan Dalam Negeri No. 661/C-III-O/Dpdn tgl. 26 April 1963, dibentuk OPS Impor Indonesia Dt. I Djawa Barat jang dilantik pada tgl. 30 Djuli 1963, dengan susunan Pengurus sbb.:

- Ketua : Drs. A. Ma'moer.
- Ketua I : Sadjum Thajib.
- Ketua II : Solichin (April 1964 mengundurkan diri dari djabatannja).
- Ketua III : R.I. Purwito (Pedjabat Sekretaris).
- Anggauta : Sekar Samsudi (tidak aktif, diganti oleh Alibasjah Wiratmadja).

Sekretariat.

Semendjak bulan April 1963, Sekretariat telah mengadakan penerangan setjara luas baik melalui tjeramah, iklan dan edaran kepada para tjalon Anggauta, agar para pengusaha jang bergerak dalam sektor impor dalam lingkungan Daerah Djawa Barat, mendaftarkan mendjadi Anggauta OPSIM Djawa Barat.

Dengan dikeluarkannja Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. No. 223/M/SK/64, tanggal 18 Djuli 1964, maka keanggautaan OPSIM ditambah dengan pengusaha jang bergerak dalam Perdagangan Besar dan OPS Impor dirubah mendjadi OPS Impor/Pedagang Besar Indonesia Djawa Barat. Sampai dengan batas penutupan wadajib pendaftaran tanggal 31 Desember 1964, keanggautaan berdjumlah 177 Pengusaha:

- 146 Importir Swasta Nasional.
- 27 Pedagang Besar.
- 2 Importir Swasta Asing dan 2 Donatur.

Aktivitas.

a. *Bidang Usaha Anggauta.*

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa, walaupun pengusaha-pengusaha tersebut memperoleh pengakuan sebagai Importir, tetapi disamping itu ada kegiatan lainnya dalam perdagangan umum. Hal ini dapat dimengerti, karena tidak keseluruhannya dapat dititik beratkan pada sektor Impor. Begitu juga bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan Besar, ada juga kegiatan mereka sebagai pedagang eceran, pertokoan.

b. Semendjak tahun 1963 sampai dengan 1965, disamping hubungan yang paling dekat Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri Djawa Barat, BPD OPSIM juga mengadakan hubungan dengan lembaga lainnya, seperti BLLD (ex BDP), PKPID, Bank Devisa serta lembaga/Djawatan² lainnya yang ada hubungan dengan OPSIM

c. *Devisa Daerah.*

Salah satu hasil kerdja-sama OPSIM dengan PKPID dan BDP, maka usul dalam pembagian Devisen Daerah, terutama tranche II 1964, dibagikan merata kepada Importir Swasta Nasional. Dan hal ini terus akan diperjuangkan oleh BPD OPSIM, sehingga pengusaha yang benar² mempunyai Pengakuan Impor, dapat mempergunakan kesempatan ini.

d. *Pendidikan.*

Mengingat kebanyakan Anggauta OPSIM adalah bekas Middenstand, sehingga banyak diantara pengusaha tersebut yang tidak menguasai setjara mendalam procedure Impor, walaupun pengusaha mereka mempunyai pengakuan Importie, maka untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan tugas OPSIM diadakanlah kursus-Impor/Ekspor. Dan ini mendapat perhatian besar dari Anggauta²-nja.

— Disamping tugas dan usaha BPD membimbing, mendorong anggauta dalam usahanya masing², juga diberikan bimbingan mental, misalnja Indoktrinasi yang berhubungan dengan tugas Pengusaha Swasta Nasional dalam peningkatan Revolusi Indonesia pada saat ini, baik melalui edaran maupun tjeramah².

Usaha akan datang.

Berhubung dengan berita, bahwa Swasta pada tahun 1966 tidak diizinkan lagi mengimpor, maka timbul suatu pemikiran pada BPD untuk merentjanakan diadakannya suatu badan „Collective Export” yang mana modalnya dikumpulkan setjara bersama-sama, begitu pula dalam pelaksanaannya, sehingga Badan ini merupakan suatu pendidikan bagi mereka. Manakala diantara mereka sudah mahir, diandjurkan berdiri sendiri dalam usaha Export.

PERTUMBUHAN OPS PERBANKAN NASIONAL SWASTA (OPS PERBANAS) DARI TH. 1952 S/D APRIL 1955.

Atas inisiatif dari 12 orang Pemimpin Bank² Nasional dari Sumatera, Kalimantan, Djawa Barat, Djawa Timur dan Djawa Tengah, pada tgl. 25 s/d 27 Mei 1952 dengan mengambil tempat di Djokjakarta, mereka berkumpul dengan maksud akan mengadakan kongresnja jang pertama, untuk mendirikan sebuah gabungan bank² Nasional, karena mengingat betapa perlunja membentuk suatu front pertahanan untuk menentang segala tantangan dari gerak-geriknja bank-bank asing, jang memang pada waktu itu kedudukannja masih kuat dan segar bugar. Hal ini tidak sadja dirasakan sebagai tantangan terhadap bangsa dan rakjat Indonesia jang sedang berevolusi, melainkan djuga sangat berbahaya bagi kelantjaran djalannja perekonomian Nasional jang sedang dalam pertumbuhannja, maka kongres dengan tekad jang bulat telah mengambil keputusan harus berani menggalang segala potensi Nasional dalam dunia perbankan dengan djalan mempersatukan bank-bank Nasional disamping bank² Pemerintah. Achirnja pada tgl. 27 Mei 1952 terbentuklah suatu organisasi dengan nama „Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia”, disingkat Perbana, berkedudukan di Jogjakarta, dengan werkveld di Djakarta dan di-tiap² daerah Dt. I diangkat seorang Komisariss untuk mengkoordinir anggauta² jang tersebar diseluruh plokso tanah air, dengan tugas atau tudjuan:

- a. Mempererat hubungan antara bank Nasional Indonesia.
- b. Memperkuat kedudukan Bank-Bank Nasional Indonesia.
- c. Menambah kemadjuan dan effisiensi dari anggotanja.

Atas andjuran J.M. Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta maka pada tgl. 23 s/d 28 Pebruari 1964, Perbana mengadakan rapat anggautanja jang ke XIII di Tretes Malang, bertalian dengan maksud Pemerintah untuk mengadakan Penertiban dalam dunia perbankan, baik Bank² Swasta, maupun Bank² Pemerintah, termasuk Bank² Tabungan dan Bank² Pembangunan, dalam suatu organisasi jang disebut „Musjawarah Bank Nasional Swasta” MUBANAS. Didalam anggaran Dasar Mubanas pasal 4, terdapat kata² „Maksud dan tudjuan Musjawarah termaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan tjara membantu suatu Organisasi Perusahaan Sedjenis, bagi perbankan jang meliputi seluruh Bank² Nasional Swasta”. Sedangkan dalam pasal 8 terdapat kelimat: Anggaran Dasar dari OPS bagi perbankan, dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dsb. Pada tgl. 5 s/d 9 Maret 1964, dibawah pimpinan Sdr. DJUANA KUSUMAHARDJA S.H. Direktur Bank Indonesia. Musjawarah termaksud dilangsungkan

di Djakarta, diantaranya telah menetapkan bahwa Perbana dianggap satu-satunya organisasi Bank Nasional Swasta yang representatif dan tjakap untuk dijadikan inti dari pembentukan OPS Perbanas, yang pada waktu itupun tersedia Anggaran Dasarnya yang baru dan Pengurus baru pula, yang hingga kini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta No. 9/6/KEP/MUPBMS tgl. 2 Mei 1964, ditetapkan menjadi OPS Perbankan Nasional Swasta, disingkat OPS. Perbanas berkantor pusat di Djakarta dan di tiap^a Dt. I diketuai oleh seorang Komisaris yang merangkap menjadi Pengurus Pleno di Pusat.

Azas Organisasi ialah:

1. Pantja Sila.
2. Manifesto Politik Republik Indonesia.
3. Amanat Pembangunan Presiden tgl. 28 Agustus 1959.
4. Deklarasi Ekonomi.

Maksud dan tujuan organisasi ialah:

- a. Membantu Pemerintah dalam persoalan^a yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya dan perbankan khususnya.
- b. Membantu pelaksanaan pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan pengamanan Politik Pemerintah dalam bidang moneter dan perbankan.
- c. Membantu dan membina Bank^a Nasional Swasta untuk berkembang setjara berlandaskan politik Pemerintah.
- d. Mempererat hubungan kekeluargaan antara Bank^a Nasional Swasta. Perdjongan yang telah ditjapai sekarang a.l.:

1. Bidang mental-ideologi negara.

1—1 Mengandjurkan dan mengadakan kepada seluruh anggauta OPS Perbanas umumnya di Djawa Barat ini, agar semua Karyawan ikut aktif mendalami Tavip.

1—2 Mengadakan/Melaksanakan Jon Hansip bagi seluruh Karyawannya yang dikoordinir oleh Bank Pemerintah.

1—3 Melaksanakan dan mengadakan seluruh anggauta OPS Perbanas mentaati Komando J.M. Menteri Penasehat Presiden Perdana Menteri Urusan Funds & Forces tentang suksesnya GEKEREV bersama-sama dengan Bamunas Djawa Barat.

1—4 Ikut serta dalam mengsucceskan Peringatan Dasawarsa KAA I.

2. Bidang Pembangunan.

2—1 Mendjalankan kerdja bakti setjara sukarelawan semua para Karyawannya guna melaksanakan Projek Serba Guna Djatiluhur.

PERTUMBUHAN OPS PERBANKAN NASIONAL SWASTA (OPS PERBANAS) DARI TH. 1952 S/D APRIL 1955.

Atas inisiatif dari 12 orang Pemimpin Bank² Nasional dari Sumatera, Kalimantan, Djawa Barat, Djawa Timur dan Djawa Tengah, pada tgl. 25 s/d 27 Mei 1952 dengan mengambil tempat di Djokjakarta, mereka berkumpul dengan maksud akan mengadakan kongresnja jang pertama, untuk mendirikan sebuah gabungan bank² Nasional, karena mengingat betapa perlunya membentuk suatu front pertahanan untuk menentang segala tantangan dari gerak-geriknja bank-bank asing, jang memang pada waktu itu kedudukannja masih kuat dan segar bugar. Hal ini tidak sadja dirasakan sebagai tantangan terhadap bangsa dan rakjat Indonesia jang sedang berevolusi, melainkan djuga sangat berbahaya bagi kelantjaran djalannja perekonomian Nasional jang sedang dalam pertumbuhannja, maka kongres dengan tekad jang bulat telah mengambil keputusan harus berani menggalang segala potensi Nasional dalam dunia perbankan dengan djalan mempersatukan bank-bank Nasional disamping bank² Pemerintah. Achirnja pada tgl. 27 Mei 1952 terbentuklah suatu organisasi dengan nama „Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia”, disingkat Perbana, berkedudukan di Jogjakarta, dengan werkveld di Djakarta dan di-tiap² daerah Dt. I diangkat seorang Komisaris untuk mengkoordinir anggauta² jang tersebar diseluruh plokso tanah air, dengan tugas atau tudjuan:

- a. Mempererat hubungan antara bank Nasional Indonesia.
- b. Memperkuat kedudukan Bank-Bank Nasional Indonesia.
- c. Menambah kemadjuan dan effisiensi dari anggotanja.

Atas andjuran J.M. Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta maka pada tgl. 23 s/d 28 Pebruari 1964, Perbana mengadakan rapat anggautanja jang ke XIII di Tretes Malang, bertalian dengan maksud Pemerintah untuk mengadakan Penertiban dalam dunia perbankan, baik Bank² Swasta, maupun Bank² Pemerintah, termasuk Bank² Tabungan dan Bank² Pembangunan, dalam suatu organisasi jang disebut „Musjawarah Bank Nasional Swasta” MUBANAS. Didalam anggaran Dasar Mubanas pasal 4, terdapat kata² „Maksud dan tudjuan Musjawarah termaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan tjara membantu suatu Organisasi Perusahaan Sedjenis, bagi perbankan jang meliputi seluruh Bank² Nasional Swasta”. Sedangkan dalam pasal 8 terdapat kelimat: Anggaran Dasar dari OPS bagi perbankan, dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dsb. Pada tgl. 5 s/d 9 Maret 1964, dibawah pimpinan Sdr. DJUANA KUSUMAHARDJA S.H. Direktur Bank Indonesia. Musjawarah termaksud dilangsungkan

di Djakarta, diantaranya telah menetapkan bahwa Perbana dianggap satu-satunya organisasi Bank Nasional Swasta yang representatif dan tjakap untuk dijadikan inti dari pembentukan OPS Perbanas, yang pada waktu itupun tersedia Anggaran Dasarnya yang baru dan Pengurus baru pula, yang hingga kini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta No. 9/6/KEP/MUPBMS tgl. 2 Mei 1964, ditetapkan menjadi OPS Perbankan Nasional Swasta, disingkat OPS. Perbanas berkantor pusat di Djakarta dan di tiap^a Dt. I diketuai oleh seorang Komisaris yang merangkap menjadi Pengurus Pleno di Pusat.

Azas Organisasi ialah:

1. Pantja Sila.
2. Manifesto Politik Republik Indonesia.
3. Amanat Pembangunan Presiden tgl. 28 Agustus 1959.
4. Deklarasi Ekonomi.

Maksud dan tudjuan organisasi ialah:

- a. Membantu Pemerintah dalam persoalan^a yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya dan perbankan khususnya.
- b. Membantu pelaksanaan pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan pengamanan Politik Pemerintah dalam bidang moneter dan perbankan.
- c. Membantu dan membina Bank^a Nasional Swasta untuk berkembang setjara berlandaskan politik Pemerintah.
- d. Mempererat hubungan kekeluargaan antara Bank^a Nasional Swasta. Perdjoangan yang telah ditjapai sekarang a.l.:

1. Bidang mental-ideologi negara.

1—1 Mengandjurkan dan mengadakan kepada seluruh anggauta OPS Perbanas umumnya di Djawa Barat ini, agar semua Karyawan ikut aktif mendalami Tavip.

1—2 Mengadakan/Melaksanakan Jon Hansip bagi seluruh Karyawannya yang dikoordinir oleh Bank Pemerintah.

1—3 Melaksanakan dan mengadakan seluruh anggauta OPS Perbanas mentaati Komando J.M. Menteri Penasehat Presiden Perdana Menteri Urusan Funds & Forces tentang suksesnya GEKEREV bersama-sama dengan Bamunas Djawa Barat.

1—4 Ikut serta dalam mengsucceskan Peringatan Dasawarsa KAA I.

2. Bidang Pembangunan.

2—1 Mendjalankan kerdja bakti setjara sukarelawan semua para Karyawannya guna melaksanakan Projek Serba Guna Djatiluhur.

2—2 Sesuai dengan fungsi Bank, ikut serta mengsucceskan pembuatan djalan baru jang menudju ke Taman Pahlawan Tjikutra, dengan djalan bergotong-rojong memberikan kredit.

2—3 Ikut mengsucceskan setjara aktif Pameran Pembangunan Djawa Barat jang baru lalu.

2. Bidang Kemasjarakatan.

3—1 Memberikan sumbangan² kepada Badan² jang bersifat kebajikan guna kepentingan umum jang dipandang perlu, sedjalan dengan program Pemerintah, umpamanja: P.M.I., Badan Buku Mahasiswa Indonesia dan jang terachir kepada peristiwa Bo-djongkoneng.

3—2 Memberikan sumbangan kepada anak² Tjatjad/Tuna Karya.

Banjaknja Anggauta.

Menurut anggaran dasar Bab IV pasal 6 tentang keanggautaan tersebut „Semua Bank² Nasional Swasta, jang mendapat izin untuk berusaha dibidang kerdja Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta cq Bank Indonesia, mendjadi anggauta”.

Jang telah resmi mendjadi anggauta di Komisariat Djabar = 8 Bank.

Jang dianggap sebagai tjalon anggauta karena belum memenuhi sebagaimana didalam ketentuan² jang telah mendjadi kewadajibannja. = 9 Bank.

Djumlah = 17 Bank.

Menurut tjatatan jang seharusnja mendjadi anggauta kira² 22 Bank Swasta jang berada di Bandung dan sekitarnja.

Bidang usaha.

Menampung uang² jang tidak/belum digunakan dari jang berada ditangan masjarakat, dalam bentuk Giro, Tabungan Deposito dll. untuk selandjutnja uang² itu disalurkan kembali kepada masjarakat jang bersifat produktif terutama kepada bidang jang bertudjuan mempertinggi produksi pangan, produksi sandang, pertanian, perikanan, perindustrian dll. jang sedjalan dengan rentjana Pemerintah, mengingat bahwa tugas bank adalah sebagai alat revolusi dan soko guru dari rentjana Pemerintah dan bidang perekonomian dan keuangan pada umumnya dan perbankan pada chususnja.

Berusaha menanggulangi meluasnja inflasi dengan djalan memberikan/menjiarkan penerangan kepada masjarakat agar merobah kebiasaan melakukan segala pembayaran dengan uang kartal, diganti dengan kebiasaan pembayaran dengan uang giral.

Rentjana Kerdja (usaha) selandjutnja.

Mempererat kerdja sama antara para anggautanja, mempertebal rasa kegotong-rojongan sesama anggauta. Akan mengadakan Bankers-Call saling membantu dan saling mengisi dalam hal likwiditas. Akan terus mempergiat menjebaran rasa bank mindedness dikalangan rakjat luas sampai ke Desa^a jang djauh dari kesibukan kota.

Akan berusaha menggalang semua „Funds and Forces” sebagai bekal jang menudju ketahap Sosialisme Indonesia sebagai Pengemban Ampera, atas dasar prinsip Berdiri diatas kaki sendiri sesuai dengan Amanat Politik P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris M.P.R.S. Bung Karno, pada Sidang Umum M.P.R.S. ke III tgl. 11 April 1965 di Bandung, jang ditudjukan kepada seluruh Rakjat Indonesia chususnja dan kepada dunia pada umumnja. Karena amat pentingnja Amanat termaksud, maka dengan penuh sadar dan tanggung djawab OPS Perbanas menjatakan penuh dukungannja.

Susunan Pengurus OPS Perbanas Komisariat Djawa Barat.

- Ketua** : A. W A R S O M A
Bank Ekonomi Nasional P.T.
Djalan Asia Afrika 123 Bandung.
- Wakil Ketua** : T H E H O N G L I A N G
Commercial Bank N.V.
Djalan Suniaradja Timur 19 Bandung.
- Sekretaris** : R O C H I J A T
Bank Sukapura
Djalan Braga 71 Atas Bandung.
- Bendahara** : C H R. A. L E K A T O M P E S S Y
Bank Tabungan Bandung
Djalan Lembong 14 Bandung.

PERTUMBUHAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEDJENIS ASURANSI KERUGIAN (GPS.-AK) DAERAH TK. I DJABAR DARI TAHUN 1955 SAMPAI 1965.

G.P.S.-A.K. dibentuk pada tgl. 19 Djanuari 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1963 tgl. 5 Agustus 1963 jang dikeluarkan oleh Menteri, sehingga GPS-AK termasuk dalam lingkungan Kementerian P.3., dan merupakan pendjelmaan dari Jajasan Kerdja Sama Asuransi (Locale Comisie Raad van Assuradeuren in Indonesia). Peleburan dari J.K.S.A. ini telah diambil oleh Pemerintah, demi untuk mengintegrasikan semua Perusahaan² Sedjenis sesuai dengan apa jang tertera dalam DEKON. Djuga oleh Pemerintah dianggap perlu merubahnja mendjadi G.P.S. disebabkan „leading Position harus dipegang oleh P.N.A.K., sedang anggauta²-nja terdiri dari P.N.A.K.², Perusahaan Asuransi Swasta Nasional dan sebagai anggauta luar biasa Perusahaan² Asuransi Asing. Hingga kini djumlah Anggauta GPS.-AK berdjumlah 20 Anggauta. Dalam masa JKSA. dahulu mengenai susunan Pengurusnja diserahkan sama sekali kepada semua anggauta untuk setjara Demokratis memilih diantara para Anggauta² semuanya 5 orang anggauta Pengurus berdasarkan suara terbanyak, sedangkan sekarang pemilihan langsung ditundjuk oleh Menteri. Pemilihan Pengurus ini dilakukan tiap setahun sekali. Adapun kewadajiban dari GPS-AK ini ialah terutama sekali membimbing para anggauta kepada sesuatu keseragaman dalam penentuan tarip² asuransi, dalam mempergunakan polis², bahkan sedapat mungkin sampai kepada penjelenggaraan teknis/administratip dimana konkurensi jang tidak sehat sedapat mungkin dapat dihindarkan.

G.P.S.-A.K. ini merupakan Tjabang dari GPS-AK Pusat berkedudukan di Djakarta jang meliputi seluruh Indonesia dimana terdapat Perusahaan-Perusahaan Asuransi baik Negara/Swasta Nasional maupun Swasta Asing dan ini terutama di-kota² besar dimana terdapat Perusahaan² Asuransi jang bekerdja. Akan tetapi di beberapa kota besar seperti misalnja di Tjirebon ada beberapa Perusahaan Asuransi jang tidak membentuk G.P.S. setempat dan djuga tidak menggabungkan diri kepada GPS-AK jang berkedudukan di Bandung walaupun sebenarnja daerah Tjirebon adalah termasuk dalam rayon GPS-AK Djawa Barat, begitu djuga Bogor. Akan tetapi untuk daerah Bogor tidaklah mendjadi kesulitan bagi GPS-AK, karena di kota ini tidak ada Perusahaan Asuransi jang mempunyai kantor Tjabangnja. Walaupun terlepas untuk tunduk kepada segala peraturan² per-asuransian jang digariskan oleh Kantor Pusat mereka masing² jang berkedudukan di Djakarta/Semarang, dengan sendirinja djuga mendapatkan instruksi²/dan laporan²/tjara kerdja dari GPS-AK Pusat. Disamping tjara² kerdja jang telah disebutkan diatas, GPS-AK

Pusat djuga mengadakan kursus² bagi mereka jang berminat untuk bidang Asuransi jang djuga mentjakup peladjaran² mengenai Ideologi Negara, ekonomic/perbankan dsb. Walaupun GPS-AK sudah sedjak lama didirikan (sebagai pendjelmaan dari J.K.S.A.), namun G.P.S.-A.K. masih djuga menghadapi beberapa kesulitan, terutama disebabkan adanya beberapa Perusahaan Asuransi/Agen² jang tidak mau menghubungi GPS-AK untuk mendjadi anggauta, sehingga oleh mereka banjak dilakukan penjewe-
 lewengan² dalam penentuan tarip² dan sebagainya jang bagi G.P.S.-A.K merupakan suatu hal jang sukar diatasi dan tidak pula dapat melarangnja karena bukan anggauta GPS-AK.

Perusahaan² Asuransi demikian lazimnja disebut Maskapai² Asuransi „non-tariff” dimana bagi GPS-AK ada larangan untuk mengadakan suatu kerdja-sama dengan mereka, dalam arti kata tidak boleh memberi ataupun menerima „facultative reinsurance” dari padanja. Adapun susunan Pengurus dari G.P.S.-A.K. di Bandung untuk tahun kerdja 1965 ini adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|--|---------------|
| 1. A. RACHIM | — P.N.A.K. „DJASA SAMUDRA” | — Ketua. |
| 2. M. SOEDJONO | — P. T. MASK. ASURANSI „WARI-
NGIN LLOYD” | — Wk. Ketua. |
| 3. TAN TJONG HAUW | — P. T. MASK. ASURANSI „INDONESIA” | — Sekretaris. |
| 4. J. A. LEKTONPESSY | — P. T. ASURANSI „BINTANG” | — Anggauta |
| 5. ONO KARTADINATA | — P. T. ASURANSI „CHAKRA” | — Anggauta. |

PERTUMBUHAN ORGANDA DT. I DJAWA BARAT

1. Organda Djawa Barat didirikan dan diresmikan pada tanggal 16 Djuli 1962 dalam Konperensi Daerah sebagai realisasi keputusan Musjawarah Angkutan Darat di Malang tgl. 28 s/d 30 Djuni 1962 dan dengan keputusan Menteri Perhubungan Darat & P.T.P. tertanggal 17 Djuni 1963 No. L 25/1/18 tentang pengangkatan terhadap Organda sebagai Organisasi TUNGGAL dalam angkutan darat. Organda adalah pelaksanaan fusi atau peleburan dari organisasi² angkutan darat Nasional jaitu Orpeni, Pergapri, Gapo/Ipossi dan sebagai hasil integrasi dengan Gandavetri (Gabungan Angkutan Darat Veteran R.I.) pada tanggal 11 s/d 14 Djuli 1964 di Tjipajung. Dengan adanya Perpres. No. 2 tahun 1965 maka seperti OPS² lain, melalui Organda Pusat diakui sebagai OPS Organda.
2. Organda berdasarkan tjita² pembentukan dan pembinaan suatu masyarakat sosialisme Indonesia jang adil dan makmur serta sedjahtera berlandaskan Pantja Sila, dengan berpedoman kepada sistim demokrasi dan ekonomi terpimpin, jang berdasarkan Kepribadian Indonesia serta dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan, dan bertudjuan menghimpun perusahaan² angkutan bermotor serta mengusahakan alat kelengkapan keperluan pengangkutan kendaraan bermotor didarat dalam satu organisasi dengan tudjuan:
 - a. mendudukkan perusahaan angkutan kendaraan bermotor swasta nasional pada kedudukan jang selaras dengan fungsinya jang vital didalam kehidupan masyarakat.
 - b. memelihara dan menjempurnakan kehidupan perusahaan anggautanja agar bermanfaat bagi kemandjuaan pembangunan masyarakat serta Negara Republik Indonesia.
 - c. mempertinggi deradjat, membela kepentingan dan memupuk perusahaan anggautanja masing² dan/atau bersama.
3. Anggauta Organda meliputi Perusahaan² Otobis, Truck, Gandengan dan mobil penumpang umum, dewasa ini berdjumlah 2.224 Pengusaha Truck, Bus, Suburban, Oplet dengan 3.608 djumlah kendaraan. Menurut perhitungan sampai pada tgl. 31 Desember 1964 djumlah kendaraan penumpang umum diseluruh Djawa Barat terdiri dari:

	<i>Pemilik.</i>	<i>Kendaraan</i>
Mobil penumpang Umum.....	4.588	5.232
Otobus Umum	266	1.006
Truck Umum	3.504	8.603
Gandengan Umum	44	80
Djumlah	8.402	14.921

4. Dalam melaksanakan tugas organisasi Organda Djawa Barat dengan Pemerintah yang bersangkutan khususnya dengan Gubernur Kepala Daerah dan Inspeksi Lalu-Lintas Jalan mendapatkan bantuan dan dorongan yang cukup besar. Tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran para anggotanya yang terdiri dari Perusahaan Angkutan Nasional dan Swasta itu, baik terhadap organisasi maupun terhadap Revolusi.

Organda Djawa Barat tidak pernah absen dalam pengerahan² kendaraan baik insidental maupun proyek² nasional, proyek Tjikunten Tasikmalaja, Djatiluhur dls. yang masih berdjalan terus dan proyek² nasional lainnya maupun tingkat Kabupaten/Kotapradja. Mengenai dana²/sumbangan² antara lain Gunung Agung, Ganefo, Dwikora, KIAA, Dasa Warsa KAA dll. dana, juga tidak pernah absen, disamping mengandjurkan kepada sektor angkutan supaya menjumbangkan langsung kepada Pemerintah/Panitia setempat.

5. Bidang angkutan dewasa ini menghadapi kesulitan, lebih² bagi perusahaan angkutan yang diatur dan dipimpin dengan ketentuan izin yang berwadajib, waktu perdjalan dan tarip, yaitu Otobus.

Mengenai Truck Umum yang pada kenjataanja tidak berlaku tarip angkutan tetapi juga tidak menunjukkan prespektief hari depan karena tidak sesuaija ongkos angkutan. Prekwensi daja angkutan Otobus jg. vital, sukar dipertahankan, karena pendapatan perusahaan djauh dari pada menutupi keperluan eksploitasi dalam keadaan monetair sekarang dan karena mahalja alat² onderdeel dan bahan bakar yang sukar didapat.

Menurut kalkulasi umum dengan harga kendaraan dan harga² serta ongkos² pengangkutan bulan Pebruari 1965 menunjukkan tiap penumpang per Km. Rp. 8,30 atau Rp. 80,— per ton/Km., maka berdasarkan keputusan Gubernur tertanggal 31 Maret 1965 No. 51/BI/Pem/SK/65 tentang penetapan tarip maksimum angkutan penumpang Otobis untuk daerah Tk. I Djawa Barat Rp. 4,50 tiap penumpang/Km. dan dari djumlah itu Rp. 0,50 tiap penumpang/Km untuk dana keperluan bahan bakar dan djalan², maka sukarlah digambarkan akan tambahja Prekwensi dan daja angkutan Otobus karena tidak mungkinja untuk menutup ongkos² dan melandjutkan perusahaannya.

6. Dalam pelaksanaan Gekerev, Organda Djawa Barat dengan bantuan Bamunas Djawa Barat dan Inspeksi Lalu-Lintas Jalan telah bekerdja dan berusaha keras untuk mensukseskan dan untuk memenuhi instruksi J.M. Menteri Ketua Umum BAMUNAS Pusat, melalui Organda Pusat, tentang sumbangan untuk pendirian Gedung Veteran dan Gedung Jakindra, Organda Djawa Barat telah mengirimkan sementara

Rp. 1.000.000,— (satu djuta rupiah) untuk Gedung Jakindra. Untuk ini masih diteruskan usaha dengan giat melalui Kepala Inspeksi L.L.D. agar seluruh angkutan swasta bergotong-rojong memberikan bantuan sumbangnja.

7. *Susunan Pengurus.*

Penasehat.

1. Rd. Sabri Gandanegara — sebagai wakil dari Pemerintah Daerah Djawa Barat.
2. M. M a k s o e m — Kepala Inspeksi L.L.D. Djawa Barat.
3. R.D. R a m l a n — Kepala I.P.D.N. Djawa Barat.
4. W.A.M. Inkiriwang — dari Golongan Karyawan Pengusaha Angkutan.
5. Lie Bian Hoen — idem.

8. *Dewan Pengurus.*

1. Ketua Umum — Wisnoe S.
2. K e t u a I — Nj. Elly.
3. K e t u a II — Tan Giok Keng.
4. K e t u a III — Nedrie Sastraatmadja.
5. K e t u a IV — M. Simandjuntak.
6. Bendahari — Lauw Ping Gwan.
7. Anggauta Pengurus — Robert Inkiriwang.
8. Anggauta Pengurus — Yap Goan Bie.

Komisariat².

Sebagai Perwakilan² Organda Djawa Barat di Daerah² Tingkat II diseluruh Djawa Barat telah dibentuk Komisariat² Organda.

PERTUMBUHAN OPS PENERBITAN DJAWA BARAT

Ikatan Penerbit Indonesia OPS Penerbitan Djawa Barat didirikan tanggal 23 Nopember 1964 No. 44/SK/M/64, semendjak didirikan hingga kini baru berusia $\pm$ 5 bulan.

Sebelum mendjadi OPS ia adalah sebagai suatu organisasi *Ikatan Penerbit Indonesia* disingkat *IKAPI*, jang berazaskan *Pantja Sila* dengan berbaluan *Manipol Usdek* dan bertudjuan:

memasukkan penerbitan buku² jang bermutu dan berguna bagi masjarakat sosialis Indonesia jang ber Pantja-Sila dan berhaluan Manipol Usdek. Didirikan pada tgl. 25 Agustus 1959 di Bandung. Hingga kini telah berusia 5 tahun. Dia bergerak dalam bidang *penerbitan buku² sekolah, madrasah, Pesantren dan Umum sesuai dengan Dasar dan Tudjuannja*.

Dalam permulaan berdirinja beranggautakan 6 Perusahaan Penerbit dan sekarang telah berdjumlah 49 anggauta dengan iuran terachir Rp. 1.000,— (Seribu rupiah) dan uang pangkal Rp. 5.000,— (Lima ribu rupiah).

Dia bergerak menudju kepada tudjuannja dengan didampingi 2 badan bagian, jaitu „*Dana Simpan Pindjam*” *Ikapi* dengan singkatan „Dana Ikapi” jang bertudjuan, *membentuk suatu modal setjara kolektif untuk sekedar membantu keuangan anggautanja jang membutuhkan, dengan djalan memberi pindjaman (kredit) dan Ikatan Isteri*, jang bertudjuan sosial semata-mata.

Dengan djalan tjeramah², kursus² dan indoktrinasi jang achir² diadakan dengan bantuan team indoktrinasi UNPAD dan Penerangan Djawa Barat membawa hasil jang tidak sedikit, untuk membangun manusia Indonesia Baru jang sosialis Pantjasilais.

Oleh karena Ikapi jang mendjadi OPS Penerbitan dewasa ini, djuga mempunyai tudjuan² membangun mental dengan djalan penerbitan dan ikut berevolusi dalam segala bidang dan *berdikari*, maka iapun mempunyai rentjana untuk membangun *Pabrik Kertas, Karton dan lainnja jang berbubungan dengan kebutuhan² penerbitan seperti Pertjetakan, Pendjilidan dan lain² jang tidak kalah dengan negeri² jang sudah madju*. Dan rentjana jang tersebut mendjadi rentjana, jang akan dilaksanakan dalam waktu singkat, djika keadaan mengidzinkan.

Susunan Pengurus jang sekarang adalah sebagai berikut:

1. K e t u a : Nj. Rachmat Soemitro.
2. Wakil Ketua : Abu Bakar.
3. Penulis : Rachmat Marta adi Subrata.
4. Bendahari : Rochdi Partaatmadja, dengan dibantu oleh Ali Dachlan.
5. Pembantu : H. Achmad Ratman dan M. Rizan.

Alamat Sekretariat: Djalan Geredja 3 Bandung.

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung

Ditengah-tengah keindahan lembah Tangkubanprahu, diantara perjalanan Bandung ke Lembang terbentangleh kampus I.K.I.P. Bandung dan ditengah-tengahnja mendjulang tinggi gedung Bumi Siliwangi, sekolah² mertju suar jang memberi arah pada musafir dan kelana pendidikan jang sedang mentjari tudjuan didalam pembinaan pendidikan bagi tunas nusa dan bangsanja

I.K.I.P. adalah singkatan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan bertugas mempersiapkan ahli², pemimpin², peneliti², penjuluh² dan pembimbing² dalam bidang kependidikan, dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi. Untuk memahami keadaan I.K.I.P. ini, kita perlu mengetahui latar belakangnja.

1. Sedjarah Pendidikan Guru untuk Sekolah Landjutan.

- Pendidikan Guru untuk Sekolah landjutan dimulai sedjak 1950 dan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1950 dan berbentuk kursus idjazah A (2 tahun) idjazah BI (3 tahun) dan idjazah BII (5 tahun) sesudah S.G.A., S.M.A. dan jang sederadjat. Dengan demikian di Bandungpun sedjak 1950 dimulai kursus² tsb.
- Pada tahun 1954 dengan keputusan Menteri P.D.K. No. 38742/Kab didirikanlah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (P.T.P.G.) Bandung mulai 1 September 1954. P.T.P.G. mempunjai kedudukan Universiter.
- Sedjak 24 September 1957 P.T.P.G. ditetapkan sebagai satu fakultas dilingkungan Universitas Padjadjaran, jang dimulai pada permulaan tahun kuliah 1957/1958. Dengan demikian P.T.P.G. diubah namanja mendjadi F.K.I.P. Unpad.
- Dengan keputusan Menteri P.P.K. No. 6 dan 7 tahun 1961 ditetapkan pengintegrasian kursus² BI/BII kedalam F.K.I.P. sedjak tahun 1961. Dengan demikian ditetapkan hanja adanja satu matjam pendidikan dan satu matjam idjazah untuk pendidikan guru taraf universiter. Demikianlah BI/BII di Bandung diintegrasikan kedalam F.K.I.P. Unpad.
- Sedjak dihapuskan BI/BII (jang kuliah²nja dilakukan pada sore hari, sehingga banjak guru² dapat mengikutinja), maka kini hanja guru² jang mendapat tugas beladjarlah jang dapat mengikuti F.K.I.P. Dan djumlah jang mendapat tugas beladjar ini terbatas sekali. Hal ini dirasakan sebagai sesuatu jang menghambat kebutuhan kementerian P.D.K. dalam memenuhi tenaga² pendidik untuk tingkat Sekolah Landjutan.

Atas dasar itu dengan keputusan Menteri P.D.K. No. 92/1962 didirikan Institut Pendidikan Guru yang bersifat kedinasan. Dengan demikian ditetapkanlah I.P.G. Bandung dengan 6 Departemen meliputi 22 jurusan.

— Dengan keputusan Presiden No. 1 tahun 1963 ditetapkan penjuruan F.K.I.P. dan I.P.G. dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (I.K.I.P.) yang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen P.T.I.P. Bandung.

Pimpinan.

Tokoh² yang duduk sebagai pimpinan sedjak P.T.P.G. adalah sebagai berikut:

- a. Prof. M. Sadarjoen Siswomartojo sebagai Dekan P.T.P.G. yang kemudian menjadi F.K.I.P. sedjak 1 September 1954 — 15 Mei 1961.
- b. Prof. H. Moh. Yamin sebagai Pd. Dekan P.T.P.G. dari Agustus 1956 — Agustus 1957.
- c. Drs. Harsojo sebagai Pd. Dekan F.K.I.P. dari 15 Mei 1961 — 15 Desember 1961.
- d. Prof. M.A. Gazali Soerianatsoedjana M.A. sebagai Dekan F.K.I.P. dari 15 Desember 1961 — 11 Mei 1964 dan Ketua Presidium Sementara I.K.I.P. dari 11 Mei 1964 — 5 Maret 1965.
- e. Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani sebagai Rektor yang pertama bagi I.K.I.P. Bandung sedjak 5 Maret 1965.

Alumni.

BI/BII dan P.G.S.L.P. di Bandung selama 1950 — 1961 telah menghasilkan $\pm$ 2.500. Sedjak integrasi sebagian meneruskan untuk mentjapai idjazah Sardjana atau Sardjana Muda di F.K.I.P. atau di Fakultas lain. Ada pula yang berkesempatan keluar Negeri dan mendapat idjazah Universitas.

Dari 1954 — 1964 F.K.I.P. Universitas Padjadjaran telah menghasilkan 548 Sardjana dan 2513 Sardjana Muda.

2. *I.K.I.P.*

I.K.I.P. Bandung mulai dapat dircalisasikan sedjak 11 Mei 1964 sebagai penjuruan F.K.I.P. Universitas Padjadjaran dan I.P.G. Bandung.

Mendjelang adanja Rektor, pimpinan I.K.I.P. Bandung diserahkan kepada sebuah presidium sebagai wakil² dari F.K.I.P. dan I.P.G. yang terdiri dari 3 orang ketua dan 8 orang anggauta. Adapun ketua² tersebut adalah:

Ketua I : Prof. M.A. Gazali Soerianatasoedjana M.A.
 Ketua II : R. Kardjono.
 Ketua III : R. Sahardi Notodipuro.
 Sekertaris I : S. Nasution, M.A. dan kemudian diganti oleh Mochtar Buchori, M. Ed.
 Sekertaris II : Dra. Mien Warnaen.
 Anggauta² : R.A. Santoso, M.Sc. (Ed) jang kemudian diganti oleh Dr. R. Garnadi.
 Liem Tjong Tiat, M. Ed. jang kemudian diganti oleh Dr. Phil. Soepardjo.
 Drs. Soemitro jang kemudian diganti oleh Dr. Achmad Sanusi, S.H.
 Ir. Hadis Sumantri.
 R. Suplin Judawinata.
 Ir. Lie Tiong Djien.

Sedjak 5 Maret 1965 telah ditetapkan rektor I.K.I.P. Bandung jang pertama ialah Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Struktur dan Organisasi.

I.K.I.P. Bandung merupakan I.K.I.P. Induk. Diseluruh Indonesia ada 4 I.K.I.P. Induk, jaitu di Djakarta, Bandung, Jogja dan Malang.

I.K.I.P. Bandung ini mempunyai tjabang²-nja di Banda, Atjeh, Palembang, Bandjarmasin, Palangkaraja, sedangkan Pontianak akan ditetapkan djuga sebagai tjabang.

Disamping tjabang I.K.I.P. Bandung mempunyai extension²-nja di: Bogor, Tasikmalaja, Garut, Tjiamis jang sudah resmi, sedangkan jang masih menunggu peresmianja adalah Madjalengka, Tjirebon, Sumedang, Tjiandjur dan Sukabumi.

I.K.I.P. Bandung mempunyai 5 Fakultas, jaitu:

- (1). Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 5 djurusan.
- (2). Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta dengan 4 djurusan.
- (3). Fakultas Keguruan Sastra Seni dengan 4 djurusan. ..
- (4). Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial dengan 4 djurusan.
- (5). Fakultas Keguruan Ilmu Teknik dengan 4 djurusan.

Disamping itu ada Balai Penelitian jang berstatus fakultas dan terdiri dari 5 lembaga.

Pimpinan.

Pimpinan I.K.I.P. Bandung sedjak 5 Maret 1965 adalah:

Rektor : Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani.
 Wakil Rektor : Let. Kol. Inf. Kadar Mangundjaja.

Pembantu Rektor I (bidang pendidikan dan penelitian : Prof. M.A. Gazali Surianatasoedjana, M.A.

Pembantu Rektor II (Bidang administrasi, keuangan, personalia dll.) : Drs. Djuhana Natawisastra.

Pembantu Rektor III (bidang kemahasiswaan) : Drs. Wagito Martodihardjo.

Pembantu Rektor IV (bidang pengembangan masyarakat, extension upgrading dll.) : Dra. Mien Soewarmi Warnaen.

Dekan F.I.P. : Winarno Surachmad M.Ed.

Dekan F.K.P.S. : Dr. Phil. Soepardjo Adikusumo.

Dekan F.K.I.T. : R. Kardjono.

Dekan F.K.I.E. : Prof. Dr. Ganardi Prawirosudirdjo.

Dekan F.K.S.S. : Drs. Sjahrul Sjarif.

Ketua Balai Penelitian : Dr. W.A. Gerungan.

Seperti lazimnja bagi suatu institut, di I.K.I.P. telah dibentuk Dewan Penjataan jang terdiri dari:

Ketua : Brig. Djen. Mashudi, Gubernur Kepala Daerah Djabar.

Wakil Ketua I : Maj. Djen. T.N.I. Ibrahim Adji, Pangdam VI Siliwangi.

Wakil Ketua II : Drs. R. Moerhadi Danoewilogo, Kepala Angkatan Kepolisian Komisariat Djawa Barat.

Anggauta³ : 1. Sdr. A. Pryatna, S.H. Kepala Kedjaksanaan Tinggi Bandung.

2. Sdr. Laksamana Muda Udara R.A. Wiriadinata, Panglima Koopau.

3. Sdr. Kolonel Pensiun Soetoko, Ketua Harian Front Nasional Djawa Barat.

4. Sdr. R. Adur Kepala Perwakilan P.D.K. Djabar.

5. Sdr. Ir. Oekar Bratakusumah, Rektor ITB.

6. Sdr. R. Sanusi Hardjadinata, Rektor Unpad.

7. Sdr. Dr. R. Utju Rubaah, partikelir di Bandung.

8. Sdr. R.O. Joeda Koesoemah, Pensiunan Kepala Djawatan Kebudayaan Departemen P.D.K.

9. Sdr. Simatupang S.H. Direktur Djendral P.N. Postel.

10. Sdr. Hartono Wirjodinoto S.H. Direktur Djendral P.N.K.A.

11. Sdr. Drs. E. Ma'mur, partikelir di Bandung.

12. Sdr. Rachmat Solihin, partikelir di Bandung.

13. Nj. Emma Puradiredja, Anggauta D.P.A.

14. Maj. Djen. Prof. Dr. Mustopo, Pembantu Chusus Menteri P.T.I.P.

15. Sdr. Oejeng Suwargana, Pengusaha di Bandung.

Disamping itu telah dibentuk **Jajasan Kesedjahteraan I.K.I.P.** dengan bertujuan membantu pimpinan I.K.I.P. dalam usaha^s kesedjahteraan pegawai^s-nja.

Adapun pimpinan terdiri dari:

K e t u a	: Sdr. Sarimin Reksodihardjo.
Wakil Ketua	: Sdr. Dr. Achmad Sanusi S.H.
Penulis	: Sdr. Mas Soeto Adhiwidjojo.
Bendahara	: Sdr. Raden Soelaeman Natawidjaja.
Anggota	: Sdr. Hadji Nitisumantri.

Senat I.K.I.P. jang lengkap, terdiri dari para Guru Besar, para Lektor Kepala dan para Lektor, sedang disusun.

Kegiatan Akademis.

Civitas Academica I.K.I.P. jang terdiri dari dosen^s, karyawan^s dan mahasiswa bekerdja sama erat untuk menjelesaikan dan menunaikan Tritugas Perguruan Tinggi.

Disamping itu I.K.I.P. Bandung telah ditetapkan oleh P.J.M. Presiden sebagai pilot project untuk nation and character building.

Selama ini telah dilakukan seminar^s, simposium^s, workshop, penataran dalam bidang pendidikan.

Baru^s ini telah dilakukan seminar tentang Pengadjaran Bahasa Indonesia jang mendapat sambutan jang baik sekali dari fihak Departemen P.D.K., Pers, Sastrawan^s dan masjarakat.

Dan jang paling achir ialah workshop mengenai pengadjaran ilmu eksakta jang bertujuan menghindarkan verbalisme dalam pengadjaran ilmu^s eksakta disekolah-sekolah.

Afiliasi^s dilakukan dengan berbagai departemen, berbagai universitas/institut, Seskoad, SESCOAK.

Diusahakan pula berbagai kegiatan pengabdian kepada masjarakat, seperti turun kedesa, checking up buta huruf, melawat keperbatasan Kalimantan, pagelaran seni dsb.

Djumlah dosen seluruhnja adalah : 1.293 orang.

Djumlah karyawan tata-usaha adalah : 488 orang.

Djumlah : 1.781 orang.

Mahasiswa.

Keadaan Mahasiswa pada bulan Maret 1965 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa biasa (regular)	2.813 orang.
2. Mahasiswa karyawan:	
a. extension resmi	4.152 orang.
b. extension belum resmi	<u>949 orang.</u>
Djumlah	7.913 orang.

Seluruh mahasiswa dihimpun dalam satu Dewan Mahasiswa I.K.I.P. sebagai kegiatan intra universiter.

Disamping itu kelompok² extra universiter diberikan pula kesempatan untuk menetapkan komisariatnja dilingkungan I.K.I.P. Bandung dengan mematuhi ketentuan² jang telah ditetapkan oleh pimpinan IKIP.

Pembangunan.

Disebabkan I.K.I.P. Bandung oleh P.J.M. Presiden telah ditundjuk sebagai Pilot Projek Nation and Character building, dengan demikian harus merupakan tjontoh dan teladan bagi semua I.K.I.P. jang ada di Indonesia, ditambah pula dengan ketetapan M.P.R.S. No. IV/1965 jang menetapkan Projek Nation and Character building sebagai projek prioritas pertama, maka I.K.I.P. Bandung merentjanakan perluasan dan pembangunan kampus I.K.I.P. sehingga akan mampu menunaikan tugas sebagai Tjandradimuka tjalon² pendidik bagi pembina² tunas² muda pembangunan Indonesia.

Bumi Siliwangi jang mempunyai tanah seluas 15 Ha. dan jang menurut perentjanaan akan diluaskan mendjadi 60 Ha., sedang membangun, memperbaiki dan memperluas asrama, kantor tata-usaha, gedung Bumi Siliwangi, gedung Olah-Raga, djalan² dalam kampus, gedung pertjetakan, W.C. umum, gedung kuliah, kafetaria, perumahan dosen dan pegawai. Sedang direntjanakan pula untuk membangun tjabang Bank Negara Indonesia, kantor pos, poliklinik, pompa bensin, dll., jang selain memenuhi kebutuhan dan keperluan I.K.I.P., dapat pula dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnja.

Djuga penggalian unsur² kebudajaan dan berbagai tjabang kesenian dan keolah-raga digiatkan. Tidak pula lupa perentjanaan dalam perluasan Perpustakaan jang merupakan sumber² berharga bagi penggalian bidang ilmu. Mudah²-an I.K.I.P. jang masih baru ini, tetapi jang mempunyai sedjarah latar belakang jang lama akan dapat memberikan darma baktinja kearah penjelesaian revolusi.

Radio Republik Indonesia Studio Bandung.

Pandangan Umum.

1. Sedjak proklamasi Kemerdekaan 17/8-1945, dengan mengambil tempat dibekas Studio Radio Pemerintah Djepang (Hoso Kyoku) jang berada di Tegallega, RRI Studio Bandung mulai berkumandang diudara dalam suasana revolusi fisik, dan sedjak hari²-pertama revolusi itu, RRI Studio Bandung turut langsung menyiarkan teks Proklamasi Kemerdekaan keseluruh dunia disamping siaran² lainnja.
2. Setelah Pemerintah Daerah Djawa Barat mengungsi ke Tasikmalaja, RRI Studio Bandungpun menyiarkan siaran²-nja dari Djl. Gn. Ladu No. 14, Tasikmalaja mulai tanggal 15 April 1946.
3. Dengan didudukinja sebagian besar daerah Djawa Barat, Radio Perdjungan Djabar berkumandang dari kota Jogjakarta, disamping Radio Perdjungan jang memantjarkan siaran²-nja dari kota Serang.
4. Dalam zaman Pendudukan Belanda, Pemerintah Federal Pasundan, Radio Omroep In Overgangstijd (ROIO) di Bandung menyiarkan siaran²-nja jang merupakan propaganda Pro-Belanda; siaran² mana dipantjarkan dari gedung Studio/Pemantjar jang berada di Djl. Bukittinggul No. 4 Tjiumbulleuit sehingga Penjerahan kedaulatan.
5. Zaman Pengakuan Kedaulatan RIS, pada tgl. 29 Desember 1949 bertempat di Djl. Bukittinggul No. 4 Tjiumbulleuit, Radio Bandung diserahkan kepada Radio RIS oleh pihak Belanda (ROIO).
6. Tahun 1950 — 1955 merupakan masa konsolidasi dan stabilisasi kedalam, disamping turut berusaha membubarkan Pemerintah Pasundan dan menegakkan Negara Kesatuan R.I.; djuga tugas pengamanan daerah Djawa Barat dari berbagai gangguan Gerombolan dan kaki-tangan Belanda. Kesemuanja itu dengan mempergunakan 2 buah pemantjar jang ada pada waktu itu.
7. Tahun 1955 — 1960, penambahan pemantjar-baru jang berkekuatan 10 kilowatt, jang diresmikan pada tgl. 16 Agustus 1955 ber-sama² dengan peresmian gedung Studio jang berada di Djl. Tjiandjur No. 6. Dalam masa ini, Studio dan Pemantjar masing² mendapat sebuah disel jang baru, untuk kelangsungan djalannja siaran jang sering terganggu oleh padamnja aliran listrik PLN.
8. Tahun 1960 — 1965, dapat dikatakan tidak ada pembangunan/tambahan jang berarti dalam bidang peralatan, dan sementara ditjukupkan dengan alat² jang telah ada sadja.
9. Tahun 1965 — 1969, diharapkan tambahnja Pemantjar-baru jang berkekuatan 20 kilowatt dalam tahun 1966 dan jang berkekuatan

1 kilowatt, serta pembangunan Studio baru yang lebih lengkap dan representatif, berikut auditorium, Studio Televisi dan perlengkapan² lainnya.

Kegiatan.

1. Sedjak Proklamasi kemerdekaan, tugas RRI adalah: informasi, edukasi dan hiburan-sehat. Kini tugas tersebut ditambah lagi dengan indoktrinasi; sehingga menjadi: informasi, edukasi, indoktrinasi dan hiburan-sehat. Kesemuanya itu selalu sejalan dengan Pemerintah Pusat dan melayani kepentingan daerah dalam segala kegiatan yang terjadi di Jawa Barat.
2. RRI Bandung turut mempunyai andil a.l. dalam bidang Pemerintahan, sedjak penguburan Negara Federal Pasundan, yang diteruskan dengan Negara Kesatuan R.I.; juga dalam pengamanan daerah dari berbagai macam gerombolan-bersendjata yang mengatjau didaerah ini sehingga tertangkapnya Kartosuwirjo; dalam bidang olahraga (PON, Asian Games, Ganefo dsb); kesibukan² Nasional dan Internasional seperti: Konstituante, MPRS, Tamu²-Agung, ILO, WHO, KAA-I, Dasawarsa KAA-I, turut dalam penjurusan Panitia Televisi Experimentil, dsb, dsb.
3. Segala macam usaha dalam bidang: informasi, edukasi, indoktrinasi dan hiburan sehat, dalam berbagai bentuk siaran dengan tak ada henti² dipantjarkan pada waktunya, tanpa terlalu memikirkan kesulitan² yang ada, baik dalam soal keuangan, personil, peralatan dan kendaraan yang serba kurang.

Organisasi.

1. Setelah mengalami ber-kali² perobahan dalam organisasinya (semula merupakan Djawatan Radio R.I., lalu Direktorat Radio, kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Radio dan Televisi, lalu dirobah menjadi Urusan Radio dan Televisi, yang akhirnya mulai bulan Pebruari 1965 dirobah lagi menjadi Direktorat Radio R.I. dalam Departemen Penerangan). Dalam salah-satu Konferensi-dinas dengan Kepala² Studio seluruh Indonesia di Surakarta telah pernah diputuskan gagasan merupakan Jajasan dalam Pemerintah (bukan Swasta).
2. Dalam Direktorat Radio R.I. sekarang dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat; sedang RRI Studio Bandung merupakan sebuah Studio Regional Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Studio, yang mempunyai 3 buah bagian, yakni Bagian Siaran, Bagian Teknik dan Bagian Umum.
3. Personalia Pimpinan dari mana-kemana sedjak tahun 1945 hingga sekarang ialah:

- a. R.A. Darja RRI (1945 — 1947).
- b. Radersma ROIO (1948 — 1949).
- c. R Adang Kadarusman RRIS — RRI (1949 — 1950)
- d. R Socratno Wirjoatmodjo (1950 — 1953).
- e. R. Soeparto (Ket. Dewan Pimp) (1953 — 1954).
- f. Loctan Soetan Toenaro (1954 — 1960).
- g. 'Abd. Fattah Mardai (1960 — sekarang).

Kesimpulan dan harapan/saran.

1. RRI adalah termasuk djuga salah-satu projek Infrastruktur prasarana, jang dalam rangka Nation & Character building merupakan masalah pokok, hal mana telah dinjatakan dalam Amanat Politik PJM Presiden jang berdjudul „Berdikari”, bahwa projek Prasarana harus didahulukan dari projek² lainnja, demi berhasilnja segala rentjana pembangunan, chususnja pembangunan di Djawa Barat ini.
2. RRI jang dalam tugasnja tidak terhalang oleh djarak jang djauh, tidak terbatas oleh lautan dan tidak terhenti oleh hutan dan gunung, termasuk salah-satu alat revolusi jang sangat ampuh; demi suksesnja pembangunan Djawa Barat, dalam waktu jang pendek harus diperdjuangkan dengan gigih bertambahnja 1 — 2 Studio RRI didaerah ini selain jang telah ada. Sebagai urgensi pertama adalah kota Serang, kemudian kota Tasikmalaja.

Djika untuk Djawa Tengah telah ditambah Studio-baru disamping Jogjakarta, Surakarta dan Semarang, ja'ni Studio RRI Purwokerto, sedang di Djawa Timur ditambah dengan Studio RRI Malang, disamping Studio² Surabaya, Madiun, Djember dan Sumenep, maka tambahan Studio² di Djawa Barat dengan Serang pada tahun in djuga adalah urgen sekali untuk diperdjuangkan sehingga mendjadi kenyataan. Sebagai imbalan pemikiran, bisalah diperbandingkan dalam kema-djuan dan dalam pembangunannja disegala bidang, sebuah kota atau daerah jang *ada RRI-nja* dengan kota/daerah lain jang sepadan tetapi *tidak ada RRI-nja*.

3. Dengan djalan kerdja-sama antara Pemerintah Daerah, PN. Postel, Hubdam VI, PLN., RRI dan Instansi² lain jang dipandang perlu, akan dapat segera diudjudkan berdirinja Studio Radio di Serang, kemudian di Tasikmalaja. Sudah tentu dalam soal ini hubungan pribadi antara Bapa Gubernur/Kepala Daerah Djawa Barat dengan Bapa Menteri Penerangan pribadi (djuga dengan Kepala Direktorat Radio R.I. Sdr. Soekirman), akan lebih mempermudah pelaksanaan persoalan ini.

Kemajuan serta Perkembangan Perusahaan Bangunan Negara PN. Indah Karya

Pandangan Umum.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1961, maka bekas Perusahaan Belanda 'Naamloze Vennootschap' Ingenieurs Bureau Ingeneneren Vrijburg (I.B.I.V.) yang telah dikuasai Pemerintah sedjak tahun 1960 dan dinasionalisasikan tahun 1961 menjadi Perusahaan Bangunan Negara P.N. Indah Karya.

Oleh karena Perusahaan kami baru lahir dalam periode 'Investment' revolusi kita, maka sumbangan kami kepada revolusi dan negara kita belumlah sebanjak apa yang kami tji²ta²kan, akan tetapi kami rasa bahwa sumbangan² kami sudah dapat digolongkan kedalam sumbangan² besar.

Perkembangan kemajuan Perusahaan kami, walaupun masih muda serta mengalami halangan² yang sewadjarnja, menundjukkan hari depan yang baik.

- A. Sedjalan dengan nada periode investment, serta sesuai dengan bidang pekerdjaan kami jaitu pekerdjaan perentjanaan sadja, maka kami chususnja menjumbangkan tenaga dan fikiran kepada Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama jaitu dalam pengairan, pengendalian bandjir serta perkembangan daerah pengaliran sungai, pembangunan pelabuhan serta industri, perentjanaan kota dan bidang² arsitektur serta sipil tehnik lainnja.
- B. Adapun selama masa berdirinja Perusahaan hingga sekarang, pekerdjaan-pekerdjaan yang telah dan sedang kami kerdjakan di Djawa Barat chususnja ialah sebagai berikut, yang termasuk projek besar:
 - a. Projek serba guna sungai Tjimanuk.
 - b. Projek Djalan Raya Djakarta — Bogor — Tjiawi yang akan merupakan penerusan Djakarta By-pass.
 - c. Projek Pelabuhan Ratu yang akan merupakan sumbangan guna perkembangan keparawisatawan Nasional kita.

Selain itu masih ada projek² lainnja yang walaupun tidak sebesar yang kami sebutkan diatas tetap merupakan pekerdjaan-pekerdjaan yang penting.

Diantaranja ialah

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Complex Perbekalan | — Djakarta |
| 2. Kantor Sjahbandar | — Djakarta |
| 3. Guest House Medan | — Medan |
| 4. Garde Bataljon | — Djakarta |
| 5. Hanggar Priok | — Djakarta |
| 6. Steiger Pakan Baru | — Sumatera |
| 7. Laboratorium Masalah Air | — Bandung |

- | | |
|--|----------------|
| 8. Waduk Gondang | — Djawa Timur |
| 9. Gedung D.P.U.T. Djakarta | — Djakarta |
| 10. Mesdjid Istiqlal | — Djakarta |
| 11. Djembatan Musi | — Palembang |
| 12. Slipway M.T.B. — A.L.R.I. | — Djakarta |
| 13. Projek Rayon | — Dajeuh Kolot |
| 14. Projek Bandjarmasin | — Kalimantan |
| 15. Djalan Raya Lap. Terbang Tuban-Sanur | — Bali |
| 16. Lapangan ^a Terbang & Pelabuhan di Irian Barat | — Irian Barat |
| 17. Djalan Raya Lintas Sumatera | — Sumatera |
| 18. Djembatan sungai Kapuas | — Kalimantan |
| 19. B.K.T.N. | — Bandung |
| 20. Kompro Bandjir Djakarta Raya | — Djakarta |

Bidang pekerdjaan kami khususnja ialah *PERENTJANAAN*, sedangkan pekerdjaan pemborongan bukanlah termasuk bidang kami.

Melihat semangat revolusi kita serta rentjana Pemerintah, maka kami berharap mendapat kesempatan untuk turut membantu perentjanaan berbagai-bagai projek besar maupun ketjil dimasa depan, hal ini tidak sadja akan bermanfaat bagi kemadjuan serta kemakmuran rakjat kita seluruhnja tetapi akan djuga bermanfaat bagi kemadjuan serta perkembangan perusahaan kami hingga dapat mentjapai taraf internasional.

Perusahaan kami dipimpin oleh suatu team Direksi jang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur jang bertanggung djawab atas bidangnya masing². Para Direktur bertanggung djawab kepada Presiden Direktur jang sebaliknya bertanggung djawab kepada Menteri Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Didalam perusahaan kami terdapat bagian^a jang mengurus kelantjaran pekerdjaan kami, setiap bagian dikepalai oleh seorang kepala Bagian jang bertanggung djawab atas bagiannja masing².

Karyawan kami, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan telah bertambah dan menjadi lebih lengkap. Pada waktu ini djumlah karyawan P.N. Indah Karya mendekati angka 100 (seratus).

Dengan melihat setjara skilas kepada perkembangan dan kegiatan-kegiatan perusahaan kami, maka kami amat berbesar hati akan kemadjuan serta perkembangan jang lebih meluas dimasa depan.

Senada dengan gelora semangat Revolusioner kita, maka kami pertjaja bahwa kami sanggup menunaikan tugas kami dibidang kami setjara baik dan bertaraf internasional.

Balai Penelitian Keramik dari Tahun 1945 — 1965.

Pandangan Umum.

a. *Selama tahun 1945 — 1950.*

Ada dua Balai penelitian keramik;

1. di Bandung

2. di Pedalaman (Kebumen, kemudian pindah ke Jogjakarta).

ad. 1. di Bandung mulai dibangun kembali pada pertengahan tahun 1946, sebab pada tahun 1945, letak Balai ada di Front dan tempat Balai menjadi tempat pertahanan dan pertempuran, sehingga semua arsip Balai habis.

ad. 2. Di Pedalaman, dibentuk Balai Penelitian baru (di Kebumen), sambil memberikan penjuruhan² kepada beberapa perusahaan bata-genteng.

Tahun 1947: Serbuan tentara Belanda sampai di Gombong. Balai diungsikan ke Jogjakarta sambil mendirikan perusahaan pertjontohan aardewerk di Rewulu dan di Surjaden Jogjakarta. Memberikan penjuruhan kepada beberapa pabrik gelas di Kediri, Surakarta serta penjuruhan Keramik Putih di Sumatera Barat.

Tahun 1948: Setelah Jogjakarta diduduki oleh tentara Belanda, semua personil dikumpulkan, dibawa keluar kota dan dipersilahkan pulang kedaerahnya masing² sambil meneruskan perdjongan. Baru pada tahun 1949 mereka dapat dikumpulkan kembali, yaitu setelah penjerahan kedaulatan.

Tahun 1950: Kedua Balai digabungkan dan ditetapkan kedudukannya di Bandung.

b. *Selama tahun 1950 — 1955:*

1. Balai mendapat bantuan tenaga ahli dari luar Negeri, antara lain dari ICA, U.N. (Dr. Sutton dan Sdr. Draayer), demikian pula alat²-nja.

2. Mengenai perentjanaan, terbagi dalam 3 tingkatan:

Tingkat pertama: Menghidupkan kembali perusahaan² induk.

Tingkat kedua: Pembangunan perusahaan porselin, seperti alat makan & minum dan alat tehnik jang ketjil² jang dapat menguntungkan dan sebagai perusahaan pertjontohan.

Tingkat ketiga: Mekanisasi perusahaan² jang telah ada (mesin² jang didapat dari bantuan ICA, Colombo dan sebagainya).

c. *Selama tahun 1955 — 1959:*

1. Membuka kesempatan kepada kader² ahli untuk dikirimkan ke luar negeri (bantuan ICA, Colombo dsb).
2. Pelaksanaan projek² dari ketiga tingkatan tersebut diatas. Setelah kader² ahli yang dikirimkan pertama kalinya kembali ke Indonesia, atas bantuan Colombo kemudian dikirimkan lagi kader² ahli yang lain.
3. Rentjana untuk DEPERNAS (8 tahun) tahapan pertama jaitu:
 - (a). Pabrik bata-genteng Plered Purwakarta.
 - (b). Perusahaan Keramik porselin untuk alat makan & minum, dengan target 50 ton/sehari, sebanyak 8 buah, 2 perusahaan pembantu (1 perusahaan Tahan-api dan 1 perusahaan pemurnian kaolin) masing² dengan kapasitas 50 ton $\frac{1}{2}$ hari dan 100 ton/sehari.

Di Djawa Barat akan didirikan:

- (a). Sebuah pabrik bata-genteng Plered Purwakarta, dengan kapasitas 20.000 genteng $\frac{1}{2}$ hari.
- (b). Sebuah pabrik porselin di Tjirebon dengan kapasitas 3 ton/sehari.
- (c). Sebuah pabrik porselin di Djakarta dengan kapasitas 3 ton/sehari.

Bimbingan kepada perusahaan² dalam ketiga projek tersebut sudah mulai berdjalan.

d. *Dalam periode „Mahkota Revolusi”.*

1. Pembinaan industri² keramik (petjah-belah, bata-genteng dan kapur) di-daerah² seluruh Indonesia.
2. Intensifikasi penelitian dengan bahan kekajaan alam Indonesia, yang langsung dibutuhkan dalam pembangunan nasional (bata tahan api, isolator, katja djendela, alat² tehnik dll.). Mengusahakan kerdja-sama dengan badan² lain dalam bidang penelitian.

Kegiatan Balai.

A. Sedjak berdirinja Balai ini, ketjuali selama pendudukan Djepang, bertugas dalam bidang²:

1. Penelitian dan pengudjian.
2. Penjualan.
3. Pendidikan.

ad. 1. *Penelitian & Pengudjian:*

- a. Meneliti dan mengudji bahan² yang terdapat didalam negeri untuk mengetahui kwalitet dan kegunaannja.

- b. Pertjobaan pembuatan barang² keramik dari hasil² re-search jang telah ditjapai dengan baik untuk diprodusir setjara masal.
- c. Penelitian atas proses pembuatan untuk menjempurnakan tjara² produksi atau mentjari proses baru.
- d. Turut aktif dalam usaha pembinaan standard mutu bahan² keramik. Dalam hal ini Balai bekerdja sama dengan lain² instansi.

ad. 2. *Penjuluhan:*

- a. Memberikan penerangan dan pendjelasan tehnik kepada pengusaha² dan perseorangan jang berminat.
- b. Mengadakan survey bahan untuk mengetahui kemungkinan mengexploitir bahan tsb. dan penjelenggaraan pembinaan perusahaan.
- c. Membuat (atau permintaan) rentjana perusahaan dengan berbagai kapasitas, lengkap dengan alat²-nja, djumlah tenaga dan modal jang dibutuhkan.
- d. Mengirim petugas ahli ke-perusahaan² untuk mengadakan perbaikan atau membangun perusahaan baru.

ad. 3. *Pendidikan:*

Hingga sekarang, pendidikan jang diselenggarakan oleh Balai baru mentjapai tingkat kursus jang lamanja satu tahun. Diredjatkan untuk mendirikan sekolah keramik jang lamanja tiga tahun.

Tudjuan pendidikan:

- 1. Mendidik tenaga² untuk industri keramik berupa tenaga pandai keramik, pembantu pemimpin perusahaan dan pemimpin perusahaan.
- 2. Memberi kesempatan pada utusan² perusahaan/perorangan untuk mengikuti penjelidikan dalam bidang² tertentu.
- 3. Menjiapkan tenaga² tukang khusus, untuk memenuhi permintaan/kebutuhan tenaga untuk perusahaan² atau instansi² lain.
- 4. Membimbing para penggemar (amateur) keramik dalam memperoleh atau menambah pengetahuan teori atau praktek.

B. Hasil jang telah ditjapai dari masa ke masa:

a. *Selama periode fisik dari tahun 1945 — 1950:*

— di Jogjakarta:

- 1. Dari mengungsi dan membangun telah memperoleh

- pengalaman² dalam menentukan dan membangun unit perusahaan keramik putih dalam rangka pembangunan perusahaan kerajinan rakjat.
2. Menemukan bahan pelebur Lodojo, jang mana sangat penting guna pembuatan barang² porselin.
 3. Penggunaan gips Ponorogo utk pembuatan tjetakan keramik.
 4. Penggunaan pasir putih untuk bahan gelas.
 5. Timah gunung sawal untuk didjadikan „loodglit”, sebagai bahan glasur untuk aardewerk.
 6. Bahan „leemblasur” alam dari Wonosari untuk glasur barang „steengoed”.

— di Bandung:

1. Pembuatan aardewerk merah-Plered + 10% kapur dengan glasur TSG.
2. Pembuatan aardewerk putih dengan tanah Tjiawi, Bodjong, kapur dengan glasur TSG.
3. Pembuatan aardewerk kaolin Biliton, Kwarts Biliton, kapur dengan glasur spesial.

Selama tahun² „Survival” 1950 — 1955:

1. Pembangunan kembali Induk Perusahaan Keramik Plered Purwakarta, dengan kapasitas 0,5 ton masa sehari, 100 kg glasur dan tjetakan² gips menurut kebutuhan. Sebagai Induk Perusahaan, unit²-nja ialah perusahaan² kerajinan rakjat. Pembangunan berdasarkan organisasi produksi kooperasi.
2. Pembangunan pabrik keramik Majong Kudus, dengan kapasitas produksi 10 ton/sehari barang halus. Tugasnja adalah sebagai perusahaan induk. Organisasinja sama dengan organisasi perusahaan biasa, dimana buruhnja diambil dari lingkungan dekat.
3. Pembangunan pabrik porselin di Malang, dengan kapasitas 0,5 ton/sehari, berupa barang djadi porselin. Organisasi perusahaannja biasa, dimana unit² rakjatnja dapat ikut serta dalam produksi.
4. Pembangunan pabrik keramik Purwokerto, dengan kapasitas 1 ton barang djadi, berupa alat makan & minum.
5. Pembangunan pabrik keramik Tulungagung, dengan kapasitas masing² 2 ton/sehari berupa tegel² dan 1 ton/sehari berupa isolator². Dari kelima pabrik tsb. hanja pabrik di Tulungagung sadja jang belum berdjalan sepenuhnya.
6. Pembangunan pabrik penggilingan bahan Lodojo di Tulungagung, dengan kapasitas 10 ton/sehari.

7. Penemuan Trenggalek 90% dan 10% kapur, untuk aardewerk keras.
8. Pembuatan porselin dengan bahan L.B.K. (masa jang terdiri dari tanah Lodojo, kaolin Biliton dan kwarsa).
9. Penelitian kembali pembuatan gelas, alat makan & minum dengan menggunakan pasir.
10. Pembangunan Seksi Keramik Putih, Seksi Bata tahan api dan Seksi Gelas di Balai, dimana alat²-nja diperlengkapi untuk maksud produksi. Seksi jang menghasilkan, dibutuhkan guna memperoleh pengalaman² dalam pendidikan kader² dan guna keperluan demonstrasi.

Adapun mengenai Seksi Bahan Bangunan dan Seksi pantji (email), masih tetap rentjana, dimana djika keadaan sudah mengidjinkan akan djuga dibentuk.

Balai harus dapat membangun dan memberikan bantuan keluar dalam membina perusahaan-perusahaan, sehingga „leading-position” dalam masjarakat dapat dipertahankan oleh perusahaan Negara (penelitian dalam pembinaan produksi).

Periode „Investment” tahun 1955 — 1959:

1. Bimbingan kepada perusahaan² jang telah dibangun (test running).
2. Perentjanaan perkembangan industri tahapan pertama untuk DE-PERNAS.
3. Penjualan dalam seksi-seksi produksi.

Kesimpulan dan harapan:

Industri keramik di Indonesia pada dewasa ini masih djauh dalam mentjukupi kebutuhan. Rentjana pembangunan pabrik² keramik oleh Pemerintah (rentjana pembangunan semesta menurut M.P.R.S.), belum dapat terlaksana seluruhnja. Setiap tahun kita masih meng-import barang² keramik, jang djumlahnja tidak sedikit, misalnja piring ± 7 djuta, tjangkir ± 3 djuta demikian pula misalnja barang gelas, bata tahan api dan sebagainya.

Tetapi djika kita benar² akan memenuhi prinsip „berdiri diatas kaki sendiri”, sebagian besar dari barang² tersebut dapat kita buat dengan bahan² jang terdapat dibumi kita sendiri, jang walaupun mungkin mutunja masih kurang, tapak demi setapak kita akan madju kearah itu.

Guna maksud tersebut, pada dewasa ini Balai Penelitian Keramik sedang berusaha sekuat-kuatnja mengintensipkan penelitian².

PERKEMBANGAN PERSUTERAAN DI DJAWA BARAT oleh: Drs. UNUS SURIAWIRIA

Pendahuluan.

Kegiatan dan pertjobaan² usaha memelihara ulat sutera, atau singkatnja „usaha persuteraan” dinegara kita, telah dimulai sedjak abad ke-18, dalam bentuk sederhana dan tjoba² (3, 13, 14, 15, 17, 18, 24). Di-tahun² berikuntnja tertjatat pula adanja beberapa keaktifan dan usaha untuk pemeliharaan ulat sutera ini, misalnja sekitar tahun 1927 didaerah Garut (Djawa Barat) dan tahun 1932 didaerah Sala (Djawa Tengah), kedua-duanja oleh seorang Djepang (3, 14, 15). Tetapi jang paling terkenal aktif dan luas penjabarannya sebelum Indonesia Merdeka, ialah didjaman pendjadjahan Djepang antara tahun³ 1942 — 1945. Diberbagai daerah diseluruh Indonesia, terutama dipulau Djawa, mulai diaktifkan dan dikembangkan usaha persuteraan ini oleh Djepang. Bahkan dibeberapa tempat pendidikan kemiliteran atau vak-vak khusus jang diberikan Djepang kepada pemuda-pemudi kita, persuteraan merupakan djuga salah-satu peladjaran (3, 14, 15), misalnja di Garut, Sala, dsb. Dan para pemuda jang pada saat itu dapat didikan dan peladjaran dasar persuteraan itulah, jang kemudian mendjadi kader untuk kemadjuan dan penjabaran usaha persuteraan dewasa ini, setjara langsung ataupun tidak langsung. Tahun² diantara 1957 sampai dengan 1963, merupakan puntjak keaktifan usaha persuteraan dinegara kita (3, 5, 13, 14, 15, 17). Hal ini terbukti dari tjatatan sbb.:

1957. Seorang bekas tentara Djepang bernama *Naito* jang berganti nama djadi Mohamad Kurdi dan masuk warganegara Indonesia, menetap pula di Wanaradja, Garut, setelah Djepang kalah, melihat alam dan kemungkinan² baik dinegara kita untuk usaha persuteraan, maka dimulailah pertjobaan-pertjobaan pemeliharaan ulat sutera jang bibitnja didatangkan dari Djepang melalui amplop surat (19). Dan saat inilah sebenarnja jang mendjadi titik tolak dan dasar penjabaran setjara luas usaha persuteraan dinegara kita sampai dengan sekarang ini. Karena walaupun sebelumnya dibeberapa tempat atau daerah telah ada usaha² pemeliharaan, maka sifatnja adalah sederhana sekali, atau adakalanja setjara tersembunji dan tertutup bagi umum (14, 19). Namun atas usaha Mohamad Kurdi alias Naito, tjara lama memelihara ulat sutera dirombak dan disebar-kenalkan kepada masyarakat. Penjabaran serta pengenalan setjara umum dan terbuka mendapat bantuan sepenuhnya dari S.M. Kosasih dan H. Machdar (14). Ditahun 1960 selain S.M. Kosasih dan H. Machdar djuga Ackub Wangsadimiarta ikut aktif dan ikut menjabarkan (14, 19).

1961. Atas usaha dan sponsor anggota² veteran jang tergabung dalam Industri Sutera-alam Rakjat Indonesia (ISRI), di Bandung diadakan Seminar

Persuteraan jang ke 1. Seminar ini lebih tepat kalau disebut pertemuan, karena sifatnja hanya pembitjaraan mungkin tidaknja usaha persuteraan disebar-luaskan dinegara Indonesia, setelah ada beberapa orang jang menjtjoba dan mengusahakan setjara sederhana disamping datangnja penindjau-penindjau jang sengadja dikirimkan ke Djepang untuk maksud usaha persuteraan. Kelanjutan dengan adanja seminar ini, maka seperti „tjendawan dimusim hudjan”-lah timbulnja pemelihara² baru dibidang usaha persuteraan (19).

Ditahun 1961 tersebut usaha² persuteraan kebanyakan dalam bidang pemeliharaan sadja, ketjual oleh S.M. Kosasih dan Ackub Wangsadimiarta dalam bidang pembibitan (14, 19).

1962. Seminar Persuteraan jang ke-2 diadakan di Makasar, jang bentuk dan sifatnja sama seperti pada seminar ke-1. Tetapi pada tahun tersebut terbitlah buku & penuntun pemeliharaan ulat sutera pertama dinegara kita, jang disusun oleh Ackub Wangsadimiarta dan Wibowo, disamping diktat/publikasi² lain dibidang usaha persuteraan dalam madjalah atau surat kabar (3, 15).

1963. Sebagai puntjak kreasi dan keaktipan Ackub Wangsadimiarta dari Sukabumi jang dibantu-penuh oleh tenaga achli/sardjana dari berbagai perguruan tinggi, maka dapatlah benang & ulat sutera Indonesia dijadikan bahan untuk keperluan kedokteran, antara lain benang bedah (14, 15, 19). Tetapi achir tahun 1963, maka usaha dan keaktipan dibidang persuteraan di negara kita mulai menurun bahkan djumlahnja makin sedikit (22, 9). Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnja faktor didikan dasar dibidang persuteraan, bibit jang tidak memenuhi sjarat untuk tetap dipelihara dan dikembangkan, dan sambutan/usaha penampungan, ataupun bantuan dari fihak pemerintah ataupun penampung djalannja seret (9, 22), disamping adanja hama dan penjakit ulat jang sukar dan tidak bisa diatasi oleh para pemelihara (22, 23, 24).

Pada tahun 1964 seminar Persuteraan ISRI ke-3 diadakan di Tjibogo-Bogor, jang thema dan isinja sudah mentjerminkan kegiatan, pengalaman dan keaktipan² lainnja dibidang usaha persuteraan dinegara kita (3, 6, 14, 15, 17). Disamping itu djuga tahun 1964 ini merupakan tahun dimana keaktipan penelitian dasar persuteraan dimulai dan diaktipkan dibeberapa fakultas atau lembaga.

Indonesia bukanlah negara baru jang aktif dibidang usaha persuteraan kalau mengingat bukti² (3, 14, 15), misalnja:

Dimusium Nasional Sutera Tokyo, telah disimpan kain tenun sutera asli Indonesia jang bukan sadja usianja telah 200 tahun lebih, tetapi djuga nilai seni tenun suteranja sudah tinggi sekali (3). Hal ini djuga karena benang suteranja jang dibuat tenunan tersebut adalah benang asli Indonesia. Sutera bagi rakjat dan negara Indonesia bukan barang baru atau

atau barang asing (14), tetapi sudah merupakan barang jang umum. Terbukti dari tjerita atau buku² kuna, sutera selalu disebut-sebut sebagai bahan pakaian dan bukannya satyn, poplin, organsa, dsb. Disamping itu djuga dibeberapa tempat dinegara kita sampai dengan sekarang ini, terkenal karena keradjinan dan seni-tenunan suteranja, seperti Atjeh, Silungkang, Palembang, Sambas, Samarinda, Bali, Makasar, Mandar, Bugis, dsb. (3, 14, 19). Atau ada beberapa nama tempat/kota jang memakai-mengambil nama sutera, seperti *Panjutran* jang perkataannja berasal dari *pa* dan *suteraan* atau tempat penghasil sutera, adalah nama tempat terkenal di Tjiamis, Djawa Barat jang sedjak dulu terkenal karena swa-sembeda dan berdikari dalam bidang sandang sampai sekarang ini (15, 22). Kota Madjalengka (Djawa Barat) dinamakan djuga Kota Sutera, karena mempunyai sedjarah persuteraan didjaman dulu jang dipatahkan/dimusnahkan kemudian oleh pemerintah djadjahan Belanda. Karena itu tidaklah heran kalau pada djaman pendjadjahan Belanda, jang menjtoba aktif dalam usaha memelihara sutera selalu sembuni² atau tidak diumumkan kepada masjarakat, sampai djaman pendjadjahan Djepang. Djaman pendjadjahan Djepang usaha persuteraan mulai diaktifkan dan dikembangkan setjara luas dan teratur. Dibeberapa tempat seperti Tjimalaka, (Bandung, Wanaradja (Garut) dsb. pemerintah djadjahan Djepang bermaksud untuk mendirikan pabrik sutera setjara besar²-an (3, 14), jang bukti²-nja sampai sekarang masih ada dikedua tempat tersebut. Disamping itu djuga pada beberapa tempat pendidikan pemuda-pemudi kita, peladjaran mengenai usaha persuteraan diberikan, sehingga mereka inilah jang mendjadi kader dan pahlawan persuteraan kemudian dinegara kita ini. Didjaman pendjadjahan Djepang ini, ada dua matjam ulat sutera jang dipelihara, jang tergantung kepada djenis ulatnja (19), jaitu:

Samia (Attacus) ricinus, ulat sutera eri (eri silk) jang makanan pokoknja daun keliki (*Ricinus communis*). Bentuk dan warna ulatnja lebih besar, berwarna biru muda kehidjau-hidjauan, tubuhnja diliputi sematjam tepung, kupu²-nja bersajap kuning hidjau dengan gambar setengah bulan. Hasil suteranja tidak bisa dipintal terus karena putus². Ulat sematjam ini sampai sekarang banjak dipelihara di Assam (India) dan Tiongkok.

Bomby mori, ulat sutera jang umum sekali dikenal sekarang, jang makanan pokoknja daun murbei (*Morus spp.*). Kelebihan dari sutera eri karena kokon ulat ini dapat dipintal dengan tidak putus² sampai sepanjang antara 1000 — 1500 meter.

Maka berdasarkan kegiatan, penjebaran dan sambutan masjarakat, usaha persuteraan dinegara kita dapat dibagi mendjadi 3 periode:

Periode Pertama; sebelum pendjadjahan Djepang, dimana usaha² persuteraan jang sifatnja tidak dipopulerkan, tidak dise-

barkan dan sedikit banjak selalu sembunji², sehingga bagi masyarakat merupakan usaha yang asing dan tidak/djarang dikenal. Pada Periode ini diberbagai daerah sedjak At'eh s/d Sulsera, sudah tertjatat adanya usaha dan keaktifan kearah memperkembangkan dan menjabarkan usaha persuteraan, walaupun hasilnya selalu gagal akibat tekanan pemerintah djadjahan Belanda (3, 13, 14, 15, 17, 19).

Periode Kedua;

diantara Maret 1942 s/d 1957, dimana usaha² persuteraan yang sebelumnya tidak dipopulerkan, tidak disebarkan dan selalu sembunji², maka atas perintah Djepang diaktifkan dan disebarkan. Bahkan setjara khusus pula Djepang memberikan pelajaran dasar tentang usaha persuteraan, dan setjara mendalam pula dikandung maksud oleh Djepang untuk mendirikan pabrik sutera alam besar di Tjimalaka (Sumedang) dan Wanaradja (Garut) keduanya di Djawa Barat (3, 14, 15). Pada periode ini pulalah terdapatnya kader² didikan Djepang yang sekarang atau selandjutnya menjadi pelopor usaha persuteraan dinegara kita, seperti Ibu Wiwi, Moh. Topah dlsb. Djuga pada periode ini pula dinegara kita dikenal 2 matjam/djenis ulat sutera yang makanan pokoknya berbeda (19).

Periode Ketiga;

diantara tahun 1957 sampai dengan sekarang ini. Persuteraan dinegara kita sekarang bentuk dan sifatnya sangat berbeda dengan periode² yang terdahulu. Disamping itu djuga usaha persuteraan bukan lagi merupakan usaha seseorang usaha sembunji², tetapi usaha bersama yang mendapatkan bantuan dan perhatian Pemerintah beserta aparatur²-nya. Kursus/didikan dasar diadakan dimana-mana, dipelopori oleh usaha dan atas nama Veteran atau usaha dan atas nama badan/lembaga lain, tertjatat seperti Kooperasi Industri Textil Indonesia (Koptexi) antaranja. Kader² dididik setjara khusus di Djepang, negara yang paling maju dalam usaha persuteraan didunia dewasa ini. Disamping itu djuga beberapa lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, mulai aktif dan mengarahkan perhatiannya dibidang penelitian dasar dan landjutan dalam bidang persuteraan. Laboratoria Serikultur (yang khusus dalam bidang persuteraan) walau dalam

bentuk jang sederhana, didirikan diberbagai Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi, untuk setjara langsung dan tidak langsung membantu usaha² menaikkan kualitas serta kuantitas hasil sutera dinegara kita.

Maka, berbitjara mengenai „*Dua puluh tahun persuteraan di Djawa Barat*” pemitjaraan bertitik tolak dari periode kedua sampai dengan sekarang ini.

Usaha dan Kegiatan Masyarakat.

Tahun keramat 1945, adalah tahun kelandjutan usaha persuteraan dinegara kita, jang sebelumnya sudah aktif dimulai. Pada tahun ini tertjatat diberberapa daerah/tempat usaha persuteraan jang umumnja merupakan usaha perseorangan, di Atjeh di Karawang, di Garut, di Tasikmalaja, di Sala, dsb. (13, 14, 18, 19). Tidak menjebar luas dan tidak tjepat dikenalnja oleh masyarakat, karena saat itu semua fikiran, tenaga dan perhatian ditudjukan khusus kepada Revolusi fisik (22).

Ditindjau dari berbagai alasan, Indonesia merupakan negara jang pada tempatnja atau ideal untuk suatu usaha seperti usaha persuteraan (2, 3, 6, 13, 14, 15 18, 19, 22). Kalau di Djepang banjknja pemeliharaan tiap tahun paling banjak antara 4 — 6 kali sadja, maka sebaliknya dinegara kita bisa sampai 8 — 10 kali. Hal ini mengingat keadaan iklim, keadaan tjuatja, keadaan alam serta murbei sebagai makanan pokok *Bomby mori* (22), sangat baik dan tepat sekali.

Disamping itu djuga berdasarkan djiwa bangsa Indonesia jang radjin dan gotong-rojong, maka usaha persuteraan itu tepat sekali untuk Indonesia (14).

Antara tahun 1957 — 1963, merupakan masa pertumbuhan jang subur sekali untuk usaha² persuteraan dinegara Indonesia, terbukti dengan timbulnja usahawan² baru dibidang persuteraan dari Sabang sampai Merauke (3, 6, 13, 14, 15, 19). Usaha² persuteraan ini ada jang merupakan hobby, merupakan usaha ketjil²-an, usaha gotong-rojong, usaha besar, tetapi djuga banjak jang berupa usaha „ikut²-an” karena tertarik akan keuntungannja sadja. Dan jang terachir inilah jang kemudian berdjatuhan atau tidak berusia lama (3, 9, 14). Didaerah sekitar Djawa Barat, sekitar tahun 1963 tertjatat ada kira² 500 buah pengusaha rakjat jang bersifat ketjil, hobby, sekira 50 buah pengusaha rakjat jang mempunyai kebun murbei antara 1 — 10 Ha dan tempat pemeliharaan ulat jang khusus, 4 — 5 pengusaha besar jang lengkap dengan ruang pembibitan, pemeliharaan, pengolahan dan alat perlengkapan jang lengkap (9). Belum terhitung pengusaha² lain jang setjara ketjil-ketjilan sembungji² dan pengusaha lain diluar Djawa Barat, terutama Sulsera, Atjeh, Djawa Tengah, dsb.

Tetapi diachir tahun 1963 terutama diawal tahun 1964, maka djumlah jang banjak dan besar dari para pengusaha persuteraan mulai tampak

menurun dan berkurang (9). Ternyata sekali bahwa berkurang dan menurunnya ini, antara lain dikarenakan:

a. Gulung tikar atau patahnya semangat untuk tetap berusaha atau memulai lagi berusaha, jang disebabkan karena:

- dasar pengetahuan mengenai pemeliharaan ulat sutera para usahawan tidak tjukup atau tidak dipunyai sama sekali, bahkan ada/banjak jang ikut aktif memeliharanya itu karena tertarik oleh keuntungan jang akan didapatkan kelak, atau maksud² lainnja lagi,
- para usahawan dalam tjara memeliharanya itu tidak mampu/tidak tahu bagaimana mengetahui hama-penjakit ulat, disamping tidak adanya bantuan jang berwadajib (Djawatan² jang bersangkutan) terhadap soal² tersebut, sehingga ulat² jang mereka pelihara musnah atau hantjur sama sekali,
- tidak adanya hubungan/ikatan antar pemelihara dengan pemelihara lain jang sewaktu-waktu dapat mengadakan musjawarah untuk memperbintjangkan segala sesuatu jang berkenaan dengan usaha persuteraan. Tidak djarang pula pengusaha/pemelihara jang maunya berdiri-sendiri (menutup diri) dan tidak mau mengadakan hubungan dengan pemelihara lain, atau memberikan pengalaman²-nja untuk orang lain atau untuk kemadjuan usaha persuteraan,
- persoalan bibit, dimana bibit² jang umum dipelihara adalah bibit jang tidak baik nilainya atau tidak memenuhi sama sekali sjarat²-nja untuk dipelihara atau dikembangkan, sehingga djangankan dapat menaikkan atau meningkatkan kualitas dan kwantitas hasil suteranya, bahkan mematahkan semangat untuk tetap atau memulai memelihara.

b. Tidak adanya perhatian/bantuan dari jang berwadajib, terutama dalam persoalan²:

- bibit,
- penjakit,
- penerangan-bimbingan,
- penampungan hasil jang tetap-teratur dan lantjar,
- keseragaman/ketetapan nilai kokon, benang sutera, untuk tiap² pengusaha,
- keseragaman/ketetapan harga kokon, benang sutera untuk tiap² jang dihasilkan,

sehingga langsung atau tidak langsung dengan adanya hal² tersebut diatas menghambat, mengurangi dan mempersedikit djumlah pemeliharaan ulat sutera, terutama bibit (telur) ulat sutera, maka banjak dian-

tara pemelihara jang membuatnja sendiri² tidak memakai tjara/prosedur jang benar. Misalnja ada/banjak pemelihara jang membuat bibit dari kokon jang djustru kalau kokon tersebut dijual tidak laku atau dibuat benang tidak dapat karena nilainja sangat rendah atau buruk sekali (9, 22). Maka bagaimana nilai ulat dan hasil suteranja kelak, kalau djustru bibitnjapun sudah rendah/sangat rendah sekali nilainja.

Tjara dan ruang pemeliharaan, dibeberapa daerah/tempat djuga tidak memenuhi sjarat, terutama sekali dalam kebersihannja (9, 22), sehingga hasil² jang didapat dibawah nilai-terketijl. Karena, memelihara ulat sutera memerlukan sjarat²: kebersihan ruangan-pemelihara-alat², ketekunan dan keradjinan pemelihara, keserasian suhu-kelembaban, tidak adanja pengaruh² lingkungan jang mungkin mengganggu/menghambat pertumbuhan dan kehidupan ulat jang dipelihara, dsb. Hal ini mengingat ulat sutera termasuk chewan jang poikilothermis atau chewan berdarah dingin jang peka terhadap pengaruh² tsb. (16). Disamping itu djuga faktor makanan sangat mempengaruhi pula (7, 12). Dinegara Djepang jang selama 50 — 70 tahun achir² ini meradjai persuteraan dunia, maka faktor² pemeliharaan tsb. diatas sungguh² ditaati dan diperhatikan dengan seksama sekali (9, 16, 22).

Pengetahuan dasar tentang pemeliharaan, pembibitan, pengolahan dan pengaruh² lain dibeberapa atau dibanjak pemelihara sangat rendah atau tidak dipunyai sama sekali (9, 22), sehingga kerugian dan kegagalan jang diderita atau dialami. Disamping itu djuga banjak para pemelihara jang ikut aktifnja memelihara karena ikut²-an, karena tertarik oleh keuntungannya jang bakal didapat, tanpa mementingkan pengetahuan dasar memelihara. Bahkan ada djuga gejala² serakah, jaitu seseorang pemelihara jang karena berhasil pada pemeliharaan pertama sebanyak 1 — 2 ribu ekor ulat, lalu menaikkan 5 — 5 kali atau lebih djumlah ulat pada pemeliharaan kedua, tanpa memperhitungkan kemampuan, makanan, sjarat² pemeliharaan, dsb. Akibatnja pemelihara kedua ini bukan untung atau berhasil, tetapi malah sebaliknya (9, 22).

Penampungan hasil perlu mendapat perhatian jang berwadjib sebaik-baiknja dan selantjar-lantjarnja. Karena dibeberapa tempat/daerah pemeliharaan banjak hasil² pemeliharaan jang sungguh² diharapkan akan menghasilkan uang, tetapi ternjata tidak mendapatkan penampungan/hasil jang lajak (9, 22), sehingga berakibat putus asa untuk memelihara selanjutnja.

Bantuan dan penerangan/bimbingan baik setjara langsung berupa bantuan² alat² dan perlengkapan, ataupun setjara tidak langsung berupa pemberian kursus² pendidikan singkat dan penerangan/publikasi/batjaan, untuk daerah/tempat pemeliharaan ulat sutera sangat diperlukan sekali (9, 22, 24). Karena tanpa adanja bantuan tersebut ada/banjak diantara pe-

melihara jang berkeluh kesah kalau mendapat kesukaran terutama dalam hal hama-penjakit, kemana mereka harus memintakan pertolongan atau bantuan.

Pendidikan dasar jang singkat dalam bidang persuteraan telah diadakan dibeberapa tempat, terutama sekali atas sponsor/inisiatif Veteran (9, 14) dan oleh fihak lain, Kooperasi Industri Textil Indonesia (Koptexi) di Bandung pada achir tahun 1964 dengan bantuan Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran dan Djawatan² lain serta lembaga²-nja (22). Oleh Koptexi telah dididik sebanjak 82 peserta jang terdiri dari wakil² tiap kabupaten di Djawa Barat dan wakil² lain dari Sumatera Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Sulawesi Selatan Tenggara, Kalimantan Barat dsb. Berbeda dengan kursus² jang diberikan terdahulu, maka kursus singkat ini disamping memberikan mata² peladjaran khusus persuteraan djuga mata peladjaran dasar lain terutama bidang² ilmu hajat, pertanian, kedokteran jang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan usaha persuteraan (22).

Usaha² lain jang tudjuannja menaikkan kwalitas dan kwantitas persuteraan dinegara kita, ialah dengan diberikannja/diadakannja suatu badan jang permanen di Djawa Barat oleh Pemerintah Daerahnja, jaitu pembentukan Badan Pembina Persuteraan Djawa Barat, dimana duduk seorang/wakil dari berbagai djawatan, lembaga, perguruan-tinggi dan pengusaha di Djawa Barat jang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan usaha persuteraan (22). Djuga oleh Koptexi diberikan/disediakan dana² dan bantuan penelitian jang tudjuannja untuk meninggikan kwalitas dan kwantitas hasil sutera.

Disamping itu djuga sebagai alat penerangan, pengenalan setjara umum, dibeberapa daerah/tempat telah diadakan pameran² khusus persuteraan jang mengemukakan tjara² pemeliharaan murbei/ulat sutera dan pengolahan² hasilnja, misalnja di Atjeh, Medan, Djakarta, Sukabumi, Bandung, Semarang, Jogja, Sragen, Ampenan, Makasar dsb. diantara tahun² 1962 — 1964 (9, 14, 15).

Kalau mula² hanja Departemen Urusan Veteran & Demobilisan jang mempelopori serta mengaktifkan anggota²-nja dibidang usaha persuteraan, maka sekarang usaha tsb. telah meluas ke Departemen² lainnja, antaranja Departemen Perindustrian Rakjat, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian (9, 14, 22).

Tetapi selama sistim usaha persuteraan masih tetap dan umum seperti sekarang ini berlaku, jaitu dimana seorang pemelihara atau pengusaha; membuat bibit/membibitkan sendiri, memelihara ulat sendiri, mengolah hasilnja sendiri, maka usaha persuteraan dinegara kita tidak akan madju atau berkembang luas apalagi menguntungkan (9, 22). Karena dengan sistem tersebut perhatian pengusaha/pemelihara terlalu banjak diarahkan

keberbagai soal dan tidak dichususkan. Akibatnja maka semua kerdja setengah² atau tidak mentjapai hasil jang diharapkan.

Karena itu disarankan oleh Koptexi dan Badan Pembina Persuteraan Djawa Barat untuk membagi-bagi tugas pekerdjaan. Jaitu bahwa didalam keaktifan usaha persuteraan ini ada:

- a. Balai pembibitan jang tugasnja hanja membuat/menjadiakan bibit² ulat dan murbei bagi para pemelihara, jang nilainja dapat dipertanggung-djawabkan,
- b. Balai penelitian & penyakit, jang tugasnja mengadakan penelitian² untuk meningkatkan nilai dan djumlah keaktifan persuteraan, bertugas untuk mengadakan usaha pentjegahan-pembasmian penjakit/hama ulat sutera atau murbei,
- c. Badan/Kooperasi penampung hasil, jang tugasnja menerima, menampung semua hasil persuteraan tanpa merugikan pemelihara,
- d. Pemelihara, jang tugasnja hanja memelihara ulat sutera sedjak menetas dari telur hingga mengokon,
- e. pelindung/pengawas, jang tugasnja melindungi dan mengawasi segala keaktifan semua tsb. diatas, agar satu diantara semua atau antara satu dengan lainnja tetap ada kerdja-sama tanggung-djawab.

Dengan pembagian tugas pekerdjaan ini maka *tugas pemelihara* jaitu masjarakat, hanja memelihara ulat mulai menetas hingga mendjadi kokon. Tugas² lainnja diserahkan kepada balai/badan/lembaga jang lebih tepat atau kompeten (9, 22, 24). Maka gagasan atau tjita² meng- „HOME INDUSTRY“-kan usaha persuteraan dinegara kita, dengan tjara kerdja tsb. diatas dapat terlaksana dengan sukses dan gemilang (9).

Dinegara kita sampai sekarang tertjatat banjak sekali Lembaga/Perguruan tinggi jang mengadakan/ikut aktif dalam bidang persuteraan (3, 9, 14, 15, 22, 24), misalnja: Fakultas Pertanian Bogor, Bagian Biologi/Kimia ITB, Pakultas Pertanian/Fakultas Ilmu Pasti & Pengetahuan Alam Unpad, Fakultas Biologi Unas, Universitas Gadjah-Mada, Akademi Pembangunan Nasional Djogja, Balai Penelitian & Pembibitan Sutera Alam ISRI Bandung, Balai Penelitian Textil Bandung, Lembaga Hama & Penyakit Tumbuhan Bogor, Fakultas Pertanian Pajakumbuh, dlsb. Sedangkan orang/orang² jang setjara perseorangan atau golongan djuga aktif dibidang usaha persuteraan, tertjatat antara lain: S.M. Kosasih (Bandung) untuk membuat mesin² reeling-rereeling kokon mendjadi benang mentah sutera, Adang Adiwikarta (Garut) untuk membuat mesin² pengolahan dari benang mentah mendjadi benang jang siap untuk ditenun, Ackub Wangsadimiarta (Sukabumi) untuk mentjari tjara² pemeliharaan, pembibitan ulat sutera jang baik, disamping menemukan tjara² untuk membuat benang bedah dari benang sutera dan kelendjar sutera seperti jang

sudah umum dikerdjakan di Spanjol, Djerman, Djepang, RRT dan Rusia, Ibu Wiwi (Bandung) untuk pemeliharaan, Wibowo (Bandung) untuk pentjelupan dan penenunan benang² sutera mentah dan sisa (afval), Ummi Salamah (Banda Atjeh) untuk pemeliharaan dan penjuluan peraktis, D.A. Tisna Amidjaja (Bandung) untuk penugasan setjara khusus dalam bidang penelitian biologi di ITB jang ada hubungannja dengan usaha persuteraan, Sumartono (Bogor) untuk penelitian jang ada hubungannja dengan bidang² ilmu serangga (entomologi), Unus Suriawiria (Bandung) untuk penelitian dibidang penjakit dan pembibitan di ITB, dan beberapa nama lainnja lagi (3, 9, 14, 22).

Hasil dan beberapa usaha dibidang penelitian.

Berdasarkan kemampuan tiap pemelihara kepada luas/banjaknja tanaman murbei sebagai bahan makanan pokok ulat sutera dan djumlah ulat jang dapat dipelihara, maka rata² hanja dapat memelihara dalam djumlah 5000 — 10.000 ekor ulat setiap musim pemeliharaan. Kalau dihitung djumlah rata² kematian 50% dan tiap kokon menghasilkan 0,1 gram, maka hasil jang akan didapat antara 250 — 500 gram. (3, 5, 6, 9, 14, 15, 22). Tetapi ada dan banjak djuga pemelihara jang mampu memelihara antara 100.000 — 500.000 ekor setiap musimnja sehingga dengan perhitungan ini maka dapat dibayangkan betapa hasil benang sutera setiap musim akan didapat.

Disamping itu djuga hasil lain akan didapat kalau usaha persuteraan dijalankan setjara „usaha sambilan” atau „usaha antar-rumah”, dimana gagasannja sbb. (2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22): Kalau seandainja semua pagar rumah jang biasanja ditanami pohon bambu pring-gandani, beluntas, bunga sepatu, dsb. diganti dengan pohon murbei, maka setiap rumah rata² dapat menanam antara 100 — 400 pohon, rata² 200 pohon. Setelah mentjapai usia 9 — 12 bulan, maka pohon murbei siap untuk diambil daunnja untuk dijadikan makanan ulat sutera. Setiap pohon mampu memberikan makan kepada 20 ekor ulat rata². Maka dapat dibayangkan bahwa tiap rumah dapat memelihara sedikitnja 200×20 ekor = 4000 ekor setiap musim. Hitunglah diakhir pemeliharaan mati 50%, maka sisanja jang mengokok ada 2000 ekor, atau menghasilkan benang mentah $2000 \times 0,1$ gram = 200 gram.

Ditiat Rukun Tetangga (RT) ada berapa rumah, maka dapat dibayangkan berapa djumlah rumah jang pekarangannja dapat ditanami murbei di Indonesia ini. Dan dapat pula dihitung berapa banjak benang jang bisa dihasilkan.

Untuk membuat 1 Kg benang sutera mentah mengingat nilai dan berat tiap kokon, diperlukan antara 3000 — 12000 buah. Kapasitas hasil setiap pemelihara pada dewasa ini antara 1000 — 10000 buah kokon setiap

Kekuatan dan pandjang benang sutera Indonesia tidak kalah oleh benang³ hasil luar negeri, walaupun oleh Djepang jang sudah 50 tahun lebih aktif dan meradjai sutera alam didunia (2, 3, 9, 14, 15, 22). Misalnja suatu penelitian jang telah dilakukan di Balai Penelitian Sutera Negara, HINO, Djepang ditahun 1961 memberikan hasil sbb.:

Afganistan, Siria, Libanon pandjang 800 — 1000 meter.

— benang sutera antara Rp. 20.000,— — Rp. 45.000,—, setiap kg,
— kokon antara Rp. 150,— — Rp. 300,— setiap liter.

- kebersihannya,
- tebalnja,
- kesehatannya,
- kekuatannya,
- rata² tebal dan pandjanganja,

Pada masa ini dibeberapa pemelihara sekitar Garut, Bandung, Tjandjur, Sukabumi, Bogor, dsb. menghasilkan kokon/benang jang lebih baik dan lebih tinggi nilainya kalau dibandingkan dengan tahun² 1957 — 1963 (9). Hal ini karena selain usaha mereka sangat tekun, tidak mengenal lelah, banjak mengorbankan waktu, kekajaan, keluarga dan kepentingan pribadinja seperti Ackub Wangsadimiarta (Sukabumi), S.M. Kosasih (Bandung), Adang Adiwikarta (Garut) dsb., djuga sebagai hasil penelitian diberbagai Lembaga/Perguruan tinggi dan hasil kerdjasama-hubungan-penindjauan keberbagai negara penghasil sutera terutama Djepang (9, 22, 24, 25).

340

a. *Usaba penelitian praktis jang bersifat pengamatan/pengalaman.*

Di Indonesia banjak pemelihara jang disamping memelihara djuga setjara sukarla bertindak sebagai pengamat/peneliti praktis, sehingga hasilnja berguna untuk pemelihara lain atau untuk bahan penelitian lebih landjut setjara mendalam di Lembaga/Perguruan-tinggi (3, 6, 9, 14, 24). Tertjatat misalnja:

- S.M. Kosasih (Bandung) dalam bidang mesin² reeling dan rereeling untuk mengambil benang dari kokon, sehingga dasar²/pengalaman dan penelitian praktisnja mendjadi dasar untuk mesin² reeling dan rereeling lain jang sekarang banjak digunakan.
- Ackub Wangsadiarta (Sukabumi) dalam bidang dasar pemeliharaan, pembibitan dan pentjarian tjara² pembuatan benang bedah dari sutera alam (silk braided) dan benang bedah saluran sutera (silk gland). Penemuan dan pengalamannja, membawa perubahan, perbaikan dan dasar² usaha² persuteraan dinegara kita dewasa ini.
- Adang Adiwikarta (Garut) dibidang mesin² pengolahan benang mentah mendjadi benang jang siap untuk ditenun, serta alat² tenunnja setjara praktis. Penemuannja ini merupakan titik-terang bagi kemandjuan dan kelandjutan industri tenun sutera dinegara kita.

Dibidang pemeliharaan djumlah peneliti-praktis ini sangat banjak, dan tersebar dimana-mana. Sehingga umumnja praktis semua pemelihara daerah bertindak djuga sebagai pengamat/peneliti-praktis untuk daerahnja.

Chusus mengenai benang bedah sutera jang pada tahun 1963 tjara pembuatannja untuk Indonesia didapatkan oleh Ackub Wangsadiarta, adalah suatu kerdja dan ketekunan jang harus dipudji dan dibanggakan (9, 14, 22). Karena, pembuatan benang dari silk-gland, jaitu benang-sutera jang dibuat langsung dari kelendjar-suteranja tanpa ulat tsb. membuat kokon dulu, merupakan „keruntuhan Murcia” di Spanjol jang ber-abad² memegang monopoli (22). Ternjata sekali bahwa penemuan ini mendapat sambutan jang lajak dari berbagai ahli bedah, dan beberapa pertjobaan penggunaan telah dilakukan di Sukabumi dan Djakarta (22), oleh dokter²/ahli bedah dengan memuaskan hasilnja.

b. *Penelitian dasar dan landjutan di Lembaga/Perguruan-tinggi.*

Walau hasil jang sudah selesai masih sangat terbatas, tetapi sedjak tahun 1963 penelitian² jang bersifat ilmiah dalam bidang persuteraan baik dari segi biologis, pertanian atau pendidikan, ternjata mempunjai tempat baik dibeberapa Lembaga/Perguruan-Tinggi (3, 9, 14, 22, 24). Bagian Biologi ITB dan Fakultas Pertanian Bogor, merupakan pelopornja dalam bidang penelitian persuteraan, jang kerdja penelitiannja

dikerdjakan sebagai tugas penelitian mahasiswa tingkat sardjana/doktoralnja. Dan usaha ini ditiru dan dilandjutkan oleh Lembaga/Perguruan-tinggi lainnja, antara lain oleh Universitas Nasional Djakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Akademi Pendidikan Nasional Djokja, Fakultas Biologi/Kehutanan/Pertanian, Fakultas Pertanian Pajakumbuh, dsb.

Penelitian dibidang murbei, hama/penjakit murbei, pemeliharaan, telah selesai sebagian dikerdjakan di Institut Teknologi Bandung dan Fakultas Pertanian Bogor (7, 8, 9, 10, 11, 12).

Faktor² jang mempengaruhi baik tidaknja suatu djenis daun murbei untuk makanan ulat jang dapat meninggikan kwalitas dan kwantitas hasil suteranja ialah kadar air, bahan anorganik, matjam² saccharida, asam² amino (7) disamping muda atau tuaanja daun² jang diberikan tsb. (12), dan ternjata pula bahwa kadar asam amino mempunyai peranan jang paling menentukan sekali (7). Djenis² asam murbei jang paling baik untuk makanan ulat ialah *Morus nigra*, *Morus multicaulis*, dimana hasilnja memberikan persentase djumlah kokon terbaik (12, 7), disamping itu djuga ternjata sekali bahwa kombinasi makanan jang teratur antara *Morus multicaulis* dan *Morus nigra* mengakibatkan kenaikan nilai kokon jang dihasilkan, sedangkan kalau hanja dengan *Morus nigra* sadja memberikan persentase kematian jang terendah (17). *Morus australis* merupakan djenis ketiga jang banjak digunakan tetapi tidak sebaik kedua djenis lainnja (7, 12, 9). *Morus alba* var. *macrophylla* merupakan djenis murbei jang paling buruk dan mengakibatkan djumlah kematian terbanjak (9). Dari daun murbei didapatkan kurang lebih 17 genera djamur jang disebut phyllosphere daun murbei, jaitu *Mucor*, *Choanophora*, *Syncephalastrum*, *Phyllosticta*, *Plenodomus*, *Diplodia*, *Pestalotia*, *Nigrospora*, *Goniothecium*, *Acrothecium*, *Stomphylium*, *Conisporium*, *Penicillium*, *Aspergillus*, *Verticillium* dan *Monilia* (10). Sesuai dengan pendapat Legay (1958) ternjata bahwa penjakit jang datang melalui makanan lebih sedikit kalau dibandingkan melalui udara, sentuhan tangan pemelihara (10, 9).

Kegunaan daun murbei tidak sadja untuk makanan ulat, tetapi djuga dibeberapa daerah merupakan bahan makanan (lalap) jang sangat digemari masjarakat, terutama daun² jang muda (9, 22), tetapi djuga dibidang farmasi memegang peran jang penting, misalnja sebagai diureticum, galactogogum, mempersedikit rasa njeri, mempertjepat baiknja luka² bakar-bisul, obat anti diabetes, dsb. (9, 11, 22). Penelitian dibidang pembibitan, penjakit ulat telah dikerdjakan djuga di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran (8, 9, 20, 21, 22, 24, 25). Penjakit ulat jang banjak menjerang ulat² jang dipelihara di-negara kita ternjata sudah hampir lengkap seperti jang umum menjerang

diberbagai negara penghasil sutera, baik Djepang, Tiongkok ataupun Rusia (9, 20, 22, 23, 24). Misalnja grassery jang disebabkan virus, muscardine jang disebabkan jamur, flacheria jang disebabkan bakteri dan pebrine jang disebabkan oleh protozoa (9, 20, 24). Terutama untuk bibit² jang datang dari luar-negeri dan umumnja Djepang, harus segera diadakan penelitian mendalam dan diadakan usaha karantina sebelumnja dipelihara (24). Dan kegagalan serta kerugian akibat penjakit² inilah jang merupakan faktor kegagalan para pemelihara ulat dinegara kita disamping faktor² lainnja lagi (9, 20, 24). Penelitian dibidang pembibitan terutama dalam hal mempertjepat penetasan telur atau memperlambat penetasan telur, memberikan hasil jang baik pula, jaitu bahwa mempertjepat telur sangat baik dengan menggunakan larutan HCl 4 N dan 6 N, sedang memperlambat penetasan dapat digunakan penjinpanan pada suhu konstan antara 4-5°C, (9, 25). Maksud dari pada penelitian ini ialah mengingat keadaan makanan ulat jang kadang² banjak dan kadang² sedikit sedangkan djumlah telur tetap, karena itu harus ditjari djalan untuk mempertjepat penetasan telur² ulat seandainja djumlah makanan tersedia banjak, dan diusahakan untuk memperlambat/menjinpan tanpa kerusakan kalau seandainja djumlah makanan ulat sedikit diakibatkan kemarau panjang atau serangan hama/penjakit murbei.

Pentjegahan terhadap penjakit² tersebut kebanyakan dengan mempersedikit djumlah bibit penjakit, hama jang tersebar luas diudara sekitar ruang pemeliharaan, dengan penjemprotan dan penutupan ruang pemeliharaan, alat² selama 3 — 4 hari oleh larutan formaline 1 — 5% (20, 22, 23, 24). Achirnja perlu dikemukakan, bahwa dengan adanya usaha persuteraan dinegara kita tidak sadja menguntungkan dalam hal bahan sandang seperti umumnja kita harapkan, tetapi djuga sebagai bahan/sumber protein chewani dari pupaenja (13), pupuk dari kotoran ulat/bekas² makanan ulat (9, 13, 22), dan langsung atau tidak langsung didikan mentjintai kebersihan terhadap masyarakat (9, 22).

Diskusi dan Kesimpulan.

Berdasarkan alam, keadaan, djiwa dan semangat bangsa Indonesia, usaha persuteraan dinegara kita merupakan hal jang ideal dan tepat diadakan (2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 9, 17, 18, 19, 24, 22, 25). Karenanja tidak heran kalau dalam waktu dekat hasil kokon dan benang Indonesia menjamai bahkan melebihi hasil jang telah didapat oleh Negara penghasil sutera lainnja jang telah lama aktif seperti Djepang, djuga negara „leluhur sutera” seperti Tiongkok (2, 3, 14, 9, 15, 17). Sebagai objek usaha²-antar-rumah (home industry) persuteraan merupakan objek jang paling tepat sekali mengingat alam dan djiwa bangsa Indonesia. Karena itu maka adanya pembagian tugas kepada setiap badan²/lembaga untuk ikut aktif sehingga

masjarakat hanja bertugas memelihara ulat dari mulai telur menetas sampai dengan membuat kokon harus benar² dapat dilaksanakan (9, 22). Kurangnja pengetahuan dasar, sukar dapat diatasinja hama² penjakit dan tidak lantjarnja usaha penampungan, mendjadi sebab² mengapa banjak pemelihara jang gagal, patah semangatnja ditengah djalan, disamping sebab² lain misalnja makanan, kurangnja penerangan-bimbingan (9, 23, 24, 25). Karena itu dalam objek pemeliharaan ulat sutera bimbingan-penerangan dan usaha² penjempurnaan dibidang pemeliharaan, pembibitan dsb. harus benar² diusahakan dan dilaksanakan setjara merata dan teratur ditiap tempat/daerah pemeliharaan (9, 23). Usaha persuteraan tidak sadja hanja menghasilkan benang sutera, tetapi djuga kepentingan-kepentingan lain (2, 3, 5, 6, 11, 9, 15, 22).

Daftar Publikasi & Kepustakaan.

1. Ackub Wangsadimiarta (1963): Djadwal pemeliharaan ulat sutera semusim. Arena Tekstil Bandung.
2. Ackub Wangsadiamiarta & Wibowo (1963): Pemeliharaan ulat sutera & pengolahan hasilnja. Arena Tekstil Bandung.
3. Ackub Wangsadimiarta (1964): Sambutan kepada Musjawarah ke-3 Inkop. ISRI. Musjawarah ke-3 Inkop. ISRI Bogor.
4. Adang Adiwikarta (1964): Pengolahan benang mentah. Gakoptexi Djabar Bandung.
5. Dadi Achdi (1964): Laporan penindjauan terhadap industri sutera alam di Djepang. Komuved Dt. I Djawa Barat Bandung.
6. Dadi Achdi (1964): Perkembangan industri sutera alam didaerah Djawa Barat. Musjawarah ke-3 Inkop. ISRI, Bogor.
7. Dardjat (1964): Penjelidikan sekitar daun murbei (*morus spp.*) sebagai makanan ulat sutera (*Bomby mori*). Thesis Bag. Biologi ITB (tak diterbitkan).
8. Darbohusodo (1964): Biologi & klassifikasi dari *Nosema bombycis*. Skripsi Bagian Biologi ITB (tidak diterbitkan).
9. Laboratorium Serikultur ITB (1964): Laporan kegiatan selama '63-'64 (idem).
10. Liem Kiok Hwa (1964): Phyllosphere daun murbei. Thesis Bag. Biologi ITB (idem).
11. Laurette Liem (1961): Farmacognosi daun murbei. Thesis Bag. Biologi ITB (idem).
12. Maman Djunarja (1964): Pengaruh makanan terhadap perkembangan ulat sutera dan produksinja. Thesis Fakultas Pertanian Bogor (tidak diterbitkan).
13. Saleh Puspo (1959): Sedikit ttg. ulat sutera. *Hemereazoa*, LXVI 7 — 8.

14. Sambas Atmadinata (1964): Djadikan Indonesia negara sutera kelas I didunia. Musjawarah ke-III Inkop. ISRI Bogor.
 15. Tachjar H. (1964): Sutera alam Indonesia. Musjawarah ke-3 Inkop. ISRI Bogor.
 16. Tisna Amidjaja (1964): Kerakteristika fasa² pertumbuhan Bomby mori dan faktor² lingkungan jang mempengaruhi. Gakoptexi Djawa Barat Bandung.
 17. Ummi Salamah (1964): Ceureutoe dan ulat sutera. Industri Sutera Alam Rakjat Indonesia, D.I. Atjeh.
 18. Ummi Salamah (1964): Lap. aktivitas ISRI D.I. Atjeh. Musjawarah ke-3 Inkop. ISRI, Bogor.
 19. Unus Suriawiria (1964): Naito al. Muh. Kurdi, pembawa ulat sutera Djepang ke Indonesia. Intisari XII/II.
 20. Unus Suriawiria (1964): Beberapa penjakit ulat sutera + tjara² penjegahannja. Gakoptexi Djawa Barat, Bandung.
 21. Unus Suriawiria (1964): Pembibitan & pengokonan ulat sutera Gakoptexi Dj. B.
 22. Unus Suriawiria (1964): Kegiatan persuteraan di Djabar. Gakoptexi Djabar. Bdg.
 23. Unus Suriawiria (1964): Penelitian terhadap beberapa telur ulat sutera jang dihasilkan sendiri oleh pengusaha ulat sutera. Lab. Serikultur ITB. (Laporan tidak diterbitkan).
 24. Unus Suriawiria (1964): Pentingnja untuk segera diadakan karantina bagi bibit² ulat sutera jang datang dari luar. Badan Pembina Bahan-dasar Tekstil Djawa Barat, Bandung.
 25. Unus Suriawiria (1964): mempertjepat & memperlambat penetasan telur u/. Gakoptexi.
-

BEBERAPA TJATATAN PERKAPASAN DI DJAWA BARAT

oleh: Drs. UNUS SURIAWIRIA

Bagian Biologi ITB.

I. Pendahuluan.

Dari berbagai tjatatan dan berbagai keterangan, maka nenek moyang bangsa Indonesia adalah terkenal karena swadaya, swasembada dan berdikari disegala bidang, chususnja bidang SANDANG. Sebagai buktinja kalau kita pergi ke-daerah² seperti daerah orang² Baduj (Tjibeo-Banten), daerah orang Tengger (pegunungan Tengger), orang² Kubu (di Sumatera-Selatan), dsb. jang oleh kebanyakan orang sekarang dianggap sebagai penduduk jang masih primitif atau terbelakang, maka untuk keperluan sandangnja mereka menanam sendiri kapas²-nja, memintal sendiri mendjadi benang dan menenun sendiri mendjadi bahan² pakaian. Keaktipan² ini mercka kerdjakan sedjak dulu, dan sebagai warisan nenek moyangnja. Di Djawa Barat, disamping swasembada & berdikarinja orang² Baduj dalam bidang sandang, terkenal djuga penduduk Panjutrán (Tjiamis-Selatan), Pameungpeuk atau tepatnja Tjikelet dan Bungbulang (Garut-Selatan), Djampangkulon (Sukabumi-Selatan) dan berpuluh bahkan lebih lagi daerah² lainnja jang terkenal dalam penanaman kapas.

Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, baik didaerah dekat pantai, daerah pegunungan, dsb. maka akan selalu kita dapati pohon kapas, jang umum disebut kapas „mori” kapas „naun” atau kapas „taunan”. Hal ini karena sekali kapas tersebut ditanamkan maka seumur hidup (atau bertahun-tahun) kapas tersebut akan berbunga berbuah dan terambil hasilnja. Backer & Watt (1, 8) telah mentjatat bahwa sedikitnja akan diketemukan 8 djenis kapas rakjat jang ditanam sebagai pagar, sebagai batas tanah atau sengadja dikebun-kebun. Penanaman ini bukan hanya sebagai persediaan kapas bilamana ada orang meninggal, tetapi djuga digunakan sebagai bahan untuk pakaian jang umumnja ditenun dengan alat tenun jang dinamakan „gedogan”.

Akibat politik djadjahan Belandalah matinja dan hilangnja keaktipan-keaktipan masjarakat Indonesia untuk berswasembada dan berdikari dibidang sandang. Djutaan gulden tiap tahun import bahan² sandang dari negeri Belanda atau lainnja ke Indonesia jang langsung ataupun tidak langsung mengalahkan, mematikan dan menghambat pengusaha² tekstil rakjat jang semula menanam dan membuat bahan pakaian sendiri. Tjatatan ditahun 1866 sudah lebih

dari f. 21,5 djuta impor bahan pakaian ke Indonesia dari negeri Belanda. Tentunja djuga impor jang dipaksakan untuk membunuh dan mematikan usaha² masjarakat dibidang Sandang.

Penanaman kapas jang benar² terpelihara dan memberikan hasil jang baik sebagai bahan sandang, telah aktif dilakukan di Indonesia sedjak djaman dulu, sehingga sedjak tahun 1920 s/d 1940 negara Indonesia sudah mampu *mengeksport* kapas keluar negeri jang rata² lebih dari 1000 ton tiap tahunnja (6). Luas penanaman kapas jang sudah tertjatat untuk Djawa dan Madura sebelum perang Dunia ke-2, rata² diatas 5000 Ha lebih (6, 7).

II. Perkapasan di Djawa Barat.

Penanaman setjara luas dari djenis² kapas berserat pandjang seperti deltaphine, kambodja, koker, dsb. di Djawa Barat tertjatat sedjak tahun 1921. Tetapi jang lebih aktif dan lebih luas lagi ialah sedjak tahun 1939 di hampir semua daerah di Djawa Barat ini, seperti (6): Dihitung dalam Ha.

Tahun	Banten	Djakarta	Bogor	Priangan	Tjirebon	Djumlah
1939	10	—	141	53	9	213
1940	18	—	158	56	32	264
1941	3	—	234	123	10	370
1942	16	—	334	201	34	585
1943	37	20	339	471	3409	4276
1950	120	47	370	315	969	1821
1951	325	2	224	318	350	1219
1952	3	8	516	307	81	915
1953	199	14	82	354	68	717
1954	87	6	89	322	41	545
1955	114	19	137	263	67	599
1956	126	26	42	399	46	639
1957	168	17	44	465	49	763

Tjatatatan keaktifan sesudah tahun 1957 jang mungkin karena diakibatkan oleh banjarknja import benang tenun jang kalau diperhitungkan lebih banjak untungnja berdagang (indent) benang tenun dari pada menanam kapas, terlihat gejala² kemunduran dan ketidakaktifan. Walaupun disana-sini terutama didaerah sekitar Bogor, Sukabumi, Madjalengka dan terutama sekali Tjirebon, banjak petani jang menanam dan memelihara kapas sehabis panen disawah-sawah.

Sesudah tahun 1960 ternyata keaktifan dalam penanaman kapas mulai terlihat lagi bermuntjul di sana-sini, terutama di daerah Tjirebon dan Madjalengka. Dan yang perlu dikemukakan disini ialah keaktifan dari Koperasi Industri Textil Indonesia (Koptexi) yang memelopori setjara aktif penanaman kapas setjara luas diberbagai daerah. Walaupun hasil setjara luas dari 176 Ha yang ditanam telah rugi dimana hasilnya jauh dibawah minimal, tetapi keaktifan²-nya masih terus digiatkan dan diluaskan. Pada permulaannya, penanaman kapas di Djawa Barat ini selalu terbentur kepada:

- a. iklim dan tjuatja yang sudah tidak dapat ditentukan lagi mulai dan akhirnya,
- b. banjaknya hama dan penyakit yang sukar diatasi,
- c. kekurangan pupuk, obat²an,
- d. kekurangan pengetahuan dasar tentang pemeliharaan kapas,
- e. seretnya atau tidak lantjarnya usaha² penampungan hasil.

Ditahun 1963 umumnya tiap Ha memerlukan pembiajaan sekitar Rp. 45.000,— sampai Rp. 50.000,— tetapi ditahun 1965 (s/d tjtatan akhir Djuli) memerlukan biaya yang tidak kurang dari Rp. 350.000,— tiap Ha (dibandingkan dengan di Sumatera Rp. 750.000,— — Rp. 800.000,—).

Para petani kapas di Djawa Barat umumnya tergolong dalam dua golongan besar:

- a. *petani biasa*
- b. *petani penenun atau peradjud.*

Sistim penanaman umumnya dilakukan dengan tjara „bagi hasil”, jaitu kepada setiap petani oleh suatu badan (misalnya Koptexi) diberikan 50% dari seluruh biaya perongkosan, pemindjaman alat² pertanian (umumnya semprotan² hama) dan bibit. Hasilnya 50% untuk badan dan 50% dibeli oleh badan dari petani dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah, misalnya kapas-kotor kwalitas A (kapas kotor atau barangkal jaitu kapas yang masih berbidji) dengan harga Rp. 750,—/Kg untuk djenis deltaphine dan Rp. 600,—/Kg untuk djenis kambodja, sedangkan kapas bersih (tanpa bidji lagi) kwalitas A ialah Rp. 4000,—/Kg.

Kepada para petani biasa, diusahakan agar bisa dikembalikan atau disalurkan kembali hasil kapasnya itu berupa bahan² sandang yang telah djadi dengan harga yang sering-an-ringannya. Sedangkan kepada para petani penenun atau petani peradjud hasil kapasnya akan dikembalikan sebagian berupa benangnya.

Tahun 1964/1965 merupakan tahun kesibukan bagi penanaman² kapas di Djawa Barat. Disekitar Tjirebon (Keresidenan) tertjatat

lebih dari 1.500 Ha tanaman kapas jang didjalankan oleh Koptexi, PT. Sri Kapas atau badan² lain. Hasilnja sungguh memuaskan, rata² bisa sampai 6 - 8 kwintal tiap Ha. Pupuk jang digunakan untuk kapas umumnja Urea, FMP 2A atau DS. Pupuk kandang berguna djuga semasa kapas mau tumbuh dan masih ketjil. Obat²-an untuk hama ialah eldrin, dieldrin, arkotin, dsb. Untuk mengurangi pemakaian pupuk jang makin lama makin terasa mahal, dan sukar, maka sekarang dibeberapa petani kapas telah dikerdjakan sistim tumpang-sari dengan tumbuhan dari keluarga polong²-an jang langsung ataupun tidak langsung bisa memberikan sumber zat lemas, pengganti Urea, misalnja katjang-kedele, katjang suuk, dsb. Hal ini karena pada akar² tumbuhan dari keluarga polong²-an mengandung bintil² zat lemas jang dihasilkan oleh bakteri zat lemas, seperti Rhizobium, Nitrobacter, dsb. Pengurangan penggunaan obat²-anpun karena sukar dan mahalnja, telah banjak digunakan tumbuhan penghasil insektisida seperti derris, dsb. Penanaman kapas di Djawa Barat diusahakan tidak mengganggu:

- tanaman pangan (padi, djagung, dsb).
- tanaman ekonomi lainnja (tebu, sajian dsb.).
- cultuurregeling dan ketetapan² Pemerintah lainnja.

Diutamakan sekali terlaksanaja intensifikasi pemakaian tanah jang sesuai dengan rentjana Pemerintah (land-useplanning).

Usaha² untuk bandingan, bimbingan, penjuluan, pencerangan, dsb. jang telah didjalankan ialah:

- a. Kursus dasar dan kursus jang bersifat up grading, misal oleh Koptexi di Bandung achir tahun 1964 dan awal 1965,
- b. Tjeramah² dan pemutaran film, baik oleh Djawatan Pertanian Rakjat, Fakultas Pertanian, atau oleh badan/lembaga² lainnja lagi.
- c. Publikasi jang bersifat khusus atau umum pada madjalah/surat kabar.
- d. Keaktipan² lainnja jang tudjuannja untuk mengembangkan, membangkitkan dan memberikan semangat kepada masjarakat untuk berusaha dan mentjoba menanam kapas.

Penanaman kapas di Djawa Barat tidak merupakan kebun jang khusus. Kalau tidak tumpang sari dengan tanaman lain seperti untuk djenis kambodja, tentu ditanamkan pada tanah sehabis tanaman padi. Dibanjak tempat ada djuga jang ditanamkan sebagai pagar atau lainnja lagi, untuk djenis² kapas taunan atau mori. Waktu penanaman jang umum sekali dikerdjakan didaerah Djawa Barat untuk kapas² djenis deltaphine, ialah antara Djanuari — Mei tiap² tahun.

Hal ini diperhitungkan dengan habisnja masa panen padi untuk mulai menanam dimana air hudjan masih ada, dan tibanja musim kemarau untuk pemckaran kapas agar baik dan sehat. Djenis deltapine mulai dari ditanamkan sampai dengan diambil hasilnja hanja antara $3\frac{1}{2}$ — 4 bulan sadja.

Soal hama, penjakit dan iklim merupakan djuga persoalan jang langsung ataupun tidak langsung membawa kegagalan atau kemunduran usaha² perkapasan, apa lagi kalau obat²-an tidak tersedia. Hama kapas sangat banjak, djuga penjakitnja. Sehingga pada pertama kali tanaman kapas ditanam di Djawa Barat ini jang pertamanya hampir mematahkan semangat para petani kapas ialah hama dan penjakit, karena mereka belum berpengalaman. Sedjak bidjinja jang belum ditanamkan, lalu bidji jang sedang tumbuh atau berke-tambah sampai kebuah jang siap akan menghasilkan kapas, di Djawa Barat ini sudah njata ada hama dan penjakitnja.

Kerdja-sama jang erat dalam bidang perkapasan di Djawa Barat walaupun tidak resmi, telah terdjalin lama sekali. Kerdja-sama ini ialah antara para petani/penanam kapas seperti antara-lain Koptexi dengan Djawatan Pertanian, Fakultas Pertanian, ITB, BAPT dan badan/Lembaga lainnja. Dengan adanja kerdja-sama ini tidak sadja memberikan keuntungan dalam bidang penghambatan pentjegahan hama dan penjakit, djuga pengurangan penggunaan pupuk anorganis dan penaikan taraf dan daja tanam serta hasilnja.

Penanaman kapas di Djawa Barat kebanyakan dibekas-bekas panen sawah. Tanah bekas sawah mula² ditjangkul atau dibadjak dan digaru diratakan. Kemudian dibuatkan parit² memandjang untuk mendjaga genangan air sewaktu kapas tumbuh. Kapas mula² ditanamkan pada lubang² (tiap lubang antara 3 — 6 bidji jang tergantung kepada daja tumbuhnja) dan ditutup dengan tanah sedikit berpasir atau abu. Djarak penanaman tergantung kepada tanah dan djenis kapas. Ada jang 30 — 60 cm. didalam barisan atau 80 — 150 cm. antara barisan. Djarak ini tergantung pula kepada sifat penanaman apakah tersendiri atau tumpang-sari. Pengalaman membuktikan bahwa jarak tanam jang agak kerap memberikan hasil tinggi tumbuhnja lekas masak dan memperpendek pest-control (pembasmian hama). Selama tumbuhan tumbuh didjaga tentang kesuburan dan hama atau penjakitnja. Pada setinggi 5 cm. pemupukan pertama diberikan, misal dengan Urea, ZA atau FMP, maupun dengan pupuk kandang. Pada tinggi 20 cm. diadakan pengurangan tanaman kapas untuk lebih menguatkan dan menjuburkan tumbuhnja.

III. Hasil kapas di Djawa Barat.

Pemungutan hasil kapas dilakukan kalau sudah terlihat tanda² kulit buah sudah berwarna sawo tua atau tjoklat tua, daun kelopak tambahan kalau dipegang djadi rapuh, dan dari tiap tumbuhan ternjata 3-4 buah sudah masak atau kering. Untuk bibit, maka dibiarkan agar kapas dan bidjinja itu sudah nampak keluar sendiri. Seleksi hasil dapat dilakukan dalam beberapa tjara:

- sewaktu mengambil,
- sesudah ditempat penampungan.

Seleksi hasil terutama ditudjukan untuk mempertinggi nilai bibit. Walau masih merupakan „pilot projek”, usaha² perkapasan di Djawa Barat ini hasilnya sudah tjukup menggemirakan, ialah tiap Ha bisa sampai antara 6 — 8 kwintal kapas berbidji (berangkal). Sehingga pada achir tahun 1964 di Djawa Barat ini sedikitnja bisa dihasilkan kapas kotor sampai 35 — 40 ton. Dan pada pertengahan tahun 1965 dapat pula dihasilkan sampai 30 ton, disamping pada panen sekarang ini (Agustus-September 1965) dapat dihasilkan 2 atau 3 kali lipat tahun 1964. Kapas Djawa Barat menurut hasil test jang dilakukan di Balai Penelitian Textil, memberikan kemungkinan dan hari depan jang baik. Terbukti pula bahwa hasil tahun 1964 bisa didjadikan benang berukuran 20/s atau bahkan ada jang sampai 30/s. Kehalusan/kekuatan tjukup, kedewasaan dan keretakan panjang jang baik dan staple tjukup.

Pada masa ini untuk pengolahan hasil kapas Diawa Barat masih terbentur kepada soal hindsan (pengupasan kapas berbidji mendjadi kapas tanpa bidji). Dengan menggunakan mesin atau alat hindsan jang sudah umum, ternjata memakan waktu jang terlalu banjak mengingat djumlah jang banjak. Sedangkan satu²-nja pabrik jang mempunjai mesin hindsan besar adalah PPN Serat di Asembagus, Banjuwangi (Djatim). Menghinds kapas ke Asembagus, disamping memerlukan waktu dan perongkosan jang djauh terlalu banjak dan besar, djuga keamanan dari kapas² tersebut didjalan sukar diatasi. Usaha untuk menghinds kapas sendiri disekitar Djawa Barat sekarang sedang aktif dikerdjakan, baik dengan membuat mesin² hinds dengan mentjontoh jang sudah ada, ataupun dengan djalan memperbaiki dan menjempurnakan hindsan² jang umum dipakai rakjat agar semi-machinal umpamanja.

Hasil jang tinggi tentang perkapasan di Djawa Barat ini, selain berkat ikut aktifnja beberapa ahli/sardjana dari berbagai perguruan tinggi/lembaga, djuga karena tokoh² daerah perkapasan, jang makin

lama makin menonjol kreasi dan daya fikirnja dalam usaha untuk mempertinggi kualitas serta kuantitas hasil kapas. Tertjatat seperti Satari dan S. Duki (Tjirebon), Adinata (Kadipaten), Sastratimu (Kuningan), Emen (Tomo), dan banjak tokoh² lainnja lagi.

IV. Diskusi dan kesimpulan.

Persuteraan di Djawa Barat mempunyai sedjarah jang sudah baik dan berhasil sedjak djaman nenek mojang kita dulu. Beberapa daerah sampai sekarang tertjatat sebagai daerah kapas, dimana banjak ditanam kapas² djenis² taunan jang dinamakan pula kapas mori. Bulan Djanuari — Mei tiap tahun merupakan masa untuk menanam kapas di Djawa Barat. Hasilnja ternyata sangat menggembirakan, hingga tiap Ha bisa sampai 6 — 8 kwintal. Untuk tiap Ha diperlukan pembiajaan sebesar $\pm$ Rp. 350.000,—.

V. Perpustakaan.

1. Backer, C.A.: Flora van Batavia, deel. I
Mededelingen van het Landbouw 4/1907.
2. Brown, H.B.: Cotton.
Mc Graw Hill Book Co. Inc. 1958.
3. Gorkom, K.W. van: Oost Indische Cultures.
J.H. de Bussy, Amsterdam, 1913.
4. Kuijper, H.P.: De katoen cultuur in the Residentie Palembang.
Jaarboek van het Depart. van Landbouw,
251/1906.
5. Setten, J.G. van: Ecnige gegevens voor de katoen cultuur in
Nederlandsche Oost Indie.
Med. van het Landbouw, 14/1911.
6. Sofjan, A: Masalah kapas di Indonesia.
Panitia Negara Urusan Textil, 1959.
7. Unus S.: Projek Perkapasan Koptexi di Djawa Barat.
Gabungan Koptexi Djawa Barat, 1965.
8. Watt, G.: The wild and cultivated cotton plants of the world.
London, 1907.

**DAFTAR PENANAMAN KAPAS DI DJAWA BARAT MENURUT
TJATATAN JANG TELAH MASUK TH. 1965**

No. urut	Nama Daerah	Areal dalam Ha.	Keterangan penanaman
1.	Kabupaten Lebak	170	Rentjana Koptexi
2.	Kabupaten Bandung	0,2	Pertjobaan.
3.	Kabupaten Sumedang	134	Rentjana Koptexi
4.	Kabupaten Garut	200	Rentjana Koptexi
5.	Kabupaten Tasikmalaja	10	Rentjana Koptexi
6.	Kabupaten Tjiamis	264	Rentjana Koptexi
7.	Kabupaten Tjirebon	109	Pengusaha tenun rakjat
8.	Kabupaten Madjalengka	100	Pengusaha tenun dan rakjat.
Djumlah		987,2	

Tjataan: Angka* Badan Pembina Perkapasan Djabar.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH D J A W A - B A R A T .

No. : 119/B-I/BPD/SK/64.

Perihal : Pembentukan Badan Koordinasi
Pembangunan Daerah Tingkat I
Djawa-Barat (disingkat BAKOP-
DA. Djawa-Barat) atas dasar Ke-
putusan Presiden No. 19 tahun
1964.

GUBERNUR KEPALA DAERAH DJAWA-BARAT.

MENIMBANG: Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) yang diantara lain mengandung isi mentjabut Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961 serta merubah dan menjempurnakan isi, maksud dan tudjuannya, maka dianggap perlu untuk segera mentjabut pula Keputusan kami tgl. 27 Mei 1963 No. 22/GKDH/BPD/SK/1963, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961 dan membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Djawa Barat (BAKOPDA Djawa-Barat) atas landasan Surat Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964.

MEMBATJA/: Surat J.M. Menteri Dalam Negeri tgl. 18 April 1964
MENGINDAH- No. Des/57/2/34 tentang pembentukan Badan Koor-
KAN dinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) termaksud diatas.

MENGINGAT: 1. Undang² No. 1 tahun 1957 jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961.
3. Deklarasi Ekonomi yang diutjapkan P.J.M. Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1963.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1963.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA: Mentjabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat tgl. 27 Mei 1963 No. 22/GKDH/BPD/SK/63 tentang pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I Djawa-Barat berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961.

KEDUA: Membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I Djawa-Barat (BAKOPDA Djawa-Barat) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964 dengan susunan seperti berikut:

Ketua : Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat.

Wakil Ketua I : Wakil Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat.

Wakil Ketua II: Wakil Ketua DPRD-GR. Daerah Tk. I Djabar.

Anggauta² :

1. Anggauta BPH. jang bertugas di-bidang Pembangunan.
2. Ketua Seksi I dalam DPRD-GR Daerah Tk. I Djawa-Barat.
3. Ketua Seksi II dalam DPRD-GR Daerah Tk. I Djawa-Barat.
4. Ketua Seksi III Dalam DPRD-GR Daerah Tk. I Djawa-Barat.
5. Ketua Seksi IV dalam DPRD-GR Daerah Tk. I Djawa-Barat.
6. Ketua Seksi V dalam DPRD-GR Daerah Tk. I Djawa-Barat.
7. Wakil dari Angkatan Darat.
8. Wakil dari Angkatan Kepolisian.
9. Wakil dari Kedjaksanaan Tinggi.
10. Wakil dari Front Nasional Daerah Djawa-Barat.
11. Wakil dari Angkatan Udara.
12. Ketua Bamunas Daerah Djawa-Barat.
13. Seorang Sardjana/Ahli Ekonomi Wakil dari lingkungan Pimpinan UNPAD.
14. Seorang Sardjana dibidang Industri Wakil dari Pimpinan I.T.B.

15. Seorang Sardjana/Ahli Teknik Wakil dari Pimpinan P.N. Indah Karya.
16. Kepala Bagian Pembangunan Daerah Djawa-Barat (Biro I) merangkap Sekertaris.
17. Pemimpin Bank Pembangunan Indonesia Tjabang Djawa-Barat.
18. Kepala atau Pedjabat yang ditunjuk dari Inspektorat Perkebunan Dt. I Djawa-Barat.
19. Kepala atau Pedjabat yang ditunjuk dari Dinas Penguasa/Port Authority Pelabuhan Tjirebon (Departemen Perhubungan Laut).

KETIGA : Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) bertugas:

- a. Menjusun usul rentjana pembangunan komplementer dari pada rentjana pembangunan nasional semesta untuk ditetapkan oleh BAPENAS.
- b. Membantu pelaksanaan pembangunan nasional semesta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Menjusun rentjana pembangunan daerah, rentjana tahunan, rentjana jangka pandjang untuk disahkan oleh BAPPENAS.
- d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

KEEMPAT: Membentuk Sekretariat BAKOPDA Djawa-Barat yang sekaligus berfungsi sebagai Badan Perentjana Daerah (Planning Board Daerah), dengan susunan sebagai berikut:

Sekretaris I Kepala Bagian Pembangunan Daerah Djawa-Barat/Biro I (Kepala Sekretariat)

Sekretaris II: Wakil dari Direksi Bank Karya Pembangunan Djawa-Barat.

- Staf Pembantu:
1. R. Nana Djajasumpena dari Bagian Pembangunan Daerah Djawa Barat.
 2. Achmad Sobana S.H. dari Bag. Pemb. Daerah Djawa-Barat.
 3. R. Odong Sadeli Adiwidjaja dari Bagian Pembangunan Daerah Djawa-Barat.

4. R. Benjamin Wigenakusuma dari Bagian Pembangunan Daerah Djawa-Barat.
5. Drs M.A. Zainuddin dari Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa-Barat.

Team Achli : dalam lingkungan Sekertariat

1. Seorang achli Pertanian sebagai Wakil dari Djawatan Pertanian Daerah Djawa-Barat.
2. Seorang achli dalam bidang Pengairan sebagai Wakil dari Djawatan P.U. Daerah Djawa-Barat.
3. Seorang achli dalam bidang Bangunan²/Djalan²/Djembatan² sebagai wakil dari Djawatan P.U. Daerah Djawa Barat.
4. Seorang achli dibidang Industri Sandang sebagai wakil dari Djawatan Perindustrian Daerah Djawa-Barat.
5. Seorang achli dibidang Industri lainnja sebagai wakil dari Djawatan Perindustrian Daerah Djawa-Barat.
6. Seorang achli dalam lapangan Perdagangan/Distribusi sebagai wakil dari Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri Daerah Djawa-Barat.
7. Seorang achli dalam bidang Kehutanan sebagai wakil dari Djawatan Kehutanan Daerah Djawa-Barat.
8. Seorang achli dalam lapangan Agraria sebagai wakil dari Inspeksi Agraria Daerah Djawa-Barat.
9. Seorang achli dalam lapangan Geologie/Pertambangan sebagai wakil dari Direktorat Geologie.
10. Seorang achli dalam bidang Lalu Lintas Djalan sebagai wakil dari Djawatan Lalu Lintas Djalan Daerah Djawa-Barat.
11. Seorang achli dari P.N. Listrik Negara (P.L.N.) sebagai wakil dari Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XI.

12. Seorang ahli dalam bidang Perburuhan sebagai wakil dari Djawatan Perburuhan Daerah Djawa-Barat.
13. Seorang ahli dalam bidang Pendidikan sebagai wakil dari Departemen P.D.K. Djawa-Barat.
14. Seorang wakil dari Direksi Bank Karya Pembangunan Djawa-Barat.
15. Seorang Ahli dalam lapangan Sosial dan Kemasjarakatan sebagai wakil dari Djawatan Sosial Daerah Djabar.
16. Seorang wakil dari Bagian Perusahaan Daerah/Biro II pada Sekertariat Gubernur Kepala Daerah Djabar.
17. Seorang ahli sebagai wakil dari Djawatan Urusan Agama.
18. Seorang ahli sebagai wakil dari DEPORA.
19. Seorang ahli sebagai wakil dari Tjabang Bank Pembangunan Indonesia di Bandung.

- b. Sekertariat/Planning Board bertugas membantu Pimpinan BAKOPDA Djawa-Barat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

KELIMA : Alamat BAKOPDA dan Sekertariat BAKOPDA: Djalan Diponegoro No. 22 Bandung.

KEENAM : Hal² yang belum tertjantum dan/atau diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KETUDJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : **BANDUNG**
 Pada tanggal : **12 JULI 1964**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
 DJAWA-BARAT,**

ttd.

(MASHUDI)

Brig. Djen. T.N.I.

Sesuai dengan aslinja,
 Pd. Sekertaris Daerah,

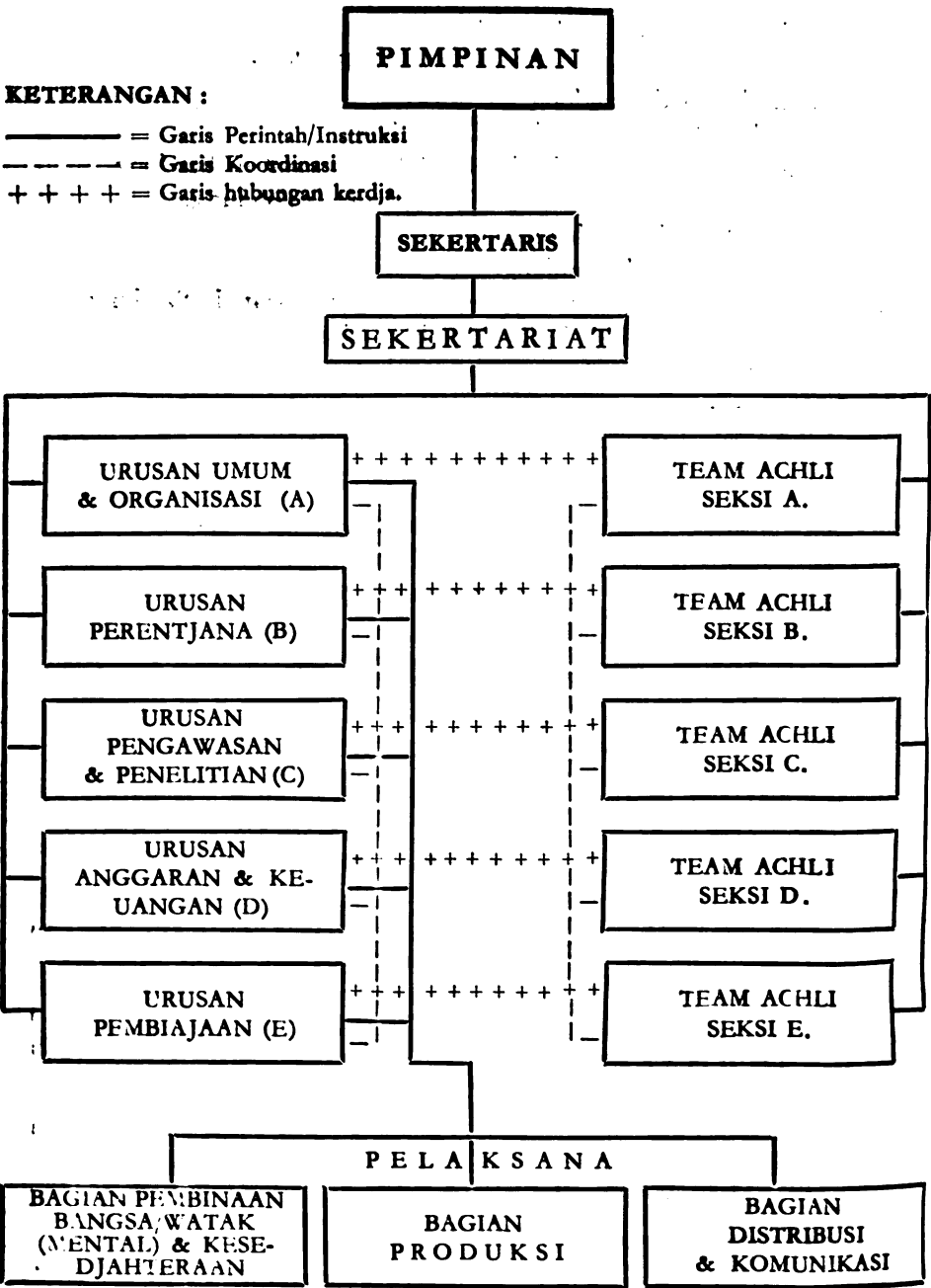
(R. Rachmat Wiratanoemadja)

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Presiden Kabinet Kerdja di Djakarta.
2. J.M. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
3. Badan Perantjang Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Djakarta.
4. Musjawarah Pembangunan Nasional (MUPENAS) di Djakarta.
5. Deperdep Dalam Negeri di Djakarta.
6. Pangdam VI Siliwangi di Bandung.
7. Kepala Polisi Komisariat Djawa-Barat di Bandung.
8. Djaksa Tinggi di Bandung.
9. Komandan Pertahanan Udara di Bandung.
10. Ketua DPRD-GR Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung.
11. Ketua Front Nasional Daerah Djawa-Barat di Bandung.
12. Rektor I.T.B. di Bandung.
13. Rektor UNPAD di Bandung.
14. Ketua BAMUNAS Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung.
15. Pres. Dir. P.N. INDAH KARYA di Bandung.
16. Semua Instansi/Djawatan yang bersangkutan.
17. Arsip. _____

**BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH (BAKOPDA)
DJAWA-BARAT**

Berdasarkan: Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964



SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH D J A W A - B A R A T

No. : 146/B.I/B.P.D/SK/64.

Lampiran : 2 (dua)

Tentang : Pengangkatan Anggauta Badan
Koordinasi Pembangunan Da-
erah (BAKOPDA) Daerah Jawa-
Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH DJAWA BARAT:

MENIMBANG: Bahwa dalam hubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 12 Djuli 1964 No. 119/B.I/B.P.D./SK/64 tentang: Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat disingkat BAKOPDA atas dasar Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964 dianggap perlu untuk mengisi personalia Badan tersebut sesuai dengan ketentuan susunannya seperti tertantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tersebut diatas.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961.
 3. Deklarasi Ekonomi yang diucapkan Paduka Jang-Mulia Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1963.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1963.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964.
 6. Keputusan Pimpinan Harian Bappenas/Menteri Uppenas No. 214/M/1964/Sk tanggal 20 Djuli 1964.
 7. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 12 Djuli 1964 No. 119/B.I/B.P.D./SK/64.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mengangkat para pedjabat seperti tertjantum dalam daftar lampiran I dan daftar lampiran II masing² sebagai Anggauta Pimpinan BAKOPDA Djawa Barat dan sebagai Anggauta Team Achli dan Anggauta Staf Pembantu dalam lingkungan Sekertariat Badan tersebut.

KEDUA : Berdasarkan Keputusan Pimpinan Harian Bappenas/ Menteri Uppenas No. 214/M/1964/Sk tanggal 20 Djuli 1964, memberikan kepada para Anggauta Pimpinan BAKOPDA dan para Anggauta Team Achli dilingkungan Sekertariat termasuk para pembantu Staf Sekertariat BAKOPDA:

- a. Ongkos² perdjalanen dinas berdasarkan peraturan² jang berlaku bagi Daerah Djawa Barat.
- b. Uang tambahan atas Honorarium jang diberikan menurut peraturan² jang berlaku, sebanjak Rp. 500,— sebulan bagi tiap² Anggauta dan Sekertaris BAKOPDA.
- c. Uang Honorarium sebagai balas djasa atas pekerjaan/hasil karya jang dilakukannja bagi kepentingan BAKOPDA Djawa Barat kepada para Anggauta Team Achli dilingkungan Sekertariat BAKOPDA tersebut termasuk para pembantu Staf Sekertariat BAKOPDA sebesar Rp. 1.250,— sebulan.

Satu dengan lainnja dengan ketentuan bahwa uang tambahan atas Honorarium sebanjak Rp. 500,— sebulan kepada para Anggauta dan Sekertaris BAKOPDA dibebankan kepada Dana bantuan jang diterima oleh BAKOPDA Djawa Barat dari BAPPENAS (Pemerintah Pusat), sedangkan Honorariumnja sendiri sebesar seperti ditentukan dalam peraturan jang berlaku bagi Daerah Djawa Barat begitu djuga ongkos-ongkos perdjalanen dinas termaksud dalam sub a. pasal ini, dibebankan kepada Anggaran Belandja/Kuangan Daerah Djawa Barat sendiri.

KETIGA : Tata usaha Keuangan BAKOPDA Djawa Barat termasuk Dana Bantuan yang diterima oleh BAKOPDA Djawa Barat diselenggarakan oleh Bank Karya Pembangunan Daerah Djawa-Barat (Sekertaris II) yang selandjutnja berkewadajiban untuk tiap semester memberi laporan mengenai itu kepada BAPPENAS melalui Ketua BAKOPDA.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Hal² yang belum tertjantum dan/atau diatur dalam surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di: **BANDUNG**
Pada tanggal : **19 OKTOBER 1964.**

GOVERNUR KEPALA DAERAH
DJAWA — BARAT,

ttd.

MASHUDI
BRIG. DJEN. TNI.

Sesuai dengan aslinja,
Pd. Sekertaris Daerah,

(R. Rachmat Wiratanoemadja).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Kabinet Kerdja di Djakarta.
2. J.M. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
3. Badan Perantjang Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Djakarta.
4. Musjawarah Pembangunan Nasional (MUPENAS) di Djakarta.
5. Baperdep Dalam Negeri di Djakarta.
6. Pangdam VI/Siliwangi di Bandung.
7. Kepala Polisi Komisariat Djawa Barat di Bandung.
8. Djaksa Tinggi di Bandung.
9. Komandan Pertahanan Udara di Bandung.

10. Ketua DPRD-GR Daerah Tingkat I Djawa Barat di Bandung.
11. Ketua Front Nasional Daerah Djawa Barat di Bandung.
12. Rektor I.T.B. di Bandung.
13. Rektor UNPAD di Bandung.
14. Ketua BAMUNAS Daerah Tingkat I Djawa Barat di Bandung.
15. Pres. Direktur P.N. INDAH KARYA di Bandung.
16. Semua Instansi/Djawatan jang bersangkutan.
17. A r s i p.

1 s/d 17 agar mendjadi maklum, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan seperlunja.

10. Ketua DPRD-GR Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
11. Ketua Front Nasional Daerah Jawa Barat di Bandung.
12. Rektor I.T.B. di Bandung.
13. Rektor UNPAD di Bandung.
14. Ketua BAMUNAS Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung
15. Pres. Direktur P.N. INDAH KARYA di Bandung.
16. Semua Instansi/Djawatan yang bersangkutan.
17. A r s i p.

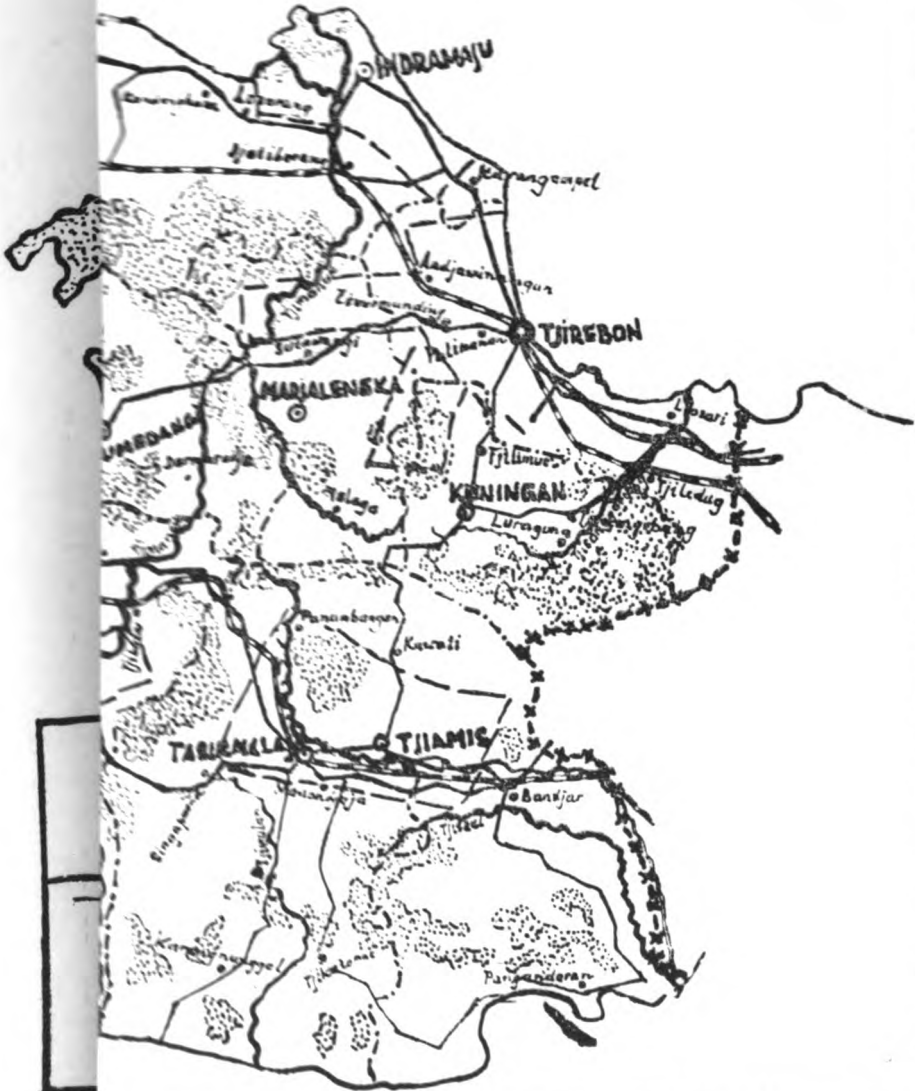
1 s/d 17 agar menjadi maklum, dan

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui
dipergunakan seperlunya.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM 1630 TO 1880
BY
JOHN B. HENNINGSEN
OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY
PUBLISHED BY THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY
1880

No. urut	N A M A	Djabatan dalam BAKOPDA	DARI INSTANSI	DJABAT
13.	K A D A R	Anggauta Team Achli	Dep. PDK. Perwak. Djawa-Barat	Wakil Kepala
14.	RD. ACHMAD JOESOEF	s.d.a.	Bank Karya Pemb. Daerah Djabar	Pres. Dir. B Karya
15.	M.A. KARNEN PARTASUM	s.d.a.	Djaw. Sosial Dt. I Djabar	Achli Sosial
16.	ACHMAD ADNAWIDJAJA	s.d.a.	Sek. Gub. Kepda.	
17.	R. Moh. AMIN	s.d.a.	Ktr. Ur. Agama	Kep. Sekerta
18.	ATIK SATARI W.	s.d.a.	Bank Pemb. Indo- nesia	
B.	DILINGKUNGAN SEKERTARIAT			
1.	DRS. KARDYAT	Sekertaris II	Bank Karya Pemb.	Staf Pimp. E Karya Pemba
2.	R. NANA DJAJASUMPENA	Pemb. pada Sekertariat	Biro Pembangunan Daerah	Angg. Staf I pinan
3.	R. ODONG S. ADIWIDJAJA	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
4.	ACHMAD SOBANA S.H.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
5.	R. BENJAMIN W.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
6.	DRS. M.A. ZAINUDDIN	s.d.a.	s.d.a.	Staf Pimpina Karya Pemba

NOMOR	A l a m a t				KETERANGAN
	Kantor	Telp.	Rumah	Telp.	
1	Djl. Riau 209	7385	Djl. Haruman 23	3720	
2	Djl. Braga 14	4191	Djl. Malabar 23	3620	
3	Djl. Naripan 9	4161	Djl. Wira-angun ² 5	3665	
4	Djl. Diponegoro 22	4131			
5	Djl. Supratman 234	4380	Djl. Nanas	7140	
6	Djl. Atjeh 47	4324/ 4239			
7	Djl. Braga 14	91	Djl. R. Patah 34	3620	
8	Djl. Ir. H. DJU- ANDA 31	2715	Buahbatu 9		
9	idem	2715	Djl. Ir. H. DJU- ANDA 20		
10	idem	2715	Djl. Kautamaan Is- tri 17		
11	idem				
12	Djl. Braga 14	4191			



GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000274860



